

BTN 5IAP

MENJADI PEMAIN UTAMA PROGRAM **SEJUTA RUMAH**








BTN 5IAP

Menjadi Pemain Utama Program Sejuta Rumah

Posisi Bank BTN di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh. Ditopang sejarah panjang di bidang tersebut, ditambah “Program 5 Siap”, maka Perseroan siap menjadi pemain utama program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. 5 Siap itu adalah Siap Sumber Daya Manusia (SDM), Siap Teknologi, Siap Proses Bisnis, Siap Pendanaan dan Siap Suplai Rumah. Dengan bekal itu, Bank BTN yakin akan terus dapat meningkatkan kinerjanya kini dan di masa mendatang.

ASET 
18,83%

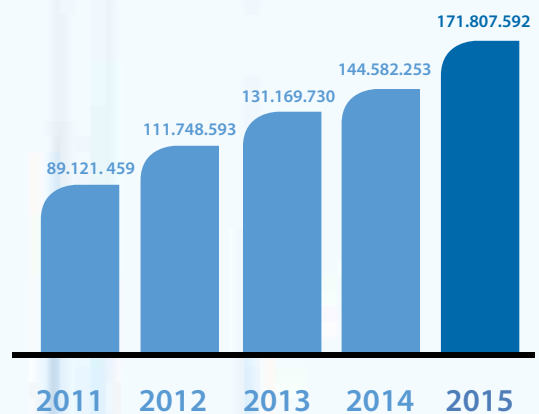
”

*The Most Improved
ASEAN Corporate
Governance Scorecard
2015 dengan predikat
EXCELLENT (>90)*

“

Kredit dan 
Pembiayaan
19,88%

Total Aset



Fokus, Inovasi dan *Operational Excellence* adalah kunci sukses BTN untuk bergerak menjadi yang terdepan dalam pembiayaan perumahan selama 65 tahun



Laba
Bersih 
61,57%

”

Kriteria Penilaian
Kinerja Unggul (KPKU)
Kementerian BUMN
dengan nilai 492 (*Good
Performance*)


“

Dana
Pihak Ketiga 
19,95%



Bank BTN SIAP untuk
mewujudkan Program
Sejuta Rumah dan ikut serta
mensejahterakan rakyat
Indonesia.



CAR 
16,97%

”

“Tingkat Kesehatan Bank
(*Risk Based Bank Rating*)
dengan Komposit 2”

“



NPL
3,42%

Sejak 2015 Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank pelaksana Program Sejuta Rumah untuk Rakyat. Hal ini tentu saja dikarenakan reputasi Bank BTN yang sangat baik dalam pembiayaan KPR. Pangsa pasar pembiayaan KPR subsidi Bank BTN sebesar 98%.



Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang memuaskan, di tengah lambatnya pertumbuhan industri perbankan



Program Sejuta Rumah

Penunjukan Bank BTN sebagai bank pelaksana
Program Sejuta Rumah

Bank BTN sebagai bank fokus perumahan memiliki *marketshare* KPR 30,6% dan *marketshare* KPR subsidi 98%

Pemerintah mencanangkan program Sejuta Rumah

Bank BTN telah membiayai KPR bagi masyarakat Indonesia sebanyak 3,5 juta unit

Terdapat *backlog* rumah nasional sebesar **15 juta** unit

Bank BTN sebagai pelopor penyaluran KPR sejak 1976

Ketersediaan rumah bagi masyarakat adalah amanat UUD 1945



Kesinambungan Tema

2011



Housing Finance and Beyond

Kesuksesan Bank BTN menjaga konsistensinya sebagai penyalur pembiayaan perumahan terdepan di Indonesia, telah pula membantu jutaan keluarga dalam mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah idaman. Demi menjaga konsistensi tersebut, Bank BTN tetap berfokus pada inti bisnisnya sejak 1976. Bank BTN juga senantiasa memperkuat fokusnya melalui berbagai produk dan layanan finansial pelengkap yang berkonsep *One Stop Service* untuk memenuhi berbagai kebutuhan perbankan keluarga Indonesia. Sepanjang tahun 2011, di tengah semakin agresifnya kompetisi dalam merebut pangsa pasar perumahan, Bank BTN tak hanya berhasil menjaga dominasinya, tetapi juga mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dari segi jumlah aset dan jumlah penyaluran kredit. Kinerja tersebut meyakinkan Perseroan bahwa peluang untuk tumbuh dan berkembang di masa depan, masih terbuka lebar.

2012



Dedicated to Indonesian Families

Rumah tidak hanya merupakan kebutuhan pokok (*human basic needs*) bagi keluarga Indonesia, namun lebih dari itu. Sektor properti memiliki peran yang penting bagi perekonomian nasional. Tak kurang dari 175 industri bergantung pada sektor ini. Banyak sekali tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga berdampak pada berkurangnya pengangguran.

2013



Transformasi yang didukung dengan implementasi Tata Kelola yang baik dalam Pencapaian Bisnis Berkualitas

Mengarungi tahun 2013, Bank BTN dalam proses menuju level selanjutnya melalui transformasi yang meliputi bidang bisnis, budaya, serta infrastruktur (*foundations*). Sesuai fokus dan visi Bank BTN untuk menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan, maka tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai dasar dalam membangun rumah Bank BTN. Seperti seseorang yang mendirikan rumah, maka orang itu akan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu yang kokoh, sehingga ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Dalam hal ini dasar yang kita bangun bersama melalui proses transformasi adalah implementasi tata kelola yang baik sehingga ketika datang guncangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, Bank BTN tidak dapat digoyahkan, bahkan mampu untuk terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai bisnis yang berkualitas secara berkelanjutan di tahun-tahun yang penuh tantangan ke depan menuju *World Class Banking*.

2014



BTN TERDEPAN, GCG RUMAHKOE

Menghadapi tahun 2015 yang sering disebut sebagai era ekonomi baru, era persaingan bebas ASEAN, Bank BTN meluncurkan *tagline* yang sekaligus menjadi budaya perusahaan yang baru yaitu BTN TERDEPAN, GCG RUMAHKOE. *Tagline* baru ini menunjukkan tekad Bank BTN yang besar untuk mewujudkan visi perusahaan "Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan" dengan berlandaskan pada *Good Corporate Governance*. *Tagline* baru ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi yang telah dijalani Bank BTN sejak tahun 2013 lalu, dimana Bank BTN menjadikan GCG sebagai panglima menuju keberhasilan perusahaan. Untuk itu, Manajemen Bank BTN berupaya untuk menjadikan *tagline* tersebut sebagai ruh operasional Bank BTN. BTN Terdepan juga menjadi perwujudan sikap dan tekad bahwa Bank BTN siap menghadapi era ekonomi baru, dan mempertahankan kepemimpinannya, khususnya di bidang pembiayaan perumahan.

Kesinambungan Tema

2015



“BTN 5IAP MENJADI PEMAIN UTAMA PROGRAM SEJUTA RUMAH”

Posisi Bank BTN di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh. Ditopang sejarah panjang di bidang tersebut, ditambah “Program 5 Siap”, maka Bank BTN siap menjadi pemain utama program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. 5 Siap itu adalah Siap Sumber Daya Manusia (SDM), Siap Teknologi, Siap Proses Bisnis, Siap Pendanaan dan Siap Suplai Rumah. Dengan bekal itu, Bank BTN yakin akan terus dapat meningkatkan kinerjanya kini dan di masa mendatang.

Daftar Isi

18	Milestone Perseroan
26	Kilas Kinerja
31	Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

36 Laporan Manajemen

38	Laporan Dewan Komisaris
48	Laporan Direksi
66	Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

68 Profil Perusahaan

70	Identitas Perusahaan
72	Riwayat Singkat
74	Brand Perusahaan
75	Bidang Usaha
76	Produk dan Jasa
88	Peta Wilayah Operasional
90	Struktur Organisasi Perusahaan
92	Visi dan Misi Perusahaan
93	Budaya Perusahaan
96	Profil Dewan Komisaris
102	Profil Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris
106	Profil Dewan Pengawas Syariah
108	Profil Direksi
114	Profil Pejabat di Bawah Direksi
115	Profil Pejabat Eksekutif
117	Profil Karyawan
119	Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
120	Penghargaan dan Sertifikasi
128	Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang

132 Informasi Bagi Investor

135	Ikhtisar Saham
136	Ikhtisar dan Kronologis

137	Ikhtisar <i>Negotiable Certificate Of Deposit</i> (NCD) Telah Jatuh Tempo
138	Kronologis Pencatatan Saham
139	Pencatatan Saham Perdana (<i>Initial Public Offering</i> /IPO)
139	Penawaran Umum Terbatas I (<i>Rights Issue</i>)
140	Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen
142	Komposisi Pemegang Saham
146	Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham Perseroan
148	Kebijakan Dividen
149	Kegiatan <i>Investor Relation</i> Tahun 2015

150 Analisis dan Pembahasan Manajemen

153	Tinjauan Industri
153	• Perekonomian Dunia
153	• Perekonomian Indonesia
154	• Kondisi Industri Perbankan
155	Tinjauan Operasional
156	• Kinerja Operasional
158	• Kinerja Operasional Per Produk dan Layanan
158	• Perbankan konsumen
163	• Perbankan Komersial
165	• Giro
166	• Deposito Berjangka Lembaga
166	• Unit Usaha Syariah
169	• Tabungan
170	• Deposito
170	• Jasa dan Layanan Perbankan
171	• Kartu Konsumer
171	• Wealth Management
172	• <i>Electronic – Channel</i>
173	• Kinerja Segmen

Daftar Isi

174	• Aspek Pemasaran	265	• Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
176	• Pangsa Pasar	266	• Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang dan Modal
177	• Prospek Usaha 2016	267	• Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi
179	• Strategi Pengembangan Usaha	270	• Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Bank
182	Tinjauan Keuangan	276	• Perubahan Kebijakan Akuntansi
182	• Laporan Posisi Keuangan	277	• Informasi Kelangsungan Usaha
184	• Liabilitas	278 Sumber Daya Manusia	
184	• Liabilitas Non Keuangan	278	Sumber Daya Manusia Perusahaan
186	• Ekuitas	280	• <i>People Transformation</i>
186	• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	283	• Internalisasi Budaya Perusahaan
192	• Laporan Arus Kas	284	Manajemen Sdm
194	• Rasio Keuangan	284	• <i>Organization Development</i>
194	• Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang	284	• <i>Human Capital Acquisition</i>
196	• Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko	285	• <i>Learning and Development</i>
198	• Dasar Penetapan Manajemen Risiko	286	• Pelaksanaan dan Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2015
236	• Risiko Likuiditas	300	• <i>Human Capital Engagement</i>
244	• Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	300	• <i>Performance Management</i>
245	• Investasi Barang Modal	302	• <i>Human Capital Information System</i>
245	• Komitmen dan Kontinjensi	302	• <i>Human Capital Reward</i>
246	• Dampak Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank	303	• <i>Career Management</i>
246	• Akselerasi Pertumbuhan <i>Fee Based Income</i>	304	• <i>Industrial Relation</i>
246	• Perbandingan Target dan Realisasi	305	• <i>Organisasi Pengelola Human Capital</i>
246	• Proyeksi	305	• Profil Ringkas Kepala <i>Human Capital Division</i>
252	• Informasi Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan		
252	• Kebijakan Dividen		
252	• Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/Atau Karyawan		

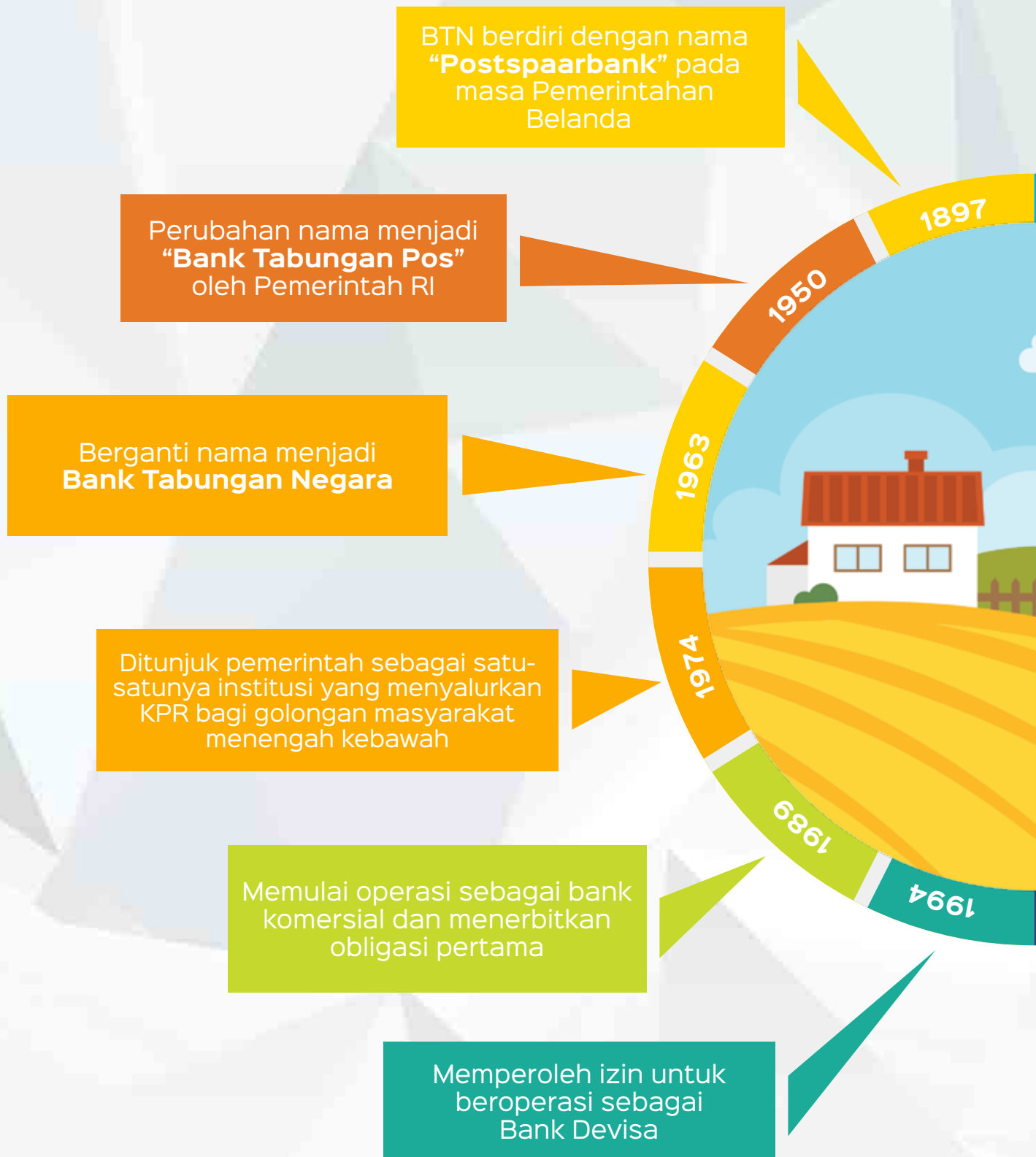
Daftar Isi

306	• Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas <i>Human Capital Division</i>	448	• Sekretaris Dewan Komisaris
307	Profil Karyawan	449	• Komite Audit
308	• Komposisi Jumlah Karyawan Tetap (Pegawai Tetap) Berdasarkan Level Organisasi	458	• Komite Remunerasi dan Nominasi
309	• Komposisi Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan	473	• Sekretaris Perusahaan
309	• Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	481	• Komite Di Bawah Direksi
310	• Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	481	• Komite Manajemen Risiko
311	• Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	483	• Komite Kebijakan Perkreditan
311	• Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Unit Kerja	485	• Komite Pengarah Teknologi Informasi
312	• Biaya Tenaga Kerja	486	• Komite Personalia
313	• Tingkat <i>Turnover</i> Karyawan	488	• Komite Produk
314	Tata Kelola Perusahaan	489	Unit Audit Internal
316	<i>Good Corporate Governance</i>	510	Kebijakan Akuntansi
320	• Paradigma GCG Bank BTN	511	Fungsi Manajemen Risiko
321	• Arti Penting GCG Bagi Bank BTN	535	Sistem Pengendalian Intern
322	• Standar Kualitas Penerapan GCG (<i>Code Of GCG</i>) Bank BTN	548	Program Anti Pencucian Uang (Apu) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
324	• Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Ojk	564	Permasalahan Hukum
338	• <i>GCG Assessment</i>	566	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
339	• <i>Self Assessment</i> Sesuai Ketentuan Bi/Ojk	566	Transaksi Dengan Pihak Berelasi
342	• Struktur dan Mekanisme GCG	567	<i>Buy Back Share dan Buy Back Obligasi</i>
345	• Rapat Umum Pemegang Saham	568	<i>Share Option</i>
369	• Dewan Komisaris	570	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
406	• Direksi	571	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/ Atau Politik
448	Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris	573	<i>Information Technology Governance</i>
		576	Akses Informasi
		602	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

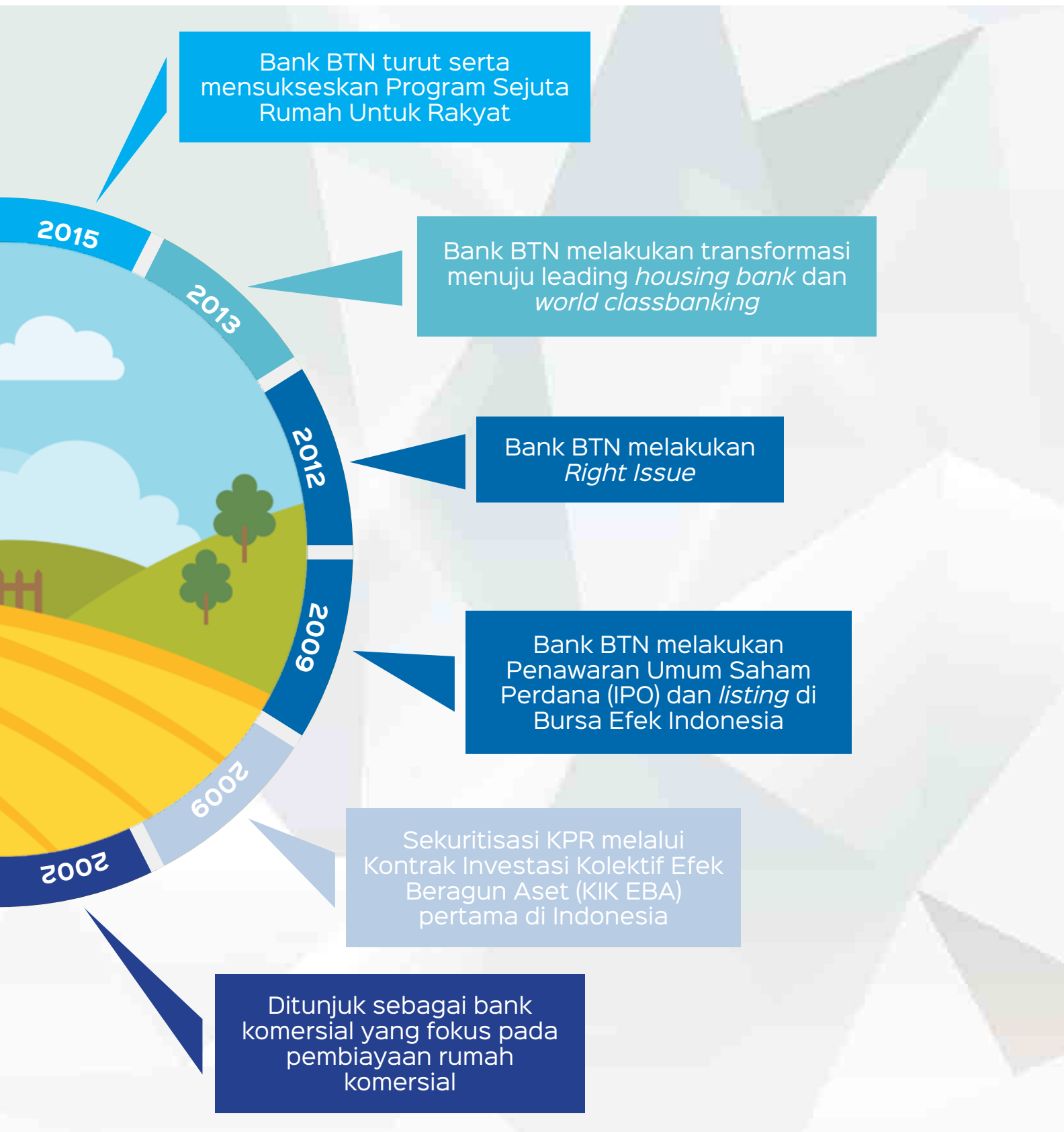
Daftar Isi

603	Perlakuan Yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham	628	• Kebijakan
604	Kontribusi Bagi Negara	628	• Kegiatan CSR Terkait Ketenagakerjaan Tahun 2015
605	Rencana Strategis	629	• Kesehatan dan Keselamatan Kerja
616	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	631	Tanggung Jawab Sosial dan Masyarakat
618	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	631	• Kebijakan
618	• <i>Highlight</i>	631	• Kegiatan CSR Terkait Pengembangan Sosial dan Masyarakat 2015
618	• Semangat Menaungi, Berbakti Pada Negeri	632	• Biaya Yang Dikeluarkan
619	• Kaleidoskop CSR Bank BTN 2015	638	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah
621	Kebijakan dan Pelaksanaan CSR Bank BTN	638	• Kebijakan
621	• Kebijakan CSR	638	• Kegiatan Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah
621	• Visi dan Misi CSR	638	• Kerahasiaan Nasabah
621	• Bidang Kegiatan CSR		
623	• Pelaksanaan Program CSR	644	Laporan Keuangan Konsolidasi 2015
625	Anggaran CSR	648	Laporan Auditor Independen
626	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup	651	Laporan Posisi Keuangan
626	• Kebijakan	656	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
626	• Pelaksanaan Kegiatan 2015 Terkait Dengan Lingkungan Hidup	658	Laporan Perubahan Ekuitas
627	• Sertifikasi	660	Laporan Arus Kas
628	Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	663	Catatan Atas laporan keuangan

Milestone Perseroan

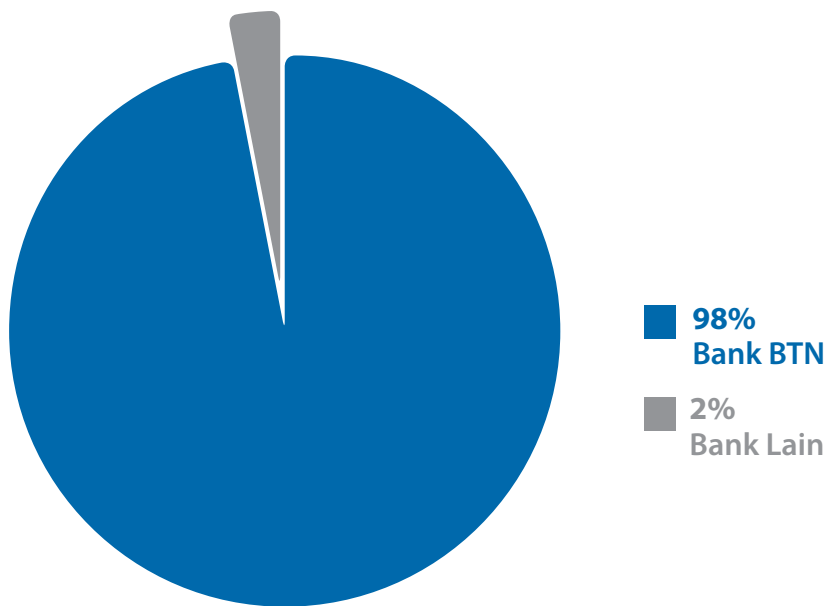


Milestone Perseroan



KPR *Supremacy*

Bank BTN dominan dalam penguasaan pasar pembiayaan perumahan nasional. Hingga saat ini Bank BTN telah memberikan pembiayaan KPR sebesar Rp124,93 triliun, atau sebesar 89,90% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BTN. Penguasaan bisnis perumahan mencapai 30,6% ditahun 2015 dan terbesar di antara perbankan nasional. Sejak 2015 Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank pelaksana Program Sejuta Rumah untuk Rakyat. Hal ini tentu saja dikarenakan reputasi Bank BTN yang sangat baik dalam pembiayaan KPR. Pangsa pasar pembiayaan KPR subsidi Bank BTN sebesar 98%.



Mortgages Industry Integrator

Memiliki relationships yang kuat dengan para stakeholders bisnis perumahan yang memungkinkan Bank BTN menjadi integrator sisi supply dan sisi demand bisnis perumahan. Bank BTN telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 3.000 pengembang perumahan seluruh Indonesia untuk membiayai lebih dari 600.000 unit KPR di tahun 2015. Sedangkan dari sisi demand, Bank BTN aktif menggelar pameran perumahan yang merupakan rangkaian dari strategis korporasi dalam menjaring masyarakat yang ingin membeli rumah dengan skim KPR sekaligus dalam rangka pemenuhan program Sejuta Rumah. Upaya lain yang telah dilakukan Bank BTN untuk meningkatkan demand adalah dengan pelaksanaan program akad kredit secara massal, antara lain telah dilaksanakan program akad 6.600 KPR dalam sehari, Program akad 1.000 KPR dalam sehari dan memfasilitasi KPR dengan DP 1%.

Easily Accessible Services

Bank BTN menyediakan kemudahan akses dalam jasa/layanan bisnis perumahan bagi masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas **Teknologi Informasi** melalui sistem aplikasi kredit yang terintegrasi. Bank BTN juga sudah melakukan **percepatan pelayanan dan proses kredit** secara fokus, baik untuk KPR subsidi maupun KPR non subsidi. Termasuk dalam hal ini menambah jaringan pelayanan dan proses kredit melalui kantor layanan Bank BTN di daerah-daerah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana-dana berbiaya murah dan *fee-based income*, serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia, pada tahun 2015 Bank BTN melaksanakan beberapa inisiatif di bidang digital dan *branchless banking*. Beberapa produk dan layanan baru *digital banking* yang dikembangkan adalah *e-banking*, yang terdiri dari *cash management*, *EDC purchase/payment*, portal *BTN property*, *eMoney* dan *vending machine* untuk pembelian tiket KAI.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi, Bank BTN telah menyiapkan program *eForm* dan *push teller transaction*, dan telah membuka beberapa *digital outlet*. Bank BTN juga berpartisipasi dalam program pemerintah LAKU PANDAI. Komitmen Bank BTN untuk mendukung inklusi keuangan ini telah dimulai pada tahun 2010, dengan meluncurkan Tabungan BTN Cermat.

Pengembangan produk Tabungan BTN Cermat kemudian diperluas, melalui peluncuran Tabungan BTN Cermat yang didukung mesin *Electronic Data Captured* atau EDC. Layanan Tabungan BTN Cermat kemudian diperluas dengan teknologi berbasis Ponsel atau *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD). Dengan layanan USSD ini, masyarakat dapat melakukan transaksi Tabungan BTN Cermat melalui komunikasi dari telepon seluler pengguna.

World Class Service Level

Bank BTN memiliki standar layanan kelas dunia baik dari sisi *operational excellence* (kecepatan dan ketepatan proses KPR), ragam jaringan dan produk yang didukung oleh teknologi informasi yang handal. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya berbagai macam penghargaan terkait dengan *service excellence*. Penghargaan tersebut adalah sebagai Brand KPR oleh Infobank tanggal 26 Maret 2015, Bank Kategori Berkinerja Terbaik oleh Infobank dan MRI tanggal 21 Mei 2015, *4th Best Overall Performance* Bank BTN Syariah oleh Infobank dan MRI tanggal 4 Juni 2015, *3rd Best Phone* Bank BTN Syariah oleh Infobank dan MRI tanggal 4 Juni 2015 serta berbagai penghargaan lain terkait dengan kinerja Bank dan kualitas pelayanan lainnya.

Housing Finance Expertise

Bank BTN memiliki SDM yang ahli di bidang pembiayaan perumahan. Bank BTN sebagai pelopor pembiayaan perumahan sejak tahun 1976 dan telah membiayai KPR bagi rakyat Indonesia lebih dari 3,5 juta unit rumah. dan pada tahun 2015 ini Bank BTN telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat.

Roadmap Transformasi

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas sebagai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia yang disebut dengan "NAWA CITA". Agenda tersebut yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari agenda prioritas tersebut, Kementerian BUMN membuat *roadmap* yang selaras dengan Agenda "NAWA CITA" tersebut pada agenda ke -7 yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Sektor strategis tersebut terdiri dari sektor Ekonomi Kerakyatan serta sektor Perbankan dan Jasa Keuangan.

Berikut adalah inisiatif di sektor Perbankan dan Jasa yang terkait bank, salah satunya yaitu Bank BTN :

1. *INITIATIVE CHARTER* : Dukungan pembiayaan untuk mendukung Infrastruktur dan konektivitas.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur dan konektivitas

WORKSTREAMS UTAMA :

- Membentuk task force di bawah kementerian BUMN yang akan mengintegrasikan rencana pembiayaan dan mengawasi pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur BUMN.
- Menyusun *roadmap* pembiayaan infrastruktur BUMN yang terdiri dari:
 - Melakukan identifikasi proyek strategis BUMN per tahun dari 2015 s.d. 2019
 - Melakukan identifikasi kapasitas *self-financing* BUMN *project owner*, kontraktor
 - Menetapkan struktur pembiayaan untuk setiap proyek yang telah diidentifikasi :
 - Pembiayaan melalui perbankan dapat dilakukan dengan skema *joint-financing*, sindikasi
 - Pembiayaan *long term* USD melalui infrastructure fund pooling.

Peran serta Bank BTN pada inisiatif ini yaitu dengan ikut mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk rakyat yang dapat membantu

Roadmap Transformasi

- mengatasi backlog rumah untuk masyarakat Indonesia.
2. **INITIATIVE CHARTER** : Mendorong Kemandirian keuangan melalui Inklusi Finansial
Tujuan Meningkatkan akses keuangan formal kepada masyarakat

WORKSTREAMS UTAMA :

- Melakukan pemetaan jaringan kantor cabang bank dan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat akses layanan keuangan/perbankan rendah.
- Memberikan kemudahan akses keuangan/perbankan melalui mekanisme *agent banking (branchless banking)* dimana bank tidak perlu membuka jaringan kantor cabang untuk melayani masyarakat khususnya di daerah *remote*.
- Sinergi antara operator telekomunikasi dengan lembaga keuangan/bank khususnya dalam pemanfaatan teknologi *mobile phone*.
 - Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti USSD atau SMS dengan biaya yang relatif murah/terjangkau.
- Penerapan kebijakan/peraturan terkait penyaluran dana bantuan/subsidi Pemerintah (G2P) melalui elektronik (*noncash*) untuk mendorong percepatan pemanfaatan layanan perbankan.
- Pemberlakuan *unique Financial ID Number* khususnya bagi penerima bantuan/subsidi Pemerintah.
- Sinergi penjualan produk asuransi di agen bank.

Peran serta Bank BTN pada insiatif ini yaitu dengan meluncurkan produk Laku Pandai dari Tabungan BTN Cermat sebagai wujud peningkatan akses keuangan formal kepada masyarakat.

3. **INITIATIVE CHARTER** : Meningkatkan daya saing dan efisiensi melalui Sinergi ATM dan EDC
Tujuan Efisiensi pengelolaan ATM dan EDC Bank-bank BUMN

WORKSTREAMS UTAMA :

- Mengintegrasikan pengelolaan ATM dan EDC dalam satu kendali di bawah Bank-bank BUMN.
- Menyiapkan infrastruktur pengelolaan ATM dan EDC Bank-bank BUMN.
 - Akuisisi perusahaan pengelola layanan ATM dan EDC independen sebagai embrio bagi pengelolaan ATM dan EDC Bank-bank BUMN.
 - Menyiapkan *roadmap* integrasi ATM dan *deployment* EDC BUMN secara bertahap dalam 5 (lima) tahun ke depan.
 - Memperkuat posisi pengelola ATM dan EDC Bank-bank BUMN sebagai cikal bakal *National Payment Scheme*.
- Memperkuat daya saing Bank-bank BUMN melalui pengelolaan ATM dan EDC secara lebih efisien dan kuat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- Memperluas cakupan ATM dan EDC Bank-bank Himbara secara nasional sekaligus memperkuat akses perbankan masyarakat.

Peran serta Bank BTN pada insiatif ini yaitu dengan bekerjasama dengan Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) dalam meluncurkan ATM Merah Putih.

4. **INITIATIVE CHARTER** : Konsolidasi Perbankan Syariah
Tujuan Penguatan Perbankan Syariah BUMN melalui konsolidasi

WORKSTREAMS UTAMA :

- **Timeline pra konsolidasi**
 - Pembentukan tim konsolidasi
 - Penunjukkan konsultan independen
 - Analisis aspek legal
 - Analisis struktur konsolidasi dan struktur transaksi
 - Identifikasi *stakeholder* dan implementasi *stakeholder management*

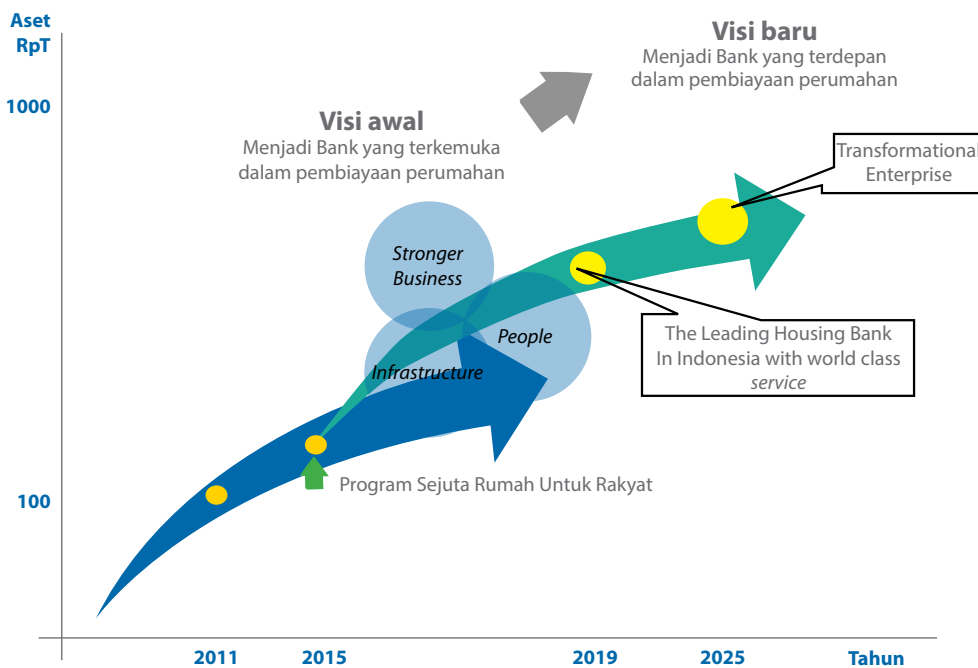
Roadmap Transformasi

- **Timeline paska konsolidasi**

- Pembentukan tim paska konsolidasi
- Implementasi *business* dan *process model*
- Penyelarasan infrastruktur, organisasi dan SDM
- Penyelarasan budaya perusahaan dan komunikasi

Peran serta Bank BTN pada insiatif ini yaitu mendukung *roadmap* pengembangan perbankan syariah secara Nasional sebagai wujud penguatan perbankan syariah.

Bank BTN sendiri telah menetapkan target jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yaitu menuju *Transformational Enterprise-Global Mindset* dengan target menjadi perusahaan global di bidang perumahan, *property* dan infrastruktur dasar. Untuk mencapai rencana tersebut, Bank BTN telah melakukan transformasi sejak tahun 2013 dan dibagi ke dalam tiga tahapan.



Tahap I

Tahun 2013 – 2015 yaitu tahap *survival period*, dengan tahapan yang dicapai adalah *domination nation wide market leader* yaitu menguasai bisnis perumahan nasional. Persyaratan yang diperlukan dalam tahapan ini adalah (a) mendominasi *market share* atas pasar perumahan, (b) *protected market*, (c) *predictable change*, dan (d) *financial capital driven*.

Tahap II

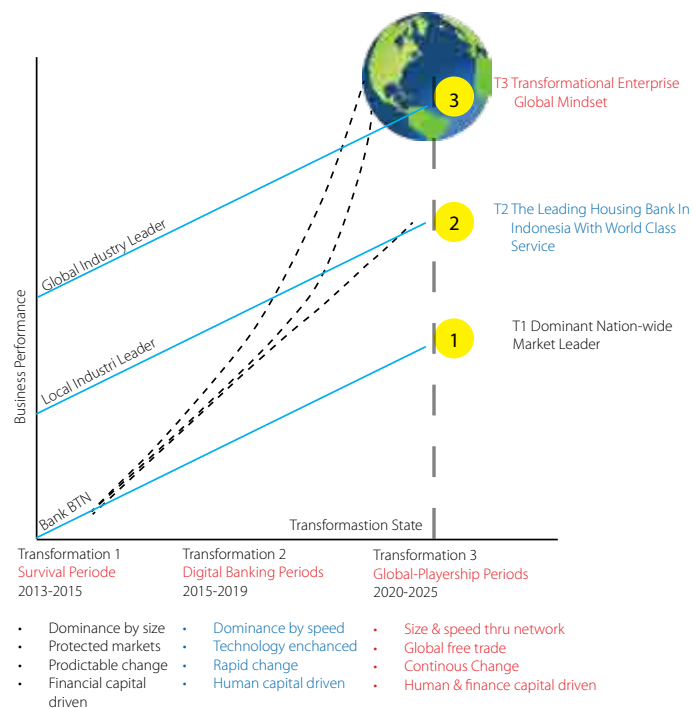
Tahun 2016 – 2019 yaitu tahap *digital banking period*, dengan tahapan yang akan dicapai adalah *the leading housing bank Indonesia with world class service*. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahapan ini adalah: (a) *dominance by speed*, (b) *technology enhance*, (c) *rapid change* dan (d) *human capital driven*.

Roadmap Transformasi

Tahap III

Tahun 2020 – 2025 yaitu tahap global *playership period*, dengan tahapan yang akan dicapai adalah *transformational Enterprise Global Mindset*. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahap ini adalah: (a) *size and speed thru network*, (b) *global free trade*, (c) *continuous change* dan (d) *human and financial driven*.

Berikut gambar tahapan transformasi Bank BTN dalam jangka panjang yang dimulai dari tahun 2013 – 2025 adalah:



Saat ini transformasi tahap I sedang dalam proses akhir, sehingga persyaratan menuju transformasi tahap 2 telah dipenuhi antara lain penguasaan bisnis perumahan mencapai lebih dari 30,6% ditahun 2015 dan terbesar di antara perbankan nasional, menguasai pasar KPR subsidi 98%, perbaikan bisnis dan penguatan modal. Untuk itu, Bank BTN perlu melakukan lompatan dalam *roadmap* transformasi dengan fokus pada penguatan bisnis (*stronger business*).

Penguatan bisnis dalam transformasi Bank BTN adalah:

- Penguatan bidang kredit
- Penguatan bidang dana
- Penguatan bidang infrastruktur
- Penguatan bidang SDM

Kilas Kinerja

Ikhtisar Keuangan

(dalam milliar Rupiah)

	2015	2014	2013	2012	2011
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya					
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	14.966	12.807	10.783	8.819	7.556
Beban Bunga dan Bonus	(8.155)	(7.343)	(5.130)	(4.092)	(3.770)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	6.811	5.465	5.653	4.727	3.786
Pendapatan Operasional Lainnya	1.107	895	764	571	512
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non Keuangan	(901)	(771)	(430)	(213)	(110)
Pembalikan (Beban) Estimasi Penyisihan Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi	7	(1)	(2)	(1)	58
Beban Operasional Lainnya	(4.490)	(4.010)	(3.849)	(3.214)	(2.720)
Laba Operasional	2.534	1.577	2.136	1.871	1.526
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	8	2	5	(8)	(3)
Laba Sebelum Beban Pajak	2.542	1.579	2.141	1.863	1.522
Beban Pajak	(691)	(434)	(579)	(499)	(403)
Laba Tahun Berjalan	1.851	1.146	1.562	1.364	1.119
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan-Setelah Pajak	1.811	1.121	1.443	1.358	1.026
Laba per Saham (Nilai Penuh)	175	108	148	148	123
Laporan Posisi Keuangan					
Aktiva Produktif	149.519	130.695	113.470	90.671	71.926
Kredit yang Diberikan	127.732	106.271	92.386	75.411	59.338
Pembiayaan/Piutang Syariah	11.224	9.645	8.081	6.000	4.226
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7.839	1.496	4.839	11.472	9.781
Efek-Efek	1.820	5.466	4.202	1.023	739
Obligasi Pemerintah	8.231	8.238	8.385	7.469	7.107
Total Aset	171.808	144.582	131.170	111.749	89.121
Simpanan dari Nasabah	127.709	106.471	96.208	80.668	61.970
Giro	31.368	23.423	19.116	13.271	13.150
Tabungan	30.758	26.168	24.238	21.540	14.816
Deposito Berjangka	65.583	56.880	52.854	45.856	34.004
Simpanan dari Bank Lain	1.721	1.179	275	707	793
Efek-Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	2.135	3.818	2.653	2.335	4.450
Surat Berharga yang Diterbitkan	12.492	8.520	8.837	7.137	5.438
Pinjaman yang Diterima	7.727	6.988	7.073	6.737	5.695

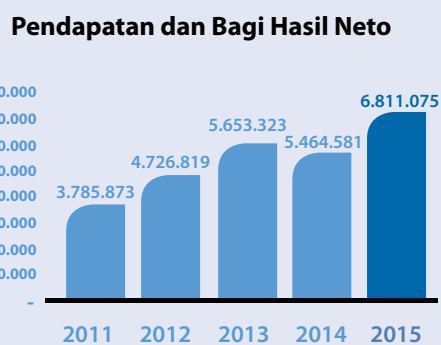
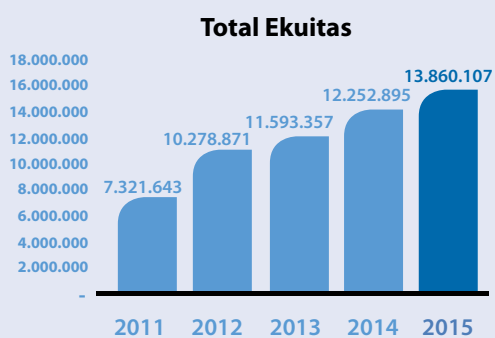
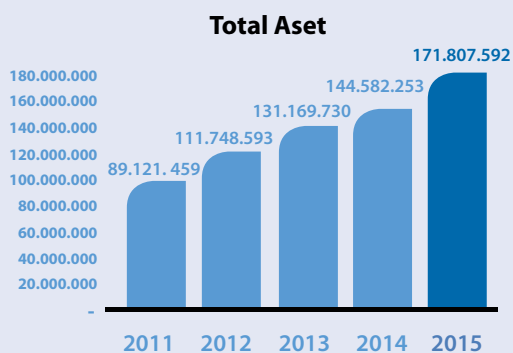
Kilas Kinerja

	2015	2014	2013	2012	2011
Total Liabilitas	157.947	132.329	119.613	101.470	81.800
Ekuitas	13.860	12.253	11.557	10.279	7.322
Rasio Keuangan					
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,97%	14,64%	15,62%	17,69%	15,03%
<i>Non Performing Loans (NPL) - Gross</i>	3,42%	4,01%	4,05%	4,09%	2,75%
<i>Non Performing Loans (NPL) - Net</i>	2,11%	2,76%	3,04%	3,12%	2,23%
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,61%	1,14%	1,79%	1,94%	2,03%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	16,84%	10,95%	16,05%	18,23%	17,65%
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	4,87%	4,47%	5,44%	5,83%	5,76%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,83%	88,97%	82,19%	80,74%	81,75%
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	108,78%	108,86%	104,42%	100,90%	102,5%
Kepatuhan (Compliance)					
Persentase pelanggaran BMPK					
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK					
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM Utama Rupiah					
Konvensional	7,95%	8,09%	9,29%	8,15%	8,20%
Syariah	5,04%	5,09%	8,10%	8,00%	6,50%
GWM Valuta Asing	8,08%	8,39%	8,03%	8,03%	8,02%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,74%	1,92%	1,01%	0,70%	1,73%
Lainnya					
Jumlah Karyawan	9.042	8.582	8.011	7.142	6.337
Jumlah ATM	1.830	1.830	1.504	1.404	1.180
Jumlah Kantor	821	820	820	756	640

Keterangan:

1. Bank BTN tidak memiliki investasi pada entitas asosiasi.
2. Bank BTN tidak memiliki anak perusahaan sehingga laba dan penghasilan komprehensif lain tidak dikelompokkan kedalam diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pendangali.

Kilas Kinerja



Kilas Kinerja

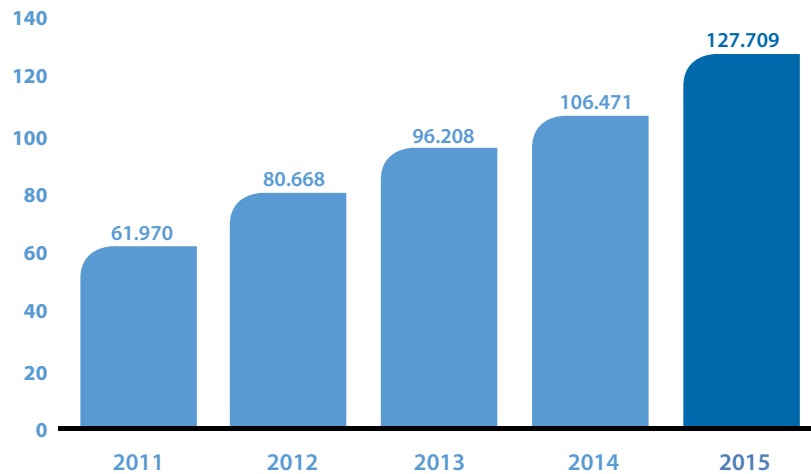
Tabel Ikhtisar Operasional

(dalam miliar Rupiah)

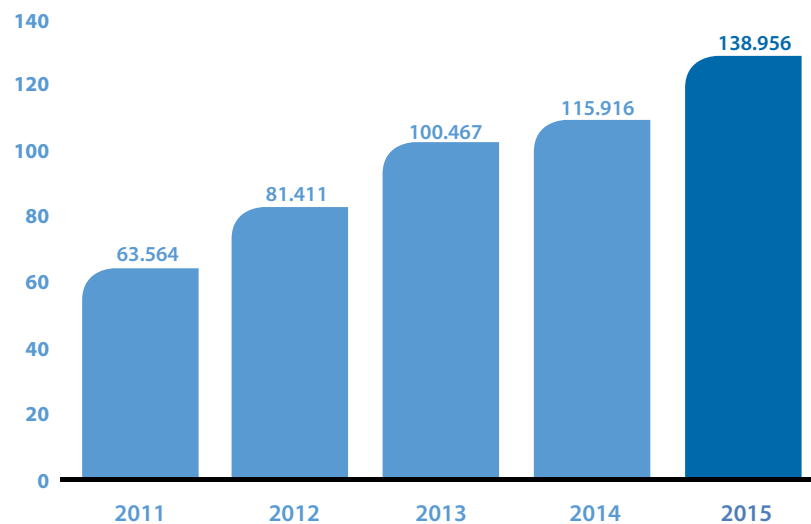
Produk	2015	2014	2013	2012	2011
Produk Simpanan					
Tabungan	31.368	23.423	19.116	13.271	13.150
Giro	30.758	26.168	24.238	21.540	14.816
Deposito Berjangka	65.583	56.880	52.854	45.856	34.005
Total	127.709	106.471	96.208	80.668	61.970
Produk Kredit					
(dalam juta Rupiah)					
Kredit Perumahan	124.927	102.614	87.005	70.223	55.805
Kredit Non-Perumahan	14.029	13.302	13.463	11.187	7.759
Total	138.956	115.916	100.467	81.411	63.564
<i>Fee Based Income</i>	1.121	917	665	517	513

*sudah termasuk simpanan, pembiayaan, dan *fee based income* syariah

Grafik Perkembangan Produk Simpanan 2011-2015

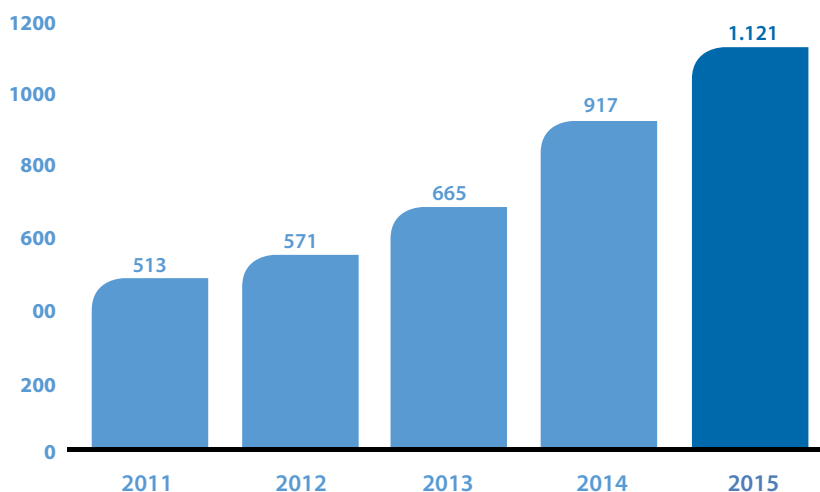


Grafik Perkembangan Produk Kredit 2011-2015



Kilas Kinerja




Grafik Perkembangan Fee Based Income 2011-2015



Fasilitas ATM dan Mobil Kas Keliling

Jenis Fasilitas	2015	2014	(+/-)
ATM	1.830	1.830	-
Mobil Kas Keliling	10	10	

Rating

Rating Agency	Rating Category	Current Rating	Outlook
	Corporate Rating Bonds	idAA idAA	Stable
	National Long term Bonds	AA (idn) AA (idn)	Stable
	Bank Deposits - domestic currency Bank Financial Strength Baseline Credit Assesment	Baa3/P-3 D Ba2	Stable

Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

9 Februari 2015



BTN LUNCURKAN PORTAL PROPERTI

Portal BTN Properti adalah inovasi baru yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui portal ini Bank BTN menjawab apa yang diperlukan masyarakat tentang kebutuhan rumah. Fitur-fitur seperti konsultasi KPR, simulasi KPR, edukasi masyarakat, *customer service chat*, berita seputar properti dan informasi terkini tersedia dalam portal BTN properti. Proses aplikasi kredit dapat dipantau secara *online* melalui portal BTN properti dengan www.btnproperti.co.id

BTN LUNCURKAN KARTU ATM SUKA-SUKA

Bank BTN meluncurkan Kartu ATM Suka-Suka bagi para nasabahnya. Peluncuran kartu ini merupakan bentuk apresiasi Bank BTN kepada nasabah yang ingin memasang foto favoritnya di kartu ATM. Ini merupakan layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah yang dapat berfoto sendiri atau bersama rekan/keluarganya untuk dicetak di kartu ATM. Bank BTN ingin memberikan sentuhan beda pada produk layanan Bank BTN yang bertujuan untuk mengapresiasi kebutuhan pasar di Indonesia.

14 Maret 2015



5 April 2015



PEDULI BANJIR BANK BTN TANAM POHON 6,5 KM

Penanaman pohon sepanjang 6,5 KM ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Ke-65 Bank BTN. Lokasi penanaman pohon melanjutkan dari program penghijauan yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN pada akhir tahun 2014. Program penghijauan ini merupakan program berkelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh BUMN di lokasi ini.

MENDUKUNG PROGRAM LAKU PANDAI, BTN KUKUHKAN TABUNGAN BTN CERMAT

Produk Tabungan BTN Cermat (Mencerdaskan Masyarakat) diharapkan dapat memberikan layanan perbankan kepada masyarakat di pelosok daerah, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan perbankan. Tabungan ini, merupakan wujud komitmen Bank BTN dalam mendukung program Laku Pandai yang dicanangkan oleh OJK.

25 Mei 2015



Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

BANK BTN TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TAHAP I RP3 TRILIUN

Bank BTN melaksanakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 ("Obligasi") dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3 triliun. Adapun dana hasil obligasi ini akan dipergunakan perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam mensukseskan program sejuta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

10 Juni 2015



12 Juli 2015



BUMN BERANGKATKAN 75.000 LEBIH PEMUDIK DENGAN BANK BTN SEBAGAI KORDINATOR SELURUH BUMN.

Tercatat lebih dari 75.000 peserta mudik diberikan fasilitas mudik gratis bersama BUMN pulang ke kampung halamannya pada tahun 2015. Fasilitas mudik gratis ini diberikan oleh 16 BUMN yang berkoordinasi dibawah kementerian BUMN. Bank BTN bertindak sebagai *host* dalam penyelenggaraan mudik bareng BUMN tahun 2015.

BUMN HADIR UNTUK PAPUA

Bank BTN sangat peduli dan senang hati mendapatkan peran untuk mengkoordinasi kegiatan HUT ke-70 RI di wilayah Papua. Dengan penunjukan Menteri BUMN kepada Bank BTN dan Re-Indonesia selaku koordinator kegiatan HUT tersebut, maka seluruh kegiatan BUMN yang ada di wilayah Papua akan dikoordinasikan menjadi satu dan fokus kepada perayaan HUT ke-70 RI BUMN Hadir Untuk Negeri di wilayah Papua dari tanggal 15 – 23 Agustus 2015.

13 Agustus 2015



17 Agustus 2015



HUT RI KE-70 BTN BEDAH RUMAH 45 VETERAN DI PAPUA

Sejalan dengan core business Bank BTN, dilaksanakan bantuan 'bedah rumah' untuk anggota veteran di wilayah Papua. Pada kesempatan ini Bank BTN memberikan bantuan untuk melakukan bedah rumah bagi 45 veteran dengan total bantuan mencapai Rp900 Juta

Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

24 Agustus 2015



BTN PROPERTY EXPO CATAT TRANSAKSI LEBIH RP1,5 TRILIUN

Target Rp1,5 triliun akhirnya terlampaui setelah sesi penutupan BTN Property Expo 2015 ditutup dengan total transaksi selama pameran berlangsung mencapai hampir Rp1,6 triliun

BANK BTN SIAPKAN KREDIT BAGI 10.000 TKI UNTUK PUNYA RUMAH

Bank BTN akan membuka kran KPR untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri untuk memiliki rumah di Indonesia. Dengan dukungan fasilitas KPR yang disiapkan khusus untuk para TKI itu, maka terbuka peluang uang mengalir di dalam negeri. TKI sebagai sumber devisa negara akan membelanjakan uangnya di dalam negeri. Peluangnya sangat besar untuk para TKI ini membeli rumah dengan fasilitas KPR. Bukan TKI saja, tetapi calon TKI dan keluarga para TKI pun dapat memanfaatkan fasilitas KPR untuk pembelian atau renovasi rumah dengan jaminan penghasilan para TKI tersebut.

29 Agustus 2015



31 Agustus 2015



DUKUNG E-TOL NASIONAL BANK BTN LUNCURKAN KARTU PREPAID

Bank BTN terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada para nasabahnya dengan meluncurkan kartu *prepaid*. Pembayaran tol melalui *eTol* selama ini telah banyak membantu masyarakat untuk menghemat waktu tanpa harus melalui antrian panjang karena banyaknya jumlah kendaraan yang akan keluar melakukan pembayaran di pintu tol.

PROGRAM SERBA UNTUNG DARI TABUNGAN BTN BATARA DILUNCURKAN

Bank BTN meluncurkan program undian SERBU (serba untung) dari Tabungan BTN Batara. Program undian serbu ini merupakan kelanjutan dari program undian yang sudah ada sebelumnya. Setelah sebelumnya sukses dengan program undian Homebastis, BTN optimis program baru yang didapuk nama SERBU ini akan menuai sukses di pasar.

3 September 2015



Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

UNTUK AKURASI DATA NASABAH BANK BTN RANGKUL KEMENDAGRI

Langkah awal yang dibangun oleh Bank BTN bersama Kemendagri terkait dengan system yang menyangkut identitas nasabah. Nantinya akan dikembangkan kerjasama lanjutan bersama Kemendagri tentang banyak hal terkait bisnis Bank BTN. Kerjasama ini mempunyai nilai strategis bagi pengembangan bisnis kedua belah pihak. Bisnis perbankan yang dimiliki oleh Bank BTN dengan dukungan jaringan layanan yang luas, sumber daya yang kompeten disamping dukungan IT modern dapat dimanfaatkan untuk keperluan Kemendagri.

7 September 2015



14 September 2015



BANK BTN MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN KEMENDESA

Karena target dan peluang bisnis pembiayaan perumahan, Bank BTN saat ini menysar ke berbagai instansi pemerintah dan swasta. Bersama Kemendes, Bank BTN menggali kerjasama jasa layanan perbankan, termasuk didalamnya pemberian fasilitas kredit perumahan kepada pegawai di lingkungan Kemendes.

BANK BTN DAPAT PINJAMAN BILATERAL DARI ICBC BANK

PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama dengan Bank BTN dalam pembiayaan perumahan. ICBC akan memberikan pinjaman bilateral kepada Bank BTN dengan total pinjaman mencapai RMB 5 miliar, atau setara dengan Rp10 triliun. Kerjasama ini ditujukan untuk mendukung infrastruktur dan pembangunan perumahan di Indonesia.

16 September 2015



12 Juli 2015



PERCEPAT SEJUTA RUMAH AKAD KREDIT 1.000 UNIT SEHARI

BTN menggagas gerakan ini sebagai inisiatif bisnis dan layanan perseroan kepada para mitra dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Permintaan rumah masih sangat tinggi untuk kelas menengah bawah. Pengembang dapat membangun rumah dan Bank BTN dapat menyalurkan KPR. Sekaligus dengan ini akan mengurangi backlog pemenuhan kebutuhan rumah dalam negeri.

Peristiwa Penting Selama Tahun 2015

27 OKTOBER 2015

KERJASAMA BANK BTN-BPJS TK DUKUNG SEJUTA RUMAH

Untuk memberikan komitmen atas terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk kebutuhan rumah bagi para pekerja, Bank BTN melakukan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dalam penyediaan rumah bagi pekerja. Kerjasama ini merupakan sinergi 2 BUMN dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Sejuta Rumah sekaligus menjawab kebutuhan rumah bagi para pekerja di dalam negeri.



25 NOVEMBER 2015



BANK BTN AKAD KREDIT 6.600 KPR DALAM SEHARI

Bank BTN melaksanakan proses akad kredit kepada 6.600 debitur dalam sehari. Ini sekaligus menjawab Bank BTN dalam kondisi pendanaan yang sangat aman dan sangat siap dalam mendukung program Sejuta Rumah. Bank BTN siap menjadi motor penggerak dalam program Sejuta Rumah. Meskipun demikian, karena ini bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Bank BTN sendiri, maka semua pihak terkait di negeri ini harus memberikan dukungan karena ini adalah program pemerintah untuk rakyat.

11 DESEMBER 2015

BTN KEMBANGKAN WILAYAH INDONESIA TIMUR

Bank BTN meresmikan Kantor Wilayah IV yang dipusatkan di Makassar dengan harapan dapat menyederhanakan bisnis proses sekaligus memangkas birokrasi dalam pengambilan keputusan strategis menyangkut pelayanan perbankan di wilayah tersebut. Terdapat 12 kantor cabang yang berada dalam pengawasan Kanwil IV ini.



21 DESEMBER 2015



BANK BTN SIAP MENSUKSESKAN ATM HIMBARA

Bank BTN siap dalam mensukseskan program ATM Merah Putih dengan bergabungnya seluruh ATM bank BUMN ke dalam ATM Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Penggabungan ATM Himbara ini merupakan wujud sinergi antar BUMN di bidang perbankan. Tujuannya sangat positif dan akan bermanfaat dalam mendukung efisiensi BUMN sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat karena biaya akan semakin murah dengan fitur layanan lebih.

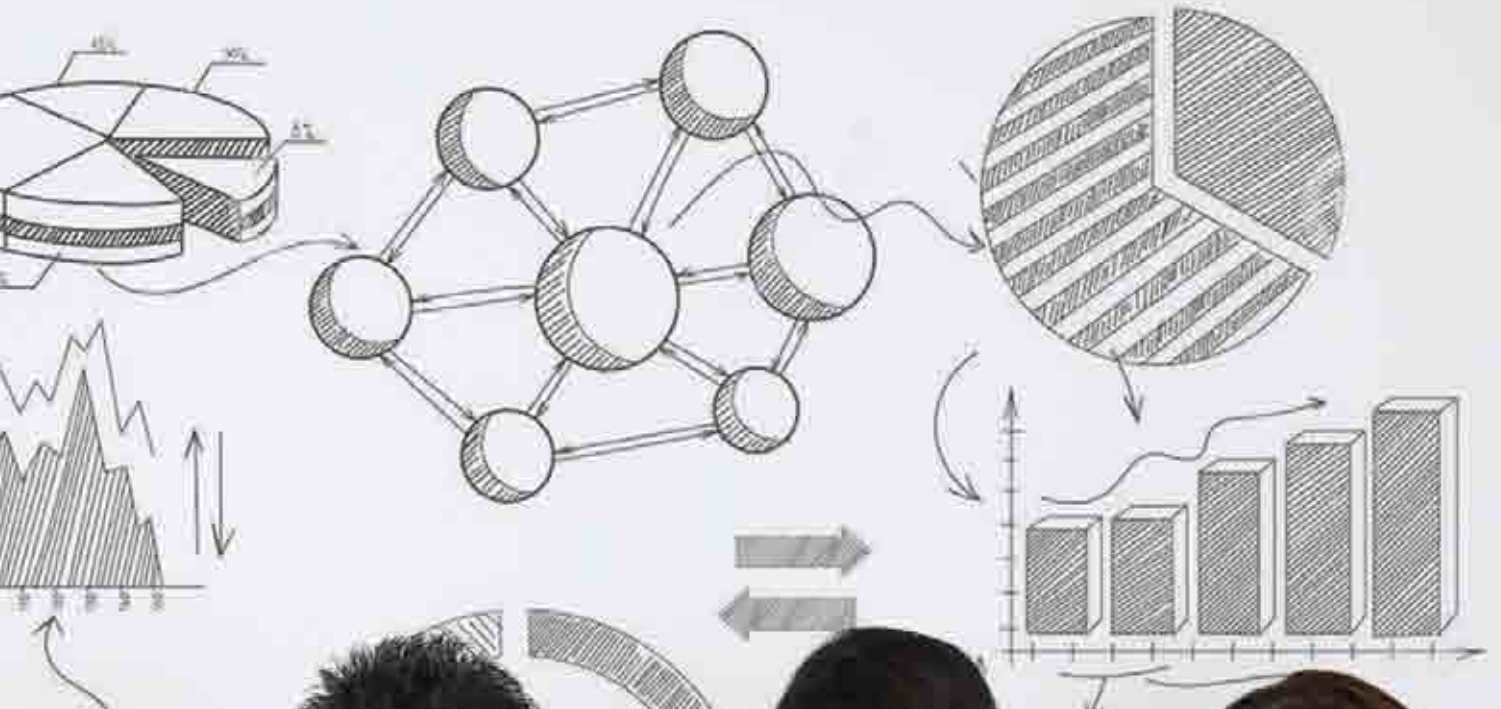
02

Laporan Manajemen



Perseroan memiliki potensi berkembang yang masih sangat besar. Terlebih lagi, Perseroan fokus pada KPR segmen menengah bawah dengan nasabah yang berasal dari kelas menengah di Indonesia. Jumlah kelas menengah di Indonesia diperkirakan terus bertambah di masa datang, dan menjadi pasar KPR yang potensial bagi Perseroan.





Laporan Dewan Komisaris



Direksi Perseroan telah melaksanakan nasehat Dewan Komisaris yang ditunjukkan dengan meningkatnya penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko (RBBR) periode 2015 dengan nilai komposit 2 dibandingkan dengan nilai komposit 3 pada periode 2014. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya secara efektif dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Laporan Dewan Komisaris

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip *good corporate governance*. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola sesuai kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Untuk menjaga obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Tugas dan wewenang komite-komite penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penilaian atas komite-komite penunjang Dewan Komisaris, dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Tinjauan Makro Ekonomi

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas prestasi kinerja Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2015. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2015 melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,44% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan 11,58% (yoy) di tahun 2014. Perlambatan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatnya risiko kredit beberapa segmen membuat bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru. Secara sektoral, perlambatan kredit khususnya terjadi pada sektor yang terimbas dampak global. Penyaluran kredit ke

Laporan Dewan Komisaris

sektor *tradable* (Pertanian, Pertambangan, dan Industri) tertekan lebih dalam bila dibandingkan dengan penyaluran kredit ke sektor *nontradable*.

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat sepanjang tahun 2015 menjadi sebesar 7,26% dibandingkan 12,29% pada tahun 2014. Perlambatan DPK sepanjang 2015 terutama disumbang oleh penurunan pertumbuhan deposito, khususnya deposito rupiah.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2015. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi sangat baik. Secara garis besar, Penilaian atas kinerja Direksi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Program Sejuta Rumah

Pencapaian Program Sejuta Rumah di 2015 telah melampaui yang telah ditargetkan. Unit yang ditargetkan adalah sebanyak 431.000 unit, sedangkan realisasinya sebanyak 474.099 unit atau mencapai 110,00% dari yang ditargetkan.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah perlambatan perekonomian yang berdampak pada kondisi industri perbankan di 2015, Direksi mampu mengambil berbagai inisiatif strategis selaras dengan program transformasi yang telah dicanangkan Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja operasional Perseroan. Pada tahun 2015, Direksi telah melaksanakan nasehat Dewan Komisaris yaitu fokus terhadap strategi 1) penurunan *Non Performing Loan* (NPL), 2) menjaga likuiditas, 3) peningkatan *fee based income*, dan 4) penguatan usaha syariah. Nilai NPL Gross mengalami penurunan dari 4,01% di 2014 menjadi 3,42% di 2015. Walaupun *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan sebesar 108,78% per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki alat-alat likuid yang memadai dalam bentuk penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain serta surat berharga yang dimiliki. Terkait *fee based income*, Perseroan mampu meningkatkan besarnya yaitu sebesar Rp1,12 triliun, meningkat sebesar 22,29% dari tahun 2014 yang sebesar Rp0,92 triliun. Perseroan juga telah berhasil meningkatkan laba dari Unit Usaha Syariahnya. Laba Unit Usaha Syariah pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 28,79% dari tahun 2014 sebesar Rp202,14 miliar menjadi Rp260,33 miliar di tahun 2015.

Perseroan berhasil meningkatkan posisinya menjadi bank peringkat keenam terbesar di Indonesia dari sisi kredit dan peringkat ketujuh dari jumlah aset. Aset Perseroan mencapai Rp171,81 triliun di tahun 2015, atau tumbuh 18,83% dari Rp144,58 triliun pada tahun 2014. Sedangkan posisi kredit yang disalurkan Perseroan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 19,88%. Posisi Kredit yang disalurkan Perseroan tahun 2015 mencapai Rp138,96 triliun meningkat dari Rp115,92 triliun di tahun 2014. Besarnya penyaluran kredit yang diberikan di tahun 2015 sebesar Rp51,25 triliun, meningkat sebesar 23,19% dari 2014 yang sebesar Rp41,60 triliun. Meskipun besarnya penyaluran kredit mengalami peningkatan, Perseroan mampu untuk menurunkan NPL seperti yang telah dijelaskan di atas.

Peningkatan kinerja operasional tersebut telah berdampak pada peningkatan yang cukup signifikan pada Laba Perseroan. Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 61,57% dari Rp 1,15 triliun di 2014 menjadi Rp1,85 triliun di 2015.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank mencerminkan hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk - based bank rating*) yang mencakup 4 faktor sebagai berikut.

Direksi berhasil melaksanakan program transformasi tahap I sesuai dengan hasil pengawasan dan nasehat Dewan Komisaris yang tercermin antara lain: penurunan *Non Performing Loan* (NPL), peningkatan aset dan dana pihak ketiga, manajemen permodalan, peningkatan *fee based income* dan penguatan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan tata kelola yang diamanatkan dalam RUPS.

Laporan Dewan Komisaris

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance*
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Pada tahun 2015, Perseroan telah mendapat tingkat kesehatan Bank Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Selain pengawasan pada pencapaian kinerja bisnis, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat pada proses bisnis. Dewan Komisaris telah memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi untuk lebih meningkatkan implementasi manajemen risiko, *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility*.

Manajemen Risiko

Dalam rangka Perseroan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis perbankan yang dinamis Bank BTN menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat guna tercapainya *risk adjusted return* Bank yang optimal dan berkelanjutan, melalui suatu kerangka kerja, tata kelola manajemen risiko dan mengikuti tahapan proses manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada setiap tingkatan/level organisasi Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui;

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu

tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;

3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Persero secara efektif,

Risiko inherent yang dikelola Bank yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan investasi. Menurut pendapat Dewan Komisaris, risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Hasil penilaian risiko di 2015 menunjukkan risiko komposit termasuk dalam peringkat *low* hingga *low to moderat*.

Good Corporate Governance

Dewan Komisaris menyadari bahwa implementasi *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi *good corporate governance* menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2015. GCG merupakan mekanisme yang mengatur hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self*

Dewan Komisaris memandang bahwa tantangan ekonomi dunia, pembangunan infrastruktur domestik serta Program Sejuta Rumah akan memberikan peluang bisnis bagi Perseroan di tahun 2016.

Laporan Dewan Komisaris

assessment) atas pelaksanaan GCG. Pada 2015, Perseroan memperoleh nilai komposit *assessment* pelaksanaan GCG sebesar 2 atau dalam kategori BAIK.

Selain *self assessment*, Perseroan juga mengikuti program *assessment* yang dilakukan oleh pihak eksternal sebagai *feedback* bagi Perseroan. Penilaian eksternal dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) berdasarkan *ASEAN CG Scorecard*. Pada tahun 2015, Perseroan mendapat predikat "*Excellent*" yang artinya perusahaan sudah mampu memenuhi standar internasional praktik GCG yang ditentukan OECD.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan hal penting lainnya yang mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berpendapat bahwa CSR akan berdampak bagi kinerja perusahaan, melalui legitimasi dari para *stakeholders*. CSR akan meningkatkan reputasi Perseroan dan selanjutnya akan terjalin hubungan yang harmonis antara Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dengan efektif meliputi program pelestarian alam dan lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab terhadap konsumen. Direksi telah memiliki komitmen dengan menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR secara konsisten terus meningkat. Terdapat peningkatan penyaluran dana CSR sebesar 72% untuk tahun 2015 yang semula sebesar Rp6.271.617.876 di tahun 2014 menjadi sebesar Rp10.765.272.616 di tahun 2015.

Pandangan atas Prospek Usaha Bank

Bank Indonesia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 akan mencapai kisaran 5,2%-5,6% yoy. Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek

infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Sementara itu, investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makro ekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat, diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor, khususnya ekspor manufaktur.

Dari sektor Perbankan, stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* perbankan yang rata-rata sebesar 21,39% pada Desember 2015.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 optimis akan berada pada kondisi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016 serta pertumbuhan kredit yang diperkirakan masih akan terus meningkat di tahun 2016.

Sektor perumahan masih memiliki potensi yang sangat besar di masa datang. Kebutuhan rumah di Indonesia sebesar 800.000 unit setiap tahunnya, namun hanya dapat terpenuhi setengahnya. Hal ini mengakibatkan *backlog* perumahan telah mencapai sekitar 15 juta unit saat ini. Sebagai Persero dengan bisnis utama KPR dan kredit perumahan, Perseroan memiliki potensi berkembang yang masih sangat besar. Terlebih lagi, Perseroan fokus pada KPR segmen menengah bawah dengan nasabah yang berasal dari kelas menengah di Indonesia. Jumlah kelas menengah di Indonesia diperkirakan terus bertambah di masa datang, dan menjadi pasar KPR yang potensial bagi Perseroan.

Laporan Dewan Komisaris

Melihat prospek usaha tersebut, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada terutama dalam mengembangkan bisnis Perumahan yang disalurkan melalui Program Sejuta Rumah Sebagai Peluang Bisnis Perseroan. Di tahun 2016 potensi semakin meningkat sejalan dengan program Pemerintah, yaitu membangun rumah bersubsidi sebanyak 700 ribu unit dan jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa selama 2015, komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Komite Audit

Komite Audit telah menjalankan peran secara profesional dan independen selama tahun 2015. Komite Audit telah menyelenggarakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat.

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan Penugasan Audit Eksternal. Pada tahun buku 2015, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perusahaan adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (KAP PSS-EY). Komite Audit telah memastikan bahwa pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran. Atas dasar penugasan tersebut, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait KAP yang ditunjuk berdasarkan proses pengadaan sesuai ketentuan.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, isu utama temuan audit yang penting, serta kemungkinan adanya hambatan dalam penugasan audit, selain itu Komite Audit juga menghadiri *exit meeting* atas hasil *sampling* pemeriksaan Kantor Akuntan Publik di beberapa Kantor Cabang. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik dan kemudian memberikan rekomendasi dan/atau laporan. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2. *Review* terhadap Sistem Pengendalian *Internal*. Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian *internal*, Komite Audit telah berupaya agar peran audit *internal* dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit *internal* dan tindak lanjut atas temuannya. Komite Audit telah *mereview* hasil pekerjaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Division* selama tahun 2015, yang terdiri dari:
 - Audit Umum Konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) obyek Audit
 - Audit Umum Sharia sebanyak 24 (dua puluh empat) obyek audit
 - Audit Teknologi Sistem Informasi sebanyak 30 (tiga puluh) obyek audit
 - Audit Mutu *Internal* sebanyak 21 (dua puluh satu) obyek audit
 - Audit khusus sebanyak 29 (dua puluh sembilan) obyek audit.

Laporan Dewan Komisaris

Komite Audit melakukan pemantauan terhadap implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Cabang dengan menghadiri *Exit Meeting* baik untuk audit *internal* maupun audit eksternal. Disamping itu, Komite Audit telah menghadiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Obyek Audit umum yang dilakukan oleh *Internal Audit Division* (IAD).

Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit telah menyampaikan saran sebagai berikut.

- Menyarankan kepada *Internal Audit Division* (IAD), agar auditor *internal* meningkatkan evaluasi atas pengendalian *internal* yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, bisnis proses pemberian kredit komersial dan konsumen, termasuk KUR terutama dalam penentuan kolektibilitas kredit di Kantor Cabang dan Pusat sehingga penetapan kolektibilitas kredit dapat sesuai dengan ketentuan yg berlaku serta prinsip *Good Corporate Governance*.
- IAD agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan diseluruh Kantor Cabang.
- IAD agar memiliki auditor yang memiliki keahlian khusus di bidang IT, serta menambah wawasan petugas IAD dalam bidang operasional perbankan seperti pelatihan keabsahan tanda tangan.
- Komite Audit menyarankan agar Manajemen dapat secara serius menyelesaikan tindak lanjut temuan sesuai dengan rekomendasi IAD, sehingga tidak terjadi lagi temuan yang berulang.

Selain mereview laporan audit *internal*, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas Perseroan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris juga menilai bahwa kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan perannya dengan efektif selama 2015. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 8 kali rapat.

Sepanjang tahun 2015, selain merealisasikan rencana kerja, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Memperbaiki dan mensosialisasikan budaya perusahaan yaitu BTN TERDEPAN GCG RUMAHKOE serta menyiapkan materi pelatihannya.
2. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan dalam RUPS.
3. Menyampaikan rekomendasi nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi pegawai.
5. Mengevaluasi kebijakan nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
6. Mengusulkan draft perbaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Direksi.
7. Mengevaluasi kebijakan mengenai sanksi dan disiplin pegawai.
8. Melakukan *review system grading* dan rencana *assessment* pegawai

Laporan Dewan Komisaris

9. Mengusulkan perbaikan system remunerasi pegawai dengan berdasarkan 3 P (*Pay for Person, Pay for Performance dan Pay for Position*).
 10. Melakukan evaluasi implementasi *Human Resources Information System* (HRIS)
 11. Memberikan masukan bagi perbaikan *Board Manual* Perseroan
 12. Memberikan masukan dalam pembuatan *Code of Conduct* Perseroan
 13. Memonitor tindak lanjut hasil audit khusus oleh *Internal Audit Division*.
 14. Mensosialisasikan fungsi Dewan Komisaris, tugas Komisaris Independen, tugas komite Dewan Komisaris, rencana kerja Dewan Komisaris dan perbaikan budaya kerja dengan mensosialisasikan prinsip-prinsip GCG dan budaya perusahaan yang telah disempurnakan dalam kesempatan mengikuti *exit meeting* IAD.
 15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite pada *Annual Report* Perseroan 2015
 16. Menyampaikan laporan *self assessment* GCG mengenai Pengawasan Aktif Dewan Komisaris.
 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite pada Laporan GCG Perseroan tahun 2015.
1. Rapat berkala dengan *Risk Management Division* dengan agenda program kerja *Risk Management Division* untuk tahun 2015.
 2. Rapat berkala dengan *Risk Management Division* dengan agenda pembahasan Laporan Profil Risiko dan Laporan RBBR.
 3. Rapat berkala Komite Pemantau Risiko dengan *Risk Management Division* dengan agenda harmonisasi penilaian risiko *Risk Management Division* dan *Internal Audit Division*, hasil RBBR menurut versi OJK, *monitoring* kredit *high risk high rise building, tools manual* untuk *monitoring* kredit *high risk high rise building* dan peran *Risk Management Division* dalam pembahasan *impairment asset*.
 4. Rapat membahas Perbedaan Penilaian KPMR Risiko Kredit antara OJK dengan Perseroan merujuk pada Surat dari OJK No. S-30/PB.312/2015 tanggal 4 Mei 2015 perihal Perbedaan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit Bank Saudara Posisi Desember 2014.
 5. Rapat pembahasan permohonan konsultasi kredit komersial.
 6. Rapat dengan *Treasury Division* terkait kondisi likuiditas dan alat perhitungan Likuiditas Perseroan.
 7. Rapat pembahasan *stress test analysis* Perseroan terkait melemahnya nilai tukar rupiah karena devaluasi Yuan dan rencana the Fed menaikkan suku bunga.
 8. Rapat bersama *Risk Management Division* mengenai *Review* Piagam Komite Pemantau Risiko.
 9. Rapat bersama dengan beberapa Divisi yang membahas tentang permasalahan *Four Eyes Principle* dan *Non Performing Loan*.
 10. Rapat pembahasan *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris juga menilai bahwa kinerja Komite Pemantau Risiko telah menjalankan perannya dengan efektif selama 2015. Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 14 kali rapat.

Untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pada periode Januari - Desember 2015, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan beberapa hal, sebagai berikut :

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2015 terjadi beberapa kali perubahan komposisi Dewan Komisaris. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2015

Laporan Dewan Komisaris

memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Sdr. Mardiasmo sebagai Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya sebagai anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2015
- Sdr. Herman Hidayat sebagai Komisaris terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015
- Sdr. Maulana Ibrahim sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Sahala Lumban Gaol sebagai Komisaris Independen

RUPST 2015 kemudian menyetujui untuk mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- Sdr. Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Utama
- Sdr. Kamaruddin Sjam sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Lucky Fathul Aziz H. sebagai Komisaris
- Sdri. Catherinawati Hadiman sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Arie Coerniadi sebagai Komisaris Independen

Sdr. Sukardi Rinakit mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama Perseroan melalui Surat kepada Perseroan pada tanggal 4 Juni 2015. Oleh karena itu, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 2 September 2015. RUPSLB tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan

hormat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Sdri. Amanah Abdulkadir sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Agung Kuswandoro sebagai Komisaris

RUPSLB juga menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen
- Sdri. Sumiyati sebagai Komisaris
- Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen:

Sdr. Chandra M. Hamzah

Komisaris Independen:

Sdr. Kamaruddin Sjam

Komisaris Independen:

Sdr. Arie Coerniadi

Komisaris Independen:

Sdri. Catherinawati Hadiman

Komisaris:

Sdri. Sumiyati

Komisaris:

Sdr. Fajar Harry Sampurno

Komisaris:

Sdr. Lucky Fathul Aziz H.

Namun demikian, Sdr. Chandra M. Hamzah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015.

Laporan Dewan Komisaris

Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut perlu dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dalam rangka memenuhi tuntutan bisnis Perseroan, khususnya untuk mengawal Program Sejuta Rumah dapat dilaksanakan dengan baik, selain mempertimbangkan pemilihan Putra Terbaik Bangsa untuk ditempatkan sebagai Pengawas dalam melaksanakan putaran roda Perseroan. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penutup

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2015. Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perseroan bisa selalu meningkat di masa yang akan datang,

Sekali lagi, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, berkat dedikasi dan kerja keras, Perseroan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang mengalami tantangan.

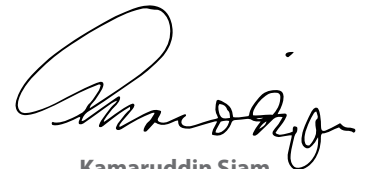
Jakarta, Maret 2016
Atas nama Dewan Komisaris
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Arie Coerniadi
Komisaris Independen



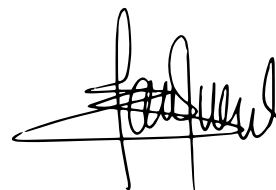
Catherinawati Hadiman
Komisaris Independen



Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen



Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris



Fajar Harry Sampurno
Komisaris

Laporan Direksi



Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang. Bahkan pada saat kondisi perekonomian yang melemah dan sebagian industri mengalami penurunan kinerja Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan: Laba 61,57%; Aset 18,83%; pertumbuhan kredit dan pembiayaan 19,95%; dan, Dana Pihak Ketiga 19,97%. Tidak hanya pada aspek keuangan Perseroan juga sukses melaksanakan program Sejuta Rumah serta menjadi satu-satunya Bank BUMN yang mendapatkan predikat *The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015* di tingkat ASEAN.

Laporan Direksi

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang kami hormati.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat tak terhingga kepada kita semua, terutama keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bisnis yang begitu *turbulence* saat ini.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk Tahun buku 2015. Secara umum, pencapaian kinerja Perseroan sangat baik. Tidak hanya pada aspek keuangan namun juga aspek non keuangan kendatipun kondisi perekonomian global dan nasional mengalami perlambatan.

Tinjauan Makro Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 mengalami perlambatan, terutama pada semester pertama. Perlambatan ini sejalan dengan melemahnya ekonomi global, terutama negeri Tiongkok, serta penurunan harga minyak dan komoditas. Demikian halnya dari sisi perekonomian regional juga menunjukkan perlambatan ekonomi terutama pada daerah yang berbasis sumber daya alam.

Namun Demikian, memasuki triwulan ketiga 2015, ekonomi nasional mulai menunjukkan perbaikan. Hingga pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy). Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tercatat 4,79% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan tersebut terutama didorong oleh peningkatan permintaan domestik yang didorong oleh meningkatnya peran Pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi infrastruktur.

Sementara itu, inflasi pada tahun 2015 terkendali dengan baik sebesar 3,35% dan berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar $4 \pm 1\%$. Hal ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Namun, risiko inflasi tetap perlu terus diwaspadai, terutama terkait penyesuaian *administered prices*, sehingga diperlukan penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Ke depan, inflasi tahun 2016 diperkirakan akan berada pada tingkat yang sama, yaitu $4 \pm 1\%$. Terkelolanya inflasi dengan baik membuat BI *rate* bertahan pada tingkat 7,5% pada akhir Desember 2015, setelah mengalami penurunan sebesar 25bps pada bulan Februari 2015. Sejalan dengan ruang pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka dengan terjaganya stabilitas makro ekonomi pada akhir 2015, Bank Indonesia kemudian memutuskan untuk menurunkan BI *rate* sebesar 50bps pada awal tahun 2016, masing-masing 25bps pada 14 Januari 2016 dan 25bps pada 18 Februari 2016. Penurunan BI *Rate* ini diharapkan dapat memperkuat pelonggaran kebijakan makro prudensial dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Rupiah melemah 11,30% dari Rp12.385/USD pada 31 Desember 2014 ke level Rp13.785/USD pada 31 Desember 2015. Sumber tekanan terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain, ketidakpastian *timing* dan besaran kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta Yuan yang terus terdepresiasi di tengah perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Sedangkan, dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah terkait dengan meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden secara musiman, serta kekhawatiran terhadap

Laporan Direksi

melambatnya ekonomi domestik. Namun demikian, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 pergerakan rupiah cenderung menguat dan lebih stabil, seiring dengan sentimen positif terhadap negara berkembang akibat menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan *Fed Fund Rate* sebesar 25bps pada 17 Desember 2015, yang mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga negara.

Namun demikian, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri Perbankan. Ketahanan Industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit sepanjang 2015 melambat sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada tahun 2015 tercatat sebesar 10,44% (yoy) atau lebih rendah 11,58% (yoy) dibandingkan pada tahun 2014. Perlambatan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi (prosiklikalitas). Selain itu, meningkatnya risiko kredit di beberapa segmen membuat industri perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat menjadi sebesar 7,26% sepanjang tahun 2015 dibandingkan 12,29% pada tahun 2014. Perlambatan DPK sepanjang tahun 2015 utamanya di sumbang oleh penurunan pertumbuhan deposito, khususnya deposito rupiah.

Pelemahan ekonomi ini juga berdampak pada kinerja industri properti di tanah air. Berdasarkan survei Bank Indonesia, pertumbuhan indeks harga properti residensial pada triwulan IV tahun 2015 melambat baik secara triwulanan maupun tahunan, masing-masing sebesar 0,73% (qtq) dan 4,62% (yoy). Perlambatan kinerja juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan penjualan properti residensial, yaitu sebesar 40,07% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Perlambatan penjualan properti juga terjadi pada penyaluran KPR dan KPA pada triwulan IV-2015 sebesar 1,17% (qtq). Akan tetapi, penggunaan KPR masih tetap

menjadi sumber pembiayaan dominan bagi konsumen dalam pembelian properti residensial. Selain itu, berdasarkan data BPS, *backlog* rumah meningkat sekitar 15 juta unit. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan rumah atau *housing ownership rate* Indonesia adalah sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis perumahan di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik, yang diperkuat dengan adanya penduduk *midle class* yang tumbuh sangat signifikan dan penjualan rumah sebagian besar dengan kredit.

Kebijakan Strategis

Berdasarkan kondisi makro ekonomi termasuk pengaruhnya terhadap industri perbankan dan bisnis properti serta KPR, Perseroan merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk meraih setiap peluang dan potensi yang muncul yang kami kemas dalam program transformasi dan/atau Rencana Jangka Panjang Bank lalu dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*).

Secara garis besar, program transformasi Perseroan dibagi menjadi tiga tahap periode, yaitu: Tahap I *Survival Period* (2013-2015); Tahap II *Digital Banking Period* (2016-2019); dan, Tahap III *Global Playership Period* (2020-2025).

Saat ini, Perseroan telah menyelesaikan dengan baik transformasi tahap I dan persyaratan menuju transformasi tahap II telah dipenuhi, antara lain: penguasaan bisnis perumahan telah mencapai lebih dari 30% di tahun 2015 dan terbesar diantara perbankan nasional, menguasai pasar KPR subsidi lebih dari 98%, perbaikan bisnis dan penguatan modal. Untuk itu, Perseroan perlu untuk melakukan lompatan besar yang telah dituangkan dalam *roadmap* transformasi dengan fokus pada penguatan bisnis (*stronger business*), yang dibagi kedalam 5 (lima) bidang sebagai berikut:

1. Bidang Kredit

Pertumbuhan kredit Perseroan akan ditopang oleh pertumbuhan KPR dan kredit konstruksi untuk mendukung program Sejuta Rumah.

Laporan Direksi

Direncanakan akan disalurkan KPR sebanyak 200 ribu unit yang akan mendorong pertumbuhan total kredit sebesar 18%-20%. Adapun strategi bidang kredit secara umum adalah optimalisasi program Sejuta Rumah, meningkatkan segmen *home equity* dan *consumer loan*, selektif pada segmen *commercial*-non perumahan, serta perbaikan manajemen perkreditan.

Perbaikan kualitas kredit merupakan tolok ukur keberhasilan kredit yang diberikan dan menjadi sumber pembiayaan kembali. Hal yang menjadi prioritas untuk dibenahi adalah:

- Meningkatkan efektivitas *collection management*
- Meningkatkan efektivitas *asset recovery*
- Memperbaiki manajemen perkreditan

2. Bidang Pendanaan

Strategi di bidang pendanaan difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kredit khususnya program Sejuta Rumah, adapun strategi yang akan dikembangkan adalah meningkatkan dana pihak ketiga murah, kerjasama dengan institusi pemilik dana besar untuk pembiayaan KPR program, dan meningkatkan *wholesale funding*.

3. Bidang Permodalan

Untuk mendukung penyaluran KPR dalam rangka program Sejuta Rumah dibutuhkan permodalan yang cukup dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Direncanakan akan dilakukan konversi dana FLPP yang sebelumnya dicatat dalam giro program menjadi instrumen modal subordinasi sebesar Rp12 triliun (berdasarkan modal inti per 31 Desember 2015). Selain itu juga, akan dilakukan revaluasi aset Perseroan sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN.

4. Peningkatan *fee based income* dan pembentukan anak usaha

Strategi untuk meningkatkan *fee based income* dan pembentukan anak usaha difokuskan untuk melaksanakan berbagai inisiatif strategi sebagai berikut.

- Membentuk anak usaha bidang asuransi (jiwa dan umum) dan *multifinance*, serta integrasi ATM Merah Putih melalui penyertaan modal.
- Meningkatkan jumlah *account* baru untuk menambah pendapatan administrasi baik kredit maupun dana.
- Meningkatkan aktivitas *treasury*, *transaction services*, *card business*, *wealth management* dan *payment point*.
- Meningkatkan bank garansi pada kantor cabang potensial.
- Menggali potensi *fee based* lainnya, seperti mengembangkan SKBDN dan L/C
- Mengoptimalkan bisnis *wealth management* dalam memasarkan produk *non banking*.

5. Bidang *Human Capital*

Strategi di bidang *human capital* difokuskan untuk mencapai produktivitas pegawai dengan program kerja sebagai berikut:

- Pemenuhan *human capital* dari *internal* dan *eksternal* secara *pareto*.
- Pengembangan organisasi Perseroan yang efektif dan efisien serta berdaya saing.
- Pengembangan kompetensi *human capital* melalui *training* untuk memenuhi gap kompetensi.
- Penguatan keterikatan perusahaan dengan fokus pada *talent management system* yang efektif.
- Pembenahan terhadap sistem *human capital reward and punishment* untuk menumbuhkan kebanggaan bersikap laku *professional*.
- Pengembangan *Human Capital Information System* (HCIS) yang terpadu untuk membantu terciptanya suatu sistem pengelolaan *human capital* yang lebih baik dan efisien.

Laporan Direksi

6. Bidang infrastruktur

Selain pengembangan strategi bisnis dan peningkatan produktivitas pegawai, peningkatan bisnis *support* melalui penguatan berbagai bidang infrastruktur juga menjadi fokus Perseroan. Strategi di bidang infrastruktur meliputi strategi penerapan GRC (*GCG, Risk, and Compliance*) secara konsisten, memperkuat IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan produktivitas *delivery channel* baik jaringan kantor maupun *e channel*.

Perlu kami garis bawahi pula bahwa sebagai Bank BUMN, Perseroan bertekad bulat untuk mensukseskan sembilan agenda prioritas sebagai Visi dan Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia (NAWA CITA) yang dituangkan dalam Roadmap Kedepan Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultansi, khususnya terkait dukungan pembiayaan Program Sejuta Rumah; Mendorong kemandirian keuangan melalui program inklusi keuangan dengan terus mengembangkan LAKU PANDAI melalui produk Tabungan Cermat; Meningkatkan daya saing dan efisiensi melalui sinergi ATM dan EDC melalui layanan jasa ATM Merah Putih (HIMBARA); dan; Penguatan perbankan syariah BUMN melalui Program Konsolidasi Perbankan Syariah secara Nasional.

Analisis Kinerja Perseroan

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, perlambatan ekonomi global dan domestik yang dimulai pada tahun 2014 memberikan tekanan pada kinerja Perseroan di tahun tersebut. Belajar dari pengalaman tersebut, Direksi kemudian mengubah perilaku organisasi Perseroan menjadi lebih proaktif, inisiatif serta tanggap terhadap perubahan lingkungan yang cepat.

Hasilnya, perlambatan ekonomi dan berbagai tantangan pada tahun 2015 sebagaimana uraian diatas dapat diantisipasi dengan baik oleh

Perseroan. Melalui eksekusi segenap program transformasi, tahap demi tahap, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, pada saat kondisi perekonomian nasional melemah dan sebagian industri mengalami penurunan kinerja sekalipun. Secara umum, Perseroan berhasil meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan, antara lain: Laba meningkat 61,57% mencapai Rp1.851 miliar; Aset meningkat 18,83% mencapai Rp171.808 miliar; pertumbuhan kredit dan pembiayaan meningkat 19,88% menjadi Rp138.956 miliar; dan, Dana Pihak Ketiga meningkat 19,97% menjadi Rp13.860 miliar. Sementara itu, Perseroan juga sukses melaksanakan program Sejuta Rumah serta menjadi satu-satunya Bank BUMN yang mendapatkan predikat *The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard* 2015 di tingkat ASEAN. Terlebih lagi, berdasarkan penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dari Kementerian BUMN, Perseroan berhasil memperbaiki nilai dari 339 (*early result*) pada tahun 2014 menjadi 492 (*Good Performance*) di tahun 2015.

Program Sejuta Rumah secara resmi dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015. Perseroan telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai bank penggerak utama (*anchor*) untuk program yang sangat strategis ini. Tugas ini tidak saja membawa sejarah baru bagi Perseroan, namun juga membawa lompatan kinerja bisnis yang luar biasa untuk tahun 2015 dan diharapkan terwujud juga pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam rangka mendukung program sejuta rumah Perseroan telah menyiapkan program 5 SIAP, yaitu:

- **Siap Pendanaan:** melalui kerjasama pendanaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perseroan sendiri;
- **Siap Teknologi Informasi:** yaitu meningkatkan kapasitas teknologi informasi serta pengembangan sistem aplikasi kredit yang terintegrasi;
- **Siap Supply Rumah:** dengan bekerjasama dengan lebih dari 3.000 pengembang perumahan di seluruh Indonesia;
- **Siap Sumber Daya Manusia:** yaitu pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya pemroses kredit baik KPR Subsidi maupun KPR Non Subsidi.

Laporan Direksi

- **Siap Proses Bisnis:** melalui penyempurnaan proses bisnis, perbaikan *risk management* dan menambah jaringan pelayanan.

Melalui kerja keras serta dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* Perseroan, program Sejuta Rumah ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Selama tahun 2015, Perseroan telah berhasil memberikan KPR dan dukungan pembiayaan untuk pembangunan rumah sebanyak 474.099 unit, yang terdiri dari pembiayaan rumah Subsidi sebanyak 286.747 unit dan rumah Non Subsidi sebanyak 187.352 unit. Pembiayaan KPR Subsidi tahun 2015 ini telah mencapai lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target pembiayaan yang direncanakan Pemerintah tahun 2015.

Hal lain yang juga sangat membanggakan bagi Perseroan di tahun 2015 adalah perbaikan kualitas kredit yang signifikan. Perbaikan ini tentunya datang dari berbagai inisiatif di bidang perkreditan, salah satunya dengan melakukan perbaikan pada proses bisnis kredit. Pada lini depan (*front-end*), Perseroan melakukan perbaikan proses akuisisi kredit baru, melalui penerapan pendekatan *four-eyes principles* dan *credit scoring model*, meningkatkan kompetensi analis kredit serta membentuk unit *Credit Risk* bagi kredit-kredit komersial. Pada lini tengah (*middle-end*), Perseroan telah meningkatkan monitoring terhadap bisnis dan agunan debitur, terutama dengan penerapan system monitoring berbasis *web* (*iCremo*). Sedangkan pada lini belakang (*back-end*), Perseroan memperkuat manajemen penagihan dengan terus memperbaiki organisasi unit kerja *Consumer Collection and Remedial* serta *Asset Management*, menambah jumlah kolektor di lapangan, serta mengintensifkan penjualan agunan kredit-kredit bermasalah melalui *investor gathering*, *website* BTN Property serta kerjasama dengan balai lelang dan agen properti.

Dengan melaksanakan berbagai inisiatif strategis di atas, Perseroan berhasil meningkatkan pertumbuhan kredit yang tinggi sebesar 19,88%, jauh di atas pertumbuhan industri yang sebesar 10,44%. Posisi Kredit dan Pembiayaan Syariah yang disalurkan Perseroan tahun 2015 mencapai Rp138,96 triliun meningkat dari Rp115,92 triliun

di tahun 2014. Peningkatan ini khususnya berasal dari produk-produk kredit untuk mendukung program Sejuta Rumah, yaitu KPR Bersubsidi dengan pertumbuhan sebesar 26,73% dan Kredit Konstruksi yang bertumbuh sebesar 30,47%. Besarnya penyaluran kredit yang diberikan di tahun 2015 sebesar Rp51,25 triliun, meningkat sebesar 23,19% dari 2014 yang sebesar Rp41,60 triliun. Sedangkan, NPL per 31 Desember 2015 sebesar 3,42%, membaik sangat signifikan dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yaitu 4,01%. Hasil ini dicapai melalui intensifikasi penagihan, penjualan agunan kredit dan perbaikan proses bisnis untuk kredit-kredit baru.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana-dana berbiaya murah dan *fee-based income*, serta memperluas program keuangan inklusi di Indonesia, selain program *marketing* dan *priority banking* yang telah dilaksanakan setiap tahun secara konsisten, pada tahun 2015 Perseroan melaksanakan beberapa inisiatif di bidang *digital* dan *branchless banking*. Beberapa produk dan layanan baru *digital banking* yang dikembangkan adalah *e-banking*, yang terdiri dari *cash management*, *EDC purchase/payment*, portal BTN Property, *eMoney* dan *vending machine* untuk pembelian tiket kereta api. Perseroan juga telah membuka beberapa *digital outlet*. Selain itu, Perseroan juga berpartisipasi dalam program LAKU PANDAI yang diinisiasi oleh Pemerintah, dengan terus mengembangkan produk Tabungan BTN Cermat. Pada tahun 2015 pengembangan Tabungan BTN Cermat diperluas lagi dengan menggunakan mesin *Electronic Data Captured* (EDC). Layanan Tabungan BTN Cermat kemudian kembali diperluas dengan teknologi berbasis Ponsel atau *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD). Dengan layanan USSD ini, masyarakat dapat melakukan transaksi Tabungan BTN Cermat melalui telepon seluler.

Strategi-strategi di atas mampu membuat Perseroan bertahan (*survive*) dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerjanya. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan mengalami peningkatan sebesar 19,95%, tumbuh dari Rp106,47 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp127,71 triliun per 31 Desember

Laporan Direksi

2015. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terutama didorong oleh dana berbiaya murah, terutama dari Giro yang meningkat 33,92%, dari Rp23,42 triliun menjadi Rp31,37 triliun. Pencapaian ini membuat rasio *Current Account Saving Account* (CASA) Perseroan meningkat dari 46,58% pada tahun 2014 menjadi 48,65% di tahun 2015. Perseroan juga berhasil meningkatkan *fee based income* sebesar 22,29%, dari Rp0,92 triliun di tahun 2014 menjadi Rp1,12 triliun di tahun 2015.

Secara keseluruhan, berbagai upaya di atas berhasil meningkatkan laba bersih Perseroan yang signifikan, yaitu: sebesar 61,57% dari Rp1,15 triliun di 2014 menjadi Rp1,85 triliun di 2015, seiring dengan menurunnya biaya dana dan membaiknya kualitas kredit Perseroan. Beberapa rasio profitabilitas pada tahun 2015 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi tahun 2014. NIM sebesar 4,87%, meningkat dari 4,47%. ROE dan ROA masing-masing sebesar 16,84% dan 1,61%, meningkat dari posisi 31 Desember 2014 yang masing-masing sebesar 10,92% dan 1,14%. Sedangkan, terkait kinerja Unit Usaha Syariah (UUS), sepanjang 2015, berhasil mencatatkan peningkatan Pembiayaan sebesar Rp11,22 triliun, meningkat sebesar 16,37% dari posisi tahun 2014 sebesar Rp9,65 triliun. Jumlah dana pihak ketiga juga meningkat sebesar 26,95%, dari Rp8,75 triliun di tahun 2014 menjadi Rp11,11 triliun di tahun 2015. Laba Unit Usaha Syariah meningkat sebesar 28,79% dari Rp202,14 miliar di tahun 2014 menjadi Rp260,33 miliar di tahun 2015. Hal penting lainnya adalah Perseroan juga mampu mempertahankan tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang kuat sehingga mampu menopang pertumbuhan portofolio kredit yang berkualitas. Nilai CAR Perseroan per 31 Desember 2015 sebesar 16,97%, meningkat dari 14,64% per 31 Desember 2014.

Kinerja yang sangat memuaskan ini kemudian tercermin dari pergerakan harga saham Perseroan, dengan kode perdagangan BBTN. Walaupun Indeks Perdagangan Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan sebesar 12,13% pada tahun 2015,

namun harga saham BBTN justru meningkat 7,47%, dari Rp1.205 pada penutupan perdagangan tahun 2014 menjadi Rp1.295 pada penutupan perdagangan tahun 2015. Peningkatan nilai saham ini menggambarkan kepercayaan investor yang semakin tinggi terhadap Perseroan.

Berbagai pencapaian dan kesuksesan yang dicapai Perseroan di atas menunjukkan bahwa program transformasi yang dilaksanakan manajemen telah berada pada jalur yang benar.

Pencapaian Target 2015

Sebagai rangkuman atas Analisis Kinerja Perseroan, secara umum berikut kami sampaikan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target 2015 yang ditetapkan Perseroan, antara lain: Pencapaian pendapatan bunga bersih telah melebihi target, yaitu sebesar 100,54%; Pencapaian laba operasional sebesar 9,79% dari target yang telah ditentukan; Pencapaian laba tahun berjalan telah melebihi target, yaitu sebesar 102,27%; Pencapaian total aset melebihi target, yaitu sebesar 100,14%; Pencapaian ekuitas telah melebihi target yaitu sebesar 100,98%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target. Hanya sebagian kecil yang tidak tercapai, diantaranya adalah laba operasional yang sedikit di bawah target.

Kendala-Kendala yang Dihadapi

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, tekanan ekonomi makro turut mempengaruhi kinerja Perseroan pada tahun 2015. Sementara pada sisi lainnya, persaingan antar bank, terutama untuk KPR Non Subsidi menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan kajian dalam rangka mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi. Dengan menggunakan *tools* analisis SWOT, Perseroan menyadari bahwa salah satu kendala yang dihadapi Perseroan adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, khususnya dana murah (*low cost funding*) belum optimal dalam

Laporan Direksi

mendukung pertumbuhan kredit dengan tingkat volatilitas yang masih tinggi. Belum optimalnya penghimpunan dana murah ini menyebabkan kontribusi *fee based income* masih terbatas.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Perseroan telah menetapkan strategi-strategi sebagai berikut: Mengembangkan layanan dan produk berbasis digital khususnya untuk meningkatkan penghimpunan dana murah serta *fee based income* dan Meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi persaingan bisnis. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik sebagaimana yang dapat dilihat pada uraian analisis kinerja di atas.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan lebih baik dan berada pada kisaran 4,8-5,5%. Konsumsi rumah tangga menunjukkan indikasi perbaikan. Investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan terutama didorong oleh pengeluaran atau investasi pemerintah. Peningkatan investasi pemerintah ditopang oleh realisasi proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan bendungan yang sebagian telah memasuki tahap konstruksi. Kegiatan investasi yang meningkat tersebut tercermin dari meningkatnya penjualan semen, impor barang modal, dan indikasi peningkatan kredit. Selain itu, penyerapan belanja fiskal daerah juga berpotensi untuk semakin meningkat, sejalan dengan upaya khusus yang telah disiapkan Pemerintah untuk meningkatkan penyerapan belanja pemerintah daerah. Di sisi lain, perbaikan ekspor berlangsung secara gradual seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang belum secepat perkiraan semula. Konsistensi Pemerintah dalam mendorong reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan ekonomi dan realisasi proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan mendorong perekonomian semakin baik.

Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan

industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada tahun 2016 diharapkan meningkat dibandingkan tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 14% pada tahun 2016.

Satu hal lagi yang sangat penting dan telah kami pahami adalah prospek bisnis KPR ke depan sangat baik (dapat dilihat dari kebutuhan perumahan yang masih begitu besar sebagaimana data *backlog* dan pertumbuhan penduduk kelas menengah dan penjualan rumah sebagian besar dengan kredit di atas). Penyebab tingginya *backlog* rumah di Indonesia di pengaruhi oleh banyak hal baik, dari sisi *supply* dan *demand*. Dari sisi *supply*, faktor penyebabnya adalah minimnya ketersediaan lahan dengan lokasi yang baik dan harga terjangkau, infrastruktur yang minim, pasokan bahan bangunan yang berkualitas dan murah sulit tersedia, mahalnya perizinan dan masih besarnya pajak terkait perumahan terutama untuk rumah segmen bawah. Penyebab dari sisi *demand* diantaranya terbatasnya penghasilan masyarakat dalam menyediakan uang muka rumah maupun kemampuan untuk mengangsur cicilan, bank-bank umum di Indonesia lebih banyak melayani pembiayaan rumah segmen menengah ke atas, dana perbankan umumnya berjangka pendek sehingga rentan *maturity mismatch* dan penyediaan dana jangka panjang dari pasar modal masih terbatas. Penyelesaian *backlog* rumah di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan upaya yang komprehensif oleh seluruh *stakeholders* perumahan, terutama oleh Pemerintah. Sejalan dengan penyelesaian *backlog*, pada tahun 2015 secara serentak Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat. Tujuan program tersebut adalah untuk menyediakan kebutuhan rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mempercepat penyelesaian *backlog* perumahan nasional. Perseroan memiliki peran strategis dalam program pembangunan perumahan nasional khususnya mendukung Program Sejuta Rumah dari Pemerintah. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank utama untuk mensukseskan program ini.

Laporan Direksi

Melihat prospek usaha industri perbankan nasional dan bisnis KPR, termasuk di dalamnya Program Sejuta Rumah yang sangat menjanjikan di tahun 2016 tersebut, Perseroan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih setiap peluang dan potensi yang tercipta. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan, Direksi optimis bahwa prospek usaha di masa yang akan datang akan cerah. Hal ini ditopang dengan yang dimiliki oleh Perseroan diantaranya sebagai berikut.

1. Bisnis Perseroan fokus di bidang perumahan
2. Produk KPR BTN memiliki *brand* yang kuat sebagai *market leader* khususnya pada segmen menengah bawah,
3. *Customer base* nasabah KPR besar
4. *Relationship* dengan *stakeholder* perumahan

Kami memiliki keyakinan yang kuat dapat segera mewujudkan Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk itu Perseroan telah menyiapkan strategi pengembangan usaha yang tepat, antara lain:

1. Fokus pada pembiayaan perumahan untuk mendukung program Sejuta Rumah,
2. Aliansi strategis dengan lembaga negara, BUMN, dan Pemda, untuk mendukung program Sejuta Rumah,
3. Opsi menggunakan dana FLPP yang saat ini berada di giro program menjadi instrumen modal subordinasi,
4. Menggunakan *customer base* nasabah KPR untuk memperoleh dana murah yang semakin ketat,
5. Memanfaatkan *relationship* dengan *stakeholder* perumahan untuk menghadapi persaingan bisnis pembiayaan perumahan

Penerapan *Good Corporate Governance*

Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik GCG, tidak hanya selaras

dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices/standard internasional*. Bagi Perseroan, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan, investasi meniti tangga kesuksesan (*the most critical secret of success side*). *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*, merupakan *tagline* yang gencar dikampanyekan manajemen kepada segenap *stakeholders*.

Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan senantiasa menerapkan *standard* praktik GCG yang tinggi yang mengacu pada ketentuan OJK dan standar *internasional* sesuai *framework* ASEAN CG Scorecard yang selaras dengan parameter yang telah ditetapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Berbagai upaya intensif telah dilakukan sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian *Good Corporate Governance* pada Laporan Tahunan ini. Beberapa hal terkait dengan upaya intensif tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Struktur dan Mekanisme GCG

Perseroan telah memiliki struktur GCG yang kuat dan efektif yang terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ Perseroan tersebut telah menjalankan perannya masing-masing dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan

Laporan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi atas hasil kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Selama tahun 2015, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu yang tidak melewati batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 24 Maret 2015. Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 September 2015 dengan agenda Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan Nomor 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi Perseroan Nomor SKB-01/DIR-BTN/2015.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Hasil evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS. Adapun penilaian lainnya dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank

Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2015, Perseroan mendapat nilai komposit 2.

Dalam pelaksanaannya, organ Perseroan memiliki berbagai kebijakan/pedoman (GCG infrastruktur) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tujuannya antara lain:

- Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
- Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan.
- Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Perseroan dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ Perseroan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Manajemen Risiko

Untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis perbankan yang dinamis, maka Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai konsep strategis. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Perseroan secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko paling kurang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi Perseroan terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*. Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta *limit* Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan, strategi bisnis dan *risk appetite* Perseroan. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perseroan harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan *limit* Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan *limit* Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Perseroan secara keseluruhan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.

Bagian dari penerapan manajemen risiko adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran eksposur Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha sebagai acuan untuk melakukan pengendalian, setelah dilakukan pemantauan. Dalam proses penerapan manajemen risiko diatas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

4. Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh Pelaksanaan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan batasan wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit kerja, penetapan *limit-limit* yang memadai, kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perseroan serta pelaksanaan audit berkala dengan cakupan yang memadai.

Terdapat 8 Risiko yang dikelola Perseroan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Kedelapan risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Hasil penilaian risiko posisi Desember 2015 menghasilkan nilai peringkat risiko komposit 2 (*low to moderate*).

Laporan Direksi

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengawasan *intern* merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi acuan dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Beberapa tujuan Sistem Pengendalian *Internal* (SPIN) Perseroan adalah untuk memastikan:

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan), yaitu: untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan otoritas pengawasan Perseroan maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan *intern* yang ditetapkan Perseroan.
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (Tujuan Informasi), yaitu: untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perseroan (Tujuan Operasional), yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko), yaitu: untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perseroan secara berkesinambungan.
- Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dengan pengendalian *intern* yang baik diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran dan kinerja yang ditetapkan manajemen, menambah kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses pengelolaan risiko yang akurat dan memadai.

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian *intern* di Perseroan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian *intern* telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang telah dibentuk.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian *Internal* Perseroan senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian *intern*. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun *Internal Audit Division*.

Perseroan juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian *intern* secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi *intern* dan *ekstern* serta harus meningkatkan kapasitas SPIN tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Laporan Direksi

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

- Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
- Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian *intern*;
- Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
- Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
- Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
- Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Pada periode 2015, *Internal Audit Division* (IAD) melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektivitas SPIN Perseroan yang memadai, yang mencakup lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan pertemuan yang

telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite, *Internal Audit Division* dan beberapa divisi terkait dapat dikatakan bahwa Perseroan telah memiliki sistem pengendalian *internal* yang memadai.

Whistle Blowing System

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct* dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun WBS.

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian *internal* dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk:

- Melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran;
- Secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian Laporan Pelanggaran Mekanisme yang dibangun oleh Perseroan dalam menerapkan WBS adalah pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya kepada:

- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah pegawai Perseroan, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada Tim SPP/WBS. Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan modus lainnya yang dirasakan nyaman oleh Pelapor.
- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Tim SPP/WBS, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama Perseroan di Kantor Pusat dengan ditandai "*CONFIDENTIAL*" atau "*RAHASIA*" pada sampul surat.
- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang kemudian akan diteruskan ke Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris.

Laporan Direksi

- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang akan meneruskannya ke Direktur Utama.

Kepada Pelapor yang beritikad baik, Perseroan memberikan jaminan perlindungan, sebagai berikut:

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, email) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari si Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sepanjang tahun 2015, jumlah pengaduan yang masuk adalah sejumlah 101 pengaduan yang mencakup 20 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 38 pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung dan 43 pengaduan melalui Email. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 83 pengaduan telah selesai tanpa proses audit

lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 18 pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus).

Information Technology Governance

Perseroan senantiasa melakukan pengembangan dalam Teknologi dan Informasi (TI) sesuai dengan arahan kebijakan Rencana Bisnis Persero yang menetapkan bahwa Perseroan akan melakukan perubahan pada konsep *Branchless Banking* sehingga Perseroan dapat melayani seluruh nasabahnya dimana pun berada. Dalam hal pengembangan TI ke depan menuju *branchless banking*, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk mendukung kebijakan produk serta bisnis Perseroan.

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan tanggung jawab Direksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola korporasi dan terdiri atas kepemimpinan, kemampuan perencanaan, dan metode untuk memastikan dukungan dan keselarasan organisasi Teknologi Informasi terhadap strategi dan tujuan Perseroan.

Pengorganisasian seluruh kapasitas yang ada untuk menyusun formulasi strategi dan rencana Teknologi Informasi, mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif, dan mengelola operasional Teknologi Informasi untuk memberikan daya saing bagi organisasi.

Pemetaan dilakukan terhadap tata kelola proses Teknologi Informasi yang berjalan saat ini di Perseroan mengacu kepada kerangka kerja *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) yang terdiri atas 4 domain sebagai berikut:

- *Plan and Organise (PO)*
- *Acquire and Implement (AI)*
- *Deliver and Support (DS)*, dan
- *Monitor and Evaluate (ME)*

Untuk memastikan penerapan praktik GCG tersebut di atas, maka Perseroan secara konsisten telah melaksanakan *Third Party Assessment*, baik pada level nasional maupun internasional, sekaligus untuk mendapatkan *second opinion* terhadap

Laporan Direksi

kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Pada periode 2015, Perseroan telah melakukan penilaian yang dinilai oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) terhadap praktik *Corporate Governance* yang dinilai berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS); *League of American Communication Professionals* (LACP) yang berkedudukan di Amerika Serikat; *Annual Report Award* (ARA) yang diselenggarakan oleh OJK, BI, IAI, Departemen Keuangan, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Bursa Saham Indonesia dan Kementerian BUMN; *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG); *Indonesia Good Corporate Governance Award* 2015 yang diselenggarakan oleh IPMI *International Business School*; dan, serta Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Dapat kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari lembaga-lembaga independen tersebut menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. Pada level *internasional* Perseroan berhasil meraih prestasi sebagai satu-satunya bank BUMN yang mendapatkan predikat *The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard* 2015 di tingkat ASEAN. Hasil penilaian *ASEAN CG Scorecard* terhadap Perseroan mendapatkan predikat *EXCELLENT* (skor diatas 90). Artinya, Perseroan mampu memenuhi standar *internasional* praktik GCG yang ditentukan *ASEAN CG Scorecard/OECD* yang berada di atas skor rata-rata 100 perusahaan terbuka dan emiten dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia. Selain itu, penilaian LACP mendapatkan skor 98 dan mendapatkan 5 (lima) penghargaan sekaligus, yaitu:

1. *Best Letter to Shareholders*;
2. *Gold Award for Excellence within its Industry on The Development of The Organization*;
3. *Top 10 Indonesian Annual Reports of 2014*;
4. *Top 50 Annual Reports in the Asia-Pacific Region*;
5. *Top 100 Annual Report Worldwide*.

Sementara pada level nasional, hasil penilaian lainnya, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

- Penilaian ARA mendapatkan skor 80,24 yang mendapatkan juara III kategori BUMN *Listed*.
- Penilaian CGPI mendapatkan skor 85,75 dengan predikat *The Most Trusted Company*;
- Penilaian *Indonesia Good Corporate Governance Award* 2015 mendapatkan nilai di atas 92 yang merupakan skor tertinggi;
- Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2015 yang mencerminkan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Upaya Perseroan menerapkan GCG membuahkan hasil yang sangat memuaskan sebagaimana ditunjukkan dari pengakuan pihak eksternal tersebut di atas melalui penghargaan yang diraih oleh Perseroan selama periode 2015, baik pada tingkat nasional maupun *internasional*.

Berbagai penghargaan yang telah diterima bukan hanya sekedar formalitas, akan tetapi mencerminkan efektivitas implementasi GCG di Perseroan. Perseroan telah merasakan bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Sebagaimana uraian pada bagian Analisis Kinerja Perseroan diatas. dan dikuatkan dengan dari berbagai penghargaan pihak independen yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2015 sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian penghargaan dan sertifikasi, yang diantaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut: Kinerja Perseroan Sangat Bagus dari INFOBANK; Industri Keuangan BUMN selama tahun 2014 dari INFOBANK; Bank Berkinerja Terbaik dari PROPERTY dan BANK; *4th Best Overall Performance* Bank BTN Syariah dari INFOBANK dan MRI.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu dari penerapan GCG yang utama di Perseroan. Perseroan sangat menyadari bahwa pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang meliputi, nasabah, masyarakat, karyawan dan negara merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja berkelanjutan.

CSR merupakan hal penting dalam mendukung tumbuh kembangnya Perseroan. Perseroan

Laporan Direksi

menempatkan CSR sebagai bagian program jangka panjang perusahaan. Perseroan dalam upaya mencapai *sustainable business* senantiasa berusaha memberikan kinerja yang optimal untuk para pemegang saham namun juga memikirkan bagaimana memberikan kontribusi secara maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR meliputi CSR terkait dengan lingkungan hidup; CSR terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; CSR terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat; serta CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Selama 2015, kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan komitmen Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan. Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang utama. Dana CSR terkait dengan pelestarian alam di 2015 sebesar Rp473.330.492, mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp239.091.000.

Untuk CSR terkait dengan program ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selama 2015 antara lain adalah dengan memberikan kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh karyawan. Perseroan juga menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya yang diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas Perseroan. Jaminan kesehatan yang diterima seluruh karyawan berupa asuransi kesehatan untuk istri/suami dan anak.

Perseroan telah dan terus melakukan upaya penerapan K3 secara optimal untuk memperhatikan keselamatan lingkungan kerja dengan target *zero accident*. Selama tahun 2015, tidak terdapat kecelakaan kerja di Perseroan baik oleh pegawai tetap maupun pegawai *outsourcer*, sehingga rasio kecelakaan kerja sebesar 0%.

Terkait dengan pengembangan sosial masyarakat, sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (*good corporate citizenship*), Perseroan menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi Perseroan. Kebijakan yang dimiliki Perseroan dituangkan dalam bentuk komitmen untuk membangun kesejahteraan bersama melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan.

Perseroan telah memberikan beberapa santunan kepada berbagai pihak yang memerlukan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana terkait kegiatan CSR pada tahun 2015 sebesar Rp4.123.940.998.

Dalam menerapkan CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) berbasis web, Program *Engagement* Nasabah dan Program Peningkatan Layanan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Direksi menilai bahwa selama 2015, komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut.

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Perkreditan
- *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
- Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Laporan Direksi

- Komite Personalia
- Komite Produk

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Perseroan sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko. Selama 2015, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut.

1. Usulan peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di Tahun 2015,
2. Evaluasi *self assessment* profil risiko,
3. Melakukan analisis Tingkat Kesehatan Perseroan,
4. *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Kebijakan Pengkreditan merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Sepanjang tahun 2015, Komite Kebijakan Perkreditan tidak mengadakan rapat. Rapat terkait kebijakan kredit dibahas pada rapat Direksi dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Asset and Liability Management Committee (ALCO) merupakan *Executive Committee* yang berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *asset and liabilities* dan pengambilan keputusan dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka *Asset Liability Management (ALMA)*. Sepanjang tahun 2015, *Asset and Liability Management Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja Perseroan secara periodik,
2. Monitoring perubahan suku bunga kredit kepada debitur,
3. Melakukan evaluasi kinerja kinerja *asset* dan *liabilities* dan Strategi rekomposisi dana pihak ketiga,

4. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan *cost of fund* dana pihak ketiga,
5. Melakukan evaluasi penyesuaian tingkat suku bunga kredit konsumen,
6. Melakukan evaluasi kinerja likuiditas dan rekomposisi dana pihak ketiga,
7. Melakukan evaluasi strategi pencapaian pertumbuhan total dana pihak ketiga.

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan *Executive Committee* yang berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang Teknologi Informasi. Sepanjang tahun 2015, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengembangan IT *Project Charter* dan Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (RSTIK) Tahun 2016 – 2018.

Komite Personalia merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Sepanjang tahun 2015, Komite Personalia telah mengadakan 14 (empat belas) kali rapat terkait dengan pemenuhan kebutuhan pegawai.

Komite Produk merupakan komite yang membantu Direksi dalam melakukan evaluasi kesesuaian dan pengembangan produk baru. Selama tahun 2015, Komite Produk telah melakukan Pengembangan menuju transformasi *digital banking* Perseroan.

Laporan Direksi

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2015 komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2015, RUPST menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Hulmansyah dan Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai anggota Direksi Perseroan.

RUPST 2015 menyetujui mengangkat Sdr. Adi Setianto, Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Sulis Usdoko dan Sdr. Oni Febriarto R. sebagai anggota Direksi Perseroan. Dengan adanya perubahan anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2015 adalah menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Maryono
Direktur	: Irman Alvian Zahiruddin
Direktur	: Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	: Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Adi Setianto
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Sulis Usdoko
Direktur	: Oni Febriarto R.

Perubahan ini dipandang sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk memenuhi tuntutan bisnis, mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis sebagaimana yang dituangkan dalam program transformasi, termasuk mensukseskan program Sejuta Rumah, berdasarkan evaluasi dari pemegang saham pengendali dan rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penutup

Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2015. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang terjadi di industri perbankan. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2015.

Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2015.

Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu bertahan dan bahkan senantiasa menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Kedepannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa Perseroan akan menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, Maret 2016
Atas nama Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.


Maryono
Direktur Utama

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian *internal* perusahaan sudah cukup memadai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2016

Dewan Komisaris



Arie Coerniadi
Komisaris Independen



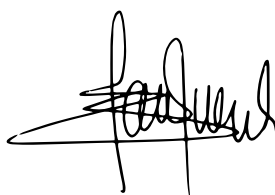
Catherinawati Hadiman
Komisaris Independen



Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen



Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris



Fajar Harry Sampurno
Komisaris

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian *internal* perusahaan sudah cukup memadai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2016

Direksi



Maryono

Direktur Utama



Irman Alvian Zahiruddin

Direktur



Iman Nugroho Soeko

Direktur



Mansyur Syamsuri Nasution

Direktur



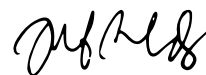
Sulis Usdoko

Direktur



Adi Setianto

Direktur



Oni Febriarto R

Direktur



Sis Apik Wijayanto

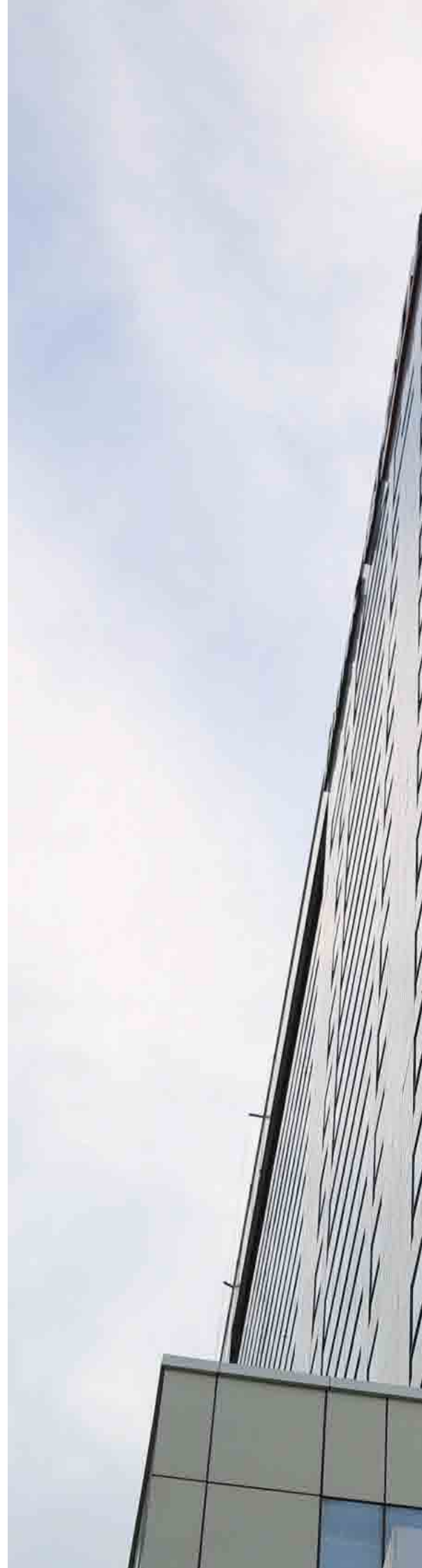
Direktur

03

Profil Perusahaan



Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai Pemimpin pembiayaan perumahan, Perseroan bercita-cita menjadi *The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service.*





Identitas Perusahaan



Perseroan terus meningkatkan jumlah jaringan kantor dan juga pada tahun 2015 perseroan juga menambah 5 (lima) *outlet* prioritas di seluruh Indonesia

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Bidang Usaha

Bank Umum

Tanggal Pendirian

9 Februari 1950

Dasar Hukum Pendirian

Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950

Kepemilikan

Pemerintah Republik Indonesia 60,04% Masyarakat 38,96% Karyawan 1,00%

Modal Dasar

Rp10.239.216.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp5.291.172.500.000

Modal Dasar

Rp10.239.216.000.000

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

17 Desember 2009

Kode Saham

BBTN

Alamat Kantor Pusat

Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta
10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704
www.btn.co.id
email: csd@btn.co.id

Riwayat Singkat



Riwayat Singkat



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki sejarah yang sangat panjang di industri perbankan di Indonesia. Bank BTN telah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Di era kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963.

Pada tahun 1974, Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Perseroan mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman.

Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama lebih dari enam dekade, dalam menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR, baik KPR Subsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan juga sukses meningkatkan posisinya menjadi peringkat ke-10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset serta penyaluran kredit. Dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan, Perseroan bercita-cita menjadi *The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service*. Saat ini, Perseroan fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni perbankan konsumen, perbankan komersial dan perbankan syariah. Pada tahun 2015 Perseroan berperan penting dalam membantu program Pemerintah: Sejuta Rumah Untuk Rakyat, Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui pembiayaan KPR.

Brand Perusahaan

Identitas *brand* Bank BTN terdiri dari simbol, huruf logo, serta warna. Simbol terdiri dari dua bentuk, yaitu simbol primer berbentuk atap rumah yang disusun oleh dua pola segienam besar dan kecil serta simbol sekunder berbentuk garis berwarna merah. Huruf logo terdiri dari kata Bank yang terletak di sisi kiri simbol primer dan kata BTN yang terletak di kanan simbol primer serta di atas simbol sekunder. Simbol-simbol menggambarkan arti sbb:

Atap rumah menggambarkan visi dan misi utama Perseroan sebagai lembaga pemberi Kredit Pemilikan Rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dua pola segi enam besar dan kecil, melambangkan makna "yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil".

Simbol atap rumah dengan kesan tiga dimensi yang berbentuk ruang, melambangkan keleluasaan Perseroan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.

Tiga Dimensi yang terbentuk dari 4 Pilar Kokoh berarti menunjukkan keamanan dan keluwesan Perseroan.



Sahabat Keluarga Indonesia

Simbol garis merah di bawah kata BTN diartikan sebagai kepercayaan diri.



Warna biru melambangkan kematangan Perseroan yang berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional.



Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.



Warna merah melambangkan kepercayaan diri sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. no. 7 tanggal 12 Oktober 2009, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat Dagang Berjangka Waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi aset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai syarat bahwa Perseroan di kemudian hari harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- p. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
- q. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk dan Jasa



Perbankan Konsumer

Perbankan konsumer ditujukan untuk nasabah perorangan yang terdiri dari Produk Kredit dan Produk Simpanan. Produk Kredit terbagi menjadi empat, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan Lainnya dan Kredit Konsumer. Sedangkan Produk Simpanan terbagi menjadi dua, yaitu Tabungan dan Deposito.

Produk Kredit

Produk Kredit Bank BTN terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Produk Kredit perumahan mencakup KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Adapun uraian terkait Produk Kredit Perbankan Konsumer sebagai berikut.

KPR Subsidi

Kredit pemilikan rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan suku bunga

rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Produk KPR Subsidi mencakup KPR RSH KLBI Relending, KPR RSH APBN, KGU RSH, KP Rusun, KPR BTN Sejahtera Tapak, KPR BTN Sejahtera Susun, dan KPR SSA/SSB Tapak dan Susun.

a. KPR Rumah Sehat KLBI Relending

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah sederhana sehat yang dibeli dari pengembang dan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga berjenjang dan suku bunga pada masa subsidinya disubsidi oleh Bank Indonesia.

b. KPR RSH APBN

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah sederhana sehat yang dibeli dari pengembang untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga berjenjang dan suku bunga pada masa subsidinya disubsidi oleh Pemerintah.

Produk dan Jasa

Bank BTN senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan berbagai macam produk baik dalam produk pembiayaan, simpanan, maupun produk syariah.

c. Kredit Griya Utama RSH

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah sederhana sehat khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap sepanjang waktu kredit dan pendanaan kreditnya dibiayai oleh Pemerintah.

d. KPR Rusun

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah sederhana sehat susun khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap sepanjang waktu kredit dengan uang muka yang disubsidi oleh pengembang.

e. KPR BTN Sejahtera Tapak

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah tapak yang dibeli dari pengembang dan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit dan dana untuk pembiayaannya merupakan *sharing* dana pemerintah dan bank.

f. KPR BTN Sejahtera Susun

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah susun yang dibeli dari pengembang dan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit dan dana untuk pembiayaannya merupakan *sharing* dana pemerintah dan Perseroan.

g. KPR SSA/SSB Tapak dan Susun

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah yang dibeli dari pengembang dan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit kepada debitur dan suku bunga pasar yang disubsidi oleh Pemerintah.

KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR

non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan Kredit Ruko.

a. KPR BTN Platinum

Fasilitas kredit untuk membeli rumah baru atau lama, dalam proses pembangunan (*indent*) maupun memindahkan pembiayaan dari bank lain (*take over*), dengan pelayanan cepat dan mudah.

b. KPA BTN

Fasilitas kredit untuk membeli apartemen/konominium baru atau lama, dalam proses pembangunan (*indent*) maupun memindahkan pembiayaan dari bank lain (*take over*), dengan pelayanan cepat dan mudah.

c. Kredit Ruko BTN

Fasilitas kredit untuk membeli unit rumah toko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

Kredit Perumahan Lainnya

Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, Perseroan juga menawarkan produk-produk kredit terkait perumahan lainnya yang terdiri dari Kredit Agunan Rumah BTN, Kredit Bangun Rumah BTN, PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan BTN, PRR-KB Ketenagakerjaan BTN, TBUM Bapertarum, dan TBM Bapertarum.

a. Kredit Agunan Rumah BTN (KAR) BTN

Fasilitas kredit multiguna yang dapat digunakan untuk renovasi rumah, pembelian isi rumah, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya, dengan cara agunan rumah/apartemen/ruko.

b. Kredit Bangun Rumah BTN

Fasilitas kredit untuk membangun rumah idaman di atas lahan milik sendiri

c. PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan

Fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk uang muka pembelian rumah atau apartemen bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan (d/h Jamsostek) yang telah direkomendasikan.

Produk dan Jasa

Pinjaman ini diberikan kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat PUM-KB, untuk tujuan pembayaran uang muka pembelian rumah dengan jangka waktu PUM-KB fleksibel sampai dengan 15 tahun dan tidak melebihi jangka waktu KPR dengan suku bunga sebesar 6%.

d. PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan

Fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk renovasi rumah bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan(d/h Jamsostek) yang telah direkomendasikan BPJS Ketenagakerjaan. Pinjaman ini diberikan kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat PRR-KB, dengan tujuan untuk mengembangkan/ memperbaiki rumah, dimana pinjaman ini diajukan, disetujui, diberikan bersamaan dan beragunan secara paripasu dengan KAR. Keunggulan PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang fleksibel sampai dengan 10 tahun dan tidak melebihi jangka waktu KAR, suku bunga 6%, maksimal kredit sampai dengan Rp50 juta dan tidak melebihi 50% dari total pinjaman (Kredit Agunan Rumah BTN ditambah PRR-KB Jamsostek).

e. TBUM BTN Bapertarum

Fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk tambahan uang muka pembelian rumah atau apartemen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan dan ditujukan bagi golongan I, golongan II dan golongan III, dengan sumber dana berasal dari dana iuran Taperum-PNS.

f. TBM Bapertarum

Fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk tambahan biaya membangun rumah yang didapat bersamaan dengan Kredit Bangun Rumah.

Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai.

a. Kredit Ringan BTN (Kring BTN)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/ instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.

b. Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Bank BTN.

c. Kredit Swadana BTN

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang.

d. Kredit Pegawai

Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Produk Simpanan

Perseroan juga menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan nasabahnya, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Produk simpanan tersebut dimanfaatkan Perseroan dalam menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sejalan dengan strategi perusahaan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Tabungan

Produk Tabungan Bank BTN pada Segmen usaha Perbankan Konsumer mencakup produk Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN e'BATARAPOS, Tabungan BTN Cermat, Tabungan BTN Perumahan, Tabungan BTN Prima, dan Tabungan lainnya. Tabungan Lainnya terdiri dari Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabunganku. Adapun uraian terkait produk tabungan ialah sebagai berikut.

a. Tabungan BTN Batara

Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah.

Tabungan BTN Batara diklasifikasikan lagi berdasarkan segmen yang dituju, antara lain:

Produk dan Jasa

- **Tabungan BTN Batara Payroll**
Tabungan yang tersegmentasi untuk nasabah yang penyaluran gaji atau *salary creditingnya* melalui Bank BTN.
 - **Tabungan BTN Batara Pensiun**
Tabungan yang diperuntukkan bagi para pensiunan sebagai sarana penerimaan pensiun setiap bulan yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
 - **Tabungan BTN Batara Pendidik**
Tabungan yang tersegmentasi untuk nasabah yang berprofesi sebagai tenaga pendidik kerjasama.
- b. Tabungan BTN e'BATARAPOS**
Tabungan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat karena dapat melakukan transaksi di Kantor Pos *online* seluruh Indonesia.
- c. Tabungan BTN Perumahan**
Tabungan yang diperuntukkan dalam rangka membantu lebih banyak masyarakat di Indonesia menabung dengan tujuan membeli rumah, khususnya rumah pertama.
- d. Tabungan BTN Cermat Laku Pandai**
Tabungan yang memberikan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui EDC dan rekening ponsel sampai ke pelosok negeri tanpa harus datang ke kantor Bank.
- e. Tabungan BTN Prima**
Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik.
- f. Tabungan BTN Haji**
Tabungan yang diperuntukkan kepada calon jemaah haji yang akan mempersiapkan ibadan haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.
Tabungan BTN Haji terdiri atas:
- Tabungan BTN Haji Reguler
 - Tabungan BTN Haji Plus
- g. Tabungan BTN Junior**
Tabungan untuk Edukasi Menabung bagi anak-anak dengan usia sampai dengan 12 tahun.
- h. Tabungan BTN Juara**
Tabungan untuk edukasi keuangan dan transaksi sesuai kebutuhan generasi muda.
- i. Tabungan BTN Simpanan Pelajar**
Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- j. TabunganKu**
Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deposito

Deposito Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito Bank BTN adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

a. Deposito BTN

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga yang menarik yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

b. Deposito BTN Valas

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga yang menarik dalam bentuk mata uang asing.

Perbankan Komersial

Perbankan Komersial ditujukan untuk nasabah korporat yang terdiri dari Produk Kredit dan Produk Simpanan. Produk Kredit Komersial mencakup produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa Kredit Konstruksi BTN, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari Kredit UMKM, Kredit Linkage BTN, dan Kredit Korporasi. Produk Simpanan juga terbagi menjadi dua, yaitu Giro dan Deposito.

Produk dan Jasa

Produk Kredit

Produk Kredit Perbankan Komersial mencakup produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa Kredit Konstruksi BTN, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari kredit UMKM, Linkage Program dan Kredit Korporasi.

Kredit Perumahan

Konstruksi BTN

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk Pengembang/ Developer. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dll) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dll) berikut sarana dan prasarannya sepanjang berdasarkan penilaian Bank layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Bank BTN memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi. Dalam memutuskan pembiayaan kredit konstruksi, Bank BTN mempertimbangkan periode tenor kredit berdasarkan perkiraan waktu pembangunan dan pendapatan yang dihasilkan setelah proyek tersebut selesai dilakukan. Sebagai jaminan, Kredit Konstruksi BTN mengagunkan tanah dan properti yang dibangun.

Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, Linkage Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Linkage Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja BTN, Kredit Modal Kerja Kontraktor, dan Kredit Sindikasi.

a. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diperuntukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penyaluran kredit UMKM, Perseroan mengkategorikan nasabah usaha mikro sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dengan penjualan maksimal Rp300 juta per tahun. Untuk segmen ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp100 juta. Adapun nasabah Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp500 juta atau penjualan maksimal Rp2,5 miliar per tahun. Bagi usaha kecil ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp500 juta.

Sementara, Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp10 miliar atau penjualan maksimal Rp50 miliar per tahun. Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp5 miliar.

b. Kredit Linkage BTN.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan/dijamin kepada sektor Usaha Kecil dan Mikro (produktif) serta sektor konsumtif. Salah satu mitra Perseroan dalam Kredit Linkage BTN yang terbesar adalah Permodalan Nasional Madani (PNM).

c. Kredit Korporasi

- Kredit Investasi

Fasilitas pembiayaan proyek jangka panjang dalam jumlah hingga 70% dari total biaya proyek. Jatuh tempo pinjaman ini didasarkan pada proyeksi tanggal penyelesaian proyek dan proyeksi arus kas, dengan ketentuan seluruh jangka waktu kredit tidak melebihi 15 tahun. Kredit ini biasanya dijamin dengan proyek yang dibiayai dan pencairan kredit ditentukan dari prestasi pembangunan proyek. Apabila dalam investasi diperlukan/ dibutuhkan kredit modal kerja maka kredit modal kerja yang dapat diberikan adalah maksimum 75% dari kebutuhan modal kerja.

- Kredit Modal Kerja BTN

Kredit yang diperuntukan bagi nasabah untuk Pembiayaan usaha industri perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual dengan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 80% dari kebutuhan modal kerja. Sedangkan untuk jangka waktu kredit dapat mencapai 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang.

- Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)

Fasilitas kredit modal kerja untuk membantu kontraktor menyelesaikan pekerjaan mereka berdasarkan kontrak

Sejak 2015 Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank pelaksana Program Sejuta Rumah untuk Rakyat. Hal ini tentu saja dikarenakan reputasi Bank BTN yang sangat baik dalam pembiayaan KPR. Pangsa pasar pembiayaan KPR subsidi Bank BTN sebesar 98%.

Produk dan Jasa

tertentu dalam jumlah hingga 60% dari nilai kontrak. Jatuh tempo kredit ini biasanya tidak dapat melebihi jangka waktu dalam kontrak dan kredit ini umumnya dijamin dengan nilai kontrak dan agunan aset tetap lainnya. Kredit ini umumnya dikenakan bunga mengambang pada tingkat lebih tinggi dari KPR non subsidi.

- **Kredit Sindikasi**
Pinjaman atau kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu.

Produk Simpanan

Di samping menyalurkan kredit, Perseroan juga menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial. Adapun produk-produk pendanaan komersial yang diterbitkan oleh perseroan antara lain giro dan deposito berjangka lembaga.

Giro BTN

Giro BTN merupakan simpanan transaksional pihak ketiga dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, dan Surat Perintah Pembayaran.

- a. **Giro BTN Rupiah**
Giro BTN Rupiah merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, dan Surat Perintah Pembayaran.
- b. **Giro BTN Valas**
Giro BTN Valas merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan Surat Perintah Pembayaran.

Deposito BTN

Deposito Bank BTN merupakan simpanan berjangka untuk investasi

dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank. Manfaat Deposito Bank BTN adalah bunga menarik ; pembayaran bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, dipindahbukukan ; jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

- a. **Deposito BTN Rupiah**
Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.
- b. **Deposito BTN Valas**
Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.
- c. **Deposito On Call (DOC) BTN Rupiah**
DOC BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah Bank BTN menawarkan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan berbagai Produk Pembiayaan dan Produk Pendanaan. Melalui beragam produk dan layanan perbankan dengan skema keuangan yang bervariasi, serta beroperasi dengan prinsip bagi hasil, Unit Usaha Syariah Bank BTN menjadi alternatif solusi

Strategi di bidang pendanaan difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kredit khususnya program Sejuta Rumah, adapun strategi yang akan dikembangkan adalah meningkatkan dana pihak ketiga murah, kerjasama dengan institusi pemilik dana besar untuk pembiayaan KPR program, dan meningkatkan *wholesale funding*.

Produk dan Jasa

perbankan yang kredibel dan menguntungkan bagi segenap segmen masyarakat Indonesia. Produk Unit Usaha Syariah terbagi menjadi Produk Pembiayaan dan Produk Simpanan. Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi pembiayaan Konsumer dan pembiayaan Komersial. Produk Simpanan Unit Usaha Syariah terdiri dari produk Giro, Tabungan, dan Deposito. Sedangkan Jasa dan Layanan terdiri dari Kartu Debit Visa BTN Syariah, Kiriman Uang, BTN Cash Management, Payment Point BTN iB, Payroll BTN iB, Penerimaan Biaya Perjalanan Haji, SPP Online BTN iB, Program Pengembangan Operasional BTN iB, Garansi Bank BTN iB, dan *Safe Deposit Box* BTN iB.

Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi pembiayaan Konsumer dan pembiayaan Komersial. Uraian terkait produk pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut.

Pembiayaan Konsumer

a. KPR Sejahtera BTN iB

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan akad "Murabahah" (jual beli) dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Susun, atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

b. KPR Platinum BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (Jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.

c. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (Jual Beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

d. KPR Indent BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *istishna'* (Jual Beli atas dasar pesanan),

dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

- Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

- Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad "Kafalah bil Ujroh" yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad "Murabahah" yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya

Pembiayaan Komersial

- Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad "Musyarakah" (Kerjasama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

- Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad "Mudharabah" (Bagi Hasil), atau "Musyarakah"

Produk dan Jasa

(Kerjasama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

- **Pembiayaan Investasi BTN iB**
Pembiayaan dengan prinsip “Murabahah” (Jual beli) atau “Musyarakah” (Kerjasama) yang diberikan kepada nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- **Pembiayaan Sindikasi BTN iB**
Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu Nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad “Mudharabah” (Bagi Hasil), “Musyarakah” (Kerjasama), “Murabahah” (Bagi Hasil), atau “Ijarah” (Sewa).

Produk Simpanan

Produk Simpanan Unit Usaha Syariah terdiri dari produk Giro, Tabungan, dan Deposito. Uraian terkait produk Simpanan Unit Usaha Syariah diuraikan sebagai berikut.

Giro

- a. **Giro BTN iB**
Produk simpanan dengan prinsip “Wadiah” (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
- b. **Giro BTN Prima iB**
Produk simpanan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

Tabungan

- a. **Tabungan BTN Batara iB**
Produk simpanan dana berakad “Wadi’ah” (Titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- b. **Tabungan BTN Prima iB**
Produk simpanan dana berakad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- c. **Tabungan BTN Qurban iB**
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah qurban dengan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d. **TabunganKu iB**
Produk simpanan dengan akad Wadi’ah (Titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. **Tabungan BTN Sempel iB**
Khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.
- f. **Tabungan BTN Sempel iB**
Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.

Deposito

- a. **Deposito BTN iB**
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil).

Produk dan Jasa

b. *Deposito On Call* BTN iB

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil)

Jasa dan Layanan Perbankan

Jasa dan Layanan Perbankan yang dimiliki Perseroan diantaranya berupa kartu konsumen, *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksadana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan Kiosk, CDM, *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa trading, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Adapun jasa dan layanan yang diberikan Bank BTN berdasarkan kegiatan usaha Perbankan Konsumer sebagai berikut.

Kartu Konsumer

Kartu Konsumer ini mencakup produk Kartu ATM/ Debit BTN dan Kartu Kredit BTN.

a. **Kartu ATM / Debit BTN**

Kartu ATM BTN juga berfungsi sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online*. Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN Visa e-Batarapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN.

b. **Kartu Kredit BTN**

Kartu Kredit BTN membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat.

c. **Kartu Suka-Suka BTN**

Kartu Suka-Suka BTN adalah Kartu Debit BTN Visa dengan desain *customize* sesuai dengan keinginan nasabah, yang diperuntukkan untuk nasabah individual ataupun komunitas.

d. **Debit BTN Online VBV (Verified by Visa)**

Dengan Debit BTN *Online* nasabah dapat menggunakan Kartu Debit BTN Visa yang dimilikinya untuk melakukan transaksi *online* (*e-Commerce*).

Wealth Management

Keberadaan bisnis *wealth management* Perseroan yang semakin lengkap mulai memberikan peningkatan pada perolehan *fee based income* khususnya *fee based income* yang didapat melalui penjualan *non banking product*. Dengan pembukaan layanan BTN Prioritas, Perseroan kemudian mengembangkan layanan dan produk yang dapat melengkapi keberadaan bisnis *wealth management*. Hal ini ditandai dengan peluncuran penjualan produk *Bancassurance* dan Reksa Dana yang bekerja sama dengan mitra asuransi dan *Manager Investasi* profesional di bidangnya. Bank BTN bekerja sama dengan PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk penjualan produk *Bancassurance*. Adapun untuk produk Reksa Dana, Perseroan bekerja sama dengan PT Trimegah Aset Manajemen, PT Bahana TCW Investment Management, PT Manulife Asset Management Indonesia dan PT Schroder Investment Management Indonesia. Perseroan menjadi agen penjual produk Surat Utang Negara secara lengkap, dimulai dari produk Sukuk Negara Ritel Seri SR 006, Saving Bonds Ritel Seri SBR 001, Obligasi Negara Ritel Seri ORI 011, Sukuk Negara Ritel Seri SR 007, dan Obligasi Negara Ritel Seri ORI 012.

Electronic Channel ATM

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi *premium* seperti *Gallery ATM* di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

Produk dan Jasa

CDM (*Cash Deposit Machine*)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai sehingga memudahkan dalam bertransaksi, cepat dan *realtime*. Dapat menerima denominasi uang Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

Pastikan uang yang akan disetorkan masih dalam kondisi layak dengan memperhatikan bahwa uang dalam kondisi tidak berlubang, tidak terstaples atau terikat karet dan sudah tersusun rapi.

ATM Non Tunai (Kiosk)

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak *modern, touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

SMS Banking

Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer service* di kantor cabang Bank BTN.

Untuk USSD tekan *141*15# dan kirimkan. Operator GSM yang mendukung adalah Telkomsel, Indosat, XL.

Tarif SMS dan USSD mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

Mobile Banking

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi *iMobile* BTN dari *Google Play, Blackberry World* dan *Apple Store*. Koneksi menggunakan jalur data *internet* sehingga lebih murah dan efisien.

Tarif data *internet* mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

Internet Banking

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan

dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media *internet*. Alamat *website*: <https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN.

Tarif data *internet* mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

Virtual Account

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerjasama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

EDC (*Electronic Data Capture*)

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

Cash Management

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi *internet*. Alamat *website*: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data *internet* mengikuti kebijakan masing-masing operator.

Branchless Banking

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan diluar wilayah jaringan kantor bank melalui kerjasama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan atau kerjasama dengan agen yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disebut LAKU PANDAI.

Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *fee based income*, seperti: Pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing,

Produk dan Jasa

Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran *internet* dan TV berlangganan, Pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa.

Selain itu, Sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain :

a. Garansi Bank

Merupakan layanan berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

b. BTN Cash Management

BTN Cash Management merupakan layanan *management* keuangan bagi nasabah giro lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan (pemantauan mutasi dan saldo, pencetakan rekening koran, *transfer*, pembayaran biaya operasional, *payroll* pegawai, multi debit, *cash pooling* dan *cash distribution*) melalui koneksi *internet* agar lebih mudah, efektif dan efisien.

c. Virtual Account BTN

Layanan bagi nasabah giro lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

d. Transfer Management

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah lembaga untuk membantu nasabah melakukan *transfer* dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (*transfer* ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). *Transfer* dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kodemata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

e. Payment Management

Payment management merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- *Edu Payment / SPP Online* BTN
- *Edu payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dll)
- Pembayaran Pajak
- Pembayaran pembelian produk Pertamina
- Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan
- Pembayaran luran BPJS Kesehatan
- Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
- Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
- Bank Operasional I dan II

f. Payroll Service BTN

Payroll Service merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.

Produk dan Jasa

Jasa dan Layanan Unit Usaha Syariah

Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan *transfer*, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

BTN Cash Management

Layanan berbasis *internet* dengan menggunakan aplikasi *web-browser* yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

Payment Point BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.

Payroll BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.

Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.

SPP Online BTN iB

Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery channel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.

Program Pengembangan Operasional BTN iB

Program yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* (GCG).

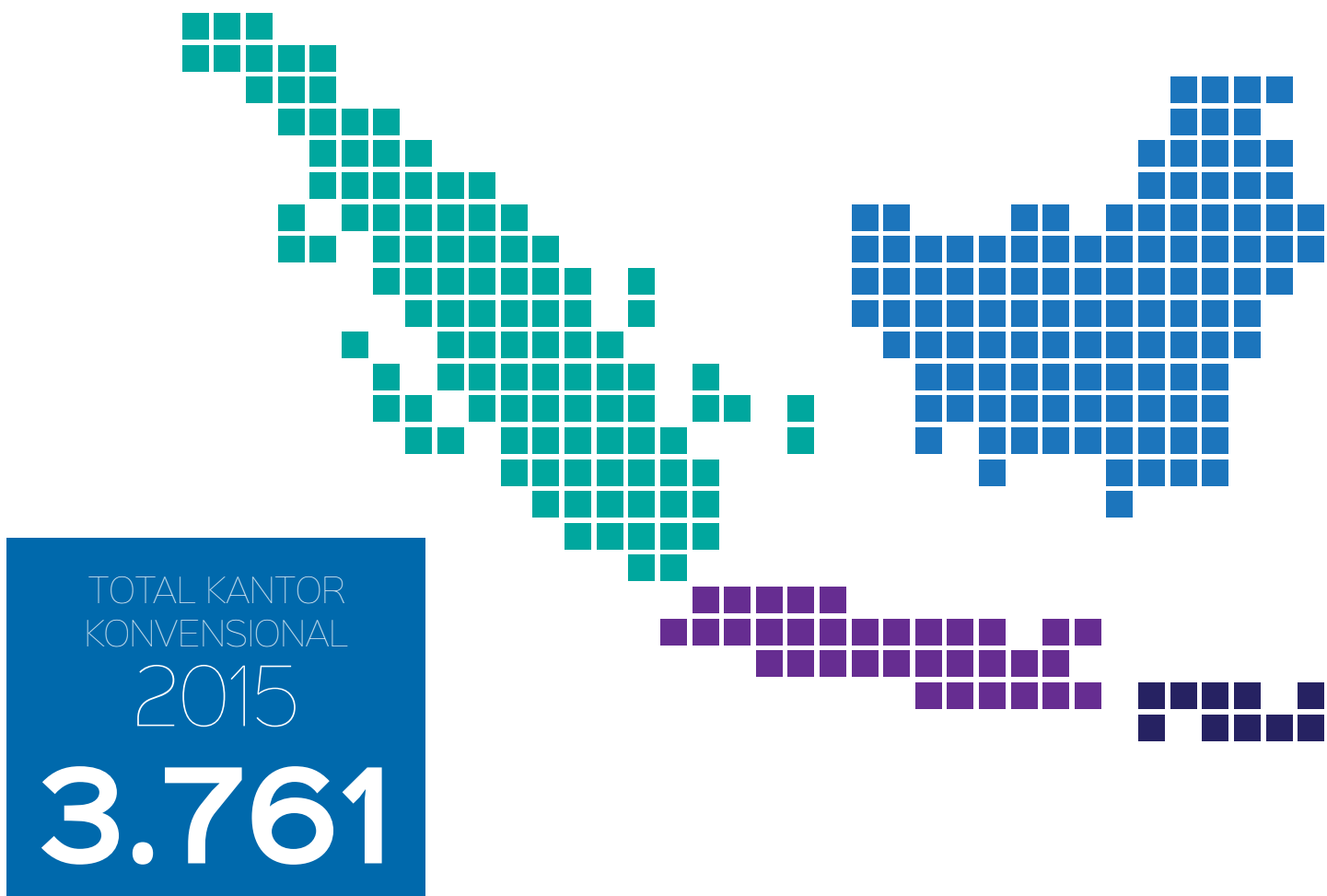
Garansi Bank BTN iB

Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad "Kafalah" (Garansi).

Safe Deposit Box BTN iB

Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi *system* pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan, dan lainnya. Akad yang digunakan adalah "Ijarah" (Sewa).

Peta Wilayah Operasional



Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah, Perseroan terus meningkatkan jumlah jaringan kantor. Pada tahun 2015 telah dibuka 1 Kantor Wilayah baru yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya peningkatan DPK, pemberian kredit, dan penurunan NPL di wilayah Indonesia Timur. Selain itu pada tahun 2015 perseroan juga menambah 5 (lima) *outlet* prioritas di seluruh Indonesia.

Jenis Kantor	2014	2015	(++)
Kantor Konvensional:			
Kantor Wilayah	3	4	1
Kantor Cabang	65	65	-
Kancapem	223	223	-
Kantor Layanan Setara KCP	3	3	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	2.948	2.948	-
Kantor Kas	479	479	-
Outlet Prioritas	34	39	5
Total Jaringan Kantor Konvensional	3.755	3.761	6
Kantor Syariah:			
Kantor Cabang Syariah	22	22	-
Kantor Cabang Pembantu Syariah	21	21	-
Kantor Kas Syariah	7	7	-
Total Jaringan Kantor Syariah	50	50	-

Peta Wilayah Operasional



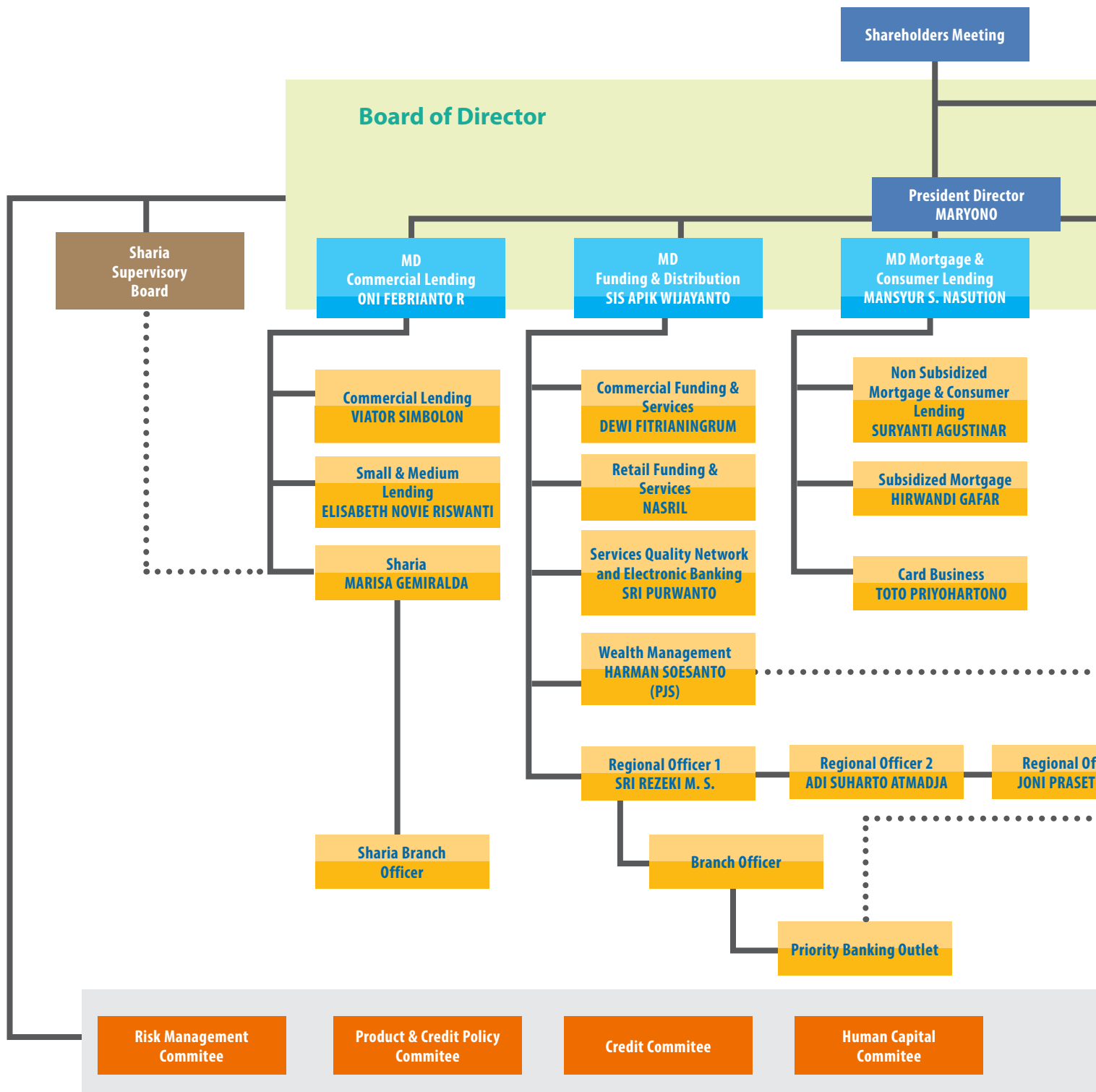
Berikut adalah data jaringan kantor Perseroan tiap pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel Jaringan Kantor pada Beberapa Pulau di Indonesia

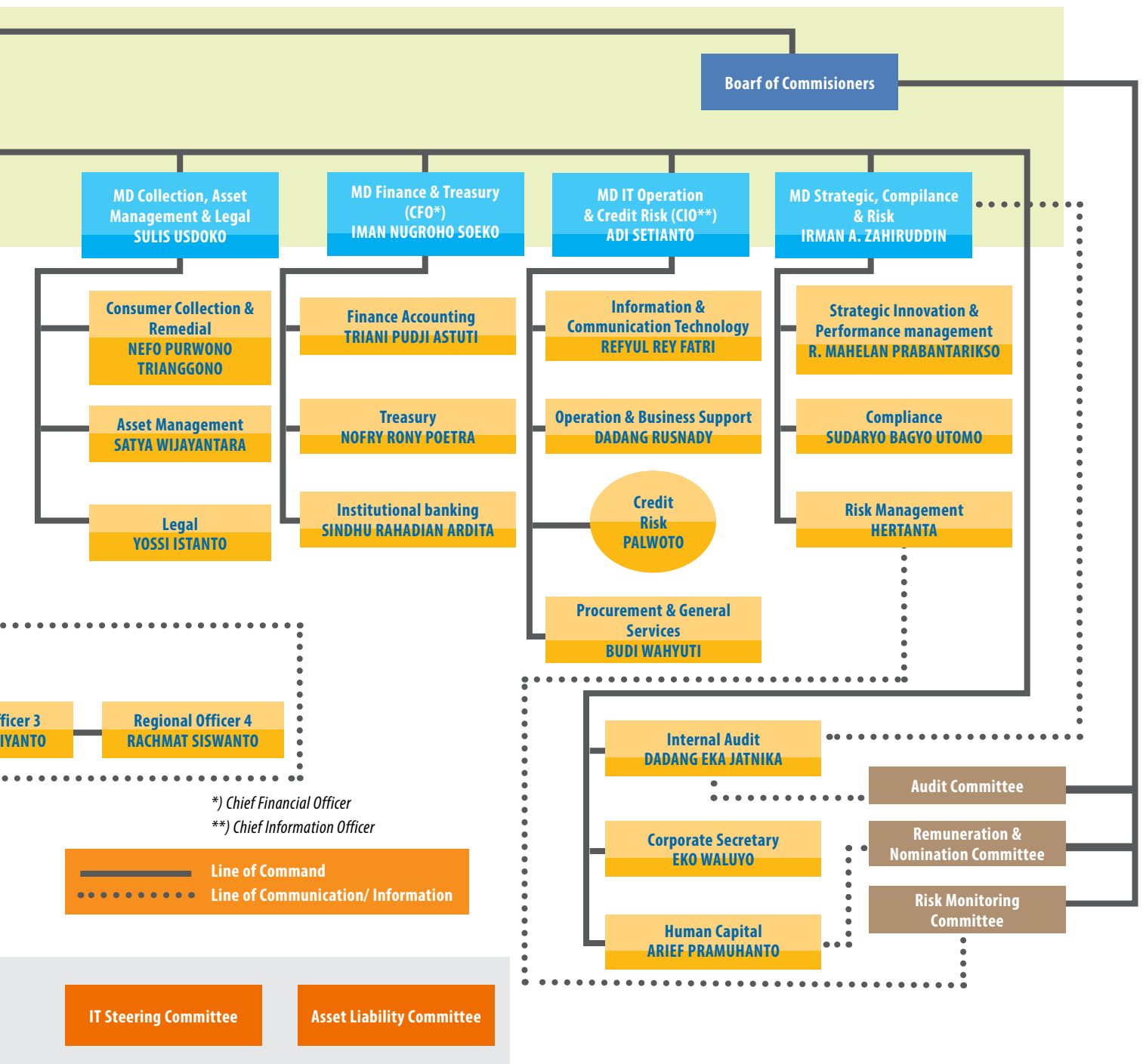
Jenis Kantor	Pulau						
	2015	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Kantor Konvensional:							
Kantor Wilayah	4	1	2	-	1	-	-
Kantor Cabang	65	11	38	5	5	3	3
Kancapem	223	34	158	10	13	5	3
Kantor Layanan Setara KCP	3	-	3	-	-	-	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	2.948	700	1.621	299	126	141	61
Kantor Kas	479	58	375	18	18	8	2
Outlet Prioritas	39	6	25	4	2	2	-
Total Jaringan Kantor Konvensional	3.761	810	2.222	336	165	159	69
Kantor Syariah:							
Kantor Cabang Syariah	22	4	15	2	1	-	-
Kantor Cabang Pembantu Syariah	21	1	19	-	1	-	-
Kantor Kas Syariah	7	1	6	-	-	-	-
Total Jaringan Kantor Syariah	50	6	40	2	2	-	-
Total Jaringan Kantor	3.811	816	2.262	338	167	159	69

Jumlah kantor per 31 Desember 2015

Struktur Organisasi Perusahaan



Struktur Organisasi Perusahaan



Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi Bank
yang Terdepan
dalam Pembiayaan
Perumahan

Diputuskan pada *workshop Leadership Forum* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 4-5 Desember 2015.

Misi

- Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah.
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
- Menyiapkan dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.
- Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

Budaya Perusahaan

BTN TERDEPAN GCG RUMAHKOE

Dengan memegang teguh norma GCG RUMAHKOE :

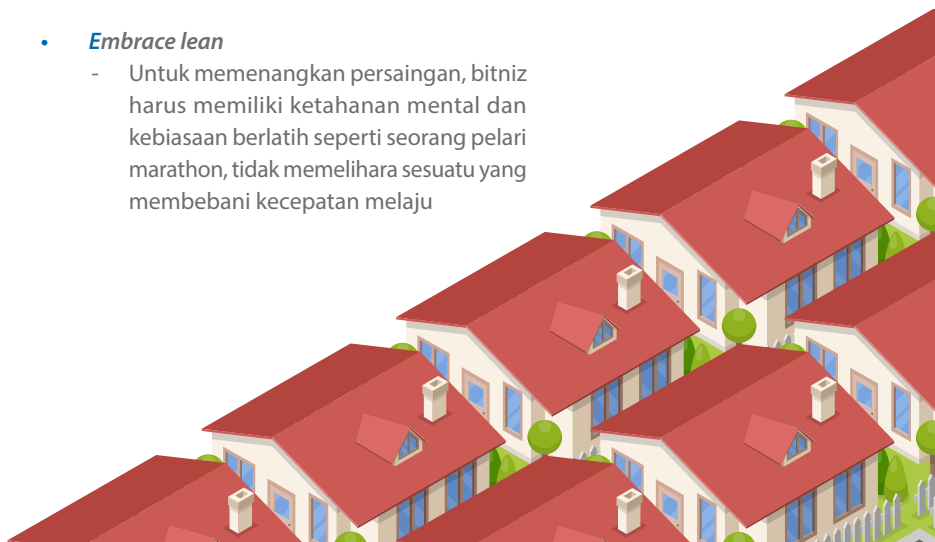
FOR ME GREAT IS NOT GOOD ENOUGH, CHALLENGES ARE ACCEPTED AND GREEN IS A MUST, THEREFORE I:

- **Reach for growth and learning opportunities**
 - Merupakan komitmen diri pribadi bitniz
 - Merupakan komitmen perusahaan memberdayakan SDMnya (*empowerment*) dan menjadikan SDM memandang perubahan sebagai kesempatan bukan ancaman
 - Merupakan komitmen BTN kepada *stakeholder* lainnya (asumsi *the best interest of the stakeholders* adalah pertumbuhan)
 - Organisasi yang ingin bertumbuh harus diisi oleh orang-orang yang terus ingin belajar dan bertumbuh yang tidak mengulangi kesalahan yang sama atau yang bisa dihindari
 - BTN berkomitmen menjadi organisasi yang pintar yang memperbaiki diri sehingga terhindar dan tidak membiarkan dirinya ditipu atau dicurangi
- **Utilize environmental friendly technology and innovation**
 - Pemanfaatan teknologi dan penerapan inovasi untuk menciptakan/menambah *competitive advantage* - sangat menentukan kemampuan bersaing
 - Inovasi adalah perubahan yang terencana dan terfokus pada penciptaan solusi dengan memperbaiki semua aspek/proses bisnis tanpa henti
 - BTN menghindari inovasi yang tidak berguna dengan mensyaratkan inovasi dilakukan dengan integritas tinggi dan mendatangkan *value added* karenanya dengan efisien
 - Teknologi yang digunakan dan inovasi yang diterapkan harus positif dampaknya terhadap lingkungan
 - Termasuk teknologi yang ramah lingkungan adalah *paperless business process*
- **Make interest of client and communities happen**
 - Merupakan *customer orientation* dari BTN
 - Harus dihindari nasabah diuntungkan tetapi masyarakat dirugikan oleh keuntungan yang dinikmati nasabah tersebut
 - Bitniz adalah problem solver dan dengan orientasi ini hasil yang ingin dicapai melampaui harapan lingkungan sehingga BTN dan bitniz akan dirasakan sebagai asset nasional



Budaya Perusahaan

- Dengan memperhatikan *interest of communities* maka BTN menghindarkan berbisnis di area yang tidak diminati masyarakat
- Memahami interest dari masyarakat adalah syarat untuk bertumbuh
- **Act accountable and dependable (Teamwork)**
 - Setiap Bitniz memiliki tanggung jawab dan memahami tanggung jawabnya serta tidak menghindari bertanggung jawab
 - Untuk dapat diberikan tanggung jawab Bitniz harus dapat diandalkan, tidak hanya bekerja bila diawasi atau diperintah atau diajari. Itulah sebabnya bitniz harus punya komitmen untuk belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik kapasitasnya
 - Keterukuran kinerja menjadi penting
 - Seorang yang diketahui oleh orang lain kinerjanya serta dapat diandalkan performanya dapat dipilih untuk menjadi anggota suatu tim atau memilih orang lain bagi anggota timnya untuk berbagi tugas dan tanggung jawab
 - Seseorang yang bertanggung jawab, mengakui perbuatannya, dapat diketahui orang lain kinerjanya dan dapat diandalkan dengan sendirinya menjadi teladan bagi yang mengetahuinya
- **Hate arrogance and dishonesty (Teamwork)**
 - Membenci kesombongan, jauh dari sifat sombong dan selalu bersifat jujur adalah sikap yang dibutuhkan untuk menjadikan bitniz gemar belajar dan mau terus bertumbuh serta mampu melihat kesempatan untuk belajar dan bertumbuh
 - Jika para bitniz bersifat sombong dan tidak jujur akan sulit membentuk tim yang anggotanya tidak saling tahu kekuatan dan kelemahannya satu sama lain
 - Tanpa kejujuran apalagi dan kesombongan tidak akan ada integritas
 - Tanpa kejujuran dan rendah hati akan sulit mendengar orang lain sehingga komunikasi tidak terbuka dan tidak akan efektif
 - Rendah hati dan Jujur adalah sifat utama yang membentuk integritas diri bitniz
- **Keep communication open (Teamwork)**
 - Syarat bagi memahami keinginan (minat) nasabah, masyarakat, teman sejawat dan setim serta untuk mengantisipasi hambatan/ rintangan dan untuk berdiskusi serta memecahkan kesulitan adalah komunikasi yang terbuka
 - Komunikasi yang terbuka menghindarkan penumpukan masalah sehingga masalah tidak menjadi terlalu sulit atau terlambat untuk dipecahkan, memungkinkan pembelajaran dan menjadi penyubur tumbuhnya inovasi
 - Komunikasi yang terbuka mempercepat pemahaman dan pengambilan keputusan serta membahagiakan karena setiap bitniz merasa dihargai sehingga memungkinkan diskusi yang mendukung inovasi ide dan karya bagi kemajuan BTN
 - Komunikasi yang tidak terbuka menimbulkan "*distrust*" dengan segala inefisiensi dan bahayanya bagi BTN
- **Organize concerted effort as a team player (Teamwork)**
 - Kerjasama dalam tim diibaratkan suatu konser, pemain musik bergiliran tampil solo, bersamaan membentuk keindahan suara dan saling percaya serta hormat karena tahu masing masing pemain bertindak dengan tanggung jawab dan kapasitasnya dapat diandalkan
 - Pemain yang tidak pernah berlatih bersama atau tidak rela memberikan kesempatan pada pemain lainnya untuk memimpin atau tampil solo beberapa saat akan merusak harmoni
 - Pemain yang diberikan kesempatan tidak memperpanjangnya bila yang giliran pemain lain tiba
- **Embrace lean**
 - Untuk memenangkan persaingan, bitniz harus memiliki ketahanan mental dan kebiasaan berlatih seperti seorang pelari marathon, tidak memelihara sesuatu yang membebani kecepatan melaju



Budaya Perusahaan



Komitmen pribadi setian insan
BTN dalam implementasi budaya
perusahaan

**Saya siap
melakukan**



perubahan, mulai dari diri saya, mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai saat ini.

**Saya akan
memberikan**



pengaruh positif kepada seluruh jajaran Pegawai Bank Tabungan Negara di Unit Kerja saya dan Unit Kerja lain untuk menjalankan Nilai Budaya Perusahaan Bank Tabungan Negara secara konsisten.

**Saya akan
bekerjasama**



dengan pimpinan dan sesama *Most Valuable Player* di Unit Kerja saya untuk mengakselerasi *internalisasi* Nilai Budaya Perusahaan Bank Tabungan Negara.

**Saya akan terus
memonitor
dan mengamati**



perilaku pegawai di Unit Kerja saya dan Unit Kerja lain dengan cara:

- Memberikan apresiasi segera bila ditemukan keselarasan dengan Nilai Budaya Perusahaan Bank Tabungan Negara; dan
- Mengingatkan segera bila ditemukan ketidakselarasan dengan Nilai Budaya Perusahaan Bank Tabungan Negara.



Profil Dewan Komisaris



Profil Dewan Komisaris



Profil Dewan Komisaris



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen*

Chandra M. Hamzah, 48 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Utama/ Independen Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 September 2015. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Indonesia. Saat ini tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data pada tahun 2007-2011 dan anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2000-2001.

*) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen

Kamaruddin Sjam, 68 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Independen Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Juni 2015. Meraih gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta pada tahun 1997. Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (2009-2014) dan Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2002-2007). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Lanang Bersatu. Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) oleh BPKP dan LAN pada tahun 2002; Program Studi Banding di Ghuangchou dan Shenchen, China pada tahun 2002; dan Short Term Training Programme on Auditing Objectives and Methods Applied to public Sector (Performance Audit) di Marseille, Perancis pada tahun 1999.

Profil Dewan Komisaris



Arie Coerniadi
Komisaris Independen

Arie Coerniadi, 47 tahun. Berdomisili di Tangerang. Diangkat sebagai Komisaris Independen Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Juni 2015. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Vice President di NISP Sekuritas (2010-2015), Group Head Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2010-2014), dan *Vice President* di Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Chief Finance Officer* di Sarana Global Indonesia sejak tahun 2011. Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Financial Market Operation* oleh New York Institute of Finance pada tahun 1998 di New York; *Securities Lending and Borrowing* di Amsterdam pada tahun 1996; dan *Global Custodian Services* oleh State Street pada tahun 1995 di Sydney.



Catherinawati Hadiman
Komisaris Independen

Catherinawati Hadiman, 50 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Independen Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Juni 2015. Meraih Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Diaspora Saraswati Gemilang (2013-sekarang). Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Direktur *Corporate and Commercial Banking* PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009) dan *Vice CEO* di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2012). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Risk Management Refreshment Program "Key Risk Management Challenges in 2014: Hardwiring Risk Management Process into Strategic Loan Growth, Capital Planning and Corporate DNA"* di Moscow, Rusia pada tahun 2014; *Workshop Managing Credit Risk in Retail Banking* di Bali pada tahun 2012; *Orchestrating Wining Performance* di Switzerland pada tahun 2011; dan *Global Macro Conference Asia* di Hong Kong pada tahun 2010.

Profil Dewan Komisaris



Sumiyati
Komisaris**

Sumiyati, 54 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 September 2015. Meraih gelar *Master of Financial Management (M.F.M)* dari Queensland University, Australia. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (periode 2015-sekarang) dan Komisaris PT Jiwasraya (Persero), (periode 2012-2015). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2009-2015.

***) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Fajar Harry Sampurno
Komisaris

Fajar Harry Sampurno, 49 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 September 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 7 Desember 2015. Meraih gelar *Doctor of Philosophy* dari University of Iowa, USA. Saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Dahana (Persero) pada tahun 2012-2015, dan Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2011-2012.

Profil Dewan Komisaris



Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris

Lucky Fathul Aziz Hadibrata, 58 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 27 Juli 2015. Meraih gelar *Master of Art (MA)* dalam bidang *Development Economics* dari Boston University, Massachusetts, USA pada tahun 1985. Pada tahun 1991, beliau meraih gelar *Master of Science (MS)* dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Saat ini beliau sebagai Direktur Utama Dana Pensiun OJK (Periode 2015–sekarang) dan sebelumnya menjabat sebagai Deputy Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK (2012 -2014). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung (2010-2012), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007-2010). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Leading and Managing People: Power and Relationships* oleh Wharton Business School University of Pennsylvania pada tahun 2014; *A New Era of Conduct Supervision: Consequences, Challenges, and Opportunities* oleh OJK, AusAID dan The World Bank pada tahun 2014 di Bali; *Workshop on Banking Supervision Indonesia FSA–Japan FSA* oleh OJK dan Japan FSA pada tahun 2014; dan *Strengthening the Asian Financial Sector Toward Sustainable and Inclusive Growth* oleh ADBInstitute pada tahun 2013 di Jepang.

Profil Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris



Sandra Firmania, SE. MH
Sekretaris Dewan Komisaris

Sandra, 45 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas pada tahun 1995. Beliau juga melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2007. Memulai karir sebagai PNS pada tahun 1996 melalui penerimaan PNS Depkeu dengan jabatan sebagai staf di Direktorat Perkebunan dan Kehutanan Ditjen Pembinaan BUMN Depkeu, Kepala Seksi di beberapa bagian pada Kementerian BUMN dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IIb pada Kementerian BUMN Penugasan di Komisaris BUMN diperolehnya sejak tahun 2003 sebagai staf dekom PT PPA (Persero), Sekdekom PT PPA (Persero), Sekdekom PT Pegadaian (Persero) dan Sekretaris Dewan Komisaris di Bank BTN sejak 31 Agustus 2014. Aktif mengikuti *training* dan pelatihan baik dalam dan luar negeri.



Waldi Gautama
Anggota Komite Audit

Waldy Gutama, 59 tahun. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 26 September 2013. Bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1981 dan memiliki pengalaman sebagai Pengawas Bank sejak 1989 dengan jabatan terakhir Pengawas Bank Madya (2006-2011). Beliau menamatkan pendidikan Sarjana di STIA-LAN RI pada 1988 dan memperoleh gelar *Magister Management* dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IPWI Jakarta pada 2000. Pelatihan yang telah diikutinya antara lain *Regulation and Supervision of Cooperatives Insurance Companies and Other Non Bank Financial Institution* (SEACEN Center) di Malaysia pada 1983. Pada tahun 1999 mengikuti kursus *In The Specialized Course in Bank Supervision* di Federal Reserve Bank of NYC, USA. Basel 2 Implementation in Bank Indonesia dan Bank of Thailand pada 2010.

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 736/DIR/2015 tanggal 2 Oktober 2013 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 26 September 2013 s.d 26 September 2015.

Profil Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris



Sondang Gayatri
Anggota Komite Audit

Sondang Gayatri, 56 tahun. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 26 September 2013. Sebelumnya beliau aktif di BNI sejak 1982 sampai Maret 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Wilayah. Menamatkan Sarjana pada 1983 dan diikuti dengan berbagai pelatihan diantaranya Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV pada 2012, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 serta Sertifikasi 4st Internasional (CWMA and IBI) pada 2011.

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 736/DIR/2015 tanggal 2 Oktober 2013 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 26 September 2013 s.d 26 September 2015.



Deddy Effendi Ridwan
Anggota Komite Audit

Deddy Effendi Ridwan, 57 Tahun. Berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 5 Oktober 2015, Memulai karir di Bank Niaga pada Tahun 1986 dengan jabatan terakhir sebagai *Controller-Asset Restructuring Project-Corp Banking* pada tahun 2014. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 dan melanjutkan pendidikan S2 Keuangan Bisnis di Universitas Atmajaya, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Keuangan dan Ekonomi Islam di Universitas Trisakti. Pelatihan yang telah diikuti antara lain EDP *Audit Training* (Citibank, Jakarta), *Financial Reporting for Audit Committee* (IKAI, Jakarta). Beliau juga melaksanakan Audit Benchmarking di UOB, Singapore-Chemical Bank, New York-Core State (PIB), Philadelphia-BONY, New York-Barclays, Coventry, England.

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 510/DIR/2015 tanggal 4 September 2015 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015.

Profil Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris



Nurani Raswindriati
Anggota Komite Pemantau Risiko

Nurani Raswindriati, 53 Tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak November 2015. Sarjana Akutansi, Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1986 dan meraih gelar *Magister Management* dari Universitas Gajah Mada. Memulai karirnya di Bank Niaga pada Tahun 1986 sampai dengan tahun 2007, selanjutnya beliau bergabung dengan Bank Permata sampai dengan tahun 2012. Sejak bulan Juli 2012 Beliau bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan April 2015 dengan jabatan terakhir *Senior Advisor, Policy and Standard Operating Procedure Development*. Mengikuti berbagai *training* antara lain: *Housing Finance Management and Managerial Effective Program*, Bombay - India. *Credit Risk Management, Loan Structuring, Institute of Banking and Finance*, Singapore. *Risk Management Certification Program*–Level I-III, *Kiran Executive Development Program*.

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 512/DIR/2015 tanggal 4 September 2015 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 2 November 2015.



Mohamad Helmy
Anggota Komite Pemantau Risiko

Mohamad Helmy, 57 tahun. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak Juni 2015. Menyelesaikan pendidikan sarjana Ekonomi di Universitas Jayabaya pada tahun 1984. Beliau memulai karir di Bank Bumi Daya pada tahun 1986 sampai dengan 1999, selanjutnya bergabung dengan Bank Mandiri sampai dengan tahun 2014, dengan jabatan terakhir sebagai *Team Leader Pricing Management – Market and Operational Risk Group* dan terakhir sebagai *Trainer and Consultant Risk Management*, PT Peak Pratama Indonesia. Mengikuti beberapa *training*, antara lain: *Managing Opportunity and Risk In Crisis* dari BARA (2009), *Leadership Training* dari INSEAD, Jakarta (2010), Level 1 dan 2-*Risk Management Certification, Certified by Global Association of Risk Professional (GARP) and Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), The Simulation Training at The Risk Games Conference 2013-Asian Banker*, Jakarta, April 2013.

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 362/DIR/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang pengangkatan anggota komite pemantau resiko PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 s.d 30 November 2015.

Profil Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris



Rudolf Tulus P. Sirait
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Rudolf Tulus P. Sirait, 36 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 Juni 2013. Memiliki pengalaman di bidang Perbankan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 di PT Bank Negara Indonesia dan menjabat berbagai posisi di berbagai perusahaan di Indonesia. Menamatkan gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret, Solo pada tahun 2003 jurusan Manajemen dan meraih Master *Management* di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Meraih gelar Certified Professional *Human Resources* (CPHR) pada tahun 2014.

Profil Dewan Pengawas Syariah



Ahmad Nazri Adlani
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Ahmad Nazri Adlani, 77 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Sebelumnya beliau aktif di bidang kemiliteran dengan pangkat terakhir Brigjen TNI (purn). Pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Utusan Golongan periode 1999 sampai dengan 2004 setelah sebelumnya menjadi Anggota MPR RI periode 1997 sampai dengan 1998, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia periode 1995 sampai dengan 2000, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI periode 2000 sampai dengan 2005, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI periode 2005 sampai dengan 2014 dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015 serta turut mendirikan Dewan Syariah Nasional MUI dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI periode 2016-2021 dan anggota Sidang Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI, Ketua Dewan Pengawas Syariah Mega Finance dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Sinar Mas Syariah. Pendidikan kemiliteran diperoleh di SUSBINMINU Departemen Hankam, SUSLAPA IF VII (Sekolah Perwira Infanteri AD) Bandung dan terakhir pada SUSCADOS BINTAL ABRI (Kursus Calon Dosen Pembinaan Mental ABRI) Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir, dan Fakultas Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, serta sempat belajar di Macquary University, Sydney, Australia.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2016.



Mohamad Hidayat
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Mohamad Hidayat, 47 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Aktif sebagai Dosen Pasca Sarjana di beberapa Perguruan Tinggi: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, *Islamic Economic and Finance* Universitas Trisakti, *Indonesia Banking School* dll. Beliau menamatkan studi S1 di Fakultas Syariah IAIN JAKARTA tahun 1991, meraih MBA dari IPWI Jakarta tahun 2000 dan MH dari STIH IBLAM di bidang Hukum pada tahun 2003, meraih gelar S3 Jurusan *Islamic Economic and Finance* UNIVERSITAS TRISAKTI tahun 2015. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain *Islamic Banking* di Langkawi Malaysia tahun 1998, Sistem Pengawasan yang diselenggarakan oleh YPPI tahun 1999, Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014 dan Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015. Saat ini aktif sebagai Instruktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Dewan Pembina pada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI. Beliau dikenal sebagai *mubaligh* dan saat ini tercatat sebagai Khatib tetap di Istana Presiden Republik Indonesia dan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1998 serta di Bank Indonesia sejak tahun 2003.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2016.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Muhammad Syakir Sula Anggota Dewan Pengawas Syariah



Muhammad Syakir Sula, 52 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 19 Juli 2010. Saat ini juga sebagai Anggota KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2014-Sekarang, Ketua V MES (2015-Sekarang), Pengurus DSN MUI-Dewan Syariah Nasional MUI (2005-Sekarang) serta Komisaris Jamkrindo Syariah (2015-Sekarang). Selain itu masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Panin Life Syariah, Central Asia Raya Syariah, Nasional Re Syariah, sejak tahun 2007. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2008-2014, Anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah-Bank Indonesia) tahun 2008-2012, CEO Batasa Tazkia Consulting (2006-2007), Staf Ahli Dewan Direksi Bank Muamalat (2005-2006) serta Direktur Marketing Asuransi Takaful dan Direktur Operasional Asuransi Takaful (1999-2005). Dibidang organisasi profesi pernah menjadi Ketua Umum AASI-Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2003-2007), Ketua Umum IIS-Islamic Insurance Society (2007-2012), Wakil Ketua Umum IAEI-Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2005-2010), Ketua PKES-Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (2008-2013), Ketua III IAEI (2010-2015), Pengurus MUI Pusat (2005-2015), Sekjen MES-Masyarakat Ekonomi Syariah (2005-2015). Menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1989, beliau merupakan salah satu Ahli Asuransi Syariah di Indonesia dengan gelar profesi AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*), QIP (*Qualified Insurance Practitioner*), dan CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*). Mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, antara lain *Workshop Perbankan Syariah*, *Training Internasional Perbankan and Finance Syariah*, *Training Bank Insurance*, *Pelatihan Sistem Manajemen Mutu-BNSP*, *Pelatihan Asesor Kompetensi-BNSP*, dll.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 379/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, SK terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 s.d 31 Desember 2016.

Profil Direksi



Profil Direksi



Profil Direksi



Maryono
Direktur Utama

Maryono, 59 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Utama Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012, dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Maret 2013. Meraih gelar MBA dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 1998. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mutiara mulai November 2008 sampai dengan Desember 2012. Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1982 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 2008, pernah menjabat sebagai *Group Head Jakarta Network Group* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2008), menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara Tbk. (2008-2012) Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Regional WSBI (*World Saving Bank Institute*) Kawasan Asia Pasifik sejak tahun 2015. Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Refreshment Sertifikasi Management Risiko* di Moscow, Rusia tahun 2014; *Negotiation Dynamics Programme*, INSEAD, Fontainebleau di Perancis pada tahun 2004 dan *Senior Executive Programme In Asia*, Michigan Business School, Hongkong pada tahun 2004. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.



Irman Alvian Zahiruddin
Direktur *

Irman Alvian Zahiruddin, 52 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012 dan dinyatakan efektif sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 27 Oktober 2015. Meraih gelar Master di Bidang *Finance and Investment* dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan menyelesaikan *Certified Wealth Management* di Erasmus University-MM UGM Jakarta. Beliau mengawali kariernya di Citibank sejak tahun 1989. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Consumer Group PT Bank Permata Tbk (2002–2006), Direktur Eksekutif Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional)(2007), Direktur di *GE Capital* dan PT GE Astra Finance (1999–2002). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Refreshment Sertifikasi Risk Management* di Tokyo tahun 2015; *The Aligning Strategy and Sales (ALIGN)*, Harvard Business School, HBS Campus, Boston, USA, 2014; *Course of Study in Housing Finance* yang diselenggarakan Wharton School University of Pennsylvania USA pada tahun 2008; Cambridge Executive Education Programme "*Shaping Our Future in The Global Recovery*", Inggris, tahun 2010 dan *Course High Impact Leadership*, New York, pada tahun 2012. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

*) Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Profil Direksi



Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur

Mansyur Syamsuri Nasution, 56 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Maret 2013. Meraih gelar *Master of Science* pada bidang *Resources Economics* tahun 1991 dari Colorado State University. Sebelumnya menjabat sebagai EVP Coordinator–Consumer Finance, Bank Mandiri (2008-2012). Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1983 di Bank Bumi Daya sampai dengan tahun 1997. Dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menduduki jabatan beberapa *Group Head* di Bank Mandiri. Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya Bank *risk Management Program Executives*, IBI dan LSPP di Hong Kong tahun 2014; *Aligning Strategy and Sales*, Harvard Business School, Boston USA pada tahun 2012; *Competitive Strategy Programme*, INSEAD Business School, Fontainebleau, France pada tahun 2011 dan *Creating Growth Opportunities*, Wharton Business School, Philadelphia, USA, pada tahun 2010. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.



Iman Nugroho Soeko
Direktur

Iman Nugroho Soeko, 60 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 25 Februari 2014 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Juni 2014. Meraih gelar *Master of Social Science* dari Univ. of Birmingham, Inggris pada tahun 1989. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Departement* (2006), *Group Head IBCMS Group Bank Mandiri* (2009–2010) dan *Chief Executive Bank Mandiri (Europe) Ltd.* (2010–2013). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Real Estate Management Program; Finance, Design and Leadership*, di Harvard Business School, HBS Campus, Boston, USA, tahun 2014; *Manager's Certification on the 4th Disciplines of Execution* Jakarta, tahun 2010; *Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance and Directorship*, di Bali tahun 2009. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Profil Direksi



Adi Setianto
Direktur

Adi Setianto, 54 tahun. Berdomisili di Tangerang. Diangkat sebagai Direktur Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 8 Juni 2015. Meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Drexel University, Pennsylvania, USA pada tahun 1992. Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1993, Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Direktur Jaringan dan Layanan (2014-2015) serta Direktur *Treasury and Financial Institution* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010–2014). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Liquidity Risk Management in Banks* oleh Fitch Learning di London pada tahun 2014; *Marketing Financial Solution* oleh Divisi LPN and Thierry Fuller (Blue Mountain Incorporated) pada tahun 2009; dan *Malcolm Baldrige Criteria for Executive Workshop* pada tahun 2007. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.



Sis Apik Wijayanto
Direktur

Sis Apik Wijayanto, 53 tahun. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Bank pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 1 Juni 2015. Meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988 dan *Magister Manajemen* dari Universitas Airlangga pada tahun 2007. Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta II di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2014–2015). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Wealth Management Seminar* pada tahun 2012; *Service Excellence Delivery Training* pada tahun 2008; *Leadership Training for Managers* oleh Dale Carnegie pada tahun 2006; dan *AVP Development Program, Value Driven Marketing Strategy* oleh MarkPlus Institute pada tahun 2005. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Profil Direksi



Sulis Usdoko
Direktur

Sulis Usdoko, 54 tahun. Berdomisili di Bekasi. Diangkat sebagai Direktur Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 1 Juni 2015. Meraih gelar *Magister Manajemen* dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003. Beliau memiliki pengalaman berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1986. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Retail Funding and Services Division Head* (2013–2015). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya program *Asia Regional Group Meeting oleh The World Savings Banks Institute* di Hanoi, Vietnam pada tahun 2014; *Fewer, Bigger, Bolder, from Mindless Expansion to Focused Growth* oleh MarkPlus, Inc. pada tahun 2014; *Effective Leadership Through Social Intelligence* oleh Stefan Ciesielski - Jakarta Post pada tahun 2013; dan *The Annual McAfee Executive Summit* oleh McAfee di Melbourne, Australia pada tahun 2010. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.



Oni Febriarto Rahardjo
Direktur

Oni Febriarto Rahardjo, 44 tahun. Berdomisili di Tangerang. Diangkat sebagai Direktur Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Mei 2015. Meraih gelar *Magister Manajemen* dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 1996. Beliau mulai berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Small and Medium Lending Division Head* (2013–2015). Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Certified Risk Management Level 5* pada tahun 2015; *Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 60* oleh LPPI pada tahun 2014; *Program Kunjungan Kerja Housing Development Finance Corporation* di India pada tahun 2010; dan *Smart Merger and Acquisition* oleh Indonesian *risk Professional Association (IRPA)* pada tahun 2008. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Profil Pejabat di Bawah Direksi



Eko Waluyo
Sekretaris Perusahaan

44 tahun, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk efektif sejak 1 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 233/DIR/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan Pejabat sebagai *Corporate Secretary* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Beliau memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Tim Sekuritisasi KPR, Manager Investor Relations dan Department Head Investor Relations sejak tahun 2011 sebelum diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan. Meraih gelar master (MM) dibidang finance dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Kentucky USA tahun 2004. Beliau juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan dan Seminar diantaranya: *The 1st Corporate Secretary Leadership Forum*, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Bangkok, Thailand (2015), *The Workshop Making Small-Scale Savings Work for Everyone in a Digitised World*, *The World Savings Bank Institute (WSBI)*, Washington DC, USA (2015), *Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, Jakarta, Indonesia (2015), *Workshop Peran dan Fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN*, Kementerian BUMN, Bandung, Indonesia (2015), Sosialisasi Peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN, Denpasar, Bali, Indonesia (2015), *The First Asean Marketing Summit*, Markplus Institute, Jakarta, Indonesia (2015), *Investor Relations Masterclass, Executive Workshop, the Investor Relations Society*, United Kingdom (UK) (2013), *"The First International Conference on Finance and Banking"*, Faculty of Economics and Business di Bali (2013), *Certified Investor Relations* (2012), Leadership di INSEAD Fontainebleau Paris (2010), *International Conference on Corporate Governance* di Birmingham UK (2010) dan sejumlah seminar dan pelatihan lainnya.



Dadang Eka Jatnika
Kepala Audit Internal

Dadang Eka Jatnika, 46 tahun, menjabat sebagai Kepala Audit *Internal* di Bank BTN sejak 1 April 2014. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1995, dan pernah menjabat sebagai Manager Senior *Associate Auditor* (2010), Senior Manager *Associate Auditor* (2011), Senior *Associate Auditor* (2011), Auditor *Superintendent – ICT* (2012), dan *Superintendent Conventional General Audit* (2013). Menjabat sebagai *Internal Audit Division Head* sejak 1 April 2014. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1993) dan Magister Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2006). Beliau juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan dan Seminar diantaranya *National Anti Fraud Conference (NAFC)* (2015), *Chief Audit Executive Forum 2015 "Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan"* (2015), *SOPAC 2015 Conference and Financial Institution Benchmarking Program* (2015), *Training of Trainers* (2012), *Sopac Conference*, Sydney Australia (2012), *Network Security Training* (2013), *International Symposium on Audit Bank Efficiency* (2013) dan *Certified Fraud Examiners (CFE)* (2014) dan sejumlah seminar dan pelatihan lainnya.

Profil Pejabat Eksekutif

Toto Priyohartono,

54 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Kepala *Card Business and Electronic Banking Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Dadang Rusnady,

54 tahun. *Master Of Business Administration*, St. Louis University. Kepala *Operation and Business Support Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 135/DIR/2014.

Nefo Purwono Trianggono,

52 tahun. *Magister Management*, Universitas Indonesia. Kepala *Consumer Collection and Remedial Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Palwoto,

45 tahun. Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kepala *Credit Risk Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 258/DIR/2015.

Satya Wijyantara,

47 tahun. S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Kepala *Asset Management Division*. Menjabat sejak 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.559/DIR/2015.

Sindhu Rahardian Ardita,

42 tahun. *Magister Management*, Universitas Gajah Mada. Kepala *Institutional Banking Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Dewi Fitrianingrum,

49 tahun. *Magister Management*, Universitas Gajah Mada. Kepala *Commercial Funding and Services Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 559/DIR/2015.

Harman Soesanto,

45 tahun. S2 Manajemen Strategi, Universitas Indonesia. Pjs Kepala *Wealth Management Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Sudaryo Bagyo Utomo,

52. Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Kepala *Compliance Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 264/DIR/2013.

Hertanta,

50 tahun. *Master of Business Administration*, University of Arkansas. Kepala *Risk Management Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Nasril,

50 tahun. Sarjana Ekonomi, STIE KBP, Padang. Kepala *Retail Funding and Services Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.257/DIR/2015.

Marisa Gemiralda,

55 tahun. S2 bidang Manajemen Pemasaran, Universitas Trisakti. Kepala *Sharia Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Eko Waluyo,

44 tahun. *Magister Management*, Universitas Gajah Mada. Kepala *Corporate Secretary Division*. Menjabat sejak 1 April 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 232/DIR/2015.

Nofry Rony Poetro,

47 tahun. *Master of Business Administration*, The George Washington University, Washington DC, USA. Kepala *Treasury Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Triani Pudji Astuti,

53 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada. Kepala *Finance and Accounting Division*. Menjabat sejak 1 Juli 2011, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 242/DIR/2011.

Sri Purwanto,

51 tahun, *Master of Business Administration*, Syracuse University, New York, USA. Kepala *Service Quality, Network and Electronic Banking Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Viator Simbolon,

55 tahun. Sarjana Hukum, Unika Parahyangan, Bandung. Kepala *Commercial Lending Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 150/DIR/2014.

Hirwandi Gafar,

47 tahun. Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung. Kepala *Subsidized Mortgage Division*. Menjabat sejak 1 Maret 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/DIR/2014.

Profil Pejabat Eksekutif

Arief Pramuhanto,

53 tahun. *Master of Business Administration*, Monash University, Melbourne. Kepala *Human Capital Division*. Menjabat sejak 1 Maret 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/DIR/2015.

Elisabeth Novie Riswanti,

48 tahun. Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada. Kepala *Small and Medium Lending Division*. Menjabat sejak 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 559/DIR/2015.

Refyul Rey Fatri,

57 tahun. Sarjana Computer dan *Mathematical Science* Victoria University, Melbourne. Kepala *Information Communication and Technology Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 135/DIR/2014.

R. Mahelan Prabantarikso,

46 tahun. S3 Manajemen SDM, Institut Pertanian Bogor. Kepala *Strategic Innovation and Performance Management Division*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015

Dadang Eka Jatnika,

46 tahun. *Magister* Akuntansi, Universitas Diponegoro. Kepala *Internal Audit Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/DIR/2014.

Sri Rezeki M. S.,

50 tahun. *Magister* Manajemen, Universitas Gajah Mada. Kepala *Regional Office I*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.257/DIR/2015

Yossi Istanto,

42 tahun. S2 Hukum Bisnis, Unika Parahyangan, Bandung. Kepala *Legal Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/DIR/2014.

Adi Suharto Atmadja,

52 tahun. Sarjana Teknik, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Kepala *Regional Office II*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Budi Wahyuti,

55 tahun. Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret. Kepala *Procurement and General Services Division*. Menjabat sejak 1 September 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 365/DIR/2014.

Joni Prasetyanto,

47 tahun. S2 Hukum Bisnis, Universitas Indonesia. Kepala *Regional Office III*. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Suryanti Agustinar,

50 tahun. S2 Manajemen, Universitas Gajah Mada. Kepala *Non Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division*. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 150/DIR/2014.

Rachmat Siswanto,

54 tahun. S2 Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Kepala *Regional Office IV*. Menjabat sejak 1 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 648/DIR/2015.

Profil Karyawan



Komposisi Jumlah Karyawan Tetap berdasarkan *Level* Organisasi

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan *Level* Organisasi

Grade	2015	2014	2013	2012	2011
22	2	5	6	-	2
19 s/d 21	77	82	92	76	62
15 s/d 18	865	790	790	795	763
13 s/d 14	1.665	1.774	1.672	1.740	336
11 s/d 12	4.019	3.422	2.941	2.271	3.229
8 s/d 10	1.558	1.440	1.368	1.166	743
Jumlah	8.186	7.513	6.869	6.048	5.135

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	2015	2014	2013	2012	2011
Pasca Sarjana	299	248	272	288	291
Sarjana	5.305	3.390	2.999	2.841	2.618
Sarjana Muda	1.663	2.590	2.207	1.586	1.166
SLTA	919	1.285	1.390	1.332	1.059
SLTP	-	-	1	1	1
SD	-	-	-	-	-
Jumlah	8.186	7.513	6.869	6.048	5.135

Profil Karyawan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tahun	Jumlah Karyawan			Jumlah Total	
	Peg. Tetap	Kontrak	Outsource	Tidak Termasuk Outsource	Termasuk Outsource
2011	5.135	1.202	3.326	6.337	9.663
2012	6.048	1.094	4.945	7.142	12.087
2013	6.869	1.142	5.578	8.011	13.589
2014	7.513	1.069	6.227	8.582	14.809
2015	8.186	856	6.504	9.042	15.546

Pengembangan Pegawai

Pengembangan kompetensi pegawai baik *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu program utama di tahun 2015 yaitu *people transformation*. Sesuai dengan SE Direksi No. 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pembelajaran dan Pengembangan Pegawai, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan *Human Capital*, ditetapkan bahwa pemberian Pegawai yang berhak mengikuti kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan adalah Pegawai dengan status pegawai tetap dan pegawai dengan status tertentu. Dalam hal ini setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pembelajaran dan pengembangan, baik pegawai laki-laki maupun perempuan. Sepanjang tahun 2015 sebanyak 7.023 pegawai telah mengikuti *training*, dengan total biaya *training* di 2015 sebesar Rp105.993.657.000.

Sebanyak 440 program *training* dilaksanakan pada tahun 2015 yang diikuti oleh total 15.991 peserta. Rincian peserta *training* setiap bulannya dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan/*training* pada tahun 2015 dalam setiap bulannya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Peserta
Januari	909
Februari	1.269
Maret	1.601
April	1.999
Mei	2.352
Juni	1.329
Juli	372
Agustus	1.259
September	824
Oktober	2.178
November	1.631
Desember	268
Total	15.991

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global)

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta 12190,
Indonesia
Tel : 62-21 5289 5000
Fax. : 62-21 5289 4100

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav 34 –35, Jakarta 10220,
Indonesia
Tel . 62-21 570 9009
Fax. 62-21 570 9026

Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Setiabudi Atrium Suite 809 – 810
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920,
Indonesia
Tel. 62-21 521 0077
Fax. 62-21 521 0078

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, 20th Fl
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910,
Indonesia
Telp. 62-21 5795 7755
Faks. 62-21 5795 7750

Penghargaan dan Sertifikasi

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingannya. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan 27 penghargaan dan apresiasi dari berbagai lembaga di tingkat nasional maupun *internasional*, meliputi:



Brand KPR

Acara: *Digital Brand Award 2015*
Penyelenggara: INFOBANK
Tanggal: 26 Maret 2015



BUMN Terbuka Peringkat 4 Kontribusi Ekonomi Indonesia

Acara: *Indikator BUMN Award*
Penyelenggara: BUMN TRACK
Tanggal: 23 April 2015

Penghargaan



4th Best Overall Performance Islamic Business Unit

Acara: *Service Excellence Award 2015*
Penyelenggara: INFOBANK dan MRI
Tanggal: 4 Juni 2015



6th Best Overall Performance Commercial Banking

Acara: *Service Excellence Award 2015*
Penyelenggara: INFOBANK dan MRI
Tanggal: 4 Juni 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



BUMN Terbuka Peringkat 10 Juara Umum

Acara: Indikator BUMN Award
Penyelenggara: BUMN TRACK
Tanggal: 23 April 2015



Bank Kategori Berkinerja Terbaik

Acara: Indonesian Property and Bank Award X 2015
Penyelenggara: Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan
Tanggal: 21 Mei 2015

Penghargaan



3rd Best Phone Bank BTN Syariah

Acara: Service Excellence Award 2015
Penyelenggara: INFOBANK dan MRI
Tanggal: 4 Juni 2015



The Best Contact Centre Operation

Acara: Contact Centre Award 2015
Penyelenggara: INDONESIA CONTACT CENTRE ASSOCIATE (ICCA)
Tanggal: 4 Juni 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



Kinerja Bank Sangat Bagus

Acara: *Info Bank Award 2015*
 Penyelenggara: INFOBANK
 Tanggal: 14 Agustus 2015



**Unit Usaha Syariah Terbaik
 Aset >Rp5 Triliun**

Acara: *Best Syariah Award 2015*
 Penyelenggara: INVESTOR
 Tanggal: 19 Agustus 2015

Penghargaan



2nd Best Sharia Award Asset >10 Triliun

Acara: *Infobank Sharia Award 2015*
 Penyelenggara: INFOBANK
 Tanggal: 16 Oktober 2015



**Industri Keuangan BUMN Sangat Bagus
 Kinerja Keuangan selama tahun 2014**

Acara: *Infobank BUMN Award 2015*
 Penyelenggara: INFOBANK
 Tanggal: 23 Oktober 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



Excellent GCG Sector Finance 2015
Acara: Indonesia Good Corporate Governance
Penyelenggara: ECONOMIC REVIEW
Tanggal: 26 Agustus 2015



Juara III Annual Report BUMN Listed Company
Acara: Annual Report Award
Penyelenggara: OJK.BI.IAI.Depkeu.KNKG.IDX. BUMN
Tanggal: 22 September 2015

Penghargaan



Tokoh Perbankan 2015 untuk Direktur Utama Bank BTN
Acara: Anugerah Perbankan Indonesia 2015
Penyelenggara: Economic Review dan Perbanas
Tanggal: 05 November 2015



Peringkat I untuk kelompok Buku Bank III (Aset Rp100 Triliun ke atas)
Acara: Anugerah Perbankan Indonesia 2015
Penyelenggara: Economic Review dan Perbanas
Tanggal: 05 November 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



The Best Financial 2015 Top 50 Public Listed Companies

Acara: *The 7th IICD Corporate Governance Conference and Award*
 Penyelenggara: *Indonesian Institute for Corporate Directorship*
 Tanggal: 16 November 2015



Top 50 Public Listed Companies

Acara: *The 7th IICD Corporate Governance Conference and Award*
 Penyelenggara: *Indonesian Institute for Corporate Directorship*
 Tanggal: 16 November 2015

Penghargaan



Kategori BUMN KIP 2015

Acara: *Keterbukaan Informasi Publik*
 Penyelenggara: *Komisi Informasi Pusat RI*
 Tanggal: 15 Desember 2015



The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index

Acara: *GCG Award 2015*
 Penyelenggara: *Majalah SWA*
 Tanggal: 17 Desember 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Internasional



Best Letter to Shareholders

Acara: Annual Report Award
Penyelenggara: LACP (League of American Communications Professionals)
Tanggal: 20 Juli 2015



Gold Award

Acara: Annual Report Award
Penyelenggara: LACP (League of American Communications Professionals)
Tanggal: 20 Juli 2015

Internasional



Top 100 Annual Reports Worldwide

Acara: Annual Report Award
Penyelenggara: LACP (League of American Communications Professionals)
Tanggal: 20 Juli 2015



Top 50 Annual Reports in the Asia-Pacific Region

Acara: Annual Report Award
Penyelenggara: LACP (League of American Communications Professionals)
Tanggal: 20 Juli 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Internasional



Top 10 Indonesian Annual Reports

Acara: Annual Report Award
 Penyelenggara: LACP (League of American Communications Professionals)
 Tanggal: 20 Juli 2015



Top 2 public-listed companies from Indonesia (The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015)

Acara: ASEAN Corporate Governance
 Penyelenggara: ASEAN Corporate Governance
 Tanggal: 14 November 2015

Internasional



Bank dengan akad kredit terbanyak dalam sehari

Acara: Pencatatan Rekor MURI pada BTN Akad Kredit 6.600 KPR Dalam Sehari
 Penyelenggara: BTN _ MURI
 Tanggal: 25 November 2015

Penghargaan dan Sertifikasi

Sertifikasi

Jenis Sertifikat

ISO 9001:2008
Internal Audit Services (General, Syariah and IT Audits)

Unit Kerja Penerima

Internal Audit Division

Pemberi Sertifikasi

SGS Indonesia
Masa Berlaku s.d: 11 Agustus 2017

Jenis Sertifikat

ISO 9001:2008
Mortgage Processing (KPR and KPA Non Subsidi Ready Stock) from Application to Loan Disbursement

Unit Kerja Penerima

Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division

Pemberi Sertifikasi

SGS Indonesia
Masa Berlaku s.d: 15 September 2018

Jenis Sertifikat

ISO 9001:2008
Risk Management Services

Unit Kerja Penerima

Risk Management Division

Pemberi Sertifikasi

SGS Indonesia
Masa Berlaku s.d: 15 September 2018

Jenis Sertifikat

ISO 9001:2008
Compliance Assurance

Unit Kerja Penerima

Compliance Division

Pemberi Sertifikasi

SGS Indonesia
Masa Berlaku s.d: 15 September 2018

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang

UNIT USAHA KONVENSIIONAL

Kantor Wilayah I
Gedung Bank BTN Bekasi Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman No. 19 Bekasi 17143
Telp.:(021) 88953281, 88953282
Fax.:(021) 8849519

Kantor Wilayah II
Jl. Raya Darmo No. 123-125 Surabaya -
Jawa Timur – 60241
Telp : (031) 5661704, 5661204
Fax : (031) 5661696

Kantor Wilayah III
Komplek Sudirman City Square
No. A 10 - 11
Jl. Sudirman Pekanbaru - 28115
Telp.:(0761) 571126, 571127, 571208, 571350
Fax.:(0761) 571190

Kantor Wilayah IV
Jl. Sultan Hassanudin NO. 1
Makassar
Telp :0411 – 5070760
081354788784

KANTOR CABANG

CABANG JAKARTA KUNINGAN
Wisma Budi Lt. 1 dan 2
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C6
Jakarta 12940
Telp.:(021) 52964652
Fax.:(021) 52964974

CABANG SURABAYA
Jl. Pemuda No. 50
Surabaya 60271
Telp.:(031) 5353513-19
Fax.:(031) 5345073, 5458002

CABANG MEDan
Jl. Pemuda No. 10A
Medan 20151
Telp.:(061) 4149777
Fax.:(061) 4158112, 4153203

CABANG MAKASAR
Jl. Kajaolalido No. 4
Makassar 90111
Telp.:(0411) 316016, 316011
Fax.:(0411) 316388

CABANG YOGYAKARTA
Jl. Jend. Sudirman No. 71
Yogyakarta 55223
Telp.:(0274) 589898, 581014,
581016
Fax.:(0274) 561289

CABANG BANDUNG
Jl. Jawa No. 7
Bandung 40117
Telp.:(022) 4232112, 4241036,
4241034
Fax.:(022) 4204562

CABANG DENPASAR
Jl. Dewi Sartika No. 2
Denpasar 80114
Telp.:(0361) 243811
Fax.:(0361) 243815

CABANG PALEMBANG
Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5
No. 125. Palembang 30128
Telp.:(0711) 411175, 410552
Fax.:(0711) 410854

CABANG PADanG
Jl. H. R. Rasuna Said No. 3
Padang 25129
Telp.:(0751) 31903, 32094 - 96
Fax.:(0751) 31900, 34938

CABANG BANJARMASIN
Jl. R. E. Martadinata No. 4
Banjarmasin 70111
Telp.:(0511) 4368133,
4366669 - 70
Fax.:(0511) 4366492,
43363964

CABANG MANADO
Jl. Wolter Monginsidi No. 56
Manado 95115
Telp.:(0431) 868095,
855504 -05
Fax.:(0431) 868013, 863416

CABANG SEMARANG
Jl. M.T. Haryono No. 717 Sema-
rang 50242
Telp.:(024) 312151, 446166
Fax.:(024) 312186

CABANG JAKARTA HARMONI
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
Telp.:(021) 6336789, 6332666,
2310490
Fax.:(021) 6386593, 6332676,
6333021

CABANG BOGOR
Jl. Pengadilan No. 13-15 Bogor
16121
Telp.:(0251) 8311700
Fax.:(0251) 8323007, 8351432

CABANG BEKASI
Jl. Jend. Sudirman No. 19
Bekasi 17143
Telp.:(021) 8840649
Fax.:(021) 8849519

CABANG JAYAPURA
Jl. Koti No. 22
Jayapura 99111
Telp.:(0967) 537970-71
Fax.:(0967) 533373

CABANG BANDAR LAMPUNG
Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
Bandar Lampung 35215
Telp.:(0721) 489253 - 55,
484778, 483256
Fax.:(0721) 489252

CABANG KENDARI
Jl. A. Yani , Komplek A. Yani
Square Blok. A6-7
Kendari 9311
Telp.:(0401) 322101
Fax.:(0401) 322502

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang

<p>CABANG SAMARINDA Jl. RE. Martadinata No. 01 Samarinda 75127 Telp.: (0541) 736930, 731695, 731510 Fax.: (0541) 737698</p>	<p>CABANG MATARAM Jl. Pejanggik No. 99-101 Cakranegara, Mataram 83121 Telp.: (0370) 631186, 638289 Fax.: (0370) 634542</p>	<p>CABANG KUPANG Jl. Jend. Sudirman No. 87 Kupang 85119 Telp.: (0380) 831004 Fax.: (0380) 833741</p>
<p>CABANG AMBON Jl. Diponegoro No. 75B Ambon Telp.: (0911) 355882, 354471, 348552, 355882 Fax.: (0911) 348559</p>	<p>CABANG PALU Jl. Jend. Sudirman No. 2, Palu 94111 Telp.: (0451) 424555, 428555 Fax.: (0451) 425993</p>	<p>CABANG PALANGKARAYA Jl. Diponegoro No. 23 Palangkaraya 73111 Telp.: (0536) 3223407, 3222698, 3224136 Fax.: (0536) 3221020</p>
<p>CABANG JAKARTA MELAWAI Jl. Melawai Raya No. 72 Blok B-4 kebayoran Baru- Jakarta Selatan kode pos 12130 Telp. : (021) 7223623 , 7223631 Fax.: (021) 7392813</p>	<p>CABANG BATAM Jl. Engku Putri No. 1, Kel. Belian , Kec. Nongsa Batam Center Telp.: (0778) 470630, 470625-28 Fax.: (0778) 457262, 453923</p>	<p>CABANG BANGKALAN Jl. Teuku Umar No. 16, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan 69116 Telp.: (031) 3098929 / 3098831/ 3098930 Fax.: (031) 3098834</p>
<p>CABANG MADIUN Jl. Dr. Sutomo No. 38 Madiun 63116 Telp.: (0351) 451460, 459034, 459034, 457927, 459500 Fax.: (0351) 463510</p>	<p>CABANG JEMBER Jl. A. Yani No. 05 Jember 68118 Telp.: (0331) 484611, 489292, 489266 Fax.: (0331) 484617</p>	<p>CABANG SOLO Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo 57141 Telp.: (0271) 726930 Fax.: (0271) 726931</p>
<p>CABANG PEKALONGAN Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan 51113 Telp.: (0285) 433883 - 84, 433484, 433917, 413222 Fax.: (0285) 433926 , 413902</p>	<p>CABANG PURWOKERTO Jl. Jend. Sudirman No. 431 Purwokerto 53116 Telp.: (0281) 641114 Fax.: (0281) 638386</p>	<p>CABANG TASIKMALAYA Jl. Sutisna Senjaya No. 101 Tasikmalaya 46112 Telp.: (0265) 334464 - 65 Fax.: (0265) 330884</p>
<p>CABANG CIREBON Jl. Siliwangi No. 16 Cirebon 45121 Telp.: (0231) 209143, 209153 Fax.: (0231) 209777</p>	<p>CABANG PURWAKARTA Jl. RE. Martadinata No. 1 Pur- wakarta 41114 Telp.: (0264) 201024, 210830 - 31, 206637 Fax.: (0264) 201591</p>	<p>CABANG BENGKULU Jl. Soeprpto No. 7 - 8, Bengkulu 38223 Telp.: (0736) 20875 Fax.: (0736) 20874</p>
<p>CABANG JAMBI Jl. H. M. Yusuf Singadikane No. 146 Jambi Telp.: (0741) 61793, 61792 Fax.: (0741) 62665</p>	<p>CABANG PEKANBARU Jl. Jend. Sudirman No. 393 Pekanbaru 28116 Telp.: (0761) 40494, 40185 - 88 Fax.: (0761) 32271, 44776</p>	<p>CABANG PONTIANAK Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78122 Telp.: (0561) 740163 Fax.: (0561) 740168</p>
<p>CABANG TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Tangerang 15118 Telp.: (021) 5539363 Fax.: (021) 5537977, 5581186</p>	<p>CABANG CIPUTAT Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat 15411 Telp.: (021) 7445145 Fax.: (021) 7490968, 7402731</p>	<p>CABANG BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 141 Balikpapan Telp.: (0542) 420333 Fax.: (0542) 420896</p>
<p>CABANG KEDIRI Jl. Diponegoro No. 22 - 24 Kediri 64121 Telp.: (0354) 691260 - 62 Fax.: (0354) 691265</p>	<p>CABANG CILEGON Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49 Cilegon 42414 Telp.: (0254) 391766, 392681, 393479 Fax.: (0254) 393480</p>	<p>CABANG DEPOK Jl. Margonda Raya No. 186 Depok 16423 Telp.: (021) 7751236-37 Fax.: (021) 7772927</p>

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang

<p>CABANG GRESIK Komp. Pertokoan Multi Sarana Plaza Blok C 01 No. 1 Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118 Telp.: (031) 3973455 Fax.: (031) 3973456</p>	<p>CABANG SIDOARJO Jl. Ahmad Yani No. 15 Sidoarjo Telp: (031) 8929211 , 8957949 - 50 Fax.: (031) 8957951</p>	<p>CABANG TANJUNG PINANG Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza Bintang Center Blok Bunga No. 9 - 12 Tanjung Pinang Telp.: (0771) 7447101 , 7447088 Fax.: (0771) 7447082</p>
<p>CABANG KARAWANG Jl. Kertabumi No. 29 A-D, Karawang 41311 Jawa Barat Telp.: (0267) 412282 - 83 Fax.: (0267) 412247</p>	<p>CABANG GORONTALO Jl. Prof. HB. Yasin No. 55, Kel Limba U2, Kota Selatan - Gorontalo Telp.: (0435) 830490, 829481 Fax.: (0435) 826707, 823943</p>	<p>CABANG PANGKAL PINANG Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade Center B11 - B14 Pangkal Pinang Telp.: (0717) 423748 Fax.: (0717) 488706</p>
<p>CABANG BANDA ACEH Jl. Sri Ratu Afiatuddin No. 19 - 23 , Gampong Peunayong, Banda Aceh Telp.: (0651) 35756, 35757 Fax.: (0651) 35758</p>	<p>CABANG TERNATE Jl. Pahlawan Revolusi (Samping Kantor PosTernate) Kel. Gamalama, Ternate Tengah - Maluku Utara Telp.: 0921 - 3111330 Fax.: 0921 - 3126968</p>	<p>CABANG CIBUBUR Ruko Madison Blok B1 No. 6-8 Cibubur Time Square Jl. Raya Alternatif transyogi Km. 3 Cibubur - Bekasi 17435 Telp.: 021 - 84300071 - 73 Fax.: 021 -</p>
<p>CABANG KELAPA GADING SQUARE Jl. Raya Boulevard Barat Blok D No. 23 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Telp. 021 - 45866883, 4586688 Fax. 021 - 45866885</p>	<p>CABANG CIMAH Jl. Raya Timur Cimahi No. 475 Cimahi 40524 Telp. 022 - 6651644, 6651645 Fax. 022 - 6652586</p>	<p>CABANG BUMI SERPONG DAMAI Komp. BSD, Ruko Sektor VII E Blok K No. 8, Jl. Raya Serpong, Tangerang 15310 Telp.: (021) 5372235 - 37 Fax.: (021) 5372238</p>
<p>CABANG JAKARTA KEBON JERUK Jl. Anggrek No. 01 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550 Telp.: (021) 53666345 Fax.: (021) 59666344</p>	<p>CABANG JAKARTA CAWANG Patria Park Apartment dan Of- fice RK 01-02 Jl. DI Panjaitan Kav. 5-7, Jakarta Timur 13340 Telp.: (021) 85918467 - 69 Fax.: (021) 85918470</p>	<p>CABANG CIKARANG Ruko Cikarang Commercial Center B1 No. 3-5. Jl. Raya Cikarang - Cibusarah Km. 40 Cikarang 17550 Telp.: (021) 8936275 / 89830014 Fax.: (021) 8936418</p>
<p>CABANG KARAWACI Perumnas Karawaci I , Jl. Cendrawasih No. 1 Tangerang 15115 Telp.: (021) 5517849 - 50 Fax.: (021) 5524367 , 5511420</p>	<p>CABANG HARAPAN INDAH BEKASI Komp. Ruko Sentra Niaga Blok SN No. 1-3 Jl. Boulevard Hijau, Harapan Indah, Bekasi 17132 Telp.: (021) 88386971, 88386972, 88386974 Fax.: (021) 88386974</p>	<p>CABANG SURABAYA BUKIT DARMO Jl. Bukit Darmo Golf Blok 1 No. 07 Surabaya Telp.: (031) 7323344 , 7322146 , 7322147 Fax.: (031) 7232899</p>
<p>CABANG BANDUNG TIMUR Jl. Raya Cinunuk No. 223 A Kec. Cileunyi, kab. Bandung kode pos 40624 Telp. : (022) 7816883 Fax.: (022) 7838482, 7816876</p>		

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang

KANTOR CABANG SYARIAH		
<p>CABANG JAKARTA HARMONI Jl. Suryo Pranoto No. 9 B-D, Kel. Petojo Selatan. Kec. Gambir Jakarta Pusat 10130 Telp.: (021) 3860617 , 3860620 , 3864265 Fax.: (021) 3447271 (021) 3857706</p>	<p>CABANG BANDUNG Jl. Cicendo No. 16 Kel. Babakan Ciamis Bandung Kec. Sumur Bandung 40117 Telp.: (022) 4265472 , 4265473 , 4265474 Fax.: (022) 4265385</p>	<p>CABANG SURABAYA Jl. Diponegoro No. 29 Surabaya 60271 Telp.: (031) 5666363,5610518 Fax.: (031) 5610519</p>
<p>CABANG YOGYAKARTA Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru, Gondokusuman Yogyakarta 55224 Telp.: (0274) 551055, 512467 Fax.: (0274) 551056</p>	<p>CABANG MAKASAR Jl. Slamet Riyadi No. 7 A Kel. Bulogading, Kec. Ujung pandang 90111 Telp.: (0411) 3613399, 3613499 Fax.: (0411) 320785</p>	<p>CABANG MALANG Jl. Bandung No. 40, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang Telp.: (0341) 579888, 335959 Fax.: (0341) 579777</p>
<p>CABANG SOLO Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332 Solo 57141 Telp.: (0271) 712127, 7008978,7008947 Fax.: (0271) 717276</p>	<p>CABANG BATAM Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29 Pelita Batam 29432 Telp.: (0778) 421921 , 437880 Fax.: (0778) 422126</p>	<p>CABANG MEDAN Jl. Ir. H. Juanda No. 48. Medan Telp.: (061) 4144554 Fax.: (061) 4144546</p>
<p>CABANG TANGERANG Jl. Serpong Raya, Ruko Villa Melati Mas Blok. SR-1 No. 23-24 Serpong - Tangerang 15320 Telp.: (021) 5370773 Fax.: (021) 5370744</p>	<p>CABANG BOGOR Jl. Jendral Sudirman No. 01, Kec. Bogor Tengah. Bogor 16121 Telp.: (0251) 8327171, 8327575 Fax.: (0251) 8324567</p>	<p>CABANG BEKASI Jl. Jenderal Sudirman , Ruko No. 1 G-H , Kel. Kayu Ringin. Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi 17144 Telp : (021) 8893333 Fax : (021) 88956655</p>
<p>CABANG PEKANBARU Jl Tuanku Tambusi Blok A No. 10 - 11, Labuh Baru Timur Pekanbaru 28291 Telp : (0761) 7891314 Fax : (0761) 7891313</p>	<p>CABANG SEMARANG Jl. Achmad Yani No. 195 C Semarang 50133. Telp : (024) 8449918, 8449919 Fax : (024) 8410825</p>	<p>CABANG BANJARMASIN Jl. Jend. A. Yani Km. 5 Komplek Kencana No. 1. Banjarmasin 70249 Telp : (0511) 3250530 , 3250540 , 3250560 Fax: (0511) 3260900</p>
<p>CABANG CIREBON Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 91 Cirebon Telp : (0231) 235485 - 86 - 88 Fax : (0231) 205790</p>	<p>CABANG PALEMBANG Jl. Veteran No. 325 - 329, Palembang 30114 Telp : (0711) 355417, 355963 Fax : (0711) 313366</p>	<p>CABANG BALIKPAPAN Jl. Jenderal Sudirman No. 565 - 566 , Balikpapan 76114 Telp: (0542) 742260, 742258 Fax: (0542) 742229</p>
<p>CABANG CILEGON Jl. Jend Ahmad Yani No 1B, Cilegon Telp : (0254)378264, 378265 Fax : (0254) 378272</p>	<p>CABANG JAKARTA PASAR MINGGU Jl. Ruko Grand Palace Blok G dan H, Jl. Raya Ps. Minggu Km 16 Pancoran - Jakarta Selatan Telp : (021) 799 3662,799 3015 Fax: (021) 799 3174</p>	<p>CABANG TASIKMALAYA Jl. Yudanegara No. 10 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya 46112 Telp : 0265 - 310612, 7296566, 7296567, 7296568 Fax: 0265 - 310613</p>
<p>CABANG TEGAL Jl. Gajah Mada No. 107 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat Kota Tegal - Jawa Tengah 52113 Telp : (0283) 342923 ,342933 Fax: (0283) 342913</p>		

04

Informasi Bagi Investor



Perseroan senantiasa membangun hubungan baik dengan investor, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia.





Bank  BTN



Kinerja Pasar Modal Indonesia sepanjang tahun 2015 menghadapi banyak tantangan. Hal ini membuat laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren konsolidasi melemah. Akan tetapi, harga saham Perseroan menunjukkan tren peningkatan yang baik. Peningkatan nilai saham ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari Investor terhadap Perseroan.

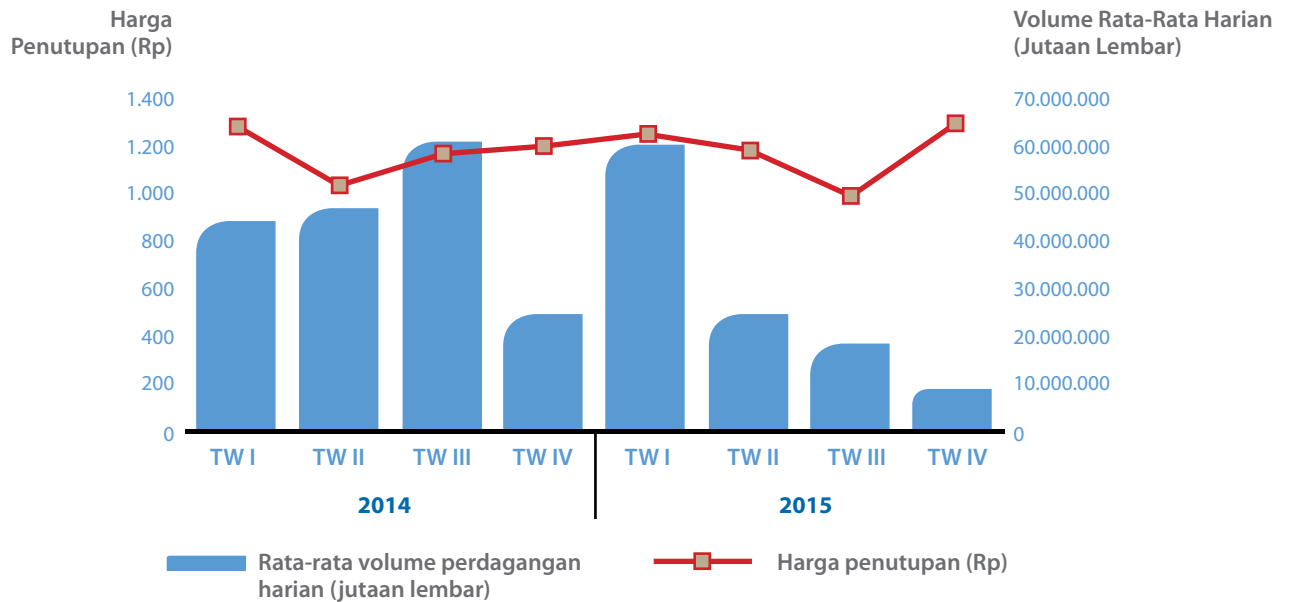
Ikhtisar Saham

Kinerja saham BBTN Triwulanan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel Kinerja Saham Triwulanan

Periode	Jumlah saham yang beredar (lembar)	Harga Penutupan (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Harga Tertinggi (Rp)	Rata-rata volume perdagangan harian (jutaan lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp)
TW I - 2014	10.565.260.500	1.285	845	1.325	44.283.537	13.576.359.742.500
TW II - 2014	10.565.260.500	1.040	990	1.405	46.969.547	10.987.870.920.000
TW III - 2014	10.567.696.000	1.170	1.040	1.215	60.784.207	12.364.204.320.000
TW IV - 2014	10.567.696.000	1.205	1.080	1.220	24.547.275	12.734.073.680.000
TW I - 2015	10.567.720.500	1.255	990	1.255	59.785.924	13.262.489.227.500
TW II - 2015	10.567.720.500	1.190	1.085	1.235	24.470.582	12.575.587.395.000
TW III - 2015	10.582.345.000	995	945	1.235	18.149.510	10.529.433.275.000
TW IV - 2015	10.582.345.000	1.295	1.295	1.260	8.448.484	13.704.136.775.000

Grafik Kinerja Saham 2014 -2015



Ikhtisar dan Kronologis Pencatatan Obligasi

Obligasi	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (Tahun)	Tingkat Bunga Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
Obligasi BTN XII Tahun 2006	1.000.000.000.000	10	12,750%	20-Sep-06	19-Sep-16	idAA
Obligasi BTN XIV Tahun 2010	1.650.000.000.000	10	10,250%	11-Jun-10	11-Jun-20	idAA
Obligasi BTN XV Tahun 2011	1.300.000.000.000	10	9,500%	28-Jun-11	28-Jun-21	idAA
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	2.000.000.000.000	10	7,900%	5-Jun-12	5-Jun-22	idAA
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	2.000.000.000.000	10	7,900%	27-Mar-13	27-Mar-23	idAA
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A	900.000.000.000	3	9,625%	08-Jul-15	08-Jul-18	idAA
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	500.000.000.000	5	9,875%	08-Jul-15	08-Jul-20	idAA
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	800.000.000.000	7	10,000%	08-Jul-15	08-Jul-22	idAA
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	800.000.000.000	10	10,500%	08-Jul-15	08-Jul-25	idAA

*) Rating oleh PT Pefindo (17 April 2015-1 April 2016)

Ikhtisar dan Kronologis Pencatatan Sekuritisasi KPR

Perseroan telah melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR melalui skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan skema Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dengan rincian sebagai berikut.

Sekuritisasi	Jumlah Penerbitan (Rp)	Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	
Sekuritisasi KPR BTN ke-1 (KIKDSMF01)	Kelas A	100.000.000.000	13,00%	11-Feb-09	10-Jan-18	idAAA
	Kelas B	11.111.108.501				
Sekuritisasi KPR BTN ke-2 (KIKDSMF02)	Kelas A	360.000.000.000	11,00%	10-Nov-09	10-Dec-19	idAAA
	Kelas B	31.305.329.159				
Sekuritisasi KPR BTN ke-3 (KIKDBTN01)	Kelas A	688.500.000.000	9,25%	27-Dec-10	27-Feb-19	idAAA
	Kelas B	61.500.230.717				
Sekuritisasi KPR BTN ke-4 (KIKDBTN02)	Kelas A	645.000.000.000	8,75%	16-Nov-11	27-Feb-21	idAAA
	Kelas B	58.450.414.156				
Sekuritisasi KPR BTN ke-5 (KIKDBTN03)	Kelas A	925.000.000.000	7,75%	12-Dec-12	7-Jan-23	idAAA
	Kelas B	75.000.005.977				
Sekuritisasi KPR BTN ke-6 (KIKDBTN04)	Kelas A1	403.000.000.000	8,90%	20-Dec-13	26-Feb-22	idAAA
	Kelas A2	525.000.000.000	9,50%			
	Kelas B	72.000.005.941				
Sekuritisasi KPR BTN ke-7 (KIKDBTN05)	Kelas A1	723.500.000.000	10,00%	2-Dec-14	7-Sep-25	idAAA
	Kelas A2	647.500.000.000	10,25%			
	Kelas B	129.000.001.615				
Sekuritisasi KPR BTN ke-8 (EBA-SP SMF-BTN01)	Kelas A	181.600.000.000	8,60%	4-Dec-15	7-Mar-22	idAAA
	Kelas B	18.400.000.041				

Ikhtisar dan Kronologis Pencatatan *Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)*

NCD	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat Bunga Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri C	300.000.000.000	15	9,50%	05-Dec-14	26-Feb-16
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri B	85.000.000.000	12	9,25%	26-Feb-15	18-Feb-16
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri C	10.000.000.000	15	9,50%	26-Feb-15	19-Mei-16
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri D	440.000.000.000	18	9,70%	26-Feb-15	18-Agt-16
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri B	620.000.000.000	12	9,00%	30-Apr-15	30-Apr-16
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri C	160.000.000.000	18	9,25%	30-Apr-15	30-Okt-16

Ikhtisar *Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)* Telah Jatuh Tempo

NCD	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat Bunga Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri A	280.000.000.000	6	9,00%	05-Des-14	04-Jun-15
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri B	45.000.000.000	12	9,25%	05-Des-14	27-Nov-15
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri A	470.000.000.000	6	9,00%	26-Feb-15	26-Agt-15
NCD I Bank BTN Tahap III Tahun 2015	500.000.000.000	5	9,00%	17-Feb-15	15 Jul-15
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri A	330.000.000,000	6	8,75%	30-Apr-15	30-Okt-15

Kronologis Pencatatan Saham

Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor	
					Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Sebelum IPO					6.354.000.000	3.177.000.000.000
Setelah IPO						
17 Desember 2009	Penawaran Saham Perdana	Saham Biasa Seri B	500	2.360.057.000	8.714.057.000	4.357.028.500.000
4 Feb - 17 Mar 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	95.015.000	8.809.072.000	4.404.536.000.000
40kt - 14 Nov 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	26.898.500	8.835.970.500	4.417.985.250.000
1 Feb - 14 Mar 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	2.544.500	8.838.515.000	4.419.257.500.000
1 Mei - 11 Jun 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	5.068.000	8.843.583.000	4.421.791.500.000
23 Nov - 6 Des 2012	Penawaran Umum Terbatas I	Saham Biasa Seri B	500	1.512.857.500	10.356.440.500	5.178.220.250.000
1 Feb - 15 Mar 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	206.420.500	10.562.861.000	5.281.430.500.000
1 Jul - 16 Agust 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.992.500	10.564.853.500	5.282.426.750.000
1 Feb - 14 Mar 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	407.000	10.565.260.500	5.282.630.250.000
1 Jul - 19 Agust 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	2.435.500	10.567.696.000	5.283.848.000.000
2 Feb - 16 Maret 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	24.500	10.567.720.500	5.283.860.250.000
1 Juli - 18 Agustus 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	14.624.500	10.582.345.000	5.291.172.500.000

Saham Bank BTN dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*)

Kronologis Pencatatan Saham

Pencatatan Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*)

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009. Pada proses IPO tersebut, Perseroan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat.

Pencapaian IPO Perseroan dengan nilai *proceed* mencapai Rp1,88 triliun tersebut mendapat penghargaan “*Best IPO in Indonesia 2009*” dari majalah the Asset dan “*Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009*” dari Publisher Alpha South Asia (Hongkong). Penawaran saham tersebut juga mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *over subscribe* sebanyak 2,04 kali.

Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue*)

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue*.

Rights Issue dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil *Rights Issue* ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan kredit. Adapun ringkasan transaksi *Rights Issue* Perseroan adalah:

Jenis Penawaran	HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal	Rp500 (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	Rp1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima Rupiah)
Jumlah Dana (<i>Proceeds</i>) yang Diterima	Rp1.868.379.012.500 (satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu lima ratus Rupiah)
Rasio Konversi	555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu) Saham Lama berhak atas 94.943 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	14,61% (empat belas koma enam satu persen) sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% (enam belas koma empat puluh sembilan persen) setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	23 November 2012
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen

Program Kepemilikan Saham ditujukan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan *level of engagement* sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja pegawai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan. Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan terdiri dari:

- **Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (MESA).**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/ MESA*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta Program MESA terdiri dari semua karyawan tetap Perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 September 2009, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA.
- Jumlah saham dalam Program MESA sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum atau sebesar 226.928.500 saham. Program MESA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7, dimana peserta Program MESA akan diberikan alokasi

untuk membeli saham dengan jatah pasti dan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% dari harga saham saat Penawaran Umum Perdana.

- Diskon pembelian saham Program MESA tersebut menjadi tanggungan Bank.
 - Saham yang dibeli dalam Program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
- **Program Pemberian Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan**
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/ MESOP*).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen

Pelaksanaan program MESOP dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 40% dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2010.
2. Tahap Kedua Jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2011.
3. Tahap Ketiga Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada peserta program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP dengan *option life* (masa berlakunya hak opsi) selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi. Dalam *Vesting Period* tersebut Peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode pelaksanaan *exercise* opsi adalah 2 kali setiap tahun, masing-masing selama 30 hari bursa. Periode pelaksanaan pertama terhitung sejak tanggal 1 Februari dan untuk periode pelaksanaan kedua dimulai 1 Juli setiap tahunnya sampai dengan masa laku Hak Opsi setiap tahap berakhir. Harga pelaksanaan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2004 tertanggal 20 Januari 2014 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan. Harga pelaksanaan MESOP untuk tiap tahap adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama : Rp855 per saham
- Tahap kedua : Rp1.297,44 per saham
- Tahap ketiga : Rp1.098,36 per saham

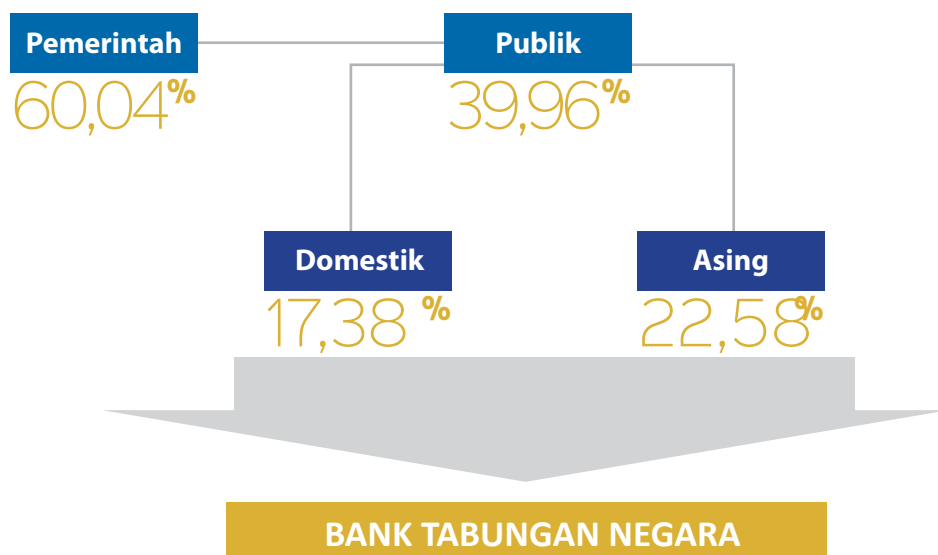
Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Pemegang Saham

Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna. Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambil alihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Negara Republik Indonesia memiliki 6.353.999.999 lembar Saham Biasa dan satu lembar Saham seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus, sehingga kepemilikan sahamnya sebesar 60,04%.

Secara umum, pemegang saham BTN terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia 60,04% dan publik 39,96%. Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.



Komposisi Pemegang Saham

Secara rinci, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan
Negara Republik Indonesia		
Pemerintah Republik Indonesia	6.354.000.000	60,04%
Publik		
- Pemegang Saham Lokal		
Perorangan Indonesia	256.753.735	2,43%
Karyawan	105.839.800	1,00%
Koperasi	1.517.900	0,01%
Yayasan	22.667.033	0,21%
Dana Pensiun	177.038.562	1,67%
Asuransi	359.221.152	3,39%
Perseroan Terbatas	242.376.730	2,29%
Reksadana	673.389.284	6,36%
Sub Total	1.838.804.196	17,38%
- Pemegang Saham Asing		
Perorangan Asing	2.546.440	0,02%
Badan Usaha Asing	2.386.994.364	22,56%
Sub Total	2.389.540.804	22,58%
TOTAL	4.228.345.000	39,96%

Rincian 20 Pemegang Saham Terbesar

Rincian 20 nama pemegang saham terbesar setelah Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

No	Nama	Saham	Persentase	Status
1	NT TST CO S/A THE CARAVEL FUND (INTERNATIONAL)	285.499.900	2,6978888	Badan Usaha Asing
2	BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT	128.847.908	1,2175743	Perseroan Terbatas
3	JPMCB-HANDELSBANKENS TILLVAXTMARKNADSFON	120.000.000	1,1339642	Badan Usaha Asing
4	PT AIA FINL - UL EQUITY	98.733.800	0,9330049	Asuransi
5	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY	92.008.000	0,8694481	Badan Usaha Asing
6	BBH BOSTON S/A BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP	88.551.700	0,8367871	Badan Usaha Asing
7	REKSA DanA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR	87.459.300	0,8264643	Reksadana
8	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	80.153.421	0,7574259	Badan Usaha Asing
9	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING	75.340.327	0,7119436	Badan Usaha Asing
10	SSB EB5 ACF LORD ABBETT SECURITIES TRUST	74.470.804	0,7037269	Badan Usaha Asing
11	PT JASA RAHARJA (PERSERO)	72.932.500	0,6891903	Asuransi
12	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-IN	71.342.800	0,6741682	Badan Usaha Asing
13	REKSA DANA MANULIFE GREATER INDONESIA FUND	68.861.400	0,6507197	Reksadana

Komposisi Pemegang Saham

No	Nama	Saham	Persentase	Status
14	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS	61.502.035	0,5811759	Badan Usaha Asing
15	CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKET	59.917.549	0,5662029	Badan Usaha Asing
16	PT JASA RAHARJA (PERSERO)	57.774.500	0,5459518	Asuransi
17	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED L	55.587.400	0,5252843	Badan Usaha Asing
18	PT TASPEN (PERSERO) – THT	53.593.271	0,5064404	Asuransi
19	BNYM LUX S/A BLACKROCK GLOBAL FUNDS-2040	50.820.900	0,4802423	Badan Usaha Asing
20	REKSADANA MANULIFE SAHAM ANDALAN	47.795.200	0,4516504	Reksadana

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Selain Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat pemegang saham yang persentase kepemilikannya lebih dari 5%.

Kepemilikan Saham oleh Direktur dan Komisaris

No	Jabatan	Nama	Jumlah Saham (lembar)	% Kepemilikan Saham
DEWAN KOMISARIS				
1	Komisaris Utama/Independen*	Chandra M. Hamzah	-	-
2	Komisaris Independen	Kamaruddin Sjam	-	-
3	Komisaris Independen	Arie Coerniadi	-	-
4	Komisaris Independen	Catherinawati Hadiman	-	-
5	Komisaris**	Sumiyati	-	-
6	Komisaris	Fajar Harry Sampurno	-	-
7	Komisaris	Lucky Fathul Aziz H	-	-
DIREKSI				
1	Direktur Utama	Maryono	98.500	0,0009%
2	Direktur ***	Irman Alvian Zahiruddin	4.922.650	0,6465%
3	Direktur	Mansyur S. Nasution	375.000	0,0035%
4	Direktur	Iman Nugroho Soeko	-	-
5	Direktur	Sis Apik Wijayanto	100.000	0,0009%
6	Direktur	Adi Setianto	-	-
7	Direktur	Sulis Usdoko	-	-
8	Direktur	Oni Febriarto R.	-	-

Komposisi Pemegang Saham

* Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 Perihal Ketidakbersediaan menjadi Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*** Efektif menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai rurat OJK No. SR.202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan
Publik		
Pemegang Saham Lokal		
Perorangan Indonesia	256.753.735	2,43%
Karyawan	105.839.800	1,00%
Koperasi	1.517.900	0,01%
Yayasan	22.667.033	0,21%
Dana Pensiun	177.038.562	1,67%
Asuransi	359.221.152	3,39%
Perseroan Terbatas	242.376.730	2,29%
Reksadana	673.389.284	6,36%
Sub Total	1.838.804.196	17,38%
Pemegang Saham Asing		
Perorangan Asing	2.546.440	0,02%
Badan Usaha Asing	2.386.994.364	22,56%
Sub Total	2.389.540.804	22,58%
TOTAL	4.228.345.000	39,96%

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham Perseroan

Per 31 Desember 2015, IHSG ditutup pada 4.593, turun 12,13% dari posisi 31 Desember 2014 sebesar 5.227 poin. Kinerja ini merupakan salah satu performa yang paling lemah di antara indeks-indeks saham acuan di Asia. Penurunan dipengaruhi oleh kondisi global terkait perlambatan ekonomi di Tiongkok dan *concern* terhadap kenaikan *Fed Fund Rate* di Amerika Serikat. Dari sisi domestik, realisasi Produk Domestik Bruto yang di bawah perkiraan turut menambah sentimen negatif di pasar saham.

Volume rata-rata perdagangan harian saham tercatat sebesar 5.979,93 juta saham atau meningkat sebesar 9,05% dibanding tahun sebelumnya yaitu 5.483,54 juta saham. Akan tetapi, nilai rata-rata perdagangan harian saham mengalami penurunan sebesar 3,39%, dari Rp6.005,75 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp5.766,23 miliar pada tahun 2015. Sementara itu, sepanjang tahun 2015, *Net Sell Investor* Asing tercatat sebesar Rp22,5 Triliun.

Kapitalisasi pasar saham tercatat mengalami penurunan sebesar 6,80%, dari Rp5.228,04 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp4.872,70 triliun pada tahun 2015.

Negara	Year to Date Performance Benchmark Stock Index
1 Cina	+ 10,46%
2 Jepang	+9,07%
3 Korea Selatan	+2,39%
4 Australia	-0,41%
5 Amerika Serikat	-1,46%
6 Filipina	-3,85%
7 Malaysia	-3,87%
8 Inggris	-4,39%
9 India	-5,62%
10 Hong Kong	-7,30%
11 Indonesia	-12,31%
12 Thailand	-13,86%
13 Singapura	-14,25%

Namun demikian, selama tahun 2015 saham Perseroan, dengan kode perdagangan BBTN, mencatatkan kinerja yang memuaskan, yang tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel Kinerja Saham BBTN 2015

Indikator	BBTN	
	2015	2014
Harga Penutupan (Rp)	1.295	1.205
Harga Terendah (Rp)	945	845
Harga Tertinggi (Rp)	1.310	1.405
Rata-rata volume Perdagangan Harian (lot)	302.217	438.915
PE (x)	7,40	11,16
PBV (x)	0,99	1,04
Kapitalisasi Pasar (Rp Jutaan)	13.703.690	12.734.440

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham Perseroan

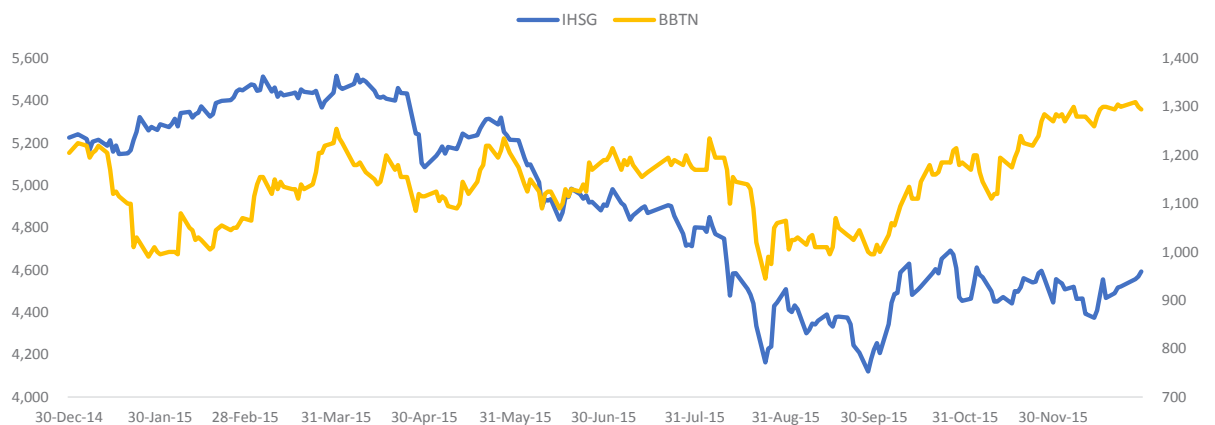
Saham BBTN berhasil mencatat kenaikan sebesar 7,47% (yoy), dari harga penutupan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.205 per lembar saham menjadi Rp 1.295 per lembar saham pada 31 Desember 2015.

Peningkatan harga saham BBTN ini didorong oleh kinerja keuangan Perseroan tahun 2015 yang memuaskan, yang berada di atas ekspektasi pasar dan consensus analis. Di tengah perlambatan ekonomi dan menurunnya kinerja perbankan nasional, Perseroan mencatatkan peningkatan kinerja, seperti pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 19,88%, peningkatan dana pihak ketiga sebesar 19,95% dan pertumbuhan laba bersih sebesar 61,57% pada tahun 2015. NPL mengalami perbaikan dari 4,01% menjadi 3,42%, serta NIM meningkat dari 4,47% menjadi 4,87% pada tahun 2015.

Namun demikian, rata-rata volume perdagangan harian selama periode 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode 2014, dari rata-rata 438.915 lot saham pada tahun 2014 menjadi 302.217 lot saham pada tahun 2015.

Price to Book Value (PBV) BBTN per 31 Desember 2015 tercatat sebesar 0,99x, atau turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 1,04x. *Price to Earning* (PE) BBTN per 31 Desember 2015 tercatat sebesar 7,40x, turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 11,16x.

IHSG vs BBTN



Atas kinerja yang baik tersebut, BBTN berhasil masuk dalam komponen perhitungan beberapa Indeks Saham terkemuka sebagai berikut:

Indeks	Periode
LQ45	Februari-Juli 2016
Kompas	Februari-Juli 2016
MNC36	November 2015-April 2016
Infobank 15	Januari-Juni 2016
Investor 33	Desember 2015-Mei 2016

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2014, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya.

Tabel Pelaksanaan Pembayaran Deviden

Tahun	Dividen Tunai (Rp miliar)	Laba Bersih (Rp miliar)	<i>Dividend Payout Ratio</i>	Dividen Per Lembar Saham (Rp)	Tanggal Pembayaran
2014	223	1.116	20%	21,11	24 April 2014
2013	469	1.562	30%	44,36	7 April 2014
2012	409	1.364	30%	38,74	10 Mei 2013
2011	224	1.119	20%	25,31	30 Mei 2012
2010	275	916	30%	31,19	30 Juni 2011

Kegiatan *Investor Relation* Tahun 2015

Perseroan senantiasa membangun hubungan baik dengan investor, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya melalui penyelenggaraan secara berkala kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan pemegang saham tertentu dan paparan publik.

Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai komunikasi kepada investor sebagaimana tabel dibawah ini.

Perseroan juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi melalui situs Perseroan di www.btn.co.id. Situs ini memuat informasi terkini seperti aksi korporasi, laporan keuangan dan *company guidance* (triwulanan), bahan presentasi Perseroan ke publik dan klipng media mengenai pemberitaan Perseroan.

Tanggal	Kegiatan	Tempat
24-Mar-15	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Jakarta
2-Sep-15	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Jakarta
27-Apr-15	<i>Analyst Meeting 1Q2015 & Press Conference</i>	Jakarta
27-Jul-15	<i>Analyst Meeting 2Q2015 & Press Conference</i>	Jakarta
26-Oct-15	<i>Analyst Meeting 3Q15 & Press Conference</i>	Jakarta
26-Feb-15	<i>Analyst Meeting FY 2014 & Press Conference</i>	Jakarta
17-19 Nov 15	<i>Asia Pacific Summit</i>	Singapore
8-Oct-15	<i>Capital Market Institutional Gathering</i>	Bandung
11-12 Jun 15	<i>CIMB 9th Annual Indonesia Conference</i>	Bali
9-Sep-15	<i>Citi Indonesia Investor Conference</i>	Jakarta
3-4 Nov 15	<i>Deutsche Access Indonesia Conference</i>	Jakarta
11-Nov-15	<i>Investor Summit 2015 & Press Conference</i>	Jakarta
25-May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Kuala Lumpur
11-12 May 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Singapore
11-13 Nov 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Jakarta
13-15 May 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Tokyo
1-5 Jun 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Eropa
18-22 May 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	USA
2-3 Nov 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	London
23-24 Nov 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Hong Kong
26-27 May 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Hong Kong
26-29 Oct 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	USA
4-5 May 15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Jakarta
22-Apr-15	<i>Public Expose 2015 & Press Conference</i>	Jakarta
9-10 Mar 15	<i>UBS Indonesia Conference 2015</i>	Jakarta
18-Nov-15	Yuk Nabung Saham	Jakarta

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Perseroan secara aktif menyelenggarakan kegiatan lain seperti pertemuan media, ulasan media dan promosi melalui media.

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen



Memperhatikan pencapaian program Sejuta Rumah dan permasalahan *backlog* perumahan, Perseroan dapat berperan mengurangi backlog dan sekaligus menangkap peluang dalam mengembangkan bisnis perumahan





Bank BBTN

**PERINGKAT 10 BESAR BANK
PER 31 DESEMBER 2014**

No	Bank/Bank	AMK1	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang
1	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
2	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
3	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
4	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
5	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
6	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
7	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
8	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
9	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
10	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111

No	Bank/Bank	AMK1	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang	Bank/Bank	Pu. Bilang
1	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
2	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
3	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
4	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
5	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
6	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
7	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
8	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
9	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111
10	Bank BBTN	11,111	100%	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111	Bank BBTN	11,111

IKHTISAR KUNE



Tahun 2015 merupakan tahap pertama Perseroan menuju transformational enterprise-global mindset. Persyaratan menuju transformational tahap kedua telah dipenuhi antara lain dengan penguasaan bisnis perumahan mencapai 30,6% di tahun 2015.

Tinjauan Industri

Perekonomian Dunia

Tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia selama 2015 tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, harga komoditas yang menurun, dan pasar keuangan yang masih bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi Negara maju yang masih belum solid dan pertumbuhan ekonomi Negara berkembang yang cenderung menurun. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh moderat dan ekonomi Eropa mengalami pemulihan, meskipun belum mampu meningkatkan inflasi yang masih rendah. Sementara itu, Perekonomian Tiongkok terus melemah sejalan dengan *rebalancing* ekonominya dari *investment driven* menjadi *consumption driven*. Kondisi tersebut mendorong perbedaan arah kebijakan moneter yang berdampak pada meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan pembalikan modal asing dari *Emerging Markets* (EM), termasuk Indonesia. Ke depan, di tengah prospek pemulihan ekonomi global yang membaik, sejumlah risiko eksternal masih perlu diwaspadai, khususnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan kondisi pasar keuangan global pasca kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR). (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Desember 2015).

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 mengalami perlambatan, sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Hal ini terkonfirmasi dari sisi regional yang menunjukkan perlambatan ekonomi terutama dialami daerah yang berbasis sumber daya alam. Sejalan dengan ekspor yang masih lemah, pertumbuhan investasi relatif terbatas. Investasi bangunan tumbuh meningkat ditopang realisasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, sementara investasi non-bangunan masih terbatas. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02% (yoy). Namun, pertumbuhan ekonomi masih dapat ditopang oleh konsumsi yang masih cukup kuat, baik rumah tangga maupun pemerintah.

Inflasi pada tahun 2015 mengalami perlambatan. Inflasi berada pada posisi cukup rendah yaitu berada di bawah 3,35%, berada dalam kisaran Bank Indonesia, yaitu $4 \pm 1\%$. Di sisi lain, inflasi

inti tetap terkendali, didukung oleh ekspektasi yang terjaga, dampak *passthrough* pelemahan nilai tukar yang terbatas dan tekanan permintaan yang relatif lemah. Hal ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Namun, risiko inflasi perlu terus diwaspadai, terutama terkait penyesuaian *administered prices*, sehingga diperlukan penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi. *Administered prices* diperkirakan mengalami deflasi, seiring dengan menurunnya harga energi dunia di tengah reformasi subsidi. Sementara itu, kelompok *volatile food* mengalami Inflasi yang cukup rendah. Ke depan, pada tahun 2016, inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran $4 \pm 1\%$.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan di tahun 2015, hingga Desember 2015 Rupiah melemah 11,30% dari Rp12.385/USD di tanggal 31 Desember 2014 ke level Rp13.785/USD. Sumber tekanan terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain, ketidakpastian *timing* dan besaran kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta Yuan yang terus terdepresiasi di tengah perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Sementara, dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah terkait dengan meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden secara musiman, serta kekhawatiran terhadap melambatnya ekonomi domestik. Namun, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 pergerakan rupiah cenderung menguat dan lebih stabil, seiring dengan sentimen positif terhadap EM akibat menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan *Fed Fund Rate* pada 17 Desember 2015 yang mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga Negara. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung stabilitas makro ekonomi dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Kinerja transaksi berjalan 2015 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada kisaran 2% dari PDB. Penurunan defisit transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan nonmigas dan migas akibat penurunan impor yang signifikan. Hal

Tinjauan Industri

tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah dan ekspor yang berkontraksi akibat harga komoditas yang menurun serta permintaan global yang masih lemah. Di sisi lain, kinerja transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan melambatnya perekonomian domestik. Namun, surplus tersebut diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tidak sepenuhnya dapat menutup defisit transaksi berjalan.

(Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Desember 2015)

Kondisi Industri Perbankan

Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri perbankan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit sepanjang 2015 melambat sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada tahun 2015 tercatat sebesar 10,44% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 11,58% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi (prosiklialitas). Selain itu, meningkatnya risiko kredit beberapa segmen membuat bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru. Secara sektoral, perlambatan kredit khususnya terjadi pada sektor yang terimbas dampak global. Penyaluran kredit ke sektor *tradable* (Pertanian, Pertambangan, dan Industri) tertekan lebih dalam bila dibandingkan dengan penyaluran kredit ke

sektor *nontradable*. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat menjadi sebesar 7,26% sepanjang tahun 2015 dibandingkan 12,29% pada tahun 2014. Perlambatan DPK sepanjang 2015 utamanya disumbang oleh penurunan pertumbuhan deposito, khususnya deposito rupiah.

Posisi Perseroan di Industri Perbankan

Berdasarkan perbandingan kinerja Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan, pada periode 2014-2015, Perseroan berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK masing-masing sebesar 18,83%, 19,88%, dan 19,95%. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan industri perbankan nasional (Bank Umum). Pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK pada periode 2014-2015 industri perbankan tercatat masing-masing sebesar 9,21%, 10,44%, dan 7,26%. Pertumbuhan laba yang berhasil dicapai oleh Perseroan sebesar 61,57% jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional yaitu sebesar -6,72% per Agustus 2015.

Rasio NIM sebagai penggerak utama pendapatan perbankan nasional, pada November 2015 sebesar 5,20%, sedangkan tingkat NIM yang berhasil dicapai oleh Perseroan sebesar 4,87%. Disisi lain, Rasio ROA yang dicatatkan Perseroan selama periode 2015 sebesar 4,87%, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri perbankan yang sebesar 2,30%.

Sebagai perbandingan kinerja Perseroan terhadap perbankan nasional, berikut ini merupakan rincian kinerja Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Dibanding Rata-Rata Industri

Kinerja	Tahun 2015	
	BTN	Industri Perbankan
Aset	18,83%	9,21%
Kredit	19,88%	10,44%
DPK	19,95%	7,26%
Laba	61,57%	(6,72%)
Pendapatan Bunga	16,86%	13,84%
Beban Bunga	11,06%	15,12%
NIM	4,87%	5,39%
ROA	1,61%	2,32%
CASA	48,65%	54,01%

Tinjauan Operasional

Terbesar di antara perbankan nasional, menguasai pasar KPR Subsidi sebesar 98%, serta perbaikan bisnis dan penguatan modal. Pendapatan operasional Bank di 2015 mencapai Rp6,81 triliun, meningkat Rp1,35 triliun atau sebesar 24,64% dari 2014 yang mencapai Rp5,46 triliun.

Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai Lembaga pembiayaan Kredit Perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam menyalurkan KPR Subsidi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini terus dilanjutkan dalam pelaksanaan penyaluran program-program KPR Subsidi khususnya KPR Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Uang Muka. Sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta MoU antar Perseroan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.001/MoU/DIR/2015 Tanggal 6 Januari 2015 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur KPR Subsidi dengan bantuan FLPP. Dengan demikian, lembaga yang memberikan pembiayaan ini tidak hanya terbatas untuk Perseroan, tetapi juga dapat dilakukan oleh Bank BUMN lainnya, Bank-Bank Swasta dan Bank-Bank Pembangunan Daerah, sehingga sifat usahanya adalah persaingan bebas.

Nature of Business Perseroan lebih memfokuskan bidang usahanya kepada pemberian kredit perumahan yang tidak terbatas kepada kredit subsidi dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian (*prudential banking practices*) yang didukung oleh peningkatan pengumpulan dana ritel. Atas dasar *nature of business* tersebut, Perseroan membagi produk dan layanan menjadi tiga bagian besar, yaitu Perbankan Konsumer, Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah.

Perseroan telah memisahkan *mortgage* dan *consumer lending* dan *retail funding* pada level direktorat dalam upaya untuk lebih memperkuat bisnis *mortgage* yang merupakan *core* bisnis Perseroan. Pemisahan *mortgage* dan *consumer lending* juga dilakukan pada level divisi melalui pembentukan *subsidized mortgage* yang terpisah dengan *non-subsidized*. Dalam rangka menunjang peningkatan portofolio UMKM, Perseroan membentuk divisi yang membidangi kredit *small and medium* yang terpisah dengan *commercial lending*.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu, Perseroan juga menyediakan berbagai layanan lainnya yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai kegiatan.

Produk dan layanan yang disediakan Perseroan berdasarkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut.

1. Perbankan Konsumer

Perbankan konsumer ditujukan untuk nasabah perorangan yang terdiri dari Produk Kredit dan Produk Simpanan. Produk Kredit terbagi menjadi empat, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan Lainnya dan Kredit Non Perumahan. Sedangkan Produk Simpanan terbagi menjadi dua, yaitu Tabungan dan Deposito.

2. Perbankan Komersial

Perbankan Komersial ditujukan untuk nasabah korporat yang terdiri dari Produk Kredit dan Produk Simpanan. Produk Kredit Komersial mencakup produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa Kredit Konstruksi BTN, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari kredit UMKM, Kredit *Linkage* BTN, dan Kredit Korporasi. Produk Simpanan juga terbagi menjadi dua, yaitu Giro dan Deposito.

Tinjauan Operasional

3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah Perseroan menawarkan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan berbagai Produk Pembiayaan dan Produk Pendanaan. Melalui beragam produk dan layanan perbankan dengan skema keuangan yang bervariasi, serta beroperasi dengan prinsip bagi hasil, Unit Usaha Syariah menjadi alternatif solusi perbankan yang kredibel dan menguntungkan bagi segenap segmen masyarakat Indonesia. Produk Unit Usaha Syariah terbagi menjadi Produk Pembiayaan dan Produk Simpanan. Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi pembiayaan Konsumer dan pembiayaan Komersial. Produk Simpanan Unit Usaha Syariah terdiri dari produk Giro, Tabungan, dan Deposito.

4. Jasa dan Layanan Perbankan

Jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya. Selain itu Perseroan juga menawarkan jasa berupa kartu konsumer, *wealth management*, dan *electronic channel*.

Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumer berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksadana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATMDanKiosk, CDM, *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*.

Kinerja Operasional

Hingga 31 Desember 2015, Perseroan berhasil mempertahankan posisinya untuk tetap berada di jajaran 10 besar bank di Indonesia berdasarkan jumlah aset dan kredit. Aset Perseroan mencapai Rp171,81 triliun di tahun 2015, atau tumbuh 18,83% dari Rp144,58 triliun pada tahun 2014 (lihat penjelasan pada tinjauan keuangan). Sedangkan posisi kredit yang disalurkan Perseroan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 19,88%. Posisi Kredit yang disalurkan Perseroan tahun 2015 mencapai Rp138,96 triliun meningkat sebesar Rp23,04 triliun dari Rp115,92 triliun di tahun 2014.

Tabel Posisi Kredit

Jenis Kredit	31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013		31/12/2014		31/12/2015		y.o.y (2015 terhadap 2014)
	RpM	Komp.	RpM	Komp.	RpM	Komp.	RpM	Komp.	RpM	Komp.	
Kredit Perumahan	55.805	87,79%	70.223	86,26%	87.005	86,60%	102.614	88,52%	124.927	89,90%	21,74%
KPR Subsidi	25.804	40,60%	25.562	31,40%	28.429	28,30%	34.347	29,63%	43.527	31,32%	26,73%
KPR Non-Subsidi	18.611	29,28%	29.129	35,78%	39.548	39,36%	45.601	39,34%	53.567	38,55%	17,47%
Kredit Perumahan Lainnya	4.199	6,61%	6.070	7,46%	7.198	7,16%	8.179	7,06%	8.934	6,43%	9,23%
Kredit Konstruksi	7.191	11,31%	9.462	11,62%	11.829	11,77%	14.486	12,50%	18.900	13,60%	30,47%
Kredit Non-Perumahan	7.759	12,21%	11.187	13,74%	13.463	13,40%	13.302	11,48%	14.029	10,10%	5,47%
Kredit Konsumer	1.463	2,30%	1.923	2,36%	2.597	2,58%	2.916	2,52%	3.839	2,76%	31,65%
Kredit Komersial	6.296	9,90%	9.264	11,38%	10.865	10,81%	10.386	8,96%	10.190	7,33%	(1,89%)
Total Kredit	63.564	100,0%	81.411	100,00%	100.467	100,00%	115.916	100,00%	138.956	100,00%	19,88%

*termasuk pembiayaan syariah

Tinjauan Operasional

Sedangkan besarnya penyaluran kredit Perseroan di 2015 sebesar Rp51,25 triliun, meningkat 23,19% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp41,60 triliun. Kontribusi peningkatan terbesar berasal dari KPR Subsidi yang meningkat sebesar Rp4,81 triliun atau 60,43%.

Tabel Penyaluran Kredit

(dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	Tahun					y.o.y
	2011	2012	2013	2014	2015	(2015 terhadap 2014)
Kredit Perumahan	18.789	28.041	33.955	34.029	41.812	22,87%
KPR Subsidi	5.896	4.213	6.506	7.960	12.771	60,43%
KPR Non-Subsidi	5.340	12.479	14.286	12.629	13.404	6,13%
Kredit Perumahan Lainnya	1.540	2.659	2.500	2.416	2.418	0,08%
Kredit Konstruksi	6.013	8.690	10.663	11.023	13.219	19,92%
Kredit Non-Perumahan	6.384	9.679	10.338	7.569	9.434	24,64%
Kredit Konsumer	900	1.809	2.389	2.564	4.268	66,47%
Kredit Komersial	5.484	7.870	7.949	5.005	5.166	3,22%
Total Kredit	25.173	37.720	44.293	41.598	51.246	23,19%

*termasuk pembiayaan syariah

Di sisi lain, jumlah rekening dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan di 2015 mengalami peningkatan sebesar 328.211 atau 5,19% dari 6.327.355 unit rekening di 2014 menjadi 6.655.566 unit rekening di 2015.

Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga

(dalam unit rekening)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	55.070	0,83%	50.597	0,80%	8,84%
Tabungan	6.466.043	97,15%	6.151.562	97,22%	5,11%
Deposito	134.453	2,02%	125.196	1,98%	7,39%
Total	6.655.566	100,00%	6.327.355	100,00%	5,19%

*termasuk dana syariah

Sejalan dengan peningkatan jumlah rekening dana pihak ketiga, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan di 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp21,24 triliun atau 19,95% dari Rp106,47 triliun di 2014 menjadi Rp127,71 triliun di 2015.

Tabel Jumlah Dana Pihak Ketiga

(dalam juta Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	31.368.443	24,56%	23.422.618	22,00%	33,92%
Tabungan	30.757.681	24,08%	26.167.914	24,58%	17,54%
Deposito	65.582.546	51,35%	56.880.145	53,42%	15,30%
Total	127.708.670	100,00%	106.470.677	100,00%	19,95%

*termasuk dana syariah

Tinjauan Operasional

Analisis kinerja operasional per produk dan layanan disajikan pada penjelasan di bawah ini.

Kinerja Operasional Per Produk dan Layanan

Perbankan Konsumer

Produk Kredit

Produk Kredit Perseroan terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk kredit perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit perorangan Perseroan disalurkan dalam mata uang Rupiah. Kinerja produk kredit perbankan konsumer dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penyaluran Produk Kredit Perbankan Konsumer (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Kredit Perumahan	26.296	86,50%	21.299	89,92%	23,46%
KPR Subsidi	11.718		7.345		59,55%
KPR Non Subsidi	12.195		11.569		5,41%
Kredit Perumahan Lainnya	2.383		2.385		(0,11%)
Kredit Konsumer - Non Perumahan	4.104	13,50%	2.386	10,08%	71,96%
Total	30.399	100,00%	23.685	100,00%	28,35%

Selama tahun 2015, Perseroan berhasil menyalurkan kredit konsumer konvensional sebesar Rp30,40 triliun, meningkat sebesar Rp6,72 triliun atau 28,35% dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp23,69 triliun. Peningkatan ini khususnya berasal dari produk Kredit KPR Bersubsidi dengan pertumbuhan positif mencapai 59,55% atau sebesar Rp4,38 triliun. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah yang dijalankan oleh Perseroan. Sedangkan penurunan pertumbuhan terjadi pada produk kredit perumahan lainnya yaitu sebesar Rp2 miliar atau 0,11%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa produk kredit perumahan lainnya yaitu kredit kerjasama bank yang perjanjian kerjasamanya jatuh tempo, Perseroan menghentikan realisasi sebelum diperpanjangnya perjanjian kerjasama tersebut.

KPR Subsidi

Sepanjang 2015, Perseroan berhasil menyalurkan KPR Bersubsidi sebesar Rp11,72 triliun atau sebanyak 114.770 unit perumahan melalui Bank Konvensional, meningkat sebesar 59,55% bila dibandingkan dengan penyaluran KPR Bersubsidi pada tahun 2014 yang sebesar Rp7,34 triliun. Peningkatan kredit KPR subsidi disebabkan oleh adanya peningkatan KPR BTN Sejahtera Tapak. Sedangkan produk KPR BTN Sejahtera Susun mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pengembang masih dalam proses pembangunan untuk Rumah Susun, pembangunan tersebut perlu waktu yang tidak sebentar sehingga Rumah Susun baru dapat diperjualbelikan 1 sampai 2 tahun kedepan.

Tabel Perkembangan Penyaluran KPR Subsidi (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
KPR BTN Sejahtera Tapak	10.800	92,17%	7.336	99,88%	47,23%
KPR BTN Sejahtera Susun	0,88	0,01%	6,19	0,08%	(85,82%)
KPR BTN Sejahtera Susun Indent	-	-	2,64	0,04%	(100,00%)
KPR SSA/SSB Tapak	917	7,83%	-	-	100,00%
Total	11.718	100,00%	7.345	100,00%	59,55%

Tinjauan Operasional

KPR Non Subsidi

Perseroan mengembangkan portofolio KPR bagi nasabah segmen menengah ke atas melalui layanan KPR Non Subsidi. Layanan KPR Non Subsidi terdiri dari produk-produk KPR dan KPA BTN, serta Kredit Ruko. Adapun perkembangan penyaluran KPR Non Subsidi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Perkembangan Penyaluran KPR Non Subsidi (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
KPR BTN Platinum	11.722	96,13%	11.063	95,62%	5,96%
KPA BTN	258	2,11%	296	2,56%	(12,87%)
Kredit Ruko BTN	215	1,76%	210	1,82%	2,38%
Total	12.195	100,00%	11.569	100,00%	5,41%

Selama Tahun 2015, Perseroan telah menyalurkan 46.643 unit KPR BTN Platinum dengan nilai Rp11,57 triliun. Produk KPA BTN berhasil disalurkan sebanyak 771 unit dengan nilai Rp258 miliar. Kemudian Produk Kredit Ruko BTN sebanyak 474 unit telah berhasil disalurkan dengan nilai Rp215 miliar.

Secara keseluruhan, Penyaluran KPR Non Subsidi meningkat sebesar 5,41% dari Rp11,57 triliun di tahun 2014 menjadi Rp12,19 triliun di tahun 2015. Peningkatan ini didominasi oleh Produk KPR BTN Platinum yang mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan sebesar Rp660 miliar atau 5,96% dari Rp11,06 triliun di 2014 menjadi Rp11,72 triliun di 2015 diikuti oleh Kredit Ruko BTN yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,38% dari Rp210 miliar di tahun 2014 menjadi Rp215 miliar di tahun 2015. Hal ini telah sejalan dengan adanya program Sejuta Rumah. Sedangkan Produk KPA BTN mengalami penurunan sebesar 12,87% dari Rp296 miliar di 2014 menjadi Rp258 miliar, karena Bank Indonesia membatasi kepemilikan KPR/KPA indent hanya untuk kepemilikan pertama saja.

Kredit Perumahan Lainnya

Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, Perseroan juga menawarkan produk-produk kredit terkait perumahan. Namun, pada tahun 2015 Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya yang terdiri dari Kredit Agunan Rumah BTN, Kredit Bangun Rumah BTN, PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan BTN, PRR-KB Ketenagakerjaan BTN, TBUM Bapertarum, dan TBM Bapertarum mengalami penurunan sebesar 0,11%.

Adapun perkembangan penyaluran kredit perumahan lainnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Kredit Agunan Rumah BTN	2.244	94,19%	2.212	92,74%	1,45%
Kredit Bangun Rumah BTN	64	2,69%	41	1,71%	57,27%
PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan BTN	63	2,64%	37	1,57%	68,05%
PRR-KB BP Ketenagakerjaan BTN	1,5	0,06%	92	3,87%	(98,37%)
TBUM Bapertarum	10	0,42%	3	0,12%	257,17%
TBM Bapertarum	0,04	0,00%	0,02	0,00%	100,00%
Total	2.383	100,00%	2.385	100,00%	(0,11%)

Selama tahun 2015, Perseroan telah menyalurkan 13.212 unit Kredit Agunan Rumah BTN dengan nilai Rp2,24 triliun, Produk Kredit Bangun Rumah BTN sebanyak 224 unit dengan nilai Rp64,06 miliar, Produk PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 3.144 unit dengan nilai Rp63,84 miliar, PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 42 unit dengan nilai Rp1,5 miliar, Produk TBUM Bapertarum sebanyak 508 unit dengan nilai Rp10,10 miliar, dan Produk TBM Bapertarum sebanyak 2 unit dengan nilai Rp40 juta.

Tinjauan Operasional

Produk Kredit Agunan Rumah BTN mengalami pertumbuhan sebesar Rp32 miliar atau sebesar 1,45%. Produk PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan BTN mengalami pertumbuhan sebesar Rp25 miliar atau 68,05% dari pencapaian sebesar Rp37 miliar di tahun 2014 menjadi Rp63 miliar di tahun 2015.

Produk Kredit Bangun Rumah BTN mengalami pertumbuhan sebesar Rp20 miliar atau 57,27% dari Rp41 miliar di 2014 menjadi Rp64 miliar.

Secara keseluruhan, perkembangan penyaluran kredit perumahan lainnya (Kredit Perumahan Non KPR) mengalami sedikit penurunan sebesar Rp2,39 triliun di 2014 menjadi Rp2,38 triliun di 2015 atau menurun sebesar 0,11% di tahun 2015. Penurunan ini didominasi oleh Produk PRR-KB BP Ketenagakerjaan yang mengalami penurunan sebesar 98,37% dari Rp92 miliar di 2014 menjadi Rp1,5 miliar di 2015. Hal ini disebabkan oleh masa perjanjian kerjasama Perseroan dengan BPJS jatuh tempo pada pertengahan tahun 2015 dan proses pembaharuan perjanjian kerjasama tersebut baru selesai di akhir tahun 2015. Sehingga Perseroan tidak dapat merealisasikan kredit kerjasama dengan BPJS secara maksimal di tahun 2015.

Kredit Konsumer Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Dengan dukungan pelanggan yang besar, maka peluang Perseroan untuk meningkatkan bisnis di segmen ini sangatlah besar. Berikut realisasi penyaluran kredit konsumer non perumahan pada tahun 2015.

Tabel Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumer - Non Perumahan (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Kring BTN	628	15,31%	500	20,95%	25,65%
Kring BTN Pensiunan	39	0,94%	27	1,14%	42,13%
Kredit Swadana BTN	3.047	74,25%	1.818	76,17%	167,60%
Kredit Pegawai	390	9,50%	42	1,74%	836,44%
Total	4.104	100,00%	2.386	100,00%	71,96%

Selama Tahun 2015, Perseroan telah menyalurkan sebanyak 8.332 unit Kredit Ringan BTN (Kring BTN) dengan nilai Rp628 miliar. Penyaluran Kredit Ringan BTN (Kring BTN) mengalami peningkatan sebesar Rp500 miliar di tahun 2014 menjadi Rp628 miliar di tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 25,65%. Selanjutnya sebanyak 514 unit Produk Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan) telah disalurkan dengan nilai Rp39 miliar. Penyaluran Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan) mengalami peningkatan sebesar Rp27 miliar di tahun 2014 menjadi Rp39 miliar di tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 42,13%. Produk Kredit Swadana telah berhasil disalurkan sebanyak 1.043 unit dengan nilai Rp3,05 triliun. Penyaluran Kredit Swadana BTN mengalami peningkatan sebesar Rp1,82 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,05 triliun di tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 67,64%. Produk Kredit Pegawai telah disalurkan sebanyak 226 unit, mengalami peningkatan sebesar Rp42 miliar di tahun 2014 menjadi Rp390 miliar di tahun 2015.

Secara keseluruhan di tahun 2015, Penyaluran Kredit Konsumer Non Perumahan meningkat sebesar 71,96% atau tumbuh sebesar Rp1,72 triliun dari Rp2,39 triliun di tahun 2014 menjadi Rp4,1 triliun di tahun 2015. Peningkatan ini didominasi oleh Kredit Swadana BTN yang mencapai pertumbuhan sebesar Rp1,23 triliun atau sebesar 67,64% dari Rp1,82 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,05 triliun di tahun 2015.

Produk Simpanan

Perseroan juga menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan nasabahnya, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Produk simpanan tersebut dimanfaatkan Perseroan dalam menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sejalan dengan strategi perusahaan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Tinjauan Operasional

Secara garis besar, kinerja produk simpanan atau Dana Pihak Ketiga pada tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah rekening maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun. Rincian terkait kinerja produk simpanan Perseroan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (dalam unit rekening)

Jenis Simpanan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan	6.118.475	99,01%	5.852.481	99,04%	4,54%
Deposito	60.975	0,99%	56.479	0,96%	7,96%
Total	6.179.450	100,00%	5.908.960	100,00%	4,58%

Jumlah rekening dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan di 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,58% dari 5.908.960 unit rekening di 2014 menjadi 6.179.450 unit rekening di 2015. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk tabungan yang mencapai pertumbuhan sebesar 4,54% dari 5.852.481 unit rekening di tahun 2014 menjadi 6.118.475 di tahun 2015.

Tabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam miliar Rupiah)

Jenis Simpanan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan	29.403	76,13%	25.231	72,46%	16,54%
Deposito	9.222	23,87%	9.588	27,54%	-3,82%
Total	38.625	100,00%	34.819	100,00%	10,93%

Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,93% atau tumbuh sebesar Rp3,81 triliun dari Rp34,82 triliun di 2014 menjadi Rp38,63 triliun di 2015. Peningkatan ini berasal dari produk tabungan yang mengalami peningkatan sebesar 16,54% dari total pencapaian jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp25,23 triliun di tahun 2014 menjadi Rp29,40 triliun di tahun 2015.

Adapun Penjelasan mengenai kinerja produk simpanan diuraikan sebagai berikut.

Tabungan

Produk tabungan Perseroan mengalami peningkatan di 2015, baik dari jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening meningkat sebesar 265.994 unit rekening atau sebesar 4,54% dari 5.852.481 unit rekening di 2014 menjadi 6.118.475 unit rekening di 2015. Peningkatan rekening tabungan khususnya berasal dari Produk Tabungan Lainnya yang mencakup produk Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji Reguler dan Haji Plus, TabunganKu, Tabungan BTN Pensiunan, Tabungan Batara Pendidik, dan Tabungan BTN Sempel dengan pertumbuhan keseluruhan mencapai 16,19% atau berkembang sebesar 304.076 unit rekening dari sebesar 1.878.331 unit rekening di tahun 2014 menjadi 2.182.407 unit rekening di tahun 2015.

Tabel Jumlah Rekening Produk Tabungan (dalam unit rekening)

Jenis Tabungan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan Batara	1.802.251	29,46%	1.692.857	28,93%	6,46%
Tabungan Batara Prima	43.398	0,71%	44.567	0,76%	(2,62%)
Tabungan Lainnya	2.182.407	35,67%	1.878.331	32,09%	16,19%
• Tabungan BTN Junior	992.490	16,22%	932.368	15,93%	15,16%
• Tabungan BTN Juara	850.794	13,91%	695.027	11,88%	6,45%
• Tabungan BTN Haji Reguler	58.179	0,95%	53.108	0,91%	22,41%
• Tabungan BTN Haji Plus	453	0,01%	459	0,01%	9,55%
• TabunganKu	234.690	3,84%	180.568	3,09%	(1,31%)
• Tabungan BTN Pensiunan	7.094	0,12%	5.953	0,10%	29,97%

Tinjauan Operasional

Jenis Tabungan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
• Tabungan Batara Pendidik	19.336	0,32%	10.848	0,19%	19,17%
• Tabungan BTN Simpel	19.371	0,32%	-	-	-
Tabungan Pos	2.085.703	34,09%	2.236.279	38,21%	(6,73%)
• Tabungan Tabanas Batara	167.338	2,73%	358.383	6,12%	(53,31%)
• Tabungan E'Batara Pos	978.610	15,99%	1.040.459	17,78%	(5,94%)
• Tabungan Cermat	939.755	15,36%	837.437	14,31%	12,22%
Tabungan BTN Perumahan	4.716	0,08%	447	0,01%	955,03%
Total	6.118.475	100%	5.852.481	100%	4,54%

Sedangkan, jumlah dana yang dihimpun Perseroan melalui produk tabungan meningkat 16,54% dari Rp25,23 triliun di 2014 menjadi Rp29,40 triliun di 2015. Peningkatan dana produk tabungan khususnya berasal dari Tabungan Batara Prima dengan pertumbuhan mencapai Rp2,67 trilion atau sebesar 21,67% dari Rp12,32 triliun di tahun 2014 menjadi Rp14,99 triliun di tahun 2015.

Tabel Jumlah Dana Produk Tabungan Konvensional (dalam miliar Rupiah)

Jenis Tabungan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan Batara	10.132	34,46%	9.355	37,08%	8,31%
Tabungan Batara Prima	14.989	50,98%	12.319	48,82%	21,67%
Tabungan Lainnya	1.799	6,12%	1.472	5,83%	22,21%
• Tabungan BTN Junior	636	2,16%	555	2,20%	14,59%
• Tabungan BTN Juara	486	1,65%	394	1,56%	23,35%
• Tabungan BTN Haji Reguler	110	0,37%	105	0,42%	4,76%
• Tabungan BTN Haji Plus	2	0,01%	3	0,01%	-33,33%
• TabunganKu	449	1,53%	344	1,36%	30,52%
• Tabungan BTN Pensiunan	60	0,20%	55	0,22%	9,09%
• Tabungan Batara Pendidik	54	0,18%	16	0,06%	237,50%
• Tabungan BTN Simpel	2	0,01%	-	-	-
Tabungan Pos	2.447	8,32%	2.084	8,26%	17,42%
• Tabungan Tabanas Batara	83	0,28%	119	0,47%	-30,25%
• Tabungan E'Batara Pos	2.309	7,85%	1.863	7,38%	23,94%
• Tabungan Cermat	55	0,19%	102	0,40%	-46,08%
Tabungan BTN Perumahan	36	0,12%	1	0,00%	3500,00%
Total	29.403	100%	25.231	100%	16,54%

Keterangan: Untuk Tabungan BTN Simpanan Pelajar (Tabungan BTN Simpel), baru mulai dipasarkan di bulan September 2015.

Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah. Manfaat Deposito Berjangka adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

Produk deposito berjangka mengalami peningkatan di 2015, baik jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening produk deposito berjangka meningkat sebesar 8,05% atau sebanyak 4.548 unit rekening dari 56.479 unit rekening di 2014 menjadi 61.027 unit rekening di 2015. Peningkatan terbesar berasal dari deposito 3 bulan yang tumbuh sebesar 19,18% atau 12.818 rekening pada tahun 2014 menjadi 15.277 rekening pada tahun 2015.

Tinjauan Operasional

Tabel Jumlah Rekening Produk Deposito Berjangka (dalam unit rekening)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
1 bulan	36.135	59,21%	34.755	61,54%	3,97%
2 bulan	52	0,09%	-	0,00%	-
3 bulan	15.277	25,03%	12.818	22,70%	19,18%
6 bulan	6.427	10,53%	5.648	10,00%	13,79%
12 bulan	2.699	4,42%	2.889	5,12%	(6,58%)
24 bulan	335	0,55%	332	0,59%	0,90%
<i>Deposito On Call</i>	102	0,17%	37	0,07%	175,68%
Total	61.027	100,00%	56.479	100,00%	8,05%

Sedangkan, jumlah dana produk deposito berjangka mengalami penurunan sebesar 3,82% dari Rp9,59 triliun di 2014 menurun menjadi Rp9,22 triliun di 2015. Penurunan tersebut khususnya disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang berdampak pada penetapan suku bunga deposito berjangka.

Tabel Jumlah Dana Produk Deposito Berjangka (dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
1 bulan	5.789	62,78%	5.515	57,53%	4,96%
2 bulan	100	1,09%	-	0,00%	-
3 bulan	2.453	26,61%	3.162	32,99%	(22,41%)
6 bulan	460	4,99%	559	5,84%	(17,77%)
12 bulan	191	2,08%	287	3,00%	(33,32%)
24 bulan	16	0,18%	20	0,21%	(18,78%)
<i>Deposito On Call</i>	209	2,27%	41	0,44%	400,77%
Total	9.222	100,00%	9.588	100,00%	(3,82%)

Perbankan Komersial

Produk Kredit

Produk Kredit Perbankan Komersial mencakup produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa kredit konstruksi BTN, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari kredit UMKM, Kredit *Linkage* BTN dan Kredit Korporasi.

Tabel Perkembangan Penyaluran Kredit Komersial (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Kredit Perumahan	12.032	72,63%	9.981	72,28%	20,55%
Kredit Non Perumahan	4.354	27,37%	3.827	27,72%	18,47%
- Kredit UMKM	1.374	8,29%	1.470	10,65%	(6,53%)
- Kredit <i>Linkage</i> BTN	150	0,91%	136	0,98%	10,29%
- Kredit Korporasi	3.009	18,17%	2.221	16,08%	35,52%
Total	16.566	100,00%	13.808	100,00%	19,97%

Sepanjang tahun 2015, Perseroan berhasil menyalurkan kredit komersial sebesar Rp16,56 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,97% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp13,81 triliun. Kredit Perumahan perbankan komersial Perseroan berupa Kredit Konstruksi BTN. Pada 2015, jumlah realisasi penyaluran Kredit Konstruksi BTN mencapai Rp12,03 triliun, atau tumbuh 20,55% dari Rp9,98 triliun pada 2014.

Tinjauan Operasional

Kredit Non Perumahan terdiri dari produk Kredit UMKM, Kredit *Linkage* BTN, dan Kredit Korporasi. Kinerja produk kredit non perumahan dijabarkan sebagai berikut.

Kredit UMKM

Pada 2015, jumlah realisasi penyaluran Kredit UMKM BTN mengalami penurunan mencapai Rp1,37 triliun, atau turun sebesar 6,53% dari Rp1,47 triliun pada 2014. Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Bank penyalur KUR di tahun 2015.

Tabel Realisasi Penyaluran Kredit UMKM (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
KUR BTN	2	0,15%	218	14,83%	(99,08%)
Kredit UMKM Lainnya	1.372	99,85%	1.252	85,17%	9,58%
Total	1.374	100,00%	1.470	100,00%	(6,53%)

Kredit *Linkage* BTN

Pada 2015, jumlah realisasi penyaluran *Kredit Linkage* BTN mengalami peningkatan mencapai Rp150 miliar, atau tumbuh 10,29% dari Rp136 miliar pada 2014.

Tabel Realisasi Penyaluran Kredit *Linkage* BTN (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	2014	Pertumbuhan
Kredit <i>Linkage</i> BTN	150	136	10,29%

Kredit Korporasi

Pada 2015, jumlah realisasi penyaluran Kredit Korporasi mengalami peningkatan sebesar Rp3,01 triliun, atau tumbuh 35,52% dari Rp2,22 triliun pada 2014. Peningkatan korporasi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan pada KMK Kontraktor sebesar 140,18% dari Rp433 miyar di 2014 menjadi Rp1,04 triliun di 2015. Penyebab utama lainnya juga diakibatkan oleh peningkatan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 13,98% dari Rp923 miliar di 2014 menjadi Rp1,05 triliun di 2015. Rincian kredit korporasi disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Penyaluran Kredit Korporasi (dalam miliar Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
KMK	1.052	34,95%	923	41,56%	13,98%
Kredit Investasi	917	30,47%	856	38,54%	7,13%
KMK Kontraktor	1.040	34,55%	433	19,50%	140,18%
Kredit Sindikasi	1	0,03%	9	0,41%	(88,89%)
Total	3.010	100,00%	2.221	100,00%	35,52%

Produk Simpanan

Di samping menyalurkan kredit, Perseroan juga menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial. Adapun produk-produk pendanaan komersial yang terdapat di Perseroan antara lain giro dan deposito berjangka lembaga. Kinerja produk simpanan perbankan komersial adalah sebagai berikut.

Tinjauan Operasional

Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (dalam unit rekening)

Jenis Simpanan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	49.775	42,26%	46.253	42,24%	7,61%
Deposito Berjangka Lembaga	68.007	57,74%	63.260	57,76%	7,50%
Total	117.782	100,00%	109.513	100,00%	7,55%

Jumlah rekening dana pihak ketiga lembaga yang berhasil dihimpun Perseroan di 2015 mengalami peningkatan 7,55% dari 109.503 unit rekening di 2014 menjadi 117.782 unit rekening di 2015. Peningkatan tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah rekening deposito berjangka lembaga sebesar 7,50% atau 4.747 unit rekening.

Tabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam miliar Rupiah)

Jenis Simpanan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	29.152	37,38%	22.002	34,98%	32,50%
Deposito berjangka Lembaga	48.828	62,62%	40.903	65,02%	19,38%
Total	77.980	100,00%	62.905	100,00%	23,96%

Sejalan dengan peningkatan unit rekening, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan mengalami peningkatan sebesar 23,96%, dari Rp62,91 triliun di 2014 menjadi Rp77,98 triliun di 2015. Peningkatan ini berasal dari produk deposito berjangka lembaga maupun dari produk giro. Produk Deposito Berjangka Lembaga mencapai pertumbuhan sebesar 19,38% atau tumbuh sebesar Rp7,92 triliun. Sedangkan produk giro, mencapai pertumbuhan sebesar 32,5 32,5% atau tumbuh sebesar Rp7,15 triliun.

Giro

Pada 2015, jumlah rekening produk giro meningkat sebesar 7,61% dari 46.253 unit rekening di 2014 menjadi 49.768 unit rekening di 2015. Jumlah rekening produk Giro non FLPP meningkat sebesar 3.521 unit rekening atau sebesar 7,61%, dan jumlah rekening produk Giro FLPP meningkat sebesar 1 unit rekening atau sebesar 16,67%.

Tabel Jumlah Rekening Produk Giro (dalam unit rekening)

Jenis Giro	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro Non FLPP	49.768	99,98%	46.247	99,99%	7,61%
Giro FLPP	7	0,02%	6	0,01%	16,67%
Total	49.775	100,00%	46.253	100,00%	7,61%

Jumlah dana produk giro mengalami peningkatan sebesar 32,50% dari Rp22,00 triliun di 2014 menjadi Rp29,15 triliun di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari produk Giro FLPP dengan pertumbuhan sebesar Rp4,43 triliun atau sebesar 32,90%.

Tinjauan Operasional

Tabel Jumlah Dana Produk Giro (dalam miliar Rupiah)

Jenis Giro	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro Non FLPP	11,251	38.59%	8,532	38.78%	31.87%
Giro FLPP	17,901	61.41%	13,470	61.22%	32.90%
TOTAL	29,152	100.00%	22,002	100.00%	32.50%

Deposito Berjangka Lembaga

Produk deposito berjangka lembaga Perseroan mengalami peningkatan di 2015, baik jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening produk deposito berjangka meningkat sebesar 7,50% dari 63.260 unit rekening di 2014 menjadi 68.007 unit rekening di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari Deposito berjangka lembaga sebesar 7,31% atau sebesar 4.621 unit.

Tabel Jumlah Rekening Produk Deposito Berjangka Lembaga (dalam unit rekening)

Jenis Deposito	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Deposito Berjangka Lembaga	67.796	99,69%	63.175	99,87%	7,31%
Deposito On Call Lembaga	211	0,31%	85	0,13%	148,24%
TOTAL	68.007	100,00%	63.260	100,00%	7,50%

Sejalan dengan peningkatan unit rekening, jumlah dana produk deposito berjangka lembaga mengalami peningkatan sebesar 19,38% dari Rp40,90 triliun di 2014 menjadi Rp48,83 triliun di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari produk deposito berjangka lembaga dengan peningkatan sebesar Rp6,17 triliun atau sebesar 15,20%.

Tabel Jumlah Dana Produk Deposito Berjangka Lembaga (dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Deposito Berjangka Lembaga	46.748	95,74%	40.580	99,21%	15,20%
Deposito On Call	2.080	4,26%	323	0,79%	543,96%
TOTAL	48.828	100,00%	40.903	100,00%	19,38%

Unit Usaha Syariah

Produk Syariah

Produk Syariah secara garis besar terdiri dari Produk Pembiayaan dan Produk Simpanan. Uraian terkait kinerja produk Unit Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut.

Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan Unit Usaha Syariah diklasifikasikan ke dalam jenis pembiayaan konsumen dan komersial. Adapun uraian terkait kinerja produk pembiayaan Unit Usaha Syariah, dijabarkan sebagai berikut.

Realisasi Pembiayaan Baru berdasarkan segmen perbankan konsumen dan komersial sampai dengan Desember 2015 telah mencapai Rp4,28 triliun, meningkat sebesar 4,29% atau sebesar Rp176,22 miliar dari Desember 2014. Realisasi Pembiayaan didominasi oleh segmen konsumen dengan komposisi sebesar 57,50%, sementara untuk segmen komersial sebesar 42,50%.

Tinjauan Operasional

Tabel Realisasi (Pelimpahan) Pembiayaan Baru Unit Usaha Syariah (dalam juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Pembiayaan Konsumer	2.461.821	57,50%	1.885.120	45,92%	30,59%
Pembiayaan Komersial	1.819.700	42,50%	2.220.181	54,08%	(18,04%)
Total	4.281.521	100,00%	4.105.301	100,00%	4,29%

Realisasi (Pelimpahan) Pembiayaan Konsumer

Sepanjang 2015, Unit Usaha Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan konsumer sebesar Rp2,46 triliun, meningkat sebesar 30,59% atau tumbuh sebesar Rp576,70 miliar dari realisasi pembiayaan konsumer Unit Usaha Syariah di tahun 2014 sebesar Rp1,89 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari produk pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB dengan pertumbuhan sebesar 70,89% atau berkembang sebesar Rp436,54 miliar dari Rp615,80 miliar di tahun 2014 menjadi Rp1,05 triliun di tahun 2015. Peningkatan signifikan lainnya juga diakibatkan oleh KPR BTN Platinum iB sebesar Rp111,61 miliar atau 12,17% dari Rp917,40 miliar di 2014 menjadi Rp1,03 triliun di 2015 dan produk KPR BTN Indent iB dengan peningkatan sebesar Rp36,68 miliar atau 25,06% dari Rp146,36 miliar menjadi Rp183,04 miliar.

Tabel Realisasi (Pelimpahan) Pembiayaan Konsumer (dalam juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
KPR BTN Sejahtera iB	1.052.338	42,75%	615.797	32,67%	70,89%
KPR BTN Platinum iB	1.029.014	41,80%	917.403	48,67%	12,17%
Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB	32.695	1,33%	27.870	1,48%	17,31%
KPR BTN Indent iB	183.041	7,44%	146.362	7,76%	25,06%
PKB BTN iB	3.480	0,14%	3.316	0,18%	4,95%
Pembiayaan Tunai Emas BTN iB	2.551	0,10%	4.611	0,24%	(44,68%)
Pembiayaan Multijasa BTN iB	12.149	0,49%	5.435	0,29%	123,53%
Pembiayaan Multimanfaat BTN iB	98.301	3,99%	106.820	5,67%	(7,98%)
Pembiayaan Talangan Haji BTN iB	48.252	1,96%	57.506	3,05%	(16,09%)
Total	2.461.821	100,00%	1.885.120	100,00%	30,59%

Realisasi (Pelimpahan) Pembiayaan Komersial

Produk pembiayaan komersial Unit Usaha Syariah selama tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini mencapai 18,04% atau menurun sebesar Rp400,48 miliar dari total pelimpahan pembiayaan komersial sebesar Rp2,22 triliun di tahun 2014 menurun menjadi Rp1,82 triliun di tahun 2015. Penurunan ini didominasi oleh produk Pembiayaan Modal Kerja BTN iB yang menurun sebesar 39,96% atau sebesar Rp286,41 miliar dari Rp716,84 miliar di tahun 2014 menurun menjadi Rp430,42 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kebijakan arah bisnis Unit Usaha Syariah untuk kembali fokus kepada *Core Business* pembiayaan perumahan.

Tabel Realisasi (Pelimpahan) Pembiayaan Komersial (dalam juta Rupiah)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Pembiayaan Konstruksi BTN iB	1.187.089	65,24%	1.041.694	46,92%	13,96%
Pembiayaan KUR BTN iB	-	0,00%	149.713	6,74%	(100,00%)
Pembiayaan Modal Kerja BTN iB	430.423	23,65%	716.835	32,29%	(39,96%)
Pembiayaan Investasi BTN iB	202.188	11,11%	311.939	14,05%	(35,18%)
Total	1.819.700	100,00%	2.220.181	100,00%	(18,04%)

Tinjauan Operasional

Produk Simpanan

Produk simpanan Unit Usaha Syariah terdiri dari produk Giro, Tabungan dan Deposito berjangka. Uraian terkait kinerja produk simpanan Unit Usaha Syariah diilustrasikan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (dalam unit rekening)

Jenis Kredit	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	5.295	1,48%	4.344	1,41%	21,89%
Tabungan	347.568	97,00%	299.081	96,83%	16,21%
Deposito	5.471	1,53%	5.457	1,77%	0,26%
Total	358.334	100,00%	308.882	100,00%	16,01%

Jumlah rekening dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Unit Usaha Syariah Perseroan di 2015 mengalami peningkatan sebesar 16,01% dari 308.882 unit rekening di 2014 menjadi 358.334 unit rekening di 2015. Peningkatan tersebut didominasi oleh peningkatan tabungan sebesar 48.487 rekening atau 16,21%.

Tabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam juta Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	2.216.283	19,96%	1.421.418	16,25%	55,92%
Tabungan	1.354.947	12,20%	937.178	10,71%	44,58%
Deposito	7.533.306	67,84%	6.388.861	73,04%	17,91%
Total	11.104.536	100,00%	8.747.457	100,00%	26,95%

Jumlah Dana Pihak Ketiga Desember 2015 telah mencapai 104,25% sebesar Rp11,10 triliun dari Target 2015 sebesar Rp10,65 triliun. DPK Desember 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp2,6 triliun atau 26,95% dari Rp8,75 triliun di Desember 2014. Jumlah DPK didominasi oleh Deposito berjangka sebesar Rp7,53 triliun dibandingkan Giro sebesar Rp2,22 triliun dan Tabungan sebesar Rp1,35 triliun

Giro

Pada 2015, jumlah rekening produk giro Unit Usaha Syariah meningkat sebesar 21,89% dari 4.344 unit rekening di 2014 menjadi 5.295 unit rekening di 2015. Jumlah rekening produk Giro BTN iB meningkat 760 unit rekening atau 23,32%, sedangkan jumlah rekening produk Giro BTN Prima iB meningkat 191 unit rekening atau sebesar 17,60%.

Tabel Jumlah Rekening Produk Giro (dalam unit rekening)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro BTN iB	4.019	75,90%	3.259	75,02%	23,32%
Giro BTN Prima iB	1.276	24,10%	1.085	24,98%	17,60%
Total	5.295	100,00%	4.344	100,00%	21,89%

Sejalan dengan peningkatan unit rekening, jumlah dana produk giro Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan sebesar 55,92% dari Rp1,42 triliun di 2014 menjadi Rp2,22 triliun di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari peningkatan dana produk giro BTN iB dengan pertumbuhan mencapai Rp499,50 miliar atau sebesar 40,60% dari Rp1,23 triliun di 2014 menjadi Rp1,73 triliun di 2015.

Tinjauan Operasional

Tabel Jumlah Dana Produk Giro

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Giro BTN iB	1.729.780	78,05%	1.230.281	86,55%	40,60%
Giro BTN Prima iB	486.503	21,95%	191.137	13,45%	154,53%
Total	2.216.283	100,00%	1.421.418	100,00%	55,92%

Tabungan

Produk tabungan Unit Usaha Syariah Perseroan mengalami peningkatan di 2015, baik dari jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening meningkat sebesar 16,21% dari 299.081 unit rekening di 2014 menjadi 347.568 rekening di 2015. Peningkatan rekening tabungan khususnya berasal dari peningkatan rekening tabungan BTN Qurban iB sebesar 42,97% dari 1.322 unit rekening di 2014 menjadi 1.890 unit rekening di 2015.

Tabel Jumlah Rekening Produk Tabungan Unit Usaha Syariah

(dalam unit rekening)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan BTN Batara iB	217.345	62,53%	186.406	62,33%	16,60%
Tabungan BTN Prima iB	91.751	26,40%	78.835	26,36%	16,38%
Tabungan BTN Haji iB	28.540	8,21%	24.911	8,33%	14,57%
Tabunganku iB	8.042	2,31%	7.607	2,54%	5,72%
Tabungan BTN Qurban iB	1.890	0,54%	1.322	0,44%	42,97%
Total	347.568	100,00%	299.081	100,00%	16,21%

Sejalan dengan peningkatan jumlah unit rekening, jumlah dana produk tabungan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan sebesar Rp417,77 miliar atau sebesar 44,58% dari Rp937,18 miliar di 2014 menjadi Rp1,35 triliun di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari peningkatan dana produk tabungan BTN Prima iB yang berkembang sebesar Rp252,35 miliar atau sebesar 46,37% dari Rp544,19 miliar di 2014 menjadi Rp796,53 miliar di 2015.

Tabel Jumlah Dana Produk Tabungan Unit Usaha Syariah

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan BTN Batara iB	465.681	34,37%	311.925	33,28%	49,29%
Tabungan BTN Prima iB	796.534	58,79%	544.185	58,07%	46,37%
Tabungan BTN Haji iB	88.573	6,54%	77.137	8,23%	14,83%
Tabunganku iB	3.128	0,23%	3.506	0,37%	(10,78%)
Tabungan BTN Qurban iB	1.031	0,08%	425	0,05%	142,59%
Total	1.354.947	100,00%	937.178	100,00%	44,58%

Tinjauan Operasional

Deposito

Produk deposito Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan di 2015, baik jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening produk deposito berjangka meningkat sebesar 0,24% dari 5.458 unit rekening di 2014 menjadi 5.471 unit rekening di 2015. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya peningkatan yang berasal dari Deposito BTN iB (Perorangan), yaitu sebesar 1,61%.

Tabel Jumlah Rekening Produk Deposito Berjangka (dalam unit rekening)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Deposito BTN iB (Perorangan)	4.346	79,44%	4.277	78,36%	1,61%
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.119	20,45%	1.166	21,36%	(4,03%)
Deposito <i>On Call</i> iB	6	0,11%	15	0,27%	(60,00%)
Total	5.471	100,00%	5.458	100,00%	0,24%

Sejalan dengan peningkatan jumlah unit rekening, jumlah dana produk deposito Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan sebesar Rp1,12 triliun atau sebesar 17,91% dari Rp6,39 triliun di 2014 menjadi Rp7,53 triliun di 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari produk deposito BTN iB (Lembaga) yang mencapai pertumbuhan positif sebesar 21,30% dari Rp5,79 triliun di tahun 2014 menjadi Rp7,02 triliun di tahun 2015.

Tabel Jumlah Dana Produk Deposito Berjangka dalam juta Rupiah)

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Deposito BTN iB (Perorangan)	507.775	6,74%	557.692	8,73%	(8,95%)
Deposito BTN iB (Lembaga)	7.019.926	93,19%	5.787.259	90,58%	21,30%
Deposito <i>On Call</i> iB	5.605	0,07%	43.910	0,69%	(87,24%)
Total	7.533.306	100,00%	6.388.861	100,00%	17,91%

Jasa dan Layanan Perbankan

Jasa dan layanan perbankan terdiri dari jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya. Pendapatan administrasi berupa biaya giro, biaya tabungan, biaya administrasi deposito, dan biaya administrasi kredit. Pendapatan layanan berupa *payment point*, kartu dan *E-Banking*, *Servicing Fee* Sekuritisasi aset, Transfer, Bank Garansi, SDB, *Fee* Bancassurance, Administrasi Pembiayaan Syariah, serta *Fee* Jasa Perbankan. Selain itu, pendapatan lainnya berupa penilaian agunan, denda, dan lain lain.

Selama tahun 2015, total penerimaan *fee based income* yang berhasil dihimpun oleh Perseroan sebesar 22,29% dari Rp917 miliar menjadi Rp1,12 triliun di tahun 2015. Peningkatan ini berasal dari pendapatan *trading* sebesar 53,12% dari total pencapaian *fee based* sebesar Rp109,10 miliar menjadi Rp167 miliar di tahun 2015.

Tabel Penerimaan *Feebased Income* s/d bulan Desember 2015

Keterangan	Des '15		Des' 14		Growth
	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	
a. Pendapatan <i>trading</i>	167	14,90%	109,10	11,90%	53,12%
b. Pendapatan administrasi	397	35,43%	347	37,81%	14,59%
1. Biaya Giro	14	1,24%	11	1,21%	25,50%
2. Biaya Tabungan	310	27,65%	281	30,66%	10,276/0
3. Biaya Adm Deposito	16	1,42%	10	1,106/0	57,76%
4. Biaya Adm kredit	57	5,11%	44	4,83%	29,34%

Tinjauan Operasional

Keterangan	Des '15		Des' 14		Growth
	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	
c. Pendapatan layanan	193	17,25%	158	17,28%	22,09%
1. <i>Payment Point</i>	4	0,38%	4	0,41%	14,99%
2. <i>Kartu & E Banking</i>	63	5,57%	50	5,49%	24,14%
3. <i>Servicing Fee</i> Sekuritisasi aset	20	1,78%	10	1,11%	96,65%
4. <i>Transfer</i>	4	0,38%	6	0,686%	-30,92%
5. <i>Bank Garansi</i>	31	2,79 %	22	2,42%	41,34%
6. <i>SDB</i>	5	0,41%	4	0,426%	21,30%
7. <i>Fee Bancassurance</i>	10	0,90%	3	0,336%	236,17%
8. <i>Adm. Pembiayaan Syariah</i>	50	4,48%	55	5,95%	-7,86%
9. <i>Fee Jasa Perbankan</i>	6	0,53%	4	0,48%	36,18%
d. Pendapatan lainnya	364	32,43%	303	33,02%	20,10%
1. <i>Penilaian agunan (LPA, taksasi)</i>	7	0,59%	3	0,36%	99,37%
2. <i>Denda</i>	95	8,48%	85	9,28%	11,81%
3. <i>Lainnya</i>	262	23,36%	214	23,38%	22,18%
Total :	1.121	100,00%	917	100,00%	22,29%

*termasuk penerimaan *fee based Income* syariah

Kartu Konsumer

Pada 2015, jumlah pemegang kartu produk Kartu Konsumer meningkat sebesar 24,97% dari 3.033.178 unit kartu di 2014 menjadi 3.790.477 unit kartu di 2015. Jumlah rekening produk Kartu ATM/Debit BTN yang meningkat sebesar 25,04%, sedangkan jumlah rekening produk Kartu Kredit BTN meningkat sebesar 12,73%.

Tabel Jumlah Pemegang Kartu Produk Kartu Konsumer

Keterangan	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
Kartu Debit	3.769.503	99,45%	3.014.573	99,39%	25,04%
Kartu Kredit	20.974	0,55%	18.605	0,61%	12,73%
Total	3.790.477	100,00%	3.033.178	100,00%	24,97%

Wealth Management

Selama periode tahun 2015, jumlah nasabah dan *Asset Under Management (AUM)* yang dikelola oleh layanan BTN Prioritas mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2015, layanan BTN Prioritas mengelola 14.471 Nasabah Prioritas dan mengelola produk *wealth* (*Surat Berharga, Reksadana, dan Bancassurance*) sebesar 17.038 nasabah atau meningkat sebesar 103,55% dari total nasabah tahun 2014.

Tabel Jumlah Nasabah *Wealth Management*

Jenis Produk	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
1. DPK	14.471	45,93%	11.317	73,11%	27,87%
Outlet	14.005		10.903		28,45%
Non Outlet	466		414		12,56%
2. Surat Berharga	4.144	13,15%	3.741	24,17%	10,77%

Tinjauan Operasional

Jenis Produk	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
ORI	2.717		1.282		111,93%
SUKUK	1.427		1.739		(17,94%)
SBR	0		720		(100,00%)
3. Reksadana	1.091	3,46%	8	0,05%	13537,50%
4. Bancassurance	11.803	37,46%	414	2,67%	2750,97%
Total	31.509	100,00%	15.480	100,00%	103,55%

Sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah *wealth management*, *Asset Under Management* selama tahun 2015 mencapai Rp18,98 triliun atau meningkat sebesar 45,14% yang semula hanya Rp13,08 triliun pada akhir tahun 2014. Rincian terkait *Asset Under Management* diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah *Asset Under Management* (dalam miliar Rupiah)

Jenis Produk	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
1. DPK	16.738	88,15%	12.340	94,32%	35,64%
Outlet	16.197		11.712		38,29%
Non Outlet	541		629		(13,90%)
2. Surat Berharga	1.825	9,61%	742	5,68%	146%
ORI	1.295		373		247,18%
SUKUK	530		269		97,19%
SBR	-		100		(100,00%)
3. Reksadana	362	1,91%	0,05	0,00%	717486,51%
4. <i>Bancassurance</i>	63	0,33%	0,46	0,00%	13542,84%
Total	18.988	100,00%	13,082	100,00%	45,15%

*Pemerintah tidak menerbitkan SBR pada Tahun 2015

Electronic – Channel

Selama periode tahun 2015, jumlah transaksi produk *e-channel* meningkat sebesar 9.515.017 transaksi atau 21,09% dari 45.126.924 transaksi di 2014 menjadi 54.641.941 transaksi di 2015. Peningkatan ini berasal dari produk *Mobile Banking* dengan peningkatan sebesar 9.515.017 transaksi atau 109,69% dari 3.535.548 transaksi di 2014 menjadi 7.413.767 transaksi di 2015.

Tabel Jumlah Transaksi *E-Channel*

Jenis Produk	2015	Komposisi	2014	Komposisi	Pertumbuhan
ATM & Kiosk	41.111.139	75,24%	38.346.516	84,97%	7,21%
CDM	124.613	0,23%	100.305	0,22%	24,23%
<i>Internet Banking</i>	251.757	0,46%	200.091	0,44%	25,82%
<i>Cash Management</i>	798.154	1,46%	587.432	1,30%	35,87%
<i>SMS Banking</i>	4.942.511	9,05%	2.357.032	5,22%	109,69%
<i>Mobile Banking</i>	7.413.767	13,57%	3.535.548	7,83%	109,69%
Total	54.641.941	100,00%	45.126.924	100,00%	21,09%

Tinjauan Operasional

Kinerja Segmen

Segmen Operasi merupakan komponen Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis sehingga memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Perseroan telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen usahanya. Segmen usaha Perseroan terbagi ke dalam segmen Konvensional dan Syariah.

Adapun informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha diuraikan sebagai berikut.

Tabel Segmen Usaha (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Segmen	14.455.136	511.073	-	14.966.209
Beban Segmen	(8.143.967)	(11.166)	-	(8.155.133)
Pendapatan Segmen-Neto	6.311.169	499.907	-	6.811.076
Pendapatan Operasional Lainnya	1.070.040	36.486	-	1.106.526
Penyajian Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non aset keuangan	(718.428)	(182.580)	-	(901.008)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	7.198	-	7.198
Beban Operasional Lainnya	(4.278.836)	(211.351)	-	(4.490.187)
Laba Operasional	2.383.945	149.660	-	2.533.605
Pendapatan (Beban) bukan operasional – Neto	(102.389)	110.670	-	8.281
Beban Pajak	(690.979)	-	-	(690.979)
Laba Tahun berjalan	1.590.577	260.330	-	1.850.907
Total Aset	159.835.661	13.268.941	(1.297.010)	171.807.592
Total Liabilitas	147.534.993	11.709.502	(1.297.010)	157.947.485

Uraian	2014			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Segmen	12.394.564	412.764	-	12.807.328
Beban Segmen	(7.332.418)	(10.329)	-	(7.342.747)
Pendapatan Segmen-Neto	5.062.146	402.435	-	5.464.581
Pendapatan Operasional Lainnya	860.284	34.536	-	894.820
Penyisihan Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non aset keuangan	(693.604)	(77.562)	-	(771.166)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(729)	-	(729)
Beban Operasional Lainnya	(3.831.984)	(178.155)	-	(4.010.139)
Laba Operasional	1.396.842	180.525	-	1.577.367
Pendapatan (Beban) bukan operasional – Neto	(19.652)	21.612	-	1.960
Beban Pajak	(433.755)	-	-	(433.755)
Laba Tahun berjalan	943.435	202.137	-	1.145.572
Total Aset	135.076.817	11.151.110	(1.645.574)	144.582.353
Total Liabilitas	124.679.741	9.295.291	(1.645.574)	132.329.458

Tinjauan Operasional

Terkait dengan pertumbuhan kinerja segmen, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Segmen Usaha

Uraian	Pertumbuhan			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Segmen	16,62%	23,82%	-	16,86%
Beban Segmen	11,07%	8,10%	-	11,06%
Pendapatan Segmen-Neto	24,67%	24,22%	-	24,64%
Pendapatan Operasional Lainnya	24,38%	5,65%	-	23,66%
Penyisihan Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non aset keuangan	3,58%	135,40%	-	16,84%
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(1087,38%)	-	(1087,38%)
Beban Operasional Lainnya	11,66%	18,63%	-	11,97%
Laba Operasional	70,67%	(17,10%)	-	60,62%
Pendapatan (Beban) bukan operasional – Neto	421,01%	412,08%	-	322,50%
Beban Pajak	59,30%	-	-	59,30%
Laba Tahun berjalan	68,59%	28,79%	-	61,57%
Total Aset	18,33%	18,99%	(21,18%)	18,83%
Total Liabilitas	18,33%	25,97%	(21,18%)	19,36%

Secara umum, kinerja segmen operasi Perseroan menunjukkan pergerakan kinerja yang sama di bank konvensional dan bank syariah. Laba tahun berjalan bank konvensional meningkat sebesar 68,59% dan bank syariah meningkat sebesar 28,79%. Sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan, jumlah aset dan jumlah liabilitas mengalami peningkatan. Jumlah aset bank konvensional meningkat sebesar 18,33% dan bank syariah meningkat 18,99%. Demikian pula dengan liabilitas bank konvensional yang meningkat sebesar 18,33% dan bank syariah yang meningkat sebesar 25,97%.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Penetapan strategi pemasaran diarahkan untuk menjadikan Perseroan sebagai Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan. Strategi pemasaran yang dilakukan terkait dengan produk-produk Perseroan diuraikan sebagai berikut.

1. Bidang Kredit

Pertumbuhan kredit Perseroan pada tahun 2016 akan ditopang oleh pertumbuhan KPR dan kredit konstruksi untuk mendukung program Sejuta Rumah. Direncanakan akan disalurkan KPR sebanyak 200 ribu unit yang akan mendorong pertumbuhan total kredit sebesar 18%-19%. Adapun strategi pemasaran bidang kredit tahun 2016 secara umum adalah optimalisasi program Sejuta Rumah, meningkatkan segmen *home equity* dan *consumer loan*, selektif pada segmen *commercial* – non perumahan. Inisiatif yang telah dilakukan adalah:

Tinjauan Operasional

Tabel Strategi Pemasaran Bidang Kredit

Strategi	Inisiatif
Optimalisasi program Sejuta Rumah	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kerjasama dengan <i>stakeholder</i> perumahan Aliansi strategis dengan BUMN dan lembaga pemilik dana untuk mengembangkan KPR program Pemasaran melalui tim Griya KPR Pameran BTN <i>Property Expo</i> dan <i>gathering</i>
Meningkatkan segmen <i>equity loan</i> dan <i>consumer loan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan <i>database</i> debitur untuk penawaran kembali kredit
Selektif pada segmen <i>commercial - non housing</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian kredit komersial <i>non housing</i> lebih selektif, diprioritaskan pemberian kepada debitur prima
Memperbaiki pelayanan Perkreditan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enhancement</i> aplikasi perkreditan (<i>iLoan</i>, <i>CSM</i>, <i>iCremo</i>, <i>btnproperty.co.id</i>, dan lainnya) Implementasi <i>four eyes principles</i> lebih luas

2. Bidang Pendanaan

Strategi pemasaran di bidang pendanaan difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kredit khususnya program Sejuta Rumah, adapun strategi yang akan dikembangkan adalah meningkatkan dana pihak ketiga murah, kerjasama dengan institusi pemilik dana besar untuk pembiayaan KPR program, dan meningkatkan *wholesale funding*.

Tabel Strategi Pemasaran Bidang Pendanaan

Strategi	Inisiatif
Meningkatkan dana pihak ketiga murah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama B to B (penawaran fitur <i>SPAN</i>, <i>H2H</i>, <i>iCash</i>, <i>virtual account</i>, <i>EduPayment</i>, <i>Payroll</i>, <i>Billing payment</i>, serta pembukaan <i>outlet</i> di instansi yang strategis) <i>Marketing communication</i>, program <i>gimmick</i>, <i>customer gathering</i>, serta peningkatan produktivitas <i>outlet</i> Pengembangan produk Tabungan Rencana, Tabungan Umroh, Tabungan Perumahan Syariah, Tabungan Pensiunan dan Tabungan Pos Implementasi sistem monitoring <i>sales</i> termasuk sistem apresiasi bagi tenaga penjual
Kerjasama dengan institusi pemilik dana besar untuk pembiayaan KPR program	<ul style="list-style-type: none"> Aliansi strategis dengan BUMN/lembaga dalam penempatan dana untuk KPR program seperti dengan BPJS- Ketenagakerjaan
Meningkatkan <i>wholesale funding</i>	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan obligasi/pinjaman/NCD Menjalin kerjasama dengan investor pemilik dana baik dalam dan luar negeri Sekuritisasi KPR

3. Peningkatan *Fee Based Income*

Strategi pemasaran di bidang pendapatan operasional lainnya difokuskan untuk tumbuh sebesar 20%. Adapun strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan jumlah *account* baru untuk menambah pendapatan administrasi baik kredit maupun dana.
- Meningkatkan aktivitas *treasury*, *transaction services*, *card business*, *wealth management* dan *payment point*.
- Meningkatkan bank garansi pada kantor cabang potensial.
- Menggali potensi *fee based* lainnya, seperti mengembangkan SKBDN dan L/C.
- Mengoptimalkan bisnis *wealth management* dalam memasarkan produk *non banking*.

Tinjauan Operasional

Pangsa Pasar

Analisis pangsa pasar diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank.

Tabel Kinerja Bank Dibanding Rata-rata Industri (dalam miliar Rupiah)

Uraian		2015*	2014	2013
Jumlah Aset	Industri	6.022,90	5.615,10	4.954,50
	Perseroan	171,81	144,58	131,17
	Pangsa Pasar	2,85%	2,57%	2,65%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri	4.367,00	4.114,40	3.664,00
	Perseroan	127,71	106,47	96,21
	Pangsa Pasar	2,92%	2,59%	2,63%
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Industri	3.950,70	3.674,30	3.292,90
	Perseroan	136,91	114,35	100,47
	Pangsa Pasar	3,47%	3,11%	3,05%
Perbandingan Rasio Keuangan dengan rata-rata industri Bank Umum				
CAR	Industri	21,12%	19,38%	18,36%
	Perseroan	16,97%	14,64%	15,62%
BOPO	Industri	84,87%**	82,62%	77,98%
	Perseroan	84,83%	88,97%	82,19%
ROA	Industri	2,30%	2,80%	3,08%
	Perseroan	1,61%	1,14%	1,79%
LDR	Industri	90,47%	89,30%	89,70%
	Perseroan	108,78%	108,86%	104,42%

Keterangan:

*) Data Industri dari Bank Indonesia per November 2015

**)BOPO: Data Kajian Stabilitas Keuangan BI, BOPO untuk tahun 2015 baru tersedia data Industri per Juni 2015.

Pangsa Pasar Berdasarkan Aset

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Perseroan di 2015 mencapai 2,85%. Hal ini disebabkan oleh proporsi peningkatan jumlah aset Perseroan yang sejalan dengan proporsi peningkatan jumlah aset bank umum di Indonesia.

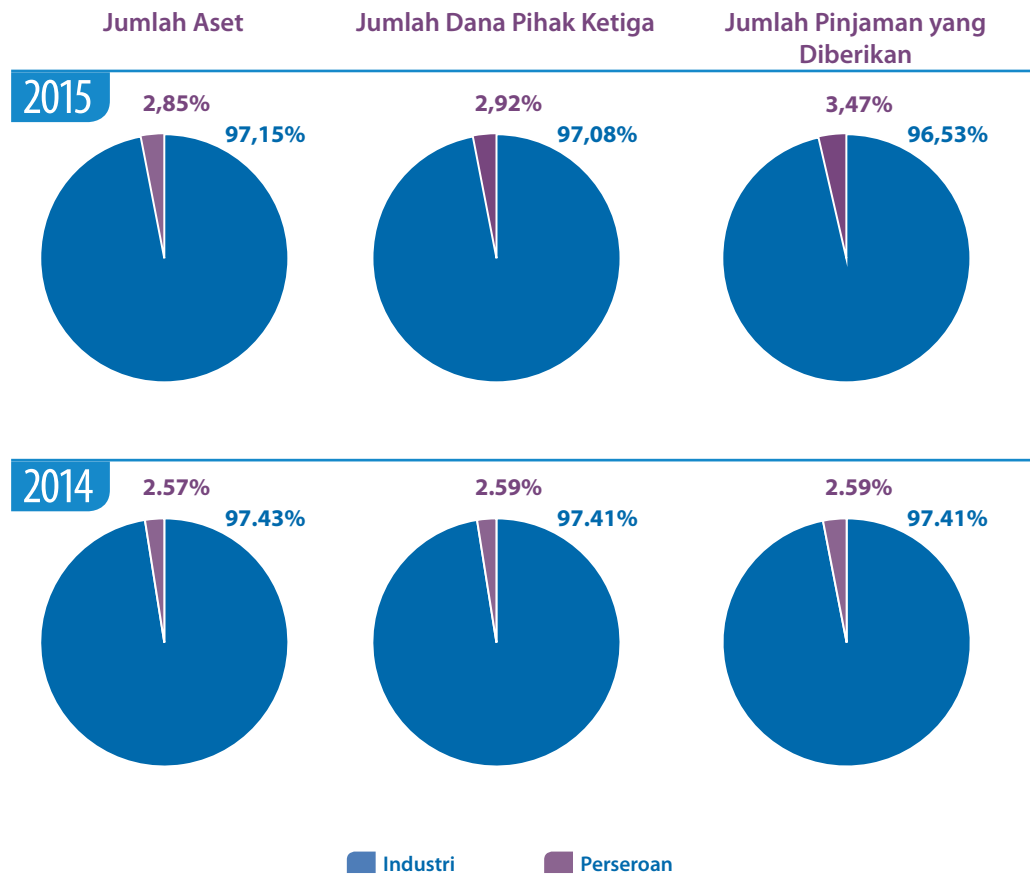
Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di 2015 mencapai 2,92%. Hal ini disebabkan kemampuan Bank dalam mengelola produk simpanan Bank sehingga mampu meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Bank sejalan dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum di Indonesia.

Pangsa Pasar Berdasarkan Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di 2015 mencapai 3,47%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank dalam mengelola produk pinjaman sehingga mampu meningkatkan penyaluran kreditnya.

Tinjauan Operasional



Perbandingan Rasio Keuangan dengan Rata-Rata Industri Bank Umum

Berdasarkan rasio keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal (CAR) di 2015 mencapai 16,97%, meningkat dibandingkan tahun 2014 dan 2013 namun masih lebih rendah dari industri. Sedangkan beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 84,83% dibandingkan tahun 2014 namun masih lebih rendah dibandingkan industri. Imbal hasil atas aset (ROA) mengalami peningkatan sebesar 1,63% di tahun 2015 namun masih lebih rendah dari industri. Selain itu, tingkat likuiditas (LDR) menurun sebesar 108,80% di tahun 2015 namun masih lebih tinggi dari industri.

Prospek Usaha 2016

Bank Indonesia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 akan mencapai kisaran 5,2%-5,6% yoy. Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Sementara itu, investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makro ekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat, diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor, khususnya ekspor manufaktur.

Tinjauan Operasional

Dari sektor Perbankan, stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat 9,7% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya, namun meningkat di bulan Agustus dan diperkirakan mencapai 10,9% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK pada Juli 2015 tercatat sebesar 14,6% (yoy). Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 optimis akan berada pada kondisi yang lebih baik. Melihat upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016 serta pertumbuhan kredit yang diperkirakan masih akan terus meningkat di tahun 2016.

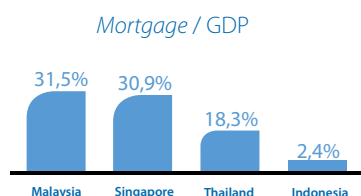
Melihat Prospek usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk memanfaatkan peluang yang ada terutama dalam mengembangkan bisnis Perumahan yang disalurkan melalui Program Sejuta Rumah Sebagai Peluang Bisnis Perseroan. Adapun uraian terkait program tersebut ialah sebagai berikut.

Program Sejuta Rumah Sebagai Peluang Bisnis

Memperhatikan pencapaian program Sejuta Rumah dan permasalahan *backlog* perumahan, Perseroan dapat berperan mengurangi *backlog* dan sekaligus menangkap peluang dalam mengembangkan bisnis perumahan. Beberapa alasan bahwa bisnis perumahan di Indonesia masih memiliki prospek antara lain: (a) Kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi sehat dan pasar pembiayaan perumahan yang jauh dari jenuh; (b) Penduduk *middle class* tumbuh sangat *significant*; (c) *Backlog* penyediaan rumah per tahun masih cukup tinggi; dan (d) Penjualan rumah sebagian besar dengan kredit.

Adapun skim prospek bisnis perumahan di Indonesia diuraikan sebagai berikut.

Gambar Prospek Bisnis Perumahan



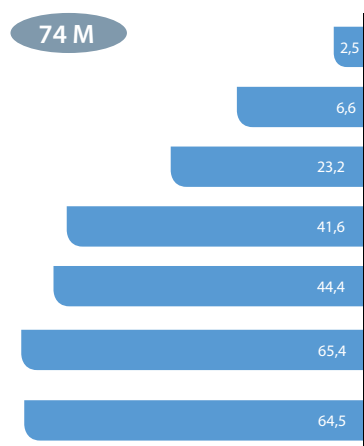
Kondisi ekonomi sehat dan pasar pembiayaan perumahan yang jauh dari jenuh

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

- GDP tumbuh > 6%
- BI rate terkendali
- Pertumbuhan penduduk usia produktif
- Konsumsi meningkat > 4%
- Arus modal investasi > 25%

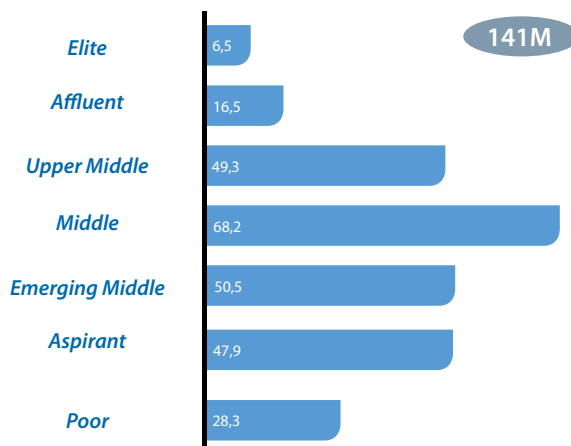
Sumber : Bank Indonesia, Housing Finance Network

Indonesia Population 2012 (millions)



Penduduk *Middle Class* Tumbuh Sangat Siginifikan

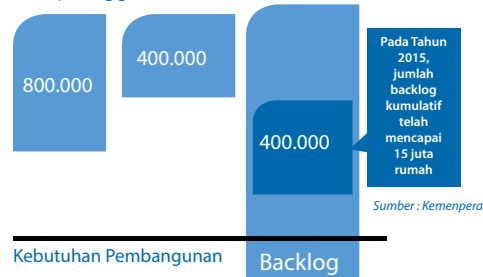
Indonesia Population 2020 (millions)



Sumber : BCG

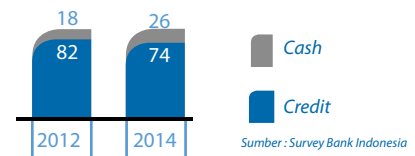
Tinjauan Operasional

Tingkat kebutuhan Rumah per Tahun Cukup Tinggi



Backlog Penyediaan Rumah per Tahun Cukup Tinggi

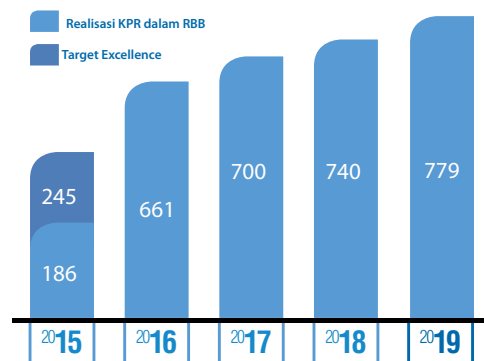
Persentase Pembiayaan Rumah Berdasarkan Dengan Kredit



Penjualan Rumah Sebagian Besar Dengan Kredit

Di sisi lain, berdasarkan data kementerian Pupera bahwa target *supply* rumah tahun 2015 mencapai 431.000 unit dan terus meningkat menjadi 700.000 unit di tahun 2016. Hal ini menjadi peluang Perseroan dalam menyalurkan KPR dan kredit modal kerja bagi pelaku perumahan (pengembang). Berikut perkiraan potensi target *supply* rumah dan potensi KPR dalam rangka program Sejuta Rumah.

Gambar Potensi Penyaluran KPR Program Sejuta Rumah



Potensi Penyaluran KPR Program Sejuta Rumah

Potensi penyaluran KPR dalam program Sejuta Rumah di tahun 2015 adalah sebesar 431 ribu unit, namun diperkirakan dapat teralisasi sejumlah 186 unit mengingat belum siapnya seluruh prasyarat pendukung sesuai gambar potensi penyaluran KPR Program Sejuta Rumah di atas. Sisa target sebesar 245 ribu unit merupakan target *excellence* Perseroan berdasarkan potensi yang ada. Di tahun 2016 potensi semakin meningkat sejalan dengan prasarana pendukung mulai disediakan oleh pihak pemerintah yaitu mencapai 661 ribu unit dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Strategi Pengembangan Usaha

Melihat prospek usaha industri perbankan Indonesia tersebut, Perseroan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih setiap peluang dan potensi yang tercipta. Perseroan telah menetapkan strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk menangkap peluang tersebut. Strategi pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2016 mengacu kepada kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, *corporate plan* dan analisa SWOT yang telah dilakukan. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan bank, telah disusun program transformasi dengan beberapa tambahan inisiatif strategis sebagai berikut.

Tinjauan Operasional

1. *Business transformation*, meliputi:
 - a. Perkreditan
 - 1) Selain tetap fokus pada kredit perumahan dan mendukung program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat, dengan porsi minimal 85%. Maka dilakukan juga beberapa perbaikan strategi implementasi:
 - Kredit perumahan, langkah strategis yang dilakukan adalah:
 - Pembiayaan kredit subsidi, dengan strategi meningkatkan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, yaitu: penyaluran KPR FLPP dengan Kementerian/institusi yang menangani perumahan Rakyat (penguasaan pangsa pasar > 95%).
 - Untuk pembiayaan KPR Non subsidi, target pasarnya adalah masyarakat ekonomi menengah bawah (harga rumah < Rp350 juta) dengan pangsa pasar > 60%, melalui strategi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN, Multinasional maupun swasta nasional dalam penyediaan rumah bagi karyawan (B to B).
 - Kredit *home equity*, yaitu kredit yang diberikan untuk renovasi, *top up* KPR, dilakukan dengan strategi optimalisasi *customer based* debitur KPR baik eksisting maupun yang sudah lunas.
 - Untuk kredit pembangunan perumahan ditujukan untuk mendukung *supply* rumah (KPR) melalui menyediakan modal kerja konstruksi, pembebasan lahan, maupun infrastruktur perumahan bagi pengembang/developer
 - Tambahan strategi yang akan dilakukan:
 - Pembiayaan kredit program, strategi yang dilakukan adalah Kerjasama dengan lembaga/instansi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bapetarum, Pemda dan lainnya. Pola kerjasama yang akan dirintis dalam pemenuhan kredit program dengan BPJS ketenagakerjaan dan sekaligus dukungan dalam program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat.
 - Kredit non perumahan, langkah strategis yang dilakukan adalah : Tetap fokus pada kredit-kredit yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan (*housing related*) dengan memanfaatkan *value chain* perumahan seperti kredit konstruksi, modal kerja dan pembiayaan lahan untuk rumah subsidi.
 - 2) Memperbaiki manajemen perkreditan meliputi proses kredit, SDM perkreditan, dan memperkuat manajemen risiko kredit.
 - 3) Memperbaiki kualitas kredit melalui implementasi *collection management system* berdasarkan *time bucket* dan *asset management*.
 - b. Pendanaan yang mendukung bank fokus perumahan.
Adapun sumber pendanaan yang diharapkan mendukung kegiatan bank dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Pendanaan untuk KPR subsidi/program berasal dari penempatan dana dari lembaga/instansi yang terkait kerjasama kredit (BLU-PPP, Bapetarum, Pemda, BPJS, dan lainnya)

Tinjauan Operasional

dan pendanaan pendamping berasal dari *capital market* (penerbitan surat berharga) dan pinjaman.

- 2) Pendanaan untuk KPR non subsidi disiapkan dari pendanaan *capital market* dan pinjaman, *core deposit* dana pihak ketiga yang berorientasi pada *low cost*, dan sekuritisasi KPR.
- 3) Sedangkan pendanaan untuk kredit lainnya berasal dari pengumpulan dana pihak ketiga.

Strategi tambahan dalam pendanaan yang akan dilakukan:

Pola pendanaan yang akan dikembangkan dalam rangka mendukung program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang ditempuh adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung yaitu BPJS TK, Taspen, SMF, World Bank, ADB dan lainnya.

- c. Memperkuat bisnis syariah yang fokus pada pembiayaan sektor perumahan dan sektor produktif segmen UMKM.
- d. Memperkuat permodalan dengan perbaikan profitabilitas, sekuritisasi KPR, penerbitan saham baru, *sub debt* dan *dividen policy*.
- e. Menunjang kegiatan masyarakat dengan berbagai fasilitas yang dimiliki Perseroan seperti *transaction services* (loket dan *e channel*) dan *wealth management*.

2. *Infrastructure transformation*, meliputi:

- a. Memperluas dan meningkatkan aktivitas operasional perbankan yang berbasis IT.
- b. Meningkatkan *Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance* (GRC) dengan melakukan perbaikan proses untuk memperoleh sertifikasi ISO di tahun 2015. Sertifikasi yang dilakukan adalah sertifikasi ISO 9001 terhadap Unit *Risk Management* dan *Compliance* serta validasi model pengukuran risiko yang digunakan oleh RMD.
- c. Mengembangkan *delivery channel* melalui pengembangan jaringan kantor dan ATM serta *e-channel*.
- d. Mengembangkan *Housing Finance Institute*.

3. *People transformation*, meliputi:

- a. Membangun budaya perusahaan baru, meningkatkan peran *leaders* dalam proses pengelolaan *Human Capital (Culture and Leadership)*.
- b. Membangun kebanggaan bersikap laku profesional dan mengurangi pegawai yang menghambat budaya organisasi menjadi organisasi yang pintar.
- c. Memahami dan mempraktekkan SLA standar dunia (*Strategic and Tactical HC Practices*)
- d. *Rebranding* Perseroan sesuai visi, misi, dan budaya perusahaan.

Tinjauan Keuangan

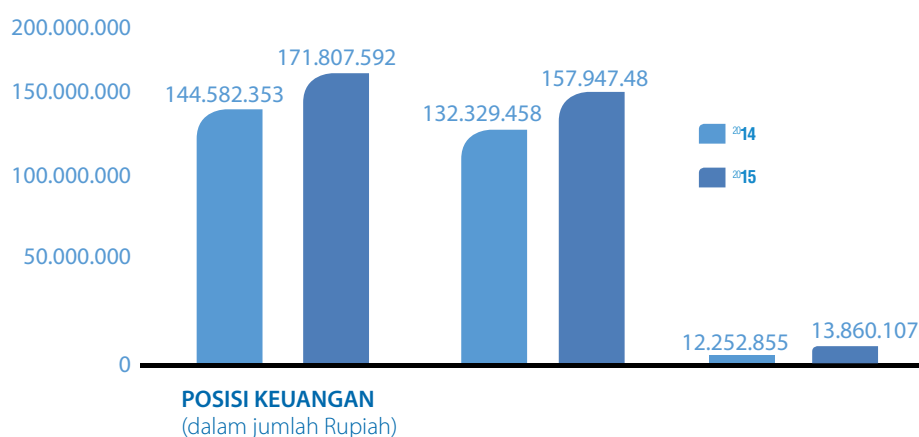
Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang terlampir material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
ASET				
Aset Keuangan	168.700.592	142.085.981	26.614.611	18,73%
Aset Non Keuangan	3.107.000	2.496.372	610.628	24,46%
TOTAL ASET	171.807.592	144.582.353	27.225.239	18,83%
LIABILITAS				
Liabilitas Keuangan	154.102.042	129.130.449	24.971.593	19,34%
Liabilitas Non Keuangan	3.845.443	3.199.009	646.434	20,21%
Total Liabilitas	157.947.485	132.329.458	25.618.027	19,36%
Total Ekuitas	13.860.107	12.252.895	1.607.212	13,12%
Total Liabilitas dan Ekuitas	171.807.592	144.582.353	27.225.239	18,83%



Aset

Per 31 Desember 2015, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp171,81 triliun dari Rp144,58 triliun per 31 Desember 2014. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp27,23 triliun atau sebesar 18,83%. Peningkatan total aset tersebut khususnya berasal dari peningkatan aset keuangan.

Aset Keuangan

Aset keuangan Perseroan per 31 Desember 2015 mencapai Rp168,70 triliun, meningkat Rp26,61 triliun atau sebesar 18,73% dari Rp142,09 triliun per 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari peningkatan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, serta peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka dan *interbank call money*. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah meningkat Rp22,56 triliun

Tinjauan Keuangan

atau sebesar 19,73% dari Rp114,35 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp136,91 triliun per 31 Desember 2015. Sedangkan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat Rp6,34 triliun atau sebesar 423,87% dari Rp1,49 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp7,83 triliun per 31 Desember 2015.

Tabel Aset Keuangan (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Kas	1.181.219	920.482	260.737	28,33%
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	9.371.509	1.614.842	17,23%
Giro pada Bank Lain	201.361	1.093.393	(892.032)	(81,58%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7.839.477	1.496.455	6.343.022	423,87%
Efek-Efek - Neto	1.807.561	5.436.970	(3.629.409)	(66,75%)
Obligasi Pemerintah	8.230.908	8.238.065	(7.157)	(0,09%)
Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah - Neto	136.905.226	114.345.618	22.559.608	19,73%
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	1.183.489	365.000	30,84%
Total	168.700.592	142.085.981	26.614.611	18,73%

Laba tahun berjalan Bank mengalami peningkatan Rp705,34 miliar atau sebesar 61,57% dari Rp1,15 triliun di 2014 menjadi Rp1,85 triliun di 2015.

Total aset Bank meningkat menjadi Rp171,81 triliun dari Rp144,58 triliun di 2014. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp27,23 triliun atau sebesar 18,83%.

Per 31 Desember 2015, jumlah kas Perseroan mencapai Rp1,18 triliun, meningkat Rp260,74 miliar atau tumbuh 28,33% dibandingkan kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp920,48 miliar. Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas Bank.

Giro pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp1,61 triliun atau 17,23% dari Rp9,37 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp10,99 triliun per 31 Desember 2015. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan Giro pada Bank Indonesia akibat naiknya simpanan dari nasabah. Giro pada Bank Lain mengalami penurunan sebesar Rp892,03 miliar atau 81,58% dari Rp1,09 triliun per Desember 2014 menjadi Rp201,36 miliar per 31 Desember 2015. Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas Bank.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mengalami peningkatan sebesar Rp6,34 triliun atau 423,87% dari Rp1,50 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp7,84 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penempatan pada Bank Indonesia dalam *Deposit Facility* sebagai bentuk investasi dan pengelolaan likuiditas.

Efek-Efek mengalami penurunan sebesar Rp3,63 triliun atau 66,75% dari Rp5,44 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp1,81 triliun per 31 Desember 2015. Penurunan ini sebagai akibat dari kegiatan *management treasury*.

Obligasi Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp7,16 miliar atau 0,09% dari Rp8,24 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp8,23 triliun per 31 Desember 2015. Penurunan ini khususnya berasal dari Obligasi Pemerintah dalam kategori diperdagangkan sebagai akibat kegiatan *management treasury*.

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah mengalami peningkatan sebesar Rp22,56 triliun atau 19,73% dari Rp114,35 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp136,91 triliun per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan baru terutama pada kredit sektor perumahan sebagai bagian dari dukungan Bank terhadap program Sejuta Rumah.

Bunga yang masih akan diterima mengalami peningkatan sebesar Rp365 miliar atau 30,84% dari Rp1,18 triliun per

Tinjauan Keuangan

31 Desember 2014 menjadi Rp1,55 triliun per 31 Desember 2015. Hal ini terutama berasal dari bunga kredit yang masih akan diterima yang disebabkan karena meningkatnya *volume* kredit Bank.

Aset Non Keuangan

Tabel Aset Non Keuangan (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Aset Tetap – neto	1.553.401	1.488.383	65.018	4,37%
Aset Lain-lain – neto	1.553.599	1.007.989	545.610	54,13%
Total	3.107.000	2.496.372	610.628	24,46%

Aset non keuangan Perseroan meningkat Rp610,63 miliar atau 24,46% dari Rp2,50 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp3,11 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan ini didominasi oleh Aset lain-lain - neto yang meningkat sebesar Rp545,61 miliar atau 54,13% dari Rp1,01 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp1,55 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan aset lain-lain - neto khususnya berasal dari biaya dibayar dimuka terutama biaya sewa gedung dan kendaraan serta peningkatan uang muka pajak (lihat catatan atas laporan keuangan terkait perpajakan).

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp65,02 miliar atau 4,37% dari Rp1,49 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp1,55 triliun per 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh meningkatnya perabot kantor untuk menunjang peningkatan operasional Bank.

Liabilitas

Per 31 Desember 2015, total liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp25,62 triliun atau 19,36% dari Rp132,33 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp157,95 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari peningkatan liabilitas keuangan.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp24,97 triliun atau 19,34% dari Rp129,13 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp154,10 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas keuangan khususnya berasal dari peningkatan simpanan nasabah yang mencapai Rp21,24 triliun atau 19,95% dari Rp106,47 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp127,71 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan simpanan nasabah terbesar khususnya berasal dari deposito berjangka.

Tabel Liabilitas Keuangan (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Liabilitas Segera	1.960.789	1.835.807	124.982	6,81%
Simpanan dari Nasabah	127.708.670	106.470.677	21.237.993	19,95%
Simpanan dari Bank Lain	1.721.198	1.179.269	541.929	45,95%
Bunga yang masih harus dibayar	357.364	308.996	48.368	15,65%
Pinjaman yang diterima	7.726.728	6.998.213	728.515	10,41%
Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.135.091	3.817.603	(1.682.512)	(44,07%)
Surat-Surat Berharga yang diterbitkan	12.492.202	8.519.884	3.972.318	46,62%
Total	154.102.042	129.130.449	24.971.593	19,34%

Tinjauan Keuangan

Liabilitas Segera meningkat sebesar Rp124,98 miliar atau 6,81% dari Rp1,84 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp1,96 triliun per 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang pajak badan akibat naiknya laba Bank.

Simpanan dari nasabah meningkat sebesar Rp21,24 triliun atau 19,95% dari Rp106,47 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp127,71 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan terbesar khususnya berasal dari Deposito Berjangka akibat dari efektifitas pemasaran produk Bank.

Simpanan dari Bank Lain meningkat sebesar Rp541,93 miliar atau 45,95% dari Rp1,18 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp1,72 triliun per 31 Desember 2015 yang berasal dari meningkatnya deposito dari bank lain.

Bunga yang masih harus dibayar meningkat sebesar Rp48,37 miliar atau 15,65% dari Rp309 miliar per 31 Desember 2014 menjadi Rp357,36 miliar per 31 Desember 2015. Hal ini khususnya berasal dari bunga obligasi akibat meningkatnya jumlah obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pinjaman yang Diterima meningkat sebesar Rp728,52 miliar atau 10,41% dari Rp6,99 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp7,73 triliun per 31 Desember 2015 yang disebabkan meningkatnya pinjaman bilateral dalam rangka mendukung ekspansi kredit Perseroan.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali menurun sebesar Rp1,68 triliun atau 44,07% dari Rp3,82 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp2,14 triliun per 31 Desember 2015 sebagai akibat dari pembelian kembali efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang sudah habis masa kontrak repo-nya.

Surat-surat Berharga yang Diterbitkan meningkat sebesar Rp3,97 triliun atau 46,62% dari Rp8,52 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp12,49 triliun per 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I dalam rangka mendukung ekspansi bisnis Perseroan.

Liabilitas Non Keuangan

Liabilitas non keuangan meningkat Rp646,43 miliar atau sebesar 20,21% dari Rp3,19 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp3,85 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas non keuangan berasal dari peningkatan liabilitas imbalan kerja, khususnya imbalan pasca kerja yang disediakan Perseroan sebagai program pensiun.

Tabel Liabilitas Non Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	7.198	(7.198)	(100,00%)
Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain	3.835.877	3.076.551	759.326	24,68%
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	9.566	115.260	(105.694)	(91,70%)
Total	3.845.443	3.199.009	646.434	20,21%

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi mengalami penurunan sebesar Rp7,20 miliar atau 100% dari Rp7,20 miliar per 31 Desember 2014 menjadi nihil per 31 Desember 2015 yang disebabkan tidak terdapat penurunan nilai untuk pos komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2015.

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain mengalami peningkatan sebesar Rp759,33 miliar atau 24,68% dari Rp3,08 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp3,84 triliun per 31 Desember 2015 yang berasal dari meningkatnya setoran jaminan kredit akibat meningkatnya *volume* kredit yang diberikan dan meningkatnya liabilitas imbalan kerja sebagai dampak dari meningkatnya jumlah karyawan Perseroan.

Tinjauan Keuangan

Liabilitas Pajak Tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp105,69 miliar atau 91,70% dari Rp115,26 miliar per 31 Desember 2014 menjadi Rp39,57 miliar per 31 Desember 2015. Hal ini berasal dari koreksi positif atas beda temporer yang disebabkan oleh lebih besarnya pembentukan CKPN komersil terhadap pembentukan PPAP sesuai Perpajakan.

Ekuitas

Tabel Ekuitas (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Modal Saham	5.291.173	5.283.848	7.325	0,14%
Tambahan Modal Disetor	2.046.598	2.028.136	18.462	0,91%
Opsi Saham	2.690	9.483	(6.793)	(71,63%)
Kerugian Neto yang belum direalisasi atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah Pajak Tangguhan	(133.690)	(90.013)	(43.677)	48,52%
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(106.144)	(110.251)	4.107	(3,73%)
Saldo Laba	6.759.480	5.131.692	1.627.788	31,72%
Telah Ditentukan Penggunaannya	4.751.833	3.859.360	892.473	23,12%
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.007.647	1.272.332	735.315	57,79%
Total Ekuitas	13.860.107	12.252.895	1.607.212	13,12%

Per 31 Desember 2015, total ekuitas Perseroan meningkat Rp1,61 triliun atau sebesar 13,12% dari Rp12,25 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp13,86 triliun per 31 Desember 2015. Peningkatan total ekuitas khususnya berasal dari saldo laba dan tambahan modal disetor. Pertumbuhan terbesar berasal dari saldo laba yang mencapai peningkatan sebesar Rp1,63 triliun atau 31,72% dari Rp5,13 triliun per 31 Desember 2014 menjadi Rp6,76 triliun per 31 Desember 2015. Sedangkan tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp18,46 miliar atau sebesar 0,91% yang disebabkan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8, dan MESOP III tahap 5 dan 6, tahun 2015 dengan total tambahan Modal disetor pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2,05 triliun.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

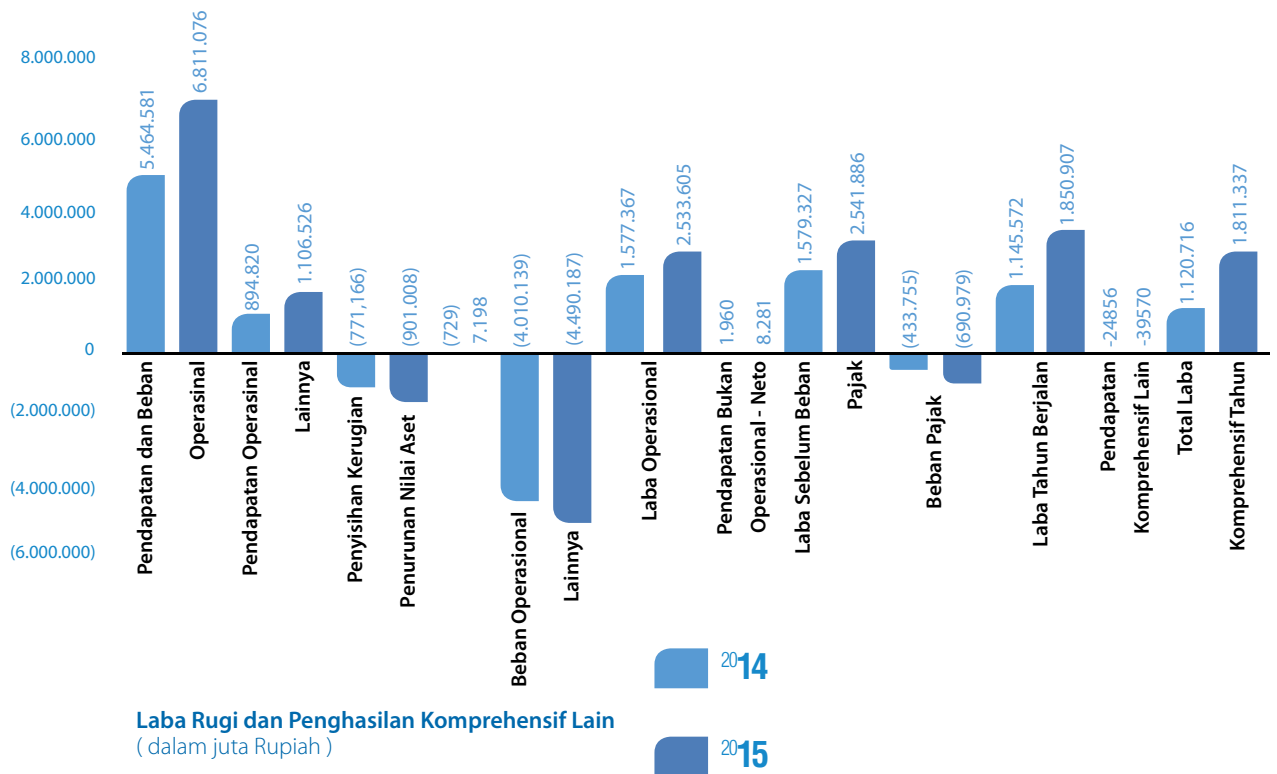
Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil – Neto	6.811.076	5.464.581	1.346.495	24,64%
Pendapatan Operasional Lainnya	1.106.526	894.820	211.706	23,66%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan non- Keuangan	(901.008)	(771.166)	(129.842)	16,84%
(Pembalikan) Beban Estimasi Penyisihan Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	7.198	(729)	7.927	(1087,38%)
Beban Operasional Lainnya	(4.490.187)	(4.010.139)	(480.048)	11,97%
Laba Operasional	2.533.605	1.577.367	956.238	60,62%
Pendapatan Bukan Operasional – Neto	8.281	1.960	6.321	322,50%
Laba Sebelum Beban Pajak	2.541.886	1.579.327	962.559	60,95%

Tinjauan Keuangan

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Beban Pajak	(690.979)	(433.755)	(257.224)	59,20%
Laba Tahun Berjalan	1.850.907	1.145.572	705.335	61,57%
Pendapatan Komprehensif Lain	(39.570)	(24.856)	(14.714)	59,20%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan-Setelah Pajak	1.811.337	1.120.716	690.621	61,62%
Laba Per Saham Dasar*	175	108	67	62,04%
Laba Per Saham Dilusian*	175	108	67	62,04%

*dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh



Tinjauan Keuangan

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan pada tahun 2015 mencapai Rp6,81 triliun, meningkat Rp1,35 triliun atau sebesar 24,64% pada tahun 2014 yang mencapai Rp5,46 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil yang lebih besar dari beban bunga dan bonus. Peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil sebesar Rp2,16 triliun atau 16,86% di tahun 2015. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pendapatan bunga yang mencapai Rp2,06 triliun atau sebesar 16,62%.

Tabel Pendapatan (Beban) Operasional (Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	14.966.209	12.807.328	2.158.881	16,86%
Bunga	14.455.136	12.394.564	2.060.572	16,62%
Bagi hasil secara syariah	511.073	412.764	98.309	23,82%
Beban Bunga dan Bonus	(8.155.133)	(7.342.747)	(812.386)	11,06%
Bunga	(8.073.584)	(7.295.733)	(777.851)	10,66%
Beban Pendanaan Lainnya	(70.383)	(36.685)	(33.698)	91,86%
Bonus	(11.166)	(10.329)	(837)	8,10%
Total	6.811.076	5.464.581	1.346.495	24,64%

Pendapatan Bunga

Jumlah pendapatan bunga meningkat sebesar Rp2,06 triliun atau 16,62% dari Rp12,39 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp14,46 triliun di tahun 2015 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah pendapatan bunga dari kredit yang diberikan Perseroan. Pendapatan bunga Perseroan dari kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp2,17 triliun atau 19,12% dari Rp11,35 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp13,52 triliun di tahun 2015 yang disebabkan oleh meningkatnya *volume* atau penyaluran kredit akibat dari ekspansi bisnis Perseroan serta perbaikan kualitas aset.

Tabel Pendapatan Bunga (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Kredit yang diberikan dan piutang				
Kredit yang diberikan	13.523.274	11.352.218	2.171.056	19,12%
Giro pada Bank Indonesia	58.935	53.634	5.301	9,88%
Giro pada Bank Lain	3.496	3.125	371	11,87%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	116.020	100.573	15.447	15,36%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	725	37	688	1859,46%
Nilai wajar melalui Laba Rugi				
Obligasi Pemerintah	5.914	6.834	(920)	(13,46%)
Efek-efek	360	878	(518)	(59,00%)
Tersedia untuk Dijual				
Obligasi Pemerintah	382.072	373.979	8.093	2,16%
Efek-efek	166.888	361.716	(194.828)	(53,86%)
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	99.939	78.712	21.227	26,97%
Efek-efek	97.513	62.858	34.655	55,13%
Total	14.455.136	12.394.564	2.060.572	16,62%

Tinjauan Keuangan

Pendapatan Perseroan dari Bagi Hasil secara syariah mengalami peningkatan sebesar Rp98,31 miliar atau 23,82% dari Rp412,76 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp511,07 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan terutama oleh penyaluran pembiayaan syariah dan perbaikan kualitas aset.

Beban Bunga dan Bonus mengalami peningkatan sebesar Rp812,39 miliar atau 11,06% dari Rp7,34 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp8,16 triliun pada tahun 2015. Hal ini khususnya berasal dari peningkatan beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan Perseroan akibat bertambahnya *volume* surat berharga yang diterbitkan.

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya-neto meningkat Rp390,26 miliar atau sebesar 10,04% dari Rp3,89 triliun di 2014 menjadi Rp4,28 triliun di 2015. Hal ini disebabkan peningkatan pendapatan operasional lainnya yang diperoleh Perseroan lebih rendah dari peningkatan beban operasional lainnya. Peningkatan beban operasional lainnya khususnya berasal dari beban gaji dan tunjangan karyawan yang mencapai Rp1,56 triliun di tahun 2014 menjadi Rp1,93 triliun di tahun 2015. Peningkatan beban gaji dan tunjangan karyawan meningkat sebesar Rp356,09 miliar atau 23,34% akibat dari meningkatnya jumlah karyawan.

Tabel Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lain

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Pendapatan Operasional Lainnya	1.106.526	894.820	211.706	23,66%
Pungutan administrasi dan Denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	533.688	468.951	64.737	13,80%
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	210.996	187.578	23.418	12,48%
Keuntungan dari penjualan efek-efek – Neto	147.558	61.696	85.862	139,17%
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – Neto	19.495	47.406	(27.911)	(58,88%)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek – Neto	-	999	(999)	(100,00%)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah – Neto	-	5.571	(5.571)	(100,00%)
Lain-lain	194.789	122.619	72.170	58,86%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(901.008)	(771.166)	(129.842)	16,84%
Pembalikan (Beban) estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	7.198	(729)	7.927	1087,38%
Beban Operasional Lainnya	(4.490.187)	(4.010.139)	(480.048)	11,97%
Beban Umum dan Administrasi	(2.151.266)	(2.122.830)	(28.436)	1,34%
Beban Gaji dan tunjangan karyawan	(1.929.346)	(1.564.254)	(365.092)	23,34%
Premi program penjamin Pemerintah	(229.549)	(203.451)	(26.098)	12,83%
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah – Neto	(193)	-	(193)	-
Lain-lain	(179.833)	(119.604)	(60.229)	50,36%
Total	(4.277.471)	(3.887.214)	(390.257)	10,04%

Tinjauan Keuangan

Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp64,74 miliar atau 13,80% dari Rp468,95 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp533,69 miliar pada tahun 2015 yang berasal dari meningkatnya biaya pungutan administrasi simpanan nasabah yang disebabkan karena meningkatnya jumlah rekening simpanan yang dikelola oleh Perseroan.

Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan mengalami peningkatan sebesar Rp23,42 miliar atau 12,48% dari Rp187,58 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp210,99 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan dari efektifitas penagihan yang dilakukan oleh Perseroan.

Keuntungan dari penjualan efek-efek – Neto dan mengalami peningkatan sebesar Rp85,86 miliar atau 139,17% dari Rp61,70 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp147,56 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi.

Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – Neto mengalami penurunan sebesar Rp27,91 miliar atau 58,88% dari Rp47,41 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp19,50 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh harga pasar obligasi Pemerintah yang menurun.

Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek – Neto mengalami penurunan sebesar Rp999 miliar atau 100% dari Rp999 miliar pada tahun 2014 menjadi nihil per pada tahun 2015 yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki efek-efek dalam kategori diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2015.

Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah – Neto mengalami penurunan sebesar Rp5,57 miliar dari Rp5,57 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi kerugian Rp193 juta per tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh menurunnya nilai pasar Obligasi Pemerintah.

Pendapatan operasional lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp72,17 miliar atau 58,86% dari Rp122,62 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp194,79 miliar pada tahun 2015 yang berasal dari meningkatnya pendapatan dari jasa-jasa perbankan akibat dari usaha Perseroan dalam meningkatkan *fee based income*.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp129,84 miliar atau 16,84% dari Rp771,17 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp901 miliar pada tahun 2015 yang terutama berasal dari pencadangan kredit dan pembiayaan syariah sebagai akibat dari meningkatnya saldo kredit dan pembiayaan syariah pada tahun 2015.

Perseroan melakukan pembalikan estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi sebesar Rp7,93 miliar atau 1087,38% dari pembentukan beban estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi sebesar Rp729 juta pada tahun 2014 menjadi pembalikan estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi sebesar Rp7,20 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan tidak terdapat penurunan nilai untuk pos komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2015.

Beban Umum dan Administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp480,05 miliar atau 11,97% dari Rp4,01 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp4,49 triliun pada tahun 2015 yang diakibatkan dari meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan.

Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan mengalami peningkatan sebesar Rp365,09 miliar atau 23,34% dari Rp1,56 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1,93 triliun pada tahun 2015 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan.

Premi program penjamin Pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp26,1 miliar atau 12,83% dari Rp203,45 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp229,55 miliar pada tahun 2015 yang diakibatkan dari meningkatnya jumlah simpanan nasabah yang dihimpun Perseroan.

Beban Operasional Lain-Lain mengalami peningkatan sebesar Rp60,23 miliar atau 50,36% dari Rp119,6 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp179,88 miliar pada tahun 2015 yang diakibatkan dari meningkatnya biaya penyelamatan kredit yang disebabkan karena meningkatnya proses penagihan dan penyelesaian kredit yang bermasalah.

Tinjauan Keuangan

Laba Operasional

Laba operasional Perseroan mengalami peningkatan Rp956,24 miliar atau tumbuh sebesar 60,62% dari Rp1,58 triliun di 2014 menjadi Rp2,53 triliun di 2015. Peningkatan laba operasional diperoleh dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil-neto lebih besar dari peningkatan beban operasional lainnya.

Pendapatan Bukan Operasional - Neto

Pendapatan bukan operasional – neto mencapai Rp8,28 miliar di 2015, meningkat Rp6,32 miliar atau sebesar 322,50% dari tahun 2014 yang mencapai Rp1,96 miliar. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari peningkatan pendapatan penjabaran mata uang asing akibat selisih kurs.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum pajak Perseroan mengalami peningkatan Rp962,56 miliar atau sebesar 60,95%

Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lain

Kerugian komprehensif lain di 2015 sebesar Rp39,57 miliar, meningkat sebesar Rp14,71 miliar atau sebesar 59,20% dibandingkan dengan tahun 2014, kerugian komprehensif lain mencapai Rp24,86 miliar. Kerugian ini disebabkan oleh kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual yang mencapai Rp58,28 miliar.

dari Rp1,58 triliun di 2014 menjadi Rp2,54 triliun di 2015. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba operasional Perseroan.

Beban Pajak

Beban pajak penghasilan-neto di 2015 mencapai Rp690,98 miliar, meningkat Rp257,22 miliar atau sebesar 59,20% dari Rp433,76 miliar di 2014. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan Rp705,34 miliar atau sebesar 61,57% dari Rp1,15 triliun di 2014 menjadi Rp1,85 triliun di 2015. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba operasional dan laba sebelum pajak.

Tabel Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lain

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan	
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali program imbalan pasti	5.476	(33.185)	38.661	116,50%
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.369)	8.296	(9.665)	(116,50%)
Akun-Akun yang akan di reklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	(58.236)	44	(58.280)	(132.454,55%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	14.559	(11)	14.570	132.454,55%
Total	(39.570)	(24.856)	(14.714)	59,20%

Pengukuran kembali program imbalan pasti mengalami peningkatan sebesar Rp38,66 miliar atau 116,50% dari kerugian sebesar Rp33,19 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp5,48 miliar pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh realisasi bunga diskonto pada tahun 2015 meningkat dibandingkan asumsi tahun sebelumnya.

Tinjauan Keuangan

Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual menurun sebesar Rp58,28 miliar atau 132.454,55% dari Rp44 juta pada tahun 2014 menurun hingga Rp58,24 miliar pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh menurunnya nilai pasar Obligasi Pemerintah yang dimiliki oleh Perseroan.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan di tahun 2015 sebesar Rp1,81 triliun, meningkat sebesar Rp690,62 miliar atau tumbuh sebesar 61,62%. Sedangkan untuk tahun 2014, jumlah laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp1,12 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan.

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar mengalami peningkatan Rp67 atau sebesar 62,04% dari Rp108 di tahun 2014 menjadi Rp175 di tahun 2015 sejalan dengan peningkatan laba.

Laba Per Saham Dilusian

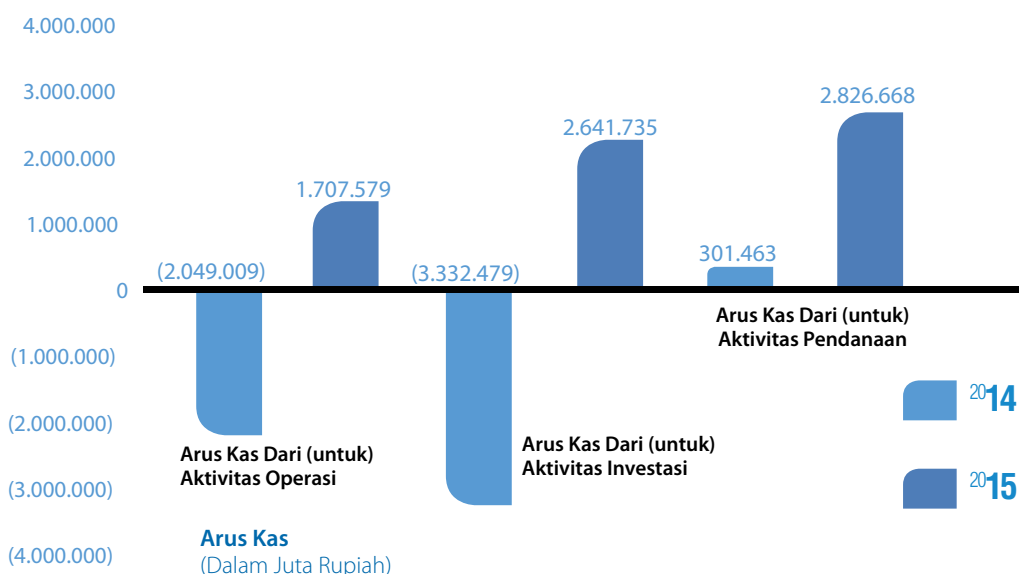
Laba per saham dilusian mengalami peningkatan Rp67 atau sebesar 62,04% dari Rp108 di tahun 2014 menjadi Rp175 di tahun 2015 sejalan dengan peningkatan laba.

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014	Pertumbuhan
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi	1.707.579	(2.049.009)	3.756.588
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi	2.643.735	(3.332.479)	5.976.214
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan	2.826.668	301.463	2.525.205
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	7.177.982	(5.080.025)	12.258.007
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	13.031.998	18.112.023	(5.080.025)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	20.209.980	13.031.998	7.177.982



Tinjauan Keuangan

Perseroan mencatatkan kas dan setara kas awal tahun 2015 yang mencapai Rp13,03 triliun yang mengalami peningkatan neto Rp7,17 triliun atau sebesar 55,08% sehingga menjadi Rp20,21 triliun di akhir tahun 2015. Arus kas Bank selama 2015 diuraikan sebagai berikut.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi

Total Arus Kas neto yang diperoleh Perseroan berasal dari aktivitas operasional pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp1,71 triliun. Arus Kas masuk antara lain berasal dari penerimaan bunga dan bagi hasil sebesar Rp14,60 triliun, penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp227,27 miliar, pendapatan bukan operasional lainnya neto sebesar Rp8,28 miliar, penurunan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp572,46 miliar, kenaikan simpanan dari nasabah yang termasuk Giro yang berjumlah Rp7,15 triliun, Giro *Wadiah* yang berjumlah Rp794,87 miliar, Tabungan yang berjumlah Rp4,17 triliun, Tabungan *Waidah* dan *Mudharabah* yang berjumlah Rp417,77 miliar, Deposito berjangka yang berjumlah Rp7,56 triliun, serta Deposito berjangka *Mudharabah* sebesar Rp1,14 triliun. Sebagian arus kas keluar antara lain berasal dari pemberian kredit sebesar Rp21,82 triliun, pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi sebesar Rp8,12 triliun, serta beban operasional lainnya sebesar Rp3,45 triliun.

Total Arus Kas neto keluar yang berasal dari aktivitas kegiatan operasional tahun 2014 tercatat sebesar Rp2,05 triliun. Arus Kas masuk antara lain berasal dari penerimaan bunga dan bagi hasil sebesar Rp12,55 triliun dan dari kenaikan jumlah dana pihak ketiga termasuk Giro sebesar Rp4,04 triliun, Giro *Waidah* sebesar Rp266,19 miliar, Tabungan sebesar Rp1,85 triliun, Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* sebesar Rp82,73 miliar, Deposito berjangka sebesar Rp2,22 triliun, dan Deposito berjangka *Mudharabah* sebesar Rp1,81 triliun. Arus Kas keluar antara lain digunakan untuk pemberian kredit yang diberikan sebesar Rp14,20 triliun, pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi sebesar Rp7,27 triliun, dan beban operasional lainnya sebesar Rp3,23 triliun.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi

Total Arus Kas neto masuk dari aktivitas investasi pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp2,64 triliun. Arus Kas masuk berasal dari penurunan efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp3,40 triliun,

jatuh tempo efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp92,02 miliar, Penurunan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual sebesar Rp873,07 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp262,52 miliar, pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp6 miliar, serta pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp1,45 triliun.

Total Arus Kas neto keluar dari kegiatan investasi pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Arus Kas masuk berasal dari jatuh tempo efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp22,21 miliar dan jatuh tempo obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp50 miliar. Arus Kas keluar digunakan untuk pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp199,51 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp191,40 miliar, kenaikan efek-efek yang tersedia untuk dijual Rp3 triliun, kenaikan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp13,29 miliar.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

Total Arus Kas neto masuk dari kegiatan pendanaan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp2,83 triliun. Arus Kas masuk berasal dari penerimaan kas dari surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3,98 triliun, penerimaan dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp2,77 triliun, dan penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp728,51 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp4,45 triliun serta pembayaran dividen sebesar Rp223,12 miliar.

Total Arus Kas neto masuk dari kegiatan pendanaan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp301,46 miliar. Arus Kas masuk berasal dari transaksi efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp5,15 triliun, eksekusi opsi saham karyawan sebesar Rp2,68 miliar, serta penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp577,38 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp900 miliar, pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp3,98 triliun, pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp74,82 miliar, serta pembayaran dividen sebesar Rp468,65 miliar.

Tinjauan Keuangan

Rasio Keuangan

Tabel Rasio Keuangan

Uraian	2015	2014
Rasio Kinerja		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,97%	14,64%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,91%	3,26%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	3,20%	3,57%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,38%	1,21%
NPL <i>gross</i> – Konvensional	3,58%	4,19%
NPL <i>gross</i> – Syariah	1,66%	2,06%
NPL <i>net</i> – Konvensional	2,26%	2,95%
MPL <i>net</i> – Syariah	0,44%	0,67%
Return on Aset (ROA)	1,61%	1,14%
Return on Equity (ROE)	16,84%	10,95%
Net Interest Margin (NIM)	4,87%	4,47%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,83%	88,97%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	108,78%	108,86%
Rasio Kepatuhan (Compliance)		
a. Persentase pelanggaran BMPK		
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK		
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
a. GWM Utama Rupiah		
i. Konvensional	7,95%	8,09%
ii. Syariah	5,04%	5,09%
b. GWM Valuta Asing		
	8,08%	8,39%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,74%	1,92%

Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Hutang

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur solvabilitas, kolektibilitas dan profitabilitas Perseroan.

Tinjauan Keuangan

Likuiditas Perseroan

Pada tahun 2015, Tingkat likuiditas Bank yang diukur melalui rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) mengalami penurunan sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) di 2014. Pada tahun 2014, rasio kredit Perseroan terhadap dana pihak ketiga sebesar 108,86% namun mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 108,78%. Namun, tingkat likuiditas Bank masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri.

Solvabilitas

Perseroan mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank. Perseroan memastikan kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)). Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk-Weighted Assets* (RWA)). Pada tahun 2015, Rasio Kecukupan Modal Perseroan mencapai 16,97%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Rasio Kecukupan Modal tahun 2014 sebesar 14,64%.

Sesuai dengan peraturan BI, Rasio Kecukupan Modal minimum yang ditetapkan BI adalah sebesar 9%. Dengan rasio kecukupan Bank berada pada tingkat 16,97%, struktur permodalan Perseroan memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal Perseroan sudah memenuhi Peraturan BI. Hal ini berarti bahwa Perseroan telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Rentabilitas

Rentabilitas Perseroan diukur melalui rasio-rasio berikut.

Tabel Rasio Rentabilitas

Keterangan	2015	2014
ROA	1,61%	1,14%
ROE	16,84%	10,95%
NIM	4,87%	4,47%
BOPO	84,83%	88,97%

Pada Tahun 2015, Perseroan mencatatkan *Return on Asset* sebesar 1,61% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,14%. Nilai *Return on Equity* Perseroan tahun 2015 sebesar 16,84% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 10,95%. Sedangkan *Net Interest Margin* mengalami peningkatan menjadi 4,87% dari 4,47% pada tahun 2014. Pada level NIM tersebut maka Perseroan merupakan Bank dengan tingkat profitabilitas yang baik. Selain itu, Rasio BOPO mengalami penurunan menjadi sebesar 84,83% dari posisi di tahun 2014 yang sebesar 88,97%.

Dari rasio-rasio yang telah diuraikan sebelumnya, Perseroan telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efektifitas yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya.

Tinjauan Keuangan

Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas Kredit Bank terlihat dari total kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* (NPL)). Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*) Gross untuk perbankan konvensional masing-masing sebesar 3,58%, dan 4,19% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sedangkan untuk perbankan syariah masing-masing sebesar 1,66% dan 2,06%. Rasio NPL neto masing-masing sebesar 2,26% dan 2,95% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sedangkan untuk perbankan syariah sebesar 0,44% dan 0,67% untuk tahun 2015 dan 2014. Perseroan telah melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan kualitas piutang, khususnya kredit yang telah disalurkan.

Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Modal

Perseroan menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan tersebut direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung

strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal Perseroan terdiri dari:

Modal Inti

Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari: Modal Inti Utama (*Common Equity Tier – CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Modal pelengkap meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Pada 2015, Perseroan memiliki jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp13,89 triliun, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan modal inti dan modal pelengkap tahun 2014 sebesar Rp11,17 triliun.

Tinjauan Keuangan

Tabel Struktur Modal (dalam juta Rupiah)

No.	Komponen Modal	2015	2014
I.	MODAL INTI (Tier 1)	12.171.623	10.735.782
	1. Modal Inti Utama (Common Equity Tier - Cet 1)	12.171.623	10.735.782
	1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	5.291.173	
	1.2. Cadangan Tambahan Modal	7.224.620	
	1.2.1. Agio / Disagio	2.046.598	
	1.2.2. Modal Sumbangan	-	
	1.2.3. Cadangan Umum	3.018.884	
	1.2.4. Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	1.049.213	
	1.2.5. Laba/Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	1.850.907	
	1.2.6. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan	-	
	1.2.7. Dana setoran modal	-	
	1.2.8. Waran yang diterbitkan	-	
	1.2.9. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)	1.345	
	1.2.10. Pendapatan komprehensif lain	(133.690)	
	1.2.11. Saldo surplus revaluasi aset tetap	-	
	1.2.12. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(604.430)	
	1.2.13. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung	(4.207)	
	1.2.14. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	
	1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
	1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(344.170)	
	1.4.1. Perhitungan Pajak Tangguhan (Deferred Tax)	-	
	1.4.2. Goodwill	-	
	1.4.3. Aset tidak berwujud lainnya	-	
	1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	
	1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
	1.4.6. Eksposur Sekuritisasi	(344.170)	
	1.4.7. Faktor Pengurang modal inti lainnya	-	
	1.4.8. Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	
	2. Modal Inti Tambahan (Additional Tier - AT 1)	-	
	2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	
	2.2. Agio / Disagio	-	
	2.3. Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank Lain	-	
II.	MODAL PELENGKAP	1.721.403	435.676
	1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan	-	
	2. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrument modal pelengkap	-	
	3. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)	880.927	
	4. Cadangan Tujuan	840.476	
	5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	
	5.1. Sinking Fund	-	
	5.2. Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	
	Total Modal	13.893.026	11.171.458

Tinjauan Keuangan

No.	Komponen Modal		2015	2014
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			RASIO KPMM	
ATMR RISIKO KREDIT	70.474.182	66.250.928	Rasio CET1	14,87%
ATMR RISIKO KREDIT	222.737	226.010	Rasio Tier 1	14,07%
ATMR RISIKO OPERASIONAL	11.185.168	9.855.703	Rasio Tier 2	2,10%
TOTAL ATMR	81.882.087	76.332.641	Rasio Total	16,97%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9,00%	9,00%		14,64%

*Rasio KPMM per 31 Desember 2015 dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sementara Rasio KPMM per 31 Desember 2014 dihitung sesuai PBI No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Dasar Penetapan Manajemen Risiko

Perseroan mengelola permodalan guna menjaga kecukupan modal sesuai profil risiko Bank secara menyeluruh dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Besarnya modal yang dikelola Perseroan harus dapat meng-cover risiko yang timbul dari aktivitas Perseroan namun tidak terbatas pada rencana ekspansi bisnis dan aktivitas lain. Perhitungan kecukupan modal mengacu pada Peraturan Regulator yang berlaku.

Perseroan telah dengan konsisten melaporkan kecukupan permodalan kepada regulator dan publik melalui laporan KPMM dan mencantumkan rasio KPMM pada Laporan Publikasi Bank. Rasio KPMM Bank menunjukkan bahwa Modal Bank (CAR 16,97%) dapat meng-cover risiko (potensi kerugian) yang timbul dari aktivitas Perseroan saat ini dan yang akan datang.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.
3. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan:
 - a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan.
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering apabila

terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Komisaris.
 - d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.
4. Direksi telah melakukan pengawasan dengan:
 - a. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk *limit* Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko.
 - b. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui prosedur sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
 - c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui *limit* dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
 - d. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
 - e. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan

Tinjauan Keuangan

laporan-laporan yang disampaikan oleh *Risk Management Division* (RMD) termasuk laporan mengenai profil Risiko.

- g. Memastikan seluruh Risiko yang material dan menimbulkan dampak yang buruk telah ditindaklanjuti dan pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- h. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan kegiatan usaha Perseroan yang ditemukan oleh *Internal Audit Division* (IAD).
- i. Mengembangkan budaya peduli risiko termasuk budaya anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.
- j. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
- k. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara RMD dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan *limit* dalam menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang di-review dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Dalam menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* Perseroan mempertimbangkan strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta *limit* yang memperhatikan kemampuan modal Perseroan untuk dapat menyerap eksposur risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko, peristiwa Risiko dan dampak Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Pengukuran

Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

Pemantauan

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan *limit internal*, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh RMD.

Pengendalian Risiko

Proses pengendalian Risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, dipastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian *intern* yang handal. Terselenggaranya sistem pengendalian *intern* Perseroan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta IAD. Pelaksanaan

Tinjauan Keuangan

sistem pengendalian *intern* secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Perseroan menerapkan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) antara unit kredit dengan unit manajemen risiko, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di bidang perkreditan dengan adanya unit kerja *Credit Risk Desk*.
3. Sistem pengendalian *intern* dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup :
 - Kesesuaian antara sistem pengendalian *intern* dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
 - Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan *limit*;
 - Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
 - Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional bank;
 - Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
 - Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

4. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling kurang setiap tahun oleh RMD dan IAD.

Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus

Risiko Kredit

Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit Perseroan merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank. Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Organisasi manajemen risiko kredit dalam proses pemberian kredit telah menerapkan *four eyes principle* dengan unit *credit risk* yang terpisah dengan unit bisnis untuk kredit komersial. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap *limit* risiko kredit, membangun aplikasi *Internal Credit Rating* untuk kredit komersial dan melakukan *review Credit Scoring Model* secara berkala.

Tinjauan Keuangan

Strategi Manajemen Risiko Kredit

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Perseroan adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*) serta melakukan monitoring terhadap debitur inti.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Penurunan Nilai

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.55 dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang perhitungan ATMR dengan menggunakan pendekatan standar, tagihan yang telah jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah Pengakuan Awal dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi Arus kas Masa Datang atas aset keuangan. Kondisi tersebut ditandai dengan nilai tercatat kredit lebih besar jika dibandingkan dengan nilai terpulihkan yang diukur dengan nilai kini dari arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Apabila Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

- Evaluasi secara Individual

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai individual dan mengukur kerugian penurunan nilai, Bank menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

 - a. *Discounted cash flow*, Bank melakukan pencatatan berdasarkan jumlah yang diskonto yang diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang dan didiskonto berdasarkan suku bunga efektif awal dari setiap kredit.
 - b. *Fair value of collateral*, Bank melakukan pencatatan berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) melalui pengambil alihan agunan kredit
- Evaluasi secara kolektif

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kolektif dan mengukur kerugian penurunan nilai, Bank menggunakan metode *roll rate analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik yang menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD)

Tinjauan Keuangan

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi, serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
Tagihan Kepada Pemerintah	26.023.295	-	-	-	26.023.295
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24.686	-	-	-	24.686
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	700.166	1.974	128	1.375	703.643
Kredit Beragun Rumah Tinggal	40.775.941	25.165.072	14.153.729	16.848.784	96.943.526
Kredit Beragun Properti Komersial	8.796.717	3.538.898	1.751.346	2.040.617	16.127.578
Kredit Pegawai atau Pensiunan	339.948	189.283	100.420	103.454	733.105
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	759.016	811.287	467.886	1.010.916	3.049.105
Tagihan Kepada Korporasi	6.725.941	1.578.539	542.569	937.248	9.784.297
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	987.604	572.752	488.199	686.790	2.735.345
Aset Lainnya	2.278.164	898.311	354.368	466.972	3.997.815
Eksposur di Unit Syariah	5.579.976	5.050.056	2.336.626	1.434.985	14.401.643
Total	92.991.454	37.806.172	20.195.271	23.531.141	174.524.038

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-14				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
Tagihan Kepada Pemerintah	22.027.977	-	-	-	22.027.977
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	36.365	-	-	-	36.365
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	1.797.448	4.874	76	541	1.802.939
Kredit Beragun Rumah Tinggal	32.283.758	19.568.219	10.802.220	12.889.114	75.543.311
Kredit Beragun Properti Komersial	6.465.090	2.424.885	1.584.673	1.727.570	12.202.218
Kredit Pegawai atau Pensiunan	252.138	136.753	66.426	60.701	516.018
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.379.965	2.498.077	1.362.249	2.053.128	8.293.419
Tagihan Kepada Korporasi	5.191.014	1.371.675	518.860	981.604	8.063.153
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.141.727	622.376	501.405	729.353	2.994.861
Aset Lainnya	1.810.971	682.733	281.123	408.448	3.183.275
Eksposur di Unit Syariah	4.511.091	4.163.527	2.049.409	1.218.213	11.942.240
Total	77.897.544	31.473.119	17.166.441	20.068.672	146.605.776

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
Tagihan Kepada Pemerintah	17.386.995	641.992	1.335.263	439.877	6.219.168	26.023.295
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.250	-	-	-	23.436	24.686
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	447.385	89.907	49.970	-	116.381	703.643
Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.230.636	1.926.509	4.205.550	89.580.831	-	96.943.526
Kredit Beragun Properti Komersial	4.724.434	8.397.003	2.636.621	369.520	-	16.127.578
Kredit Pegawai atau Pensiunan	6.197	31.597	51.308	644.003	-	733.105
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	565.194	840.458	464.293	1.179.160	-	3.049.105
Tagihan Kepada Korporasi	3.902.772	2.801.058	931.562	2.066.857	82.048	9.784.297
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	726.337	245.033	214.378	1.549.597	-	2.735.345
Aset Lainnya	-	-	-	-	3.997.815	3.997.815
Eksposur di Unit Syariah	3.914.495	2.744.583	1.199.857	6.158.066	384.642	14.401.643
Total	32.905.695	17.718.140	11.088.802	101.987.911	10.823.490	174.524.038

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-14					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kon- traktual	Total
Tagihan Kepada Pemerintah	9.831.463	-	199.660	1.397.346	10.599.508	22.027.977
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.221	-	-	5.000	20.144	36.365
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	1.648.454	4.964	45.000	54.612	49.909	1.802.939
Kredit Beragun Rumah Tinggal	959.254	1.268.779	3.895.918	69.419.360	-	75.543.311
Kredit Beragun Properti Komersial	4.942.672	5.518.899	1.663.968	76.679	-	12.202.218
Kredit Pegawai atau Pensiunan	4.681	14.465	92.156	404.716	-	516.018
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	789.391	1.088.587	767.016	5.648.425	-	8.293.419
Tagihan Kepada Korporasi	3.665.181	1.744.424	1.171.029	1.400.198	82.321	8.063.153
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	833.960	303.020	248.970	1.608.911	-	2.994.861
Aset Lainnya	-	-	-	-	3.183.275	3.183.275
Eksposur di Unit Syariah	3.448.346	2.029.351	1.321.440	4.661.356	481.747	11.942.240
Total	26.134.623	11.972.489	9.405.157	84.676.603	14.416.904	146.605.776

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

31–Des-2015							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	24.686	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	18.049.749	-	-	703.643	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	96.943.526
20	Lainnya	7.973.546	-	-	-	-	-
	Total	26.023.295	24.686	-	703.643	-	96.943.526

Tinjauan Keuangan

(dalam Juta Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	36.953	19.899	28.304	-	-
	-	-	5.134	4.638	2.973	-	-
	-	-	5.920	88.115	21.211	-	-
	-	-	46.206	166.225	25.843	-	-
	-	-	1.890	25.095	-	-	61.007
	13.900.434	-	301.255	2.656.039	438.888	-	2.762.510
	-	-	365.473	596.554	117.776	-	2.073.147
	-	-	33.704	996.119	16.313	-	-
	-	-	21.895	128.106	14.410	-	-
	-	-	25.763	229.011	15.463	-	1.874.453
	2.227.144	-	149.373	922.281	71.559	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11.828	251.714	3.991	-	-
	-	-	7.187	307.760	6.577	-	-
	-	-	13.818	185.324	6.271	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	733.105	2.022.706	1.382.969	1.965.766	-	7.195.836
	-	-	-	1.824.448	-	3.997.815	434.690
	16.127.578	733.105	3.049.105	9.784.297	2.735.345	3.997.815	14.401.643

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

31-Des-2014							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	31.365	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	14.436.709	5.000	-	1.802.939	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	75.543.311	-
20	Lainnya	7.591.268	-	-	-	-	-
	Total	22.027.977	36.365	-	1.802.939	75.543.311	-

Tinjauan Keuangan

(dalam Juta Rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
-	-	71.315	47.803	15.554	-	-
-	-	9.456	4.797	6.238	-	-
-	-	9.428	102.479	30.875	-	-
-	-	71.726	151.157	41.990	-	-
-	-	3.501	22.584	3.703	-	61.011
11.126.536	-	459.219	2.041.284	710.041	-	2.098.447
-	-	650.222	676.294	137.876	-	2.529.368
-	-	46.633	1.011.589	20.500	-	-
-	-	35.483	175.634	27.088	-	-
-	-	21.111	229.291	2.424	-	1.113.535
1.075.682	-	206.804	634.741	64.305	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	15.033	218.395	925	-	-
-	-	11.841	247.689	4.493	-	-
-	-	23.350	115.401	11.700	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	516.018	6.658.297	946.840	1.917.149	-	5.603.069
-	-	-	1.437.175	-	3.183.275	536.810
12.202.218	516.018	8.293.419	8.063.153	2.994.861	3.183.275	11.942.240

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-15				
	Tagihan Berdasarkan Wilayah				
	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
Tagihan	90.279.316	36.921.220	20.070.635	23.493.572	170.764.743
Tagihan yang mengalami penurunan nilai	366.681	49.537	74.230	122.351	612.799
a. Belum jatuh tempo	123.994	20.565	34.984	55.701	235.244
b. Telah jatuh tempo	242.687	28.972	39.246	66.650	377.555
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	194.396	14.352	39.710	51.559	300.017
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	783.925	326.769	264.029	389.411	1.764.134
Tagihan yang dihapus buku	210.269	94.673	84.714	44.943	434.599

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-2014				
	Tagihan Berdasarkan Wilayah				
	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
Tagihan	75.806.237	30.915.990	17.043.824	19.901.086	143.667.137
Tagihan yang mengalami penurunan nilai	223.719	114.936	34.839	80.134	453.628
a. Belum jatuh tempo	113.583	9.000	4.900	20.353	147.836
b. Telah jatuh tempo	110.136	105.936	29.939	59.781	305.792
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Individual	62.632	19.864	15.297	18.222	116.015
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	565.135	342.369	247.436	310.201	1.465.141
Tagihan yang dihapus buku	124.404	138.989	42.056	45.561	351.010

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam juta Rupiah)

31-Des-2015						
Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
		Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
Pertanian, Perburuan, Kehutanan	113.988	-	26.794	10.884	18.254	14.971
Perikanan	15.548	-	-	-	2.811	2.515
Pertambangan dan Penggalian	136.901	-	10.692	7.531	14.261	991
Industri Pengolahan	307.143	-	19.135	19.135	25.328	7.888
Listrik, Gas dan Air	88.104	-	-	-	155	182
Konstruksi	19.617.087	108.573	172.250	134.917	538.134	68.718
Perdagangan Besar dan Eceran	3.344.368	9.884	46.092	39.567	280.846	145.618
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	1.055.551	66.805	12.488	4.501	6.370	1.235
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	210.868	4.938	7.018	7.041	39.820	1.716
Perantara Keuangan	20.596.127	6.108	1.572	2.392	9.979	1.000
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.471.044	18.371	71.665	65.653	41.449	895
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	269.441	-	-	-	2.208	238
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.541	20.565	4.589	3.136	1.255	-
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	220.165	-	5.260	5.260	38.673	24.440
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha	110.980.502	-	-	-	739.609	164.192
Lainnya	10.013.365	-	-	-	4.982	-
Total	170.764.743	235.244	377.555	300.017	1.764.134	434.599

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam juta Rupiah)

31-Des-2014						
Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
		Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
Pertanian, Perburuan, Kehutanan	142.652	-	7.794	4.746	3.816	11.552
Perikanan	24.443	-	-	-	3.957	1.483
Pertambangan dan Pengalihan	159.545	-	6.298	1.817	15.082	472
Industri Pengolahan	309.381	-	10.573	2.897	10.500	13.384
Listrik, Gas dan Air	91.159	-	-	-	372	279
Konstruksi	16.013.329	106.795	230.643	67.699	329.948	99.675
Perdagangan Besar dan Eceran	4.100.932	25.791	12.939	17.196	201.126	185.561
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	1.081.838	-	-	-	4.035	2.425
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	254.830	-	25.571	12.694	4.584	4.565
Perantara Keuangan	17.216.966	5.481	1.571	2.317	2.070	-
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.998.008	9.769	-	2.490	27.410	1.415
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	235.118	-	-	-	858	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.897	-	5.089	3.051	934	714
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	163.921	-	5.314	1.108	6.183	112
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha	91.957.590	-	-	-	851.882	29.373
Lainnya	9.650.528	-	-	-	2.384	-
Total	143.667.137	147.836	305.792	116.015	1.465.141	351.010

Tinjauan Keuangan

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-15		31-Des-14	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
Saldo awal CKPN	116.015	1.465.141	76.921	1.071.372
Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	209.027	708.567	64.803	725.462
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	209.027	708.567	64.803	725.462
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	25.025	409.574	25.709	325.301
Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	(6.392)
Saldo akhir CKPN	300.017	1.764.134	116.015	1.465.141

Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Perseroan menerapkan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar dalam menghitung risiko kredit. Dalam perhitungan risiko kredit, Perseroan telah memperhitungkan peringkat kredit. Penggunaan peringkat kredit dan lembaga pemeringkat dalam perhitungan risiko kredit, mengacu pada aturan penggunaan yang ditetapkan oleh regulator (Bank Indonesia).

Eksposur counterparty credit risk Perseroan umumnya adalah transaksi surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan agunan surat berharga yang memiliki nilai lebih tinggi daripada nilai surat berharga yang dibeli Perseroan.

Tinjauan Keuangan

Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut.

Uraian terkait Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

31-Des-2015							
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	26.023.295	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		24.686	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		252.706	67.766	9.779	366.908	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		61.007	-	-	-	

Tinjauan Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih									
Kategori	Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	-	26.023.295
	-	-	-	-	-	-	-	-	24.686
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	6.484	703.643
	-	-	-	-	-	-	-	96.943.526	96.943.526
	-	-	-	-	-	-	-	16.127.578	16.127.578
	-	-	-	-	-	-	-	733.105	733.105
	-	-	-	-	-	-	-	3.049.105	3.049.105
	-	-	-	-	-	-	-	9.784.297	9.784.297
	-	-	-	-	-	-	-	2.735.345	2.735.345
	-	-	-	-	-	-	-	3.997.815	3.997.815
	-	-	-	-	-	-	-	14.340.636	14.401.643

Tinjauan Keuangan

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

31-Des-2014							
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[[idr] AAA	[[idr]AA+ s.d [[idr] AA-	[[idr]A+ s.d [[idr]A-	[[idr]BBB+ s.d [[idr]BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
		1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	25.144	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		-	617.370	-	54.534	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		61.011	-	-	-	

Tinjauan Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih									
Jenis				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	-	22.027.977
	-	-	-	-	-	-	-	11.221	36.365
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.131.035	1.802.939
	-	-	-	-	-	-	-	75.543.311	75.543.311
	-	-	-	-	-	-	-	12.202.218	12.202.218
	-	-	-	-	-	-	-	516.018	516.018
	-	-	-	-	-	-	-	8.293.419	8.293.419
	-	-	-	-	-	-	-	8.063.153	8.063.153
	-	-	-	-	-	-	-	2.994.861	2.994.861
	-	-	-	-	-	-	-	3.183.275	3.183.275
	-	-	-	-	-	-	-	11.881.229	11.942.240

Tinjauan Keuangan

Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

1. Transaksi Derivatif

Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per 31 Desember 2015 dan 2014.

2. Transaksi Repo

Uraian terkait Transaksi Repo dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel Transaksi Repo (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15				31-Des-14			
	Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	2.446.515	2.135.091	311.424	155.712	4.389.598	3.817.873	571.725	114.399
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.446.515	2.135.091	311.424	155.712	4.389.598	3.817.873	571.725	114.399

Tinjauan Keuangan

3. Transaksi *Reverse Repo*

Perseroan tidak memiliki transaksi *Reverse Repo* per 31 Desember 2015 dan 2014.

Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c. Lainnya berupa garansi, asuransi, dan lain-lain

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi. Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*). Pemberi jaminan atau garansi yang dimiliki oleh Perseroan umumnya merupakan perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan.

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisa dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara legal.

Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit.

Tinjauan Keuangan

Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut.

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah			
		0%	20%	35%	40%
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	26.023.295	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	24.686	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	322.944	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	25.943.315	71.000.211	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	113.293	354.245	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.250.858	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	243.686	-	-
11	Aset Lainnya	1.131.138	-	-	-
12	Eksposur di Unit Syariah	1.674.832	361.492	7.086.952	-
	Total Eksposur Neraca	30.193.416	27.250.368	78.087.163	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-
	Total Counterparty Credit Risk	-	-	-	-

Tinjauan Keuangan

(dalam juta Rupiah)

31-Des-15							ATMR	Beban Modal
Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit								
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	4.937	444	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	69.275	-	-	-	-	99.227	8.930	
-	-	-	-	-	-	30.038.737	2.703.486	
-	-	-	16.027.729	-	-	16.027.729	1.442.496	
-	733.105	-	-	-	-	366.553	32.990	
-	-	2.577.090	-	-	-	2.003.667	180.330	
-	-	-	7.054.266	-	-	7.054.266	634.884	
-	-	-	1.600.260	891.399	-	2.986.097	268.749	
-	-	-	2.789.087	77.590	-	2.905.472	261.492	
-	-	-	4.086.114	-	244.361	6.846.552	616.190	
-	802.380	2.577.090	31.557.456	968.989	244.361	68.333.237	6.149.991	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	99.849	-	-	99.849	8.986	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4.477	-	-	-	3.357	302	
-	-	-	1.479.173	-	-	1.479.173	133.126	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	947.892	402.854	36.257	
-	-	4.477	1.579.022	-	947.892	1.985.233	178.671	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	311.424	-	-	-	-	155.712	14.014	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	311.424	-	-	-	-	155.712	14.014	

Tinjauan Keuangan

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah				
		0%	20%	35%	40%	
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	22.027.977				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		25.144			
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank		1.219.036			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			55.719.461	13.232.207	
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	109.995	752.094			
9	Tagihan Kepada Korporasi	646.125				
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		36.579			
11	Aset Lainnya	881.135				
12	Eksposur di Unit Syariah	1.209.510	61.266			
	Total Eksposur Neraca	24.874.742	2.094.119	55.719.461	13.232.207	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank	-				
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-				
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi					
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	
	Total Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	

Tinjauan Keuangan

(dalam juta Rupiah)

31-Des-14							ATMR	Beban Modal
Mempertimbangkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit								
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
							-	-
	11.221					10.639	958	444
							-	-
	11.908					249.761	22.478	8.930
6.591.643						27.760.934	2.498.484	2.703.486
			12.036.262			12.036.262	1.083.264	1.442.496
	516.018					258.009	23.221	32.990
		7.425.852				5.719.809	514.783	180.330
			6.024.870			6.024.869	542.238	634.884
			1.629.583	1.328.699		3.629.948	326.695	268.749
			2.302.140			2.302.140	207.193	261.492
			3.979.426		5.983.037	6.280.610	565.255	616.190
6.591.643	539.147	7.425.852	25.972.281	1.328.699	5.983.037	64.272.981	5.784.568	6.149.991
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
			165.956			165.956	14.936	8.986
							-	-
		5.478				4.109	370	302
			1.392.158			1.392.158	125.294	133.126
							-	-
-	-	-	-	-	709.001	301.325	27.119	36.257
-	-	5.478	1.558.114	-	709.001	1.863.548	149.084	178.671
							-	-
							-	-
							-	-
	571.995	-	-	-	-	114.399	9.152	14.014
							-	-
							-	-
							-	-
	571.995	-	-	-	-	114.399	9.152	14.014

Tinjauan Keuangan

Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
Eksposur Neraca						
Tagihan Kepada Pemerintah	26.023.295	-	-	-	-	26.023.295
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24.686	-	-	-	-	24.686
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	392.219	-	-	-	-	392.219
Kredit Beragun Rumah Tinggal	96.943.526	-	-	25.943.314	-	71.000.212
Kredit Beragun Properti Komersial	16.027.729	-	-	-	-	16.027.729
Kredit Pegawai atau Pensiunan	733.105	-	-	-	-	733.105
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.044.628	113.293	-	354.245	-	2.577.090
Tagihan Kepada Korporasi	8.305.124	1.250.859	-	-	-	7.054.265
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.735.345	-	-	243.686	-	2.491.659
Aset Lainnya	3.997.815	-	-	-	-	3.997.815
Eksposur di Unit Syariah	13.453.751	-	-	-	-	13.453.751
Total Eksposur Neraca	171.681.223	1.364.152	-	26.541.245	-	143.775.826
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-

Tinjauan Keuangan

Kategori Portofolio	31-Des-15					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial	99,849	-	-	-	-	99,849
Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4,477	-	-	-	-	4,477
Tagihan Kepada Korporasi	1,479,173	-	-	-	-	1,479,173
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Syariah	947,892	-	-	-	-	947,892
Total Eksposur TRA	2,531,391	-	-	-	-	2,531,391
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	311,424	-	-	-	-	311,424
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk	311,424	-	-	-	-	311,424

Tinjauan Keuangan

Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Dec-14					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
Eksposur Neraca						
Tagihan Kepada Pemerintah	22.027.977					22.027.977
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	36.365					36.365
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-					-
Tagihan Kepada Bank	1.230.944					1.230.944
Kredit Beragun Rumah Tinggal	75.543.311					75.543.311
Kredit Beragun Properti Komersial	12.036.262					12.036.262
Kredit Pegawai atau Pensiunan	516.018					516.018
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	8.287.941	109.995		752.095		7.425.851
Tagihan Kepada Korporasi	6.670.995	646.125				6.024.870
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.994.861			36.580		2.958.281
Aset Lainnya	3.183.275					3.183.275
Eksposur di Unit Syariah	11.233.239	-	-	-	-	11.233.239
Total Eksposur Neraca	143.761.188	756.120	-	788.675	-	142.216.393
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
Tagihan Kepada Pemerintah	-					-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-					-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-					-
Tagihan Kepada Bank	-					-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	-					-

Tinjauan Keuangan

Kategori Portofolio	31-Dec-14					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
Kredit Beragun Properti Komersial	165.956					165.956
Kredit Pegawai atau Pensiunan	-					-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.478					5.478
Tagihan Kepada Korporasi	1.392.158					1.392.158
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-					-
Eksposur di Unit Syariah	709.001	-	-	-	-	709.001
Total Eksposur TRA	2.272.593	-	-	-	-	2.272.593
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	571.995	-	-	-	-	571.995
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk	571.995	-	-	-	-	571.995

Tinjauan Keuangan

Sekuritisasi Aset

Tujuan bank melakukan sekuritisasi adalah mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/*securities* yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* – ABS atau Efek Beragun Aset – EBA). Sekuritisasi Aset KPR dilakukan bank antara lain sebagai upaya untuk mitigasi maturity mismatch, alternatif sumber pendanaan KPR, dan peningkatan *lending capacity*.

Fungsi yang dijalankan oleh bank dalam transaksi sekuritisasi adalah sebagai :

- Kreditur awal
- *Servicer*
- Investor

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah (“kumpulan tagihan”), Bank telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (efek beragun aset), Bank mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak lawan. Oleh Karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Bank menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan KPR termasuk dalam sekuritisasi.

Kebijakan akuntansi atas transaksi sekuritisasi yang dilakukan oleh Bank mengacu pada substansi transaksi yang dilakukan. Dalam hal aktivitas sekuritisasi yang dilakukan oleh Bank tergolong dalam kategori *true sale*, maka seluruh hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut dihentikan pengakuannya saat tanggal perpindahan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari pembayaran yang diterima dan keuntungan dan kerugian kumulatif diakui di dalam laba rugi.

Uraian terkait aktifitas Sekuritisasi Perseroan dan Peringkat beserta Lembaga Pemeringkat yang telah dilakukan Pereroan.

Tahun Sekuritisasi	Seri Surat Berharga	Nilai Sekuritisasi	Senior Class	Junior Class	Peringkat - Senior Class	Lembaga Pemeringkat
2009	KIK DSMF I	111.111	100.000	11.111	AAA	PT Moody's Indonesia
2009	KIK DSMF II	391.305	360.000	31.305	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2010	KIK DBTN 01	750.000	688.500	61.500	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2011	KIK DBTN 02	703.450	645.000	58.450	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2012	KIK DBTN 03	1.000.000	925.000	75.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2013	KIK DBTN 04	1.000.000	928.000	72.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2014	KIK DBTN 05	1.500.000	1.371.000	129.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2015	SMF BTN 01	200.000	181.600	18.400	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Tinjauan Keuangan

Uraian Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi – Perseroan bertindak sebagai kreditur asal dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Transaksi Sekuritisasi

(dalam juta Rupiah)

Eksposur Sekuritisasi	31-Des-15					
	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
Bank bertindak sebagai Kreditur Asal						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	5.655.866	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-
b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	5.655.866	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Bank Kostodian	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-	-	-
a. <i>Senior tranche</i>						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
b. <i>Junior tranche</i>						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	344.170

Tinjauan Keuangan

Tabel Transaksi Sekuritisasi

(dalam juta Rupiah)

Eksposur Sekuritisasi	31-Des-14					
	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
Bank bertindak sebagai Kreditur Asal						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	5.455.866	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-
b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	5.455.866	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Bank Kostudian	-	-	-	-	-	-
Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-	-	-
a. <i>Senior tranche</i>						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
b. <i>Junior tranche</i>						
- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	361.516

Tinjauan Keuangan

Tabel Ringkasan Aktivitas Sekuritisasi - Perseroan Bertindak sebagai Kreditur Asal (dalam juta Rupiah)

Underlying Asset	31-Dec-15		31-Dec-14	
	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.655.866	-	5.455.866	-
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-
Total	5.655.866	-	5.455.866	-

Urian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut.

a. Eksposur Aset di Neraca

Tabel Eksposur Aset di Neraca (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Tagihan Kepada Pemerintah	26.023.295	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24.686	4.937	4.937
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	392.219	99.227	99.227
Kredit Beragun Rumah Tinggal	96.943.526	33.930.234	30.038.737
Kredit Beragun Properti Komersial	16.027.729	16.027.729	16.027.729
Kredit Pegawai atau Pensiunan	733.105	366.553	366.553
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.044.628	2.283.472	2.003.667
Tagihan Kepada Korporasi	8.305.124	8.305.124	7.054.266
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.735.345	3.223.893	2.986.097
Aset Lainnya	3.997.815	2.905.472	2.905.472
Total	158.227.472	67.146.641	61.486.685

Tinjauan Keuangan

Tabel Eksposur Aset di Neraca dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-14		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Tagihan Kepada Pemerintah	22.027.977	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	36.365	10.639	10.639
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	1.230.944	249.761	249.761
Kredit Beragun Rumah Tinggal	75.543.311	27.760.934	27.760.934
Kredit Beragun Properti Komersial	12.036.262	12.036.262	12.036.262
Kredit Pegawai atau Pensiunan	516.018	258.009	258.009
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	8.287.941	6.215.957	5.719.809
Tagihan Kepada Korporasi	6.670.995	6.670.995	6.024.869
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.994.861	3.677.500	3.629.948
Aset Lainnya	3.183.275	2.302.140	2.302.140
Total	132.527.949	59.182.197	57.992.371

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif (dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15			31-Des-14		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial	99.849	99.849	99.849	165.956	165.956	165.956
Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.477	3.357	3.357	5.478	4.109	4.109
Tagihan Kepada Korporasi	1.479.173	1.479.173	1.479.173	1.392.158	1.392.158	1.392.158
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total	1.583.499	1.582.379	1.582.379	1.563.592	1.562.223	1.562.223

Tinjauan Keuangan

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
(dalam juta Rupiah)

Kategori Portofolio	31-Des-15			31-Des-14		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	311.424	155.712	155.712	571.995	114.399	114.399
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total	311.424	155.712	155.712	571.995	114.399	114.399

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)
Perseroan tidak memiliki risiko kredit akibat kegagalan setelmen per 31 Desember 2015 dan 2014

e. Eksposur Sekuritisasi

Tabel Eksposur Sekuritisasi (dalam juta Rupiah)

Jenis Transaksi	31-Des-15		31-Des-14	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	344.170	-	361.516	-
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total	344.170	-	361.516	-

Tinjauan Keuangan

f. Eksposur di Unit Usaha Syariah

Tabel Eksposur di Unit Usaha Syariah (dalam juta Rupiah)

Jenis Transaksi	31-Des-15		31-Des-2014	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
Total Eksposur		7.249.406		6.581.935

g. Total Pengukuran Risiko Kredit

Tabel Pengukuran Risiko Kredit (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-15	31-Des-14
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	70.474.182	66.250.928
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	344.170	361.516

Risiko Pasar

Dalam pengelolaan portofolio *trading book*, Perseroan memiliki *limit cut loss*, *stop gain* dan *budget loss limit*. Selain itu Perseroan juga memiliki *limit* transaksi untuk masing-masing pelaku transaksi *treasury*. Valuasi portofolio *trading book* dilakukan harian oleh RMD yang independen dari pelaku transaksi *treasury*. Metode valuasi dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. Pemantauan portofolio *trading book* dilakukan rutin secara mingguan dan bulanan.

Pengelolaan portofolio *banking book* dilakukan terpusat oleh ALCO. Dalam upaya pengelolaan, Perseroan memiliki *limit* risiko suku bunga dalam *banking book*. Pengukuran dan pemantauan risiko suku bunga dalam *banking book* dilakukan rutin setiap bulan. Risiko suku bunga dalam *banking book* diukur dengan menggunakan *metode gap report*.

Perhitungan KPMM merujuk kepada metode standar dimana perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrument keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga, sedangkan perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing, Perseroan menetapkan *limit internal* untuk Posisi Devisa Netto (PDN). Selain itu terkait pengelolaan risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan *limit* transaksi valas diantaranya adalah *limit cut loss*, *stop gain*, *budget loss limit* dan *holding period limit*. Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi spot. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat *derivative*.

Dalam perhitungan KPMM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, dan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas SE BI No. 9/33/DPNP.

Tinjauan Keuangan

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut.

Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar dalam juta Rupiah)

Jenis Risiko	31-Des-15		31-Des-14	
	Bank		Bank	
	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
Risiko Suku Bunga	572	7.150	1.690	21.124
a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
b. Risiko Umum	572	7.150	1.690	21.124
Risiko Nilai Tukar	17.247	215.587	16.391	204.886
Risiko Ekuitas	-	-	-	-
Risiko Komoditas	-	-	-	-
Risiko <i>Option</i>	-	-	-	-
Total	17.819	222.737	18.081	226.010

Risiko Operasional

RMD bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh dan memastikan kebijakan manajemen risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi yang meliputi:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh
2. Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan
3. Melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko untuk Risiko Operasional pada seluruh lintas unit kerja
4. Menyusun laporan profil Risiko Operasional yang akan disampaikan kepada Direktur *Strategic, Compliance* dan *Risk* dan Komite Manajemen Risiko
5. Melakukan kajian kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru untuk risiko operasional.
6. Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen risiko untuk Risiko Operasional dan pelatihan manajemen risiko untuk risiko operasional

Dalam rangka melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko, Perseroan mempunyai aplikasi BTN-*Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN-LED terkoneksi dengan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *lost event* secara *online* melalui media *web* (*web based*). Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut akan teridentifikasi peta eksposur risiko operasional dari masing-masing Kantor Cabang. Berdasarkan peta eksposur risiko operasional yang diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut. Dalam pemantauan Risiko Operasional dilakukan evaluasi posisi risiko operasional terhadap *limit* risiko operasional. Bank telah memulai rencana inisiasi penerapan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) dengan melaksanakan pelatihan RCSA dan persiapan pengembangannya.

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Perseroan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. *Risk Management Division* memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Tinjauan Keuangan

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari sumber daya manusia, kebijakan manajemen risiko operasional Bank paling kurang memuat:

1. Kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen SDM antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan kode etik pegawai, peningkatan kompetensi dan integritas SDM, pengaturan dan pengawasan *internal* yang memadai pada proses rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi, dan cuti.
2. Persyaratan dan kualifikasi jabatan tertentu
3. Wewenang dan tanggung jawab yang jelas
4. Penerapan prinsip *Know Your Employee (KYE)*
5. Sistem remunerasi yang jelas dan transparan.
6. Kebijakan evaluasi secara berkala

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan manajemen risiko Bank harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan risiko, pengamanan di *dealing room*, dan ruang pemrosesan data.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan manajemen risiko Perseroan didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perseroan, *backup system* dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan manajemen risiko harus dimuat kewajiban melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* atau *Enhanced Due Diligence (EDD)* secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD wajib mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk nasabah prioritas. CDD/EDD didukung oleh sistem pengendalian *intern* yang efektif khususnya pencegahan bank terhadap kejahatan *internal (internal fraud)*.

Uraian terkait Risiko Operasional dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Risiko Operasional (dalam juta Rupiah)

Pendekatan yang Digunakan	31-Des-15			31-Des-14		
	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	5.965.423	894.813	11.185.168	5.256.375	788.456	9.855.703

Risiko Likuiditas

Perseroan memiliki komite dibawah Direksi yang mengelola risiko likuiditas yaitu ALCO dengan Direktur Utama sebagai Ketua dan *Treasury Division* sebagai Sekretaris. Rapat ALCO dilaksanakan secara rutin minimal sekali setiap bulan. Sebagai *second line*, Perseroan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu *risk Management Division* yang memiliki Departemen khusus untuk memantau risiko likuiditas secara periodik yaitu Departemen *Market and Other Risk*.

Perseroan telah menetapkan indikator untuk mendeteksi lebih dini terjadinya risiko likuiditas Bank. Indikator tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan *internal* tentang *Contingency Funding Plan*. Indikator peringatan dini tersebut antara lain penurunan *secondary reserve* kurang dari minimal berturut-turut selama beberapa hari kerja, peningkatan *limit maturity gap* 1 bulan, penurunan rasio LCR, trend penurunan DPK dalam 1 bulan terakhir, dan penurunan total DPK 50 nasabah terbesar.

Tinjauan Keuangan

Pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas dilakukan secara mingguan dan bulanan oleh RMD. Untuk mengukur ketahanan Perseroan terhadap risiko likuiditas, Bank melakukan stress test risiko likuiditas secara rutin minimal 3 bulan sekali dengan skenario Bank *Specific Crisis* dan *General Market Crisis*.

Untuk mengendalikan risiko likuiditas, Perseroan memiliki *limit secondary reserve* yang wajib dijaga dan dipantau secara harian. Sebagai pedoman dalam pengendalian risiko likuiditas dalam kondisi *stress*, Perseroan memiliki kebijakan tentang *Contingency Funding Plan*. Aktivitas pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh ALCO.

Uraian Profil Maturitas Rupiah dan Valas di tahun 2015 dan 2014 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Profil Maturitas Rupiah Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

Pos – pos	31-Des-15					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
Neraca						
A Aset						
1. Kas	1.179.438	1.179.438	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia	18.511.362	18.511.362	-	-	-	-
3. Penempatan pada bank lain	436.355	411.923	24.432	-	-	-
4. Surat Berharga	9.994.384	1.110.692	66.804	38.002	1.323.330	7.455.556
5. Kredit yang diberikan	138.955.804	1.536.861	1.672.837	2.604.197	3.900.981	129.240.928
6. Tagihan lainnya	1.548.489	1.548.489	-	-	-	-
7. Lain-lain	1.042.849	1.042.849	-	-	-	-
Total Aset	171.668.681	25.341.614	1.764.073	2.642.199	5.224.311	136.696.484
B Kewajiban						
1. Dana Pihak Ketiga	127.698.175	102.149.347	10.854.665	4.809.151	7.334.495	2.550.517
2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada bank lain	3.254.860	1.150.835	952.024	592.412	559.589	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	10.936.594	-	-	-	999.617	9.936.977
5. Pinjaman yang Diterima	7.724.647	-	-	1.506.968	4.217.679	2.000.000
6. Kewajiban lainnya	2.135.091	-	-	-	750.091	1.385.000
7. Lain-lain	6.150.550	6.150.550	-	-	-	-
Total Kewajiban	157.899.917	109.450.732	11.806.689	6.908.531	13.861.471	15.872.494
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	13.768.764	(84.109.118)	(10.042.616)	(4.266.332)	(8.637.160)	120.823.990
Rekening Administratif						
A Tagihan Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	2.874.283	2.874.283	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	2.874.283	2.874.283	-	-	-	-

Tinjauan Keuangan

Pos – pos	31-Des-15					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
B Kewajiban Rekening Administratif						
1. Komitmen	13.210.290	13.210.290	-	-	-	-
2. Kontijensi	1.075.991	1.075.991	-	-	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	14.286.281	14.286.281	-	-	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(11.411.998)	(11.411.998)	-	-	-	-
Selisih [(IA-IB)+(IIA- IIB)]	2.356.766	(95.521.116)	(10.042.616)	(4.266.332)	(8.637.160)	120.823.990
Selisih Kumulatif	2.356.766	(95.521.116)	(10.042.616)	(4.266.332)	(8.637.160)	120.823.990

Tabel Profil Maturitas Rupiah Tahun 2014

(dalam jutaan Rupiah)

Pos - pos	31-Des-14					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
Neraca						
A Aset						
1. Kas	918.873	918.873	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia	10.863.208	10.863.208	-	-	-	-
3. Penempatan pada bank lain	768.435	768.435	-	-	-	-
4. Surat Berharga	13.684.437	11.588.166	24.672	-	55.000	2.016.599
5. Kredit yang diberikan	115.915.801	1.024.958	1.744.949	2.835.482	5.438.085	104.872.327
6. Tagihan lainnya	1.183.489	1.183.489	-	-	-	-
7. Lain-lain	915.216	915.216	-	-	-	-
Total Aset	144.249.459	27.262.345	1.769.621	2.835.482	5.493.085	106.888.926
B Kewajiban						
1. Dana Pihak Ketiga	106.225.065	83.535.091	11.520.039	3.245.347	1.156.357	6.768.231
2. Kewajiban pada Bank Indonesia	921.632	-	-	-	-	921.632
3. Kewajiban pada bank lain	1.769.561	735.560	450.550	270.647	42.709	270.095
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	7.938.609	-	-	-	-	7.938.609
5. Pinjaman yang Diterima	6.074.499	-	-	1.025.195	2.506.968	2.542.336
6. Kewajiban lainnya	3.817.603	482.604	-	650.000	1.299.999	1.385.000
7. Lain-lain	5.328.894	5.328.894	-	-	-	-
Total Kewajiban	132.075.863	90.082.149	11.970.589	5.191.189	5.006.033	19.825.903

Tinjauan Keuangan

Pos - pos	31-Des-14					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
Selisih Aset dengan Ke- wajiban dalam Neraca	12.173.596	(62.819.804)	(10.200.968)	(2.355.707)	487.052	87.063.023
REKENING ADMINISTRATIF						
A Tagihan Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	2.560.987	2.560.987	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	2.560.987	2.560.987	-	-	-	-
B Kewajiban Rekening Administratif						
1. Komitmen	11.224.782	11.224.782	-	-	-	-
2. Kontinjensi	1.001.561	1.001.561	-	-	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	12.226.343	12.226.343	-	-	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(9.665.356)	(9.665.356)	-	-	-	-
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	2.508.240	(72.485.160)	(10.200.968)	(2.355.707)	487.052	87.063.023
Selisih Kumulatif	2.508.240	(72.485.160)	(10.200.968)	(2.355.707)	487.052	87.063.023

Tabel Profil Maturitas Valas Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

Pos - pos	31-Des-15					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
Neraca						
A Aset						
1. Kas	1.781	1.781	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.466	4.466	-	-	-	-
3. Penempatan pada bank lain	125.858	125.858	-	-	-	-
4. Surat Berharga	6.806	-	-	-	-	6.806
5. Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
6. Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Aset	138.911	132.105	-	-	-	6.806
B Kewajiban						
1. Dana Pihak Ketiga	47.568	46.813	362	-	393	-

Tinjauan Keuangan

Pos – pos	31-Des-15					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban	47.568	46.813	362	-	393	-
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	91.343	85.292	(362)	-	(393)	6.806
REKENING ADMINISTRATIF						
A Tagihan Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	547.013	547.013	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	547.013	547.013	-	-	-	-
B Kewajiban Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	384.077	384.077	-	-	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	384.077	384.077	-	-	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	162.936	162.936	-	-	-	-
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	254.279	248.228	(362)	-	(393)	6.806
Selisih Kumulatif	254.279	248.228	(362)	-	(393)	6.806

Tabel Profil Maturitas Valas Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

Pos - pos	31-Des-14					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
Neraca						
A Aset						
1. Kas	1.609	1.609	-	-	-	-

Tinjauan Keuangan

Pos - pos	31-Des-14					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.756	4.756	-	-	-	-
3. Penempatan pada bank lain	326.529	326.529	-	-	-	-
4. Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
5. Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
6. Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Aset	332.894	332.894	-	-	-	-
B Kewajiban						
1. Dana Pihak Ketiga	253.595	253.248	241	-	106	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban	253.595	253.248	241	-	106	-
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	79.299	79.646	(241)	-	(106)	-
REKENING ADMINISTRATIF						
A Tagihan Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	497.204	497.204	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	497.204	497.204	-	-	-	-
B Kewajiban Rekening Administratif						
1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi	353.291	353.291	-	-	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	353.291	353.291	-	-	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	143.913	143.913	-	-	-	-
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	223.212	223.559	(241)	-	(106)	-
Selisih Kumulatif	223.212	223.559	(241)	-	(106)	-

Tinjauan Keuangan

Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* (LGD) berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan *limit* Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Dari 87 Kantor Cabang (Konvensional dan Syariah) 86 Kantor Cabang telah ditempatkan pegawai sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) dan dari 4 Kantor Wilayah 1 Kantor Wilayah telah ditempatkan pegawai sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang berfungsi untuk memberikan pendapat maupun konsultasi hukum kepada Kantor Cabang dalam rangka pengamanan aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dan restrukturisasi kredit, melakukan observasi, penelitian dan memberikan saran terhadap operasional di unit kerja Kantor Cabang yang dinilai memiliki potensi risiko hukum serta mendampingi dan membantu proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum.

Risiko Strategik

Risk Owner

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.

1. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Praktek manajemen risiko untuk risiko strategik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten.

- b. Unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik.

2. Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
3. *Strategic Innovation dan Performance Management Division* (SIPD) bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko Strategik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
4. *Risk Management Division* (RMD) dan SIPD bertanggung jawab dalam proses manajemen risiko untuk risiko strategik dalam berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana strategik, memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategik, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan serta Memastikan bahwa seluruh isu strategik dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategik telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Strategi Manajemen Risiko Strategik

1. Dalam penyusunan strategi, SIPD wajib mengevaluasi posisi kompetitif bank di industri. Dalam hal ini Bank perlu untuk :
 - a. Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Perseroan.
 - b. Mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa

Tinjauan Keuangan

mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perseroan.

- c. Menganalisa seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategik serta toleransi risiko Bank. Kedalaman dan cakupan analisa harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
2. SIPD harus menetapkan rencana strategik dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Rencana strategik dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan *internal* yang signifikan;
4. Dalam hal Perseroan berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Perseroan wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan
5. Setiap penerapan rencana strategik harus didukung dengan sumber pendanaan yang cukup yang sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh SIPD secara berkala dengan memonitor pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dan RMD yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM.

Dalam pengendalian Risiko Strategik SIPD berfungsi menganalisis gap antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilaksanakan oleh *Compliance Desk* (CMPD) sebagaimana wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko meliputi:

Kepatuhan

1. CMPD membuat rencana kerja kepatuhan yang memadai.
2. CMPD memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan:
 - a. Ketetapan penetapan *limit*.
 - b. Kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui *limit*.
 - c. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala.
 - d. Ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
 - e. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru.
 - f. Kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

Untuk setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, Perseroan melakukan evaluasi dan menyesuaikan Peraturan *Intern* dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh regulator tersebut.

Dalam mengidentifikasi Risiko Kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melalui BCSO melakukan evaluasi eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat (*inherent*) pada ketentuan *internal*. Di samping itu, CMPD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dengan cara :

Tinjauan Keuangan

- a. Memberikan kajian kepatuhan terhadap produk baru dan konsep peraturan *internal* yang baru.
- b. Melakukan kajian terhadap peraturan *internal* yang masih berlaku.
- c. Melakukan sosialisasi kebijakan regulator baru kepada divisi-divisi dan Kantor Cabang.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi yaitu CSD (*Corporate Secretary Division*) yang bertanggung jawab antara lain :

1. Menjalankan fungsi kehumasan dan merespons pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Perseroan dan dapat menyebabkan kerugian Bank.
2. Mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, yaitu investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat

Perseroan memiliki kebijakan untuk mengantisipasi dan menangani adanya Risiko Reputasi perusahaan yang salah satunya disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Direksi No. 01/PD/DHHP/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan

Risiko Reputasi PT Bank Tabungan Negara (Persero). Peraturan Direksi ini bertujuan untuk mengelola Risiko Reputasi atas setiap kejadian terutama dalam bentuk persepsi negatif maupun pemberitaan negatif yang dihadapi Perseroan, agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan tidak mengalami hambatan sehingga mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Dengan Peraturan Direksi ini, dimaksudkan agar segala kegiatan usaha Perseroan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama adanya akuntabilitas Bank kepada publik.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah. Perseroan telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Dalam pengendalian Risiko Reputasi, CSD bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan CSR tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program sosial lainnya yang dapat meningkatkan reputasi Perseroan di tengah masyarakat.

Perseroan mengelola risiko reputasi pada saat krisis melalui jalur komunikasi di *Corporate Secretary Division* (CSD).

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Ikatan material terkait dengan investasi barang modal adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 10 Desember 2014, Bank melakukan penandatanganan addendum kedua atas perjanjian kerjasama dengan PT Aprisma Indonesia yang bertujuan untuk pengadaan Aplikasi *Mobile Banking* dan *Internet Banking Individual* dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000. Dalam perjanjian ini disepakati menambah jangka waktu perjanjian sehingga pihak kedua berkewajiban menyelesaikan

Tinjauan Keuangan

pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam addendum perjanjian.

2. Pada tanggal 24 September 2014, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Wincor Nixdorf Indonesia yang bertujuan untuk pengadaan Jasa Pengelolaan Terminal Layanan Mandiri (jasa pengisian ATM) sejumlah 370 unit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp20.335.
3. Pada tanggal 13 November 2015, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Mandiri Informatika yang bertujuan untuk pengadaan aplikasi ATM *Multi solution* berupa penyediaan lisensi sebanyak 1.830 unit, melakukan instalasi, pengaturan dan konfigurasi aplikasi untuk jangka waktu masa garansi selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Berita Acara *Go Live* dengan nilai kontrak sebesar Rp8,3 miliar.
4. Pada tanggal 8 Juni 2015, Bank mengadakan

perjanjian dengan PT Mastersystem Infotama yang bertujuan untuk pengadaan Lisensi Produk Microsoft untuk jangka waktu perjanjian yang berlaku selama 2 tahun dengan nilai kontrak sebesar ASD 3.820.000 (nilai penuh).

Sumber dana untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut berasal dari *internal* Perseroan baik dalam mata uang Rupiah maupun Amerika Serikat Dollar.

Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yaitu melalui transaksi derivatif dengan tujuan *hedging*. Transaksi derivatif yang dapat dilakukan oleh Perseroan ialah transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan/atau suku bunga. Transaksi ini dapat berupa *forward, swap, option, cap, floor*, dan lain-lain yang dikategorikan sebagai transaksi derivatif dengan memperhatikan *counterparty line* yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan *Treasury Division Head*.

Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor, serta aset yang masih dalam penyesuaian berupa bangunan. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Pada tahun 2015, jumlah investasi barang modal sebesar Rp267,19 miliar.

Rincian terkait investasi barang modal diuraikan sebagai berikut.

Keterangan	2015
Tanah	286
Bangunan	60.698
Peralatan Kantor dan kendaraan bermotor	151.407
	212.391
Aset dalam penyesuaian (Bangunan)	54.797
Jumlah Investasi Barang Modal	267.188

Tinjauan Keuangan

Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	13.209.613	11.224.658
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.908.418	1.644.444
LIABILITAS KONTINJENSI		
Garansi yang diterbitkan	(1.460.068)	(1.354.852)
Kontinjensi -Neto	448.350	289.592

Dampak Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah mengubah tingkat suku bunga Bank Indonesia dari 7,75% menjadi 7,5%. Hal ini berdampak pada perubahan tingkat suku bunga di industri perbankan, yakni tingkat suku bunga tabungan, deposito, dan kredit. Perubahan tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil yang lebih besar dari beban bunga dan bonus. Peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil mencapai Rp2,16 triliun atau sebesar 16,86% dari Rp12,81 triliun di 2014 menjadi Rp14,97 triliun di 2015 serta peningkatan beban bunga sebesar Rp812,39 miliar atau sebesar 11,06% dari Rp7,34 triliun di 2014 menjadi Rp8,16 triliun di 2015. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan pendapatan operasional di tahun 2015 yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income*

Peningkatan *fee based income* di 2015 yang berhasil dihimpun Perseroan sebesar Rp194,79 miliar dari Rp122,62 miliar di 2014. Peningkatan tersebut berasal dari jasa perbankan yang terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM sebesar Rp87,55 miliar. Selain itu, jasa penagihan atau *payment points* mencapai Rp5,25 miliar dan jasa lainnya yang berupa *servicing fee* dari transaksi sekuritisasi, provisi atas garansi bank yang diterbitkan, dan kondisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual sebesar Rp101,99 miliar.

Tinjauan Keuangan

Perbandingan Target dan Realisasi

Pencapaian Target 2015

Secara umum, pencapaian target Perseroan di 2015 telah menunjukkan hasil yang maksimal. Uraian terkait pencapaian target digambarkan dalam table berikut.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi 2015 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2015	RBB 2015	Pencapaian
ASET			
Kas	1.181.219	937.484	126,00%
Penempatan pada Bank Indonesia	18.515.828	14.725.974	125,74%
Penempatan pada bank lain	562.213	1.293.679	43,46%
Tagihan spot dan derivative	-	-	-
Surat berharga	-	10.451.332	0,00%
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	19.267	3.920.474	0,49%
b. Tersedia untuk dijual	4.076.540	4.323.603	94,29%
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3.458.871	2.207.255	156,70%
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2.446.512	4.740.624	51,61%
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-	-
Tagihan akseptasi	-	-	-
Kredit	127.732.158	125.603.702	101,69%
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-
b. Tersedia untuk dijual	-	-	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	127.732.158	125.603.702	101,69%
Pembiayaan Syariah	11.223.646	11.205.043	100,17%
Penyertaan	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	(1.814.995)	0,00%
a. Surat berharga	(12.001)	(11.481)	104,53%
b. Kredit	(2.050.578)	(1.801.871)	113,80%
c. Lainnya	(2)	(1.643)	0,10%
Aset tidak berwujud	-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	3.237.287	3.607.454	89,74%
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.683.886)	(1.695.929)	99,29%
Aset non produktif	-	-	-

Tinjauan Keuangan

Uraian	2015	RBB 2015	Pencapaian
a. Properti terbengkalai	4.861	731	664,98%
b. Aset yang diambil alih	77.591	100.000	77,59%
c. Rekening tunda	-	-	-
d. Aset antar kantor	-	-	-
e. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-
f. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	(4.194)	-	-
Sewa pembiayaan	-	-	-
Aset pajak tangguhan	-	-	-
Aset lainnya	3.023.830	2.412.496	125,34%
TOTAL ASET	171.807.592	171.567.595	100,14%
LIABILITAS dan EKUITAS			
LIABILITAS			
Giro	30.881.940	32.123.071	96,14%
Tabungan	29.871.544	27.752.624	107,64%
Simpanan berjangka	58.086.313	61.632.673	94,25%
Dana investasi <i>revenue sharing</i>	8.905.946	8.203.765	108,56%
Pinjaman dari Bank Indonesia	-	31.280	0,00%
Pinjaman dari bank lain	3.254.860	158.240	2056,91%
Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivative</i>	-	-	-
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.135.091	2.685.000	79,52%
Utang akseptasi	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	10.936.594	12.440.029	87,91%
Pinjaman yang diterima	7.724.647	6.032.670	128,05%
Setoran Jaminan	10.279	5.220	196,92%
Liabilitas antar kantor	-	-	-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	9.566	-	-
Liabilitas lainnya	6.130.705	6.778.004	90,45%
Dana investasi profit sharing	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	157.947.485	157.842.576	100,07%
EKUITAS			
Modal Disetor	-	5.291.173	0,00%
a. Modal dasar	10.239.216	-	-
b. Modal yang belum disetor -/-	(4.948.043)	-	-
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	-	-
Tambahan modal disetor	-	1.759.762	0,00%
a. Agio	2.046.598	2.046.598	100,00%
b. Disagio -/-	-	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-	-
d. Dana setoran modal	-	-	-
e. Lainnya	2.690	-	-

Tinjauan Keuangan

Uraian	2015	RBB 2015	Pencapaian
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	(289.526)	0,00%
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(133.690)	-	-
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(106.144)	-	-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	-
h. Lainnya	-	2.690	-
Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-	-	-
Ekuitas lainnya	-	-	-
Cadangan		3.859.360	0,00%
a. Cadangan Umum	3.018.884	3.018.885	100,00%
b. Cadangan Tujuan	840.476	840.476	100,00%
Laba/rugi		2.814.726	0,00%
a. Tahun-tahun lalu	1.049.213	1.004.952	104,40%
b. Tahun berjalan	1.850.907	1.809.774	102,27%
TOTAL EKUITAS Yang DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	13.860.107	13.725.021	100,98%
Kepentingan non pengendali	-	-	-
TOTAL EKUITAS	13.860.107	13.725.021	100,98%
TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS	171.807.592	171.567.597	100,14%
LABA RUGI KOMPREHENSIF			
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	6.866.503	6.829.947	100,54%
Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih	(4.332.898)	(4.290.935)	100,98%
Laba Rugi Operasional	2.533.605	2.539.012	99,79%
Pendapatan dan Beban Non Operasional			
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-	-
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12.019	(379.400)	-3,17%
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3.738)	386.449	-0,97%
Laba Rugi Non Operasional	8.281	7.049	117,48%
Laba Rugi Tahun Berjalan sebelum Pajak	2.541.886	2.546.061	99,84%
Transfer Laba Rugi ke Kantor pusat	-	-	-
Pajak Penghasilan	-	(736.282)	0,00%
Taksiran Pajak Tahun berjalan	(783.483)	(666.326)	117,58%
Pendapatan beban pajak tangguhan	92.504	(69.956)	-132,23%
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih	1.850.907	1.809.779	102,27%
Dividen	-	542.934	-
Laba Bersih per saham	175	175	100,00%

Tinjauan Keuangan

Proyeksi

Manajemen Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2016 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2016, baik dari segi makro maupun mikro. Rencana Bisnis Bank tersebut diuraikan sebagai berikut.

Perbandingan Realisasi 2015 Dengan Rencana Bisnis Bank 2016 (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	Proyeksi 2016
1	2	3
ASET		
Kas	1.181.219	1.114.859
Penempatan pada Bank Indonesia	18.515.828	21.186.083
Penempatan pada bank lain	562.213	1.821.467
Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivative</i>	-	-
Surat berharga		10.461.757
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	19.267	3.920.474
b. Tersedia untuk dijual	4.076.540	4.323.603
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3.458.871	2.217.681
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	2.446.512	4.740.624
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-
Tagihan akseptasi	-	-
Kredit	-	148.701.616
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
b. Tersedia untuk dijual	-	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	127.732.158	148.701.616
Pembiayaan Syariah	11.223.646	13.670.696
Penyertaan	-	700.000
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(1.979.974)
a. Surat berharga	(12.001)	(11.481)
b. Kredit	(2.050.578)	(1.959.850)
c. Lainnya	(1.572)	(8.6430)
Aset tidak berwujud	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-
Aset tetap dan inventaris	3.237.287	4.166.776
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.683.886)	(1.989.093)
Aset non produktif		
a. Properti terbengkalai	4.861	731
b. Aset yang diambil alih	77.591	-
c. Rekening tunda	-	-
d. Aset antar kantor	-	-
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	(4.194)	-
Sewa pembiayaan	-	-

Tinjauan Keuangan

Uraian	2015	Proyeksi 2016
1	2	3
Aset pajak tangguhan	-	-
Aset lainnya	3.023.830	2.743.394
TOTAL ASET	171.807.592	205.338.936
LIABILITAS dan EKUITAS		
LIABILITAS		
Giro	30.881.940	32.919.208
Tabungan	29.871.544	33.969.094
Simpanan berjangka	58.086.313	67.592.858
Dana investasi revenue sharing	8.905.946	10.411.231
Pinjaman dari Bank Indonesia	-	31.280
Pinjaman dari bank lain	3.254.860	504.597
Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivative</i>	-	-
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.135.091	2.685.000
Utang akseptasi	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	10.936.594	26.625.029
Pinjaman yang diterima	7.724.647	6.782.657
Setoran Jaminan	10.279	5.220
Liabilitas antar kantor	-	-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	9.566	-
Liabilitas lainnya	6.130.705	8.277.769
Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	0
TOTAL LIABILITAS	157.947.485	189.803.943
EKUITAS		
Modal Disetor		5.291.173
a. Modal dasar	10.239.216	
b. Modal yang belum disetor -/-	(4.948.043)	
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	
Tambahan modal disetor		1.759.762
a. Agio	2.046.598	2.046.598
b. Disagio -/-	-	
c. Modal Sumbangan	-	
d. Dana setoran modal	-	
e. Lainnya	2.690	
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		(289.526)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(133.690)	
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(106.144)	
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	
h. Lainnya	-	2.690
Selisih kuasi reorganisasi	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-

Tinjauan Keuangan

Uraian	2015	Proyeksi 2016
1	2	3
Ekuitas lainnya	-	-
Cadangan		3.859.360
a. Cadangan Umum	3.018.884	3.018.885
b. Cadangan Tujuan	840.476	840.476
Laba/rugi		4.624.700
a. Tahun-tahun lalu	1.049.213	2.208.452
b. Tahun berjalan	1.850.907	2.416.248
TOTAL EKUITAS Yang DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	13.860.107	15.534.995
Kepentingan non pengendali	-	-
TOTAL EKUITAS	13.860.107	15.534.995
TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS	171.807.592	205.338.938
LABA RUGI KOMPREHENSIF		
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	6.866.503	8.486.740
Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih	(4.332.898)	(5.161.686)
Laba Rugi Operasional	2.533.605	3.325.054
Pendapatan dan Beban Non Operasional		
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12.019	(12.000)
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3738)	(112.397)
Laba Rugi Non Operasional	8.281	(124.397)
Laba Rugi Tahun Berjalan sebelum Pajak	2.541.886	3.200.656
Transfer Laba Rugi ke Kantor pusat		-
Pajak Penghasilan		
Taksiran Pajak Tahun berjalan	(783.483)	(784.408)
Pendapatan beban pajak tangguhan	92.504	(784.408)
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih	1.850.907	2.416.248
Dividen	-	724.874
Laba Bersih per saham	175	228

Informasi Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Perseroan tidak memiliki informasi material penting yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tinjauan Keuangan

Besarnya dividen Bank jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Bank.

Tahun	Dividen Tunai (Miliar Rupiah)	Laba Bersih (Miliar Rupiah)	Dividen per Lembar Saham	Dividend Payout Ratio	Tanggal Pembayaran
2013	469	1.562	44,36	30%	07-Apr-14
2014	223	1.116	21,11	20%	24-Apr-15

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Februari 2014, Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 sebesar Rp1,56 triliun. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 30% dari laba bersih yaitu Rp468,65 miliar, dan alokasi atas saldo laba sebesar 70% dari laba bersih Perseroan yaitu Rp1,09 triliun yang ditetapkan sebagai cadangan umum. Jumlah dividen kas per saham sebesar Rp44,36 dan *payout ratio* sebesar 30%. Pembagian dividen untuk tahun buku 2013 dibayarkan pada tanggal 7 April 2014 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2014.

Sedangkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2015, Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar Rp1,12 triliun. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih yaitu Rp223,12 miliar, dan alokasi atas saldo laba sebesar 80% dari laba bersih yaitu Rp892,473 miliar yang ditetapkan sebagai laba ditahan. Jumlah dividen kas per saham sebesar Rp21,11 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang saham Perseroan dengan *payout ratio* sebesar 20%. Pembagian dividen untuk tahun buku 2014 dibayarkan pada tanggal 24 April 2015 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2015.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/ MESOP*) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.
2. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
3. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lock up* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.

Tinjauan Keuangan

- Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

MESOP Tahap I

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap I adalah 145.234.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp855 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 29 Januari 2010. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2011.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap pertama yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2010 adalah sebesar Rp422,05 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 22 September 2010 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi suku bunga bebas risiko sebesar 7,8%, ekspektasi periode opsi selama 5 tahun, ekspektasi ketidakstabilan harga saham sebesar 50%, ekspektasi dividen yang dihasilkan sebesar 2%, serta tingkat pengunduran diri karyawan sebesar 1%.

Rincian terkait MESOP Tahap I diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Rincian MESOP Tahap I

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
KOMISARIS					
Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
Lucky Fathul Aziz Hadiabrata	-	-	-	-	-
Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
Sumiyati	-	-	-	-	-
DIREKSI					
Maryono	-	-	-	-	-
Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	1.354.000	1.354.000	855.00	s.d 2014
Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
Adi Setianto	-	-	-	-	-
Sulis Usdoko	-	138.500	138.500	855,00	s.d 2014
Oni Febriarto R.	-	65.000	65.000	855,00	s.d 2014
PEJABAT EKSEKUTIF					
Stephanus Hari K	18.300	43.500	43.500	855,00	s.d 2014
Dwihatmo Arisumasto	6.100	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Hanafi	190.600	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Arif Wijanarko	-	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Ferry Sonefille	-	80.500	80.500	855,00	s.d 2014
Sigit Handoko	139.100	52.000	52.000	855,00	s.d 2014
Fadlin Farades	7.300	51.500	51.500	855,00	s.d 2014
Turyanti	383.200	106.000	106.000	855,00	s.d 2014
I.G.A.K. Tri Martha W	7.600	58.500	58.500	855,00	s.d 2014
Alex Sofyan Noor	9.500	78.000	78.000	855,00	s.d 2014
Darmin Usman	4.000	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Ali Irfan	6.600	35.500	35.500	855,00	s.d 2014
Heru Kurniawan	8.700	56.500	56.500	855,00	s.d 2014
John Mangara TS.	7.300	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Bambang Prasetyo	282.300	66.000	66.000	855,00	s.d 2014
Ahmad Romzah	326.800	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Yulianti Hastiwulan	160.600	68.500	68.500	855,00	s.d 2014
Frisaba H Yusdianto	8.200	78.500	78.500	855,00	s.d 2014
Muhammad Mutaqin	6.400	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Agus Susanto	109.300	64.000	64.000	855,00	s.d 2014
Benjamen Sihombing	7.800	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Vachromi Umar	4.500	29.000	29.000	855,00	s.d 2014
Daulat Marpaung	137.600	53.500	53.500	855,00	s.d 2014
Eka Immawaty	-	60.500	60.500	855,00	s.d 2014
Roganda Mangapul S	110.100	52.000	52.000	855,00	s.d 2014
Porman Simarmata	6.100	29.000	29.000	855,00	s.d 2014
M.Iwan Suherlan	-	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
R.Achmad Zein W	8.200	55.000	55.000	855,00	s.d 2014
Paima Erianto Hsb	300.200	69.500	69.500	855,00	s.d 2014
Rudolf Valentino Saragih	238.000	56.500	56.500	855,00	s.d 2014
Anton Rijanto	8.500	53.500	53.500	855,00	s.d 2014
Astik Pradjana	-	73.000	73.000	855,00	s.d 2014
Darminto	7.300	43.000	43.000	855,00	s.d 2014
Andi Yusmanto	46.000	53.000	53.000	855,00	s.d 2014
Lia Muliana	201.700	71.500	71.500	855,00	s.d 2014
Saniman	6.100	52.500	52.500	855,00	s.d 2014
Rabono	-	35.500	35.500	855,00	s.d 2014
Rm.Satrio Wibowo	4.000	28.500	28.500	855,00	s.d 2014
Rifki Sengadji	43.200	78.000	78.000	855,00	s.d 2014

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Ricky RS. Pattinggi	32.000	57.500	57.500	855,00	s.d 2014
Syafaruddin Harahap	68.300	56.500	56.500	855,00	s.d 2014
Elvis Syahri	57.300	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Slamet Purwadi	357.000	66.000	66.000	855,00	s.d 2014
Untari Setyowati	-	68.500	68.500	855,00	s.d 2014
Zulmarwan	57.300	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Ardi Darmawan	-	53.000	53.000	855,00	s.d 2014
M Adrian Syahbandi A	8.200	59.500	59.500	855,00	s.d 2014
Anggono Sinung N.	6.600	53.500	53.500	855,00	s.d 2014
Christophorus Setyawan	4.000	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Bagya Mulyanto	4.000	63.500	63.500	855,00	s.d 2014
Achmad Chaerul	8.200	52.000	52.000	855,00	s.d 2014
Wisnu Agus Prijanto	7.300	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Muchtar Muhammad Noor	7.300	58.500	58.500	855,00	s.d 2014
Adhi Kuntoyo	6.100	51.500	51.500	855,00	s.d 2014
Atjuk Winarto	7.300	54.000	54.000	855,00	s.d 2014
Dante Sulindro Nugroho	9.200	88.500	88.500	855,00	s.d 2014
Susetio Dwiyanto	7.600	68.500	68.500	855,00	s.d 2014
Iriska Dewayani E	7.800	68.500	68.500	855,00	s.d 2014
Achmad Noorachman	9.500	77.500	77.500	855,00	s.d 2014
Fadjar Juliati	-	64.500	64.500	855,00	s.d 2014
Sahat Sihombing	20.200	60.000	60.000	855,00	s.d 2014
A.Tri Wyanjono	-	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Surasta	124.100	53.000	53.000	855,00	s.d 2014
Suriansyah	130.500	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Ahmad Fatoni	7.300	59.000	59.000	855,00	s.d 2014
Pudi Djunaidi	6.100	69.000	69.000	855,00	s.d 2014
Cuk Hidayat	6.100	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Munazir	175.600	37.500	37.500	855,00	s.d 2014
Herry	154.500	50.000	50.000	855,00	s.d 2014
Joni Wahyu Nugroho	231.600	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Asvianti Handaru W.	6.400	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Arias Rachman	6.400	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Untung Surapati	244.900	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Herman Sugiharto	7.600	57.000	57.000	855,00	s.d 2014
Arrianto Edie Nugroho	87.500	50.000	50.000	855,00	s.d 2014
Andi Ruchmono	-	43.000	43.000	855,00	s.d 2014
Nurul Astuti	92.000	43.500	43.500	855,00	s.d 2014
Sepmaedi Anada	181.900	53.000	53.000	855,00	s.d 2014

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Asep Hermansyah	64.300	50.000	50.000	855,00	s.d 2014
Noor Ridlo	-	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Indro Setiadji	6.100	67.500	67.500	855,00	s.d 2014
R.Anggarani	239.600	78.000	78.000	855,00	s.d 2014
Triyantoro	4.000	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Fitri Novianty Ratna K	6.400	49.500	49.500	855,00	s.d 2014
Zulfahmi	6.100	29.500	29.500	855,00	s.d 2014
Tyas Dite Kresnanto	6.100	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Setiyadi	186.100	56.500	56.500	855,00	s.d 2014
Toto Priyohartono	134.800	90.000	90.000	855,00	s.d 2014
R. Mahelan Prabantarikso	9.500	57.500	57.500	855,00	s.d 2014
Nefo Purwono Trianggono	13.800	-	-	855,00	-
Satya Wijayantara	8.700	56.000	56.000	855,00	s.d 2014
Dewi Fitrianingrum	14.300	83.000	83.000	855,00	s.d 2014
Viator Simbolon	100.200	108.000	108.000	855,00	s.d 2014
Sudaryo Bagyo Utomo	-	86.000	86.000	855,00	s.d 2014
Eko Waluyo	8.500	51.000	51.000	855,00	s.d 2014
Sri Purwanto	34.200	77.500	77.500	855,00	s.d 2014
Triani Pudji Astuti	133.100	105.000	105.000	855,00	s.d 2014
Arief Pramuhanto	-	-	-	855,00	-
Refyul Rey Fatri	-	-	-	855,00	-
Sindhu Rahadian Ardita	8.200	55.500	55.500	855,00	s.d 2014
Dadang Eka Jatnika	13.500	57.500	57.500	855,00	s.d 2014
Yossi Istanto	8.500	50.000	50.000	855,00	s.d 2014
Suryanti Agustinar	293.600	83.500	83.500	855,00	s.d 2014
Dadang Rusnady	-	77.500	77.500	855,00	s.d 2014
Budi Wahyuti	-	120.500	120.500	855,00	s.d 2014
Nasril	14.100	88.000	88.000	855,00	s.d 2014
Hertanta	59.000	79.500	79.500	855,00	s.d 2014
Marisa Gemiralda	15.200	94.000	94.000	855,00	s.d 2014
Elisabeth Novie Riswanti	8.500	76.500	76.500	855,00	s.d 2014
Hirwandi Gafar	8.500	58.000	58.000	855,00	s.d 2014
Nofry Rony Poetro	9.200	77.000	77.000	855,00	s.d 2014
Harman Soesanto	6.400	50.500	50.500	855,00	s.d 2014
Palwoto	228.000	57.500	57.500	855,00	s.d 2014
Sri Rezeki M.S	328.000	84.000	84.000	855,00	s.d 2014
Adi Suharto Atmadja	185.800	85.000	85.000	855,00	s.d 2014
Joni Prasetyanto	252.700	67.500	67.500	855,00	s.d 2014
Rachmat Siswanto	56.700	82.000	82.000	855,00	s.d 2014

Tinjauan Keuangan

MESOP Tahap II

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap II adalah 108.925.000 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.297,44 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2011. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2012.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap kedua yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp463,87 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi suku bunga bebas risiko sebesar 7,975%, ekspektasi periode opsi selama 5 tahun, ekspektasi ketidakstabilan harga saham sebesar 50%, ekspektasi dividen yang dihasilkan sebesar 2%, serta tingkat pengunduran diri karyawan sebesar 1%.

Rincian terkait MESOP Tahap II diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Rincian MESOP Tahap II

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
KOMISARIS					
Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
Sumiyati	-	-	-	-	-
DIREKSI					
Maryono	-	-	-	-	-
Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	855.500	855.500	1.297,44	s.d 2015
Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
Adi Setianto	-	-	-	-	-
Sulis Usdoko	-	109.000	109.000	1.297,44	s.d 2015
Oni Febriarto R.	-	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
PEJABAT EKSEKUTIF					
Stephanus Hari K	18.300	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Dwihatmo Arisumasto	6.100	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015
Hanafi	190.600	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Arif Wijanarko	-	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Ferry Sonefille	-	61.500	61.500	1.297,44	s.d 2015
Sigit Handoko	139.100	37.500	37.500	1.297,44	s.d 2015
Fadlin Farades	7.300	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Turyanti	383.200	81.500	81.500	1.297,44	s.d 2015
I.G.A.K. Tri Martha W	7.600	54.000	54.000	1.297,44	s.d 2015
Alex Sofyan Noor	9.500	56.500	56.500	1.297,44	s.d 2015
Darmin Usman	4.000	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Ali Irfan	6.600	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Heru Kurniawan	8.700	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
John Mangara TS.	7.300	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Bambang Prasetyo	282.300	55.000	55.000	1.297,44	s.d 2015
Ahmad Romzah	326.800	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Yuliati Hastiwulan	160.600	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
Frisaba H Yusdianto	8.200	56.500	56.500	1.297,44	s.d 2015
Muhammad Mutaqin	6.400	41.000	41.000	1.297,44	s.d 2015
Agus Susanto	109.300	50.000	50.000	1.297,44	s.d 2015
Benjamen Sihombing	7.800	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Vachromi Umar	4.500	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Daulat Marpaung	137.600	42.500	42.500	1.297,44	s.d 2015
Eka Immawaty	-	44.000	44.000	1.297,44	s.d 2015
Roganda Mangapul S	110.100	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Porman Simarmata	6.100	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
M.Iwan Suherlan	-	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015
R.Achmad Zein W	8.200	41.000	41.000	1.297,44	s.d 2015
Paima Erianto Hsb	300.200	55.000	55.000	1.297,44	s.d 2015
Rudolf Valentino Saragih	238.000	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Anton Rijanto	8.500	42.500	42.500	1.297,44	s.d 2015
Astik Pradjana	-	54.000	54.000	1.297,44	s.d 2015
Darminto	7.300	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Andi Yusmanto	46.000	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Lia Muliana	201.700	56.000	56.000	1.297,44	s.d 2015
Saniman	6.100	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Rabono	-	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Rm.Satrio Wibowo	4.000	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Rifki Sengadji	43.200	57.000	57.000	1.297,44	s.d 2015
Ricky RS. Pattinggi	32.000	46.500	46.500	1.297,44	s.d 2015
Syafaruddin Harahap	68.300	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Elvis Syahri	57.300	40.000	40.000	1.297,44	s.d 2015
Slamet Purwadi	357.000	59.000	59.000	1.297,44	s.d 2015
Untari Setyowati	-	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
Zulmarwan	57.300	40.500	40.500	1.297,44	s.d 2015
Ardi Darmawan	-	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
M Adrian Syahbandi A	8.200	54.500	54.500	1.297,44	s.d 2015
Anggono Sinung N.	6.600	42.500	42.500	1.297,44	s.d 2015
Christophorus Setyawan	4.000	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Bagya Mulyanto	4.000	46.000	46.000	1.297,44	s.d 2015
Achmad Chaerul	8.200	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Wisnu Agus Prijanto	7.300	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Muchtar Muhammad Noor	7.300	54.000	54.000	1.297,44	s.d 2015
Adhi Kuntoyo	6.100	41.000	41.000	1.297,44	s.d 2015
Atjuk Winarto	7.300	43.000	43.000	1.297,44	s.d 2015
Dante Sulindro Nugroho	9.200	75.500	75.500	1.297,44	s.d 2015
Susetio Dwiyanto	7.600	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
Iriska Dewayani E	7.800	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
Achmad Noorrachman	9.500	60.000	60.000	1.297,44	s.d 2015
Fadjar Juliati	-	50.500	50.500	1.297,44	s.d 2015
Sahat Sihombing	20.200	55.500	55.500	1.297,44	s.d 2015
A.Tri Wyanjono	-	40.500	40.500	1.297,44	s.d 2015
Surasta	124.100	42.500	42.500	1.297,44	s.d 2015
Suriansyah	130.500	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Ahmad Fatoni	7.300	54.500	54.500	1.297,44	s.d 2015
Pudi Djunaidi	6.100	51.000	51.000	1.297,44	s.d 2015
Cuk Hidayat	6.100	40.500	40.500	1.297,44	s.d 2015
Munazir	175.600	37.500	37.500	1.297,44	s.d 2015
Herry	154.500	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Joni Wahyu Nugroho	231.600	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Asvianti Handaru W.	6.400	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Arias Rachman	6.400	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015
Untung Surapati	244.900	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Herman Sugiharto	7.600	46.000	46.000	1.297,44	s.d 2015
Arrianto Edie Nugroho	87.500	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Andi Ruchmono	-	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Nurul Astuti	92.000	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Sepmaedi Anada	181.900	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Asep Hermansyah	64.300	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Noor Ridlo	-	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015
Indro Setiadji	6.100	50.000	50.000	1.297,44	s.d 2015
R.Anggarani	239.600	56.500	56.500	1.297,44	s.d 2015
Triyantoro	4.000	36.500	36.500	1.297,44	s.d 2015
Fitri Novianty Ratna K	6.400	36.000	36.000	1.297,44	s.d 2015
Zulfahmi	6.100	31.000	31.000	1.297,44	s.d 2015

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Tyas Dite Kresnanto	6.100	37.000	37.000	1.297,44	s.d 2015
Setiyadi	186.100	42.000	42.000	1.297,44	s.d 2015
Toto Priyohartono	134.800	69.000	69.000	1.297,44	s.d 2015
R. Mahelan Prabantarikso	9.500	46.500	46.500	1.297,44	s.d 2015
Nefo Purwono Trianggono	13.800	-	-		
Satya Wijyantara	8.700	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Dewi Fitrianingrum	14.300	63.500	63.500	1.297,44	s.d 2015
Viator Simbolon	100.200	87.500	87.500	1.297,44	s.d 2015
Sudaryo Bagyo Utomo	-	61.500	61.500	1.297,44	s.d 2015
Eko Waluyo	8.500	41.000	41.000	1.297,44	s.d 2015
Sri Purwanto	34.200	59.500	59.500	1.297,44	s.d 2015
Triani Pudji Astuti	133.100	80.500	80.500	1.297,44	s.d 2015
Arief Pramuhanto	-	-	-	-	-
Refyul Rey Fatri	-	-	-	-	-
Sindhu Rahadian Ardita	8.200	41.500	41.500	1.297,44	s.d 2015
Dadang Eka Jatnika	13.500	46.500	46.500	1.297,44	s.d 2015
Yossi Istanto	8.500	40.500	40.500	1.297,44	s.d 2015
Suryanti Agustinar	293.600	64.000	64.000	1.297,44	s.d 2015
Dadang Rusnady	-	60.000	60.000	1.297,44	s.d 2015
Budi Wahyuti	-	88.000	88.000	1.297,44	s.d 2015
Nasril	14.100	68.000	68.000	1.297,44	s.d 2015
Hertanta	59.000	61.000	61.000	1.297,44	s.d 2015
Marisa Gemiralda	15.200	83.000	83.000	1.297,44	s.d 2015
Elisabeth Novie Riswanti	8.500	55.000	55.000	1.297,44	s.d 2015
Hirwandi Gafar	8.500	43.000	43.000	1.297,44	s.d 2015
Nofry Rony Poetro	9.200	59.500	59.500	1.297,44	s.d 2015
Harman Soesanto	6.400	40.500	40.500	1.297,44	s.d 2015
Palwoto	228.000	46.500	46.500	1.297,44	s.d 2015
Sri Rezeki M.S	328.000	64.000	64.000	1.297,44	s.d 2015
Adi Suharto Atmadja	185.800	65.500	65.500	1.297,44	s.d 2015
Joni Prasetyanto	252.700	60.000	60.000	1.297,44	s.d 2015
Rachmat Siswanto	56.700	62.500	62.500	1.297,44	s.d 2015

Tinjauan Keuangan

MESOP Tahap III

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham tahap III adalah 108.925.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.098,36 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2012. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2013.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 adalah sebesar Rp427,93 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 28 Juni 2012 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi suku bunga bebas risiko sebesar 5,023%, ekspektasi periode opsi selama 5 tahun, ekspektasi ketidakstabilan harga saham sebesar 50%, ekspektasi dividen yang dihasilkan sebesar 2%, serta tingkat pengunduran diri karyawan sebesar 1%.

Rincian terkait MESOP Tahap III diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Rincian MESOP Tahap III

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
KOMISARIS					
Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
Sumiyati	-	-	-	-	-
DIREKSI					
Maryono	-	-	-	-	-
Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	828.500	828.500	1.098,36	s.d 2016
Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
Adi Setianto	-	-	-	-	-
Sulis Usdoko	-	108.500	108.500	1.098,36	s.d 2016
Oni Febriarto R.	-	54.500	54.500	1.098,36	s.d 2016
PEJABAT EKSEKUTIF					
Stephanus Hari K	18.300	37.500	37.500	1.098,36	s.d 2016
Dwihatmo Arisumasto	6.100	38.000	38.000	1.098,36	s.d 2016
Hanafi	190.600	39.500	39.500	1.098,36	s.d 2016

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Arif Wijanarko	-	42.000	42.000	1.098,36	s.d 2016
Ferry Sonefille	-	61.500	61.500	1.098,36	s.d 2016
Sigit Handoko	139.100	39.500	39.500	1.098,36	s.d 2016
Fadlin Farades	7.300	40.500	40.500	1.098,36	s.d 2016
Turyanti	383.200	80.500	80.500	1.098,36	s.d 2016
I.G.A.K. Tri Martha W	7.600	54.500	54.500	1.098,36	s.d 2016
Alex Sofyan Noor	9.500	55.500	55.500	1.098,36	s.d 2016
Darmin Usman	4.000	33.000	33.000	1.098,36	s.d 2016
Ali Irfan	6.600	42.000	42.000	1.098,36	s.d 2016
Heru Kurniawan	8.700	45.000	45.000	1.098,36	s.d 2016
John Mangara TS.	7.300	42.500	42.500	1.098,36	s.d 2016
Bambang Prasetyo	282.300	55.000	55.000	1.098,36	s.d 2016
Ahmad Romzah	326.800	40.000	40.000	1.098,36	s.d 2016
Yulianti Hastiwulan	160.600	48.500	48.500	1.098,36	s.d 2016
Frisaba H Yusdianto	8.200	57.500	57.500	1.098,36	s.d 2016
Muhammad Mutaqin	6.400	42.500	42.500	1.098,36	s.d 2016
Agus Susanto	109.300	52.000	52.000	1.098,36	s.d 2016
Benjamen Sihombing	7.800	45.500	45.500	1.098,36	s.d 2016
Vachromi Umar	4.500	32.500	32.500	1.098,36	s.d 2016
Daulat Marpaung	137.600	41.000	41.000	1.098,36	s.d 2016
Eka Immawaty	-	44.500	44.500	1.098,36	s.d 2016
Roganda Mangapul S	110.100	39.000	39.000	1.098,36	s.d 2016
Porman Simarmata	6.100	37.000	37.000	1.098,36	s.d 2016
M.Iwan Suherlan	-	37.500	37.500	1.098,36	s.d 2016
R.Achmad Zein W	8.200	44.000	44.000	1.098,36	s.d 2016
Paima Erianto Hsb	300.200	56.500	56.500	1.098,36	s.d 2016
Rudolf Valentino Saragih	238.000	45.500	45.500	1.098,36	s.d 2016
Anton Rijanto	8.500	46.000	46.000	1.098,36	s.d 2016
Astik Pradjana	-	52.000	52.000	1.098,36	s.d 2016
Darminto	7.300	34.000	34.000	1.098,36	s.d 2016
Andi Yusmanto	46.000	40.000	40.000	1.098,36	s.d 2016
Lia Muliana	201.700	58.000	58.000	1.098,36	s.d 2016
Saniman	6.100	39.500	39.500	1.098,36	s.d 2016
Rabono	-	37.500	37.500	1.098,36	s.d 2016
Rm.Satrio Wibowo	4.000	33.000	33.000	1.098,36	s.d 2016
Rifki Sengadji	43.200	59.000	59.000	1.098,36	s.d 2016
Ricky RS. Pattinggi	32.000	48.500	48.500	1.098,36	s.d 2016
Syafaruddin Harahap	68.300	44.500	44.500	1.098,36	s.d 2016
Elvis Syahri	57.300	42.500	42.500	1.098,36	s.d 2016
Slamet Purwadi	357.000	61.000	61.000	1.098,36	s.d 2016
Untari Setyowati	-	54.500	54.500	1.098,36	s.d 2016
Zulmarwan	57.300	43.000	43.000	1.098,36	s.d 2016
Ardi Darmawan	-	41.000	41.000	1.098,36	s.d 2016

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
M Adrian Syahbandi A	8.200	57.000	57.000	1.098,36	s.d 2016
Anggono Sinung N.	6.600	42.500	42.500	1.098,36	s.d 2016
Christophorus Setyawan	4.000	38.000	38.000	1.098,36	s.d 2016
Bagya Mulyanto	4.000	45.000	45.000	1.098,36	s.d 2016
Achmad Chaerul	8.200	45.500	45.500	1.098,36	s.d 2016
Wisnu Agus Prijanto	7.300	38.000	38.000	1.098,36	s.d 2016
Muchtar Muhammad Noor	7.300	56.000	56.000	1.098,36	s.d 2016
Adhi Kuntoyo	6.100	43.000	43.000	1.098,36	s.d 2016
Atjuk Winarto	7.300	46.500	46.500	1.098,36	s.d 2016
Dante Sulindro Nugroho	9.200	76.500	76.500	1.098,36	s.d 2016
Susetio Dwiyanto	7.600	58.000	58.000	1.098,36	s.d 2016
Iriska Dewayani E	7.800	54.000	54.000	1.098,36	s.d 2016
Achmad Noorachman	9.500	58.500	58.500	1.098,36	s.d 2016
Fadjar Juliati	-	48.000	48.000	1.098,36	s.d 2016
Sahat Sihombing	20.200	57.500	57.500	1.098,36	s.d 2016
A.Tri Wyanjono	-	38.500	38.500	1.098,36	s.d 2016
Surasta	124.100	46.000	46.000	1.098,36	s.d 2016
Suriansyah	130.500	33.000	33.000	1.098,36	s.d 2016
Ahmad Fatoni	7.300	53.500	53.500	1.098,36	s.d 2016
Pudi Djunaidi	6.100	47.500	47.500	1.098,36	s.d 2016
Cuk Hidayat	6.100	39.500	39.500	1.098,36	s.d 2016
Munazir	175.600	44.500	44.500	1.098,36	s.d 2016
Herry	154.500	32.000	32.000	1.098,36	s.d 2016
Joni Wahyu Nugroho	231.600	37.500	37.500	1.098,36	s.d 2016
Asvianti Handaru W.	6.400	37.000	37.000	1.098,36	s.d 2016
Arias Rachman	6.400	37.500	37.500	1.098,36	s.d 2016
Untung Surapati	244.900	34.000	34.000	1.098,36	s.d 2016
Herman Sugiharto	7.600	48.000	48.000	1.098,36	s.d 2016
Arrianto Edie Nugroho	87.500	38.500	38.500	1.098,36	s.d 2016
Andi Ruchmono	-	31.500	31.500	1.098,36	s.d 2016
Nurul Astuti	92.000	33.500	33.500	1.098,36	s.d 2016
Sepmaedi Anada	181.900	40.000	40.000	1.098,36	s.d 2016
Asep Hermansyah	64.300	32.000	32.000	1.098,36	s.d 2016
Noor Ridlo	-	38.500	38.500	1.098,36	s.d 2016
Indro Setiadji	6.100	51.000	51.000	1.098,36	s.d 2016
R.Anggarani	239.600	54.500	54.500	1.098,36	s.d 2016
Triyantoro	4.000	39.000	39.000	1.098,36	s.d 2016
Fitri Novianty Ratna K	6.400	36.000	36.000	1.098,36	s.d 2016
Zulfahmi	6.100	32.000	32.000	1.098,36	s.d 2016
Tyas Dite Kresnanto	6.100	38.000	38.000	1.098,36	s.d 2016
Setiyadi	186.100	40.000	40.000	1.098,36	s.d 2016
Toto Priyohartono	134.800	70.000	70.000	1.098,36	s.d 2016
R. Mahelan Prabantarikso	9.500	54.500	54.500	1.098,36	s.d 2016

Tinjauan Keuangan

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		yang Diberikan (Lembar Saham)	yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Nefo Purwono Trianggono	13.800	-	-	-	-
Satya Wijayantara	8.700	45.000	45.000	1.098,36	s.d 2016
Dewi Fitrianingrum	14.300	67.500	67.500	1.098,36	s.d 2016
Viator Simbolon	100.200	85.000	85.000	1.098,36	s.d 2016
Sudaryo Bagyo Utomo	-	63.000	63.000	1.098,36	s.d 2016
Eko Waluyo	8.500	44.500	44.500	1.098,36	s.d 2016
Sri Purwanto	34.200	59.500	59.500	1.098,36	s.d 2016
Triani Pudji Astuti	133.100	83.000	83.000	1.098,36	s.d 2016
Arief Pramuhanto	-	-	-	-	-
Refyul Rey Fatri	-	-	-	-	-
Sindhu Rahadian Ardita	8.200	45.000	45.000	1.098,36	s.d 2016
Dadang Eka Jatnika	13.500	53.500	53.500	1.098,36	s.d 2016
Yossi Istanto	8.500	43.500	43.500	1.098,36	s.d 2016
Suryanti Agustinar	293.600	68.000	68.000	1.098,36	s.d 2016
Dadang Rusnady	-	60.500	60.500	1.098,36	s.d 2016
Budi Wahyuti	-	85.000	85.000	1.098,36	s.d 2016
Nasril	14.100	68.500	68.500	1.098,36	s.d 2016
Hertanta	59.000	63.500	63.500	1.098,36	s.d 2016
Marisa Gemiralda	15.200	86.000	86.000	1.098,36	s.d 2016
Elisabeth Novie Riswanti	8.500	56.000	56.000	1.098,36	s.d 2016
Hirwandi Gafar	8.500	47.500	47.500	1.098,36	s.d 2016
Nofry Rony Poetro	9.200	61.500	61.500	1.098,36	s.d 2016
Harman Soesanto	6.400	39.500	39.500	1.098,36	s.d 2016
Palwoto	228.000	47.000	47.000	1.098,36	s.d 2016
Sri Rezeki M.S	328.000	67.500	67.500	1.098,36	s.d 2016
Adi Suharto Atmadja	185.800	64.500	64.500	1.098,36	s.d 2016
Joni Prasetyanto	252.700	64.500	64.500	1.098,36	s.d 2016
Rachmat Siswanto	56.700	72.000	72.000	1.098,36	s.d 2016

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Tinjauan Keuangan

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

Adapun penggunaan dana hasil penawaran umum (*initial public offering/IPO*) di tahun 2009 tersebut telah terealisasi di tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Selain penawaran umum dalam bentuk saham, pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahun 2015. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi tersebut telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 7 Oktober 2015.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Realisasi Kredit	-	Total	Realisasi Kredit	-	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penawaran Umum	30 Juni 2015*	3.000.000	5.218,12	2.994.781,88	2.994.781,88	-	2.994.781,88	2.994.781,88	-	2.994.781,88	-
	Jumlah		3.000.000	5.218,12	2.994.781,88	2.994.781,88		2.994.781,88	2.994.781,88	-	2.994.781,88	-

Keterangan:

Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahun 2015 efektif tanggal 30 Juni 2015, Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dan Penerimaan Dana Hasil Penawaran Umum Efektif pada tanggal 8 Juli 2015.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Selama tahun 2015, Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi.

Ekspansi

Selama tahun 2015, Perseroan melakukan pembukaan Kantor wilayah 4 yang berada di Makasar sebagai kordinator Kantor Cabang Perseroan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Terdapat pembukaan Outlet prioritas sebanyak 39 Outlet dan 1 Lounge. Selain itu Perseroan juga membuka *Branchless banking* selama tahun 2015. Pembukaan *Branchless Banking* dilakukan dalam upaya untuk memberikan pelayanan

Tinjauan Keuangan

yang lebih baik dalam penerimaan pembayaran, penarikan dan layanan transaksi perbankan lainnya. Pada tahun 2015 Perseroan melakukan pembukaan agen LAKU PANDAI (*Branchless Banking Service for Financial Inclusion*) sebanyak 569 Agen berbadan usaha, yaitu kerjasama agen LAKU PANDAI dengan PTPos Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2016 akan dilakukan penambahan agen LAKU PANDAI sebanyak 1878 agent berbadan usaha dan 6000 agent perorangan dengan target pertumbuhan saldo dan rekening yang dikelola agen tersebut sebesar 200 Miliar atau 500.000 rekening.

Divestasi

Selama 2015, Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi.

Akuisisi

Selama 2015, Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang dan/Atau Restrukturisasi Modal

Selama 2015, Perseroan tidak melakukan restrukturisasi utang ataupun restrukturisasi modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1. Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak yang mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; suatu pihak yang memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau suatu pihak yang memiliki pengendalian bersama atas Bank.

2. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank.
3. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venture*.
4. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank.
5. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang merupakan suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak yang mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; suatu pihak memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau suatu pihak memiliki pengendalian bersama atas Bank; serta suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank.
6. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung.
7. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci. Dengan demikian, transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan secara wajar.

Tinjauan Keuangan

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan ank BTN beserta sifat dari transaksi tersebut.

Pihak – Pihak Berelasi	Jenis hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Giro pada bank lain dan efek-efek
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Giro pada bank lain, efek-efek, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan simpanan dari bank lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Giro pada bank lain, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, pinjaman yang diterima
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT BRI Syariah	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Efek-efek
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Efek-efek
PT Bank Syariah Bukopin	Kepemilikan melalui pemerintah pusat	Simpanan dari Bank lain
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Pinjaman yang diterima dan Obligasi Pemerintah
PT Sarana Multigriya Finance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat	Pinjaman yang diterima dan efek-efek
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Garansi yang diterbitkan
PT Jasaraharja Putera	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Garansi yang diterbitkan
PT Jasaraharja (Persero)	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Garansi yang diterbitkan
PT Askrido (Persero)	Kepemilikan melalui Pemerintah Pusat	Garansi yang diterbitkan
Manajemen Kunci/ <i>Key Management</i>	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Simpanan dari nasabah

Tinjauan Keuangan

Adapun transaksi dengan pihak berelasi yang dimiliki oleh Perseroan terdiri dari transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia dan transaksi dengan Manajemen Kunci.

Adapun uraian terkait transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia di gambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Transaksi dengan pihak berelasi (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014
Aset		
Giro pada bank lain	39.918	31.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	160.000	-
Efek-efek	118.224	206.834
Obligasi pemerintah	8.230.908	8.238.065
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	25.000	126.337
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	8.574.050	8.602.287
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(22)	(65)
Total dari aset pihak-pihak berelasi – neto	8.574.028	8.602.222
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	4,99%	5,95%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	61.298.554	51.273.337
Simpanan dari bank lain	1.484	3.299
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	394.369
Pinjaman yang diterima	5.728.553	4.079.030
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	67.028.591	55.750.035
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	42,44%	42,13%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.757	9.450
Efek-efek	18.456	10.476
Obligasi pemerintah	494.136	466.517
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	470	19.544
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	518.819	505.987
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	3,47%	3,95%
Beban bunga dan bonus		
Simpanan dari nasabah	1.851.258	1.515.247
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.560	5.294
Pinjaman yang diterima	392.863	312.933
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	2.250.681	1.833.474
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	27,60%	24,97%
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan	49.516	82.573
Persentase terhadap total komitmendan kontinjensi pada rekening administratif	1,64%	2,66%

Tinjauan Keuangan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bina Griya.

Selain memiliki transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia, Perseroan juga memiliki transaksi dengan Manajemen Kunci yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Transaksi dengan Manajemen Kunci (dalam juta Rupiah)

Uraian	2015	2014
Aset		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	8.403	7.976
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(1)	(10)
Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dari manajemen kunci	8.402	7.966
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,01%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	16.477	14.116
Kompensasi karyawan kunci	95.304	100.217
Total liabilitas dari manajemen kunci	111.781	114.333
Persentase terhadap total liabilitas	0,07%	0,09%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	760	629
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,01%	0,01%
Beban bunga dan bonus		
Simpanan dari nasabah	329	426
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	0,01%	0,01%
Beban gaji dan tunjangan		
Direksi	37.216	37.869
Dewan Komisaris	16.292	16.721
Karyawan Kunci	146.123	74.612
Total	199.631	129.202
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	10,35%	8,26%

Tinjauan Keuangan

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Bank

Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perseroan ialah sebagai berikut.

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-04/MBU/6/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan tujuan Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, penghematan biaya operasional perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 2. Hal – hal yang diatur: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Perjalanan Dinas: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perusahaan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang diberikan/ disediakan oleh perusahaan. • Kegiatan perjalanan dinas harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi selektifitas, tepat guna serta mengedepankan kepentingan kemajuan perusahaan. • Jumlah personil Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang melakukan perjalanan dinas dibatasi jumlahnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas. • Kegiatan perjalanan dinas untuk kegiatan seminar, <i>workshop</i>, sosialisasi dan kegiatan sejenis di luar negeri, agar dilakukan secara selektif dan benar-benar sesuai kebutuhan perusahaan. b. Laporan Rencana dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diusulkan secara tertulis kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan persetujuan. • Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, agar dijelaskan mengenai tujuan dan kepentingan dinas, lama perjalanan dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran biaya serta informasi lain yang relevan. • Dikecualikan bagi perjalanan dinas keluar negeri atas perintah Menteri BUMN. • Setelah melakukan perjalanan dinas keluar negeri, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri BUMN. 3. Implikasi bagi Perseroan <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan harus melaporkan rencana perjalanan dinas Luar Negeri Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan persetujuan. b. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan, harus dilaporkan hasil perjalanan dinas Luar Negeri kepada Menteri BUMN.

Tinjauan Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan tujuan Dalam rangka meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik perlu dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 2. Hal – hal yang diatur: Informasi Yang Dimuat Dalam Situs Web <ol style="list-style-type: none"> a. Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini. <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dimaksud wajib: <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik; • Disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan • Dapat diakses setiap saat oleh semua pihak. 2. Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik; • Informasi bagi pemodal atau investor; • Informasi tata kelola perusahaan; dan • Informasi tanggungjawab sosial perusahaan. 3. Implikasi bagi Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan telah melaksanakan aturan tersebut yang disajikan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atas informasi mengenai Emiten yang terbuka untuk umum, aktual dan terkini. b. Atas tidak dilaksanakannya aturan tersebut, Perseroan akan dikenai sanksi administratif.

Tinjauan Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
<p>Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai tindak lanjut dari POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 b. Tujuan regulasi ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai – nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan. 2. Hal – hal yang diatur: <p>Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Entitas utama melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dan menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir, serta mempublikasikan laporan tahunan dimaksud dalam situs web Entitas Utama paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. c. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Entitas Utama; • Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Entitas Utama; • Tugas dan tanggungjawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; • Tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; • Tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; • Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan • Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3. Implikasi bagi Perseroan. <p>Perseroan saat ini tidak memiliki Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan – peraturan tersebut diatas sehingga tidak memiliki kewajiban pelaporan & penilaian sebagaimana butir (b) diatas.</p>

Tinjauan Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang dan tujuan Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas Bank Indonesia di bidang moneter tersebut perlu dibarengi dengan pengaturan dan pengawasan dibidang moneter agar kestabilan moneter dapat terjaga, kebijakan moneter dapat lebih efektif, risiko dibidang moneter dapat dicegah dan dikurangi, dan ketentuan dibidang moneter dapat dipastikan untuk dipenuhi oleh setiap orang (orang perseorangan dan korporasi, baik bank maupun non-bank). 2. Hal – hal yang diatur: Pengaturan moneter oleh Bank Indonesia mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Suku bunga; b. Nilai tukar; c. Likuiditas; d. Lalu lintas devisa; e. Pasar uang dan pasar valuta asing. <p>Serta pengawasan moneter dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan tidak langsung. b. Pemeriksaan. c. Perseroan wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia, bila Bank Indonesia melakukan pengawasan moneter. d. Perseroan wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia

Tinjauan Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
<p>Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 5 (lima) bulan terakhir mengalami tekanan. b. Kondisi perekonomian sedang mengalami pelambatan dan tekanan baik regional maupun nasional. c. Tujuan regulasi ini adalah dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan karena kondisi perdagangan saham maka diperlukan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2. Hal – hal yang diatur: <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek selama 3 (tiga) hari bursa berturut – turut secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus) atau lebih; atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013 adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1.) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 5 (lima) bulan terakhir; 2.) Kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal III tahun 2015; dan 3.) Kondisi perekonomian regional yang mengalami tekanan dan pelambatan. 4.) Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat melakukan pembelian kembali sahamnya dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. 5.) Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 6.) Pembelian kembali saham oleh perusahaan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari modal disetor. 7.) Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali saham setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek. 8.) Keterbukaan informasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari Bursa setelah terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. 9.) Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah keterbukaan informasi. 10.) Saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek; • ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; • pelaksanaan <i>Employee Stock Option Plan</i> atau <i>Employee Stock Purchase Plan</i>; • pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan; dan/atau pelaksanaan waran 11.) Emiten tetap diwajibkan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali. 3. Perseroan agar menyediakan dana yang diperuntukkan untuk pembelian saham kembali dimana saham tersebut akan menjadi aset perusahaan. 4. Perseroan akan mengalami penurunan pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham. 5. Perseroan agar memproyeksikan pergerakan harga saham setelah <i>buy back</i> selama 30 hari kedepan, mengingat jangka 30 hari saham hasil <i>buy back</i> harus dialihkan. 6. Perseroan agar melihat implikasi atas rasio – rasio financial perusahaan.

Tinjauan Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perkonomian Nasional Bagi Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan b. Merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat <i>counter cyclical</i> dan bersifat sementara untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian 2. Hal - hal yang diatur: <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar untuk portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal dan Kredit kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga Penjaminan atau Asuransi Kredit Berstatus BUMD. b. Penilaian dan Penetapan Kualitas Aset Bank Umum untuk Kredit dan Penyediaan Dana Lainnya dalam Jumlah Kecil dan Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi. c. Penyertaan Modal dalam rangka pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Kredit bermasalah dari Bank yang melakukan penyertaan dan penyertaan modal dalam rangka tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank 3. POJK ini memiliki dampak terhadap Perseroan, khususnya dalam perhitungan ATMR risiko kredit untuk portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

1. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
2. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan.
3. PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.
4. PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau Unit Penghasil Kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.

Tinjauan Keuangan

5. PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.
6. PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan criteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.
7. PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.
8. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal – Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Perseroan tidak menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Menurut catatan atas laporan keuangan auditan 2015, manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assessment

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut.

1. Kinerja Keuangan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas
4. Masalah *Internal*
5. Perkara Hukum

06

Sumber Daya Manusia



Untuk meningkatkan kualitas dan proses pelaksanaan penilaian kinerja, saat ini Perseroan sedang mengembangkan *performance management* dengan menggunakan sistim *Human Capital Information Sistem (HCIS)*.





People Transformation



Dalam dunia perbankan, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal, terutama yang berdiri di garis depan adalah suatu urgensi karena SDM merupakan aset penting bagi bank dan merupakan elemen kunci untuk menciptakan dan menambah nilai di dalam bisnis suatu bank.

People Transformation

Sesuai dengan arah *Road Map* Transformasi 2013 – 2015, salah satu fokus utama transformasi adalah *People Transformation*. Transformasi dilakukan dengan menerapkan strategi yang berkelanjutan dan didukung oleh penyelarasan implementasi *human capital management system* sesuai dengan *best practices*.

People transformation tahun 2015 dijabarkan dalam beberapa strategi sebagai berikut.

1. Membangun budaya kerja baru, meningkatkan peran *leaders* dalam proses pengelolaan *human capital (Culture and Leadership)*.
2. Membangun kebanggaan bersikap laku profesional dan mengurangi pegawai yang menghambat budaya organisasi menjadi organisasi yang pintar.
3. Memahami dan mempraktekkan *Services Level Agreement (SLA)* standar dunia (*Strategic and Tactical HC Practices*).

Penempatan SDM adalah sebagai *strategic partner* yang merupakan motor penggerak utama untuk pencapaian Perseroan sebagai *The Leading Housing Bank in Indonesia With World Class Service*.

Ketiga strategi tersebut dilakukan dengan menjalankan *Human Capital Management System* yang terbagi dalam 6 pilar sebagai berikut.

1. *Organization development*: Pengembangan organisasi yang efisien, efektif dan bersaing.
2. *Human capital acquisition*: Pemenuhan *human capital* yang handal dari eksternal untuk posisi yang strategis.
3. *Learning and development*: Memahami dan mempraktekkan SLA standar dunia.
4. *Human capital engagement*: Fokus pada membuat *talent management system* yang efektif.
5. *Human capital reward*: Menumbuhkan kebanggaan bersikap laku professional.
6. *HC Information System*: Memiliki HCIS yang menunjang profesionalisme pegawai.

Adapun program kerja yang akan dilakukan untuk menunjang strategi tersebut adalah:

1. Revitalisasi budaya perusahaan,
2. Pengembangan organisasi dengan menyelaraskan kepentingan bisnis,
3. Melakukan *manpower planning* dan *recruitment* dengan pola terbuka baik untuk *internal Experienced Hire, Pro Hire*, maupun Alih Daya,
4. Pengembangan kompetensi melalui *training* teknis, manajerial, *soft competency*, dan akademi,
5. Implementasi *talent pool*,
6. Pengembangan sistem renumerasi,
7. Implementasi *Knowledge Management*, dan
8. Implementasi program HCIS.

People Transformation

	2014	2015	2016
Organization Development	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi nilai <i>Corporate Culture</i> baru 	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi 4 pilar <i>Corporate Culture (Performance, GCG, sales & Service, Learning & KM)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan organisasi dengan menyelaraskan kepentingan bisnis
Human Capital Acquisition	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>manpower planning</i> dan <i>recruitment Experienced Hire, Pro Hire</i> di posisi strategis Melakukan Proses <i>Asesment</i> Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi beban akibat tidak performnya pegawai yang tidak kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> Menghubungkan <i>recruitment</i> dengan kesempatan belajar formal dan mengkaitkan hak pelatihan dengan implementasi <i>knowledge/</i> hasil di pelatihan sebelumnya
Learning & Development	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan berdasarkan sertifikasi <i>professional</i> sesuai gap kompetensi pegawai dan sesuai jalur karir 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk memahami SLA <i>World Class</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk memperdalam praktek SLA <i>World Class</i>
HC Engagement	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Talent Pool</i> untuk Jabatan Strategis Implementasi jalur karir fungsional dan <i>structural</i> Penyempurnaan <i>Seccession Management Approched</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Talent Pool</i> lanjutan & <i>Career Management</i> berdasarkan <i>Job Family</i> Implementasi <i>Succesion Management Planning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Talent Pool</i> yang Efektif
HC Reward	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki <i>system</i> remunerasi sehingga berbasis kinerja dan kompetensi Menghargai inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertajam beda <i>reward</i> antara yang perform dan yang melebihi target serta yang tidak <i>perform</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kebanggaan <i>professional</i> kecintaan memperbaiki diri
HC Information System	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program HCIS fasi III 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi program HCIS secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi program HCIS secara terintegrasi (berkelanjutan)

Internalisasi Budaya Perusahaan

Perseroan senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga dan melengkapi kemampuan internal SDM yang merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan bank dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

Budaya perusahaan yang menunjang transformasi disiapkan dengan tujuan agar nilai budaya perusahaan Perseroan menjadi hidup dalam organisasi dan dijalankan oleh seluruh jajaran pegawai Perseroan. Seluruh jajaran memberikan komitmen waktu dan sumber daya yang dikelola secara efektif dan bertahap. Transformasi budaya perusahaan Perseroan dimulai dari tahap *awarenes, engagement, acceptance* dan *ownership*.

Adapun program kerja yang dilaksanakan, ditujukan untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi *intrapreneurship* (pelayanan dan penjualan), kinerja, inovasi dan efisiensi sehingga terdapat perbaikan kinerja bisnis dan perbaikan proses bisnis. Pelaksanaan program kerja tersebut meliputi:

- a. Sosialisasi dan komunikasi nilai budaya perusahaan.
- b. *Internalisasi* nilai budaya perusahaan.
- c. Peningkatan efektivitas peran jajaran pimpinan sebagai penggerak transformasi.
- d. Penujukan tim penggerak budaya (*change agent*).
- e. Menyelaraskan sistem organisasi dan SDM.
- f. Melaksanakan pengukuran efektivitas program.
- g. Melaksanakan program *recognition*.

Manajemen SDM

Dalam pengelolaan SDM Perseroan menerapkan konsep *human capital* secara konsisten dan berkesinambungan dengan kebijakan yang terintegrasi. Pelaksanaan pengelolaan *human capital* mengacu pada Peraturan Direksi No. 29/DIR/CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Ruang lingkup PKMHC adalah sebagai berikut.

1. Bab 1 Pendahuluan
2. Bab 2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital*:
 - Bagi Manajemen
 - Bagi Pegawai
3. Bab 3 Kerangka Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital*
4. Bab 4 Kebijakan Manajemen *Human Capital* yang terintegrasi
 - Alur Proses Manajemen *Human Capital*
 - Kebijakan Manajemen *Human Capital*
5. Bab 5 Kebijakan *Organization Development*
6. Bab 6 Kebijakan *Human Capital Acquisition*
7. Bab 7 Kebijakan *Human Capital Development*
8. Bab 8 Kebijakan *Human Capital Engagement*
9. Bab 9 Kebijakan *Human Capital Reward*
10. Bab 10 Kebijakan *Human Capital Information System*
11. Bab 11 Penutup

Organization Development

Pengembangan organisasi dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan secara efisien, efektif dan bersaing. Oleh karena itu, pengembangan organisasi difokuskan kepada *review* organisasi secara berkelanjutan dengan melakukan kajian terhadap produktifitas dan

efektifitas struktur organisasi, memperbaharui *job competencies*, *job description* dan *job requirement*, serta kebijakan untuk promosi pegawai.

Dalam upaya mendukung Perseroan untuk menjadi ***The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service***, serta mendukung program pemerintah “Sejuta Rumah Untuk Rakyat” dilakukan perubahan struktur organisasi baru yang lebih fokus pada perbaikan proses bisnis. Pengembangan organisasi juga dilakukan dengan optimalisasi wewenang dan fungsi Kantor Wilayah dalam proses bisnis yang diimplementasikan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2015.

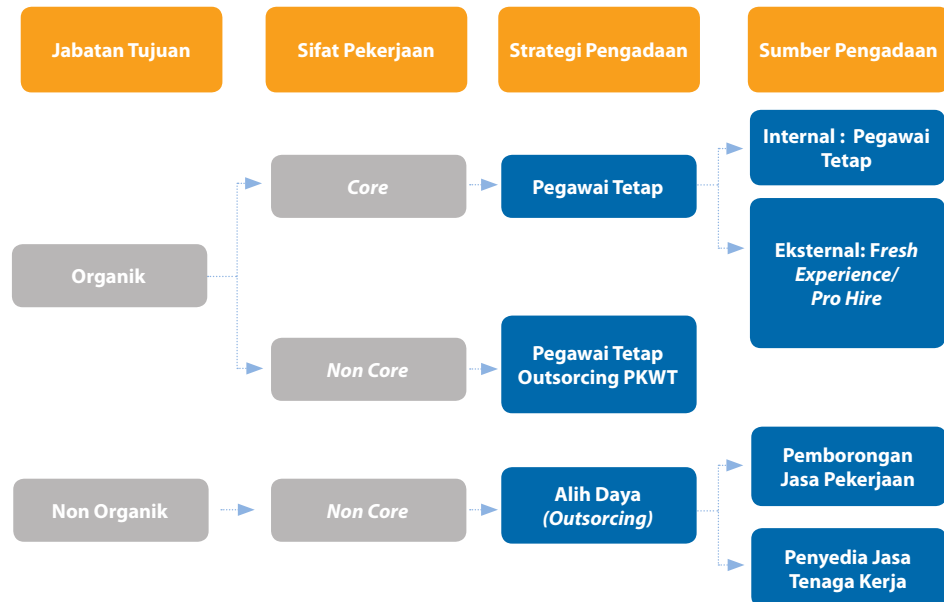
Pada tahun 2015, Perseroan juga melakukan pengembangan organisasi berupa pembukaan Kantor Wilayah IV di Makasar yang ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), pemberian kredit, dan penurunan NPL di wilayah Indonesia Timur. Kantor Wilayah Makasar membawahi 12 Cabang di wilayah Makassar, Palopo, Pare-Pare, Gowa, Watampone, Mamuju dan Bulukumba.

Human Capital Acquisition

Untuk memperkuat organisasi, Perseroan senantiasa merencanakan kebutuhan pegawai yang selaras dengan pertumbuhan bisnis. Perencanaan ini dilakukan melalui proses *Manpower Planning* untuk mengetahui jumlah dan persyaratan pegawai sesuai dengan standar formasi, untuk mencapai strategi bisnis yang ditetapkan oleh Perseroan. Proses ini dilakukan secara *bottom-up* atau melibatkan semua unit kerja yang kemudian menjadi acuan dalam proses *Human Capital Acquisition*.

Manajemen SDM

Rekrutmen pegawai dibagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan tujuan serta sifat pekerjaan seperti dalam matriks rekrutmen berikut ini :



Rekrutmen *internal* dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di suatu unit kerja melalui proses promosi maupun rotasi pegawai. Apabila pemenuhan kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi secara *internal* maka dilaksanakan pemenuhan secara eksternal, yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu memasang iklan melalui media koran maupun elektronik, *job fair*, *talent scouting* atau *job searching* melalui universitas/kampus-kampus.

Adapun metode pelaksanaan rekrutmen eksternal dilakukan dengan *Direct Hire* (rekrutmen dilakukan secara langsung oleh pihak Perseroan) maupun dengan *Alih Daya* (Rekrutmen pegawai dilakukan menggunakan pihak ketiga). Pada tahun 2015, Perseroan sedang mengembangkan sistem rekrutmen berbasis web (*e-recruitment*). Selain itu, Perseroan telah bekerjasama dengan *Linked in* terkait dengan program *Employee Branding* sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efisien.

Learning and Development

Untuk mencapai visi Perseroan menjadi Bank Yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan, Perseroan menetapkan strategi untuk mendayagunakan *human capital* dengan cara yang paling efektif dan efisien. Oleh karena itu Perseroan memandang perlu untuk memiliki suatu sistem yang dapat menjadi landasan objektif dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk mendukung upaya tersebut Perseroan menetapkan kebijakan pembelajaran dan pengembangan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas pegawai secara berkesinambungan.

Setelah memastikan pelaksanaan *recruitment* sebagai langkah awal dalam pengelolaan SDM, maka Perseroan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi yang merupakan kunci penting untuk membangun organisasi dengan kinerja terbaik. *Learning* menjadi hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengembangan pegawai. Oleh karena itu saat ini Perseroan dalam proses pengembangan *Training Department* menjadi *Training Division*. Pelaksanaan *learning* pegawai tidak lagi didasarkan pada proses bisnis melainkan lebih dikembangkan untuk berorientasi pada produk.

Manajemen SDM

Training Division dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan yang sejalan untuk mendukung strategi bisnis. *Training Division* dikembangkan dengan pembentukan 3 (tiga) *school* yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan *training* mulai dari proses identifikasi, penyusunan materi, *delivery* sampai dengan evaluasi. Setiap *school* berorientasi pada produk yaitu:

- **School of Leadership**
Mencakup *training* yang berkaitan dengan pengembangan *leadership*, antara lain *Staff Development Program*, *Officer Development Program*, *Leadership Program*, *Executive Development Program*.
- **School of Business Banking**
Mencakup seluruh *training* berkaitan dengan produk dan pelayanan Perseroan yaitu Kredit Perumahan Rakyat, *funding*, *treasury*, *collection*, *sales and servise*.
- **School of Operational Banking**
Mencakup seluruh kegiatan operasional untuk mendukung unit bisnis, yaitu *Information Technology*, *Finance*, *Risk*, *Human Capital*, *Legal* dan lainnya.

Ketiga *school* tersebut akan di dukung oleh unit *Learning Operation* yang akan berfungsi sebagai *event organizer* dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan *training*.

Perseroa senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan *training* didasarkan pada hal-hal berikut.

1. Kebijakan atau strategi manajemen.
2. Hasil *Training Need Analysis*.

Dengan demikian, pengembangan kompetensi telah dilaksanakan berdasarkan persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi efektifitas atas sistem pembelajaran dan pengembangan yang telah dilakukan, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi paska pelatihan yang dilakukan melalui *Form Evaluasi Pasca Training*. Evaluasi dinilai dalam bentuk *Return of Training Investment* yang mencerminkan tingkat efektifitas pelaksanaan *training*. Adapun hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk jenjang karir ataupun tingkat kebutuhan *training* lanjutan karyawan. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk peserta *training*, namun demikian juga pada Instruktur *Training* dan Penyelenggaranya.

Pelaksanaan dan Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2015

Selama tahun 2015 Perseroan telah melaksanakan 440 program *training* yang diikuti oleh total 15.991 peserta. Adapun total biaya penyelenggaraan *training* selama tahun 2015 mencapai Rp105.993.657.000 atau sebesar 7,15% dari total Biaya Tenaga Kerja tahun 2015 yang mencapai Rp1.481.678.759.000.

Adapun jumlah peserta *training* dalam setiap bulannya dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel Peserta Training Tahun 2015

Bulan	Jumlah Peserta
Januari	909
Februari	1.269
Maret	1.601
April	1.999
Mei	2.352
Juni	1.329
Juli	372
Agustus	1.259
September	824

Manajemen SDM

Bulan	Jumlah Peserta
Oktober	2.178
November	1.631
Desember	268
Total	15.991

Dari 440 program *training* yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok program, yaitu *Core Banking Akademy*, *New Entry Academy* dan *Strategic Initiatives*. Keseluruhan program *training* yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program Training Tahun 2015

Program Training	Jumlah Peserta
I CORE BANKING ACADEMY	14.606
FACULTY OF MARKETING, SALES & SERVICES	3.393
<i>Retail Funding and Services</i>	1.414
1 Pendidikan Marketing "Enhancing Performance Through Effective Selling and Service" Batch 1	20
2 Workshop Marketing Communication	20
3 Pendidikan Marketing "Enhancing Performance Through Effective Selling and Service Batch 2	20
4 Pendidikan Marketing "Enhancing Performance Through Effective Selling and Service Batch 3	20
5 Pendidikan New Strategic Sales Force Management	4
6 Training 360 Digital Marketing	1
7 Pelatihan Pengenalan dan Identifikasi Banknotes	42
8 Training of Trainers Program Super Untung	28
9 Indonesia Marketeers Festival	3
10 The 3rd Marketeers Ind Festival Padang	4
11 Pelatihan Marketing KC Bandung	128
12 TOT Super Untung	30
13 Workshop Marcomm Institute	2
14 Pelatihan Tabungan BTN Cermat Produk Laku Pandai Kantor Pos Tangkling, Palangkaraya	12
15 Penguatan Selling Skill PIC Tabungan BTN Perumahan	66
16 Go Live Pelatihan Layanan Transaksi Pendaftaran Penerimaan Iuran BPJS Kanwil 1	83
17 Go Live Pelatihan Layanan Transaksi Pendaftaran Penerimaan Iuran BPJS Kesehatan Kanwil 1	67
18 Internalisasi Program Undian Banjir Hadiah Tabungan BTN eBataraPos	63
19 Workshop Motivasi Selling Skill dan Service Quality KC Purwakarta	51
20 Pelatihan Untuk Funding Unit Kanwil 1	2

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
21	Pelatihan Layanan Pendaftaran dan Penerimaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan – CMFD	143
22	<i>Workshop</i> Percepatan Pencapaian Target DPK Ritel Semester II – RFSD	37
23	<i>Workshop</i> Optimalisasi Tim B2B2C & Program 1 Juta Rumah – RFSD	22
24	<i>Workshop Selling Culture</i>	54
25	Pelatihan Operasional dan <i>Selling</i> SDB	75
26	Refreshment <i>Product Knowledge</i> Tab Pos	94
27	<i>Workshop</i> Pencairan Dana Belanja Pensiun	4
28	<i>Workshop</i> Aplikasi Penerimaan Pembayaran PLN	9
29	<i>Motivation and Persuasive Selling Skill</i>	172
30	Tab BTN Pensiunan ASABRI dan TASPEN <i>Batch</i> 1	62
31	Tab BTN Pensiunan ASABRI dan TASPEN <i>Batch</i> 2	50
32	<i>Analytical Thinking For Business People</i>	26
<i>Commercial Funding</i>		363
1	Pelatihan dan Sosialisasi Transaksi <i>Host to Host</i> Pertamina	67
2	Pelatihan <i>iCash and Virtual Account</i> Kanwil 1	54
3	Pelatihan Sosialisasi Layanan Transaksi H2H Pertamina Untuk Kanwil II	60
4	Pelatihan Sosialisasi Layanan Transaksi H2H Pertamina Untuk Kanwil III	45
5	Pelatihan Sosialisasi Layanan Transaksi H2H Pertamina Untuk Kanwil IV	41
6	Eksekusi B2B2C Secara Kolaboratif Untuk Pencapaian DPK Berbasis <i>Low Cost</i>	84
7	Pelatihan <i>Powerfull Database Analysis and Dashboard Reporting With Excel 2010</i>	5
8	Seminar Nasional <i>Marketing on Multiplatform Phase</i>	2
9	<i>Training Practical Problem Solving</i>	1
10	<i>Strategic Marketing Planning</i>	2
11	<i>Strategic Decision Making</i>	1
12	<i>Training Marketing Management</i>	1
<i>Wealth Management</i>		383
1	Sosialisasi Reksadana	23
2	Ujian Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) <i>Batch</i> 1	2
3	Ujian Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) <i>Batch</i> 2	3
4	Ujian Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) <i>Batch</i> 3	2
5	<i>In House Certification Wealth Management Modul 1</i>	15
6	<i>In House Certification Wealth Management Modul 3 - Risk Management and Insurance</i>	21
7	SIPO WAPERD	17
8	WAPERD 11 Februari 2015	1
9	<i>Inhouse Certification Wealth Management Modul 1 Batch 2 - Fundamental of Wealth Management</i>	23
10	<i>Inhouse Certification Wealth Management Modul 2 Batch 1</i>	19
11	Pendidikan Ujian WAPERD	6

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
12	<i>Refreshment Program Pendidikan Lanjutan PPL WAPERD</i>	20
13	<i>Customer Experience Conference Personil 2015 BTN</i>	8
14	<i>Sales Training Program Untuk Personil BTN Prioritas</i>	97
15	Sosialisasi Reksadana	31
16	<i>In House Certification WM Modul 2 Tahap 2</i>	24
17	<i>In House Certification WM Modul 3 Tahap 2</i>	32
18	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm1</i>	5
19	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm2</i>	5
20	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm3</i>	5
21	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm4</i>	5
22	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm5</i>	5
23	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm6</i>	5
24	<i>Wealth Management Kls Aksel 1-7 Wm7</i>	5
25	Waperd Kelas Reguler	4
<i>Service Quality</i>		1.206
1	Pelatihan dan <i>Workshop</i> SLA	2
2	Sosialisasi dan Pelatihan CIF, SID, dan SPN Tahap 1	166
3	Sosialisasi dan Pelatihan CIF, SID, dan SPN Tahap 2	142
4	<i>Gathering Teller Focus Group</i>	1
5	Sosialisasi dan Pelatihan CIF, SID dan SPN Tahap 3 (Makassar)	30
6	Sosialisasi dan Pelatihan CIF, SID dan SPN Tahap 3 (Medan)	26
7	Sosialisasi dan Pelatihan CIF, SID dan SPN Tahap 4	148
8	Pelatihan Sertifikasi Layanan <i>Office Channeling</i>	25
9	Sosialisasi dan Pelatihan SPN, CIF, SID dan CC	20
10	<i>Coaching Clinic Service Quality</i> oleh Tim SNED Di KC Bandar Lampung	12
11	<i>Coaching Clinic Service Quality</i> oleh Tim SNED Di KC Denpasar dan KC Yogyakarta	55
12	<i>Coaching Clinic Service Quality</i> Oleh Tim SNED Di KC Padang dan KC Depok	66
13	Pendidikan Sistem Informasi Debitur	10
14	<i>Training Refreshment SQ Unit Head dan Service Assurance Staff</i>	84
15	<i>Workshop Internet Banking</i> BTN dan Integrasi Produk Terkait Bagi KC RO 1	93
16	<i>Workshop Internet Banking</i> BTN dan Integrasi Produk Terkait Bagi KC RO 2	20
17	Doktrin <i>Frontliner</i>	30
18	<i>Refreshment Troubleshooting</i> ATM RO 2	43
19	<i>Refreshment Troubleshooting</i> ATM RO 3	21
20	<i>Workshop Internet Banking</i> BTN dan Integrasi Produk Terkait Bagi KC RO 3	58
21	<i>Sharing Knowledge Implementasi Internet Banking</i>	4
22	<i>Workshop Internet Banking</i> BTN dan Integrasi Produk Terkait Bagi KC RO 4	68
23	<i>Refreshment</i> Persiapan BSEM MRI 2015	82

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
	Card Business	27
1	Pelatihan Desain Kartu Debit BTN Suka Suka	23
2	SAS Programming 1	1
3	<i>Project Management</i>	1
4	<i>Supply Chain Management</i>	1
5	<i>Training Building Powerful Brand</i>	1
	FACULTY OF CREDIT MANAGEMENT	2.173
	<i>Consumer Lending</i>	991
1	<i>Refreshment</i> Analisis Kredit Konsumer - Jakarta	194
2	Pelatihan <i>Sales Management for Marketing Lending Batch 1</i>	25
3	Pelatihan <i>Sales Management for Marketing Lending Batch 2</i>	18
4	Pelatihan <i>Sales Management for Marketing Lending Batch 3</i>	33
5	<i>Refreshment</i> Analisis Kredit Konsumer – Batam	55
6	<i>Refreshment</i> Analisis Kredit Konsumer – Jakarta	154
7	<i>Refreshment</i> Analisis Kredit Konsumer – Makasar	35
8	<i>Refreshment</i> Analisis Kredit Konsumer – Medan	64
9	Pendidikan <i>Pilot Project iLoan dan iCremo</i>	6
10	Pelatihan <i>Sales Management for Marketing Lending Batch 4</i>	19
11	Pelatihan <i>Sales Management for Marketing Lending Batch 5</i>	27
12	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-ASKRINDO RO 4	22
13	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-JAMKRINDO RO 2	21
14	Sosialisasi PBI dan Program B2B2C Untuk Program Sejuta Rumah	51
15	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-ASKRINDO RO 1	29
16	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-ASKRINDO RO 2	34
17	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-JAMKRINDO RO 3	15
18	Sosialisasi Proses Bisnis Asuransi-JAMKRINDO RO 4	21
19	Analisis Kredit Konsumer	27
20	Analisis Kredit Konsumer Non Subsidi <i>Batch 1</i>	78
21	Analisis Kredit Konsumer Non Subsidi <i>Batch 2</i>	58
22	<i>Sharing Knowledge FSD Web Portal BTN</i>	5
	<i>Commercial Lending</i>	403
1	Pelatihan Produk Analisa dan Monitoring Kredit Komersial <i>Batch 1</i>	26
2	Pelatihan Produk Analisa dan Monitoring Kredit Komersial <i>Batch 2</i>	26
3	Analisis Kredit Komersial	24
4	<i>Refreshment</i> Ketentuan & Restrukturisasi Kredit Komersial Serta Leadership 3.0	23
5	Sertifikasi Credit Level 1 Untuk Credit Officer <i>Batch 1</i>	28
6	Implementasi iLoan dan iCremo Kredit Komersial <i>Batch 1</i>	26
7	Pelatihan Efektivitas Pembinaan Debitur Komersial <i>Batch 1</i>	29
8	Pelatihan Efektivitas Pembinaan Debitur Komersial <i>Batch 2</i>	30
9	Pelatihan Efektivitas Pembinaan Debitur Komersial <i>Batch 3</i>	61

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
10	Implementasi iLoan dan iCremo Kredit Komersial <i>Batch</i> 4	33
11	Implementasi iLoan dan iCremo Kredit Komersial <i>Batch</i> 5	37
12	Pelatihan Kredit Sindikasi Kredit Komersial	33
13	<i>Workshop Organize Monitoring Control and Advise</i>	27
	<i>Small and Micro Lending</i>	105
1	Pelatihan <i>Small and Micro Account Officer</i>	37
2	<i>Workshop iCremo Untuk SMAO RO 1</i>	27
3	<i>Workshop iCremo Untuk SMAO RO 2</i>	18
4	<i>Workshop iCremo Untuk SMAO RO 3</i>	10
5	<i>Workshop iCremo Untuk SMAO RO 4</i>	13
	<i>Collection and Asset Management</i>	617
1	<i>Workshop Grand Strategy CCRD</i>	101
2	Pelatihan <i>Early Bucket Collection Batch 1</i> Tahun 2015	27
3	Pelatihan <i>Early Bucket Collection Batch 2</i> Tahun 2015	25
4	Pelatihan <i>Early Bucket Collection Batch 3</i> Tahun 2015	22
5	Pelatihan <i>Early Bucket Collection Batch 4</i> Tahun 2015	22
6	Pelatihan <i>Early Bucket Collection Batch 5</i> Tahun 2015	22
7	Pelatihan Standarisasi Monitoring KPI	24
8	Pelatihan Analisis Restrukturisasi Kredit	16
9	Pelatihan eColl DBM Supporting Kanwil 3	21
10	<i>Public Training</i> Pegawai CCRD	4
11	<i>Refreshment E-Coll</i> KC Wilayah IV	43
12	Restrukturisasi Kredit Komersial	26
13	<i>Training Collection Target Fixing</i>	2
14	Restrukturisasi Kredit Konsumer Kanwil 1	90
15	Restrukturisasi Kredit Konsumer Kanwil 2	54
16	<i>Workshop</i> Penyelesaian Kredit Kol 5	93
17	Pendidikan <i>Field Collector</i> RO 1	4
18	Pendidikan <i>Field Collector</i> RO 3	4
19	Restruk Kredit Komer Peg AMD Kanwil 4	17
	Appraisal	57
1	Pendidikan Dasar Penilaian 1 dan 2	28
2	Pendidikan Dasar Penilaian 1 dan 2 <i>Batch</i> 2	29
	<i>FACULTY OF RISK, COMPLIANCE AND AUDIT</i>	2.463
	<i>Faculty of Risk</i>	583
1	UKMR Level 1	95
2	UKMR Level 2	134
3	UKMR Level 3	8
4	UKMR Level 4	11
5	UKMR Level 5	2

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
6	UKMR Level 1 Komisararis	4
7	<i>Refreshment</i>	159
8	Pendidikan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	2
9	<i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Dalam Mengendalikan Risiko Strategik	2
10	<i>Workshop Risk Management</i> BMKD Prov Jambi	2
11	International Enterprise Risk Management	1
12	<i>Training Credit Risk Management</i>	2
13	<i>Training Market Risk Management</i>	1
14	<i>Workshop</i> Manajemen Risiko Perbankan	1
15	<i>Workshop Liquidity Risk Management</i>	1
16	Penerapan <i>Four Eyes Principle</i>	64
17	<i>Training Rating Knowledge Program</i>	17
18	Interest Rate Risk In Banking Book	15
19	Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan	3
20	ERM Fundamental & International Conference	3
21	Risk Management <i>Training</i> ERM Maturity	1
22	<i>Training Operational Risk Management Tools</i>	16
23	<i>General Banking Certification</i>	39
<i>Faculty of Compliance</i>		1.233
1	Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan	72
2	Pendidikan dan Pelatihan BCSO <i>Batch</i> 5	14
3	<i>Workshop "Training Of Assessor (TOA) GCG Self Assessment"</i>	1
4	Pendidikan Angkatan Ke 1 oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	3
5	<i>Workshop Fraud In Banking Industries</i>	1
6	<i>Workshop</i> Tindak Lanjut Komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Program Kerja GCG Champion 2015	61
7	Pendidikan Angkatan Ke 2 oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	3
8	<i>Workshop</i> Tata Kelola Pengendalian Gratifikasi and <i>Whistleblowing</i>	2
9	<i>Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>	13
10	<i>Workshop</i> Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Program Kerja GCG Tahun 2015	44
11	Refreshment APU PPT dan Aplikasi ICDD	913
12	<i>Workshop</i> Pengendalian Gratifikasi dan GCG	17
13	Rapat Koordinasi (Rakor) BCSO	88
14	Seminar Mencegah Tindak Pidana Korupsi	1
Faculty of Audit		647
1	Pendidikan Proses Bisnis	69
2	Pendidikan Sertifikasi QIA (Lanjutan I dan II)	23
3	Pendidikan Sertifikasi QIA (Manajerial)	14

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
4	Pelatihan <i>Forensic Audit</i>	21
5	Pendidikan ICT Audit (<i>Training Ethical Hacking Fundamental</i>)	10
6	<i>SOPAC 2015 Conference and Financial Institution Benchmarking Program</i>	2
7	SNIA dan Wisuda Sertifikasi Qualified Internal Auditor	2
8	Pendidikan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Dasar I Bagi Personil IAD	2
9	Pelatihan Preparing for ISO 9001-2015 Transition	2
10	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Internal	2
11	Pendidikan <i>Certified Forensic Auditor</i>	4
12	Sertifikasi <i>Workshop</i> Mukernas FKSPI	2
13	<i>Workshop Audit Methodology</i>	1
14	National Anti <i>Fraud Conference</i>	2
15	Sosialisasi Strategi Anti Fraud	484
16	National Conference VII IAIB	2
17	<i>QMS Interpretation and Internal Audit</i>	2
18	<i>Risk Annual Governance Summit 2015</i>	1
19	Pelatihan <i>Strategi Anti Fraud Banking</i>	2
FACULTY OF FINANCE, ACCOUNTING AND TREASURY		813
<i>Finance and Accounting</i>		256
1	<i>Inhouse Training Trade Finance for Banking</i>	21
2	Pendidikan <i>In House Training PSAK</i> Terkini	33
3	<i>Training Finance for Non Finance</i>	2
4	Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM <i>Batch 1</i>	23
5	Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM <i>Batch 2</i>	15
6	<i>Workshop Financing Document Batch 2</i>	24
7	Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM	9
8	<i>Training Financial Model Batch 1</i>	22
9	<i>Training Financial Model Batch 2</i>	24
10	Pelatihan Penghasilan Tidak Kena Pajak	83
<i>Treasury</i>		9
1	Pelatihan Basic ALMA	1
2	Pelatihan <i>Basic Treasury</i>	1
3	<i>Training Banknotes FX Hedging Instrument</i>	1
4	<i>Training Treasury Management</i>	5
5	<i>Training Derivative Instrument</i>	1
Institutional Banking		12
1	<i>Training LC dan SKBDN</i>	12
<i>Operation and Business Support</i>		536
1	Pendidikan Daftar Hitam Nasional Se-JABODETABEK Di Kantor Wilayah 1	102
2	Sosialisasi Daftar Hitam Nasional (DHN) KC Wilayah Jabar dan Kalimantan	71

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
3	Sosialisasi Daftar Hitam Nasional (DHN) KC Wilayah Kanwil 4	51
4	Sosialisasi Daftar Hitam Nasional (DHN) KC Wilayah Sumatera	64
5	<i>Workshop Business Continuity Management (BCM)</i>	1
6	Sosialisasi Daftar Hitam Nasional (DHN)	98
7	Pelatihan DBM Supporting Kanwil 1	40
8	Pelatihan Likuiditas Kantor Cabang RO 1	38
9	Pelatihan Likuiditas Kantor Cabang RO 4	59
10	<i>In House Briefing Swift</i>	7
11	Pelatihan SKNBI & DHN	2
12	<i>41th Executive Annual Gathering ASPI</i>	1
13	Undangan User Group Sistem Pembayaran'15	2
FACULTY OF HUMAN CAPITAL AND ORGANIZATION		1.708
1	<i>Lean Banking</i>	5
2	Pendidikan <i>Enterprise Level Recruitment Management</i>	3
3	Pendidikan <i>Learning Solution</i>	4
4	Pelatihan Pegawai Alih Status Menjadi LA dan LS Staff <i>Batch 1</i>	66
5	Pelatihan Pegawai Alih Status Menjadi LA & LS Staff <i>Batch 2</i>	65
6	Pelatihan Pegawai Alih Status Menjadi LA & LS Staff <i>Batch 3</i>	77
7	Pelatihan Job Specification PT GML Performance Consulting	18
8	Pendidikan dan Pelatihan iHCIS Human Capital Support <i>Batch 2</i>	59
9	Pendidikan dan Pelatihan iHCIS Human Capital Support <i>Batch 3</i>	15
10	<i>Workshop Sinkronisasi Perubahan Job Description</i>	55
11	Pelatihan Sub <i>Branch Head</i> Atas Kewenangan Memutus <i>Batch 1</i>	101
12	Pelatihan Sub <i>Branch Head</i> Atas Kewenangan Memutus <i>Batch 2</i>	103
13	<i>Workshop Kalibrasi dan Fine Tuning</i> Untuk Finalisasi Job Evaluation - HCD	10
14	Pelatihan <i>Certified Human Resource</i>	4
15	Pelatihan <i>Leadership Series Batch-1</i>	66
16	Pelatihan <i>Motivating Leadership Batch-1</i>	44
17	Sosialisasi SMK Kantor Cabang Wilayah-1	127
18	<i>Workshop E-Learning Module</i>	11
19	<i>Leadership Series Batch 2</i>	56
20	<i>Leadership Series Batch 3</i>	60
21	<i>Motivating Leadership Batch 3</i>	47
22	<i>Motivating Leadership Batch 4</i>	30
23	<i>Cash Office Head Batch 3</i>	14
24	<i>Leadership Series Batch 4</i>	55
25	<i>Leadership Series Batch 5</i>	52
26	<i>Leadership Series Batch 6</i>	27

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
27	Leadership Series Batch 7	56
28	Motivating Leadership Batch 5	42
29	Motivating Leadership Batch 6	46
30	Motivating Leadership Batch 7	40
31	Training Man Power Planning	4
32	Workshop Pencegahan Perselisihan Hub Industrial BUMN	2
33	Knowledge Management Training	3
34	Leadership Series Batch 8	29
35	Leadership Series Batch 9	52
36	Leadership Series Batch 10	54
37	Motivating Leadership Batch 8	36
38	Pelatihan New Branch Manager	25
39	Crash Program Update Data Pegawai Batch 1	22
40	Crash Program Update Data Pegawai Batch 2	25
41	Crash Program Update Data Pegawai Batch 3	39
42	Forum Eksekutif II / 2015 – FHCPI	2
43	Workshop Assessment Creating Best Talent	3
44	Workshop Employee Engagement Survey (EES)	54
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY		360
1	Pengembangan Aplikasi Webbranch	13
2	Sosialisasi Standarisasi Teknologi dan Informatika Divisi	19
3	Sosialisasi Standarisasi Teknologi dan Informatika Kanwil I	30
4	Sosialisasi Standarisasi Teknologi dan Informatika Kanwil II	30
5	Sosialisasi Standarisasi Teknologi dan Informatika Kanwil III	28
6	Sosialisasi Standarisasi Teknologi dan Informatika Kanwil IV	16
7	Training Maintenance Lokal Support Mail Korporat	5
8	Workshop F5	18
9	In House Training IT Helpdesk	8
10	In House Training ITIL (IT Instructure Library) V3 Batch 1	24
11	In House Training ITIL (IT Instructure Library) V3 Batch 2	25
12	In House Training Project Management Fundamental (Basic)	42
13	Training Advance ILE RPG IV Programming Batch 1	3
14	Traning Non-iSeries Programmers / iSeries Application Development Tool Batch 1	5
15	Traning Non-iSeries Programmers / iSeries Application Development Tool Batch 2	7
16	Sosialisasi Instalasi Aplikasi Agent EJ Di Mesin ATM	23
17	Pendidikan System Operation For Non-iSeries Programmers	5
18	Enterprise Architecture Training	14
19	Seminar E-Commerce, E-Channel Update 2015	1
20	Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM - ICTD	17

Manajemen SDM

Program Training	Jumlah Peserta
21 <i>Training</i> Microsoft SKNBI – NG	6
22 <i>Business Analyst Using</i> BCS & BABOK	3
23 <i>Managing Applied Soft Process</i> Qua and Test	2
24 <i>IBM Executive Workshop</i> Build Cloud Roadmap	2
25 Pelatihan ITIL 3.0	10
26 <i>Workshop</i> Pengadaan IT	2
27 <i>Workshop Trends and Innovation</i> Shaping Bank	2
FACULTY OF MANAGEMENT SYSTEM	305
1 Pendidikan Evaluator Penilaian Kinerja BUMN Berbasis KPKU	32
2 Sosialisasi Pembekalan Implementasi KPKU BTN	79
3 <i>Focus Group</i> KPKU	58
4 <i>In House Training</i> Statistik Dasar Untuk Perbankan	8
5 <i>Training Balanced Score Card</i> Master Class	1
6 <i>Workshop</i> Pemahaman KPKU BTN Kadiv - Kacab Jabodetabek	51
7 FGD KPKU - Finalisasi Peta ADLI KPKU	14
8 <i>Workshop</i> RSTIK 2016-2018	47
9 <i>Assessment</i> Implementasi KPKU BUMN 2015	3
10 <i>Refreshment</i> Evaluator KPKU dan Pemb Peta Skor ADLI	10
11 <i>Workshop The Power and Benefit</i> Strategic Brand	2
FACULTY OF CORPORATE AFFAIR	177
1 <i>Workshop Social Media</i> For Banking and Financial Industry Bagi Personil CSD	3
2 Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal	1
3 Pelatihan <i>Secretary Skill</i> Batch 1	30
4 <i>Workshop</i> Keprotokolan Bank BTN Batch 1	41
5 <i>Workshop</i> Keprotokolan Bank BTN Batch 2	43
6 Pelatihan Secretary Skill Batch 2	26
7 <i>Workshop</i> Pembuatan Laporan Tahunan	33
FACULTY OF GENERAL AFFAIR	96
1 Pelatihan Kelogistikan Kantor Cabang Untuk Kantor Wilayah 1	34
2 Pendidikan dan Pelatihan Kelogistikan Bagi KC dan KCS Wilayah II, III dan IV	59
3 Pelatihan <i>Nasional Building Maintenance</i>	2
4 Pelatihan <i>Building Management Summit</i>	1
FACULTY OF SHARIA	701
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	106
1 Pelatihan PDPS Batch 1	28
2 Pelatihan PDPS Batch 2	29
3 Pelatihan PDPS Batch 3	34
4 Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	15
Funding and Services Sharia	69
1 <i>Achieving Service Excellence</i> CS Syariah Batch 1	22

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
2	<i>Achieving Service Excellence CS Syariah Batch 2</i>	22
3	<i>Achieving Service Excellence Teller Syariah Batch 1</i>	25
	Pembiayaan Sharia	236
A.	Pembiayaan Konsumer	121
1	Pelatihan Analisa Pembiayaan Konsumer <i>Batch 1</i>	26
2	Pelatihan Analisa Pembiayaan Konsumer <i>Batch 2</i>	34
3	Pelatihan Analisa Pembiayaan Konsumer <i>Batch 3</i>	32
4	Pelatihan Analisa Pembiayaan Konsumer <i>Batch 4</i>	29
B.	Pembiayaan Komersial	115
1	Pelatihan Analisa Pembiayaan Komersial Syariah <i>Batch 1</i>	26
2	Pelatihan Analisa Pembiayaan Komersial Syariah <i>Batch 2</i>	28
3	Pelatihan Analisa Pembiayaan Komersial Syariah <i>Batch 3</i>	27
4	<i>Workshop dan Pelatihan Pembiayaan Mudharabah Maqayaddah Tahap 1</i>	18
5	<i>Workshop dan Pelatihan Pembiayaan Mudharabah Maqayaddah Tahap 2</i>	16
	<i>Collection and Asset Management Sharia</i>	58
1	Pelatihan <i>Collection and Workout Syariah Batch 1 Tahun 2015</i>	32
2	Pelatihan <i>Collection and Workout Syariah Batch 2 Tahun 2015</i>	26
	<i>Sharia Others</i>	232
1	<i>Workshop Bank Devisa Bank BTN Syariah</i>	18
2	Pelatihan <i>Prime Secretary Syariah</i>	20
3	<i>Workshop SAP Syariah</i>	6
4	Pelatihan BTN LED Tool Bagi Kantor Cabang Syariah	42
5	Sosialisasi Standarisasi IT Syariah <i>Batch 1</i>	12
6	Aplikasi Engine PSAK Syariah	8
7	<i>Product Knowledge and IT Syariah</i>	39
8	<i>Product Knowledge and IT Syariah Batch 2</i>	51
9	<i>Product Knowledge and IT Syariah Batch 3</i>	34
10	<i>Workshop Excecutif Hybird Contract</i>	2
	FACULTY OF LEADERSHIP	123
1	<i>Officer Development Programme (ODP)</i>	104
2	<i>Supervisor Development Programme (SDP)</i>	17
3	Sespi-Bank/Sespi-BI	2
	OTHERS	2.294
	<i>Seminar dan Workshop</i>	268
1	Pelatihan <i>Beauty Class</i>	36
2	Pelatihan dan Sertifikasi Office Channeling PT TASPEN (Persero)	4
3	<i>Workshop Pengaturan Pertanahan Nasional</i>	8
4	Manajemen Umum Dana Pensiun (MU DP)	1
5	Uji Standar Profesi Dana Pensiun	1
6	Pelatihan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) Papua Barat	1

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
7	Pendidikan <i>Presentation Skill</i>	4
8	Pelatihan Pelayanan Prima Kinerja Unggul Blasius KC Medan	42
9	Sosialisasi Terkait Family Gathering Teller Di Bank Indonesia	25
10	Pelatihan Program Purnabakti <i>Batch 2</i>	20
11	Pelatihan Kegiatan Perkasan Wil BI	1
12	Pelatihan Program Purnabakti <i>Batch 3</i>	14
13	Seminar <i>Selling In Difficult Time</i> MarkPlus	16
14	<i>Workshop High Impact Communication Skill</i>	3
15	<i>Communication and Nego Skill Improvement</i>	9
16	<i>Presentation and Communication Skill</i>	19
17	Seminar Strategi Industri Perbankan	2
18	<i>Workshop Marketing Communication</i>	17
19	<i>Workshop Achievement Motivation to Proud</i>	3
20	<i>Business Economic Forum Pushing Indonesian Economy</i>	1
21	Pelatihan Program Purnabakti <i>Batch 4</i>	16
22	Pelatihan Program Purnabakti <i>Batch 5</i>	22
23	<i>Smart Communication and Negotiation Skill</i>	3
Outbound		2.026
1	<i>Outbound</i> Bank BTN Kantor Cabang Pontianak	78
2	<i>Outbound</i> CCRD	18
3	<i>Outbound</i> KC Bangkalan	60
4	<i>Outbound</i> KC Cilegon	73
5	<i>Outbound</i> KC Denpasar	113
6	<i>Outbound</i> KC Manado	81
7	<i>Outbound</i> KC Purwakarta	81
8	<i>Outbound</i> KC Solo	113
9	<i>Outbound</i> KC Surabaya Bukit Darmo	88
10	<i>Outbound</i> KCS Syariah	30
11	<i>Outbound</i> SPMD	20
12	<i>Outbound</i> WMD	17
13	<i>Outbound</i> KC Depok	141
14	<i>Outbound</i> AMD	87
15	<i>Outbound</i> CCRD Arco 5	51
16	<i>Outbound</i> CMLD	24
17	<i>Outbound</i> KC Bandar Lampung	77
18	<i>Outbound</i> KC Cirebon	118
19	<i>Outbound</i> KC Jakarta Harmoni	224
20	<i>Outbound</i> KC Yogyakarta	108
21	<i>Outbound</i> KC Pangkalpinang	35
22	<i>Outbound</i> KC Makassar	212

Manajemen SDM

Program Training		Jumlah Peserta
23	Outbound RMD	21
24	Outbound SNED	39
25	Outbound KC Palu	45
26	Outbound KC Purwokerto	55
27	Outbound SMLD	17
II	NEW ENTRY ACADEMY	734
1	Teller Service Staff	240
2	Customer Service Staff	202
3	Supporting / Business Process Staff	252
4	Experienced Hire	20
5	Sekretaris	20
III	STRATEGIC INITIATIVES	651
	Corporate Culture Implementation	651
1	Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Perusahaan Bank BTN Batch 1	30
2	Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Perusahaan Bank BTN Batch 3	32
3	Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Perusahaan Bank BTN Batch 4	32
4	Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Perusahaan Bank BTN Untuk MVP Bagi Kepala Cabang Kanwil III dan IV	27
5	MVP Batch – 5	36
6	MVP Batch – 6	34
7	MVP Batch – 7	31
8	MVP Batch – 8	25
9	MVP Batch – 9	33
10	MVP Batch – 10	36
11	MVP Batch – 11	35
12	MVP Batch – 12	32
13	MVP Batch – 13	35
14	MVP Batch – 14	37
15	MVP Batch – 15	39
16	Sosialisasi Materi Budaya Perusahaan 4DX KC Ciputat	107
17	Pelatihan Train The Trainer Budaya Perusahaan Bank BTN Batch 1 dan Batch 2	28
18	Pelatihan Train The Trainer Budaya Perusahaan Bank BTN Batch 3	22
TOTAL		15.991

Untuk memastikan terselenggaranya kegiatan *training* secara efektif, Perseroan telah melengkapi fasilitas *training* berupa:

1. Mini Bank
2. Ruang Multimedia
3. Jumlah ruang kelas yang memadai
4. Perpustakaan

Manajemen SDM

Human Capital Engagement

Perseroan sangat menyadari bahwa karyawan yang *engage* terhadap perusahaan akan menjadi motor penggerak yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan bisnis perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka secara berkelanjutan Perseroan melaksanakan *Employee Engagement Survey* (EES). Pelaksanaan EES tahun 2015 dilakukan oleh pihak konsultan independen yaitu Aon Hewitt consultant. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaannya lebih independen dan riil, sehingga valid untuk dijadikan landasan penyusunan perbaikan dan pengembangan pegawai maupun organisasi di masa mendatang.

Dari pelaksanaan EES tahun 2015, diperoleh hasil skor 70% atau *moderate* dan di atas skor *engagement* pegawai seluruh perusahaan penyelenggara EES di Indonesia yang berada pada posisi mencapai 63% dan skor untuk industri *Financial* di Indonesia yang berada pada posisi 67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat *engagement* pegawai Perseroan memuaskan dan berada di atas tingkat *engagement* rata-rata pegawai di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei tersebut Perseroan menindaklanjutinya dengan pelaksanaan sosialisasi dan *impact plan* untuk merancang perbaikan-perbaikan pada organisasi yang diperlukan. Adapun usulan-usulan perbaikan tersebut dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada periode tahun berikutnya.

Performance Management

Perseroan merupakan organisasi berbasis kinerja. Target perusahaan secara *bankwide* didistribusikan ke seluruh Unit Kerja dan selanjutnya akan diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai. Sasaran kerja dituangkan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Pegawai yang merupakan turunan dari *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Kerja. Kinerja individu direncanakan, ditetapkan, *direview* dan dinilai menggunakan Formulir Manajemen Kinerja yang mencakup 3 sasaran penilaian kinerja, yaitu:

1. Sasaran Kerja Individu yang mencakup sasaran-sasaran kerja individu pada tahun penilaian kinerja berjalan.
2. Kompetensi Teknis yang mencakup Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan pada jabatan individu, Level Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan serta Level Kompetensi Teknis yang ditunjukkan individu.
3. Kompetensi Perilaku yaitu Level Kompetensi Perilaku yang dipersyaratkan jabatan individu yang dinilai dan Level Kompetensi Perilaku yang ditunjukkan.

Penilaian kinerja dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

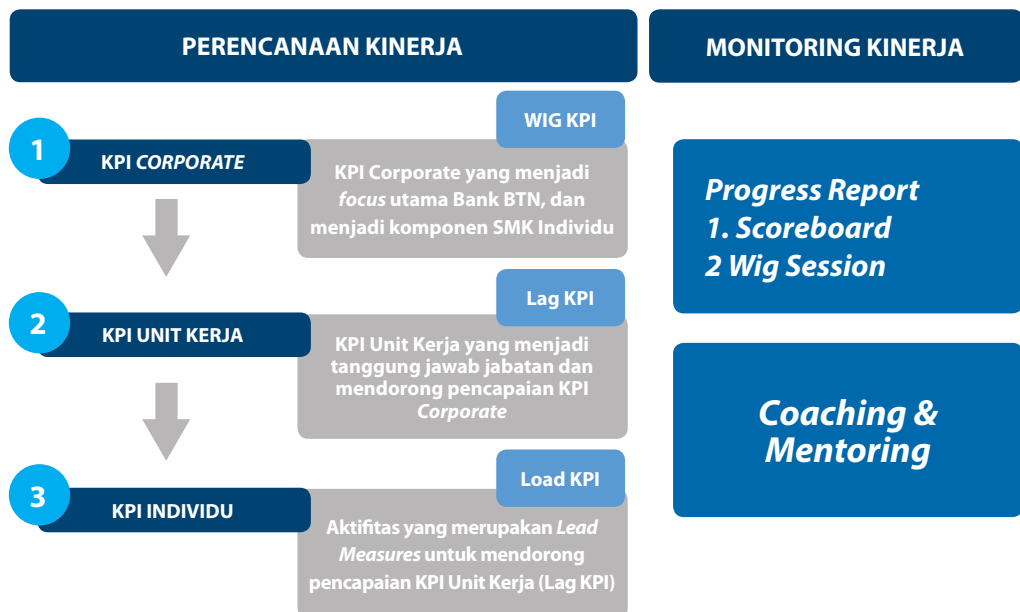
Penetapan KPI Individu dilaksanakan sebagai berikut.

Manajemen SDM



Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja juga diimplementasikan Metode 4DX (*Four Disciplines of Execution*) sebagai dasar penetapan sasaran/perencanaan kinerja dan pelaksanaan monitoringnya. Dalam penetapan sasaran kinerja, KPI *Corporate* ditetapkan sebagai sasaran paling penting/ *wildly important goals* (WIG) dan menjadi komponen SMK Individu, sedangkan KPI Unit Kerja ditetapkan sebagai Lag KPI yang menjadi tanggung jawab jabatan dan mendorong pencapaian KPI *Corporate*, selanjutnya KPI Individu ditetapkan sebagai Lead KPI yaitu aktifitas yang merupakan *Lead Measures* untuk mendorong pencapaian KPI Unit Kerja.

Sedangkan untuk monitoringnya dilakukan dengan Progres Monitoring dengan menggunakan *Scoreboard* dan pelaksanaan *Wig Session* secara kontinue dan berkesinambungan dan juga dilaksanakan proses *Coaching and Mentoring* untuk membantu memastikan pencapaian sasaran setiap individu.



Manajemen SDM

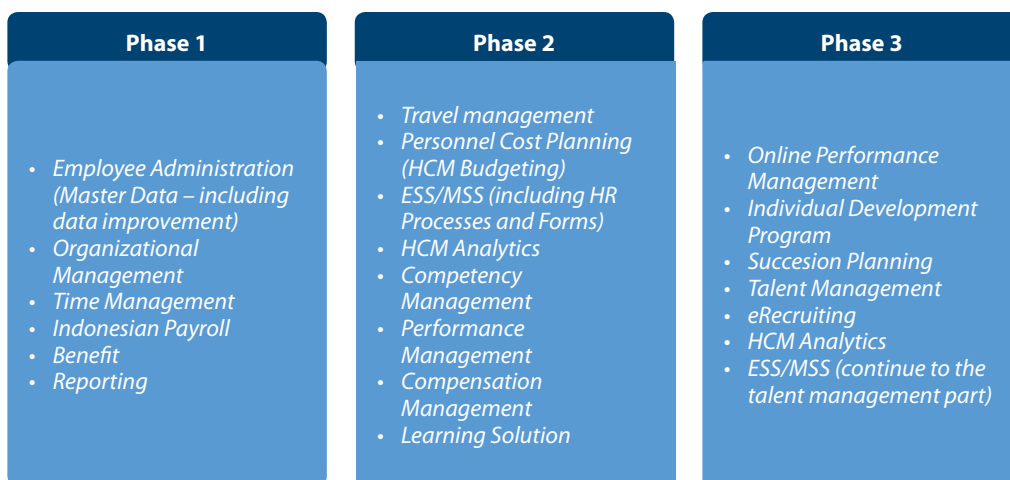
Pelaksanaan manajemen kinerja ini bertujuan agar pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas pegawai dan menggerakkan iklim pekerjaan yang terbuka, positif dan progresif. Hasil Penilaian Kinerja akan digunakan sebagai dasar pemberian *reward* pegawai dengan prinsip *competitiveness* dan *fainess*. *Reward* diberikan kepada pegawai, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan setiap tahun, *financial reward* dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan. *Non-financial reward* berupa penghargaan seperti promosi pegawai.

Untuk meningkatkan kualitas dan proses pelaksanaan penilaian kinerja, saat ini Perseroan sedang mengembangkan *performance management* dengan menggunakan sistim *Human Capital Information Sistem (HCIS)*. Implementasi HCIS saat ini, berada pada fase 3 yaitu fase *Talent Management*.

Human Capital Information System

Perseroan melaksanakan implementasi *integrated Human Capital Information System (iHCIS)* untuk memberikan nilai tambah bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan tersedianya sarana (*tools*) yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu mengenai *Human Capital* untuk pengambilan keputusan terhadap perencanaan bisnis dan proses pengelolaan *Human Capital* serta transparansi bagi manajemen dan karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Implementasi HCIS dilaksanakan dalam 3 fase, yaitu fase 1 sampai dengan fase 3 sebagai berikut.



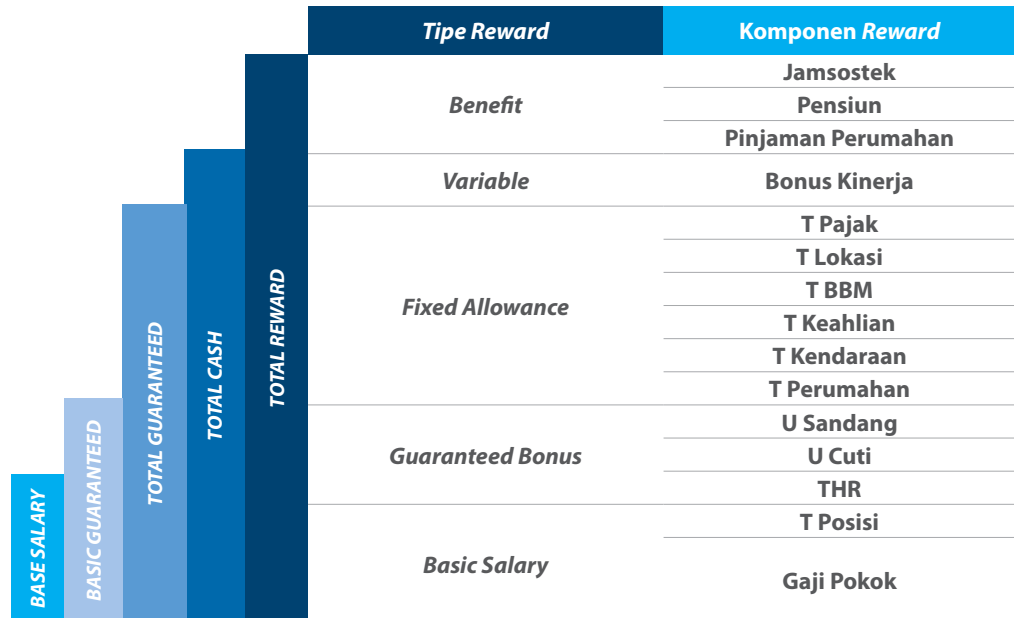
Human Capital Reward

Dalam rangka mempertahankan SDM yang berkualitas dan pemberian penghargaan bagi pegawai sebagai apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi dalam mendukung pencapaian target bisnis, maka Perseroan memberikan fasilitas jasa produksi dan bonus tambahan sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja pegawai maupun Unit Kerja masing-masing.

Selain pemberian jasa produksi dan bonus tambahan, hasil penilaian kinerja juga digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji pegawai untuk tahun berikutnya.

Penetapan remunerasi senantiasa mempertimbangkan paket remunerasi yang berlaku pada industri perbankan, ketentuan perundang-undangan dan kemampuan Perseroan. Berikut ini adalah komposisi remunerasi yang berlaku di Perseroan.

Manajemen SDM



Career Management

Jenjang karir merupakan hal yang sangat krusial dalam penerapan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang terintegrasi. Bagi Pegawai, kejelasan mengenai jenjang karir yang tersedia bagi mereka berdampak besar bagi kepuasan mereka bekerja dalam suatu organisasi. Bagi Perseroan, jenjang karir yang tertata baik menjamin ketersediaan pemangku jabatan yang cakap pada posisi-posisi kunci. Oleh karena itu, Perseroan secara khusus mengatur telah ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan karir dalam suatu kebijakan tersendiri.

Pola Karir

Secara umum Pola Karir Pegawai yang diatur sebagai berikut.

- **Pola Karir Fast Track**

Pola Karir *Fast Track* adalah pergerakan karir yang sangat dipercepat, yaitu para Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan Promosi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun setelah penempatan terakhir.

Pola Karir Middle Track

Pola Karir *Middle Track* adalah pergerakan karir yang dipercepat, yaitu para Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan Promosi dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah penempatan terakhir.

Pola Karir Normal Track

Pola Karir *Normal Track* adalah pergerakan karir yang mengikuti aturan umum, yaitu para Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan Promosi dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun setelah penempatan terakhir.

Manajemen SDM

Jalur Karir

Secara umum pergerakan karir Pegawai terdiri dari 3 (tiga) jenis pergerakan berikut ini.

Promosi

Jalur Karir ke jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih tinggi diatur dalam mekanisme Promosi. Pegawai yang berhak menjadi kandidat untuk dipromosikan adalah mereka yang termasuk dalam kelompok *star*, *potential* dan *average* berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pemetaan *Talent*. Promosi dilakukan apabila terdapat jabatan yang lowong.

Rotasi

Jalur Karir ke jabatan pada Golongan Jabatan yang sama diatur dalam mekanisme Rotasi. Rotasi dilakukan apabila terdapat jabatan lowong akibat dilakukan perputaran atau promosi dari jabatan setara atau pemangku jabatan berhalangan tetap.

Jalur Karir ke Jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah

Jalur karir ke Jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah terjadi karena permintaan Pegawai sendiri, dengan alasan:

- Ingin meniti karir pada bidang pekerjaan atau Keluarga Jabatan yang berbeda, namun harus memulai dari Golongan Jabatan yang lebih rendah.
- Ingin berpindah ke lokasi kerja yang berbeda dimana posisi yang tersedia atau terpenuhi persyaratan jabatannya merupakan jabatan dengan Golongan Jabatan yang lebih rendah daripada jabatannya saat ini.
- Pergerakan ke jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah yang disebabkan karena sanksi diatur dalam mekanisme Demosi yang diatur dalam Kebijakan mengenai Peraturan dan Sanksi Disiplin.

Penentuan karir pegawai dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan non diskriminatif. Mekanisme promosi menggunakan metode *nine box*, dimana pegawai diukur berdasarkan potensi kemampuan dan kinerjanya. Dari matriks *nine box* akan didapatkan kandidat-kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin perseroan.

Industrial Relation

Perseroan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya Perseroan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM Perseroan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Bank yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN). Hubungan yang harmonis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan *engagement* pegawai.

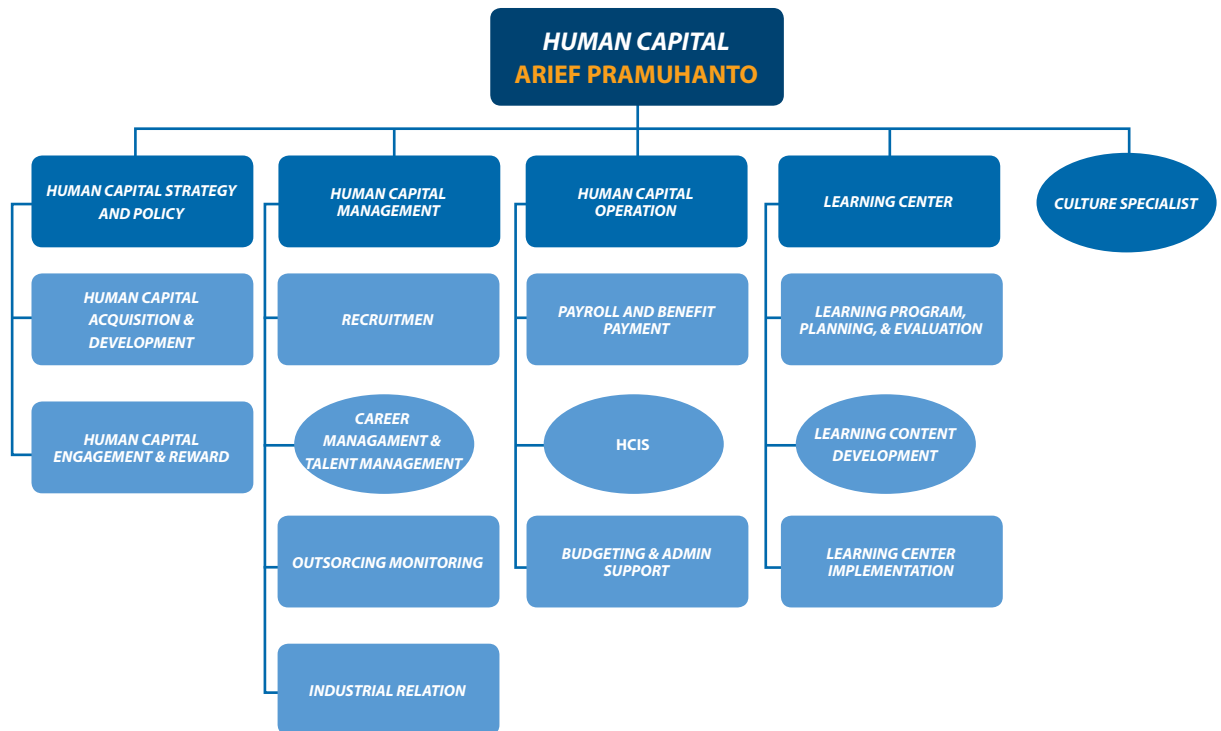
Dalam rangka mewujudkan hubungan antara pekerja dengan manajemen yang harmonis serta menjaga ketenangan bekerja, telah disusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Bank BTN. Pembaharuan terhadap PKB antara Perseroan dengan SP-BTN ini dilakukan secara berkala melalui mekanisme perundingan antara Manajemen dengan SP-BTN.

Perseroan secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban karyawan maupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai.

Manajemen SDM

Organisasi Pengelola Human Capital

Pengelolaan strategi dan sistem SDM dilaksanakan oleh *Human Capital Division* yang dipimpin oleh *Division Head* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Struktur Organisasi *Human capital Division* ditetapkan berdasarkan Ketetapan Direksi No. 02 /KD /DIR/ SPMD/2015, Tanggal 05 Mei 2015

Profil Ringkas Kepala Divisi Human Capital



Arief Pramuhanto

53 tahun. Lulusan Ekonomi, Monash University, Melbourne. Kepala Divisi *Human Capital Division*. Menjabat sejak 1 Maret 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/DIR/2015.

Manajemen SDM

Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas Divisi *Human Capital*

Terdapat 4 (empat) Departemen dan 1 (satu) unit *specialist* pada Divisi *Human Capital* dengan masing-masing ruang lingkup dan cakupan tugas sebagai berikut.

Unit Kerja	Ruang Lingkup Tugas
<i>Human Capital Management Department</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tata kelola kepegawaian melalui proses perencanaan SDM (<i>Manpower Planning</i>), perekrutan dan penempatan pegawai, pengawasan tenaga <i>outsourcing</i>, manajemen karir, dan penilaian kemampuan pegawai secara akurat untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan selaras dengan tujuan strategis Perseroan. Mengelola hubungan industrial di Perseroan, baik dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum dan serikat pekerja maupun dengan pegawai internal, sehingga mampu tercipta suasana kerja yang kondusif untuk mendukung bisnis Perseroan.
<i>Human Capital Operation Department</i>	Mengelola kegiatan operasional terkait kepegawaian yang mencakup pembayaran hak pegawai, pendokumentasian data pegawai, pelaksanaan analisa pegawai, dan dukungan administrasi untuk memastikan hak-hak dan kewajiban pegawai dan Perseroan dapat dilaksanakan secara seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<i>Human Capital Strategy and Policy Department</i>	Mengkoordinasikan pengkajian dan pengembangan kebijakan tentang budaya kerja, pengembangan karir, remunerasi, manajemen kinerja, evaluasi jabatan, <i>assessment</i> , <i>training</i> , <i>human capital planning</i> dan aktivitas " <i>Know Your Employee</i> " (KYE) secara optimal guna menunjang visi, misi dan perencanaan bisnis Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.
<i>Learning Center Department</i>	Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan dan pelatihan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan, analisis dan disain pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Perseroan, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi seluruh pegawai guna mendukung pencapaian target bank dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .
<i>Culture Specialist</i>	Menjadi Fasilitator implementasi budaya kerja perusahaan. Melaksanakan program kerja implementasi budaya kerja, menciptakan keselarasan program budaya kerja dan program kerja bisnis Bank, melaksanakan monitoring dan evaluasi program budaya di seluruh Unit Kerja, melaksanakan koordinasi dengan <i>Change Agent</i> serta melakukan <i>review</i> dan survei iklim organisasi melalui penyusunan <i>Culture Assessment Index</i> .

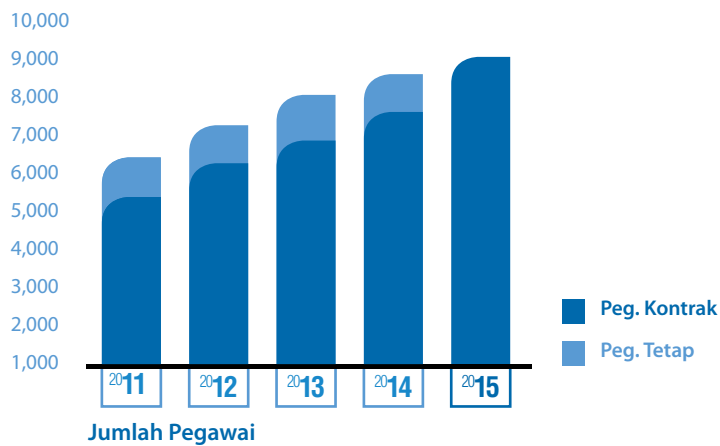
Profil Karyawan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, selain memperluas jaringan kantor, Perseroan juga menambah jumlah pegawainya. Penambahan jumlah pegawai didasarkan pada perhitungan kebutuhan bisnis perusahaan. Berikut Perkembangan jumlah pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Karyawan			Jumlah Total	
	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Pegawai <i>Outsource</i>	Tidak Termasuk <i>Outsource</i>	Termasuk <i>Outsource</i>
2015	8.186	856	6.504	9.042	15.546
2014	7.513	1.069	6.227	8.582	14.809
2013	6.869	1.142	5.578	8.011	13.589
2012	6.048	1.094	4.945	7.142	12.087
2011	5.135	1.202	3.326	6.337	9.663

Grafik Perkembangan Jumlah Pegawai 2011 - 2015



Pada tahun 2015 terdapat kenaikan pegawai sebesar 5% dari total pegawai sebanyak 14.809 pada tahun 2014 menjadi 15.546 pegawai pada tahun 2015. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak dan Pegawai *Outsource*

Profil Karyawan

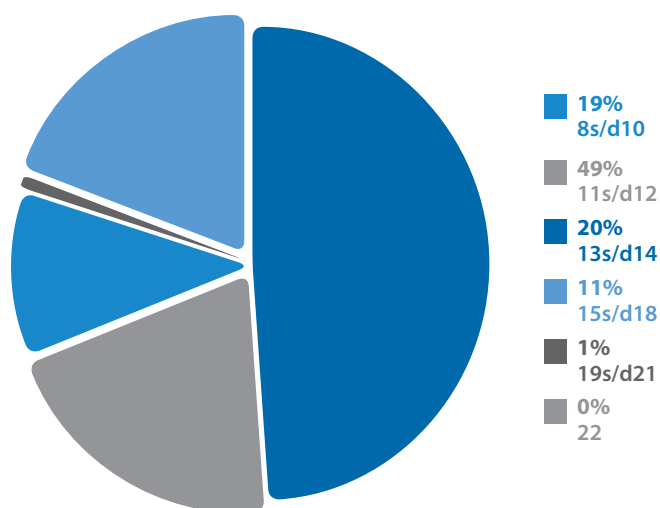
Komposisi Jumlah Karyawan Tetap (Pegawai Tetap) Berdasarkan Level Organisasi

Dari tahun ke tahun Jumlah pegawai terbanyak berada pada Level *Grade* 11 sampai dengan 12. Hal tersebut disebabkan jabatan-jabatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dan pelaksana operasional di Perseroan berada pada level tersebut. Untuk tahun 2015 pegawai pada level *Grade* 11 sampai dengan 12 mencapai 4.019 pegawai, atau mencapai 49% dari jumlah total pegawai.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	Tahun 2015		Tahun 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%
22	2	0,02%	5	0,07%
19 s/d 21	77	0,94%	82	1,09%
15 s/d 18	865	10,57%	790	10,52%
13 s/d 14	1.665	20,34%	1.774	23,61%
11 s/d 12	4.019	49,10%	3.422	45,55%
8 s/d 10	1.558	19,03%	1.440	19,17%
Jumlah	8.186	100,00%	7.513	100,00%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi.



Profil Karyawan

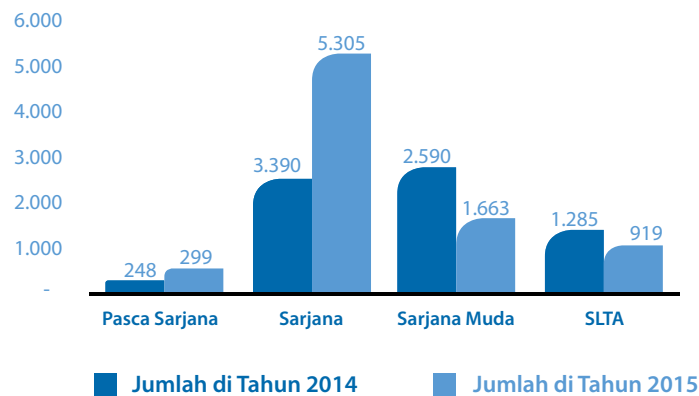
Komposisi Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terdapat pergeseran tingkat pendidikan pegawai untuk tahun 2015 menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Komposisi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana menjadi sebanyak 65% pada tahun 2015 dibanding pada tahun sebelumnya yang berjumlah 45%. Demikian juga jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana meningkat sebesar 1% pada tahun 2015.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	299	4%	248	3%
Sarjana	5.305	65%	3.390	45%
Sarjana Muda	1.663	20%	2.590	34%
SLTA	919	11%	1.285	17%
JUMLAH	8.186	100%	7.513	100%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



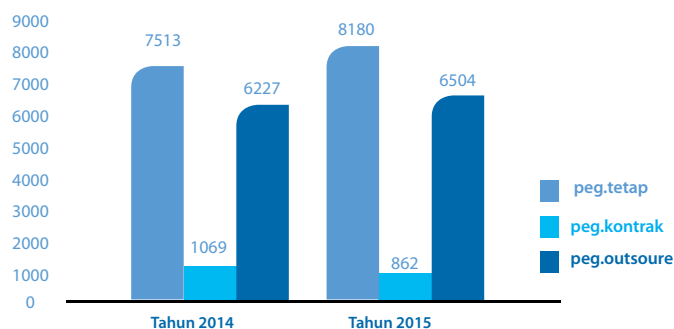
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tahun	Jumlah Karyawan			Jumlah Total	
	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Pegawai <i>Outsource</i>	Tidak Termasuk <i>Outsource</i>	Termasuk <i>Outsource</i>
2015	8.186	856	6.504	9.042	15.546
2014	7.513	1.069	6.227	8.582	14.809

Profil Karyawan

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Karyawan Tahun 2014-2015



Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi pegawai tahun 2015 mayoritas berada pada usia di bawah 30 tahun, yaitu mencapai 61% dari total pegawai. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 58%. Sedangkan komposisi pegawai pada usia antara 41 – 45 tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 15% berkurang menjadi 11% pada tahun 2015.

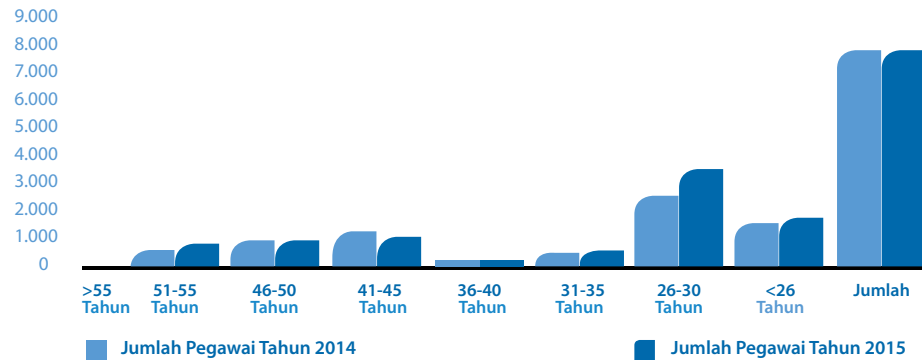
Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

USIA	2015	%	2014	%
> 55 Tahun	4	0%	5	0%
51 - 55 Tahun	637	8%	572	8%
46 - 50 Tahun	795	10%	764	10%
41 - 45 Tahun	941	11%	1.134	15%
36 - 40 Tahun	115	1%	140	2%
31 - 35 Tahun	722	9%	554	7%
26 - 30 Tahun	3.337	41%	2.597	35%
< 26 Tahun	1.635	20%	1.747	23%
Jumlah	8.186	100%	7.513	100%

Profil Karyawan

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

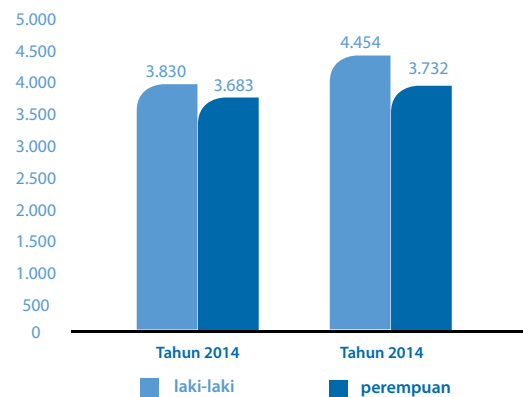


Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Berdasarkan jenis kelamin (*gender*), komposisi pegawai di 2015 yaitu laki-laki sebesar 54%, sedangkan perempuan sebesar 46%. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan di tahun 2014.

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender



Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Gender	2015	%	2014	%
Laki-laki	4.454	54%	3.830	51%
Perempuan	3.732	46%	3.683	49%
Jumlah	8.186	100%	7.513	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Unit Kerja

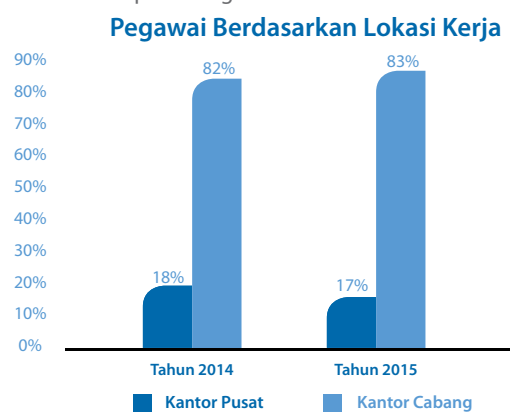
Terdapat peningkatan jumlah pegawai baik yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Peningkatan jumlah pegawai lebih banyak untuk penempatan di Kantor Cabang, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah secara langsung. Komposisi jumlah pegawai untuk Kantor Pusat sebanyak 17% sedangkan penempatan di Kantor Cabang mencapai 6.819 pegawai atau sebesar 83% dari total pegawai.

Profil Karyawan

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

Lokasi Unit Kerja	2014	%	2015	%
Kantor Pusat	1.364	18%	1.367	17%
Kantor Cabang	6.149	82%	6.819	83%
Jumlah	7.513	100%	8.186	100%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja



Biaya Tenaga Kerja

Selama 2015, Perseroan telah mengalokasikan dana untuk Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp1.646.320.290.000 atau mengalami peningkatan sebesar 15,25% dari total Biaya Tenaga Kerja tahun 2014 yang sebesar Rp1.428.533.093.000

Adapun biaya *training* tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2014 menjadi sebesar Rp105.993.657.000 pada tahun 2015, atau sebesar 0,91%, namun secara keseluruhan masih sebesar 7,15% dari Biaya Tenaga Kerja.

Perkembangan Biaya Tenaga Perseroan selama tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel Biaya Tenaga Kerja Tahun 2014 dan 2015

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian Biaya Tenaga Kerja (BTK)	Tahun 2014	Tahun 2015	Peningkatan	% Peningkatan
Gaji dan Upah	1.018.741.651	1.174.321.368	155.579.717	15,27%
Honor Komisaris & Pengawas	7.034.202	6.965.934	(68.268)	-0,97%
Lain - Lain	265.767.058	300.391.457	34.624.399	13,03%
Sub Total BTK	1.291.542.911	1.481.678.759	190.135.848	14,72%
Insentif & lainnya	1.045.059	22.697.196	21.652.137	2.071,86%
Pendidikan & Pelatihan	106.965.371	105.993.657	(971.714)	-0,91%
Perjalanan Dinas (Kantor Pusat)	28.979.752	35.950.678	6.970.926	24,05%
Sub Total BTK Lainnya	136.990.182	164.641.531	27.651.349	20,18%
Total BTK	1.428.533.093	1.646.320.290	217.787.197	15,25%

Profil Karyawan

Tingkat *Turnover* Karyawan

Dengan berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara *fair*, transparan dan berimbang, Perseroan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi segenap karyawan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat *turnover* karyawan.

Pada tahun 2015 tercatat 383 karyawan Perseroan yang berhenti, atau sebesar 4,24% dari total karyawan akhir tahun yang mencapai 9.042 karyawan.

Tabel *Turnover* Pegawai 2011 – 2015

Keterangan	Tahun				
	2015	2014	2013	2012	2011
Jml Karyawan di Awal Periode	8.582	8.011	7.142	6.337	5.312
Jml Karyawan Masuk	839	1.144	1.238	1.484	1.216
Jml Karyawan Keluar (resign dan mangkir)	383	261	203	81	90
Jml Karyawan di akhir periode	9.042	8.582	8.011	7.142	6.337
<i>Turnover</i>	4,24%	3,04%	2,53%	1,13%	1,42%

07

Tata Kelola Perusahaan



Perusahaan sudah mampu memenuhi standar internasional praktik GCG yang ditentukan IICD dan berada di atas skor rata-rata 100 perusahaan terbuka dan emiten dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia.





Good Corporate Governance



Perseroan merupakan satu-satunya bank BUMN yang mendapatkan predikat *The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard* 2015 di tingkat ASEAN. Hasil penilaian *ASEAN CG Scorecard* terhadap Perseroan mendapatkan predikat *EXCELLENT* (>90). Perseroan mampu memenuhi standar internasional praktik GCG yang ditentukan OECD dan berada di atas skor rata-rata 100 perusahaan terbuka dan emiten dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia (IICD, 2015).

Good Corporate Governance

Sejak dekade terakhir, Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices/standar internasional*. Bagi Perseroan, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan, investasi meniti tangga kesuksesan (*the most critical secret of success side*). *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*, merupakan *tagline* yang gencar dikampanyekan manajemen kepada segenap *Stakeholders* karena Perseroan memiliki keyakinan yang kuat bahwa praktik implementasi GCG tidak sekedar *Compliance Driven an sich*, namun lebih dari semua itu, Perseroan berkeyakinan bahwa GCG adalah rahasia paling mendasar menuju kesuksesan jangka panjang.

Upaya tersebut membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari pengakuan pihak eksternal melalui penghargaan yang diraih oleh Perseroan selama periode 2015 (selain penghargaan ASEAN CG *Scorecard* di atas), baik pada tingkat nasional maupun *internasional*, sebagai berikut.



**Gold Award for Excellence within its Industry on
The Development of The Organizations**

Ajang Penghargaan
Annual Report Award 2015
Diselenggarakan oleh
LACP (*League of American Communications
Professionals*)



Best Letter to Shareholders

Ajang Penghargaan
Annual Report Award 2015
Diselenggarakan oleh
LACP (*League of American Communications
Professionals*)



Top 100 Annual Reports Worldwide



Top 50 Annual Reports in the Asia-Pacific Region



Top 10 Indonesian Annual Reports

Ajang Penghargaan
Annual Report Award 2015
Diselenggarakan oleh
LACP (*League of American Communications
Professionals*)



The Best Financial 2015

Ajang Penghargaan
The 7th IICD Corporate Governance
Conference and Award
Diselenggarakan oleh
Indonesian Institute for Corporate Directorship
Indonesian GCG Award 2015

Good Corporate Governance



Top 50 Public Listed Companies

Ajang Penghargaan
The 7th IICD Corporate Governance Conference and Award

Diselenggarakan oleh
*Indonesian Institute for Corporate Directorship
Indonesian GCG Award 2015*



Juara III Annual Report BUMN Listed Company

Ajang Penghargaan
Annual Report Award 2015

Diselenggarakan oleh
OJK, BI, IAI, Depkeu, KNKG, IDX, dan BUMN



Ajang Penghargaan
Excellence GCG Sector Finance 2015

Diselenggarakan oleh
IPMI dan Economic Review



*The Most Trusted Company Based on Corporate
Governance Perception Index*

Diselenggarakan oleh
IICG dan SWA



Keterbukaan Informasi Publik 2015
Kategori BUMN

Diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Pusat RI

Good Corporate Governance

Berbagai penghargaan yang telah diterima bukan hanya sekedar formalitas, akan tetapi mencerminkan efektivitas implementasi GCG di Perseroan. Perseroan telah merasakan bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2015 sebagai berikut.

Selain mencatatkan kenaikan aset yang cukup signifikan, Perseroan juga mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan.

1. *Highlights* kinerja keuangan Perseroan periode 2015, sebagai berikut.
 - Pertumbuhan Laba Bersih 61,57% mencapai Rp1.851 miliar
 - Pertumbuhan Aset 18,83 % mencapai Rp171.808 miliar
 - Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 19,88 % menjadi Rp138.956 miliar
 - Peningkatan Dana Pihak Ketiga 19,97% menjadi Rp127.746 miliar
 - Peningkatan total Ekuitas 13,12% menjadi Rp13.860 miliar
 - *Non Performing Loan* (NPL) Netto 2,11%
 - *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 16,97%
 - *Return on Equity* (ROE) 16,84%
 - *Net Interest Margin* (NIM) 4,87%
2. Kinerja Saham dan Efek yang Sangat Baik
Peningkatan kinerja saham dan efek sangat baik. Atas kinerja Perseroan pada tahun 2015, saham Perseroan juga dimasukkan sebagai komponen perhitungan beberapa Indeks Saham terkemuka, yaitu:
 - Indeks LQ45 periode Februari - Juli 2016
 - Indeks Kompas100 periode Februari – Juli 2016
 - Indeks MNC36 periode November 2015 – April 2016
 - Indeks Infobank 15 periode Januari – Juni 2016
 - Indeks Investor 33 periode Desember 2015 – Mei 2016

Sementara peningkatan kinerja efek tercermin dari hasil *Rating* Obligasi dan Efek Beragun Aset Sekuritisasi KPR dengan *rating* sebagai berikut.

Pefindo

- *Rating* Obligasi Berkelanjutan II BTN tahap I seri A, B, C dan D mendapat penilaian peringkat idAA
- Efek Beragun Aset kelas A mendapatkan hasil pemeringkatan idAAA

Fitch Rating

Kategori *National Long Term Bonds* mendapatkan peringkat AA (idn)

Moody'S

- Kategori *Bank Deposits – domestic currency* mendapatkan peringkat Baa/P-3
- Kategori *Bank Financial Strength* mendapatkan peringkat D
- *Baseline Credit Assessment* mendapatkan peringkat Ba2

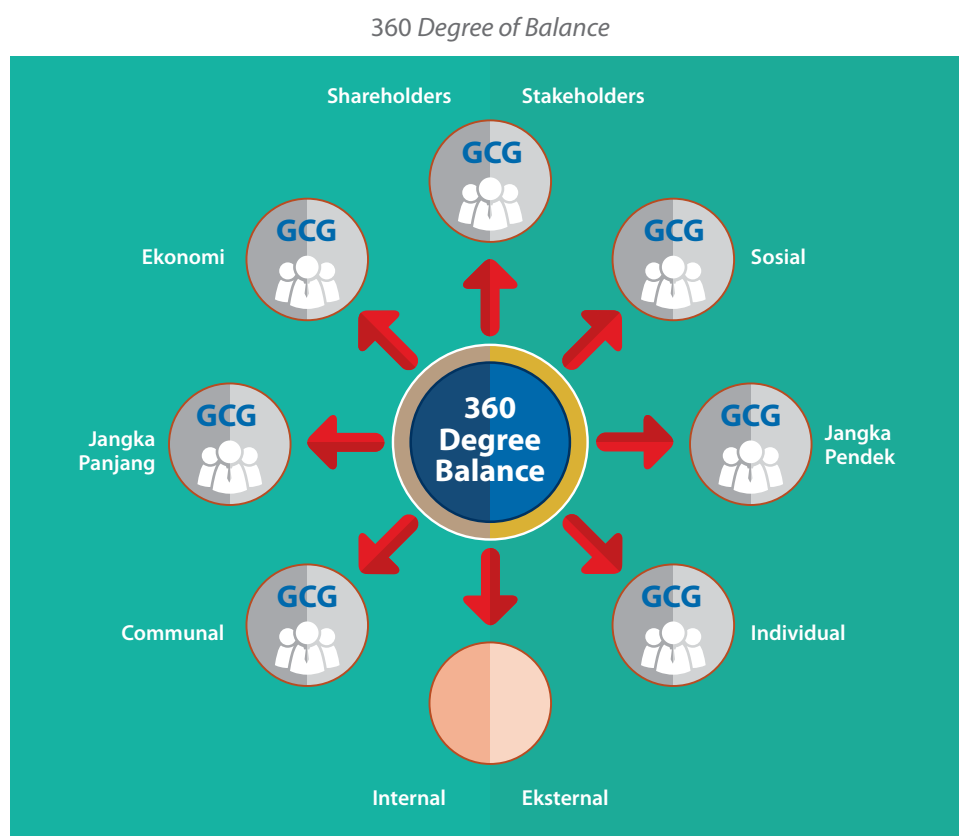
Selain hal-hal di atas pada periode pelaporan Perseroan berhasil meningkatkan kinerja yang dapat dilihat dari berbagai penghargaan dari pihak independen yang diperoleh sepanjang tahun 2015 sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian penghargaan dan sertifikasi, yang diantaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Kinerja Bank Sangat Bagus dari INFOBANK;
2. Industri Keuangan BUMN selama tahun 2014 dari INFOBANK.
3. Bank yang berkinerja Terbaik dari PROPERTY dan BANK;
4. *4th Best Overall Performance* Bank BTN Syariah dari INFOBANK dan MRI;

Peningkatan kinerja dan berbagai penghargaan di atas selaras dengan peningkatan implementasi GCG Perseroan.

Paradigma GCG BTN

Secara umum, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* (TARIF), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh (360 derajat) sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, *internal* juga *eksternal*, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan (lihat gambar 1).



Dengan menerapkan paradigma secara menyeluruh, akan terjadi keselarasan kepentingan dan tujuan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya (*goal congruence*). Keselarasan kepentingan dan tujuan perusahaan dengan para pemangku kepentingan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Arti Penting GCG Bagi BTN

GCG memiliki arti yang sangat penting bagi Perseroan. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik, yang intinya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja Perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*. Dengan membangun GCG akan dapat memperbaiki kinerja Perseroan serta menciptakan Perseroan yang berhasil yang akan membentuk keunggulan komparatif. Karena dengan GCG maka manajemen Bank akan berjalan dengan baik, efisiensi akan berjalan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan para *stakeholders*. Hal ini berkaitan pula dengan pembentukan citra yang baik dari Perseroan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip GCG memiliki arti yang begitu penting bagi Perseroan dalam rangka mewujudkan sebuah *sustainable company*. GCG akan menuntun Perseroan ke arah keunggulan kompetitif yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi dan menjamin kelanggengan kemakmuran yang akan dinikmati rakyat banyak.
2. Meningkatkan *corporate value*. Dengan dilakukannya praktik GCG akan dapat meningkatkan nilai (*value*) Perseroan melalui peningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang memungkinkan dilakukan oleh manajemen dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Prinsip-prinsip GCG akan mendorong *value driver* untuk bekerja secara lebih baik karena Perseroan dikelola atas dasar *best practice* yang kemudian akan meningkatkan nilai sebuah Bank (*Value Creation*).
3. Meningkatkan kepercayaan investor. Praktik GCG yang dapat dijalankan dengan baik akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan sebaliknya pelaksanaan GCG yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan mereka. GCG menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*). Para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan GCG yang dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja Perseroan yang selanjutnya akan meningkatkan *shareholders value*. GCG dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Bank dengan tujuan akhir yaitu tercapainya *stakeholder satisfaction* yang meliputi *task satisfaction* dan *employee satisfaction*.

Standar Kualitas Penerapan GCG (Code Of GCG) Bank BTN

Perseroan menetapkan dan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan *standard internasional* berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard.

Acuan regulasi yang dijadikan standar penerapan GCG Perseroan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Standar pelaksanaan GCG sesuai regulasi ini minimal meliputi 11 (sebelas) parameter, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit *Intern*;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian *Intern*;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan *Internal*;
11. Rencana Strategis Bank.

Standar Kualitas Penerapan GCG (Code Of GCG) Bank BTN

Hasil penilaian penerapannya dapat dilihat pada bagian *Self Assessment* sesuai ketentuan BI/OJK.

Adapun standar *internasional* yang menjadi acuan Perseroan sesuai standar *internasional* berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG *Scorecard* sebagaimana yang telah dituangkan oleh OJK dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK di tahun 2015 meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi sebagai berikut.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham.

Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Meliputi prinsip:

1. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Meliputi prinsip:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Pedoman Tata Kelola mencakup 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
1		Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.
		<ol style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
		<ol style="list-style-type: none"> Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 1 dan Rekomendasi 1.

Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan dengan cara pengambilan keputusan dan pengumpulan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BTN yang diungkapkan kepada publik, diantaranya melalui *website* perseroan;
2. Prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut telah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.

Pada periode 2015, Perseroan telah melaksanakan 2 kali RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS, sebagai berikut.

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
4. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
6. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat pertama keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

1. Khusus untuk mata acara rapat kedua, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan serta Menyerahkan Kartu Suara" dengan prosedur sebagai berikut.

1. Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
2. Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 26 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada *website* Perseroan (www.btn.co.id menu *Investor Relation-RUPS-Tata Tertib RUPS*).

Pada prinsipnya Perseroan *comply* terhadap Prinsip 1 dan Rekomendasi 2.

Dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan Regulasi.

Namun demikian pada periode 2015, bertepatan pada tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2015 Sdr.Sahala Lumban Gaol mendapat tugas dari Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara) sebagai Tim Uji Kematangan dan Kelayakan (UKK) dan Evaluasi. Kemudian, melalui Surat Nomor 31/KOM/ BTN/11/2015 Sdr. Sahala Lumban Gaol menyampaikan kepada Pimpinan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dinas ke Luar Negeri terkait tugas oleh Pemegang Saham Pengendali sehingga tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 1 dan Rekomendasi 3.

Sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perseroan yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun (www.btn.co.id menu *Investor Relation-RUPS-Tata Tertib RUPS*). Selain itu, ringkasan risalah RUPS diumumkan juga kepada regulator (OJK, BEI) baik melalui surat maupun elektronik.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan keberagaman keahlian kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
		9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.
		10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 2 dan Rekomendasi 4.

Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor dengan tujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Sekretaris Perusahaan, Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id)

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 2 dan Rekomendasi 5

Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada *website* Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor -Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 3 dan Rekomendasi 6

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan dan semua ketentuan Regulator yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementerian BUMN).

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 3 dan Rekomendasi 7

Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 4 dan Rekomendasi 8

Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.btn.co.id) menu *Investor Relation – GCG -Crossreference ASEAN CG Scorecard - Board Manual*.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 4 dan Rekomendasi 9

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 4 dan Rekomendasi 10

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang menyatakan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada *Board Manual*.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 4 dan Rekomendasi 11

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi diantaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisari Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan sebagaimana pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
III	Aspek 3: FUNGSI dan PERAN DIREKSI		
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektifitas pengambilan keputusan Direksi.
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 5 dan Rekomendasi 12

Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan dan semua ketentuan Regulator yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementerian BUMN).

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 5 dan Rekomendasi 13

Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 5 dan Rekomendasi 14

Sesuai POJK 06/2015 tentang Transparansi dan Publikasi laporan bank. Bahwa Direktur yang membidangi/membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki kualifikasi, latar belakang, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja di bidang keuangan. Pada periode 2015, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut.

1. Pendidikan
 - a. S 1 Teknik Mesin ITB
 - b. S2 *Accounting and Finance Universitas of Birmingham UK*
2. Pengalaman Kerja
 - a. *Loan Officer* urusan perkreditan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1982 – 1987)
 - b. *International Funding Manager* PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1991 – 1992)
 - c. *Treasury Manager* Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1992 – 1995)
 - d. *Deputy General Manager* Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1995 – 1996)
 - e. *General Manager (CE)* Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1996 – 1997)
 - f. Wakil kepala urusan keuangan dan jasa Bank PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1998 – 1999)
 - g. *General Manager (CEO)* Cabang Singapore PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 1999 – 2001)
 - h. *Department Head UP3 Financial Institution & Overseas Network (FION) group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2001 – 2002)
 - i. *Department Head Correspondent Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2002 – 2003)
 - j. *Department Head FI Credit Risk and Product Development* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2003 – 2006)
 - k. *Departement Head Credit Recovery II group dan Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Department* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2006)
 - l. Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) setingkat *Group Head* untuk *International Banking and Capital Market Services Group (IBCMS)* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.(tahun 2009 – 2010)
 - m. *Group Head IBCMS Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.(tahun 2009 – 2010)
 - n. *Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL)* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2010 – 2013)

Adapun Sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
		16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.
		17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. • Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 6 dan Rekomendasi 15

Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* serta sistem penilaian ini dirangkul sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.btn.co.id) menu *Investor Relation-GCG-Crossreference ASEAN CG Scorecard-Board Manual*.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 6 dan Rekomendasi 16

Kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian Penilaian Kinerja Direksi Laporan Tahunan ini.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 6 dan Rekomendasi 17

Bank BTN telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada *Board Manual*.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 18

Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi nomor 39/PD/CSD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan *Investor Relations* sebagaimana yang dapat dilihat di *website* Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor -Pedoman Kebijakan Hubungan Investor

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 19

Pelaksanaan penerapan anti *fraud* di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No.22/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* Strategi Anti *Fraud* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut.

- Pencegahan.
- Deteksi.
- Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
- Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Program yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan *fraud* dan koRUPSi dilakukan melalui Program Sosialisasi Peningkatan *awareness* kejadian *Fraud* di lingkungan kerja yaitu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan stakeholder perihal kebijakan Strategi Anti *Fraud*, Kebijakan *Whistleblowing System* dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi, yaitu antara lain:

- Terhadap personil Internal Audit, dan unit kerja *control* yaitu membekali personil dengan seminar, pelatihan dan pendidikan serta pelatihan audit, *risk management*, *information technology* serta pendidikan lainnya terkait dengan pengendalian *fraud* dan/atau *internal control*.
- Terhadap unit operasional yaitu membekali personil dengan seminar, pelatihan dan pendidikan terkait dengan aspek-aspek yang harus dihindari dalam *fraud*.
- Internal audit selalu dijadwalkan oleh HCD untuk memberikan materi pelatihan kepada pegawai baru dan pegawai existing terkait dengan sosialisasi dan *awareness Internal Control (COSO Framework)*. Selain itu kepada para pegawai baru khususnya yang bekerja pada unit kerja yang berisiko tinggi munculnya *fraud*, IAD selalu dilibatkan untuk memberikan materi terkait aspek-aspek control dalam menghindari *fraud*.
- Pengiriman *Email Blasting* terkait WBS BTN kepada seluruh personil BTN.
- Pemasangan Pengumuman (Poster) WBS pada 850 *outlet* dan kantor BTN.
- Deklarasi anti *fraud statement (Zero Fraud Tolerance)* yang tertuang dalam Pakta Integritas telah ditandatangani secara bertahap mulai tanggal 24 November 2012.
- *Code of Conduct* telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai terutama melalui proses pendidikan dan pelatihan serta pada saat internalisasi budaya kerja.
- Pada periode Oktober – November 2015 telah dilakukan Sosialisasi Anti *Fraud Awareness* yang diikuti dengan penanda tanganan Anti *Fraud Statement* pada personil-personil unit bisnis dan *supporting* di 6 KC (KC Cikarang, KC & KCS Makassar, KC Manado, KC & KCS Palembang).
- Sosialisasi Penerapan Pengendalian Gratifikasi ke seluruh divisi dan Regional *Office*.
- Terhadap pelaksanaan penerapan Anti *Fraud* tersebut telah dilaporkan kepada OJK per semester.

Disamping itu, untuk menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap maka Perseroan mengimplementasikan sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja.

Sebagai pedoman dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi, Bank menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi Nomor 45/DIR/COMP/2015.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. • Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 20

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan *vendor* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja *vendor*, rekam jejak *vendor*.

Setiap calon *vendor* dapat dimasukkan ke dalam Daftar Rekanan Bank atau Rekam Jejak Bank dengan memenuhi kualifikasi antara lain:

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia.
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Jasa sesuai bidangnya;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir memperoleh pekerjaan menyediakan Barang dan/atau Jasa baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta sesuai bidang pengadaannya;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- Tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) Perseroan atau BUMN lain;
- Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

Peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada *vendor* melalui rapat koordinasi, *monitoring* dan evaluasi kinerja *vendor*.

Pelaksanaan kebijakan seleksi *vendor* dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai database *vendor* dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/seleksi langsung.

Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur *Standar Operating Procedure* (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan *vendor*. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 21

Perseroan telah memiliki Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Secara umum, pemenuhan hak-hak Kreditur sebagai berikut

- Perseroan memastikan bahwa pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu;
- Perseroan menyampaikan informasi laporan keuangan kepada kreditur atau memastikan bahwa informasi laporan keuangan dapat diakses oleh kreditur melalui *website* Perseroan dan media lainnya seperti media massa dan penyampaian langsung kepada Kreditur;
- Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian pinjaman terpenuhi.

Pada periode 2015, Kreditur Perseroan terdiri dari 2 dengan penjelasan sebagai berikut.

- Kreditur Pinjaman Bilateral yang intinya memiliki hak-hak sebagai berikut.
 - a. Menerima pelunasan Pokok dan/atau pembayaran Bunga pinjaman dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Pinjaman dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - b. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Pinjaman dan/atau pembayaran Bunga Pinjaman, maka Kreditur berhak mengenakan denda keterlambatan yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh pinjaman oleh Perseroan kepada Kreditur, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c. Meminta dokumen-dokumen dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan usaha dan keadaan keuangan Perseroan, kecuali Perseroan telah terikat dengan Perjanjian Kerahasiaan dengan pihak lainnya atau tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kedudukan Perseroan sebagai Bank Umum.
 - d. Meminta keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, dan Perseroan wajib memberikan kesempatan pada Kreditur untuk memeriksa pembukuan Perseroan.
- Kreditur Obligasi yang memiliki hak-hak sebagai berikut.
 - a. Menerima pelunasan Pokok dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
 - b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
 - c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
 - e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut.
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; atau
 - iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 22

Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan *Whistleblowing System* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran No 21/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal *Standard Operating Procedure Whistle Blowing System* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan *Whistleblowing System* dimaksud pada periode 2015 diuraikan pada bagian *Whistleblowing System* Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi OJK
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.
V	Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI		
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK

Penjelasan Penerapan di Perseroan

Pada intinya Perseroan akan *comply* terhadap Prinsip 7 dan Rekomendasi 23

Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No. 03/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Struktur Remunerasi Direksi Laporan Tahunan ini. Peraturan Direksi tersebut merupakan ratifikasi dari Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan BUMN. Selain itu, ketentuan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan diatur dalam POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan berlaku pada 1 Januari 2017 untuk Bank Buku III dan Buku IV.

Sejak tahun 2010, Perseroan sudah memiliki kebijakan mengenai insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian *Share Option* pada laporan tahunan ini. Pada periode 2015, kebijakan penerapan LTI (*long term incentive*) baik kepada Direksi maupun karyawan dalam proses penyusunan oleh Perseroan yang meliputi kajian analisis tentang penyesuaian ketentuan internal Bank terhadap ketentuan yang diatur oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan terkait mekanisme dan pelaksanaan LTI.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 8 dan Rekomendasi 24

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *Stakeholders* melalui media teknologi informasi, selain *website* Perseroan. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pelayanan dan *update* kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu *YouTube* (dengan alamat: *officialbankBTN*), *Facebook* (dengan alamat: *socialmedia@BTN.co.id*), *Twitter* (dengan alamat: *socialmedia@BTN.co.id*), *Instagram* (dengan alamat: *officialbankBTN*) dan *LinkedIn* (dengan alamat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk).

Perseroan juga memberikan *update* informasi kepada pemegang saham melalui *email*, *conference call* dan TV Pasar Modal IBCM Channel Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan *site visit* oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, *Non-Deal Roadshow*, *one-on-one meeting*, *Analyst Meeting Public Expose*.

Perseroan *comply* terhadap Prinsip 8 dan Rekomendasi 25

Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEL. Pada Laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.

GCG Assessment

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG Assessment yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *Third Party Assessment* dan *Self Assessment* sesuai ketentuan BI/OJK, sebagai berikut.

Third Party Assessment

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *Third Party Assessment* yang dimaksudkan untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan. Pada periode 2015, Perseroan telah melakukan penilaian yang dinilai oleh *Indonesian Institute fo Corporate Directorship* (IICD) terhadap praktik *Corporate Governance* yang dinilai berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS). Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan serta *website* Perseroan. Adapun hasil penilaian dimaksud sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Skor ASEAN CG Scorecard

Prinsip	NILAI		
	2015	2014	2013
Hak-Hak Pemegang Saham	7,60	4,40	4
Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	10,00	9,71	7,94
Peran Pemangku Kepentingan	8,57	10	6,67
Pengungkapan dan Transparansi	22,50	18,75	16,67
Tanggung Jawab Dewan Komisaris	34,59	28,80	24,74
Bonus	9	7	8
Penalti	0	0	0
SKOR TOTAL	92,27	78,66	68,02

Dari tabel terlihat bahwa skor penilaian tahun 2015 adalah 92,27. IICD menjelaskan bahwa secara *overall*, hasil penilaian Perseroan mendapatkan predikat *EXCELLENT* (>90) yang artinya perusahaan sudah mampu memenuhi standar *internasional* praktik GCG yang ditentukan OECD dan berada di atas skor rata-rata 100 perusahaan terbuka dan emiten dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia.

Hasil penilaian ASEAN CG Scorecard pada 2015 tersebut mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Improved ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015* yang merupakan satu-satunya Bank BUMN yang mendapatkan penghargaan di tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) di Philipina. Selain itu, juga mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Financial 2015* dan *Top 10 Public Listed Companies* yang diselenggarakan oleh IICD di Jakarta.

GCG Assessment

Selain melakukan *assessment* menggunakan parameter ASEAN CG Scorecard, Perseroan juga melaksanakan beberapa *Third Party Assessment* yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Indonesia Good Corporate Governance Award 2015* yang diselenggarakan oleh IPMI *International Business School* dan *League of American Communication Professionals* (LACP) yang berkedudukan di Amerika Serikat, *event Annual Report Award* (ARA) yang diselenggarakan oleh OJK, BI, IAI, Departemen Keuangan, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Bursa Saham Indonesia dan Kementerian BUMN dan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Adapun hasil penilaian pada periode 2015, dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Penilaian CGPI mendapatkan skor 85,75 dengan predikat *The Most Trusted Company*;
2. Penilaian *Indonesia Good Corporate Governance Award 2015* mendapatkan nilai di atas 92 yang merupakan skor tertinggi;
3. Penilaian LACP mendapatkan skor 98 dan mendapatkan 5 (lima) penghargaan sekaligus, yaitu:
 - A. *Best Letter to Shareholders*;
 - B. *Gold Award for Excellence within its Industry on The Development of The Organization*;
 - C. *Top 10 Indonesian Annual Reports of 2014*;
 - D. *Top 50 Annual Reports in the Asia-Pacific Region*;
 - E. *Top 100 Annual Report Worldwide*.
4. Penilaian ARA mendapatkan skor 80,24 yang mendapatkan juara III kategori BUMN *Listed*.
5. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2015 yang mencerminkan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Berbagai hasil penilaian *Third Party Assessment* di atas, menunjukkan bahwa penerapan GCG di Perseroan menunjukkan hasil yang sangat baik dan selaras dengan peningkatan kinerja sebagaimana data-data di atas.

Self Assessment sesuai Ketentuan BI/OJK

Sesuai dengan Peraturan BI/OJK, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG. Hasil GCG *Self Assessment* selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

	Tahun 2015 (posisi 31 Desember 2015)	Tahun 2014 (posisi 31 Desember 2015)	Tahun 2013 (posisi 31 Desember 2015)
Nilai komposit	2	2	3

GCG Assessment

Uraian tentang hasil *assessment* 2015 dijelaskan sebagai berikut.

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG)	
Peringkat	Definisi Peringkat
Individual 2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. *Governance Structure*

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang di uraikan di atas maka dapat dirangkum berbagai hal, sebagai berikut.

Faktor-faktor Positif Aspek *Governance Structure Bank*

- Perseroan telah memiliki *governance structure* dan infrastruktur sesuai ketentuan .
- Kepala Unit Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Satuan kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit independen terhadap satuan kerja operasional dan telah menyediakan sumber daya berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Perseroan senantiasa menyempurnakan *governance structure* agar sesuai dengan ketentuan pihak eksternal/regulator dan kebutuhan bisnis.
- Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai ketentuan.

Faktor-faktor Negatif Aspek *Governance Structure Bank*

Pada posisi per 31 Desember 2015 terdapat 2 anggota Dewan Komisaris yang belum melaksanakan *Fit and Proper test* serta Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan RUPSLB tanggal 2 September 2015 mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 9 Oktober 2015.

Identifikasi Permasalahan dan *Root Causes*

Belum efektifnya dua orang Dewan Komisaris dikarenakan RUPSLB baru diselenggarakan pada bulan September 2015 dan adanya pengunduran diri Komisaris Utama pada bulan Oktober 2015.

Kekuatan

Perseroan senantiasa berupaya menyempurnakan *governance structure* dan *infrastructure* tata kelola agar sesuai dengan ketentuan pihak eksternal/regulator dan kebutuhan bisnis.

GCG Assessment

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan GCG)

Peringkat	Definisi Peringkat
-----------	--------------------

2. GOVERNANCE PROCESSES

Faktor-faktor Positif Aspek Governance Processes Bank

- Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi
- Direksi senantiasa berupaya menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini bisnis sesuai dengan regulasi
- Unit kerja Audit Internal senantiasa berusaha menjalankan fungsinya sesuai regulasi.
- Dalam penerapan fungsi audit ekstern, Bank senantiasa berusaha menjalankan fungsinya sesuai regulasi
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui tahapan proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan termasuk dalam pemenuhan kriteria ASEAN CG Scorecard dan kriteria ARA.

Faktor-faktor Negatif Aspek Governance Processes Bank

Masih terdapat beberapa hal yang perlu dan/atau dalam proses penyempurnaan terkait supervisi/monitoring aktivitas pengelolaan risiko operasional Bank sebagaimana temuan OJK.

Identifikasi Permasalahan dan Root Causes

Belum optimalnya pengelolaan risiko operasional.

Kekuatan

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan Direksi senantiasa berupaya menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini bisnis.
Bank senantiasa memperbaiki proses bisnis.

3. GOVERNANCE OUTCOME

Faktor-faktor Positif Aspek Governance Outcome Bank

- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan.
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, Peraturan Pasar Modal, Perpajakan, APU-PPT dan Peraturan Perundangan lainnya. Pada periode pelaporan, Bank mendapatkan penghargaan dari PPAK dalam pelaksanaan *Pilot Study Survey* Persepsi Publik Indonesia atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tahun 2015.
- Bank telah melaksanakan *assessment/audit* secara obyektif.
- Bank telah melaksanakan ketentuan terkait perlindungan konsumen.
- Kinerja Bank posisi per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebagai berikut:
- Total asset meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014 (*Unaudited*).
- Laba bersih meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014 (*Unaudited*).
- Kualitas kredit mengalami peningkatan signifikan (*Unaudited*).
- Rasio KPMM (setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) lebih tinggi signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan yaitu 8%, dan juga lebih tinggi signifikan dengan rasio KPMM minimal berdasarkan pendekatan *Top Down* yaitu 9 – 10% dari ATMR Bank sesuai PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Faktor-faktor Negatif Aspek Governance Outcome Bank

Masih terdapat denda, terutama terkait laporan Bank kepada BI/OJK.
Masih terdapat Fraud

Identifikasi Permasalahan dan Root Causes

Belum optimalnya supervisi/monitoring.

Kekuatan

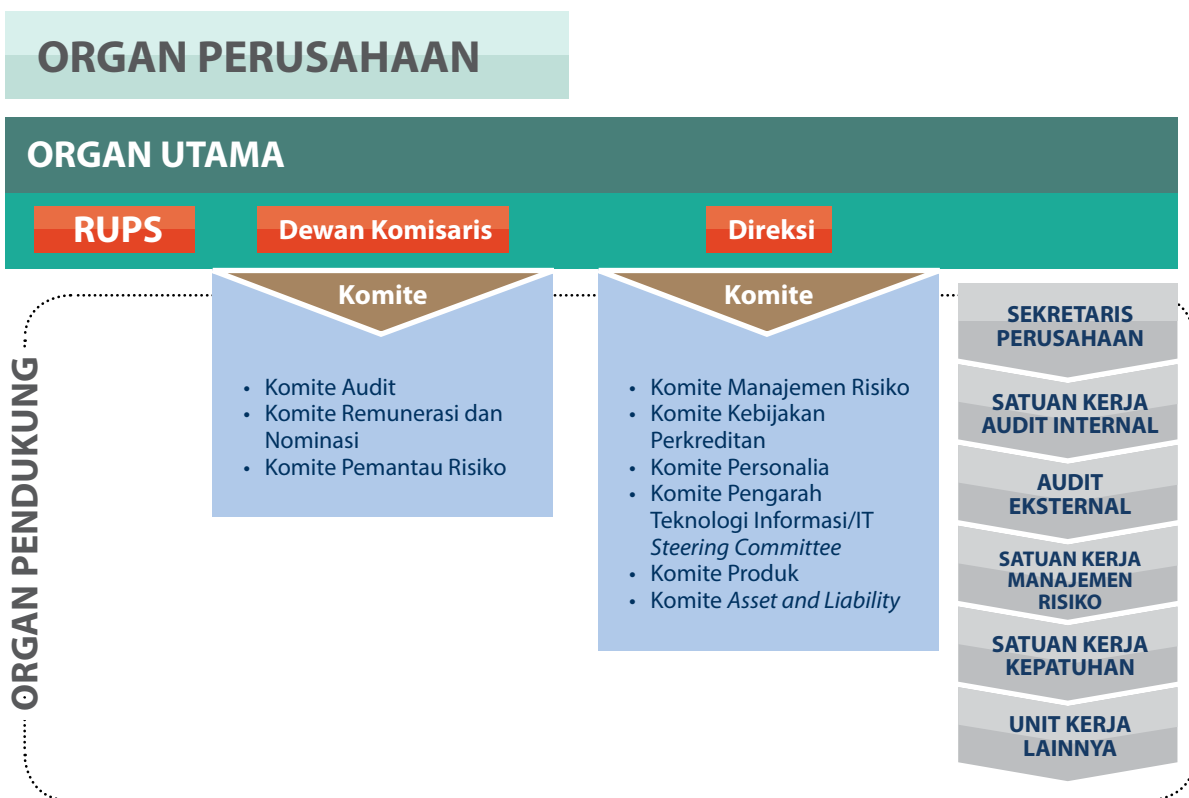
Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan GCG Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.
Bank senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian.
Bank senantiasa berusaha memenuhi dan memperbaiki aspek transparansi laporan dalam setiap laporan yang disampaikan kepada pihak ketiga. Pada periode pelaporan, Bank telah meraih penghargaan pada ajang ARA, LACP, ASEAN CG Scorecard dan GCG Award.

Struktur dan Mekanisme GCG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung sehingga manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang yaitu: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur organ perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut.



Struktur dan Mekanisme GCG

Dalam pelaksanaannya, organ Perseroan memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (*GCG Infrastruktur*). Tujuan antara lain:

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
2. Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan.
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Perseroan dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SKB-01/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Keputusan Direksi Nomor SKB-01/DIR-BTN/XII/2013 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 18 Desember 2013.
5. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SKB-03/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Keputusan Direksi Nomor SKB-03/DIR-BTN/XII/2013 tentang Penetapan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 18 Desember 2013.

Beberapa Kebijakan/Pedoman GCG yang utama telah dimiliki oleh Perseroan antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Nomor 51 tanggal 24 Maret 2015 terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 11 tanggal 8 Desember 2015 dengan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.0103-0986454 tanggal 8 Desember 2015;
2. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2015 tanggal 18 Juni 2015.
3. Piagam Komite Audit yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/DEKOM-BTN/2013 dan Keputusan Direksi Nomor SKB-02/DIR-BTN/2013 tentang Penetapan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) tanggal 18 Desember 2013.
6. Piagam Komite Asset dan Liabilitas yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No.2/PD/TRSD/2015 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) Bank tanggal 05 Februari 2015.
7. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 05/PD/ICTD/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 18/PD/CMO/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Piagam Komite Personalia yang telah disahkan berdasarkan PD No. 04/PD/HCD/2014 tentang Komite Personalia (*Human Capital Committee*).
9. Piagam Komite Produk yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No.20/PD/CMO/2011 tentang Komite Produk.
10. Piagam Komite Kebijakan Perkreditan yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 12/PD/CMLD/2015 tanggal 16 Oktober 2015 juncto PD Nomor 27/DIR/CMO/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Komite Kebijakan Perkreditan.

Struktur dan Mekanisme GCG

11. Piagam Komite Manajemen Risiko yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 8/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
12. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015.
13. Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang telah disahkan melalui Surat Edaran No. 45/DIR/CMPD/2015.
14. Piagam Audit *Intern* No. 03-SKB/DEKOM-DIR/ BTN/IAD/VI/2011 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 30 Juni 2011.
15. Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistle Blowing System* – WBS) dan Anti *Fraud* yang telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 55/DIR/CSD/2012.
16. Pedoman Kebijakan Manajemen yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 8/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
17. Pedoman Kepatuhan yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 15/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation* termasuk di dalamnya *Insider Trading*, melalui Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
19. Pedoman Akuntansi, melalui Peraturan Direksi No. 30/PD/FAD/ 2011 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk.
20. Pedoman Penyusunan RBB dan RKAP, Peraturan Direksi No. 05/PD/CMO/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
21. Pedoman lainnya dan berbagai *standard operating procedure* (SOP).

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/ pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham.
2. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
4. Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menetapkan auditor eksternal.
7. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
9. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB. Pada tahun 2015, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan menyelenggarakan 1 (satu) RUPSLB.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2015

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2015 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2015

Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diumumkan pada tanggal 13 Februari 2015, melalui iklan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web</i> Perseroan.	Diumumkan pada tanggal 2 Maret 2015, melalui situs <i>web</i> Perseroan.	RUPS tahunan dilaksanakan pada 24 Maret 2015 pada pukul 9.30 WB – Selesai, bertempat di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat.	Diumumkan pada tanggal 26 Maret 2015 melalui situs <i>Web</i> Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2015 adalah sebagai berikut.

Agenda RUPS Tahunan 2015

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Tahun buku 2014.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bank untuk Tahun buku 2014.
3. Penetapan Kantor Akuntan Laba Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun buku 2015.
4. Penetapan besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program *Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)*.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan pemberian Manfaat Pensiun Lain dan Kenaikan Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun Bank.
8. Perubahan susunan pengurus Bank.

RUPS Tahunan 2015 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

Rekap Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2015

Tabel Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2015

Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
Mardiasmo	Komisaris Utama Anggota Komite Pemantau Risiko	√		Sdr. Mardiasmo diangkat sebagai Komisioner OJK (<i>EX Officio</i> - Kementerian Keuangan) Per Tanggal 12 Januari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris sehingga statusnya sebagai Komisaris Utama berakhir terhitung sejak diangkatnya sebagai anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2015.
Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen	√		Pada saat RUPS Sdr. Sahala Lumban Gaol ditugaskan oleh Menteri BUMN untuk melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri yang disampaikan melalui Surat No. 31/KOM/BTN/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	√		
Maulana Ibrahim	Komisaris Independen Wakil Ketua Komite Audit Ketua Pemantau Risiko	√		

Rapat Umum Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
Agung Kuswandono	Komisaris Anggota Pemantau Risiko	√		
Herman Hidayat	Komisaris		√	Sdr. Herman Hidayat terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015 sehingga menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris
Maryono	Direktur Utama	√		
Irman Alvian Zahiruddin	Direktur	√		
Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√		
Hulmansyah	Direktur	√		
Rico Rizal Budidarmo	Direktur	√		
Iman Nugroho Soeko	Direktur	√		
Sahala Lumban Gaol	Ketua Komite Audit		√	Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 29/KOM/BTN/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Status Komisaris Independen Sahala Lumban Gaol bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi Komisaris Independen per 30 Oktober 2014 dengan demikian jabatan ybs adalah Komisaris bukan Komisaris Independen sehingga menghapuskan jabatannya sebagai Ketua Komite Audit. Pada saat RUPS Sdr. Sahala Lumban Gaol ditugaskan oleh Menteri BUMN untuk melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri yang disampaikan melalui Surat No. 31/KOM/BTN/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPS Tahunan 2015

Pada tanggal 24 Maret 2015, Bank BTN telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keputusan sebagai berikut.

Tabel Keputusan RUPS Tahunan 2015

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Bank 2014 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i> .	7.568.022.319 suara (99,97%)	0 suara (0,00%)	2.068.566 suara (0,03%)
Pertama	Mengesahkan Laporan tahun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i> .	7.568.022.319 suara (99,97%)	0 suara (0,00%)	2.068.566 suara (0,03%)
Kedua	Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Bank tahun buku 2014 sebesar Rp 1.115.591.707.713,- (satu triliun seratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Bank atau Rp 223.118.341.542,60 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua koma enam nol rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2014. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.892.473.366.170,40 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma empat nol rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	7.559.722.019 suara (99,86%)	8.350.300 suara (0,11%)	2.018.566 suara (0,03%)

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Ketiga	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya untuk KAP tersebut.	7.389.685.115 suara (97,62%)	44.399.447 suara (0,58%)	136.006.323 suara (1,80%)
Keempat	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2014 bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2014 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.	7.559.722.019 suara (99,86%)	8.350.300 suara (0,11%)	2.018.566 suara (0,03%)
Kelima	Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komiaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam rangka Pelaksanaan Program Hak Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Pegawai (<i>Management and Employee Stock Option Plan/MESOP</i>).	6.828.447.672 suara (90,20%)	739.624.647 suara (9,77%)	2.018.566 suara (0,03%)

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Keenam	<p>9. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>10. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>11. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan Hak Substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>	6.535.323.399 suara (86,33%)	798.807.869 suara (10,55%)	235.959.617 suara (3,12%)

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Ketujuh	12. Menyetujui kenaikan Manfaat Pensiun bagi para Pensiun, Janda/Duda atau Anak, yang telah berhak atas manfaat pensiun per 31 Desember 2014 tidak termasuk Peserta dengan status pensiun ditunda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.	6.615.370.671 suara (87,39%)	797.566.797 suara (10,53%)	157.153.417 suara (2,08%)
	13. Menyetujui untuk memberikan Manfaat lain 1 (satu) kali pada Tahun 2015 kepada peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat lain dibayarkan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).			
	14. Menyetujui pelaksanaan peningkatan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian dan/atau penambahan Pasal dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
	<p>15. Menyetujui kewenangan untuk memutuskan peningkatan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Pendiri atas dasar dan dengan memperhatikan usulan dari Direksi Pendiri, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut.</p> <p>A. Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain minimal sebesar 109% (seratus sembilan persen).</p> <p>B. Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan beban/kewajiban akuntansi PSAK No.24 bagi Pendiri.</p>			
	<p>16. Pelaksanaan kenaikan Manfaat Pensiun dan penetapan pemberian Manfaat Lain didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya juncto Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.</p>			
	<p>17. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Bank untuk melaksanakan perubahan peraturan Dana Pensiun Perseroan dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut dan hal-hal lain yang disyaratkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Kedelapan	<p>18. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Dewan Komisaris sebagai berikut.</p> <p>A. Sdr. Mardiasmo terhitung sejak diangkatnya sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2015.</p> <p>B. Sdr. Herman Hidayat terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015.</p>	6.621.141.871 suara (87,46%)	925.733.354 suara (12,23%)	23.215.660 suara (0,31%)
	<p>19. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai anggota Dewan Komisaris:</p> <p>A. Sdr. Maulana Ibrahim : Komisaris Independen</p> <p>B. Sdr. Sahala Lumban Gaol : Komisaris Independen</p> <p>Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.</p>			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
	<p>20. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:</p> <p>A. Sdr. Sukardi Rinakit: Komisaris Utama</p> <p>B. Sdr. Kamaruddin Sjam : Komisaris Independen</p> <p>C. Sdr. Lucky Fathul Aziz H.: Komisaris</p> <p>D. Sdri. Catherinawati Hadiman : Komisaris Independen</p> <p>E. Sdr. Arie Coerniadi: Komisaris Independen</p> <p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Berakhinya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan mereka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p>			
	<p>21. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:</p> <p>A. Hulmasyah: Direktur</p> <p>B. Rico Rizal Budidarmo : Direktur</p> <p>Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi.</p>			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
--------	-----------------	--	--	--

21. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi:

- A. Adi Setianto : Direktur
- B. Sis Apik Wijayanto : Direktur
- C. Sulis Usdoko : Direktur
- D. Oni Febriarto R.: Direktur

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan mereka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah menjadi sebagai berikut.

Dewan Komisaris

- A. Komisaris Utama : Sukardi Rinakit
- B. Komisaris Independen : Amanah Abdulkadir
- C. Komisaris : Agung Kuswandono
- D. Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam
- E. Komisaris : Lucky Fathul Aziz H.
- F. Komisaris Independen : Catherinawati Hadiman
- G. Komisaris Independen : Arie Coerniadi

Direksi

- A. Direktur Utama : Maryono
- B. Direktur : Irman Alvian Zahiruddin
- C. Direktur : Mansyur Syamsuri Nasution
- D. Direktur : Iman Nugroho Soeko
- E. Direktur : Adi Setianto
- F. Direktur : Sis Apik Wijayanto
- G. Direktur : Sulis Usdoko
- H. Direktur : Oni Febriarto R.

22. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlakum termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon-calon Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah dicatat dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. Nomor 18/Ket/Not/III/2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2015

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BTN di 2015 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2015

Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diumumkan pada tanggal 27 Juli 2015, melalui iklan di surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web</i> Bank.	Diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2015 melalui iklan di surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web</i> Bank.	RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada 2 September 2015 pada pukul 9.30 WB – Selesai, bertempat di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat.	Diumumkan pada tanggal 4 September 2015 melalui situs <i>web</i> Bank.

Agenda dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2015 adalah sebagai berikut.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Perubahan susunan Pengurus Bank
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Terkait Perubahan Nama Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2015

Tabel Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2015

Agenda	Keputusan RUPSLB	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
Pertama	<p>1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:</p> <p>A. Nyonya Amanah Abdulkadir sebagai Komisaris Independen</p> <p>B. Tuan Agung Kuswandoro sebagai Komisaris</p> <p>Pemberhentian yang bersangkutan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris Bank.</p>	6.792.501.728 suara (83,64%)	1.328.646.824 suara (16,36%)	NIHIL
	<p>2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Bank:</p> <p>A. Tuan Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen</p> <p>B. Nyonya Sumiyati sebagai Komisaris</p> <p>C. Tuan Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris</p> <p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejang pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Bank sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut.</p> <p>A. Komisaris Utama/Independen : Tuan Chandra M. Hamzah</p> <p>B. Komisaris Independen : Tuan Kamaruddin Sjam</p> <p>C. Komisaris Independen : Tuan Arie Coerniadi</p> <p>D. Komisaris Independen : Nyonya Catherinawati Hadiman</p> <p>E. Komisaris : Nyonya Sumiyati</p> <p>F. Komisaris : Tuan Fajar Harry Sampurno</p> <p>G. Komisaris : Tuan Lucky Fathul Aziz H.</p>			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPSLB	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
	3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Bank kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap calon Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut telah dicatat dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. Nomor 01/Ket/Not/IX/2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

Kehadiran RUPS Luar Biasa Tahun 2015

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

Tabel Kehadiran RUPS Luar Biasa Tahun 2015

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
1.	Sukardi Rinakit *)	Komisaris Utama		√
2.	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	√	
3.	Agung Kuswandono	Komisaris Anggota Komite Pemantau Risiko	√	
4.	Kamaruddin Sham	Komisaris Independen Anggota Komite Audit	√	
5.	Lucky Fathul Aziz H.	Komisaris	√	
6.	Catherinawati H.	Komisaris Independen Ketua Komite Audit	√	
7.	Arie Coerniadi	Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko	√	
8.	Maryono	Direktur Utama		√
9.	Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√	
10.	Irman A. Zahiruddin	Direktur	√	
11.	Iman Nugroho Soeko	Direktur	√	
12.	Adi Setianto	Direktur	√	
13.	Sis Apik Wijayanto	Direktur	√	
14.	Sulis Usdoko	Direktur	√	

Rapat Umum Pemegang Saham

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
15.	Oni Febriarto. R	Direktur	√	
16.	Sondang Gayatri	Anggota Komite Audit	√	
17.	Waldy Gutama	Anggota Komite Audit	√	
18.	Mohamad Helmy	Anggota Komite Pemantau Risiko	√	
19.	Rudolf Tulus Pandan-potan Sirait	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	
20.	Shalahuddin Haikal	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	
21.	Arie Pramuhanto	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	

*) Berdasarkan RUPS tanggal 24 Maret 2015 yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama namun tidak menjalankan keputusan RUPS dimaksud.

Pada tanggal 4 Juni 2015, Sdr. Sukardi Rinakit mengundurkan diri

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2014 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank BTN di 2014 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2014

Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diumumkan pada tanggal 24 Januari 2014 melalui iklan di surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web</i> Bank.	Diumumkan pada tanggal 10 Februari 2014 melalui iklan di surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web</i> Bank.	RUPS Tahunan dilaksanakan pada 25 Februari 2014 pada pukul 9.30 WB – Selesai, bertempat di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat.	Diumumkan pada tanggal 27 Februari 2014, melalui situs <i>web</i> Bank.

Agenda RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris tahun buku 2013, serta pengesahan Laporan Tahun termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan bina Lingkungan Bank tahun buku 2013.
2. Persetujuan penggunaan laba Bank untuk tahun buku 2013.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank.
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program MESOP dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi untuk menentukan dan mengubah persyaratan dan ketentuan program MESOP.
6. Perubahan Anggaran Dasar Bank.
7. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi berkelanjutan I Bank BTN tahap II tahun 2013.
8. Perubahan susunan pengurus Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham

Kehadiran RUPS Tahunan 2014

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

Tabel Kehadiran RUPS Tahunan 2014

Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir/ Keterangan
Mardiasmo	Komisaris Utama	√	
Dwijanti Tjahjaningsih	Komisaris Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	
Agung Kuswandono	Komisaris	√	
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen Ketua Komite Remunerasi	√	
Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen Ketua Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	
Maulana Ibrahim	Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko	√	
Maryono	Direktur Utama	√	
Irman Alvian Zahiruddin	Direktur	√	
Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√	

Keputusan RUPS Tahun 2014 dan Realisasinya

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2013 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang berafiliasi dengan Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-4816/PSS/2014 tanggal 10 Februari 2014.	7.583.910.970 suara (99,99%)	0 suara (0%)	750.704 suara (0,01%)	√		

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang berafiliasi dengan <i>Ernst and Young</i> sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-4777/PSS/2014 tanggal 10 Februari 2014. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2013 						

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
Kedua	<p>Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp1.562.161.484.805 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) (selanjutnya disebut Laba Bersih Perseroan) untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. Sebesar 30,00% (Tiga Puluh Persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp468.648.445.442 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2013 dan akan dibayarkan pada tanggal 07 April 2014 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2014.</p> <p>b. Sebesar 70,00% (Tujuh Puluh Persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.093.513.039.363 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	7.583.910.970 suara (99,99%)	0 suara (0%)	750.704 suara (0,01%)	√		

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
	<p>Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2013 untuk sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2014 untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan Perseroan.</p>						
Ketiga	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dimaksud.	7.582.332.040 suara (99,97%)	1.578.930 suara (0,02%)	1.578.930 suara (0,02%)	√		
Keempat	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2013, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014.	7.416.112.268 suara (97,77%)	550.402 suara (0,02%)	167.999.004 suara (2,21%)	√		
Kelima	Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Pelaksanaan Program Hak Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen & Pegawai (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP). Direksi untuk menentukan dan mengubah persyaratan dan ketentuan Program MESOP. 	6.958.238.193 suara (91,74%)	625.672.777 suara (8,25%)	750.704 suara (0,01%)	√		
Keenam	1. Merubah ketentuan pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan surat saham dengan menambahkan 1 (satu) ayat pada pasal 6.	6.626.917.872 suara (87,53%)	382.537.356 suara (5,05%)	560.711.751 suara (7,40%)	√		

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
	<p>2. Dalam hal ketentuan pada butir 1 (satu) di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari maka Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan pada RUPS Perseroan yang terdekat.</p> <p>3. Menyesuaikan ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dengan menambahkan 1 (satu) butir pada pasal 15 ayat (2) huruf b sebagai butir ke-12.</p> <p>4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari.</p>						
Ketujuh	Dalam Rapat telah dilaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013.				√		
Kedelapan	1. Membatalkan pengangkatan Sdr. Mas Guntur Dwi S. dan Sdr. Poernomo sebagai Direktur Perseroan yang telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2012 dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Evi Firmansyah dan Sdr. Saut Pardede sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.	6.498.690.552 suara (85,68%)	433.422.201 suara (5,72%)	652.548.921 suara (8,60%)		√	

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan %)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan %)	Abstain (Jumlah Suara dan %)	Telah Direalisasikan	Belum Direalisasikan	Keterangan (Alasan dalam hal Kep RUPS belum direalisasikan)
	<p>2. Mengusulkan pengangkatan:</p> <p>a. Sdr. Hulmansyah sebagai Direktur,</p> <p>b. Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur,</p> <p>c. Sdr. Sri Purwanto sebagai Direktur</p> <p>d. Sdr. Iman Nugroho Soeko sebagai Direktur</p> <p>Pengangkatan Direktur tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p>						

Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2014

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BTN di 2014 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2014

Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diumumkan pada tanggal 21 April 2014, di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily dalam Bahasa Indonesia, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web Bank</i> .	Diumumkan pada tanggal 5 Mei 2014 melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs <i>Web Bank</i> .	RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada 21 Mei 2014 pada pukul 9,30 WB – Selesai, bertempat di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat.	Diumumkan pada tanggal 4 September 2015 melalui situs <i>web Bank</i> .

Agenda RUPS Luar Biasa 2014

Agenda RUPS Luar Biasa tanggal 21 Mei 2014 adalah Perubahan susunan pengurusan Bank.

Kehadiran RUPS Luar Biasa 2014

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

Tabel Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2014

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1.	Mardiasmo	Komisaris Utama	√		
2.	Dwijanti Tjahjaningsih	Komisaris Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√		
3.	Agung Kuswandono	Komisaris Anggota Komite Pemantau Risiko	√		
4.	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	√		
5.	Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√		
6.	Maulana Ibrahim	Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Audit	√		
7.	Herman Hidayat	Komisaris	√		
8.	Maryono	Direktur Utama	√		
9.	Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√		
10.	Irman A. Zahiruddin	Direktur	√		
11.	Hulmansyah	Direktur	√		
12.	Iman Nugroho Soeko	Direktur	√		
13.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur	√		
14.	Sondang Gayatri	Anggota Komite Audit	√		
15.	Waldy Gutama	Anggota Komite Audit	√		
16.	Akhmadi	Anggota Komite Pemantau Risiko	√		

Rapat Umum Pemegang Saham

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
17.	Sri Widodo	Anggota Komite Pemantau Risiko	√		
18.	Rini Pudjiastuti	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi		√	
19.	Rudolf Tulus Pandanpotan Sirait	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi		√	
20.	Shalahuddin Haikal	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√		

Keputusan RUPS Luar Biasa 2014

Tabel Keputusan RUPS Luar Biasa 2014

Agenda	Keputusan RUPSLB	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
	1. Menyetujui dan memberhentikan dengan hormat Sdri. Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.			
Pertama	2. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Herman Hidayat sebagai Komisaris Perseroan. Pengangkatan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	6.591.929.205 (85,25%)	816.555.953 (10,56%)	324.041.112 (4,19%)
	3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut.			
	A. Komisaris Utama : Mardiasmo			
	B. Komisaris Independen* : Sahala Lumban Gaol	6.591.929.205 (85,25%)	816.555.953 (10,56%)	324.041.112 (4,19%)
	C. Komisaris Independen : Amanah Abdulkadir			
	D. Komisaris Independen : Maulana Ibrahim			
	E. Komisaris : Agung Kuswandono			
	F. Komisaris : Herman Hidayat			

Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda	Keputusan RUPSLB	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
Kedua	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.			

* Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Maret 2013, menyetujui mengalihkan jabatan Bapak Sahala Lumban Gaol menjadi Komisaris Independen Perseroan. Pengalihan jabatan dimaksud berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perseroan dikelola oleh Direksi sesuai dengan harapan Pemegang Saham.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan OJK, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, tugas pokok Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Bank serta melakukan tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS, yaitu dengan:
 - A. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - B. Mengawasi efektivitas penerapan GCG.
 - C. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
 - D. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - E. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - F. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - G. Memantau kepatuhan perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

Dewan Komisaris

- H. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- I. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.
2. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
 3. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
 4. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *Stakeholders*.
 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
 6. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen perkreditan yang sehat dan penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sebagai berikut.
 - A. Mengevaluasi dan mengawasi kebijakan yang ditetapkan Direksi apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
 - B. Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya untuk mengawasi bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit *intern*, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, melalui upaya:
 - Melakukan rapat dengan Direksi dan/atau *Internal Audit Division* guna membahas temuan-temuan audit.
 - Monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan.
 - Menugaskan anggota Komite Audit melakukan *exit meeting* di unit kerja dalam rangka pengawasan operasional
- Perseroan (antara lain namun tidak terbatas dalam manajemen perkreditan).
7. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan Implementasi GCG, terutama permasalahan:
 - A. Pelaksanaan *GCG Self Assessment* dengan melakukan analisis, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan *GCG Self Assessment*, sampai kepada memberikan persetujuan terhadap penetapan nilai komposit GCG.
 - B. Pelaksanaan strategi implementasi GCG.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Pengungkapan Board Manual)

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Bank BTN Nomor 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi Bank BTN Nomor SKB-01/DIR-BTN/2015.

Adapun isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- I Komposisi Dewan Komisaris
- II Kriteria Dewan Komisaris
- III Tugas Dewan Komisaris
- IV Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

- V Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
- VI Larangan
- VII Tanggung Jawab
- VIII Pembagian Tugas Dewan Komisaris
- IX Rapat Dewan Komisaris
- X Kepemimpinan
- XI Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- XII Organ Pendukung Dewan Komisaris
- XIII Program Induksi dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan sebagai berikut.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank.
3. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
8. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
9. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Bank.
10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
11. Melakukan tindakan Pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank.
 - c. Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - d. Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS.
 - e. Komisaris memperoleh honorarium yang besarnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh RUPS, disamping memperoleh honorarium Komisaris memperoleh fasilitas yang ditetapkan oleh Komisaris setelah berkonsultasi dengan pemegang saham Seri A Dwi Warna.

Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Melaporkan kepada RUPS mengenai kinerja Bank disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
4. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank.
5. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank.
6. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
7. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
8. Melaporkan kepada Bank, Lembaga Pengawas mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarga pada Bank dan Bank lain.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Perseroan.
 - b. Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan. Namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
 - c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit *intern* Perseroan.
 - d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit *intern* Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-perundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
 - f. Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris

- Memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- Memiliki pedoman dan tata kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
- Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuangan Bank.
- Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Mengungkapkan gaji dan tunjangan/fasilitas yang diterimanya untuk tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan) dalam laporan tahunan.
- Memberikan nasehat dan dukungan kepada Direksi dalam menerapkan GCG termasuk ketika merancang dan menindaklanjuti *action plan* GCG.
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang Pasar Modal.

Secara lengkap pengungkapan *Board Manual* dapat dilihat melalui *website* Perseroan dengan alamat www.BTN.co.id (menu *Investor Relation* – kebijakan tata kelola).

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Dewan Komisaris

Pada periode 2015, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Periode Efektif (Pada periode laporan)	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Chandra Hamzah	Mengundurkan diri	47 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Wakil ketua KPK bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 	Hukum Bisnis
Sukardi Rinakit	Mengundurkan diri	52 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ilmu Sosial dan Politik S2 <i>South East Asia Studies-National University of Singapore</i> S3 <i>Political Science, National University of Singapore.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi <i>Syndicate (SSS)</i> Peneliti, pembicara dan penulis di berbagai lembaga dan media nasional maupun internasional Staff peneliti di <i>Center for strategic and International Studies (CSIS)</i> Sekjen Perhimpunan Nasional Indonesia. 	Ilmu Politik
Mardiasmo	1 Januari 2015 – 11 Januari 2015	57 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi – Akuntansi dari UGM Paska Sarjana di bidang Ekonomi - Akuntansi PhD di bidang Akuntansi dari Birmingham, UK 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama di PT Jasa Raharja, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Staff Ahli di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia Wakil Menteri Keuangan RI, sejak. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 	Audit <i>Finance and Accounting Insurance</i> Keuangan Daerah

Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Periode Efektif (Pada periode laporan)	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Sahala Lumban Gaol	1 Januari – 24 Maret 2015	63 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di Institut Pertanian Bogor tahun 1977 • <i>Master of Arts (M.A)</i> dalam bidang <i>Economics</i> dari <i>The University of Illinois at Urbana – Champaign, USA</i> pada tahun 1988 • <i>Doctor of Philosophy (Ph.D)</i>, bidang <i>Economics</i>, dari <i>IOWA State University Ames, IA, USA</i>, pada tahun 1994 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Khusus Menteri BUMN di Kementerian BUMN • Tim Penilai Bakal Calon Anggota Direksi, Dekom, dan Dewan Pengawas BUMN • Koordinator MP3EI (Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) BUMN • Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis Energi dan Telekomunikasi di Kementerian BUMN; • Deputi Menteri Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi; • Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan; • Staf Ahli Kebijakan Publik, Kementerian BUMN; • Komisaris di PT PGN (Persero) Tbk • Komisaris PT Petro Kimia Gresik, • Komisaris PT Garuda Indonesia • Komisaris PT Tugu Insurance; • Komisaris Utama di PT Geo Dipa Energi dan PT PPA. 	<p><i>Corporate Finance Investment Pasar Modal Risk Management</i></p>
Maulana Ibrahim	1 Januari 2015 – 24 Maret 2015	67 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1977 • Pasca Sarjana jurusan Ekonomi di <i>Central Missouri State University, USA</i> pada tahun 1984 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota <i>Board of Trustee AAOIFI (Auditing and Accounting Organization of Islamic Financial Institution)</i> di Bahrain; • <i>Alternate Governor of World Bank (Ex Officio)</i>; • Deputi Gubernur Bank Indonesia; • Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia di Kuala Lumpur); • serta Komisaris Utama di PT Permodalan Nasional Madani • Komisaris Utama PT Bank Saudara Tbk dan Komisaris Utama Medco Agro Group. 	<p><i>Macroeconomy Accounting Banking and Monetary Policy Merger and Acquisition Risk Management Asset and Liability Management</i></p>

Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Periode Efektif (Pada periode laporan)	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Amanah Abdulkadir	1 Januari 2015 – 9 September 2015	54 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 Master of Art (M.A) dalam bidang Business Administration dari <i>University of Oregon</i> Eugene, OR, AS pada tahun 1990 Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang <i>Economic International</i> dari <i>Oklohoma State University</i>, Stillwater, OK, AS pada tahun 1998. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Informasi dan Risiko di Lembaga Penjamin Simpanan Konsultan <i>Technical Assistance: Social Security Reform and Economic Modeling Capacity Building</i> di Asian Development Bank, Komisaris Independen di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 	
Agung Kuswandono	1 Januari 2015 – 9 September 2015	48 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990 Master of Art (M.A) dalam bidang <i>Economics</i> dari <i>University of Colorado at Boulder</i>, Colorado USA pada tahun 1997 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Fasilitas Kepabeanaan di Kementerian Keuangan; Direktur Teknis Kepabeanaan di Kementerian Keuangan Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok di Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 Pernah terpilih sebagai Tokoh Anti KoRUPSi dari Majalah Tempo pada tahun 2007. 	<i>Customs Bea dan Cukai Kepabeanaan Risk management</i>
Herman Hidayat*)	Belum melaksanakan <i>fit and proper test</i> OJK	56 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1988 	<ul style="list-style-type: none"> Kasubdi Invetarisasi Kekayaan BUMN, Kasubdit Privatisasi pada Departemen Keuangan RI. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Departemen Keuangan RI. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN 	

Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Periode Efektif (Pada periode laporan)	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Arie Coerniadi	29 Juni 2015 – 31 Desember 2015	48 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Vice President</i> di NISP Sekuritas <i>Group Head Vice President</i> di Badan Penyehatan Perbankan Nasional <i>Vice President</i> di Kustodian Sentral Efek Indonesia <i>Chief Finance Officer</i> di Sarana Global Indonesia 	Keuangan
Kamaruddin Sjam	29 Juni 2015 – 31 Desember 2015	68 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta pada tahun 1997 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (2009-2014) Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2003-2007). Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) oleh BPKP dan LAN pada tahun 2002 	Audit Keuangan
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	27 Juli 2015 – 31 Desember 2015	59 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Jurusan Peternakan dari Universitas Padjajaran pada tahun 1980. <i>Master of Art (MA)</i> dalam bidang <i>Development Economics</i> dari Boston University, Massachusetts, USA pada tahun 1985. Pada tahun 1991, <i>Master of Science (MS)</i> dari Universitas Hasanudd, Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK (2012-2015). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung (2010-2012) Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007-2010). Pemimpin Bank Indonesia / Koordinator Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara 	Keuangan Ekonomi Makro Strategi Manajemen
Catherinawati Hadiman	29 Juni 2015 – 31 Desember 2015	50 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur PT Diaspora Saraswati Gemilang Direktur <i>Corporate and Commercial Banking</i> PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Vice CEO</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk 	Keuangan Perbankan

Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Periode Efektif (Pada periode laporan)	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Fajar Harry Sampurno	7 Desember 2015 – 31 Desember 2015	49 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doctor of Philosophy</i> dari <i>University of Iowa, USA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN. • Direktur Utama PT Dahana (Persero) pada tahun 2012-2015, • Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2011-2012. 	Strategi Manajemen Teknologi Informasi
Sumiyati	Belum melaksanakan <i>fit and proper test</i> (menunggu jadwal pelaksanaan OJK)	54 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master of Financial Management (M.F.M)</i> dari <i>Queensland University, Australia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (2015-sekarang). • Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2009-2015. 	Audit Keuangan Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan:

*) Sdr. Chandra Hamzah Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

**) Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

***) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris sangat beragam baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, maupun jenis kelamin sebagaimana kriteria ASEAN CG Scorecard

Dewan Komisaris

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2015, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibagi atas beberapa bidang tugas sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Periode	Nama	Bidang Tugas
Komisaris Utama	1 Januari- 13 Januari 2015	Mardiasmo	Membawahi Komite Pemantau Risiko
Komisaris Independen	1 Januari- 24 Maret 2015	Sahala Lumban Gaol	Membawahi Komite Audit Pengawasan dan pemberian nasihat bidang <i>Priority Banking</i> Pengawasan dan pemberian nasihat bidang Kredit Usaha Rakyat
Komisaris Independen	1 Januari- 2 September 2015	Amanah Abdulkadir	Membawahi Komite Remunerasi dan Nominasi Pengawasan dan pemberian nasihat bidang GCG dan Etika Bisnis Pengawasan dan pemberian nasihat bidang Sumber Daya Manusia
Komisaris Independen	1 Januari- 24 Maret 2015	Maulana Ibrahim	Membawahi Komite Pemantau Risiko Membawahi Komite Audit Pengawasan dan pemberian nasihat bidang Syariah
Komisaris	1 Januari- 2 September 2015	Agung Kuswandono	Membawahi Komite Pemantau Risiko
Komisaris	1 Januari- 24 Maret 2015	Herman Hidayat*)	-
Komisaris Utama/ Independen	-	Sukardi Rinakit**)	-
Komisaris Utama/ Independen	-	Chandra M. Hamzah***)	-
Komisaris Independen	24 Maret- 31 Desember 2015	Catherinawati H.	Membawahi Komite Audit Membawahi Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Independen	24 Maret- 31 Desember 2015	Kamaruddin Sjam	Membawahi Komite Audit
Komisaris	24 Maret- 31 Desember 2015	Lucky Fathul AH	Membawahi Komite Pemantau Risiko Membawahi Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Independen	24 Maret - 31 Desember	Arie Coerniadi	Membawahi Komite Pemantau Risiko
Komisaris	2 September- 31 Desember 2015	Fajar Harry S.	Pada periode pelaporan ini, belum ditetapkan pembedangannya karena menunggu hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK
Komisaris	2 September- 31 Desember 2015	Sumiyati	Pada periode pelaporan ini, belum ditetapkan pembedangannya karena menunggu hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK

Dewan Komisaris

Keterangan:

*) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

***) Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

****) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada periode 2015, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2015 – 24 Maret 2015 Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN.

Komposisi Dewan Komisaris per 1 Januari 2015 - 24 Maret 2015 sebagai berikut.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mardiasmo	Komisaris Utama	Indonesia	27 Maret 2013	28 Februari 2014
Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen	Indonesia	19 April 2012	16 Juni 2014
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen	Indonesia	28 Desember 2012	28 Juni 2013
Maulana Ibrahim	Komisaris Independen	Indonesia	27 Maret 2013	8 Desember 2013
Agung Kuswandono	Komisaris	Indonesia	28 Desember 2012	28 Juni 2013
Herman Hidayat	Komisaris	Indonesia	Mei 2014	Belum melaksanakan <i>fit and proper test</i> dari OJK

Selama Periode 24 Maret 2015 – 2 September 2015 Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris dan 4 (empat) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN.

Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Periode 24 Maret 2015 – 2 September 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Sukardi Rinakit	Komisaris Utama/ Independen*	Indonesia	24 Maret 2015	-
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen	Indonesia	28 Desember 2012	28 Juni 2013
Agung Kuswandono	Komisaris	Indonesia	28 Desember 2012	28 Juni 2013
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris	Indonesia	24 Maret 2015	27 Juli 2015
Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015

*Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

Periode 2 September 2015 – 31 Desember 2015 Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 2 September 2015 – 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen*	Indonesia	2 September 2015	-
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015
Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen	Indonesia	24 Maret 2015	29 Juni 2015
Sumiyati	Komisaris**	Indonesia	2 September 2015	<i>Subject to Fit and Proper Test</i>
Fajar Harry Sampurno	Komisaris	Indonesia	2 September 2015	7 Desember 2015
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris	Indonesia	24 Maret 2015	27 Juli 2015

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dewan Komisaris

Berdasarkan tabel di atas terlihat pada setiap periode, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia/OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Pelaksana	Hasil
Mardiasmo	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sahala Lumban Gaol	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Amanah Abdulkadir	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Maulana Ibrahim	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Agung Kuswandono	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Herman Hidayat*)	-	-
Sukardi Rinakit**)	-	-
Chandra M. Hamzah***)	-	-
Catherinawati H.	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Kamaruddin Sjam	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Lucky Fathul AH	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Arie Coerniadi	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Fajar Harry S.	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sumiyati****)	Belum melaksanakan <i>fit and proper test</i>	-

*) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

***) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

****) Chandra Hamzah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

*****) Belum melaksanakan *fit and proper test*. Sesuai rencana akan melaksanakan *fit and proper test* pada awal Januari 2016

Dewan Komisaris

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - e. Anggota Dewan Komisaris pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - f. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
6. Syarat lain berdasarkan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2015 berjumlah 6 orang anggota dengan 3 orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% dari Komisaris yang ada dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/OJK.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen adalah sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fainness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Perseroan, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank, yaitu: Sdri. Catherinawati H., Sdr. Kamaruddin Sjam, dan Sdr. Arie Coerniadi, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

Surat Pernyataan Independen

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat/tanggal lahir

Alamat domisili (Copy KTP/SIM terlampir)

Nomor telepon rumah

Jabatan

Nama perusahaan

Nomor telepon perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan Independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Independensi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan dan Keluarga Komisaris													
Komisaris Independen	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Sahala Lumban Gaol		√		√		√		√		√		√	
Amanah Abdulkadir		√		√		√		√		√		√	
Maulana Ibrahim		√		√		√		√		√		√	
Sukardi Rinakit*		√		√		√		√		√		√	
Chandra M. Hamzah**		√		√		√		√		√		√	
Catherinawati H.		√		√		√		√		√		√	
Kamaruddin Sjam		√		√		√		√		√		√	
Arie Coerniadi		√		√		√		√		√		√	

*Mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Ketentuan rangkap jabatan diatur dalam Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Mardiasmo	Komisaris Utama	1 Jan - 13 Jan 2015	Wakil Menteri	Kementerian Keuangan RI
Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen	1 Jan - 24 Mar 2015	Staf Khusus Menteri	Kementerian BUMN
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen	1 Jan - 2 sep 2015	Tidak Merangkap	Tidak Merangkap
Maulana Ibrahim	Komisaris Independen	1 Jan - 24 Mar 2015	Tidak Merangkap	Tidak Merangkap
Agung Kuswandono	Komisaris	1 Jan - 2 Sep 2015	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI
Herman Hidayat*	Komisaris	1 Jan - 24 Mar 2015	Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga	Kementerian BUMN
Sukardi Rinakit**	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-
Chandra M. Hamzah***	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-
Catherinawati H.	Komisaris Independen	24 Mar - 31 Des 2015	<i>Managing Director</i>	PT Diaspora Saraswati Gemilang
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	24 Mar - 31 Des 2015	Komisaris Utama	PT Lanang Bersatu
Lucky Fathul AH	Komisaris	24 Mar - 31 Des 2015	Tidak Merangkap	Tidak Merangkap
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	24 Maret - 31 Des	<i>Chief Finance Officer</i>	Sarana Global Indonesia
Fajar Harry S.	Komisaris	2 Sep - 31 Des 2015	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media	Kementerian BUMN
Sumiyati	Komisaris	2 Sep - 31 Des 2015	Kepala	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

*) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

**) Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

***) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dewan Komisaris

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis Pribadi. Atas Hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perseroan mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Per 31 Desember, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1. Bank BTN;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui table di bawah ini

Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (kepemilikan saham mencapai atau lebih dari 5%)

Nama	Kepemilikan Saham			
	Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Mardiasmo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sahala Lumban Gaol	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Amanah Abdulkadir	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maulana Ibrahim	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Agung Kuswandono	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Herman Hidayat*)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sukardi Rinakit**)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Chandra M. Hamzah***)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Catherinawati H.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Kamaruddin Sjam	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lucky Fathul AH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Arie Coerniadi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Fajar Harry S.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sumiyati	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

***) Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

****) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Rekomendasi/Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2015

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2015, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap :
 - a. Rencana Bisnis Bank 2015-2017
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan,
 - c. Evaluasi pencapaian Kinerja Bulanan
 - d. Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
- e. Peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Perseroan.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Memantau dan melaporkan pelaksanaan *Action plan* GCG
 - b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - c. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - d. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - e. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Dewan Komisaris

- f. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
- g. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RJP, RBB dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- h. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
5. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholders*.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
7. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi ;
8. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit *intern* Perseroan.
10. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit *Intern* Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
11. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
12. Melaksanakan *review* atas struktur organisasi
13. Melaksanakan *review* atas KPI Direksi
14. Melaksanakan *review* atas budaya kerja perusahaan
15. Merekomendasi penerapan ISO untuk Divisi *Compliance* dan Divisi *Risk Management*

Sesuai dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala, akan tetapi apabila perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. Jika hasil suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Rapat Dewan Komisaris Bank BTN dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut.

1. Rapat Dewan Komisaris, yaitu rapat *intern* Dewan Komisaris yang membahas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Rapat *Internal* Dewan Komisaris dijadwalkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, yaitu rapat bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh mayoritas Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan/memberikan arahan/petunjuk. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 1 bulan sekali dengan agenda utama adalah *Performance Review*.
3. Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan Direktorat/Divisi, yaitu rapat konsultasi yang membahas berbagai hal strategis yang difokuskan pada persoalan terkait Direktorat/Divisi secara lebih spesifik, dihadiri oleh Komisaris dan Direksi yang membidangi permasalahan yang dibahas.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 34 kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 19 kali serta Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan Direktorat/Divisi 9 kali yang sebagaimana yang dapat dilihat melalui tabel yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan Direktorat/Divisi		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Mardiasmo	Komisaris Utama	1 Jan -13 Jan 2015	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0
Sahala Lumban Gaol	Komisaris Independen	1 Jan - 24 Mar 2015	3	2	66,67%	6	5	83,33%	0	0	0
Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen	1 Jan - 2 sep 2015	22	15	68,18%	13	10	76,92%	4	3	75%
Maulana Ibrahim	Komisaris Independen	1 Jan - 24 Mar 2015	3	3	100%	6	6	100%	0	0	0
Agung Kuswandono	Komisaris	1 Jan - 2 Sep 2015	22	14	63,64%	13	9	69,23%	4	3	75%
Herman Hidayat*	Komisaris	1 Jan - 24 Mar 2015	2	0	0,00%	3	2	66,67%	0	0	0
Sukardi Rinakit**	Komisaris Utama/ Independen	Mengundurkan diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chandra M. Hamzah***	Komisaris Utama/ Independen	Mengundurkan diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catherinawati H.	Komisaris Independen	24 Mar - 31 Des 2015	31	24	77,42%	13	11	84,62%	9	6	66,67%
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	24 Mar - 31 Des 2015	31	28	90,32%	13	13	100%	9	7	77,78%
Lucky Fathul AH	Komisaris	24 Mar - 31 Des 2015	31	22	70,97%	13	12	92,31%	9	7	77,78%
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	24 Maret - 31 Des	31	28	90,32%	13	10	76,92%	9	7	77,78%
Fajar Harry S.	Komisaris	2 Sep - 31 Des 2015	12	6	50,00%	6	4	66,67%	5	0	0
Sumiyati	Komisaris	2 Sep - 31 Des 2015	12	4	33,33%	6	1	16,67%	5	3	60%

*) Pengangkatan Sdr. Herman Hidayat sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015, menggugurkan keanggotaannya sebagai Komisaris pada tanggal tersebut.

***)Sdr. Sukardi Rinakit telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat permohonan pengunduran diri yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2015

****) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dewan Komisaris

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
07 Januari 2015	Permasalahan Struktur Organisasi	Mardiasmo Sahala L. Gaol Maulana Ibrahim Amanah Abdulkadir
28 Januari 2015	Pembahasan kriteria <i>Corporate Secretary Division Head</i> (CSD) Pembahasan Surat Masuk	1. Sahala L. Gaol 2. Maulana Ibrahim 3. Agung Kuswandono 4. Amanah Abdulkadir
11 Maret 2015	1. Kenaikan Gaji Pegawai 2. Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris 3. Pembahasan Surat Pimpinan RUPS 4. Pembahasan Surat Masuk	1. Maulana Ibrahim 2. Agung Kuswandono 3. Amanah Abdulkadir
10 April 2015	1. Pembagian Anggota Komite 2. Struktur Organisasi	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H
16 April 2015	1. Pembahasan Surat Masuk 2. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2015	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H
23 April 2015	Penjelasan Mengenai Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam
30 April 2015	Penjelasan Lanjutan Mengenai Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris Pembahasan <i>Term Of Reference</i> (TOR) pemilihan KAP Struktur Organisasi <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A.H
06 Mei 2015	Pembahasan <i>Term Of Reference</i> (TOR) pemilihan KAP (Lanjutan) Pembahasan Surat Masuk	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Catherinawati H. 5. Kamaruddin Sjam 6. Lucky Fathul A.H
13 Mei 2015	Presentasi Komite pemantau Risiko Pembahasan Hasil <i>Exit Meeting</i> OJK tanggal 12 Mei 2015	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Catherinawati H. 5. Kamaruddin Sjam 6. Lucky Fathul A.H
20 Mei 2015	Pembahasan Laporan Triwulan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) Susunan Keanggotaan Komite	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul A. H
27 Mei 2015	<i>Interview</i> Calon Anggota Komite Pemantau Risiko	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A.H

Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
03 Juni 2015	Pembahasan Perkembangan Pengadaan Kantor Akuntan Publik Pembahasan Laporan Triwulan Dewan Komisaris kepada PSP	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A.H
10 Juni 2015	1. Rapat Internal Dewan Komisaris 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite 3. Pembahasan NPL	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A.H
17 Juni 2015	Pelaksanaan Tugas Komite	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A.H
01 Juli 2015	1. Pembahasan <i>Code of Conduct</i> 2. Pembahasan <i>Self Assessment</i> GCG 3. Pembahasan mengenai SDM 4. Pembahasan Surat Masuk	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A.H
08 Juli 2015	Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait SDM	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A.H
29 Juli 2015	1. Laporan Kesehatan Bank (RBBR) 2. Konsultasi Kredit Komersial	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Catherinawati H. 5. Kamaruddin Sjam
05 Agustus 2015	<i>Interview</i> Calon Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Catherinawati H. 5. Kamaruddin Sjam 6. Lucky Fathul A.H
10 Agustus 2015	Tanggapan atas Surat Kementerian BUMN Perihal Usulan Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H.
12 Agustus 2015	1. Pembahasan Surat Masuk 2. Koordinasi Organ Komisaris	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam
21 Agustus 2015	1. Pembahasan Pimpinan RUPSLB 2. Permasalahan Kredit di Kantor Cabang 3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada PSP dan OJK 4. <i>Review</i> Pengadaan Ulang KAP 5. Pembahasan <i>Key Performance Index</i> (KPI) Direksi	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Catherinawati H 4. Kamaruddin Sjam
02 September 2015	1. Permohonan Fasilitas KPR 2. Perubahan Susunan Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Komite 3. Laporan Kantor Cabang	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H
16 September 2015	1. Laporan Disiplin Kantor Cabang 2. Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam

Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
29 September 2015	1. Pembahasan Internal Dekom, 2. Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H 4. Fajar Harry S. 5. Sumiyati
07 Oktober 2015	1. Penyampaian Laporan Hasil Internal Audit Ke- pada Dewan Komisaris 2. Pembahasan Surat Masuk 3. Konsultasi kredit Komersial	1. Arie Coerniadi 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H 4. Sumiyati
15 Oktober 2015	Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H 5. Fajar Harry S.
21 Oktober 2015	Koordinasi Internal	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H
28 Oktober 2015	Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Lucky Fathul A. H
04 November 2015	1. Hasil <i>Exit Meeting</i> OJK dan Prudential <i>Banking</i> 2. Hasil <i>Exit Meeting</i> Putaran 1 sampai dengan 8 untuk Regional <i>Office</i> (RO1) Tahun 2015 3. Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H 5. Fajar Harry S.
11 November 2015	Presentasi Konsultan atas rencana Transformasi Bank BTN	1. Catherinawati H. 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H
23 November 2015	Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H 4. Fajar Harry S.
30 November 2015	1. Pembahasan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016-2018 2. Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H 5. Fajar Harry S.
16 Desember 2015	1. Pembahasan mengenai Surat Perjalanan Dinas (SPD) Anggota Komite Audit 2. Pembahasan Surat Masuk	1. Arie Coerniadi 2. Kamaruddin Sjam 3. Sumiyati
23 Desember 2015	1. Pembahasan Rumah Dinas Direksi 2. Pembahasan mengenai Persetujuan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) 3. Pembahasan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) 4. Pembahasan mengenai <i>Legal Opinion</i> TOR KAP 5. Pembahasan mengenai <i>Executive Summary</i> Lapo- ran Pengawasan 6. Pembahasan Tindak Lanjut Peraturan Direksi tentang Fungsi Kepatuhan	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Fajar Harry S. 5. Sumiyati

Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2015, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
7 Januari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Key Performance</i> Indikator (KPI) Direksi 2. Struktur Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mardiasmo 2. Sahala Lumban G. 3. Maulana Ibrahim 4. Agung Kuswandono 5. Amanah Abdulkadir 6. Herman Hidayat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Mansyur S. Nasution 3. Rico Rizal Budidarmo 4. Hulmansyah 5. Iman Nugroho Soeko
28 Januari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPI Direksi 2. Permasalahan Struktur Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahala Lumban G. 2. Maulana Ibrahim 3. Agung Kuswandono 4. Amanah Abdulkadir 5. Herman Hidayat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Irman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution 4. Rico Rizal Budidarmo 5. Iman Nugroho Soeko
4 Februari 2015	Kinerja Bank BTN Bulan Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahala Lumban G. 2. Maulana Ibrahim 3. Agung Kuswandono 4. Amanah Abdulkadir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Irman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution 4. Rico Rizal Budidarmo 5. Hulmansyah 6. Iman Nugroho Soeko
18 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Exit Meeting</i> Pembahasan Audit Keuangan oleh Akuntan Publik 2. Struktur Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahala Lumban G. 2. Maulana Ibrahim 3. Agung Kuswandono 4. Amanah Abdulkadir 5. Herman Hidayat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Mansyur S. Nasution 3. Rico Rizal Budidarmo 4. Iman Nugroho Soeko
11 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Direksi mengenai Dana Pendidikan Pegawai 2. Rencana Kenaikan Gaji Pegawai 3. Pelaksanaan RUPS 4. Penjelasan Direksi mengenai GCG <i>Action Plan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maulana Ibrahim 2. Agung Kuswandono 3. Amanah Abdulkadir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Irman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution 4. Rico Rizal Budidarmo 5. Hulmansyah 6. Iman Nugroho Soeko
18 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Dana Pensiun 2. Rencana Perubahan Anggaran Dasar 3. Perhitungan Gaji pegawai BTN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahala Lumban G. 2. Maulana Ibrahim 3. Amanah Abdulkadir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Mansyur S. Nasution 3. Iman Nugroho Soeko
10-Apr-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut RUPST Bank BTN 2. Struktur Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryono 2. Irman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution 4. Iman Nugroho Soeko 5. Adi Setianto 6. Oni Febriarto Rahardjo

Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
16 April 2015	Laporan Kinerja Bulan Maret 2015	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H	1. Mansyur S. Nasution 2. Iman Nugroho Soeko 3. Adi Setianto 4. Oni Febriarto Rahardjo 5. Sis Apik Wijayanto 6. Sulis Usdoko
23 April 2015	1. Penjelasan Mengenai Bisnis Model BTN 2. <i>Public Expose</i> Bank BTN 3. Struktur Organisasi Baru Bank BTN 4. Status Komisaris Utama Bank BTN	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam	1. Maryono 2. Iman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution
30 April 2015	<i>Action Plan</i> Perbaikan NPL	1. Agung Kuswandono 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H	1. Adi Setianto 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Sulis Usdoko
06 Mei 2015	1. Penjelasan terkait Sistem IT di BTN 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Arie Coerniadi 4. Catherinawati H. 5. Kamaruddin Sjam 6. Lucky Fathul A. H	1. Iman A. Zahiruddin 2. Iman Nugroho Soeko
17 Juni 2015	Laporan Kinerja Bulan April dan Mei 2015	1. Amanah Abdulkadir 2. Arie Coerniadi 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H	1. Maryono 2. Iman A. Zahiruddin 3. Mansyur S. Nasution 4. Iman Nugroho Soeko 5. Adi Setianto 6. Oni Febriarto Rahardjo 7. Sis Apik Wijayanto 8. Sulis Usdoko
08 Juli 2015	1. <i>Code Of Conduct</i> 2. Persiapan RUPSLB	1. Agung Kuswandono 2. Amanah Abdulkadir 3. Catherinawati H. 4. Kamaruddin Sjam 5. Lucky Fathul A. H	1. Maryono 2. Mansyur S. Nasution 3. Iman Nugroho Soeko 4. Sis Apik Wijayanto 5. Sulis Usdoko
07 Oktober 2015	1. Laporan Kinerja Bank BTN posisi Juli dan Agustus 2015 2. <i>Mapping</i> NPL Bank BTN 3. Permodalan Bank BTN terkat 1 Juta Rumah	1. Arie Coerniadi 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H 4. Sumiyati	1. Maryono 2. Iman A. Zahiruddin 3. Iman Nugroho Soeko 4. Adi Setianto 5. Oni Febriarto Rahardjo 6. Sis Apik Wijayanto
21 Oktober 2015	1. Laporan Kinerja September 2015 2. Laporan Publikasi Triwulan II 2015	1. Arie Coerniadi 2. Catherinawati H. 3. Kamaruddin Sjam 4. Lucky Fathul A. H 5. Fajar Harry S.	1. Maryono 2. Mansyur S. Nasution 3. Iman Nugroho Soeko 4. Adi Setianto
11 November 2015	Pembahasan RKAP 2016	1. Catherinawati H. 2. Kamaruddin Sjam 3. Lucky Fathul A. H	1. Maryono 2. Iman A. Zahiruddin 3. Iman Nugroho Soeko 4. Adi Setianto 5. Oni Febriarto Rahardjo 6. Sis Apik Wijayanto

Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
16 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Unit Usaha Syariah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Rencana Bisnis Bank (RBB) dan NPL 	<ol style="list-style-type: none"> Catherinawati H. Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H Fajar Harry S. 	<ol style="list-style-type: none"> Irman A. Zahiruddin Mansyur S. Nasution Oni Febriarto Rahardjo Sulis Usdoko Sis Apik Wijayanto
23 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> <i>Architecture and Strategic IT Planning</i> Tindak Lanjut Penyelesaian <i>Fraud</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H Fajar Harry S 	<ol style="list-style-type: none"> Adi Setianto
30 November 2015	Pembahasan Persetujuan RBB 2016-2018	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Catherinawati H. Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H Fajar Harry S 	<ol style="list-style-type: none"> Irman A. Zahiruddin Mansyur S. Nasution Adi Setianto Oni Febriarto Rahardjo Iman Nugroho Soeko Sulis Usdoko

Rapat Konsultasi Dewan Komisaris Dengan Direktorat

Sepanjang tahun 2015, agenda, tanggal dan peserta Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan Direktorat adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Konsultasi Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Peserta Rapat – Direksi
13 Mei 2015	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan mengenai SDM Kuorum kehadiran rapat 	<ol style="list-style-type: none"> Agung Kuswandono Amanah Abdulkadir Arie Coerniadi Catherinawati H. Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H. 	<ol style="list-style-type: none"> Mansyur S. Nasution Iman Nugroho Soeko
20 Mei 2015	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2015 dan Strategi Pencapaiannya Penjelasan Mengenai Manajemen Likuiditas BTN. 	<ol style="list-style-type: none"> Amanah Abdulkadir Arie Coerniadi Lucky Fathul A.H 	<ol style="list-style-type: none"> Maryono Iman Nugroho Soeko Adi Setianto
24 Juni 2015	<ol style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah Konsultasi Kredit Komersial RBB Bank BTN 	<ol style="list-style-type: none"> Agung Kuswandono Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H 	<ol style="list-style-type: none"> Irman A. Zahiruddin Mansyur S. Nasution Oni Febriarto Rahardjo
29 Juli 2015	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Code of Conduct Self Assessment</i> GCG Laporan Pertemuan Komisaris dengan Kementerian BUMN Laporan Kesehatan Bank (RBBR) Konsultasi Kredit Komersial 	<ol style="list-style-type: none"> Agung Kuswandono Amanah Abdulkadir Arie Coerniadi Catherinawati H. Kamaruddin Sjam 	<ol style="list-style-type: none"> Maryono Irman A. Zahiruddin Adi Setianto Oni Febriarto Rahardjo

Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Peserta Rapat – Direksi
22 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> RBBR Audit Khusus Pembahasan Surat Pengaduan Nasabah Laporan Kantor Cabang 	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Catherinawati H. Lucky Fathul A.H Sumiyati 	<ol style="list-style-type: none"> CMPD - Hertanta RMD – Wilson Arafat
15 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan <i>Four Eyes Principles</i> Strategi Penekanan NPL 	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Catherinawati H. Kamaruddin Sjam 	<ol style="list-style-type: none"> Adi Setianto Sulis Usdoko
28 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM) dan NPL Review Kinerja terkait <i>Asset Management Division (AMD)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Catherinawati H. Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H 	<ol style="list-style-type: none"> Sulis Usdoko
4 November 2015	<i>Transformation Plan</i> Bank BTN <i>Benchmarking Compansation</i> Karyawan BTN dengan Bank BUMN lain	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Catherinawati H. Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H Sumiyati 	<ol style="list-style-type: none"> Irman A. Zahiruddin
16 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Persetujuan Draft Peraturan Direksi tentang <i>Code of Conduct</i> Pembahasan Persetujuan Revisi Peraturan Divisi tentang Kepatuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> Arie Coerniadi Kamaruddin Sjam Lucky Fathul A. H Sumiyati 	<ol style="list-style-type: none"> Irman A. Zahiruddin

Keputusan Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Selama 2015, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain:

- Pembagian tugas menjadi ketua dan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Persetujuan pelaksanaan tugas Direksi ke Luar Negeri.
- Persetujuan remunerasi.
- Persetujuan *Board Manual* dan *Code of Conduct*.
- Persetujuan Peraturan Direksi tentang Fungsi Kepatuhan.
- Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Pemberian saran dan Persetujuan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016.
- Pemberian saran dan Persetujuan Rancangan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016 – 2018.

Dewan Komisaris

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program orientasi adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program induksi mengenai kondisi Bank secara umum.
2. Penanggung jawab program induksi adalah sekretaris Perseroan.
3. Program orientasi Dewan Komisaris meliputi:
 - A. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Bank.
 - B. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
 - C. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Bank, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Bank, risiko, pengendalian *internal* dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - D. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit *internal* dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian *internal* serta Komite Audit.
4. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Bank, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Divisi, pengkajian dokumen Bank atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada periode pelaporan ini, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2015 yang menyetujui pengangkatan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris Baru, yaitu Bapak Lucky Fathul Azis H, Bapak Kamaruddin Sjam, Bapak Arie Coerniadi dan Ibu Chaterinawati Hadiman.

Menindaklanjuti pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut maka Direksi melalui

Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 13 Mei 2015 dengan materi, sebagai berikut.

1. Visi, misi, sasaran strategis, strategi dan program transformasi Bisnis Bank BTN
2. Peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
3. Penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) serta etika bisnis
4. Pelaksanaan fungsi audit Bank BTN
5. Penerapan budaya perusahaan

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*, bahwa kebijakan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan baik didalam maupun di luar negeri diminta untuk melaksanakan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka *Knowledge sharing*.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kompetensi. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2015, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Dewan Komisaris

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Komisaris	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Catherinawati H.	24 Mar - 31 Des 2015	<ul style="list-style-type: none"> <i>Seminar National Conference IIA Indonesia 2015 "Heritage of Culture: Profession That Brings Value".</i> <i>The 24th World Congress of Saving and Retail Banks, The Statutory Meeting of WSBI dan The Workshop Making Small-Scale Saving Work for Everyone in a Digitized World</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Yogyakarta, 19-20 Agustus 2015 Washington D.C, USA, 23-27 September 2015 	<ul style="list-style-type: none"> <i>The Institute Of Internal Auditors Indonesia</i> WSBI
Kamaruddin Sjam	24 Mar - 31 Des 2015	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris. Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris. <i>ECIA European Conference Parice, France & On-Site Learning 2015.</i> <i>Seminar National Conference IIA Indonesia 2015 "Heritage of Culture: Profession That Brings Value".</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta, 25 April 2015 Jakarta, 09 Mei 2015 Paris, 18 – 27 September 2015 Yogyakarta, 19-20 Agustus 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan <i>The Institute Of Internal Auditors Indonesia</i> <i>The Institute Of Internal Auditors Indonesia</i>
Lucky Fathul AH	24 Mar - 31 Des 2015	<ul style="list-style-type: none"> <i>International Enterprise Risk Management Benchmarking in Spain.</i> <i>Masterclass Risk Governance-Bali dan Seminar Intrnasiona Bali ERM</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Madrid-Barcelona, Spain, 13-19 September 2015 Grand Nikko, Nusa Dua Bali, 9-11 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRMS Indonesia</i> <i>CRMS Indonesia</i>
Arie Coerniadi	24 Maret - 31 Des	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris <i>Digital Business Strategy: Leading the Next – Generation Enterprise</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta, 25 April 2015 Jakarta, 09 Mei 2015 Amerika Serikat, 16-18 November 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Colombia Business School
Fajar Harry S.	2 Sep - 31 Des 2015	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta, 10 Oktober 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Sumiyati	2 Sep - 31 Des 2015	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta, Oktober 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Dewan Komisaris

Sertifikasi Manajemen Risiko

Disamping program peningkatan kompetensi di atas, Dewan Komisaris juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2015, Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut.

1. Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen), telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 1 dan level 2 yang diselenggarakan oleh LSPP.
2. Arie Coerniadi (Komisaris Independen), telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 1 dan level 2 yang diselenggarakan oleh LSPP.
3. Sumiyati, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 1 yang diselenggarakan oleh LSPP.
4. Fajar Harry Sampurno, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 1 yang diselenggarakan oleh LSPP.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual*, sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara Individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Komisaris dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan undang yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2015 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Selain hal-hal di atas, khusus dalam pelaksanaan GCG, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG sesuai ketentuan BI/OJK dan *Third Party Assessment* dengan menggunakan *standard internasional* yaitu ASEAN CG Scorecard dengan penjelasan sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Penerapan GCG (*Self Assessment*) Dewan Komisaris Sesuai Ketentuan BI/OJK

BI/OJK secara khusus mengatur penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, termasuk pelaksanaan tugas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam ketentuan *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Adapun penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.
 - a. Dewan Komisaris menugaskan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk berkoordinasi dengan unit kerja GCG Bank dalam melaksanakan *Self Assessment*.
 - b. Komite Audit, Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan *Self Assessment* terkait parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugas Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan rekomendasi nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rekomendasi nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif di atas.
 - e. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi untuk menyetujui nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif di atas yang selanjutnya disampaikan kepada BI/OJK.
 - f. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - g. Apabila terdapat perbedaan penilaian maka yang digunakan adalah hasil penilaian BI/OJK.
2. Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG
Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 indikator.
3. Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG
Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari BI/OJK.
4. Hasil *Self Assessment* GCG
Adapun penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2014, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris mendapat nilai komposit 2.

Penilaian Kinerja Penerapan GCG Dewan Komisaris Sesuai ASEAN CG Scorecard

1. Prosedur pelaksanaan assessment kinerja Dewan Komisaris berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*.
 - a. IICD sebagai lembaga resmi yang ditunjuk OJK untuk melakukan assessment meminta Bank untuk menyampaikan Annual Report.
 - b. IICD melakukan assessment berdasarkan informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik GCG terkait kinerja Dewan Komisaris.
 - c. Adapun sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang digunakan untuk penilaian pada periode 2015 adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

- Laporan tahunan 2014; laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2014;
 - Pengumuman Panggilan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tahun 2015 untuk tahun buku 2014;
 - Pengumuman Hasil RUPST untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2014;
 - Anggaran Dasar Perusahaan;
 - Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan;
 - Website Perusahaan; serta
 - Informasi-informasi publik relevan lainnya.
- d. IICD menetapkan skor hasil penilaian yang kemudian disampaikan kepada OJK yang merupakan hasil penilaian pada level domestik.
- e. Hasil penilaian pada level domestik dimaksud (khusus untuk Top 5 Perusahaan di Indonesia) disampaikan kepada ACMF (*Asean Capital Market Forum*) pada level ASEAN untuk dilakukan penilaian silang antar anggota ASEAN.
- f. ACMF melakukan penilaian pleno untuk menentukan skor final untuk Top 50 ASEAN.
2. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris sesuai ASEAN CG *Scorecard* Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Incators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Dewan Komisaris Bank, terdiri dari lima parameter kunci/utama, dimana untuk masing-masing parameter terdiri atas beberapa parameter yakni sebagai berikut.
- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Kebijakan CG harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan
 - Visi dan Misi Perusahaan
 - b. Struktur Dewan Komisaris.
 - Kode Etik atau Kode Perilaku
 - Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
 - Komite Nominasi
 - Komite Remunerasi/Komite Kompensasi
 - Komite Audit
 - c. Proses Dewan Komisaris.
 - Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris
 - Akses Informasi
 - Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris
 - Perihal Mengenai Remunerasi
 - Audit *Internal*
 - Pengawasan Risiko (*Risk Oversight*)
 - d. Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris.
 - Komisaris Utama Perusahaan
 - Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris.
 - e. Kinerja Dewan Komisaris.
 - Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris
 - Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama
 - Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
 - Penilaian kinerja untuk anggota Dewan Komisaris
 - Penilaian Kinerja untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Pihak yang melakukan Assessment sesuai ASEAN CG *Scorecard* Assessment dilakukan melalui 2 tahapan, sebagai berikut.
- a. Penilaian pada level Domestik (di Indonesia) dilakukan oleh IICD yaitu lembaga independen yang ditunjuk secara resmi oleh OJK untuk mewakili Indonesia.
 - b. Penilaian pada level ASEAN dilakukan oleh ACMF yang merupakan lembaga beranggotakan 5 negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Vietnam.
4. Hasil *Self Assessment* sesuai ASEAN CG *Scorecard* Adapun penilaian dilakukan berdasarkan prinsip Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard* tahun 2014 mendapatkan skor 34,59% dari total bobot senilai 40%.

Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Remunerasi

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut.



Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut.

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan serta Tantiem/Insentif kerja, dimana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term insentif/LTI*).

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut.

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Untuk presentasi penetapan Remunerasi Dewan Komisaris adalah 50% dari Direktur Utama untuk Komisaris Utama dan 45 % dari Direktur Utama untuk anggota Komisaris.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan

Sesuai dengan ketentuan BI/OJK, paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

- Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain, adalah:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun	
	Orang	Jumlah (dalam juta Rupiah)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura*)	12***)	15.681
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya **) yang Dapat dimiliki	12***)	1.144
Tidak dapat dimiliki	12	751
TOTAL		17.676

Keterangan:

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

*) Gaji, Tantiem, Tunjangan cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi santunan Purna Jabatan

**) Komisaris mendapat fasilitas transportasi, komunikasi.

***) Dewan Komisaris sebanyak 14 orang, namun remunerasi diberikan untuk 12 anggota karena sebanyak 2 Komisaris Utama yang ditunjuk telah mengundurkan diri. Dewan Komisaris terdiri dari beberapa periode efektif dengan uraian sebagai berikut.

Dewan Komisaris

1. Periode efektif s.d Januari 2015 sebanyak 1 orang;
2. Periode efektif s.d Maret 2015 sebanyak 2 orang;
3. Periode efektif s.d September 2015 sebanyak 2 orang;
4. Periode efektif s.d Desember 2015 sebanyak 5 orang;
5. Komisaris yang belum efektif sebanyak 1 orang;
6. Komisaris yang tidak menjabat efektif sebanyak 1 orang

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	
Di atas Rp2 Miliar	3
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	5
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	1
Rp500 juta ke bawah	3

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengunduran diri Dewan Komisaris

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak terbebas dari setiap tanggung jawab yang melekat padanya hingga pengunduran dirinya diterima oleh RUPS.
2. Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut RUPS tidak terlaksana, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan Bank wajib untuk melaporkan hal tersebut dalam RUPS mendatang.

Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau AD Perseroan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
4. Dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Mengundurkan diri.
6. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga dapat dilakukan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.
7. Rencana pemberhentian ini wajib diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham (Seri A Dwiwarna) dalam rangka memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil oleh RUPS.

Di luar dari alasan pemberhentian di atas, jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Dinyatakan pailit atau berada dalam pengampunan (tidak lagi cakap untuk melakukan tindakan hukum) berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
4. Pengunduran dirinya efektif.
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, termasuk salah satunya karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.
6. Pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan putusan Otoritas/Regulator

Direksi

Direksi adalah Organ Utama Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Secara khusus, tugas Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan pelaksanaan RJP, RKAP, dan RBB termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mewujudkan pelaksanaan fungsi pengendalian *intern* yang meliputi audit *internal*, audit eksternal, manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.
5. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, seperti RJP, RKAP, dan RBB, Manajemen Informasi Sistem (MIS), suksesi/mutasi/promosi pejabat eksekutif, program pengembangan *human capital*, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.
7. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS.
8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit *Intern*, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Succession plan* dimana suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya *internal* yang potensial untuk memenuhi posisi pemimpin kunci.
10. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
11. Mengungkapkan kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang *human capital* kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
12. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
13. Mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.
14. Memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan mengatur tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara khusus, mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman *internal* Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Perseroan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direksi

Board Manual Direksi

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Bank BTN Nomor 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi Bank BTN Nomor SKB-01/DIR-BTN/2015.

Adapun isi dari *Board Manual* bagian Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- I Tugas Direksi
- II Wewenang Direksi
- III Kewajiban Direksi
- IV Larangan
- V Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
- VI Rapat Direksi
- VII Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris
- VIII Pengangkatan dan Masa Jabatan
- IX Anggota Direksi
- X Pengunduran Diri dan Pemberhentian
- XI Anggota Direksi
- XII Perangkapan Jabatan Direksi
- XIV Etika Jabatan
- XV Kepemimpinan
- Evaluasi Kinerja Direksi
- Organ Pendukung Direksi
- Program Induksi dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Selain beberapa hal terkait tata tertib kerja yang diatur di atas, beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

Wewenang Direksi

Wewenang Direksi adalah menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan, yang meliputi:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit, namun, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang diluar pokok dalam rangka

Direksi

Kewajiban Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
5. Menyiapkan RBB (yang telah disetujui Dewan Komisaris) dan menyampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
7. Membuat Draft Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
8. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta menyimpan dokumen keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan.
10. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
11. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
12. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
13. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri.
14. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.
15. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Bank, serta dokumen Perseroan lainnya.
16. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian *intern*, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
17. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
18. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
19. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank.
20. Menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dimana pedoman tersebut paling kurang memuat:
 - a. Landasan hukum
 - b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang
 - c. Nilai-nilai
 - d. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan dalam rapat dan risalah rapat; dan
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban
21. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
22. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti:

Direksi

- a. Membuat pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
 - b. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dicatatkan dalam Daftar Khusus.
 - c. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang saham seri A Dwiwarna.
 - d. Mengungkapkan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang harus dicatatkan dalam Daftar Khusus.
 - e. Tidak memberikan kausa umum kepada pihak lain mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - f. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 - g. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus (karena adanya keterbatasan keahlian), telah disadari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan.
23. Mengkonsultasikan kepada Dewan Komisaris terkait rencana penggunaan jasa konsultan yang bersifat strategis dan nilainya signifikan, yang kriterianya akan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Board Manual* ini.
 24. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 25. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
 26. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Memindahtangankan dan menghapuskan aktiva tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Own/BOO*) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
 - d. Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
 - e. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
 - g. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Bank yang dapat berdampak financial bagi Perseroan;
 - h. Membebankan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

Direksi

- i. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
27. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud.
28. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan pengalihan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - A. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - B. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
 Yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (*limit*) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.
29. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk:
 - a. Melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
 - b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
 - c. Melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
30. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Bank dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
31. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

Secara lengkap pengungkapan *Board Manual* dapat dilihat melalui *website* Perseroan dengan alamat www.BTN.co.id (menu *Investor Relation* - kebijakan tata kelola)

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.

Pada periode 2015, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama Direksi	Periode Efektif (Pada Periode Pelaporan)	Usia	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Maryono	1 Januari - 31 Desember 2015	59 Tahun	MBA dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI	Direktur Utama Bank Mutiara mulai November 2008 sampai dengan Desember 2012. Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1982 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 2008, pernah menjabat sebagai <i>Group Head Jakarta Network Group</i> di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2008), menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara Tbk. (2008 -2012) Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Regional WSBI (<i>World Saving Bank Institute</i>) Kawasan Asia Pasifik sejak tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan • Ekonomi • <i>Leadership</i> • Restrukturisasi Korporasi
Irman A. Zahiruddin*	1 Januari - 31 Desember 2015	52 Tahun	Master di Bidang <i>Finance and Investment</i> dari Golden Gate University, San Francisco.	Citibank sejak tahun 1989. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur <i>Consumer Group</i> PT Bank Permata Tbk (2002 – 2006), Direktur Eksekutif Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional) (2007), Direktur di GE Capital dan PT GE Astra Finance (1999 – 2002) .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) • <i>Marketing</i> • <i>Management Strategic</i>
Mansyur S. Nasution	1 Januari - 31 Desember 2015	56 Tahun	<i>Master of Science</i> pada bidang <i>Resources Economics</i>	EVP <i>Coordinator–Consumer Finance</i> , Bank Mandiri (2008 - 2012). Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1983 di Bank Bumi Daya sampai dengan tahun 1997. Dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menduduki jabatan beberapa <i>Group Head</i> di Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Resources Economic</i> • <i>Consumer Banking</i> • <i>Credit</i>

Direksi

Nama Direksi	Periode Efektif (Pada Periode Pelaporan)	Usia	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Iman Nugroho Soeko	1 Januari - 31 Desember 2015	60 Tahun	Gelar M.Soc. Sc dari <i>University of Birmingham</i> , Inggris	<i>Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Departement (2006)</i> , <i>Group Head IBCMS Group Bank Mandiri (2009 – 2010)</i> dan <i>Chief Executive Bank Mandiri (Europe) Ltd. (2010 – 2013)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Accounting and Corporate Finance Institutional Banking Treasury
Hulmansyah**	1 Januari - 23 Maret 2015				
Rico Rizal Budidarmo**	1 Januari - 23 Maret 2015				
Adi Setianto	8 Juni – 31 Desember 2015	54 Tahun	<i>Master of Business Administration (MBA)</i> dari <i>Drexel University</i>	Direktur Jaringan dan Layanan (2014-2015) serta Direktur <i>Treasury and Financial Institution</i> di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010 – 2014).	<ul style="list-style-type: none"> Information and Technology Credit Risk Operational Banking
Sis Apik Wijayanto	1 Juni – 31 Desember 2015	53 Tahun	Magister Manajemen dari Universitas Airlangga	Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta II di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2014 – 2015).	<ul style="list-style-type: none"> Consumer Banking Marketing and Service Excellent Network and Services
Sulis Usdoko	1 Juni – 31 Desember 2015	54 Tahun	Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya	Beliau memiliki pengalaman berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1986. Sebelumnya beliau menjabat sebagai <i>Retail Funding and Services Division Head (2013 – 2015)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Collection and Asset Management Retail Funding and Services Mortgage Banking
Oni Febriarto	19 Mei – 31 Desember 2015	44 Tahun	Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM	Beliau mulai berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997. Sebelumnya beliau menjabat sebagai <i>Small and Micro Lending Division Head (2013 – 2015)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Syariah Banking Credit Commercial Lending Mortgage Banking

Ket:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**) Diberhentikan dengan hormat sesuai hasil keputusan RUPST tanggal 24 Maret 2015

Direksi

Dengan demikian komposisi Direksi sangat beragam baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja dan usia.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi

1. Kebijakan kepengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Apabila tidak ada keputusan Direksi tersebut, maka Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan hadir, maka salah seorang Direktur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
2. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi maka Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi.
4. Pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas/Regulator.
5. Selain melakukan pembagian Tugas dan wewenang tersebut, Direksi melakukan pembagian tugas dan wewenang mengenai pembinaan dan supervise terhadap Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah yang ditetapkan dalam keputusan Direksi.
6. Tugas dan wewenang pembinaan dan supervisi setiap Anggota Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - A. Melakukan pembinaan dan supervisi atas Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah yang berada di bawah pembinaan dan supervisinya memberikan keputusan atas permasalahan yang diajukan oleh Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah yang berada di bawah pembinaan dan supervisinya.
 - B. Mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan kinerja Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - C. Menyampaikan hasil tindakan-tindakan dan langkah-langkah tersebut di atas kepada Rapat Direksi.
7. Apabila terdapat seorang anggota Direksi yang berhalangan, maka ditetapkan Anggota Direksi Pembina dan supervisi pengganti.
8. Pembagian tugas dan wewenang serta tata cara pembinaan dan supervisi ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Direksi

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Direksi Dibagi Atas Bidang Tugas Sebagai Berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama Direksi	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Maryono	Direktur Utama	1 Januari-31 Desember 2015	Melakukan supervisi terhadap <i>Internal Audit Division, Corporate Secretary Division</i> dan <i>Human Capital Division</i> .
Irman A. Zahiruddin*	Direktur Kepatuhan	1 Januari - 31 Desember 2015	<i>Managing Director Strategic, Compliance and Risk</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Strategic Innovation and Performance Division, Compliance Division, Risk Management Division</i> dan Kantor Cabang Syariah.
Mansyur S. Nasution	Direktur	1 Januari - 31 Desember 2015	<i>Managing Director Mortgage and Consumer Lending</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Non Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division, Subsidized Mortgage Division, Card Business Division</i> .
Iman Nugroho Soeko	Direktur	1 Januari - 31 Desember 2015	<i>Managing Director Finance and Treasury (CFO)</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Finance and Accounting Division, Treasury Division, Institutional Banking Division</i> .
Hulmansyah**	Direktur	1 Januari - 23 Maret 2015	<i>Managing Director Operation, Credit Risk (CIO)</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Commercial Lending Division, Small and Micro Lending Division, Sharia Division</i> dan Kantor Cabang di wilayah Regional Office 2
Rico Rizal Budidarmo**	Direktur Kepatuhan	1 Januari - 23 Maret 2015	<i>Managing Director Funding and Distribution</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Commercial Funding and Services Division, Retail Funding and Services Division, Service Quality, Network and Electronic Banking Division, Wealth Management Division, Regional Office</i> dan Kantor Cabang di wilayah Regional Office 1
Adi Setianto	Direktur	8 Juni - 31 Desember 2015	<i>Managing Director Information Technology, Operation and Credit Risk (CIO)</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Information and Communication Technology Division, Operational and Business Support Division, Procurement and General Services Division, Credit Risk Desk</i> dan Kantor Cabang di wilayah Regional Office 2.
Sis Apik Wijayanto	Direktur	1 Juni – 31 Desember 2015	<i>Managing Director Funding and Distribution</i> yang melakukan supervisi terhadap <i>Commercial Funding Division, Retail Funding and Services Division, Service Quality, Network and Electronic Banking Division, Wealth Management Division</i> , dan Regional Office.

Direksi

Nama Direksi	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Sulis Usdoko	Direktur	1 Juni – 31 Desember 2015	Managing Director Collection, Asset Management and Legal yang melakukan supervisi Consumer Collection and Remedial Division, Asset Management Division, Legal Division, dan Kantor Cabang di wilayah Regional Office 4
Oni Febriarto	Direktur	19 Mei – 31 Desember 2015	Managing Director Commercial Lending yang melakukan supervisi terhadap Commercial Lending Division, Small and medium Lending Division, Syariah Division dan Kantor Cabang di wilayah Regional Office 3

Keterangan:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**) Diberhentikan dengan hormat sesuai hasil keputusan RUPST tanggal 24 Maret 2015

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada periode 2015, jumlah dan komposisi Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut.

Selama Periode 1 Januari 2015 – 24 Maret 2015 Direksi berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN.

Pada periode 1 Januari 2015 - 24 Maret 2015, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Direksi

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
1	Maryono	Direktur Utama	Indonesia	28 Desember 2012	18 Maret 2013
2	Irman A. Zahiruddin	Direktur	Indonesia	28 Desember 2012	28 Desember 2012
3	Mansyur S. Nasution	Direktur	Indonesia	28 Desember 2012	18 Maret 2013
4	Hulmansyah	Direktur	Indonesia	25 Februari 2014	16 Juni 2014
5	Rico Rizal Budidarmo	Direktur	Indonesia	25 Februari 2014	16 Juni 2014
6	Iman Nugroho Soeko	Direktur	Indonesia	25 Februari 2014	16 Juni 2014

Direksi

Selama Periode 24 Maret 2015 – 31 Desember 2015 Direksi berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN.

Pada periode 24 Maret 2015 - 31 Desember 2015, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Maryono	Direktur Utama	Indonesia	28 Desember 2012	18 Maret 2013
Irman A. Zahiruddin*)	Direktur	Indonesia	28 Desember 2012	28 Desember 2012
Mansyur S. Nasution	Direktur	Indonesia	28 Desember 2012	18 Maret 2013
Iman Nugroho Soeko	Direktur	Indonesia	25 Februari 2014	16 Juni 2014
Adi Setianto	Direktur	Indonesia	24 Maret 2015	8 Juni 2015
Sis Apik Wijayanto	Direktur	Indonesia	24 Maret 2015	1 Juni 2015
Sulis Usdoko	Direktur	Indonesia	24 Maret 2015	1 Juni 2015
Oni Febriarto R	Direktur	Indonesia	24 Maret 2015	19 Mei 2015

Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dasar Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Maryono	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012
Irman A. Zahiruddin*	Direktur Kepatuhan	1 Januari - 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012
Mansyur S. Nasution	Direktur	1 Januari - 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012
Iman Nugroho Soeko	Direktur	1 Januari - 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 25 Februari 2014
Hulmansyah**	Direktur	1 Januari - 23 Maret 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 27 Februari 2014
Rico Rizal Budidarmo**	Direktur Kepatuhan	1 Januari - 23 Maret 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 27 Februari 2014
Adi Setianto	Direktur	8 Juni - 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015

Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sis Apik Wijayanto	Direktur	1 Juni – 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015
Sulis Usdoko	Direktur	1 Juni – 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015
Oni Febriarto	Direktur	19 Mei – 31 Desember 2015	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015

Keterangan:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**) Diberhentikan dengan hormat sesuai hasil keputusan RUPST tanggal 24 Maret 2015

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

Nama	Periode	Pelaksana	Hasil
Maryono	1 Jan - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Irman A. Zahiruddin	1 Jan - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Mansur S. Nasution	1 Jan - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Iman Nugroho Soeko	1 Jan - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Hulmansyah	1 Jan - 23 Maret 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Rico Rizal Budidarmo	1 Jan - 23 Maret 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Adi Setianto	8 Juni - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sis Apik Wijayanto	1 Juni - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sulis Usdoko	1 Juni - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Oni Febriarto	19 Mei - 31 Des 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

Direksi

Kriteria dan Independensi Direksi

Kriteria Direksi

Kriteria menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - A. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - B. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - C. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - D. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - E. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - F. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - G. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/

atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Direksi

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan dan Keluarga Komisaris														
Direksi	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Maryono		√		√		√		√		√		√		√
Irman A. Zahiruddin		√		√		√		√		√		√		√
Mansyur S. Nasution		√		√		√		√		√		√		√
Iman Nugroho Soeko		√		√		√		√		√		√		√
Hulmansyah		√		√		√		√		√		√		√
Rico Rizal Budidarmo		√		√		√		√		√		√		√
Adi Setianto		√		√		√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto		√		√		√		√		√		√		√
Sulis Usdoko		√		√		√		√		√		√		√
Oni Febriarto		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Direksi

Perseroan mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Per 31 Desember 2015, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1. Bank BTN;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini

Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Nama	Kepemilikan Saham			
	Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Maryono	98.500	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Irman Alvian Zahiruddin	4.922.650	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Mansyur Syamsuri Nasution	375.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Iman Nugroho Soeko	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Adi Setianto	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sis Apik Wijayanto	100.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sulis Usdoko	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Oni Febrianto Rahardjo	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), diantaranya sebagai berikut.

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus portal politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Selain jabatan rangkap sebagai mana dimaksud, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan swasta, kecuali:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN (seperti pada PT Bursa Efek Indonesia), Anggota Dewan Komisaris karena kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau Anggota Direksi yang masa jabatannya maksimal tersisa 3 (tiga) bulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperpanjang lagi atau Anggota Direksi yang akan diberhentikan, sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.
 - c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud, apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Direksi

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, sesuai ketentuan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Rangkap Jabatan Pada Direksi

Nama	Periode	Jabatan di Bank BTN	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Perusahaan/Instansi Lain
Maryono	1 Januari - 31 Desember 2015	Direktur Utama	-	-
Irman A. Zahiruddin	1 Januari - 31 Desember 2015	Direktur Kepatuhan	-	-
Mansyur S. Nasution	1 Januari - 31 Desember 2015	Direktur	-	-
Iman Nugroho Soeko	1 Januari - 31 Desember 2015	Direktur	-	-
Hulmansyah	1 Januari - 23 Maret 2015	Direktur	-	-
Rico Rizal Budidarmo	1 Januari - 23 Maret 2015	Direktur Kepatuhan	-	-
Adi Setianto	8 Juni - 31 Desember 2015	Direktur	-	-
Sis Apik Wijayanto	1 Juni - 31 Desember 2015	Direktur	-	-
Sulis Usdoko	1 Juni - 31 Desember 2015	Direktur	-	-
Oni Febriarto	19 Mei - 31 Desember 2015	Direktur	-	-

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2015

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tercermin dalam agenda rapat di atas. Pada periode 2015 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 100 (seratus) kali yang membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi, diantaranya:

1. Bidang Kepengurusan
 - Agunan yang diambil alih (AYDA)
 - *Digital Banking and Internet Banking*
 - Klasifikasi kantor
 - Kartu kredit Co-Brand BTN
 - Kendaraan dinas
 - Kartu kredit dan kartu prepaid BTN
 - Kerjasama penjaminan terkait perpanjangan KUR
 - Laporan kinerja Dapen per 31 Des 2014
 - Progres Program Sejuta Rumah
 - Permodalan
 - *Performance review*
 - Penyederhanaan proses persetujuan kredit komersial yang melampaui kewenangan Kantor Cabang
 - Persiapan *launching* Tabungan BTN Cermat-Laku Pandai di Palangkaraya
 - Pengadaan lelang pialang asuransi kredit
 - Program *non deal roadshow*
 - Program uang muka ringan 1%
 - Pembagian jasa produksi
 - Pemberian manfaat pensiun lain dan kenaikan manfaat pensiun
 - Relaksasi kebijakan kredit komersial
 - Rencana pelaksanaan RUPST 2015
 - Rencana peluncuran *website* BTN Properti
 - Rencana pengembangan dan evaluasi outlet
 - Rencana *launching* layanan Laku Pandai Bank BTN
 - Restrukturisasi kredit
 - Sistem Manajemen Kinerja
 - Supervisi Direksi
 - Struktur organisasi
 - Tagihan lisensi Microsoft
 - Tindak lanjut temuan OJK
 - Tabungan BTN Perumahan
 - Usulan kebijakan uang muka 1% untuk KPR FLPP
 - Usulan penggunaan laba

- Usulan penyempurnaan peraturan Bank terkait pemberian bantuan hukum
 - Visi Bank BTN
2. Bidang Manajemen Risiko
 - *Kajian Four Eyes Principle*
 - Laporan dan evaluasi kualitas kredit
 - OTS kredit

Rapat Direksi

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (*calendar of events*) Direksi dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Apabila dipandang perlu Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris.
3. Direksi dapat mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dipandang perlu dengan ketentuan bahwa Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Bank.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis atau sarana lainnya oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum dapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Dalam panggilan rapat harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah

Direksi

- dengan memperhatikan ketentuan dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
 10. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
 11. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.
 12. Apabila wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
 13. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
 14. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili seorang anggota Direksi lainnya.
 15. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.
 16. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 17. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
 18. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
 19. Suara blako (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.
 20. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 21. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh Anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
 22. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui.
 23. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
 24. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 25. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
 26. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
 27. Dalam hal Anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Direksi dapat menghadiri rapat melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.

Direksi

Sepanjang tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 100 (seratus) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi disajikan berdasarkan periode jabatan Direksi, sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			
		Periode	Jumlah Rapat Direksi	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran %
Maryono	Direktur Utama	1 Jan - 31 Des 2015	100	96	96%
Irman A. Zahiruddin*	Direktur Kepatuhan	1 Jan - 31 Des 2015	100	76	76%
Mansyur S. Nasution	Direktur	1 Jan - 31 Des 2015	100	90	90%
Iman Nugroho Soeko	Direktur	1 Jan - 31 Des 2015	100	94	94%
Hulmansyah**	Direktur	1 Jan - 23 Maret 2015	23	12	52%
Rico Rizal Budidarmo**	Direktur Kepatuhan	1 Jan - 23 Maret 2015	23	18	78%
Adi Setianto	Direktur	Efektif 8 Juni 2015	56	48	86%
Sis Apik Wijayanto	Direktur	Efektif 1 Juni 2015	56	42	75%
Sulis Usdoko	Direktur	Efektif 1 Juni 2015	56	50	89%
Oni Febriarto	Direktur	Efektif 19 Mei 2015	61	54	89%

Keterangan:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 27 Oktober 2015 sesuai surat OJK No. SR-202/D.03 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

***) Diberhentikan dengan hormat sesuai hasil keputusan RUPST tanggal 24 Maret 2015

Sementara frekuensi dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, termasuk agenda, tanggal dan peserta rapatnya dapat dilihat pada bagian Frekuensi dan Kehadiran Dewan Komisaris.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat

Sepanjang tahun 2015, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5 Januari	Key Performance Indicators Struktur Organisasi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
6 Januari	Evaluasi dan Perkembangan Kualitas Kredit Struktur Organisasi Kartu Kredit BTN Rencana Pengembangan dan Evaluasi Outlet Visi Bank BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
9 Januari	5 Usulan Kredit	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
13 Januari	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Kajian <i>Four Eyes Principle</i> Rencana Peluncuran <i>Website</i> BTN Properti Rencana Pengembangan dan Evaluasi Outlet	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
14 Januari	<i>Asset and Liability Committee (ALCO)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
14 Januari	Pengembangan <i>Information and Communi- cation Technology Division (ICTD)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
20 Januari	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit <i>Performance Review</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
27 Januari	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
29 Januari	Pembahasan tentang <i>Human Capital Divi- sion (HCD)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
3 Februari	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemeg- ang Saham Tahunan (RUPST) 2015 Tabungan BTN Perumahan Rencana Kerja 2015 Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
4 Februari	Laporan Kinerja Dana Pensiun (Dapen) BTN Per 31 Des 2015 Pemberian Manfaat Pensiun Lain dan Kenaikan Manfaat Pensiun Pembagian Jasa Produktif	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
10 Februari	<i>Asset and Liability Committee (ALCO)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
12 Februari	<i>Asset and Liability Committee (ALCO)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
17 Februari	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Restrukturisasi Kredit Kerjasama Penjaminan Terkait Perpanjangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Persetujuan Permohonan Kredit	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
19 Februari	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Iman Nugroho Soeko Rico Rizal Budidarmo
23 Februari	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Progress Penyusunan <i>Annual Report</i> 2014	Maryono Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
24 Februari	Usulan Kebijakan Uang Muka 1% Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Usulan Penggunaan Laba Kartu Kredit Co Brand BTN Usulan Penyempurnaan Peraturan Bank Terkait Pemberian Bantuan Hukum Klasifikasi Kantor	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
10 Maret	Laporan dan Evaluasi Kredit Struktur Organisasi Program Sejuta Rumah	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah
10 Maret	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
17 Maret	Kartu Kredit dan Kartu Prepaid BTN Tindak Lanjut Temuan OJK Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
17 Maret	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
17 Maret	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
19 Maret	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
24 Maret	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan <i>Write Off</i> (WO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Hulmansyah Rico Rizal Budidarmo
25 Maret	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
27 Maret	Supervisi Direksi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
31 Maret	<i>Indonesian Banking Expo</i> (IBEX) 2015 Rencana <i>Launching</i> Layanan Laku Pandai Bank BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
31 Maret	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
1 April	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto (sbg observer) Sulis Usdoko (sbg observer) Oni Febriarto Rahardjo (sbg observer)
1 April	Struktur Organisasi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
7 April	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
7 April	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
9 April	Program Sejuta Rumah Program Uang Muka Ringan 1% Relaksasi Kebijakan Kredit Komersial	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
21 April	Evaluasi Kinerja dan Operasional Program <i>Non Deal Roadshow</i> Pengadaan Lelang Pialang Asuransi Kredit Persiapan <i>Launching</i> Tabungan BTN Cermat – Laku Pandai Program Sejuta Rumah	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri nasution Iman Nugroho Soeko
24 April	Program Sejuta Rumah	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
27 April	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
27 April	Program Sejuta Rumah Struktur Organisasi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
12 Mei	Evaluasi Kinerja dan Operasional Penyederhanaan Proses Persetujuan Kredit Komersial	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13 Mei	Tagihan Lisensi Microsoft	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
19 Mei	<i>Performance Review</i>	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Oni Febriarto Rahardjo
19 Mei	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Adi Setianto (sbg observer) Sis Apik Wijayanto (sbg observer) Sulis Usdoko (sbg observer) Oni Febriarto Rahardjo
20 Mei	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Oni Febriarto Rahardjo
26 Mei	Internal Direksi Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Program Sejuta Rumah Permodalan	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Oni Febriarto Rahardjo
29 Mei	<i>Indonesian Banking Expo</i> (IBEX) 2015	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko
8 Juni	Rencana Pencapaian Target Keuangan Juni 2015	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
09 Juni	Progress Program Sejuta Rumah Kendaraan Dinas <i>Digital Banking</i> dan <i>Internet Banking</i>	1.Maryono 2.Irman Alvian Zahiruddin 3.Mansyur Syamsuri Nasution 4.Iman Nugroho Soeko
17 Juni	Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015-2017 Revisi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusa- haan (RKAP) 2015 Revisi <i>Update Program Sejuta Rumah</i> <i>Final Pricing Kupon Obligasi Penawaran</i> Umum Berkelanjutan (PUB) II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
19 Juni	Usulan Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
19 Juni	Mekanisme Penerapan <i>Four Eyes Principle</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
23 Juni	Evaluasi Kinerja dan Operasional Tindak Lanjut <i>Action Plan</i> Implementasi <i>ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard</i>	Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
23 Juni	<i>Asset and Liability Committee (ALCO)</i>	1.Irman Alvian Zahiruddin 2.Mansyur Syamsuri Nasution 3. Iman Nugroho Soeko 4. Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
7 Juli	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division (HCD)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
7 Juli	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>Manage Service Corebanking</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
14 Juli	Asuransi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
14 Juli	<i>Asset and Liability Committee (ALCO)</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo
23 Juli	Kajian <i>Rebranding</i> Bank BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
29 Juli	<i>Performance Review</i> Bulan Juni 2015 Rencana <i>Re-Branding</i> Bank BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3 Agustus	Kajian <i>Rebranding</i> Bank BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
11 Agustus	<i>Opening Meeting Self Assessment</i> KPKU Pembahasan Surat Dekom dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUP-SLB) Tahun 2015 Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
13 Agustus	<i>Closing Meeting</i> KPKU <i>Update Progress</i> Pelaksanaan BTN Property Expo	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
14 Agustus	Target Kredit Usulan Eksekusi <i>Management & Employee Stock Option</i> (MESOP) Tahap II KPKU	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo
14 Agustus	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
20 Agustus	<i>Performance Review</i>	Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko
19 Agustus	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko
21 Agustus	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
24 Agustus	Kewenangan Penyelesaian Kredit Konsumer Subsidi Selisih Bunga Usulan <i>Final Pricing</i> Transaksi Sekuritas KPR BTN Tahun 2015	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
25 Agustus	Usulan Permohonan Kredit Restrukturisasi Kredit <i>Manage Service Core Banking</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
26 Agustus	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo
1 September	Kerjasama BTN Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Analisa <i>Stress Test</i> Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Kondisi Keuangan BTN	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
8 September	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
14 September	Sekuritas KPR BTN Permasalahan Hukum Program Sejuta Rumah	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
15 September	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Program Sejuta Rumah Optimalisasi Pengembangan Jaringan Kartu Kredit BTN Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD) <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
15 September	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
15 September	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
29 September	Prognosa Laba, NPL, dan Pertumbuhan Kredit Bulan September 2015 Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Instrumen Penyelesaian Kredit dan Mitigasi Risiko Hukum Struktur Organisasi	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
6 Oktober	Forum Dialog dan <i>Brainstorming</i> RKAP Tahun 2016 Usulan Kegiatan Komunikasi Kepada Investor	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
12 Oktober	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
13 Oktober	Restrukturisasi Kredit <i>Performance Review</i> Bulan September 2015 <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
13 Oktober	<i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO)	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19 Oktober	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
20 Oktober	Tindak Lanjut Investor <i>Gathering</i> Proyeksi Laba Tahun 2015 dan Strategi <i>Map</i> BTN Tahun 2016 Paparan dan Observasi <i>Event</i> <i>Corporate – GCG Champion</i> Presentasi <i>Progress</i> Program Budaya Perusahaan	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
27 Oktober	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi BTN 2016 – 2018 <i>Human Capital Information System (HCIS)</i>	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko
27 Oktober	Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi BTN 2016 – 2018 <i>Human Capital Information System (HCIS)</i>	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko
10 November	Konvesi Dana FLPP dan Revaluasi Aktiva Tetap Anak Perusahaan Direktur Pengganti Usulan Kredit Klaim Asuransi Jiwa Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
17 November	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Rangkaian Acara Peresmian Pembukaan Kantor Wilayah IV	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
23 November	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit dan Revaluasi Aktiva Tetap	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo
24 November	<i>Performance Review</i>	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo
24 November	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1 Desember	<i>Survey Engagement</i> , Budaya Perusahaan dan HCIS	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko
1 Desember	Klaim Asuransi Jiwa Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
8 Desember	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
15 Desember	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
16 Desember	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko
16 Desember	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko
16 Desember	Evaluasi Kinerja dan Operasional	Maryono Irman Alvian Zahiruddin Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko
22 Desember	Rencana Pembentukan Anak Perusahaan	Maryono Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
22 Desember	Pembahasan tentang <i>Human Capital Division</i> (HCD)	Maryono Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
23 Desember	Manage Service Dengan Telkom	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
29 Desember	Pembahasan <i>Finance and Accounting Division</i> (FAD)	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo
29 Desember	Pembentukan Anak Perusahaan	Maryono Mansyur Syamsuri Nasution Iman Nugroho Soeko Adi Setianto Sis Apik Wijayanto Sulis Usdoko Oni Febriarto Rahardjo

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Ketentuan tentang program orientasi bagi Direksi baru meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan orientasi atas kondisi Bank secara umum.
2. Penanggung jawab program orientasi adalah Sekretaris Perusahaan.
3. Program Orientasi meliputi:
 - A. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
 - B. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Bank, *Competitive advantage*, risiko pengendalian *internal* dan masalah-masalah strategis lainnya yang dinilai perlu.
 - C. Penjelasan atas kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/ Divisi, ke fasilitas Bank, pengkajian dokumen Bank atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada periode pelaporan ini, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2015 yang menyetujui pengangkatan 4 (empat) anggota Direksi Baru, yaitu Bapak Adi Setianto, Sis Apik Wijayanto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto.

Menindaklanjuti pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut maka Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 13 Mei 2015 dengan materi, sebagai berikut.

1. *Overview* peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta *Risk Management*
3. Hasil audit Bank BTN
4. Penerapan budaya perusahaan
5. *Overview* bisnis Bank BTN

Direksi

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*, bahwa kebijakan Peningkatan kompetensi dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi sustainabilitas Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kompetensi bagi Direksi adalah sebagai berikut.

1. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.
3. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan baik di dalam maupun luar negeri diminta untuk mempresentasikan kepada Anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*).
4. Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan disampaikan kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2015, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pelatihan Direksi

Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Irman Alvian Zahiruddin	• Seminar Prospek Pembiayaan Properti 2015	• Jakarta, 17 Februari 2015, Hotel Le Meridien.	• Perbanas
	• <i>Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5</i>	• 20 Mei 2015	• LSPP, IBI, MMFEB UGM, GSIM-UI
	• <i>International Risk Management Refreshment Program for Executive Japan Class</i>	• 14 s/d 28 Mei 2015	• UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis International University of Japan.
	• Seminar Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	• Jakarta, 10 Juni 2015	• LPPI
	• Workshop Rencana Bisnis Bank sebagai Sarana Bank dalam mengendalikan Risiko Strategik	• Jakarta, 06 Juli 2015, Hotel Atlet Century Park.	• Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
	• Konferensi KPK: "Pencegahan KoRUPSi melalui Program Kepatuhan di Sektor Swasta Perspektif Internasional dan Indonesia.	• Jakarta, 04 Agustus 2015, Hotel Indonesia Kempinski.	• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Pelatihan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	• Jakarta, 02 November 2015	• Peak Pratama	
Mansyur Syamsuri Nasution	• Pelatihan <i>Interest Rate Risk In Banking Book</i> (IRRBB)	• Jakarta, 02 November 2015, Ruang Rapat Direksi Lt.21	• Peak Pratama

Direksi

Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Iman Nugroho Soeko	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asean Corporate Governance Conference & Award.</i> • <i>Re-drawing the ASEAN Map: "How Companies are Crafting New Strategies in South East Asia".</i> • Pelatihan <i>Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Manila, Philippines, 14 November 2015. • Jakarta, 03 Juni 2015, Shangri-la Hotel. • Jakarta, 02 November 2015, Ruang Rapat Direksi Lt. 21 	<ul style="list-style-type: none"> • Institute of Corporate Directors • Economist Corporate Network. • Peak Pratama
Adi Setianto	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 • FT-EY Global CFO Forum: "<i>Emerging Markets Summit 2015 Innovating Strategies and Practices in Era of Charge</i>". • Pelatihan <i>Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)</i>, 02 November 2015, Peak Pratama, Ruang rapat Direksi Lt 21 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, 14 April 2015 • 25 – 26 Mei 2015, The Fullerton Singapore • Jakarta, 02 November 2015, Ruang Rapat Direksi Lt. 21 	<ul style="list-style-type: none"> • LSPP • Ernst & Young • Peak Pratama
Sis Apik Wijayanto	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, 10 April 2015, Plaza Bapindo 	<ul style="list-style-type: none"> • LSPP
Sulis Usdoko	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, 11 April 2015, Plaza Bapindo 	<ul style="list-style-type: none"> • LSPP
Oni Febrianto Rahardjo	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5. • <i>Workshop Credit Management Strategy During The Slow-down Economic Growth</i>, 06 s/d 07 Agustus 2015 • <i>International Risk Management Refreshment Program for Executives.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, 06 April 2015 • Bali, 06 – 07 Agustus 2015, Discovery Kartika Plaza Hotel • Jakarta, 05 November 2015, Shangri-La Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> • BSMR • LPPI • UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sertifikasi Manajemen Risiko

Disamping program peningkatan kompetensi di atas, Direksi juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Pada periode 2015, Direksi yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut.

1. Sis Apik Wijayanto, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 5.
2. Adi Setianto, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 5.
3. Sulis Usdoko, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 5.
4. Oni Febriarto, telah lulus sertifikasi manajemen risiko level 5.

Sementara, Irman Alvian Zahiruddin mengikuti refreshment *management* risiko Perbankan level 5 di Jepang

Direksi

Penilaian Kinerja Direksi

1. Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan sejak tanggal pengangkatannya.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian terhadap sistem penilaian kinerja Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan rekomendasi tentang sistem penilaian kinerja Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi penilaian kinerja Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tentang penilaian kinerja Direksi dan kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi untuk dapat disampaikan dalam RUPS.
5. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Kriteria Assessment Kinerja Direksi

Tugas Direksi dikelompokkan berdasarkan kepemimpinan dan tiga kriteria yang ditetapkan oleh BI dan OJK tentang Penilaian kinerja Bank yaitu kinerja kepatuhan, kinerja kesehatan dan kinerja keuangan.

Berikut tugas Direksi dan pengelompokan nilainya:

Tabel Kriteria Assessment Kinerja Direksi

Tugas Direksi	Klasifikasi
Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Kepemimpinan
Mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kepemimpinan
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Kepemimpinan

Direksi

Tugas Direksi	Klasifikasi
<p>Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang <i>human capital</i> kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>Disamping itu dilakukan pembenahan terhadap <i>system human capital reward and punishment</i>, dengan focus kepada:</p> <p>Pemberian penghargaan berbasis kinerja dan kompetensi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi penuh terhadap perusahaan.</p> <p>Penyempurnaan ketentuan yang dapat memberikan penghargaan '<i>non financial</i>' kepada para karyawan yang berprestasi.</p> <p>Ketentuan mengenai <i>system punishment</i> yang objektif terhadap pegawai yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Program pembenahan <i>system reward dan punishment</i> melalui:</p> <p>Pemberian insentif bagi pegawai dan unit kerja yang berprestasi.</p> <p>Pengembangan ketentuan <i>system</i> remunerasi baik tunai maupun non tunai.</p> <p>Pengembangan <i>system</i> remunerasi bagi pengurus Bank yang berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Kementerian BUMN.</p> <p>Penyempurnaan ketentuan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.</p>	Kepemimpinan
Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, seperti RJP, RKAP, dan RBB, Manajemen Informasi Sistem (MIS), suk-sesi/mutasi/promosi pejabat eksekutif, program pengembangan <i>human capital</i> per-tanggungjawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.	Kepemimpinan
Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS	Kepemimpinan
<i>Succession plan</i> dimana suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya internal yang potensial untuk memenuhi posisi pemimpin kunci	Kepemimpinan
Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi	Pelaksanaan GCG
Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk upaya memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.	Pelaksanaan GCG
Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.	Pelaksanaan GCG
Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau dan pihak ketiga lainnya.	Pelaksanaan GCG
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Intern, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan GCG
Memperhatikan kepentingan <i>stakeholders</i> sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan GCG
Mewujudkan pelaksanaan fungsi pengendalian intern yang meliputi audit internal, audit eksternal, manajemen risiko dan kepatuhan Bank.	Pelaksanaan GCG
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.	Pelaksanaan GCG
Mewujudkan pelaksanaan RJP, RKAP, dan RBB termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.	Peningkatan Bisnis Bank dan Peningkatan Kesehatan Bank.

Selanjutnya untuk tiap-tiap kategori digunakan indikator dan setiap jabatan memiliki bobot persentase yang berbeda sesuai prioritas kerjanya. Sistem penilaian ini dirangkum sebagai *Key Performance Indicator* (KPI).

Direksi

Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan di dalam KPI

Tabel Key Performance Indicators

Perspectives	Key Performance Indicators
<i>Financial Perspective</i>	40%
F01. Sustainable Value to shareholder	ROA ROE BOPO LDR CIR Kapitalisasi pasar (Rp juta)
F02. Pertumbuhan pendanaan dengan fokus pada dana ketiga berbiaya murah	Persentase pertumbuhan DPK Rasio CASA
F03. Pertumbuhan dan keseimbangan komposisi kredit yang berkualitas dengan focus pada pembiayaan perumahan	Persentase pertumbuhan kredit % komposisi kredit perumahan % kualitas kredit (NPL)
F04. Peningkatan Pendapatan Selain Bunga	Rasio POL (<i>fee based</i>)/ Pendapatan Operasional
<i>Customer Perspective</i>	15%
C01. Terkemuka dalam Pembiayaan Perumahan	Δ Market Share KPR/KPA Jumlah Unit Realisasi KPR
C02. Terkemuka dalam Layanan Unggul	Peningkatan Skor Index Layanan Peningkatan Skor CSI
<i>Bussiness Perspective</i>	30%
B01. Peningkatan Kualitas Manajemen Strategis	% Peningkatan Skor KPKU BUMN
B02. Perbaikan Proses Bisnis untuk Meningkatkan Kualitas Operasional (<i>Operational Excellence</i>)	Implementasi 4 eyes principles dalam perbaikan proses bisnis kredit Implementasi KPR via web Peningkatan proses pengelolaan selling DPK ritel (<i>growth DPK ritel per funding people</i>) <i>Mean time to yesiloan</i> <i>Uptime</i> jaringan komunikasi Efektivitas pengadaan dan realisasi rencana investasi Akurasi pelaporan dan minimasi kesalahan operasional
B03. Pertumbuhan Anorganik	% Project penyertaan dan pertumbuhan anorganik
B04. Perbaikan Struktur Pendanaan dan Permodalan	Realisasi sekuritisasi, <i>wholesale funding</i> , dan sub debt
B05. Optimalisasi <i>Delivery Channel</i>	Jumlah transaksi <i>e channel</i> Produktivitas Outlet
B06. Optimalisasi <i>Collection</i> dan <i>Monitoring</i> Kredit	Pergeseran NPL ke PL <i>Recovery</i> % Peningkatan Komposisi Kol 1
B07. Meningkatkan GCG, <i>Risk Management</i> dan <i>Compliance</i>	Peringkat komposit RBBR GCG Index Penanganan permasalahan hukum
<i>Learning and Growth Perspective</i>	15%

<i>Perspectives</i>	<i>Key Performance Indicators</i>
LG1. Pembangunan Struktur Organisasi yang efektif	% Project pengembangan organisasi yang terimplementasi
LG2. <i>Human Capital</i>	<i>Culture Assessment Index</i>
Memperkuat <i>Corporate Culture</i>	Produktivitas Pegawai (Laba Per Pegawai)
Mengembangkan <i>Human Capital</i>	% Implementasi Modul HCMS/ <i>Human Capital Management System Incl. HCIS (Human Capital Information System)</i>
LG3. Mengoptimalkan <i>Information Technology</i>	% Project IT yang Terimplementasi Peningkatan Utilisasi

Seluruh KPI akan di *cascade* ke kinerja masing-masing Anggota Direksi.

Pihak Yang Melaksanakan *Assessment* Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan *assessment* kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI sebagaimana uraian di atas. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2015, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Selain hal-hal di atas, dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Sebagai BUMN, kinerja Direksi diukur oleh Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN) secara periodik setiap tahun dengan menggunakan metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang mengadopsi kriteria *Malcomm Balridge*
2. khusus dalam pelaksanaan GCG, penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG sesuai ketentuan BI/OJK dan *Third Party Assessment* dengan menggunakan *standard internasional* yaitu ASEAN CG Scorecard

Penilaian Kinerja Direksi Menggunakan Metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Kementerian BUMN secara khusus telah menetapkan penilaian kinerja Direksi BUMN dengan menggunakan metode KPKU melalui Surat nomor: S-153/S-MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

Adapun penjelasannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Prosedur Pelaksanaan *Assessment* KPKU adalah, sebagai berikut.
 - A. Kementerian BUMN membentuk Forum Ekselen BUMN (FEB) yang bertugas untuk melaksanakan *Assessment*.
 - B. Kementerian BUMN menyampaikan kepada Perseroan Tim FEB sebagai personil yang melaksanakan *Assessment* di Perseroan.
 - C. Direksi menunjuk unit kerja *Strategic Innovation and Performance Division* (SIPD) sebagai *Liason Officer* dan sekaligus mengkoordinir semua unit kerja untuk melaksanakan *assessment*.
 - D. Tim FEB melakukan *Assessment* dan membuat kesimpulan atau hasil *assessment*.
 - E. Tim FEB menyampaikan hasil *Assessment* kepada Kementerian BUMN untuk dapat disetujui.
 - F. Kementerian BUMN menetapkan hasil *Assessment*.
2. Kriteria *Assessment* KPKU adalah, sebagai berikut.
Kriteria *Assessment* terdiri atas 7 (tujuh) kategori yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Operasi dan Hasil.
3. Pihak yang melakukan *Assessment* KPKU adalah Tim FEB dan Kementerian BUMN.
4. Hasil *Assessment* KPKU

Direksi

Berdasarkan *Assessment* KPKU Bank BTN telah mengukur dan mengendalikan 500 indikator kinerja meliputi kinerja produk dan proses (155 indikator), kinerja fokus pelanggan (37 indikator), kinerja fokus tenaga kerja (122 indikator), kinerja kepemimpinan dan tata kelola (97 indikator) dan kinerja keuangan dan pasar (89 indikator); dengan hasil:

- A. 304 indikator (60,80%) level baik,
- B. 282 indikator (56,40%) trend benefisial,
- C. 72 indikator (14,40%) unggul dari pesaing/pembanding

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja BTN relatif menunjukkan hasil yang menggembirakan, meskipun masih perlu lebih banyak dibandingkan dengan kinerja pesaing/pembanding agar dapat memacu kinerja lebih baik, dan dievaluasi lebih baik guna meningkatkan kinerja.

Penilaian Kinerja Penerapan GCG (*Self Assessment*) Direksi Sesuai Ketentuan BI/OJK

BI/OJK secara khusus mengatur penilaian kinerja Direksi berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, termasuk pelaksanaan tugas lainnya yang meliputi parameter penanganan benturan kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan Fungsi Audit *Intern*, Penerapan Fungsi Audit Ekstern, Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian *Intern*, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*), Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan *Internal* serta Rencana Strategis Bank, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Adapun penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.
 - A. Direksi menugaskan *Compliance Division* (dhi. unit GCG) Perseroan dalam melaksanakan *Self Assessment*.
 - B. *Compliance Division* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka melaksanakan *Self Assessment*.
 - C. *Compliance Division* mengusulkan rekomendasi nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
 - D. Direksi menetapkan nilai Komposit, termasuk faktor positif dan negatif dalam pelaksanaan GCG.
 - E. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - F. Apabila terdapat perbedaan penilaian maka yang digunakan adalah hasil penilaian BI/OJK.
2. Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG
Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 16 indikator, *Governance Process* terdiri dari 14 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 10 indikator.
3. Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG
Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari BI/OJK.

4. Hasil *Self Assessment* GCG

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2014, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi mendapat nilai komposit 2.

Penilaian Kinerja Penerapan GCG Direksi Sesuai Asean CG Scorecard

1. Prosedur pelaksanaan assessment kinerja Direksi berdasarkan ASEAN CG Scorecard.
 - A. IICD sebagai lembaga resmi yang ditunjuk OJK untuk melakukan *assessment* meminta Bank untuk menyampaikan *Annual Report*.
 - B. IICD melakukan *assessment* berdasarkan informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik GCG terkait kinerja Direksi.
 - C. Adapun sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen dimaksud meliputi:
 - Laporan tahunan 2014; laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2014;
 - Pengumuman Panggilan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tahun 2015 untuk tahun buku 2014;
 - Pengumuman Hasil RUPST untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2014;
 - Anggaran Dasar Bank
 - Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan
 - *Website* Bank; serta
 - Informasi-informasi publik relevan lainnya.

D. IICD menetapkan skor hasil penilaian yang kemudian disampaikan kepada OJK yang merupakan hasil penilaian pada level domestik.

E. Hasil penilaian pada level domestik dimaksud (khusus untuk Top 5 Perusahaan di Indonesia) disampaikan kepada ACMF (*ASEAN Capital Market Forum*) pada level ASEAN untuk dilakukan penilaian silang antar anggota ASEAN.

F. ACMF melakukan penilaian pleno untuk menentukan skor final untuk Top 50 ASEAN.

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi sesuai ASEAN CG Scorecard Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi berdasarkan 4 (empat) prinsip. Prinsip Hak-hak Pemegang Saham terdiri dari 5 (lima) parameter, prinsip Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham terdiri dari 5 (lima) parameter, prinsip Peran Pemangku Kepentingan terdiri atas 5 (lima) parameter, dan prinsip Pengungkapan dan Transparansi terdiri atas 9 (sembilan) Parameter.
3. Pihak yang melakukan *Assessment* sesuai ASEAN CG Scorecard. *Assessment* dilakukan melalui 2 tahapan, sebagai berikut.
 - A. Penilaian pada level Domestik (di Indonesia) dilakukan oleh IICD yaitu lembaga independen yang ditunjuk secara resmi oleh OJK untuk mewakili Indonesia.
 - B. Penilaian pada level ASEAN dilakukan oleh ACMF yang merupakan lembaga beranggotakan 5 negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Vietnam.
4. Hasil *Self Assessment* sesuai ASEAN CG Scorecard. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan prinsip Hak-hak Pemegang Saham memperoleh Skor 7,60 dari total bobot nilai 10, prinsip Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham memperoleh Skor 10,00 dari total bobot nilai 15, prinsip Peran Pemangku Kepentingan

Direksi

memperoleh Skor 8,57 dari total bobot 10, serta prinsip Pengungkapan dan Transparansi memperoleh Skor 22,50 dari total bobot nilai 25.

Kebijakan Remunerasi

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan Remunerasi Direksi sebagaimana uraian pada bagian Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan

Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah: gaji dan bonus/tantiem
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain, adalah:

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun	
	Orang	Jumlah (dalam juta Rupiah)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura*)	10***)	37.216
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya **) yang: Dapat dimiliki	10***)	1.747
Tidak dapat dimiliki	10	1.987
TOTAL		40.950

Keterangan:

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

*) Gaji, Tantiem, Tunjangan cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi santunan Purna Jabatan

**) Direksi mendapat fasilitas transportasi, komunikasi, perumahan Komisaris mendapat fasilitas transportasi, komunikasi

***) Terdapat 2 dari 10 Direksi yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPST 2015 tanggal 24 Maret 2015

Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi sebagaimana uraian pada bagian indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

Jumlah Nominal Komponen Remunerasi Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi sesuai ketentuan BI/OJK sebagaimana uraian pada bagian Jumlah/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini. Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	10
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Informasi Lain Terkait Dampak Kebijakan Remunerasi

Pada periode 2015 tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan *internal* ataupun permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi dari pada Perseroan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan diatur berdasarkan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Uraian mengenai mekanisme pemberhentian tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran anggota Direksi dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi secara tertulis kepada Bank dan hasil penyerahan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

Direksi

6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan berikut.
 - a. Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - c. Pemberitahuan terkait Jabatan anggota Direksi yang lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 orang atau tidak adanya Direktur Utama disampaikan dalam waktu paling lambat 2(dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - e. Pembatasan kewenangan dimaksud berlaku sejak keputusan pemberitahuan sementara oleh Dewan Komisaris.
 - f. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah akan mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggara RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal.
 - h. Dalam RUPS, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - i. RUPS sebagaimana dimaksud dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang saham yang hadir.
 - j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - k. Apabila anggota Direksi diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS, setelah dipanggil secara tertulis untuk hadir dan membela diri, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.
 - l. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal.
 - m. Apabila terjadi hal demikian maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Direksi

- n. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait keputusan pemberhentian sementara dan Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
 - o. RUPS dapat memberhentikan para Anggota Direksi dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota direksi bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - p. Disamping alasan pemberhentian dimaksud, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 orang atau tidak adanya Direktur Utama, maka dalam waktu paling lambat 90 hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
 8. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh anggota Direksi lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. Selama Jabatan seluruh Anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud maka untuk sementara Bank diurus oleh Dewan Komisaris dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 9. Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila: Meninggal dunia; Masa jabatannya berakhir; Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 10. Ketentuan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan rangkap jabatan yang dilarang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Semua komite tersebut, diketuai oleh Komisaris Independen. Adapun uraiannya sebagai berikut.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peranan penting untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris dibidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf sekretariat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sebagaimana yang dituangkan dalam *Board Manual*, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan dilingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat / pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk:
 - A. Penyiapan undangan rapat.
 - B. Penyiapan bahan-bahan rapat.
 - C. Pendokumentasian surat-surat.
 - D. Penyusunan notulen rapat.
3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui sekretaris perusahaan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, baik yang harus ditindak lanjuti oleh Dewan Komisaris maupun oleh Direksi.
 - b. Bahan / materi yang bersifat administrasi mengenai laporan / kegiatan Direksi dalam mengelola Bank.
 - c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi.
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profil Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut.

SANDRA FIRMANIA, SE, MH

Warga Negara Indonesia, usia 45 Tahun, lahir di Padang Panjang pada tahun 1970. Memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 31 Agustus 2014. Meraih gelar S1 dari fakultas ekonomi manajemen dari Universitas Andalas tahun 1995 dan S2 dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2007. Beliau juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan dan Seminar diantaranya: *Corporate Valuation Workshop* yang diselenggarakan oleh *Price Waterhouse Coopers (PWC)* di Jakarta tahun 2002; *Legal Drafting* dan *Kontrak* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia PATAMA di Jakarta tahun 2011; *Metode dan Teknik Penyusunan SOP* dengan Penerapan KPI yang diselenggarakan oleh

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

PT Tempo Inti Media di Batam-Singapura tahun 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Lain (Kementerian BUMN) tahun 2006-2010; Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ic (Kementerian BUMN) tahun 2010-2012; Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa tahun 2012-2014; Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II tahun 2014-2015 serta menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II B sejak tahun 2015.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Mempersiapkan materi rapat Dewan Komisaris dan data-data lainnya.
2. Mengadakan pelaksanaan rapat dan membuat Notula Rapat *Internal* Dewan Komisaris sebanyak 34 kali.
3. Mengadakan pelaksanaan rapat dan membuat Notula Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 19 kali.
4. Mengadakan pelaksanaan rapat dan membuat Notula Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 9 kali.
5. Melaksanakan fungsi penghubung antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, dan membuat Notula Rapat Rapat pertemuan sebanyak 2 kali (Pada saat RUPS Tahunan dan RUPSLB).
6. Mengagendakan Surat Keluar Dewan Komisaris sebanyak 142 surat.
7. Membantu fungsi pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris, dengan pembuatan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Regulator sebanyak 2 kali (Semesteran), dan kepada Pemegang Saham Pengendali sebanyak 4 kali (Triwulanan).
8. Mengkoordinasi rapat Anggota Komite, yaitu Rapat Komite Audit sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kali, Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 16 (enam belas) kali, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 8 (delapan) kali.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Komite Audit Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
4. PT Bursa Efek Jakarta (BEI) Keputusan Direksi No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan IA pada Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian *intern*, Komite Audit Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, struktur, uraian mengenai aktivitas serta kewenangan dari Komite Audit. Piagam Komite Audit tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/DEKOM-BTN/2013 dan Keputusan Direksi Nomor SKB-02/DIR-BTN/2013 tentang Penetapan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero). Piagam Komite Audit berisi:

- | | | |
|-----|---|---|
| I | : | Ketentuan Umum; |
| II | : | Maksud dan tujuan; |
| III | : | Tugas dan tanggung jawab serta wewenang komite audit; |
| IV | : | Kewajiban komite; |

Beberapa pokok pedoman kerja Komite Audit yang diatur dalam Piagam Komite Audit dijabarkan sebagai berikut.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian *intern* dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan *internal* auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas *intern* maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor *internal* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor *internal*.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan
14. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas komite.

Wewenang Komite Audit

1. Komite berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Komite berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit *internal*, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite.
3. Komite berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Komite berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Secara lengkap, Piagam Komite Audit dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap sebagai anggota, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bapepam -LK No.Kep-29/PM/2004 dan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto PBI Nomor8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 507/DIR/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada periode 2015, struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Susunan Komite Audit per tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Jabatan	Nama	Keterangan	Keahlian
Ketua*	-	-	-
Wakil Ketua	Maulana Ibrahim	Komisaris Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Sondang Gayatri	Pihak Independen	Perbankan
Anggota	Waldy Gutama	Pihak Independen	Perbankan

* Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.29/KOM/BTN/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Status Komisaris Independen Sahala Lumban Gaol, bahwa Ybs. Sudah tidak menjadi Komisaris Independen per 30 Oktober 2014, dan tidak bisa menjadi Ketua Komite Audit.

Susunan Komite Audit per tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 2 Juli 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Jabatan	Nama	Keterangan	Keahlian
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen	Akuntansi, Keuangan
Anggota	Sondang Gayatri	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Waldy Gutama	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 8 September 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Jabatan	Nama	Keterangan	Keahlian
Ketua	Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Audit, Keuangan
Anggota	Sondang Gayatri	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Waldy Gutama	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 9 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Jabatan	Nama	Keterangan	Keahlian
Ketua	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Audit, Keuangan
Anggota	Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Sondang Gayatri	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Waldy Gutama	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Jabatan	Nama	Keterangan	Keahlian
Ketua	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Audit, Keuangan
Anggota	Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Sondang Gayatri	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Waldy Gutama	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan
Anggota	Deddy Effendi Ridwan	Pihak Independen	Keuangan, Perbankan

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan, sebagai berikut.

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Bersifat independen dan profesional, baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in act*).
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan atau perbankan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Per 31 Desember, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Kamaruddin Sjam	S2 Magister Manajemen	Jabatan strategis diantaranya Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Catherinawati Hadiman	S1 Sarjana Ekonomi	Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Diaspora Saras wati Gemilang (2013-sekarang). Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelumnya pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Direktur <i>Corporate and Commercial Banking</i> PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009) dan <i>Vice CEO</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2012).
Sondang Gayatri	S1 Sarjana Ekonomi Management	CEO Region Wilayah 15 Bank BNI Jakarta Kemayoran (2010-2013) dan pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Bandung.
Waldy Gutama	S2 Magister Manajemen	anggota Komite Audit Woori Bank (2012) dan Pengawas Bank Madya, Tim 2.4, Direktorat Pengawas Bank 2, Bank Indonesia (2009-2011).
Deddy Efendi Ridwan	S2 Magister <i>Business Finance</i>	<i>Finance Controller, Asset Restructuring Project – Corp Banking</i> PT Bank CIMB Niaga (Tbk) tahun 2014, <i>Project Director GL-Oracle Transformation</i> PT Bank CIMB Niaga (Tbk) tahun 2014.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

1. Komite Audit Perseroan terdiri dari 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen serta 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang berasal dari pihak independen.
2. Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
3. Anggota Komite Audit Perseroan tidak ada yang berasal dari Direksi Bank BTN maupun dari Bank lain.
4. Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
5. Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam tabel dengan aspek sebagai berikut.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Kamaruddin Sjam	Catherinawati Hadiman	Waldy Gutama	Sondang Gayatri	Deddy Effendi Ridwan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2015

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Pengawasan Penugasan Audit Eksternal

Pengawasan Auditor eksternal bertanggungjawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Pada tahun buku 2015, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perusahaan adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (KAP PSS-EY). Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran. Atas dasar penugasan tersebut, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait KAP yang ditunjuk berdasarkan proses pengadaan sesuai ketentuan.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, isu utama temuan audit yang penting, serta kemungkinan adanya hambatan dalam penugasan audit, selain itu Komite Audit juga menghadiri *exit meeting* atas hasil *sampling* pemeriksaan Kantor Akuntan Publik di beberapa Kantor Cabang. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat di atasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh

auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik dan kemudian memberikan rekomendasi dan/atau laporan. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2. *Review* terhadap Sistem Pengendalian *Internal*
Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian *internal*, Komite Audit berupaya agar peran audit *internal* dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit *internal* dan tindak lanjut atas temuannya. Komite Audit telah mereview hasil pekerjaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Division* selama tahun 2015, yang terdiri dari :
 - A. Audit Umum Konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 88 (delapan delapan) Obyek Audit
 - B. Audit Umum Sharia sebanyak 24 (dua puluh empat) obyek audit
 - C. Audit Teknologi Sistem Informasi sebanyak 30 (tiga puluh) obyek audit
 - D. Audit Mutu *Internal* sebanyak 21 (dua puluh satu) obyek audit
 - E. Audit khusus sebanyak 29 (dua puluh sembilan) obyek audit.

Selama tahun 2015. Jumlah obyek yang diaudit telah dapat diselesaikan sebanyak 192 Obyek Audit atau sebesar 121,52% dari *annual audit plan 2015* sebanyak 158 Obyek Audit.

Komite Audit melakukan pemantauan terhadap implementasi perbaikan yang dilakukan oleh KC dengan menghadiri *Exit Meeting* baik untuk audit *internal* maupun audit eksternal.

Komite Audit telah menghadiri sebanyak 27 Obyek Audit umum yang dilakukan oleh IAD. Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

- A. Menyarankan kepada *Internal Audit Division* (IAD), agar auditor *internal* meningkatkan evaluasi atas pengendalian *internal* yang terkait dengan kegiatan operasional bank, bisnis proses pemberian kredit komersial dan konsumen, termasuk KUR terutama dalam penentuan kolektibilitas kredit di Kantor Cabang dan Pusat sehingga penetapan kolektibilitas kredit dapat sesuai dengan ketentuan yg berlaku serta prinsip *Good Corporate Governance*.
- B. IAD agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan diseluruh Kantor Cabang.
- C. IAD agar memiliki auditor yang memiliki keahlian khusus di bidang IT, serta menambah wawasan petugas IAD dalam bidang operasional perbankan seperti pelatihan keabsahan tanda tangan.
- D. Komite Audit menyarankan agar Manajemen dapat secara serius menyelesaikan tindak lanjut temuan sesuai dengan rekomendasi IAD, sehingga tidak terjadi lagi temuan yang berulang.

Selain mereview laporan audit *internal*, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Audit berpendapat bahwa:

- A. Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan.
- B. Bank telah memiliki sistem pengendalian *internal* yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Rapat Komite Audit

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyelenggarakan total 29 (dua puluh sembilan) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Audit, sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 23 Maret 2015

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat KA	Jumlah Rapat	Persentase
Maulana Ibrahim	Wakil	11	7	63,64%
Sondang Gayatri	Anggota	11	11	100,00%
Waldy Gutama	Anggota	11	11	100,00%

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Periode 24 Maret - 2 Juli 2015

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat KA	Jumlah Rapat	Persentase
Amanah Abdulkadir	Ketua	9	1	11,11%
Sondang Gayatri	Anggota	9	4	44,44%
Waldy Gutama	Anggota	9	9	100,00%

Periode 3 Juli - 8 Sept 2015

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat KA	Jumlah Rapat	Persentase
Catherinawati Hadiman	Ketua	2	2	100,00%
Kamaruddin Sjam	Anggota	2	2	100,00%
Sondang Gayatri	Anggota	2	2	100,00%
Waldy Gutama	Anggota	2	2	100,00%

Periode 9 Sept - 4 Okt 2015

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat KA	Jumlah Rapat	Persentase
Kamaruddin Sjam	Ketua	3	1	33,33%
Catherinawati Hadiman	Anggota	3	1	33,33%
Sondang Gayatri	Anggota	3	1	33,33%
Waldy Gutama	Anggota	3	3	100,00%

Periode 5 Okt - 31 Des 2015

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat KA	Jumlah Rapat	Persentase
Kamaruddin Sjam	Ketua	5	2	40,00%
Catherinawati Hadiman	Anggota	5	2	40,00%
Sondang Gayatri	Anggota	5	3	60,00%
Waldy Gutama	Anggota	5	4	80,00%
Deddy Effendi Ridwan	Anggota	5	5	100,00%

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2015, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	14 Januari 2015	Tindak Lanjut hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BTN	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
2	21 Januari 2015	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
3	27 Januari 2015	Pembahasan RBBR, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Kinerja Triwulan IV Unit Usaha Syariah	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
4	28 Januari 2015	Pertemuan Komite Audit dengan Auditor Ekstern Mengenai Hasil Kunjungan Kantor Cabang dan <i>progress</i> pemeriksaan	Sondang Gayatri Waldy Gutama
5	4 Februari 2015	Pembahasan <i>Progress</i> Audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik	Sondang Gayatri Waldy Gutama
6	10 Februari 2015	Diskusi atas Konsultasi Permohonan Kredit	Sondang Gayatri Waldy Gutama
7	11 Februari 2015	Pembahasan <i>Progress</i> Audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
8	18 Februari 2015	Pembahasan Laporan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
9	25 Februari 2015	Diskusi mengenai Annual Audit <i>Plan</i>	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
10	11 Maret 2015	Pembahasan Permasalahan Pembayaran Pokok Kredit di Kantor Cabang	Sondang Gayatri Waldy Gutama
11	17 Maret 2015	Pembahasan Debitur Inti Kantor Cabang	Maulana Ibrahim Sondang Gayatri Waldy Gutama
12	9 April 2015	Pertemuan Komite Audit dengan <i>Finance Audit Division</i> terkait Laporan Keuangan Bank	Sondang Gayatri Waldy Gutama
13	20 April 2015	Rapat Komite Audit, Pengadaan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2015	Amanah Abdulkadir Sondang Gayatri Waldy Gutama
14	18 Mei 2015	Koordinasi Komite Audit dengan Divisi Terkait Monitoring Pembayaran Pokok	Waldy Gutama
15	18 Mei 2015	Koordinasi Komite Audit dengan Divisi terkait Pengadaan Kantor Akuntan Publik	Waldy Gutama
16	27 Mei 2015	Diskusi Konsultasi permohonan Kredit	Waldy Gutama
17	10 Juni 2015	Diskusi mengenai Perhitungan CKPN dan Pembayaran Angsuran Pokok Pembiayaan Syariah	Waldy Gutama
18	29 Juni 2015	Pembahasan Audit Khusus Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sukanagara	Waldy Gutama

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19	29 Juni 2015	Tindak Lanjut <i>Exit Meeting Card Business Division</i> dan Update Pengadaan Mesin ATM dan Kartu ATM NSICCS	Sondang Gayatri
20	29 Juli 2015	Koordinasi Komite Audit	Catherinawati Hadiman. Kamaruddin Sjam Sondang Gayatri Waldy Gutama
21	12 Agustus 2015	Koordinasi Komite Audit dengan Internal Audit Division	Catherinawati Hadiman. Kamaruddin Sjam Sondang Gayatri Waldy Gutama
22	16 September 2015	Pembahasan Sanksi dan Disiplin Pegawai	Catherinawati Hadiman. Kamaruddin Sjam Sondang Gayatri Waldy Gutama
23	1 Oktober 2015	Pembahasan Audit Khusus Kantor Cabang	Waldy Gutama
24	1 Oktober 2015	Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Indonesia	Waldy Gutama
25	3 November 2015	Diskusi Komite Audit dengan <i>Syariah Division</i>	Sondang Gayatri Waldy Gutama Deddy Effendi Ridwan
26	16 Desember 2016	Koordinasi Komite Audit	Catherinawati Hadiman. Kamaruddin Sjam Deddy Effendi Ridwan
27	27 November 2015	Persiapan Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2016	1. Waldy Gutama 2. Deddy Effendi Ridwan
28	23 Desember 2015	Konfirmasi mengenai Denda Giro Wajib Minimum (GWM)	Catherinawati Hadiman. Kamaruddin Sjam Sondang Gayatri Waldy Gutama Deddy Effendi Ridwan
29	23 Desember 2015	Pembahasan mengenai <i>Legal Opinion Term Of Reference</i> (TOR) Kantor Akuntan Publik (KAP)	Sondang Gayatri Waldy Gutama Deddy Effendi Ridwan

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. POJK nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); jo Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. SKB – 03/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Direksi No. SKB-03/DIR-BTN/XII/2013 tentang Piagam Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 18 Desember 2013.

Adapun isi dari Pedoman Pelaksanaan Kerja, Sistem dan Prosedur Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

- I Pengertian;
- II Maksud dan Tujuan;
- III Struktur;
- IV Persyaratan Keanggotaan untuk Pihak Independen;
- V Tugas dan Tanggung Jawab;
- VI Kewajiban dan Etika Kerja;
- VII Hak dan Kewenangan;
- VIII Rapat;
- IX Peningkatan Profesionalisme dan Penggunaan Tenaga Penunjang;
- X Pelaporan;
- XI Masa Tugas;
- XII Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - A. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - B. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

- C. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - D. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan perubahan yang diperlukan.
2. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - A. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - B. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - C. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Hak dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki hak dan wewenang, sebagai berikut.

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berhak untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, asset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan haknya Komite Nominasi dan Remunerasi bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia, Desk Kepatuhan, atau dengan Satuan Kerja Lainnya.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berasal dari pihak Independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Secara lengkap, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www.BTN.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, anggota dari Komisaris Independen, Anggota Komisaris, Anggota dari Pejabat Eksekutif dan Anggota dari Pihak Independen. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 509/DIR/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada periode 2015, struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 1 Januari 2015 - 24 Maret 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen
Anggota	Sahala Lumban Gaol*	Komisaris
Anggota	Rudolf Tulus P.S	Pihak Independen
Anggota	Shalahuddin haikal	Pihak Independen
Anggota	-	Pejabat Eksekutif SDM

* Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.29/KOM/BTN/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Status Komisaris Independen Sahala Lumban Gaol, bahwa Ybs. Sudah tidak menjadi Komisaris Independen per 30 Oktober 2014.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 24 Maret 2015 - 2 Juli 2015 sebagai berikut.

- Berdasarkan Surat Komisaris No.35/KOM/BTN/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Susunan Keanggotaan Komite Bank BTN, bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi ditiadakan untuk sementara sampai ada dua lagi Komisaris Independen yang telah memenuhi syarat efektif.
- Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi akan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris dengan bantuan dari pihak independen dan anggota dari pejabat BTN/*ex officio*.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Keterangan
Anggota	Rudolf Tulus P.S	Pihak Independen
Anggota	Shalahuddin haikal	Pihak Independen
Anggota	-	Pejabat Eksekutif SDM

- Sehingga periode 24 Maret 2015 - 30 Juni 2015 Bank BTN tidak memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi belum sesuai ketentuan

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 3 Juli 2015 - 2 September 2015 sebagai berikut.
Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen
Anggota	Rudolf Tulus P.S	Pihak Independen
Anggota	Shalahuudin haikal	Pihak Independen
Anggota	Arief Pramuhano	Pejabat Eksekutif SDM

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 9 September 2015 - 31 Desember 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Catherinawati Hadiman	Komisaris Independen
Anggota	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris
Anggota	Rudolf Tulus P.S	Pihak Independen
Anggota-ex officio	Arief Pramuhanto	Kepala Divisi <i>Human Capital Division</i>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Per 31 Desember, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. Secara lebih rinci, Riwayat hidup singkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Komite Remunerasi dan Nominasi pada laporan tahunan ini.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Catherinawati Hadiman	S1 Ekonomi	Menjabat sebagai Direktur PT Diaspora Saraswati Gemilang (2013-sekarang). Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Direktur <i>Corporate and Commercial Banking</i> PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009) dan Vice CEO di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2012).
Lucky Fathul Aziz H.	S2 <i>Master of Art</i> dan <i>Master of Science</i>	Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung (2010-2012), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007-2010).
Rudolf Tulus P. Sirait	S2 <i>Magister Management</i>	<i>Vice Managing Director</i> , PT Indonesia Sport Venture, 2012, <i>Head of Region Financial Institution</i> , PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2011.
Arief Pramuhanto	S2 <i>Master of Business Administration</i>	HRD <i>General Manager</i> di Frisian Flag Indonesia ; <i>Training Development Manager</i> di Thames Water; <i>Project Leader of Numerous Management Consulting</i>

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen, dengan anggota independen yang terdiri dari 4 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari pihak independen.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sistem remunerasi, sistem nominasi dan *succession plan* Perseroan, GCG dan Budaya Kerja.
3. Susunan komposisi, keahlian dan kriteria independensi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam tabel dengan aspek sebagai berikut.

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	Catherinawati Hadiman	Lucky Fathul Aziz H.	Rudolf Tulus P. Sirait	Arief Pramuhanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi 2015

Sepanjang tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

1. Memperbaiki budaya perusahaan dan mensosialisasikan budaya perusahaan yaitu BTN TERDEPAN GCG RUMAHKOE serta menyiapkan materi pelatihannya.
2. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan dalam RUPS.
3. Menyampaikan rekomendasi nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi pegawai.
5. Mengevaluasi kebijakan nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
6. Mengusulkan draft perbaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Direksi
7. Mengevaluasi kebijakan mengenai sanksi dan disiplin pegawai.
8. Melakukan *review system grading* dan rencana *assessment* pegawai
9. Mengusulkan perbaikan system remunerasi pegawai dengan berdasarkan 3 P (*Pay for Person, Pay for Performance* dan *Pay for Position*).
10. Melakukan evaluasi implementasi *Human Resources Information System* (HRIS)
11. Memberikan masukan bagi perbaikan *Board Manual* Bank BTN
12. Memberikan masukan dalam pembuatan *Code of Conduct* Bank BTN
13. Memonitor tindak lanjut hasil audit khusus oleh *Internal Audit Division*.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

14. Mensosialisasikan fungsi Dewan Komisaris, tugas Komisaris Independen, tugas komite Dekom, rencana kerja Dekom dan perbaikan budaya kerja dengan mensosialisasikan prinsip-prinsip GCG dan budaya perusahaan yang telah disempurnakan dalam kesempatan mengikuti *exit meeting* IAD.
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite pada Annual Report Bank BTN 2015
16. Menyampaikan laporan *Self Assessment* GCG mengenai Pengawasan Aktif Dewan Komisaris.
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite pada Laporan GCG Bank BTN 2015.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dipimpin oleh ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan total 8 (delapan) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan jabatan anggota Komite Remunerasi, sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 24 Maret 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Total Rapat Koreno	Jumlah Rapat	Persentase
Amanah Abdulkadir	Ketua	2	2	100,00%
Sahala Lumban Gaol	Anggota	2	0	0%
Rudolf Tulus Sirait	Anggota	2	0	0%
Shalahuddin Haikal	Anggota	2	1	50,00%
Arief Pramuhanto	Anggota	2	0	0%

Periode 3 Juli - 2 September 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Total Rapat Koreno	Jumlah Rapat	Persentase
Amanah Abdulkadir	Ketua	3	2	66,67%
Rudolf Tulus P.S	Anggota	3	3	100,00%
Shalahuddin haikal	Anggota	3	0	0%
Arief Pramuhano	Anggota	3	2	66,67%

Periode 9 September–31 Desember 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Total Rapat Koreno	Jumlah Rapat	Persentase
Catherinawati Hadiman	Ketua	3	3	100,00%
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	3	2	66,67%
Rudolf Tulus P.S	Anggota	3	3	100,00%
Arief Pramuhanto	Anggota	3	1	33,33%

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2015, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	21 Januari 2015	Budaya Perusahaan	Amanah Abdulkadir Salahuddin Haikal
2	19 Maret 2015	RUPS	Amanah Abdulkadir Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN
3	3 Juli 2015	Update Program Kerja SDM	1. Rudolf Tulus Sirait 2. Arief Pramuhanto
4	8 Juli 2015	Presentasi SDM	1. Amanah Abdulkadir 2. Lucky Fathul Aziz H. 3. Rudolf Sirait 4. Arief Pramuhanto
5	18 Agustus 2015	Sanksi SDM, HRIS, Rekrutmen	1. Amanah Abdulkadir 2. Rudolf Tulus Sirait
6	21 Oktober 2015	PKB, Grading, Assessment	1. Catherinawati Hadiman 2. Lucky Fathul Aziz H. 3. Rudolf Tulus Sirait
7	28 Oktober 2015	GCG	1. Catherinawati Hadiman 2. Rudolf Tulus Sirait
8	4 November 2015	Perbandingan Remunerasi BTN dengan Bank Lain	1. Catherinawati Hadiman 2. Lucky Fathul Aziz H. 3. Rudolf Tulus Sirait

Kebijakan Suksesi Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Bank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi diantaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisari Emiten atau Perusahaan Publik.

Penunjukan calon anggota Direksi dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu penetapan Bakal Calon, penjangkaran dan pengujian kompetensi. Bakal Calon Direksi harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Bakal Calon Direksi Perseroan berasal dari Direksi BUMN, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, talenta BUMN yang berprestasi, talenta Kementerian BUMN, pejabat BUMN lain dan sumber lainnya. Bakal Calon Direksi Perseroan diusulkan melalui Dewan Komisaris, setelah dilakukan penilaian dengan *assessment scoring system* yang dimiliki Perseroan.

Bakal Calon Anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan menjadi Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh Lembaga Profesional. Pengangkatan kembali Anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN dapat dilakukan tanpa UKK apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Untuk mendapatkan kandidat terbaik, Perseroan selalu mengedepankan aspek profesionalisme dan *governance*, baik untuk kandidat yang berasal dari *internal* Perseroan (*talent management system*) maupun dari pihak eksternal. Kandidat yang terpilih melalui mekanisme tersebut kemudian diajukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk dimintai persetujuannya, dan kemudian diajukan kepada OJK untuk dinilai kepatutan dan kelayakannya.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. SKB-01/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/XII/2013 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Bank BTN.

Adapun isi dari Piagam Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Kewajiban Komite
5. Akses dan Kerahasiaan Informasi
6. Struktur, Pengangkatan, dan Pemberhentian Komite
7. Persyaratan Keanggotaan Komite
8. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite

9. Rapat-Rapat Komite
10. Pelaporan Komite
11. Masa Tugas
12. Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite dan Penggunaan Tenaga Penunjang
13. Anggaran Komite
14. Penghasilan Anggota Komite
15. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. SKB-01/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/XII/2013 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Bank BTN, dalam menjalankan fungsinya Komite Pemantau Risiko melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - A. Risiko kredit
 - B. Risiko pasar
 - C. Risiko likuiditas
 - D. Risiko hukum
 - E. Risiko reputasi
 - F. Risiko strategik
 - G. Risiko kepatuhan
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Mendorong pemberdayaan fungsi di manajemen risiko Bank.
5. Melaporkan Kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
6. Komite dapat melakukan kegiatan pemantauan risiko di unit kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko.
7. Mengundang manajemen dan pihak *intern* lainnya untuk hadir dalam rapat Komite sepanjang dianggap penting dan diperlukan.
8. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Secara lengkap, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www.BTN.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, anggota dari Komisaris dan 2 (dua) orang Anggota dari Pihak Independen. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 508/DIR/2015 Tanggal 4 September 2015.

Pada periode 2015, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Januari 2015 - 11 Januari 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Maulana Ibrahim	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	Mardiasmo	Komisaris Utama
Anggota	Sri Widodo	Pihak Independen
Anggota	Akhmadi	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 12 Januari 2015 - 23 Maret 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Maulana Ibrahim	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	Sri Widodo	Pihak Independen
Anggota	Akhmadi	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 24 Maret 2015 - 20 Mei 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	Sri Widodo	Pihak Independen
Anggota	Akhmadi	Pihak Independen

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 21 Mei 2015 - 31 Mei 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	-	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Juni 2015 - 2 Juli 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Amanah Abdulkadir	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	Mohamad Helmy	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 3 Juli 2015 - 2 September 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Arie Coerniadi	Komisaris Independen
Anggota	Agung Kuswandono	Komisaris
Anggota	Mohamad Helmy	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 9 September 2015 - 4 Oktober 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Arie Coerniadi	Komisaris Independen
Anggota	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris
Anggota	Mohamad Helmy	Pihak Independen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 4 Oktober 2015 - 31 Desember 2015 sebagai berikut.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Arie Coerniadi	Komisaris Independen
Anggota	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris
Anggota	Mohamad Helmy	Pihak Independen
Anggota	Nurani Raswindriati	Pihak Independen

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Per 31 Desember 2015, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat melalui table di bawah ini. Secara lebih rinci, Riwayat hidup singkat anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Komite Pemantau Risiko pada laporan tahunan ini.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Arie Coerniadi	S1 Teknik Elektro	Menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya <i>Vice President</i> di NISP Sekuritas, <i>Group Head Vice President</i> di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan <i>Vice President</i> di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai <i>Chief Finance Officer</i> di Sarana Global Indonesia sejak tahun 2011.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	S2 <i>Master of Art</i> dan <i>Master of Science</i>	Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung (2010-2012), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007-2010).
Mohamad Helmy	S1 Sarjana Ekonomi	<i>Trainer & Consultant Risk Management</i> , PT Peak Pratama Indonesia (June 2014 – sekarang), <i>Member of Asset & Liability Committee Supporting Group</i> , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nurani Raswindriati	S2 <i>Magister Management</i>	Senior Advisor, Lembaga Penjamin Simpanan (April 2015 – sekarang), Direktur, <i>Banking Risk Analysis Group</i> , Lembaga Penjamin Simpanan (April 2014 – April 2015).

Independensi Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
2. Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang
3. Cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang berasal dari Direksi Perseroan maupun dari Bank lain.
5. Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,
7. Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan tidak merangkap jabatan atau terafiliasi sebagai pejabat dalam struktur organisasi Perseroan.
9. Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Independensi Komite Pemantau Risiko terkait hubungan afiliasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	ARIE COERNIADI	LUCKY FATHUL AZIZ H.	MOHAMAD HELMY	NURAINI RASWIN-DRIATI
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko 2015

Untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pada periode Januari - Desember 2015, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Rapat berkala dengan *Risk Management Division* dengan agenda program kerja *Risk Management Division* untuk tahun 2015.
2. Rapat berkala dengan *Risk Management Division* dengan agenda pembahasan Laporan Profil Risiko dan Laporan RBBR
3. Rapat berkala Komite Pemantau Risiko dengan *Risk Management Division* dengan agenda harmonisasi penilaian risiko *Risk Management Division* dan *Internal Audit Division*, hasil RBBR menurut versi OJK, *monitoring kredit high risk high rise building, tools manual* untuk *monitoring kredit high risk high rise building* dan peran *Risk Management Division* dalam pembahasan *impairment asset*.
4. Rapat membahas Perbedaan Penilaian KPMR Risiko Kredit antara OJK dengan Bank BTN merujuk pada Surat dari OJK No. S-30/PB.312/2015 tanggal 4 Mei 2015 perihal Perbedaan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit Bank Saudara Posisi Desember 2014.
5. Rapat pembahasan permohonan konsultasi kredit komersial.
6. Rapat dengan *Treasury Division* terkait kondisi likuiditas dan alat perhitungan Likuiditas Bank BTN.
7. Rapat pembahasan *stress test analysis* Bank BTN terkait melemahnya nilai tukar rupiah karena devaluasi Yuan dan rencana *the Fed* menaikkan suku bunga.
8. Rapat bersama *Risk Management Division* mengenai *Review* Piagam Komite Pemantau Risiko.
9. Rapat bersama dengan beberapa Divisi yang membahas tentang permasalahan *Four Eyes Principle* dan *Non Performing Loan*.
10. Rapat pembahasan *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil rapat tersebut Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Rapat Komite Pemantau Risiko

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan total 14 (empat belas) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 11 Januari 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Maulana Ibrahim	Ketua	1	1	100,00%
Agung Kuswandono	Anggota	1	0	0,00%
Mardiasmo	Anggota	1	0	0,00%
Sri Widodo	Anggota	1	1	50,00%
Akhmadi	Anggota	1	0	0,00%

Periode 12 Januari – 23 Maret 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Maulana Ibrahim	Ketua	2	2	100,00%
Agung Kuswandono	Anggota	2	0	0,00%
Sri Widodo	Anggota	2	1	50,00%
Akhmadi	Anggota	2	2	100,00%

Periode 24 Maret - 20 Mei 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Amanah Abdulkadir	Ketua	2	0	0,00%
Agung Kuswandono	Anggota	2	0	0,00%
Sri Widodo	Anggota	2	2	100,00%
Akhmadi	Anggota	2	2	100,00%

Periode 1 Juni - 2 Juli 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Amanah Abdulkadir	Ketua	2	0	0,00%
Agung Kuswandono	Anggota	2	0	0,00%
Mohamad Helmy	Anggota	2	2	100,00%

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Periode 3 Juli - 2 September 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Arie Coerniadi	Ketua	2	0	0,00%
Agung Kuswandono	Anggota	2	0	0,00%
Mohamad Helmy	Anggota	2	2	100,00%

Periode 9 September– 4 Oktober 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Arie Coerniadi	Ketua	2	0	0,00%
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	2	0	0,00%
Mohamad Helmy	Anggota	2	2	100,00%

Periode 4 Oktober – 31 Desember 2015

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat Kopar	Jumlah Rapat	Persentase
Arie Coerniadi	Ketua	5	1	20,00%
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	5	1	20,00%
Mohamad Helmy	Anggota	5	5	100,00%
Nurani Raswindriati	Anggota	5	5	100,00%

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2015, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	7 Januari 2015	Program Kerja RMD Untuk Tahun 2015	Maulana Ibrahim Sri Widodo Achmadi
2	4 Februari 2015	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan dengan OJK Pembahasan Tindak Lanjut Risalah Rapat KOPAR Januari 2015 Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2014	Maulana Ibrahim Sri Widodo Achmadi

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	12 Maret 2015	Harmonisasi Penilaian Risiko RMD dan IAD Hasil RBBR Menurut Versi OJK Monitoring kredit high risk high rise building <i>Tools manual</i> untuk <i>monitoring</i> kredit <i>high risk high rise building</i> Peran RMD dalam pembahasan <i>impairment asset</i> .	Maulana Ibrahim Achmadi
4	28 April 2015	Profil Risiko Triwulan I 2015	Sri Widodo Achmadi
5	8 Mei 2015	Pembahasan Surat OJK No. S-30/PB.312/2015	Sri Widodo Achmadi
6	22 Juni 2015	Konsultasi Kredit Komersial	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Kredit Komersial
7	29 Juni 2015	Diskusi Mengenai Profil Risiko Triwulan I 2015	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Manajemen Risiko
8	28 Juli 2015	Diskusi Mengenai Peringkat Kesehatan Bank (RBBR) Semester I 2015	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Manajemen Risiko
9	11 Agustus 2015	Kondisi Likuiditas Bank BTN dan Alat Perhitungan Likuiditas Bank BTN	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Manajemen Risiko 3. Divisi <i>Treasury</i>
10	7 September 2015	Diskusi Mengenai <i>Stresstest</i> akibat menurunnya nilai rupiah	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Manajemen Risiko
11	28 September 2015	Konsultasi Kredit Komersial	1. Mohamad Helmy 2. Divisi Kredit Komersial
12	18 November 2015	Diskusi Mengenai RBBR dan <i>Review</i> Piagam Komite Pemantau Risiko	1. Mohamad Helmy 2. Nurani Raswindriati 3. Divisi Manajemen Risiko
13	30 November 2015	Pembahasan Persetujuan RBB 2016-2018	Lucky Fathul Aziz H. Mohamad Helmy Nurani Raswindriati Divisi Strategi, Inovasi dan Performa
14	2 Desember 2015	Diskusi Mengenai <i>Four Eyes Principle</i> dan NPL	Mohamad Helmy Nurani Raswindriati Divisi Risiko Kredit Divisi Aset Manajemen
15	21 Desember 2015	Pembahasan <i>Review</i> Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko	1. Mohamad Helmy 2. Nurani Raswindriati 3. Divisi Manajemen Risiko
16	23 Desember 2015	Pembahasan mengenai Persetujuan PKMR Konfirmasi mengenai Denda GWM	Arie Coerniadi Mohamad Helmy Nurani Raswindriati

Sekretaris Perusahaan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, kalangan pasar modal, investor maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kepercayaan Publik terhadap Perseroan.

Sejalan dengan persyaratan ketentuan tentang keterbukaan informasi perusahaan, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktifitas Perseroan dan memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi mengenai hal-hal terkait kinerja, tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta sebagai penghubung antara Perseroan dengan *stakeholders*.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan dari Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan meliputi komunikasi *internal* dan *eksternal* serta hubungan kesekretariatan pimpinan perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan, melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut.

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
- b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- f. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Eko Waluyo (44 tahun), berdomisili di Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank BTN Tbk efektif sejak 1 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. 233/DIR/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan Pejabat sebagai *Corporate Secretary* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1997, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Tim Sekuritisasi KPR, *Manager Investor Relations* dan *Departement Head Investor Relations* sejak tahun 2011 sebelum diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Riwayat Jabatan Singkat Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan komunitas pasar modal, Bank BTN sebagai perusahaan publik membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator, publik dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan Bank BTN dijabat oleh Eko Waluyo (Biografi singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian Profil dalam buku laporan tahunan ini).

Sekretaris Perusahaan

Adapun riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel Riwayat Jabatan Singkat Sekretaris Perusahaan

No.	Nama Jabatan	Cabang	Unit Kerja
1.	Analisis Kredit	KC Denpasar	<i>Loan Administration</i>
2.	Penanggung Jawab Kepala Kantor Kas	KC Denpasar	Kantor Kas Kuta Center
3.	Staff Laporan Keuangan	Kantor Pusat	Divisi Akuntansi
4.	Supporting Group ALCO	Kantor Pusat	Divisi Treasury
5.	Kepala Seksi	Kantor Pusat	Tim Sekuritas KPR
6.	Manager	Kantor Pusat	<i>Investor Relation</i>
7.	<i>Department Head</i>	Kantor Pusat	<i>Investor Relation</i>
8.	<i>Division Head</i>	Kantor Pusat	<i>Corporate Secretary</i>

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Eko Waluyo meraih gelar master (MM) dibidang *finance* dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan *University of Kentucky USA* tahun 2004. Beliau juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan dan Seminar diantaranya:

Dalam Negeri

1. Pendidikan di bidang *Treasury and Fixed Income* di Bali tahun 2005.
2. Pendidikan Pasar Modal di Jakarta tahun 2006.
3. *"Increasing stakeholders' value through governance in private and public sector"*, *International Conference on Governance* di Jakarta tahun 2008.
4. *"The First International Conference on Finance and Banking"*, *Faculty of Economics and Business* di Bali (2013),

Luar Negeri

1. *Asset and Liability Management Terrapinn Financial Training* di Singapore tahun 2005.
2. *Housing Finance Management HDFC* di Mumbai tahun 2008.
3. *Certified Investor Relations* (2012), *Leadership* di INSEAD Fontainebleau Paris (2010).
4. *International Conference on Corporate Governance* di Birmingham UK (2010).
5. *Investor Relations Masterclass, Executive Workshop, the Investor Relations Society, United Kingdom* (UK) (2013).

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan 2015

Sepanjang periode 2015, program peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

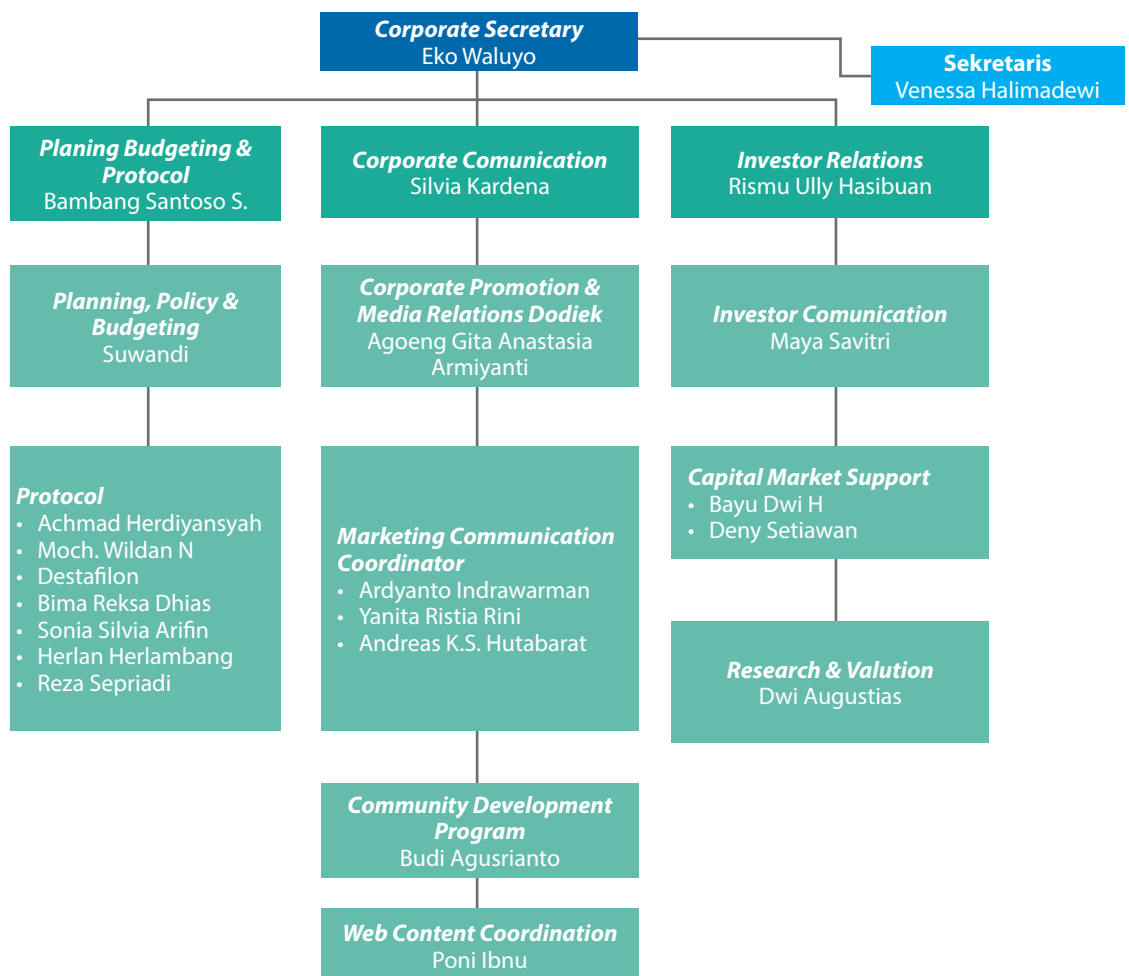
1. *The 1st Corporate Secretary Leadership Forum*, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Bangkok, Thailand (2015),
2. *The Workshop Making Small-Scale Savings Work for Everyone in a Digitised World*, *The World Savings Bank Institute* (WSBI), Washington DC, USA (2015),
3. *Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), Jakarta, Indonesia (2015),
4. *Workshop Peran dan Fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN*, Kementerian BUMN, Bandung, Indonesia (2015),
5. Sosialisasi Peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN, Denpasar, Bali, Indonesia (2015),
6. *The First Asean Marketing Summit*, *Markplus Institute*, Jakarta, Indonesia (2015),

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan Bank BTN bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dibantu oleh *Manager/Senior Manager* yang membawahi unit kerja *Investor Relations, Corporate Communication* dan *Planning, Budgeting and Protocol*.

Adapun Struktur Sekretaris Perusahaan Bank BTN adalah sebagai berikut.



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2015

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal Kepada Direksi dan Dewan Komisaris
 Sekretaris perusahaan secara rutin menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pasar modal, yang terdiri dari:
 - a. Adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Bank BTN. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau peraturan yang *diupdate* oleh Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

Sekretaris Perusahaan

Tabel Peraturan Baru yang Disosialisasikan

No	Peraturan	Sosialisasi kepada Direksi
1.	SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan PBI No. 17/8/PBI/2015 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter	Memo No. 1193/M/CSD/IR/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015
2.	Peraturan OJK No. 2/POJK.4/2015 tanggal tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan serta SE OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik	Disampaikan dalam Rapat Direksi tanggal 1 September 2015
3.	Pelaporan Laporan Keuangan Berbasis <i>Extensible Business Reporting Language</i> (XBRL)	Memo No. 1495/M/CSD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015
4.	Update mengenai transaksi pembelian dan penjualan saham BBTN oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bapapam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Memo No. 847/M/CSD/IR/V/2015 tanggal 8 Mei 2015
5.	Kebijakan Bursa Terkait Potongan Biaya Pencatatan Tahunan/ <i>Annual Listing Fee</i> (ALF) Saham BBTN 2016	Memo No. 2155/M/CSD/IR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015

- b. Perkembangan saham BBTN, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*). Selama tahun 2015 laporan perkembangan saham BBTN diantaranya:

Tabel Laporan Perkembangan Saham

No	Uraian	Penyampaian kepada Direksi
1.	Laporan Kinerja Saham BBTN Pekan ke-2 dan ke-3 Bulan Januari 2015	Memo No. 136/M/CSD/IR/I/2015 tanggal 21 Januari 2015
2.	Laporan Kinerja Saham BBTN tanggal 06 Februari 2015	Memo No. 258/M/CSD/IR/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
3.	BBTN masuk Indeks LQ45 periode Februari sd Juli 2015	Memo No. 568/M/CSD/IR/III/2015 tanggal 16 Maret 2015
4.	Laporan Kinerja Saham BBTN posisi tanggal 25 Juni 2015	Memo No. 1211/M/CSD/IR/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015
5.	BBTN Masuk Indeks Infobank15 Periode Juli-Desember 2015	Memo No. 1249/M/CSD/IR/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015
6.	BBTN Masuk Index LQ45 Periode Agustus 2015 - Januari 2016	Memo No. 1391/M/CSD/IR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015
7.	Laporan Kerja Saham BBTN Bulan Agustus 2015	Memo No. 1690/M/CSD/IX/2015 tanggal 30 September 2015
8.	BBTN Masuk Indeks MNC36 Periode Perdagangan November 2015-April 2016	Memo No. 2063/M/CSD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015

- c. Masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Bank BTN. Penyampaian masukan dan tanggapan dari investor tersebut biasanya disampaikan setelah Bank BTN melakukan pertemuan dengan investor, melalui forum *Investor Conference* dan *Non-Deal Roadshow*.

Sekretaris Perusahaan

Tabel Masukan dan Tanggapan dari Investor

No	Kegiatan	Penyampaian kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
1.	Laporan Pelaksanaan <i>Non Deal Roadshow</i>	Surat No. 450/DIR/CSD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015
2.	Laporan CIMB 9th <i>Indonesian Conference</i> 2015	Memo No. 1107/M/CSD/IR/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015
3.	Laporan Pelaksanaan <i>Non Deal Roadshow</i>	Surat No. 1193/DIR/CSD/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015

2. Pelaksanaan Program Komunikasi Kepada Komunitas Pasar Modal

Sekretaris perusahaan secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan sebagai berikut.

- Memberikan *update* kepada komunitas pasar modal mengenai perkembangan bisnis, operasional dan kinerja keuangan Bank BTN, serta target-target yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
- Meningkatkan kinerja saham BBTN, baik likuiditas/volume perdagangan dan harga saham BBTN.
- Meningkatkan *investor base* dan *coverage* terhadap BBTN.
- Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang telah secara rutin menulis *report* tentang Perseroan dan memberikan rekomendasi yang baik atas saham Perseroan.

Prinsip dasar yang digunakan oleh Sekretaris Perusahaan dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

- Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
- Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan dibidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan, adalah sebagai berikut.

- Direct*, yang meliputi: *Public Expose, Non Deal Road Show, Investor Conference, Press Conference, 1-on-1 Meetings, Group Meetings, Branch Visits* dan *Site Visits*.
- Indirect*, yang meliputi: *Annual Report, Laporan Keuangan Publikasi, Website, Media, Conference Calls* dan *Emails*.

Berikut adalah program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Bank BTN selama tahun 2015:

Tabel Program Komunikasi kepada Komunitas Pasar

Tanggal	Kegiatan	Tempat
26-Feb-15	<i>Analyst Meeting FY14 and Press Conference</i>	Jakarta
9-10 Mar-15	<i>UBS Indonesia Conference 2015</i>	Jakarta
22-Apr-15	<i>Public Expose 2015 and Press Conference</i>	Jakarta
27-Apr-15	<i>Analyst Meeting 1Q15 and Press Conference</i>	Jakarta
4-5 May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Jakarta
11-12 May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Singapore
13-15 May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Tokyo
18-22 May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	USA
25-May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Kuala Lumpur
26-27 May-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Hong Kong
1-5 Jun-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Eropa

Sekretaris Perusahaan

Tanggal	Kegiatan	Tempat
11-12 Jun-15	<i>CIMB 9th Annual Indonesia Conference</i>	Bali
27-Jul-15	<i>Analyst Meeting 2Q15 and Press Conference</i>	Jakarta
9-Sep-15	<i>Citi Indonesia Investor Conference</i>	Jakarta
8-Oct-15	<i>Capital Market Institutional Gathering</i>	Bandung
26-Oct-15	<i>Analyst Meeting 3Q15 and Press Conference</i>	Jakarta
26-29 Oct-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	USA
2-3 Nov-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	London
3-4 Nov-15	<i>Deutsche Access Indonesian Conference</i>	Jakarta
11-Nov-15	<i>Investor Summit 2015 and Press Conference</i>	Jakarta
11-13 Nov-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Jakarta
17-19 Nov-15	<i>Asia Pacific Summit</i>	Singapore
23-24 Nov-15	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Hong Kong
18-Nov-15	<i>Yuk Nabung Saham</i>	Jakarta

3. Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Sekretaris Perusahaan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur diantaranya dalam:

- Peraturan Bapepam-LK X.K.1 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada kepada Publik.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

Selama tahun 2015, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) laporan sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian Akses Informasi pada laporan GCG ini. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinir penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Bank BTN atau transaksi saham BBTN. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya.

Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2015, Bank BTN telah menyampaikan 4 (empat) tanggapan atas permintaan penjelasan dari Bursa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Permintaan Bursa

No	Permintaan Bursa	Jawaban	Tanggal
1.	Tanggapan atas penjelasan volatilitas transaksi efek BBTN	Surat No. 42/DIR/CSD/I/2015	30 Januari 2015
2.	Tanggapan atas pemberitaan Harian <i>Investor Daily</i> "2016, BTN Kaji <i>Rights Issue</i> Rp10 triliun" tanggal 23 April 2015	Surat No. 416/CSD/IR/IV/2015	24 April 2015
3.	Penjelasan pemberitaan Harian Bisnis Indonesia " <i>Rights Issue</i> BTN Rp9 triliun" tanggal 11 Juni 2015	Surat No. 535/CSD/IR/VII/2015	15 Juni 2015
4.	Tanggapan atas pemberitaan Harian Neraca "Tak Bayar Ganti Rugi, BTN Digugat ke Pengadilan" tanggal 8 Juli 2015	Surat 592/CSD/IR/VII/2015	13 Juli 2015

4. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi

Komunikasi dengan *stakeholders* Bank BTN menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*), yaitu dikoordinir melalui Sekretaris Perusahaan. Bank BTN senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya melalui publikasi di media massa, *press release*, *website* Bank BTN (www.btn.co.id), serta media sosial yang terdiri dari *facebook* (BankBTNcoid), *twitter* (@BankBTNcoid), *youtube* (officialBankBTN) dan *instagram* (officialBankBTN).

Selama tahun 2015, Sekretaris Perusahaan menerbitkan 77 (tujuh puluh tujuh) *press release* mengenai perkembangan kinerja, bisnis dan operasional Bank BTN. Daftar lengkap siaran pers sebagaimana pada bagian Akses Informasi laporan GCG ini.

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sekretaris Perusahaan mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BTN dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2015, Bank BTN menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Bank BTN, termasuk didalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Tabel Penyelenggaraan RUPS

Kegiatan	RUPS Tahunan 24 Maret 2015	RUPS Luar Biasa 2 September 2015
Pemberitahuan ke OJK, BEI dan KSEI	6 Februari 2015	14 Juli 2015
Pengumuman RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, web OJK, BEI dan Bank BTN	13 Februari 2015	27 Juli 2015
Pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, web OJK, BEI dan Bank BTN	2 Maret 2015	11 Agustus 2015
RUPS	24 Maret 2015	2 September 2015
Pengumuman ringkasan risalah RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, web OJK, BEI dan Bank BTN	26 Maret 2015	4 September 2015
Penyampaian Berita Acara RUPS ke OJK	23 April 2015	1 Oktober 2015

6. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya mengacu pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas Sekretaris Perusahaan dalam penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

- Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/*Desk*/unit kerja lainnya.
- Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan POJK tersebut di atas.
- Membuat risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir.
- Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi.
- Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/*Desk*/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2015, Bank BTN telah menyelenggarakan 100 (seratus) Rapat Direksi dan 19 (sembilan belas) Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. Rincian penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Komisaris pada laporan tahunan ini.

7. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan mengkoordinir pelaksanaan program orientasi sebagaimana yang diuraikan pada bagian Komisaris dan bagian Direksi pada Laporan GCG ini.

Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank BTN dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Perkreditan
3. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
5. Komite Personalia
6. Komite Produk

Komite Manajemen Risiko

Adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Perseroan sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling kurang terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 8/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut.

Ketua (merangkap anggota tetap)	: <i>Managing Director Strategic, Compliance and Risk</i>
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	: <i>Risk Management Division Head</i>
Anggota Tetap	: DIREKSI <ul style="list-style-type: none"> • <i>Managing Director Mortgage and Consumer Lending</i> • <i>Managing Director Treasury and Information Technology</i> • <i>Managing Director Finance, Operation and Credit Risk</i>, dan • <i>Managing Director Commercial Lending</i>
	<i>Division HEAD</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Internal Audit Division</i> • <i>Compliance Division</i>
Anggota Tidak Tetap	: DIREKSI <ul style="list-style-type: none"> • <i>Managing Director Collection, Asset Management and Legal</i>, dan • <i>Managing Director Funding and Distribution</i>
	<i>Division HEAD</i>
	<i>Seluruh Division dan Desk Head kecuali Risk Management Division Head, Compliance Division Head dan Audit Internal Division Head</i>

Komite di Bawah Direksi

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Uraian Tugas Komite Manajemen Risiko sebagai berikut.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2015, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 5 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Tanggal	Agenda
19Jan 2015	Laporan Profil Risiko TW IV 2014 dan Usulan peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di Tahun 2015.
20Apr 2015	Hasil <i>Self Assessment</i> Profil Risiko TW I 2015 dan Rekomendasi perbaikan KPMR Profil Risiko TW II 2015.
22Jul 2015	Hasil <i>Self Assessment</i> Laporan Profil Risiko Triwulan II 2015 dan Rekomendasi perbaikan KPMR Profil Risiko Triwulan III 2015.
22Okt 2015	Tingkat Kesehatan Bank BTN, Hasil <i>Self Assessment</i> Laporan Profil Risiko TW III 2015 dan Upaya Perbaikan Profil Risiko TW IV 2015.
16Des 2015	<i>Review</i> Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)

Komite di Bawah Direksi

Komite Kebijakan Perkreditan

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 12/PD/CMLD/2015 tanggal 16 Oktober 2015 juncto PD Nomor 27/DIR/CMO/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Komite Kebijakan Perkreditan, struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut.

Koordinator : Direktur yang mensupervisi Divisi pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan Bank.

Sekretaris : Divisi Pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan Bank

Anggota Tetap : *Division Head* pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan Bank
Risk Management Division Head
Internal Audit Division Head
Compliance Division Head

Anggota Tidak Tetap: Direktur lainnya
 Divisi lain yang diundang berdasarkan keperluan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Uraian Tugas Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut.

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan yang berupa pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Perseroan dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas terlaksananya peraturan dan ketentuan mengenai pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Perseroan dengan baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan masalah apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
3. Memberikan konsultasi atas pemberian kredit yang mengandung tingkat risiko tinggi dan kredit yang perlu dihindari. Konsultasi harus dibuat sebelum komitmen dibuat.
4. Memantau dan mengevaluasi: Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan; Perkembangan penghimpunan dana masyarakat; Perkembangan pemberian jasa layanan nasabah; Kepatuhan pelaksanaan wewenang memutuskan kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit; Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu; Kepatuhan terhadap pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit; Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit; Penyelesaian kredit bermasalah; dan Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

Komite di Bawah Direksi

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2015, pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Perkreditan dibahas pada rapat Direksi yang diantaranya membahas *Four Eyes Principles*, usulan Kebijakan Uang Muka FLPP, Program Sejuta Rumah, Relaksasi Kebijakan Kredit Komersial, Penyederhanaan Proses Persetujuan Kredit Komersial, Kewenangan Penyelesaian Kredit Konsumer.

Asset And Liability Management Committee (ALCO)

Merupakan *Executive Committee* yang berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *asset and liabilities* dan pengambilan keputusan dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka *Asset Liability Management (ALMA)*.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No.2/PD/TRSD/2015 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* Bank tanggal 05 Februari 2015, maka susunan struktur personil ALCO adalah sebagai berikut.

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris merangkap anggota	: Direktur yang mensupervisi <i>Treasury</i>
Anggota Tetap	: Direktur yang mensupervisi Bidang Bisnis Seluruh Kepala Divisi Bidang Bisnis Kepala Divisi <i>Finance and Accounting</i> Kepala Divisi <i>Strategy and Performance Management</i> Kepala Divisi <i>Consumer Collection and Remedial</i> Kepala Divisi <i>Risk Management</i> Kepala Divisi <i>Compliance</i> Koordinator <i>Change Management Office</i>
Anggota Tidak Tetap	: Direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Asset and Liability Management Committee (ALCO) bertugas menyusun strategi pengelolaan *asset* dan *liability* dalam rangka memaksimalkan profitabilitas Bank dan menjaga struktur neraca Perseroan melalui manajemen aktiva produktif, pengurangan biaya dana dan pengelolaan risiko suku serta risiko likuiditas.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2015, *Asset and Liability Management Committee (ALCO)* telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Rapat ALCO

Tanggal	Agenda
14 Januari 2015	Membahas kinerja pencapaian Bank BTN pada bulan Desember 2014
12 Februari 2015	Membahas kinerja pencapaian Bank BTN pada bulan Januari 2015 Monitoring perubahan suku bunga kredit kepada debitur
19 Maret 2015	Membahas kinerja pencapaian Bank BTN pada bulan Februari 2015
24 April 2015	Monitoring perubahan suku bunga kredit kepada debitur
20 Mei 2015	Membahas kinerja pencapaian Bank BTN pada bulan April 2015
23 Juni 2015	Membahas kinerja pencapaian Bank BTN pada bulan Mei 2015
14 Juli 2015	Membahas kinerja kinerja <i>asset</i> dan <i>liabilities</i> pada bulan Juni 2015 Strategi rekomposisi dana pihak ketiga
19 Agustus 2015	Membahas kinerja pencapaian bulan Juli 2015
16 September 2015	Membahas kinerja <i>asset</i> dan <i>liabilities</i> pada bulan Agustus 2015 Strategi pengelolaan <i>cost of fund</i> dana pihak ketiga

Komite di Bawah Direksi

Tanggal	Agenda
13 Oktober 2015	Membahas penyesuaian tingkat suku bunga kredit konsumen
24 November 2015	Membahas kinerja likuiditas dan rekomposisi dana pihak ketiga
16 Desember 2015	Strategi pencapaian pertumbuhan total dana pihak ketiga di tahun 2015 Penyesuaian tingkat suku bunga

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Merupakan *Executive Committee* yang berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang Teknologi Informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 05/PD/ICTD/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 18/PD/CMO/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, maka susunan struktur Organisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.

Ketua : *Information and Technology Director (ex-officio)*
 Dalam hal Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi maka Direktur Utama bertindak sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sekretaris merangkap anggota : *Information and Communication Technology Division Head (ex-officio)*

Anggota Tetap :

- *Managing Director Risk, Compliance and Strategy (ex-officio)*
- *Managing Director Retail Funding and Distribution (ex-officio)*
- *Managing Director Mortgage and Consumer Lending (ex-officio)*
- *Risk Management Division Head (ex-officio)*
- *Operation and Business Support Division Head (ex-officio)*
- *Sharia Division Head (ex-officio)*
- *Regional Office I Head (ex-officio)*

Anggota Tidak Tetap:

- Direktur lainnya
- Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mencakup:

1. Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut.
 - A. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - B. Sumber data yang dibutuhkan;
 - C. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.

Komite di Bawah Direksi

4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur.
10. Komite bertanggungjawab atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme rapat Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2015, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Rapat Komite Teknologi Informasi

Tanggal	Agenda
9 April 2015	<i>IT Project Charter</i> 2015
28 Agustus 2015	Finalisasi <i>IT Project Charter</i> 2015 Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (RSTIK) Tahun 2016 - 2018

Komite Personalia

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Bank dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan PD No. 04/PD/HCD/2014 tentang Komite Personalia (*Human Capital Committe*), maka susunana Struktur Organisasi Komiter Personalia adalah:

Koordinator	: Direktur Utama
Sekretaris	: HCD Head
Anggota Tetap	: Direktur yang mensupervisi HCD dan Direksi lain terkait SDM pada unit supervisinya sedang dibahas.
Anggota Tidak Tetap	: <i>Division Head</i> lain yang diundang berdasarkan keperluan.
<i>Supporting Group</i>	: <i>Department Head</i> HCD bersama dengan <i>Unit Human Capital Management</i> pada HCD

Komite di Bawah Direksi

Keanggotaan *Divison Head* dalam Komite Personalia Pusat tidak dapat diwakilkan sehingga dalam hal yang bersangkutan berhalangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota KPP, maka perannya tidak dapat didelegasikan kepada pemangku jabatan lain di unit kerjanya.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program SDM agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan SDM.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang *independent* bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/penugasan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait *Human Capital* di luar Nomor 1 s/d Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan manajemen *Human Capital*.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2015, Komite Personalia telah mengadakan 14 (empat belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Rapat Komite Personalia

Tanggal	Agenda
29 Januari 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
05 Februari 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
10 Februari 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
02 Maret 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
09 Maret 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
12 Maret 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
27 Maret 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
01 April 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
25 April 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
28 April 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
22 Mei 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
04 Juni 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
30 Juli 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
16 September 2015	Rapat Komite Personalia Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Komite di Bawah Direksi

Komite Produk

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No.20/PD/CMO/2011 tentang Komite Produk Bank BTN, maka susunan struktur dan keanggotaan Komite Produk adalah sebagai berikut.

Koordinator

Direktur yang mensupervisi Divisi pengelola pengembangan produk/jasa Bank

Sekretaris

Divisi pengelola pengembangan produk dan jasa Perseroan

Anggota Tetap

- *Information Technology and Communication Division Head*
- *Legal Division Head*
- *Compliance Division Head*
- *Risk Management Division Head*

Anggota Tidak Tetap

- Direktur lainnya
- Divisi lain yang diundang berdasarkan keperluan

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan kesesuaian antara pengembangan produk dengan kebutuhan serta tujuan Perseroan;
2. Melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perkembangan produk dan penerapan dalam jangka panjang;
3. Menentukan kebijakan-kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan pengembangan produk;
4. Memantau dan membahas :
 - A. Kemajuan dalam pelaksanaan produk sesuai dengan RKAP yang terkait dengan pengembangan produk.
 - B. Rencana-rencana pengembangan dan penerapan produk
 - C. Masalah-masalah strategis yang ditemui dalam pengembangan dan penerapan produk
 - D. Teknologi dan standar yang perlu dipertimbangkan, kemungkinan-kemungkinan penerapannya di lingkungan Perseroan.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2015, Komite Produk telah mengadakan 1 (satu) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Frekuensi Rapat Komite Produk

Tanggal	Agenda
24 November 2015	Pengembangan menuju transformasi <i>digital banking</i> Bank BTN

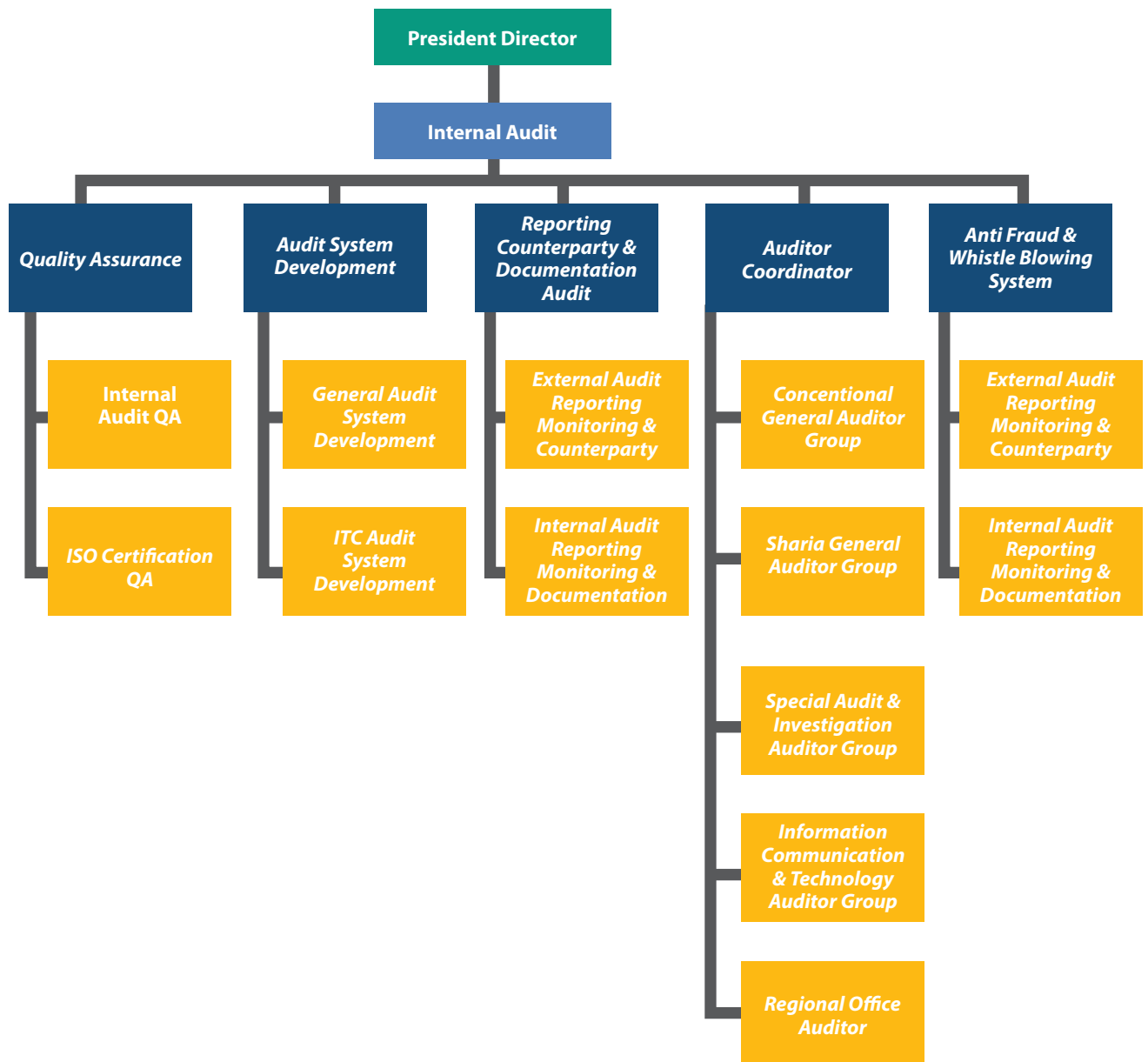
Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit *Internal* di Perseroan dijalankan oleh *Internal Audit Division* (IAD). IAD dipimpin oleh seorang Kepala IAD yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK. IAD merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris.

IAD berfungsi memberikan *assurance* yang independen dan obyektif, serta jasa konsultasi, kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan sekaligus menjadi mitra manajemen dalam mewujudkan implementasi GCG di lingkungan Bank serta dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah bagi Bank.

Struktur Organisasi dan Ketua Divisi Audit Internal

Fungsi Audit *Internal* Perseroan dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) yang diketuai oleh Dadang Eka Jatnika, dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Fungsi Audit Internal

Kedudukan Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Keberadaan (kedudukan) struktur Satuan Kerja *Internal Audit* (SKAI) pada Perseroan yang selanjutnya disebut dengan *Internal Audit Division* (IAD) telah diatur pada Piagam Audit *Intern* No. 03-SKB/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 pada Bab II Struktur dan Kedudukan pasal 3 disebutkan

1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa *Internal Audit Division* (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit *Intern* (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
4. Pasal 3 Ayat (6) disebutkan bahwa Auditor yang duduk dalam IAD bertanggung jawab langsung kepada Kepala IAD

Ketetapan Direksi No.04/KD/DIR/SPMD/2014 dengan perubahan pada KD No.02/KD/DIR/SPMD/2015 tanggal 5 Mei 2015 Tentang Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada peraturan tersebut ditunjukkan bahwa kedudukan *Internal Audit Division* (IAD) di bawah supervisi Direktur Utama. Kedudukan *Internal Audit* yang berada langsung pada supervisi Direktur Utama dan bukan berada pada supervisi Direktur operasional lain menunjukkan bahwa SKAI pada Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki independensi yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi Audit *Intern* Bank

Selanjutnya, *Internal Audit Division* (IAD) berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong

pencapaian tujuan dan sasaran Bank dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara obyektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, controll* dan *governance processes*. Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Profil Kepala Audit Internal

Profil Kepala Audit *Internal* sebagai berikut.

Dadang Eka Jatmika

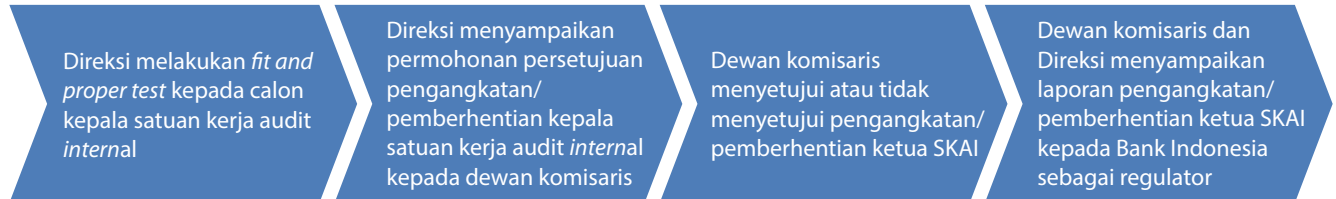
Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun. Menjabat sebagai Kepala Audit *Internal* sejak tanggal 17 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BTN No. 176/DIR/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Rotasi Pegawai. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1995, dan pernah menjabat sebagai *Senior Manager Associate Auditor, Senior Associate Auditor, Auditor Superintendent-ICT* dan *Superintendent Conventional General Audit*. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1993) dan Magister Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2006). Beliau pernah mengikuti beberapa *workshop* dan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri antara lain Ikatan Auditor *Intern* Bank Konferensi Nasional VI yang diselenggarakan oleh Ikatan Auditor *Intern* Bank di Belitung tahun 2014; *Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang diselenggarakan oleh ACFE di Austin-Texas tahun 2014; *National Anti Fraud Conference* yang diselenggarakan oleh ACFE di Discovery Kartika Plaza Kuta Bali tahun 2015; *Risk an Governance Summit* 2015 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015; SOPAC 2015 yang diselenggarakan oleh *the institute of Internal Audit* di Australia tahun 2015.

Adapun CV Kepala Audit *Internal* dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Audit Laporan Tahunan ini.

Fungsi Audit Internal

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Ketua Audit Internal

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan/pemberhentian Ketua Audit *Internal* adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan/pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak di maksud, adalah sebagai berikut.



Komposisi Personil Audit Internal

Per 31 Desember 2015, jumlah pegawai audit *internal* adalah 82 orang, dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pegawai Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Kepala Divisi	1
Sekretaris	1
<i>Audit Coordination Head</i>	1
<i>Quality Assurance</i>	5
<i>Audit System Development Departement</i>	4
<i>Reporting Counterparty Documentation Audit Departement</i>	7
<i>Conventional General Auditor</i>	34
<i>Sharia General Auditor</i>	9
<i>Special & Investigation Auditor</i>	6
<i>Information Communication Technology Auditor</i>	7
<i>Regional Office Auditor</i>	4
<i>Strategi Anti Fraud & Whistleblowing System</i>	3

Fungsi Audit Internal

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, Audit *Internal* Perseroan didukung tenaga audit profesional yang sebagian telah bersertifikat nasional maupun *internasional* sebagai berikut.

Tabel Sertifikasi Profesi Audit *Internal*

Pendidikan Akademis Formal		31 Des 2014 (orang)	31 Des 2015 (orang)	Sertifikasi				
Tingkat	Bidang Studi			QIA	Kompe- tensi LSPP	UKMR/ BSMR	CFE	CFrA
Doktor (S3)	Administrasi Publik							
Pasca Sarjana (S2)	Magister Manajemen (MM)	3	2	1		1	2	1
	Magister Akutansi (M.Si)	7	8	7		7	8	2
	Manajemen SDM (MM)		1	1			1	
	Magister Komputer		1	1				
	Hukum		2	2			2	
Sarjana (S1)	Manajemen/ Ek. Perusahaan	12	12	8		4	8	1
	Akuntansi	33	35	23		2	14	1
	Studi Ekonomi Pembangunan	5	5	2			1	
	Man. Informatika/ Ilmu Komputer	8	8	2				
	Hukum	2	7	1				
Diploma (D3)	Perpajakan		1					

Unit Bismis	Ketua Tim		Anggota Tim			Jumlah Personil
	SAA	AA	SA	AG-14	AG-13	
Audit Umum						
Kantor Pusat - Divisi	1		2	2		5
Kantor Wilayah	1		2	2	5	
Kantor Cabang						
a. Kelas Utama	1		2	2		5
b. Kelas I	1	1	2	1	1	5
c. Kelas II		1	2	1		4
d. Kelas III		1	1	1	1	4
Unit Syariah	1		2	2		5
Audit ICT						
Aplikasi: Divisi/Desk Kantor	1		2	2		5
Aplikasi: Sampling Kantor Cabang		1	1	1		3
Audit Khusus						
Fraud Investigation	1		1	2		4
Special Review		1	1	2		4

Keterangan: SAA = Senior Associate Auditor (Set. Department Head - Grade 17), AA = Associate Auditor (Set. Manager - Grade 16), SA = Senior auditor (Set. Manager G.15), A = Auditor (Set. Assistant Manager G.14 atau Assistant Manager G.13)

Fungsi Audit Internal

Selain itu dapat disampaikan pula bahwa dalam penyusunan dan penetapan jumlah personil setiap tim audit dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian risiko (*risk assessment*) atas 14 proses bisnis dan aktivitas pengelolaan ICT, kualifikasi Auditor (jabatan dan fokus kompetensi), serta kelas Cabang/Divisi/Desk. Penetapan dan kecukupan jumlah personil juga akan mempunyai dampak pada hari audit dan penyusunan anggaran biaya audit IAD.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Fungsi dan tugas *Internal Audit Division* adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian *intern* bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank dalam kerangka penerapan tata kelola bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut.

1. Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Perseroan.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
4. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, penggunaan sumber daya, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan operasional dan bisnis bank berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/ menyempurnakan efektivitas manajemen risiko, pengendalian *intern* dan proses pengelolaan (*governance processes*).

Pedoman *Internal Audit Division* (Piagam Audit)

Dalam melaksanakan tugasnya, *Internal Audit Division* (IAD) telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor:SKB-03/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011. Selain sebagai pedoman kerja, *Internal Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan.

Isi dari *Internal Audit Charter* :

1. Visi dan Misi
2. Struktur dan Kedudukan
3. Ruang Lingkup
4. Wewenang, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
5. Pernyataan Dukungan Independensi
6. Tanggung Jawab Audit
7. Kode Etik dan Persyaratan Auditor *Internal*
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
9. Tindak Lanjut
10. Lain-lain

Kode Etik Auditor

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi *Code of Conduct* yang berlaku secara umum, SPI juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam *Internal Audit Charter*. Kode Etik Auditor Perseroan adalah :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Fungsi Audit Internal

5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
6. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2015

Program Kerja IAD

Program Kerja *Internal Audit Division* tertuang dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Program Kerja tersebut mencakup sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi personil IAD, penilaian risiko, pengembangan personil IAD.

Secara umum, gambaran program kerja pada *Internal Audit Division* merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang terdiri dari:

1. Program kerja kelompok auditor (Audit Umum Konvensional, Audit Umum Syariah, Audit ICT serta Audit Khusus dan Investigasi)
 - Target Obyek Audit Umum, Audit ICT, Audit Tematik dan *Quality Assurance ISO Certification* Untuk perencanaan audit umum (konvensional dan syariah), audit ICT, audit khusus dan investigasi serta pelaksanaan audit ISO 9001:2008 yang terjadwal yaitu:

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2014	2015	+/-	%	
A. AUDIT UMUM (AU)	113	113	-	0%	
AI . AU KONVENSIONAL	86	89	3	3%	
A2. AU. SYARIAH	27	24	(3)	-11%	
B. AUDIT ICT	29	24	(5)	-17%	Berbeda dengan obyek audit ICT pada tahun 2014 yaitu audit aplikasi, obyek audit ICT tahun 2015 akan difokuskan pada area <i>Information Security Electronic Banking</i> yang terdiri dari audit atas produk ATM, SMS, <i>Mobile</i> , <i>Internet Banking</i> , <i>Virtual Account</i> , <i>iCash</i> Efisiensi Bisnis yang terdiri dari audit atas <i>Voip</i> , <i>Vicon</i> , <i>iFlow</i> , <i>Email</i> Manajemen IT Syariah
OBJEK AUDIT UMUM & ICT	142	137	(5)	-4%	
C. AUDIT KHUSUS & INVESTIGASI	3	1	(2)	-67%	
C.1. Audit Tematik	3	1	(2)	-67%	Tema: Perkreditan
C.2. Penugasan Khusus Audit Kanwil	0	2	2	100%	

Fungsi Audit Internal

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2014	2015	+/-	%	
C.3. Audit Khusus/ Investigasi	0	0	-	0%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk periode 2015, namun terdapat 4 (empat) permasalahan pada tahun 2014 yang diperoleh melalui mekanisme <i>whistleblowing system</i> maupun disposisi pada <i>executive summary</i> yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2015.
D. AUDIT SERTIFIKASI ISO 9001:2008	21	21	-	0%	
JUMLAH OBJEK AUDIT	166	161	(5)	-3%	OBJEK AUDIT

Program kerja audit tersebut telah disesuaikan perkembangan organisasi, bisnis Perseroan, *risk assessment audit* tahun 2015, *Audit Mandatory* dan program pemerintah untuk audit umum (*general audit*) dan audit ICT. Total obyek audit terjadwal atas audit umum, audit ICT, audit khusus dan investigasi serta audit sertifikasi ISO 9001:2008 untuk *audit plan* tahun 2015 adalah sejumlah 161 obyek audit yang turun sebanyak 5 (lima) obyek audit dari target *audit plan* pada tahun 2014 sejumlah 166 obyek audit, yaitu:

a. Target obyek audit untuk pelaksanaan Audit umum

Program kerja audit umum akan dilaksanakan oleh 2 (dua) kelompok auditor yaitu *Conventional General Audit Group* dan *Sharia General Audit Group*, yaitu:

- *Conventional General Audit*

Jumlah obyek audit pada tahun 2015 untuk *conventional general audit group* adalah sebanyak 89 obyek audit atau meningkat sebanyak 3 obyek audit dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 86 obyek audit atau meningkat sebanyak 3%. Target obyek audit umum konvensional menjadi tanggung jawab Kelompok Audit Konvensional.

- *Sharia General Audit*

Jumlah obyek audit pada tahun 2015 untuk *Sharia General Audit Group* adalah sebanyak 24 obyek audit atau turun sebanyak 3 obyek audit dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 27 obyek audit atau turun sebanyak 11%. Target obyek audit umum syariah menjadi tanggung jawab Kelompok Audit syariah.

Penetapan Objek audit tersebut disesuaikan dengan obyek audit yang telah jatuh tempo berdasarkan perhitungan *risiko* dan siklus audit (*Low* per 24 bulan, *Low to Moderate* per 18 bulan, *Moderate* per 12 bulan, *Moderate to High* 9 per bulan, *High* per 6 bulan).

b. Target obyek audit untuk pelaksanaan Audit ICT

Target Obyek Audit ICT sebanyak 4 obyek audit yang terdiri dari 13 obyek audit (1 obyek audit pada aspek manajemen ICT Syariah, 11 obyek audit atas aplikasi dan 1 obyek audit pada aspek keamanan informasi) dan 20 obyek audit yang merupakan sampling pada Kantor Cabang.

Pelaksanaan audit ICT pada Kantor Cabang sehingga hanya akan diterbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) untuk masing-masing obyek audit ICT (tidak diterbitkan LHA untuk masing-masing Kantor Cabang karena merupakan *sampling*). Target obyek audit ICT menjadi tanggung jawab Kelompok Audit ICT.

Fungsi Audit Internal

- c. Target obyek audit untuk pelaksanaan Audit Tematik.

Audit tematik pada tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan oleh Tim Audit Khusus dan Investigation namun apabila dibutuhkan, akan dilakukan penambahan/gabungan tim dari group audit konvensional/syariah/ICT.

- d. Target obyek audit untuk pelaksanaan Audit sertifikasi ISO 9001:2008

Audit ISO 9001:2008 dilaksanakan oleh group auditor *Quality Assurance ISO Certification* dengan target obyek audit sebanyak 21 obyek audit atau meningkat 2 obyek audit dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 19 obyek audit.

- Cadangan obyek audit untuk pelaksanaan audit khusus dan investigasi
Audit khusus merupakan pencadangan terhadap kemungkinan diperlukannya

penugasan *fraud* audit (*special investigation*) terhadap tindak perbuatan *indiscipliner* (kecurangan, penggelapan, manipulasi dsb), serta penugasan *audit non fraud* lainnya. Pencadangan waktu terhadap kemungkinan penugasan Audit Khusus dalam setahun baik yang bersifat *fraud* (*special investigation*) maupun *non fraud* untuk Konvensional dan Syariah ditetapkan sebanyak 20 objek audit dengan cadangan waktu sebanyak 345 hari kerja, sehingga harus dilaksanakan minimal oleh 2 (dua) Tim Audit.

Jumlah target audit khusus dan hari yang dicadangkan didasarkan pada pertimbangan *trend* jumlah realisasi pelaksanaan audit khusus pada tahun-tahun sebelumnya, masukan/arahan manajemen serta hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagai berikut.

Tabel Jumlah Target Audit Khusus

No	Penugasan Audit Khusus	Cadangan Jumlah Objek Audit	Cadangan Hari			
			LPA @ 2hari	Field @ 5 sd.10 hari	Laporan @ 5 hari	TOTAL
1	<i>Fraud/Special Investigation</i>	20	40	140	80	290
2	<i>Review Khusus</i>	3	6	20	24	66
	Jumlah	23	46	160	104	356

Rencana pelaksanaan audit khusus yang cukup padat baik sesuai trend audit khusus dari tahun ke tahun maupun berdasarkan arahan manajemen serta yang telah ditentukan/diinstruksikan secara *mandatory* oleh Auditor Eksternal (Bank Indonesia atau BPK), maka pada tahun 2015 dibentuk Tim Audit Khusus yang beranggotakan sebanyak 2 (dua) tim dengan jumlah orang sebanyak 2 - 3 orang per tim. Sesuai kebutuhan, anggota untuk tim audit khusus dapat berasal dari Tim Audit Khusus sendiri atau ditambah dengan anggota Tim Audit yang membawahi unit audit terjadi permasalahan atau yang ditentukan oleh pimpinan IAD. Pelaksanaan Audit Khusus tahun 2015 menyesuaikan kebutuhan dan perintah/arahan adhoc dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris.

1. Audit Anak Perusahaan dan Badan usaha terafiliasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.SKB-03/DEKOM-DIR//DAI/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Piagam Audit *Intern* (*Internal Audit Charter*) PTBank Tabungan Negara (Persero) Tbk, IAD dapat melakukan audit terhadap badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Perseroan. Audit dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan instruksi/arahan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris.

Fungsi Audit Internal

2. Ekspektasi Manajemen yang menjadi perhatian dan komitmen fokus audit *intern* tahun 2015 Hal-hal yang menjadi fokus audit pada saat pelaksanaan audit oleh kelompok audit baik General Audit (Konvensional dan Syariah) maupun Audit ICT yang diantaranya merupakan arahan serta ekspektasi manajemen Direksi dan Komisaris, hasil dan rekomendasi audit khusus, hasil audit eksternal (BI, BPK dan KAP), arahan pimpinan IAD serta hal-hal yang telah diidentifikasi menjadi fokus audit diantaranya adalah:
 1. Manajemen perkreditan yang bersifat *end to end* yang dimulai dari pengelolaan ketentuan/kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia dan dukungan sistem teknologi informasi atas proses kredit.
 2. Sistem transaksi dan sistem pencatatan, pembukuan dan pelaporan akuntansi pada unit bisnis Syariah (Divisi dan Kantor Cabang Syariah).
 3. Penegasan kembali Kode Etik Auditor butir "Obyektifitas dan Independensi" bahwa setiap auditor Wajib melaporkan segala informasi yang diketahui secara lengkap tentang fakta material, sesuatu yang berpotensi dan atau yang telah bertentangan dengan peraturan *internal*, hukum dan perundang-undangan yang apabila tidak dilaporkan maka dapat mengurangi makna atau bobot dari laporan atas kegiatan audit yang dilakukannya.
 4. Penerapan kebijakan/ketentuan mengenai metode pemilihan *sampling*, *scope* dan *focus risk base* pada pelaksanaan audit.
 5. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan budaya kerja pada Bank.
 6. *Monitoring* dan audit atas tindak lanjut *Action Plan* atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 7. Monitoring temuan audit eksternal BPK, OJK, Kantor Akuntan dan audit eksternal lain yang terjadi di Kantor Cabang / Kantor Cabang Syariah yang menjadi objek audit *intern*.
 8. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah yang tidak dilakukan *General Audit* pada tahun 2015 akan dilakukan *Tentative Audit* dengan tujuan melakukan *review* atas pengendalian *internal* untuk aspek tertentu saja.
 9. Dilaksanakan *review* berkala atas proses monitoring terhadap 25 (dua puluh lima) debitur inti.
2. Program kerja *Quality Assurance*

Program kerja *Quality Assurance* (QA) *Department Head* tahun 2015 diharapkan dapat bersifat menyeluruh dan mencakup kegiatan perencanaan dan pengembangan pengelolaan kegiatan di seluruh aktivitas Fungsi Audit *Intern*, dengan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

 - a. Mengkoordinasikan dan menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan *Quality Assurance Audit Internal* dan *ISO Certification* dapat berjalan efektif dalam pencapaian kualitas hasil audit dan operasional yang optimal serta target kinerja yang ditetapkan.
 - b. Memelihara dan mengembangkan sistem dan metodologi *quality assurance Internal Audit* dan *ISO Certification*.
 - c. Menkoordinasikan dan melakukan supervisi pada unit kerja Audit Mutu *Internal ISO* agar dapat menjalankan tugas secara independen dan profesional sesuai dengan kode etik dan standar mutu ISO yang berlaku
 - d. Mengkoordinasikan dan mensupervisi Ketua dan Anggota Tim Audit Mutu *Internal (AMI) ISO* dalam melaksanakan kegiatan audit mutu *internal* mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dokumentasi serta pemantauan tindak lanjut sesuai rencana kerja.
 - e. Melakukan supervisi dalam menyusun/merancang dan menilai *survey*/penelitian tingkat kepuasan *Auditee* atas hasil audit maupun perilaku Auditor
 - f. Mengkoordinasi dan menjamin terselenggaranya proses analisa dan penilaian kecukupan, kelengkapan, ketelitian dan akurasi *preliminary assessment* atau persiapan audit, *draft executive summary* dan laporan hasil audit sesuai dengan kualitas dan pedoman yang ditetapkan sebelum dan sesudah diproses/dietujui oleh Kepala Divisi.

Fungsi Audit Internal

- g. Mengkoordinasikan dan menjamin terselenggaranya secara efektif proses analisa dan evaluasi kecukupan hasil audit agar sesuai dengan tujuan dan program audit yang telah ditetapkan, termasuk hasil penilaian atas kecukupan, kelengkapan, kerapian, akurasi, ketelitian / kecermatan Kertas Kerja Audit (KKA) dan proses supervisi yang dilakukan Ketua Tim Audit selama proses audit.
 - h. Mengkoordinasi dan menjamin terselenggaranya proses evaluasi atas kecukupan dan kelengkapan prosedur, *review* dan dokumentasi atas penilaian *audit rating* dan *Internal Control Assessment (ICA)* yang telah dibuat oleh kelompok auditor.
 - i. Memelihara dan mengembangkan sistem dan metodologi *quality assurance Internal Audit* dan *ISO Certification*.
3. Program kerja *Audit System Development*
Program kerja *ASD Department Head* tahun 2015 diharapkan dapat bersifat menyeluruh dan mencakup kegiatan perencanaan dan pengembangan pengelolaan kegiatan di seluruh aktivitas Fungsi Audit *Intern*, dengan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Mensupervisi dan memastikan adanya perencanaan yang memadai untuk panduan arah dan monitoring kegiatan fungsi Audit *Intern* secara menyeluruh di seluruh unit Kerja IAD.
 - b. Mensupervisi dan memastikan terselenggaranya dukungan sistem, kebijakan, prosedur, panduan, program audit bagi seluruh unit kerja fungsional dan struktural di IAD.
 - c. Mensupervisi dan memastikan proses evaluasi kebutuhan sumber daya manusia / personal IAD serta terselenggaranya proses pemenuhannya.
 - d. Memastikan terselenggaranya kegiatan pengembangan dan atau penyempurnaan metodologi dan implementasi sistem operasional prosedur dan teknik audit sesuai kebutuhan termasuk di dalamnya terkait pengembangan dan *maintenance* aplikasi *Audit Management System (AMS)*.
 - e. Memastikan terselenggaranya kegiatan *desk audit* melalui *tools* audit berbasis *Audit Command Language (ACL)* untuk *support* data integritas kepada Group Auditor maupun analisa *database* yang telah ditetapkan secara rutin dan berkelanjutan.
 - f. Mensupervisi dan memastikan terselenggaranya proses perencanaan dan realisasi pengembangan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan seluruh personal IAD dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan produktivitas.
 4. Program kerja *Reporting Counterparty Documentation Audit*.
Program kerja RCDA Department Head tahun 2015 diharapkan dapat bersifat menyeluruh dan mencakup kegiatan perencanaan dan pengembangan pengelolaan kegiatan di seluruh aktivitas Fungsi Audit *Intern*, dengan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Memastikan terselenggaranya pengelolaan kegiatan pelaporan, *monitoring*, dokumentasi dan administrasi audit yang tepat waktu, akurat efisien dan efektif
 - b. Melakukan pengelolaan dan supervisi proses pelaporan hasil kegiatan audit, *monitoring* tindak lanjut hasil audit *intern* maupun audit ekstern yang digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada pihak *intern* Bank maupun pihak *ekstern* Bank.
 - c. Mengelola tindak lanjut temuan Audit *Internal* yang terkait dengan Ikhtisar Lintas Divisi (ILD) untuk dikoordinasikan penyelesaiannya dengan Divisi-Divisi terkait.
 - d. Menyusun dan memastikan ketepatan waktu penyampaian Laporan secara periodik Hasil Monitoring Tindak Lanjut Ikhtisar Lintas Divisi kepada Kepala Divisi melalui Audit *superintendent* dengan tembusan RCDA *Department*.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sekaligus bertindak sebagai *counterparty* bagi auditor ekstern (Bank Indonesia atau OJK, BPK, BPKP, KAP maupun PPATK jika diperlukan).

Fungsi Audit Internal

- f. Mengelola penyelesaian tindak lanjut temuan Audit Eksternal yang terkait dengan Ikhtisar Lintas Divisi (ILD) untuk dikoordinasikan penyelesaiannya dengan Divisi terkait.
 - g. Memastikan terselenggaranya pemberian informasi kepada Grup Auditor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil audit *Intern* dan Ekstern.
 - h. Melakukan supervisi untuk memastikan terselenggaranya kegiatan dokumentasi kegiatan audit *intern* dan ekstern serta dokumentasi peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan IAD telah dilakukan dengan baik (lengkap tepat waktu dan akurat).
 - i. Memastikan terselenggaranya distribusi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan maupun kebijakan yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan IAD kepada seluruh unit kerja IAD.
 - j. Memastikan terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aktivitas audit *intern* dan ekstern.
 - k. Sebagai nara sumber ICTASD dalam implementasi, pengembangan, penyempurnaan AMS khususnya yang terkait dengan Pelaporan Audit dan Hasil Audit.
5. Program kerja *Strategi Anti Fraud dan Whistleblowing System*
Berdasarkan Ketetapan Direksi (KD) No 04/KD/DIR/SPMD/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Direksi No 06/KD/DIR/SPMD/2013 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada *Internal Audit Division* ditambahkan satu unit kerja baru yaitu Anti *Fraud* dan *Whistle Blowing System* yang meliputi satuan kerja Anti *Fraud Coordinator* dan *Whistleblowing System Coordinator* dengan tanggung jawab utama Kepala Departemennya adalah melakukan monitoring terhadap efektifitas pelaksanaan strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, yang terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut.
- a. Pencegahan.
Pencegahan *Fraud* merupakan segala aktivitas maupun perangkat yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah dan mengurangi potensi terjadinya *Fraud* melalui aktivitas Anti *Fraud awareness*, Identifikasi kerawanan, dan *Know Your Employee (KYE)*.
 - b. Deteksi.
Deteksi adalah pilar strategi anti *Fraud* yang memuat sistem serta perangkat yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dan mencakup mekanisme *whistleblowing system*, *surprise audit*, *surveillance system*, serta pengawasan melekat penanggung jawab operasional (PJO)
 - c. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
Investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat sistem, mekanisme, dan perangkat yang bertujuan untuk menggali informasi dan pengumpulan bukti kasus *Fraud* yang diikuti dengan sistem dan mekanisme pelaporan yang komprehensif kepada manajemen maupun regulator serta mekanisme peneraan sanksi atas kejadian *Fraud*.
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan rangkaian proses dan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap putusan sanksi yang telah dilakukan, diikuti dengan evaluasi terhadap kasus *Fraud* yang terjadi, dan diakhiri dengan rekomendasi perbaikan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme strategi anti *Fraud*.

Metode Audit

IAD bank BTN menerapkan metode audit dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), termasuk pemahaman yang lebih baik akan kuantitas manajemen, karakteristik bisnis dan risiko yang dihadapi bank, serta memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi secara benar. Metode ini berfokus pada proses bisnis (*business process-focused*), dan dalam penilaian risiko dan pelaksanaan auditnya diarahkan pada area-area yang sangat menentukan kesuksesan bisnis obyek audit.

Fungsi Audit Internal

Penerapan metodologi audit berbasis risiko bertujuan:

1. Meningkatkan nilai (*value*) yang diberikan kepada obyek audit, karena metodologi ini mencakup risiko bisnis utama;
2. Menghemat waktu pelaksanaan audit pada area-area yang berisiko rendah yang berdampak pada efisiensi bisnis utama;
3. Melakukan penilaian serta penelaahan terhadap risiko yang ada secara lebih menyeluruh dalam menjaga serta mengurangi risiko bank;
4. Menilai apakah temuan serta rekomendasi akan sejalan dengan tujuan utama bank (*corporate objectives*);
5. Memberikan kesempatan lebih besar dalam melakukan kaji banding (*benchmarking*) dan menggunakan praktik terbaik (*best practices*);
6. Memposisikan IAD sebagai agen perubahan bagi bank (*corporate change agent*);
7. Menjadikan IAD sebagai tempat pelatihan terbaik bagi pejabat Bank;
8. Menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan/*overlap* antara Auditor *intern* Auditor ekstern yang disebabkan kurangnya koordinasi dan berbedanya metodologi audit yang digunakan antara keduanya.

Hal-hal utama yang ditonjolkan dalam metodologi ini adalah:

1. Berfokus pada risiko dari proses bisnis yang menjadi obyek audit
Metodologi ini dikembangkan untuk menyelaraskan proses audit dengan risiko pada proses bisnis yang menjadi obyek audit, yang mengharuskan IAD untuk melihat obyek audit dari perspektif bisnis. Metodologi ini memberikan pendekatan berbasis usaha (*business-based*) sebagai dasar penilaian risiko. Metodologi ini memberikan pendekatan berbasis usaha (*business-based*) sebagai dasar penilaian risiko. Telah diketahui bahwa kegagalan pencapaian tujuan (*objectives*) dan sasaran (*goals*) obyek audit sangat dipengaruhi oleh risiko bisnis yang dihadapi oleh obyek audit dan bagaimana manajemen mengelola risiko-risiko tersebut, sehingga dengan memahami risiko-risiko bisnis dari obyek audit dan hubungannya dengan risiko melekat (*inherent risk*) dan risiko pengendalian, Auditor *Intern* dapat mengembangkan strategi audit secara lebih efektif dan efisien.
2. Penekanan pada pentingnya pengendalian *intern*
Identifikasi terhadap efektivitas pengendalian *intern*, termasuk indikator utama penilaian keberhasilan yang digunakan oleh manajemen Perseroan. Dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya pengendalian (*control*, Auditor *Intern* mengevaluasi, dan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian *intern*.
3. Prosedur analitis dan analisa data
Auditor *intern* menggunakan prosedur ini pada tahapan perencanaan serta persiapan audit, serta untuk melengkapi bukti-bukti audit dalam mendapatkan kepastian audit terhadap perubahan-perubahan yang signifikan atau untuk mengidentifikasi area mana aja yang membutuhkan investigasi lebih lanjut (*off-side audit*).
4. Peningkatan keahlian serta alih pengetahuan (*transfer knowledge*)
Auditor *intern* melakukan alih pengetahuan dengan mengefektifkan komunikasi baik secara horisontal maupun vertikal. Database yang selalu dimutakhirkan serta diadministrasikan dengan baik merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang tercapainya hal tersebut, sehingga memungkinkan IAD untuk:
 - a. Menyelesaikan permasalahan akuntansi dan audit yang cukup signifikan
 - b. Memberikan rekomendasi yang sekaligus berupa solusi bagi permasalahan obyek audit
 - c. Memahami masalah-masalah spesifik dalam bisnis obyek audit
 - d. Memutakhirkan pengetahuan mengenai perkembangan-perkembangan terbaru baik *internal* maupun eksternal bank secara berkesinambungan
 - e. Mengakses informasi-informasi praktek terbaik dalam melakukan kaji banding (*benchmark*)
 - f. Mempertimbangkan evolusi atau perubahan baru terhadap teknik dan teknologi audit yang digunakan dalam mengefisiensi pelaksanaan audit

Fungsi Audit Internal

5. Memberikan nilai (*value*) dan rekomendasi strategis
 Metodologi ini meningkatkan audit dengan risiko bisnis, terutama pada area yang penting bagi pencapaian tujuan dari obyek audit dan menekankan bahwa risiko bisnis dapat dikurangi jika obyek audit mengelolanya secara efektif. Auditor *intern* selain melakukan perencanaan audit dan prosedur audit, pada saat yang bersamaan juga memberikan nilai tambah dengan memberikan rekomendasi strategis kepada obyek audit dalam pengelolaan risiko usahanya.
6. Kerjasama tim (*teamwork*) dan keterlibatan Kepala IAD
 Kerjasama dalam tim dan kontribusi dari Kepala IAD akan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan audit, selain partisipasi langsung dari pimpinan dalam proses audit akan lebih mempertinggi nilai yang diberikan kepada obyek audit dan terbaginya tanggung jawab secara proporsional dalam keseluruhan tim.

Pelaksanaan Kegiatan Audit 2015

Pada tahun 2015, Audit *Internal* melaksanakan kegiatan audit dengan obyek audit mencakup Audit General (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Tematik, Audit ISO dan Audit Khusus dengan rincian obyek audit sebagai berikut.

Tabel Pelaksanaan Kegiatan Audit

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
I	Audit Umum (<i>General Audit</i>)			
I.1	Konvensional	89		
	Kantor Pusat-Divisi	22	21	95,45%
	Kantor Pusat - Divisi (SKN - BI)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (BI - RTGS)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (APU PPT, KUR, PKBL & FLPP)	4	4	100,00%
	Kantor Cabang Konvensional	61	61	100,00%
I.2	Syariah			
	Kantor Pusat-Divisi Syariah	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (SKN - BI Syariah)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (BI - RTGS Syariah)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (KUR (SHAD) & FLPP (SHAD))	2	2	100,00%
	Kantor Cabang Syariah	19	19	100,00%
	Total Audit Umum (<i>General Audit</i>)	113	112	99,12%
II	Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)			
	Kantor Pusat Divisi - Obyek audit	4	6	150,00%
	Kantor Cabang Konvensional	20	24	120,00%
	Total Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)	24	30	125,00%
III	Audit Mutu Internal (AMI)			
	<i>Surveillance Grup Audit</i>	12	12	100,00%
	<i>Surveillance KP IAD</i>	3	3	100,00%
	Audit ISO Layanan Kredit 1 5 1	6	6	100,00%
	Total Audit Mutu Internal (AMI)	21	21	100,00%

Fungsi Audit Internal

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
Sub Total		158	163	103,16%
IV	Audit Khusus			
	Fraud Audit	0	26	NA
	Audit Klarifikasi	0	0	NA
	Audit Reviu	0	3	NA
	Total Audit Khusus	0	29	100,00%
Total		158	192	121,52%

Catatan : pelaksanaan objek audit pada Kantor Pusat-Divisi tidak tercapai 100 % dikarenakan terdapat reorganisasi struktur pada Kantor Pusat-Divisi

Sesuai dengan program kerja sepanjang tahun 2015, telah dilakukan audit dengan resume kegiatan audit dapat disajikan melalui tabel, sebagai berikut.

Tabel Resume Kegiatan Audit

No.	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Selesai	Belum Selesai	Keterangan
Audit Internal					
1.	General Audit – Kantor Cabang	1.796	1.465	331	-
2.	General Audit – Kantor Cabang Syariah	421	335	86	-
3.	General Audit – Kantor Pusat	145	118	27	-
4.	Audit Teknologi Sistem Informasi	420	273	147	-
Audit Eksternal					
1.	Bank Indonesia	86	55	31	-
2.	BPK – RI	0	0	0	Menunggu <i>Exit Meeting</i>
3.	Kantor Akuntan Publik	0	0	0	Masih proses audit

Efektivitas dan Cakupan Pelaksanaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh IAD mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Perseroan. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan *risk-based audit* dengan melihat risiko yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan.

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh IAD juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Perseroan.

Kebijakan Audit *Intern* Perseroan telah diimplementasikan sejak tahun 2004 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Kebijakan Audit *Intern* PTBTN (Persero) dengan perubahan terakhir pada PD No 08/PD/IAD/2013 tanggal 5 Desember 2013, pada Bab 1. Pendahuluan bagian 1.3 Pengendalian *Intern* sub bagian 1.3.3 IAD dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian *Intern* mengatur: "IAD merupakan bagian dari struktur pengendalian *intern* dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. IAD dalam kegiatan audit dan penilaian terhadap sistem pengendalian *intern* dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar, serta terpenuhinya kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana secara baik".

Fungsi Audit Internal

Cakupan audit tahun 2015 meliputi Audit Umum Konvensional (*Conventional General Audit*) dan Audit Umum Syariah (*Sharia General Audit*), Audit IT untuk Konvensional dan syariah, Audit Umum Kantor Wilayah dan Audit Khusus (*Special Audit*) yang dicadangkan serta ditambahkan dengan Audit ISO 9001:2008 terhadap Cakupan Audit Umum tahun 2015 meliputi kegiatan audit sebagai berikut.

1. Audit Umum Konvensional dan Syariah (*Risk Base*) mencakup 14 proses bisnis pada Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah dan Kantor Wilayah serta Divisi Kantor Pusat yang fokusnya didasarkan pada hasil *risk assessment*, sehingga diharapkan audit yang dilakukan lebih efektif dan efisien karena lebih terfokus pada area-area yang memiliki risiko signifikan. *Risk assessment* terhadap auditabel unit dilakukan dengan memperhatikan regulasi Bank Indonesia (PBI dan SE BI) yang mengatur Manajemen Risiko Bank.
2. Audit Umum *Mandatory (Non Risk Based)* yaitu audit yang secara *mandatory* harus dilakukan tanpa pertimbangan *risk assessment* karena kewajiban regulasi Bank Indonesia, mencakup kegiatan pengelolaan SKN-BI, BI-RTGS, APU-PPT dan CDD-EDD), BI-SSSS dan Audit Kaji Ulang KPMR (RMD-PBI) serta objek audit lain program pemerintah seperti KUR dan UKM, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan CSR, serta FLPP.
3. Audit ICT mencakup 5 domain COBIT (*Control Objectives for Information Related Technology*) dan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko dalam penggunaan IT oleh Bank Umum yang fokusnya didasarkan hasil *risk assessment* pada area-area yang risikonya signifikan yang meliputi aplikasi *Core* dan *Non-core* Bank serta audit manajemen organisasi ICTD.
4. Audit Khusus dapat berupa *fraud audit* maupun *non fraud* dilakukan secara *ad hoc* berdasarkan instruksi/persetujuan Direktur Utama dan/atau Komisaris.
5. Audit atas Sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu audit terhadap unit kerja dan proses bisnis yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 yang

dilaksanakan oleh unit kerja *Quality Assurance - ISO Certification*.

6. Audit Tematik merupakan salah satu perwujudan ruang lingkup pekerjaan audit *intern* sesuai dengan PBI No 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit *Intern* Bank Umum (SPFAIB) yaitu mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan audit tematik didasarkan atas tema tertentu dengan pertimbangan tidak terbatas pada:
 - a. Arah kebijakan perusahaan pada periode audit yang tertuang pada Fokus Audit *Intern* yang dinilai memiliki risiko yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, dan/atau
 - b. Hasil temuan audit *intern* maupun audit ekstern sebelumnya, dan/atau
 - c. Antisipasi rencana fokus pemeriksaan regulator di tahun mendatang

Adapun pelaksanaan audit pada tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel pada bagian pelaksanaan kegiatan audit.

Cakupan audit ini telah efektif dilaksanakan pada tahun 2015

Pengembangan Kompetensi IAD

Dalam pengembangan karyawan IAD, selama tahun 2015 telah dilakukan peningkatan kualitas kerja tim audit dengan melaksanakan *training* dan pelatihan baik *internal* maupun eksternal. *Training* dan pelatihan *internal* tersebut dilakukan dengan cara diskusi diantara Kepala IAD, Direksi dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur *Internal* Bank. Sedangkan *training* dan pelatihan secara eksternal dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan dan *training* yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagai berikut.

Fungsi Audit Internal

Tabel Pengembangan Kompetensi IAD

Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
Pendidikan Proses Bisnis	PT Bank Tabungan Negara	5 - 7 Januari 2015
Pendidikan <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Lanjutan I dan II	Yayasan Pendidikan Internal Audit	8 - 23 Januari 2015
Pendidikan <i>Qualified Internal Audit Manajerial</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	8 - 23 Januari 2015
<i>IT Security Ethical Hacking</i>	Multimetics	2 - 6 Februari 2015
Pendidikan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	23 - 26 Februari 2015
Seminar Sertifikasi Manajemen Risiko	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13 Maret 2015
SOPAC 2015	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	14 - 20 Maret 2015
Pendidikan <i>Managerial Development Program</i> (MDP)	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16 - 27 Maret 2015
<i>Anti Fraud</i>	Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan (FKDKP)	1 - 2 April 2015
Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) dan Wisuda <i>Qualified Internal Audit</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	14 - 16 April 2015
Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM (Surat Perintah Membayar)	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22 - 23 April 2015
<i>Web Application Security</i>	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	5 - 6 Mei 2015
Pendidikan Manajemen Risiko	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9 Mei 2015
Seminari IAIB	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	13 Mei 2015
Purnabakti	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18 - 22 Mei 2015
Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	18 - 29 Mei 2015
Penerapan GCG terutama terkait pengendalian gratifikasi dan WBS	JSM <i>Managemen Consultant</i>	4 - 5 Juni 2015
<i>Management Development Program</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1 - 12 Juni 2015
Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	8 - 19 Juni 2015
<i>Preparing For ISO 9001:2015 Transition</i>	Triniti	2 Juli 2015
Pendidikan <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	27 Juli - 7 Agustus 2015
Pendidikan <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar II	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	27 Juli - 7 Agustus 2015
<i>Workshop GCG : Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Berdasarkan POJK No.17/POJK.03/2014</i>	Kuililibrium <i>Learning Center</i>	5 - 6 Agustus 2015
<i>Workshop : National Conference IIA Indonesia 2015</i>	IIA	19 - 20 Agustus 2015
<i>Workshop ACFE : Data Nalytics</i>	ACFE	26 - 27 Agustus 2015
Seminar dan Mukernas FKSPI 2015	FKSPI	16 - 18 September 2015
<i>Workshop Indonesia Expo (IBEX) 2015</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9 - 10 September 2015
<i>ECII Conference 2015</i>	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	19 - 26 September 2015
Sertifikasi CfrA	LPFA	28 September - 2 Oktober 2015

Fungsi Audit Internal

Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
<i>Workshop Audit Methodology and Quality Review</i>	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	1 - 3 Oktober 2015
Workshop Motivating Leadership	Prasetya Mulya	10 Oktober 2015
National Anti <i>Fraud</i> Conference (NAFC)	ACFE	21 - 22 Oktober 2015
<i>Training Rating Knowledge</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29 - 30 Oktober 2015
<i>Workshop Motivating Leadership</i>	Prasetya Mulya	7 November 2015
Palatihan ISO 9001:2008 <i>Interpretation and Internal Audit</i>	Prasetya Mulya	16 - 17 November 2015
<i>Training ISO 31000 Series 1 : ERM Fundamental and International</i>	CRMS	7 - 11 Desember 2015

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan oleh *auditee* kepada Kepala IAD, yang kemudian dievaluasi untuk menetapkan, apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan “selesai ditindaklanjuti” dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus “*pending item*” diminta untuk diselesaikan oleh *auditee* dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi.

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan dan tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil Audit	Jumlah Rekomendasi	Selesai		Belum Selesai		Keterangan
		Jumlah	%	Jumlah	%	
Internal Audit Division						
General Audit KC	1.796	1.465	81,57%	331	18,43%	Belum jatuh tempo
General Audit Divisi	145	118	81,28%	27	18,62%	Belum jatuh tempo
General Audit KC Syariah	421	335	79,57%	86	20,43%	Belum jatuh tempo
Audit ICT	420	273	65,00%	147	35,00%	Belum jatuh tempo
Total	2.782	2.191	78,76%	591	21,24%	
Total Temuan IAD	5.374	4.783	89,00%	591	11,00%	

Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank BTN tahun buku 2015 ditetapkan melalui RUPSTahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Bank BTN mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Bank BTN selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai dengan RUPS Bank BTN yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2015, bahwa RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender terbatas pengadaan jasa audit umum, dengan peserta tender sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- Terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki afiliasi *internasional*;
- Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap bank berstatus perusahaan terbuka.
- Pengalaman mengaudit Bank Umum Devisa dan PKBL
- Pengalaman mengaudit Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah
- Pengalaman menyusun laporan hasil evaluasi kinerja (LHEK)

Berdasarkan kriteria tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik – Purwantono, Sungkoro dan Surja – *Ernst and Young* sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2015.

Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Periode 5 Tahun Terakhir

Adapun Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Publik, *Fee* yang mengaudit Laporan Keuangan selama 5 tahun terakhir, termasuk di dalamnya Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dapat dilihat melalui table di bawah ini.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, *Fee* dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	<i>Fee</i>	Izin KAP
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaya	Rp1.967.000.000	603/KM.1/2015
2014	Purwantono, Suherman&Surja	Benyanto Suherman	Rp1.769.000.000	381/KM.1.2010
2013	Purwantono, Suherman&Surja	Benyanto Suherman	Rp1.650.000.000	381/KM.1.2010
2012	Purwantono, Suherman&Surja	Benyanto Suherman	Rp1.650.000.000	381/KM.1.2010
2011	Purwantono, Suherman&Surja	Benyanto Suherman	Rp1.490.000.000	381/KM.1.2010

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada Periode 2015, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Bank BTN tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan dan PKBL pada tahun buku 2014 (*fee NIHIL*).

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Pada Piagam Audit *Charter* Komite Audit SKB No.02/DEKOM-BTN/2013 dan No.02/DIR-BTN/2013 Tentang Piagam Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Komite Audit disebutkan sebagai berikut.

Ayat (3) tugas dan tanggung jawab komite antara lain sebagai berikut.

- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian *intern* dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan *internal* auditor.
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta shasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pegawai *Intern* maupun auditor eksternal.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.

Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab pada piagam audit *charter* komite audit tersebut dapat dijelaskan bahwa Komite Audit dan Auditor Eksternal berkoordinasi secara aktif dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Auditor eksternal mengkomunikasikan mengenai rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank BTN yang didalamnya menyangkut ruang lingkup penugasan, *deliverables* dan *deadline*, metodologi audit, cakupan audit dan jadwal pelaksanaan audit.

Komite audit juga secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja IAD maupun Auditor Eksternal melalui rapat Komite Audit yang dilakukan setiap bulan. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh audit eksternal.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Bank Terhadap Ketentuan Mengenai Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, maka diperlukan hasil audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Kantor Akuntan Publik. Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2015 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut.

1. PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah sebagian melalui PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan terakhir diubah sebagian melalui PBI No. 14/14/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

Fungsi Audit Ekstern

2. PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

Ruang Lingkup pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. *General audit* atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Unit Usaha Syariah.
2. *General audit* atas laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Audit kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian *internal* per 31 Desember 2015 termasuk Unit Usaha Syariah.
4. Audit atas Laporan Evaluasi Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Tahun 2015 termasuk Unit Usaha Syariah.

Adapun strategi audit adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan
 - a. Komunikasi dengan regulator
 - b. Berkoordinasi dengan BTN untuk mengembangkan perencanaan audit
 - c. Penyusunan strategi dan perencanaan audit yang rinci

- d. Melakukan pelatihan *internal* untuk tim penugasan
2. Audit Interim
 - a. Memahami proses bisnis, risiko dan pengendalian *internal*
 - b. *Review* proses tutup buku
 - c. Identifikasi dan menyelesaikan isu akunting dan auditing
 - d. Pengujian pengendalian *internal* di Kantor Pusat dan di cabang-cabang
 - e. *Review* kolektibilitas dan kecukupan CKPN dan KYD
3. Tindak lanjut hasil interim
 - a. Update pemahaman atas pengendalian *internal*
 - b. Tindak lanjut hasil interim
 - c. Presentasi hasil interim audit
4. Audit akhir tahun
 - a. *Review subsequent event*
 - b. *Roll forward* prosedur substantif
 - c. *Review* tutup buku 31 Desember 2015
 - d. Finalisasi penyesuaian audit
 - e. Menerbitkan laporan hasil penugasan
5. Laporan
 - a. Penyelesaian PKBL, *management letter*, laporan evaluasi kinerja dan PSA 62

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Umum

Kebijakan akuntansi Perseroan adalah kebijakan-kebijakan yang memuat prinsip dasar, peraturan dan praktek akuntansi yang diterapkan bank sehingga pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian, pengawasan serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan sesuai dan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Bank Indonesia, ketentuan OJK, dan regulator lainnya.

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan regulasi Pasar Modal (Bapepam-LK) yaitu Peraturan No. VIII.G.7, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Adapun beberapa perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi pada periode 2015 dapat dilihat pada bagian Perubahan Kebijakan Akuntansi Laporan Tahunan ini.

Penerapan Konvergensi PSAK Ke IFRS

1. Tahap 1 Tahun (2008 – 2009) Persiapan Awal dan Infrastruktur dengan melaksanakan kegiatan yang secara garis besar sebagai berikut.
 - a. Rekonsiliasi PSAK dengan IFRS
 - b. Identifikasi dampak signifikan terhadap Bank
 - c. Kajian dampak penerapan pada Laporan Keuangan, Struktur Organisasi, IT dan SDM
 - d. Kajian pendekatan penerapan sistem
 - e. Pengadaan konsultan pendamping dan sistem
 - f. Mempersiapkan SDM melalui *internal training, workshop* dan seminar
 - g. *Data Gap Analysis* dan *Data Feeding*.
2. Tahap 2 Tahun (2009 – 2010) Implementasi Awal dan Analisa Transaksi
 - a. Melakukan analisa transaksi terhadap semua transaksi signifikan yang berdampak
 - b. Revisi kebijakan dan prosedur
 - c. Mempersiapkan SDM melalui *internal training, workshop* dan seminar
 - d. Simulasi secara paralel dengan pengembangan sistem secara bertahap
 - e. Mempersiapkan proforma laporan keuangan sesuai PSAK 50 dan 55
3. Tahap 3 Tahun (2010 – 2012) Implementasi Tahap Lanjut dan *Safe Guarding*
 - a. Penyelesaian pengembangan sistem selesai dan running aplikasi sistem baru
 - b. Revisi kebijakan dan prosedur baru
4. Tahap 4 Tahun (2012 – dst)
 - a. *Fully Comply* mulai 1 Januari 2012
 - b. Telah menerapkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif sesuai PSAK 50 dan 55
 - c. Melakukan evaluasi dampak penerapan PSAK secara terus menerus dan komprehensif.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan Dengan PSAK yang Berlaku

Pada periode 2015, tidak terdapat ketidaksesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAK yang berlaku. Laporan Audit menunjukkan bahwa Laporan Keuangan 2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Fungsi Manajemen Risiko

Penerapan sistem Manajemen Risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank, baik Komisaris dan Komite Pemantau Risiko maupun Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian *internal*.

Unit Kerja Manajemen Risiko telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008

Risk Management Division (RMD) dalam pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan *Risk Management Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Bank BTN, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank BTN termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Fungsi Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) minimal 1 tahun sekali. Sesuai Peraturan Direksi No. 8/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-

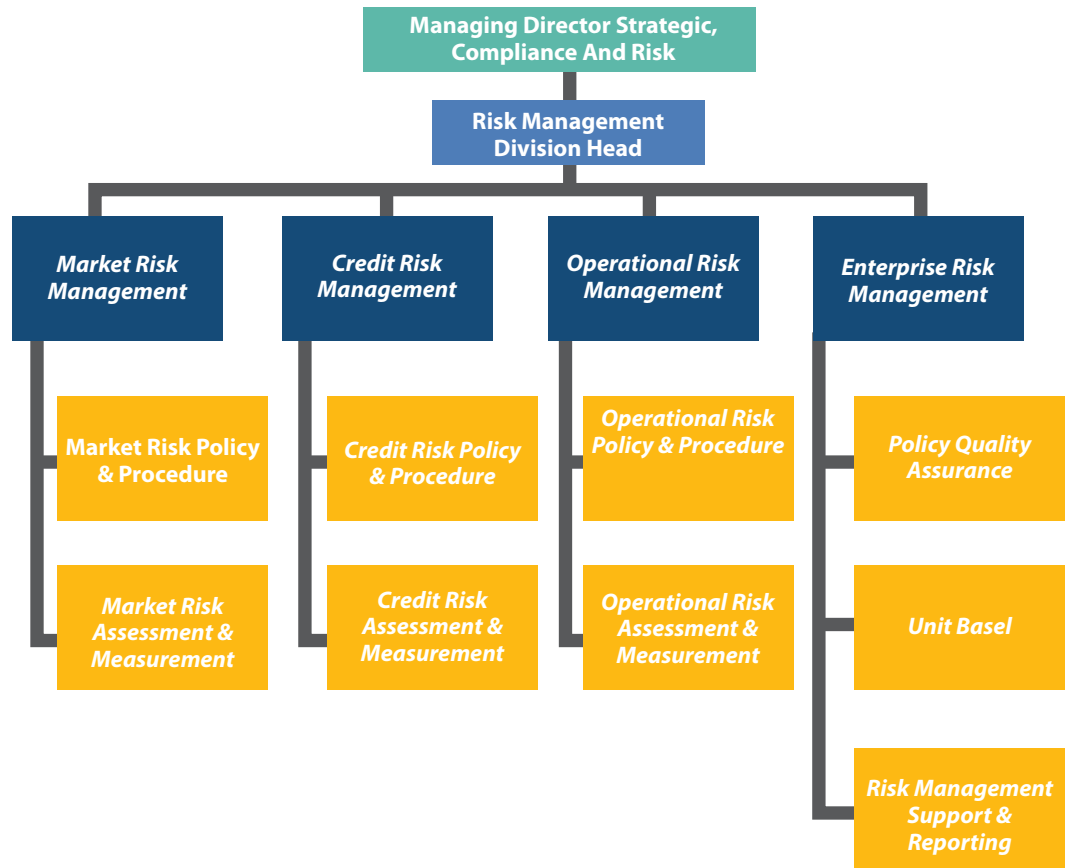
sama dengan *Division/Desk Head* unit kerja operasional dan *Risk Management Division Head*.

2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Perseroan tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Fungsi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko

Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko sesuai Ketetapan Direksi No. 02/KD/DIR/SPMD/2015 dapat dilihat pada bagan berikut.



Fungsi Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Managing Director Strategy, Compliance and Risk*. Struktur Organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Enterprise Risk Management Department*.

Credit Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit, Fungsi *Market Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, *Operational Risk*

Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit kerja *Policy and Procedure* dan Unit kerja *Assessment and Measurement*.

Enterprise Risk Management Department berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Profil Kepala Manajemen Risiko sebagai berikut.



Hertanta

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Yogyakarta 19 Januari 1965. Meraih gelar Sarjana Pertanian/ Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor tahun 1988 dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran tahun 2005. Menjabat sebagai Kepala *Risk Management Division* sekaligus sekretaris Komite Manajemen Risiko sejak 5 Mei 2015. Sebelum menjadi kepala RMD telah menduduki berbagai posisi kunci di Bank BTN, yaitu Kepala Cabang BTN KC Mataram (Juli 2006 s/d Februari 2009), Kepala Cabang BTN KC Sidoarjo (Maret 2009 s/d April 2010), Kepala Cabang BTN KC Yogyakarta (Mei 2010 s/d Juni 2011), Kepala Cabang BTN KC Malang (Juli 2011 s/d Juni 2013), Kepala Departemen *Performance - SPMD* BTN Kantor Pusat (Juli 2013 s/d 4 Mei 2015) dan Kepala *Risk Management Division (RMD)* BTN Kantor Pusat (5 Mei 2015-sekarang). Beliau juga pernah mengikuti pelatihan dan *workshop* baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: pelatihan interpretasi KPKU dan implementasi sistem penilaian kinerja BUMN yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN di Jakarta tahun 2015; *interest rate risk in banking book* yang diselenggarakan oleh pardi sudradjat consulting di Kantor Pusat BTN tahun 2015; *ERM fundamental and international conference* yang diselenggarakan oleh CRMS Indonesia di Hotel Pullman Bali tahun 2015.

Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko yaitu:

1. Membantu tugas-tugas Direktur *Strategic, Compliance and Risk* dalam melaksanakan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dan ERM bagi Bank Umum.
2. Memastikan pelaksanaan (implementasi) strategi manajemen risiko dan ERM yang telah disetujui oleh Direksi.
3. Memastikan dilaksanakan pemantauan akan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi) dan per aktivitas fungsional (perkreditan, treasury dan Investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, TSI dan SIM dan pengelolaan SDM).
4. Memastikan dilaksanakan pengembangan dan perancangan kebijakan dan prosedur serta perangkat/alat yang dibutuhkan dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Perseroan secara keseluruhan.
5. Memastikan pelaksanaan *stress testing* risiko secara keseluruhan.
6. Memastikan penyusunan rekomendasi besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada Satuan Kerja Operasional dan atau Komite Manajemen Risiko (KOMAR) secara berkala, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki *Risk Management Division*.
7. Memastikan pengembangan sistem informasi manajemen risiko secara keseluruhan.
8. Merencanakan dan merekomendasi kajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dilakukan atau dikembangkan oleh satuan kerja operasional Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
9. Merencanakan dan mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan Bank untuk mengukur risiko, khususnya apabila Bank akan menggunakan model untuk keperluan *internal*.
10. Memastikan penyusunan, penyampaian dan pendokumentasian laporan-laporan yang terkait dengan kebutuhan *internal* RMD antara lain RKAP Divisi, Survei, Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan *Key Performance Indicator* (KPI) secara bulanan, Laporan Profil Risiko secara triwulanan, Laporan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara semesteran, *Training Need Analysis* (TNA), Laporan *Self Assessment* GCG, *Dashboard* Profil Risiko dan lain-lain.
11. Memastikan dilaksanakannya penyusunan perencanaan, peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM di BTN dalam bidang manajemen risiko.
12. Memastikan pelaksanaan *Enterprise Risk Management*.
13. Memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan *internal* dan eksternal yang terkait dengan pengelolaan risiko.
14. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam lingkup kerjanya.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan *internal* perbankan menyebabkan lingkungan perbankan selalu berubah, dinamis, kompleks, dan terdiversifikasi. Faktor-faktor perubahan lingkungan tersebut antara lain semakin tingginya tuntutan *stakeholders* terhadap GCG, selain deregulasi dan perkembangan yang pesat juga mempengaruhi perubahan lingkungan perbankan.

Untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis perbankan yang dinamis, maka Bank BTN menerapkan manajemen risiko sebagai konsep strategis. Penerapan Manajemen Risiko Bank BTN merujuk kepada konsep Basel PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Otoritas lainnya terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Fungsi Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank BTN bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan *shareholder value*.

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank BTN secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi Bank terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*
Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta *limit* Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, strategi bisnis dan *risk appetite* Bank. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada

strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan *limit* Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan *limit* Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
Bagian dari penerapan manajemen risiko adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran eksposur Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha sebagai acuan untuk melakukan pengendalian, setelah dilakukan pemantauan. Dalam proses penerapan manajemen risiko di atas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
4. Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh
Pelaksanaan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan batasan wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit kerja, penetapan *limit-limit* yang memadai, kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank serta pelaksanaan audit berkala dengan cakupan yang memadai.

Strategi Manajemen Risiko

Penerapan strategi manajemen risiko Bank BTN sejalan dan disesuaikan dengan strategi Bisnis Bank. Strategi Manajemen Risiko ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha Bank ke depan, seperti melalui:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Bank BTN serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko.

Fungsi Manajemen Risiko

- Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2015, sebagai berikut.
 - a. Penyusunan dan penerbitan Peraturan Direksi No. 06/PD/RMD/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang *Self Assessment* tingkat kesehatan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. Penyusunan dan penerbitan Peraturan Direksi No. 08/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - c. Penyusunan dan penerbitan Surat Edaran Direksi No.41/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Oktober 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.
 - d. Penyusunan dan penerbitan SE Direksi No.60/DIR/RMD/2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar tanggal 28 Desember 2015.
 - e. Penyusunan dan penerbitan SE Direksi No.63/DIR/RMD/2015 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* pada tanggal 30 Desember 2015.
 - f. *Review* Peraturan Direksi mengenai Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang mengatur tentang *risk appetite* dan *risk tolerance* manajemen Bank BTN yaitu Peraturan Direksi No. 12/PD/RMD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - g. Penyusunan dan penerbitan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi 14/PD/RMD/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 3. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa ICR (*Internal Credit Rating*) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) untuk risiko operasional.
 4. Pelaksanaan *stress testing* untuk Risiko Kredit telah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, *stress testing* Risiko Pasar 2 (dua) kali dalam setahun dan *stress testing* Risiko Likuiditas dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario *stress/krisis*.

Profil Risiko

Jenis Risiko yang Dihadapi Bank dan Upaya Pengelolaannya

Terdapat 8 jenis risiko yang dihadapi Bank dan harus dikelola dengan baik. Kedelapan jenis risiko tersebut disebut *inherent risk* yang meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi.

Adapun penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut dan upaya pengelolaannya adalah sebagai berikut.

Jenis Risiko

Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya Risiko Kredit, Bank telah menerapkan kebijakan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian *intern* dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit.

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method* untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Fungsi Manajemen Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses *internal*, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum untuk Risiko Operasional, Bank menerapkan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Bank. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* (LGD) berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategic Innovation and Performance Management Division* (SIPD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi Risiko Kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melalui BCSO melakukan evaluasi eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat (*inherent*) pada ketentuan *internal*. Di samping itu, *Compliance Division* menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian kepatuhan terhadap produk baru dan konsep peraturan *internal* yang baru
2. Melakukan kajian terhadap peraturan *internal* yang masih berlaku
3. Melakukan sosialisasi kebijakan regulator baru kepada divisi-divisi dan Kantor Cabang.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Perseroan.

Khusus untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN terdapat 2 (dua) jenis risiko lagi yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi, sebagai berikut.

Fungsi Manajemen Risiko

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Upaya Mengelola Risiko

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI *Rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap *limit* risiko kredit, membangun aplikasi *Internal Credit Rating* untuk kredit komersial dan Menerapkan *four eyes principle* dengan membentuk *Credit Risk Desk*.

Pengelolaan Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar pada Bank secara umum ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Sesuai dengan regulasi dan mengingat bank tidak memiliki konsolidasi dengan anak perusahaan, maka pengelolaan risiko pasar hanya mencakup pengelolaan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko suku bunga yang dikelola oleh Bank sebagian besar berasal dari posisi *banking book* dan sebagian kecil berasal dari posisi *trading book*. Sedangkan risiko nilai tukar yang dikelola oleh bank hampir secara keseluruhan berasal dari posisi *banking book*.

Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Bank telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO). Dalam hal ini, ALCO secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau *Risk Management Division*. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru.

Fungsi Manajemen Risiko

Bank melakukan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan metode standar sebagaimana yang diatur oleh *regulator* dan analisis sensitivitas. Pengukuran risiko pasar dengan metode standar ditujukan untuk menghitung Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Dalam rangka mengukur risiko suku bunga, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank, dengan asumsi bahwa suku bunga pada kurva imbal hasil mengalami perubahan paralel. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Bank. Guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Bank melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan *regulator* dan skenario *internal bank*.

Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko pasar, Bank telah menetapkan *limit* yang mencakup *limit transaksi treasury*, *limit dealer*, *budget loss limit* dan *stop loss/stop gain limit*. Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Bank telah menetapkan batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam PBI 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai bagian pengelolaan risiko likuiditas, Bank memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commitee* atau ALCO), melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Bank.

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Bank memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen

Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* risiko likuiditas.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Bank dilakukan oleh *Treasury Division* (TRSD) dan *Risk Management Division* (RMD). Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Bank dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun *trend* kebutuhan likuiditas. Bank melakukan *stress testing* menggunakan skenario Bank *specific crisis* maupun *General Market Crisis stress test*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Bank memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis.

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala, yang dilakukan oleh TRSD maupun RMD. Pemantauan risiko likuiditas oleh RMD disampaikan kepada Direksi secara pekanan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur risiko likuiditas, Bank telah menetapkan *limit-limit* yang mencakup batasan minimal *Secondary Reserves* (SR) dan *limit maturity gap*. Kebijakan *internal* mengenai *Secondary Reserve* telah dilakukan *review* dan penyempurnaan pada semester II tahun 2015. Dalam pengukuran Risiko Likuiditas, Bank telah memiliki ketentuan mengenai metode pengukuran Risiko Likuiditas yang merupakan upaya untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas.

Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko, Bank mempunyai aplikasi BTN-Loss Event Database (BTN-LED). Aplikasi BTN-LED terkoneksi dengan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *lost event* secara *online* melalui media *web* (*web based*). Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut akan teridentifikasi peta eksposur risiko operasional dari masing-masing Kantor Cabang. Berdasarkan peta eksposur risiko operasional yang diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut. Dalam pemantauan Risiko Operasional dilakukan evaluasi posisi risiko operasional terhadap *limit* risiko operasional. Bank telah memulai rencana inisiasi penerapan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) dengan melaksanakan pelatihan RCSA pada tanggal 16-17 Desember 2015 dan persiapan pengembangannya.

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Bank. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. *Risk Management Division* memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank telah menempatkan *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) di 84 dari 87 Kantor Cabang yang berfungsi:

1. Untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan unit kerja atas aktivitas operasional (transaksi maupun non transaksi) pada Kantor Cabang (konvensional maupun syariah).
2. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja lainnya atas tindak lanjut aktivitas operasional yang memerlukan penyelesaian.
3. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan sadar risiko.
4. Melakukan *monitoring* tindak lanjut penyelesaian dan/atau perbaikan hasil evaluasi tingkat kepatuhan maupun hasil temuan audit.

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional Bank melakukan *review* secara berkala terhadap *Business Continuity Plan* sesuai dengan SE BI Nomor : 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank umum.

Pengelolaan Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* (LGD) berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan *limit* Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Dari 87 Kantor Cabang (Konvensional dan Syariah) 86 Kantor Cabang telah ditempatkan pegawai sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) dan dari 4 Kantor Wilayah 1 Kantor Wilayah telah ditempatkan pegawai sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang berfungsi untuk memberikan pendapat maupun konsultasi hukum kepada Kantor Cabang dalam rangka pengamanan aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dan restrukturisasi kredit, melakukan observasi, penelitian dan memberikan saran terhadap operasional di unit kerja Kantor Cabang yang dinilai memiliki potensi risiko hukum sertamendampingi dan membantu proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum.

Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategic Innovation and Performance Management Division* (SIPD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh *Strategic Innovation and Performance Management Division* (SIPD) secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Risk Management Division* (RMD) yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM.

Selanjutnya, *Risk Management Division*, satuan kerja bisnis, *Internal Audit Division* dan Kantor Cabang memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, *Strategic Innovation and Performance Management Division* (SIPD) berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Dalam rangka meminimalkan dampak Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses *Internal Manajemen Standar* (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan *internal* Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan *monitoring* terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke *Risk Management Division*.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank

dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, *Risk Management Division* dan *Compliance Division* bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan *Service Quality, Network and Electronic Banking Division* (SNED) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Service Quality, Network and Electronic Banking Division* (SNED).

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah. Bank telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Dalam pengendalian Risiko Reputasi, *Corporate Secretary Division* bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program sosial lainnya.

Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan Risiko Imbal hasil

Pengelolaan risiko Imbal hasil dilakukan melalui Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commite* atau ALCO), yang selain melakukan pengelolaan likuiditas juga melakukan pengelolaan terhadap risiko imbal hasil dan secara berkala membahas pengelolaan risiko tersebut pada Bank.

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko Imbal hasil, Bank memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Imbal hasil, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Imbal hasil mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko Imbal hasil, proses manajemen risiko Imbal hasil, serta kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* risiko Imbal hasil.

Pengelolaan Risiko Investasi

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Pembiayaan berbasis bagi hasil untuk sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko investasi dipantau sejak proses pemberian pembiayaan sampai dengan jatuh tempo pembiayaan. Pemantauan risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko terhadap *limit* risiko investasi, membangun aplikasi *Internal Credit Rating* dan Menerapkan *four eyes principle* dengan membentuk *Credit Risk Desk*.

Selain hal-hal di atas, pengelolaan risiko dilaksanakan dengan melakukan berbagai hal berikut:

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. *Review* terhadap PKMR telah dilakukan di semester II tahun 2015 oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyempurnakan panduan kebijakan manajemen risiko. Pengkajian ulang terhadap kebijakan *internal* juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di RMD, dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko. Perseroan juga mengikutsertakan beberapa pegawai dan pejabat di satuan kerja manajemen risiko untuk mengikuti program magister di bidang manajemen risiko serta perbankan dan keuangan.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan).

Fungsi Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Divisi Manajemen Risiko selama 2015, sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Kompetensi divisi Manajemen Risiko

Nama Pendidika ndan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
<i>BARa Risk Forum : Key Risk Management Challenges in 2015</i>	<i>Banker Association for Risk Management</i>	25 - 26 November 2015
<i>Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)</i>	Peak Pratama Indonesia	2 November 2015
Pelatihan BTN - LED Tool Tahun 2015	Bank BTN - <i>Risk Management Division</i>	21 - 22 Mei 2015
Pelatihan ISO 31000 Bidang Manajemen Risiko	CRMS Indonesia	18 - 22 Mei 2015
Pembekalan <i>Internal Branch Risk Officer (BRO)</i>	Bank BTN - <i>Risk Management Division</i>	12 - 13 Mei 2015
<i>BARa Risk Forum : Revamping The Capability In Loan Analysis</i>	<i>Banker Association for Risk Management</i>	17 - 18 September 2015
<i>BARa Risk Forum : Energizing The Role of Credit Risk Management in ERM Implementation</i>	<i>Banker Association for Risk Management</i>	5 - 6 Maret 2015
Pelatihan FRM	<i>BINUS University Business School</i>	15 Agustus - 7 November 2015
<i>Training ERM Maturity</i>	<i>PT InterlinkTechnology Service Indonesia</i>	1 - 2 september 2015
Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan	Jogja <i>Smart Indotama</i>	17 - 19 November 2015
Pelatihan <i>Operational Risk Management Tools</i>	Edward Kristianto, MBA	16 - 17 Desember 2015
Pendaftaran Pelatihan ISO 31000	CRMS Indonesia	7 - 9 Desember 2015
Pelatihan <i>workshop Excel Statistics and Financial Modelling</i>	PT AlamCiptaGemilang	30 - 31 Maret 2015
<i>Workshop Integrated Stress Test</i>	<i>Risk Management Guard (RMG)</i>	26 - 28 Oktober 2015
<i>Workshop Manajemen Risiko</i>	Jogja <i>Smart Indotama</i>	16 - 18 September 2015
<i>Workshop Aplikasi Metode Statistika</i>	MM & R	3 September 2015
<i>Workshop Operational Risk</i>	<i>Risk Management Guard (RMG)</i>	25 - 26 November 2015
Pelatihan <i>Basic Treasury Management</i>	Lentera Pro	26 - 27 Februari 2015

Fungsi Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko diperlukan kompetensi yang memadai yang tercermin dalam Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Pegawai RMD. Sepanjang tahun 2015, Pegawai RMD yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) sebagai berikut.

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko 2015

Level Sertifikasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
Level 2	<i>Operational Risk Assessment and Measurement Market Risk Policy and Procedure Credit Risk Policy and Procedure</i>	3
Level 3	<i>Operational Risk Management Dept Head Enterprise Risk Management Depart Head Market Risk Management Depart Head Credit Risk Management Department Head Policy Quality Assurance (2) Operational Risk Policy and Procedure(2)</i>	8
Level 4	<i>Risk Management Division Head</i>	1
Total		12

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Bank didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat *BI Rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut perlu dilakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk memastikan proses bisnis mencapai tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan serta risiko yang dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai pencapaian tujuan perusahaan, maka perlu berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan budaya manajemen Risiko, Bank telah melakukan sosialisasi budaya risiko ke Kantor Wilayah I, II, III dan IV dengan mengundang Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah yang dihadiri oleh Kepala Cabang.

Target dan Inisiatif Strategis Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2015

Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2015, sebagai berikut.

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Bank BTN serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2015, sebagai berikut.
 - a. Penyusunan dan penerbitan Peraturan Direksi No. 06/PD/RMD/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang *Self Assessment* tingkat kesehatan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Fungsi Manajemen Risiko

- b. Penyusunan dan penerbitan Peraturan Direksi No. 08/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - c. Penyusunan dan penerbitan Surat Edaran Direksi No.41/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Oktober 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.
 - d. Penyusunan dan penerbitan SE Direksi No.60/DIR/RMD/2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar tanggal 28 Desember 2015.
 - e. Penyusunan dan penerbitan SE Direksi No.63/DIR/RMD/2015 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* pada tanggal 30 Desember 2015.
 - f. *Review* Peraturan Direksi mengenai Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang mengatur tentang *risk appetitedan risk tolerance* manajemen Bank BTN yaitu Peraturan Direksi No. 12/PD/RMD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - g. Penyusunan dan penerbitan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi 14/PD/RMD/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa ICR (*Internal Credit Rating*) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) untuk risiko operasional.
 4. Pelaksanaan *stress testing* untuk Risiko Kredit telah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, *stress testing* Risiko Pasar 2 (dua) kali dalam setahun dan *stress testing* Risiko Likuiditas dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario *stress/krisis*.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
 - a. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko melalui Surat Komisaris kepada Direksi No. 139/KOM/ BTN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2015 atas usulan Direksi melalui Surat Direksi No. 1203/DIR/RMD/ XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. beberapa hal yang disarankan/menjadi masukan Dewan Komisaris yaitu :
 - 1) Agar *Risk Tolerance* total merupakan *risk appetite* +10 % dari *risk appetite* dan agar dibuat upaya khusus memperbaiki NPL per sub segmen yang disesuaikan dengan *risk tolerance bank wide*.
 - 2) Agar di dalam PKMR ditambahkan pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh manajemen apabila Bank telah mencapai atau mendekati *limit risk tolerance*.

Fungsi Manajemen Risiko

- 3) Agar menyampaikan hasil analisis portofolio kredit yang menjelaskan profil debitur termasuk debitur NPL, seperti : debitur dengan penghasilan *fixed* dan *non fixed income*, segmen per industri, dan lain-lain.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
 - a. Profil risiko disampaikan kepada Komisaris secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *Governance Processes*.
 - b. Rapat berkala Komite Pemantau Risiko dengan RMD secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Bank BTN, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank BTN.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1. Menyusun kerangka Manajemen Risiko termasuk strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk kebijakan *limit* risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kerangka Manajemen Risiko dan strategi dimaksud;
 - a. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko, Direksi telah melakukan:
 - 1) Direksi telah menyampaikan usulan perubahan PKMR tersebut kepada Dewan Komisaris melalui Surat Direksi No. 1203/DIR/RMD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permohonan

Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Usulan tersebut telah mendapat tanggapan/evaluasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Surat No. 139/KOM/BTN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terdapat beberapa evaluasi dari Dewan Komisaris terhadap usulan perubahan PKMR tersebut dan telah diakomodir pada PKMR yang baru.

- b. Memo TRSD No.112/M/TRSD/BLSM/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Risalah Rapat ALCO tgl 10 Februari 2015 dan ALCO Khusus tgl 12 Februari 2015, untuk mendapatkan formulasi BLR yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan suku bunga yang lebih akurat maka Direktur memberikan arahan kepada RMD yaitu:

- 1) Untuk dapat menentukan BLR per produk kredit, RMD agar melakukan evaluasi kembali terhadap perhitungan *risk premium* yang pernah dilakukan sesuai dengan memo RMD No.101/M/RMD/CRMD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2011 perihal Permintaan Data ALCO bulan Juli 2011 tentang perhitungan *risk Premium*.
- 2) Untuk menghitung/menetapkan parameter yang digunakan dalam perhitungan suku bunga per debitur/calon debitur atau permohonan suku bunga khusus, Divisi Kredit dan RMD agar melakukan kajian bersama mengenai Nilai Risiko Individual sehingga diperoleh suku bunga individual yang mengacu kepada *Credit Rating* yang dilakukan antara lain dengan cara:

Fungsi Manajemen Risiko

- Menentukan terlebih dahulu kriteria debitur sehingga dapat membedakan profil risiko debitur dan mengklasifikasikan debitur menjadi beberapa kategori.
 - Menentukan *Credit Rating* berdasarkan pada kriteria debitur dengan tingkat suku bunga KPR dan KPA dengan MK < 350 Juta yang akan menjadi dasar dalam menentukan besaran *risk premium*.
- c. Memo TRSD No.174/M/TRSD/BLSM/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Risalah Rapat ALCO tgl 19 Maret 2015, dalam rangka pengendalian COF dengan cara pemenuhan likuiditas melalui peningkatan produk CASA Direktur memberikan arahan TRSD, RMD dan Divisi *Funding* agar berkoordinasi dengan pihak regulator (OJK) dalam rangka klarifikasi pemenuhan rasio ketersediaan dan kecukupan likuiditas yang memadai untuk Bank BTN.
 - d. Memo TRSD No.289/M/TRSD/BLSM/IV/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Risalah Rapat ALCO tgl 24 April 2015, sesuai arahan Direksi RMD agar mengkaji kembali aspek-aspek yang berpengaruh dalam penentuan profil risiko Bank, diantaranya aspek likuiditas dan rentabilitas, serta membuat simulasi terkait aspek-aspek tersebut agar profil risiko Bank BTN yang saat ini peringkat 3 dapat membaik menjadi profil risiko peringkat 2.
 - e. Memo TRSD No. 320/M/TRSD/BLSM/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 Perihal Risalah rapat ALCO tgl 20 Mei 2015 sesuai arahan Direktur Divisi TRSD dan RMD agar mengeluarkan giro FLPP dari perhitungan konsentrasi depositan (50 depositan besar) maupun perhitungan *non core deposit* (NCD) serta RMD dan TRSD agar mengkaji ketentuan batas bawah *secondary reserve* (SR) menjadi satu model perhitungan dan mempertimbangkan pemenuhan rasio AL/NCD (min 50%).
 - f. Risalah ALCO bulan Mei tentang strategi permodalan (Materi SIPD)
 - g. Memo TRSD No.468/M/TRSD/BLSM/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 Perihal Risalah Rapat ALCO tgl 14 Juli 2015 membahas tentang model *internal* AL/NCD berdasarkan data historis kondisi normal dan krisis.
 - h. Memo TRSD No.534/M/TRSD/BLSM/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Risalah Rapat ALCO tgl 19 Agustus 2015, dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas TRSD agar menjaga likuiditas untuk memenuhi rasio AL/NCD sebesar 50%.
 - i. Memo TRSD No.608/M/TRSD/BLSM/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Perihal Risalah Rapat ALCO tgl 16 September 2015, membahas rasio AL/NCD dan LCR yang sesuai dengan karakteristik bisnis Bank BTN.
 - j. Mengupayakan peningkatan dana murah dan menurunkan komposisi rate deposito berbiaya tinggi menjadi lebih rendah sehingga dapat memperbaiki CASA dan meningkatkan NIM.
 - k. Laporan Hasil Pemantauan Eksposur Risiko Kredit secara bulanan dari RMD dilaporkan kepada Direksi.
 - l. Laporan Pemantauan Risiko Likuiditas secara pekanan dari RMD dilaporkan kepada Direksi.
 - m. Laporan Risiko Operasional (LED/Loss Event Database) secara triwulanan dilaporkan dari RMD kepada Direksi.
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
 - a. Direksi menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur, mengukur kesehatan Bank yang termasuk didalamnya profil risiko yaitu Peraturan Direksi No. 06/PD/RMD/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang *Self Assessment* tingkat kesehatan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. Bulan Juni 2015 telah disusun / finalisasi *limit* risiko pasar dan likuiditas sebagai bagian daripada revisi Surat Edaran Direksi No. 33/DIR/RMD/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Profil Risiko Bank
 - c. Bulan Juni 2015 telah disusun / finalisasi *risk appetite* dan *risk tolerance* untuk risiko kredit.
 - d. Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mengatur BCP,DRP,ERP dan lainnya sebagai upaya meningkatkan kesiapan Bank dalam menghadapi disaster, sedang dalam tahap pengadaan Konsultan.

Fungsi Manajemen Risiko

- e. Bulan Agustus 2015 Direksi telah menetapkan prosedur, mengukur risiko operasional berupa Surat Edaran Direksi No.30/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *BTN-Loss Event Database* (BTN-LED Tool).
 - f. Direksi telah menetapkan pengukuran risiko likuiditas yaitu Surat Edaran Direksi No.41/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Oktober 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.
 - g. SE Direksi No.60/DIR/RMD/2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar tanggal 28 Desember 2015.
 - h. SE Direksi No.63/DIR/RMD/2015 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* pada tanggal 30 Desember 2015.
 - i. Telah disusun SE Direksi mengenai Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dan sedang dalam proses permohonan legalisasi kepada divisi legal.
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui *limit* dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
 - a. Direksi telah menetapkan *limit* risiko dan besar maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia, dan praktek *prudential banking* yang baik.
 - b. Penetapan *limit* risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko merekomendasikan kepada Direktur Utama dan disetujui oleh Direksi.
 - c. Terdapat klasifikasi *limit* kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
 - d. Terdapat klasifikasi *limit* kewenangan dalam melakukan transaksi *treasury* per level jabatan.
 - e. Terdapat klasifikasi *limit* kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
 4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
 - a. Telah diperbaharui ketentuan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) untuk kredit konsumen pada bulan Maret 2015 dan BWMK untuk kredit komersial pada bulan April 2015.
 - b. Bulan Juni 2015 telah disusun perubahan kebijakan *Secondary Reserve* dan telah dilakukan kajian serta validasi oleh RMD dan pada bulan Agustus 2015 telah ditetapkan SE Direksi No.32/DIR/TRSD/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang *Secondary Reserve* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
 - c. SE Direksi No.41/DIR/RMD/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.
 - d. SE Direksi No.48/DIR/TRSD/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Pedoman Penyusunan *Contingency Funding plan* (Rencana Pendanaan Darurat).
 - e. Direksi telah menyampaikan usulan perubahan PKMR tersebut kepada Dewan Komisaris melalui Surat Direksi No. 1203/DIR/RMD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Usulan tersebut telah mendapat tanggapan/evaluasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Surat No. 139/KOM/BTN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Persetujuan Hasil *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terdapat beberapa evaluasi dari Dewan Komisaris terhadap usulan perubahan PKMR tersebut dan telah diakomodir pada PKMR yang baru.
 - f. Bulan Desember 2015 telah ditetapkan PD No. 14/PD/RMD/2015 tgl 29 Desember 2015 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Fungsi Manajemen Risiko

5. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - a. Direksi telah menetapkan melalui Peraturan Direksi mengenai organisasi manajemen risiko yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko dan Divisi-Divisi yang mendukung penerapan manajemen risiko yaitu RMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, fungsi pengendalian *intern* oleh IAD, *Credit Risk Desk* sebagai upaya perbaikan proses bisnis kredit komersial melalui penerapan *four eyes principle* dan fungsi kepatuhan dilakukan oleh CMPD sebagai Satuan Kerja Kepatuhan termasuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja tersebut.
 - *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu disampaikan melalui Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2014, Triwulan I/2015, Triwulan II/2015 dan Triwulan III/2015 serta kebutuhan data yang disampaikan juga kepada OJK pada bulan November 2015.
 - *Stress Testing* Risiko Kredit telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu terhadap kenaikan US\$ pada bulan Agustus 2015 dan kebutuhan data yang disampaikan kepada OJK pada bulan November 2015.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;
 - a. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Direksi memberikan arahan antara lain pada laporan-laporan yang disampaikan oleh RMD, yaitu :
 - 1) Profil Risiko Bank yang disampaikan secara triwulanan.
 - 2) Laporan Pemantauan Posisi dan Risiko Likuiditas disampaikan secara pekanan.
 - 3) Laporan pemantauan risiko *portofolio treasury* disampaikan secara pekanan.
 - 4) Laporan Hasil Pemantauan Eksposur Risiko Kredit yang disampaikan bulanan.
 - 5) *Stress Testing* periode Januari-Desember 2015:
 - *Stress Testing* Risiko Pasar telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu terhadap kenaikan US\$ pada bulan Agustus 2015 dan kebutuhan data yang disampaikan kepada OJK pada bulan November 2015.
7. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - a. Berdasarkan profil risiko bank, jenis risiko yang bersifat signifikan bagi bank adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Melalui mekanisme profil risiko bank, laporan pemantauan posisi dan risiko likuiditas serta laporan hasil pemantauan eksposur risiko kredit, Direksi memastikan bahwa unit-unit kerja terkait, menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan tersebut sehingga dengan demikian risiko kredit dan risiko likuiditas dapat diminimalisasi.
 - b. Perkembangan kedua jenis risiko yang signifikan di atas telah disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi melalui mekanisme Penyampaian Laporan Profil Risiko Bank secara triwulanan.
8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;

Fungsi Manajemen Risiko

- a. Direksi telah memastikan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank melalui :
 - 1) Pemberian arahan pada Laporan *monitoring* tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern/*intern* yang disampaikan IAD setiap triwulanan kepada Direksi.
 - 2) Mengevaluasi hasil tindak lanjut audit tahun sebelumnya pada *exit meeting* Audit
 - 3) Rapat Komite Audit
9. Mengembangkan budaya Risiko diawali dengan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian *intern* yang efektif;
 - a. Sebagai bagian dari mengembangkan budaya manajemen risiko, Direksi memastikan antara lain adanya :
 - 1) Sertifikasi manajemen risiko dan program *refreshment* sertifikasi kepada pegawai dan pejabat Perseroan.
 - 2) Pemberian pelatihan manajemen risiko pada pegawai baru.
 - 3) Sosialisasi *Strategic Compliance and Risk* di 4 (empat) Kantor Wilayah yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Cabang di Wilayah tersebut, salah satu sosialisasi yang disampaikan adalah meningkatkan *risk awereness culture* di seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dan menandatangani lembar komitmen Kepala Kantor Cabang untuk melaksanakan budaya sadar risiko di Kantor Cabang.
 - 4) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Cabang (Konvensional dan Syariah) melalui memo No.1/M/DIR/RMD/XI2015 tanggal 10 November 2015 perihal Perbaikan Peringkat Profil Risiko Bank, agar Kepala Cabang melakukan hal sebagai berikut.
 - Meningkatkan intensitas dan kualitas supervisi secara berjenjang pada setiap unit kerja.
 - Melakukan supervisi secara ketat dan insentif di setiap jenjang jabatan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya *fraud internal* maupun eksternal.
 - Melakukan monitoring ketat terhadap penyelesaian temuan audit
 - Agar komitmen budaya sadar risiko diinternalisasikan kepada seluruh jajaran.
 - 5) Pendidikan untuk Kepala Cabang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai operasional perbankan. Materi pendidikan dari *internal* menekankan mengenai *risk management*, *four eyes principle*, *internal control* dan *compliance*, GCG serta dilengkapi dengan materi dari pihak eksternal yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015.
10. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
 - Direksi telah memastikan kecukupan keuangan/anggaran melalui persetujuan pada RKAP 2015 dan dukungan infrastruktur.
11. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
 - Direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen terhadap satuan kerja bisnis dan IAD, RMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan fungsinya sebagai *Risk Manager* yang terus melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

Fungsi Manajemen Risiko

pengendalian risiko dan satuan kerja bisnis atau satuan kerja operasional sebagai *Risk Owner* yang wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja tersebut kepada RMD.

Pelaksanaan Implementasi Basel

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan mengantisipasi penerapan Basel II khususnya pilar 1, Bank telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran risiko kredit menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pengukuran Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Untuk rencana implementasi Basel III Bank telah melakukan persiapan penerapan kerangka kerja Basel III dan Bank telah melaporkan uji coba perhitungan *Leverage Ratio* (LR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) per triwulanan kepada regulator.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Fungsi Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian Bank sendiri (*Self Assessment*) atas tingkat kesehatan bank, maka Profil Risiko Bank BTN sebagai berikut.

Tabel Self Assessment Profil Risiko Posisi Desember 2014 dan Desember 2015

Jenis Risiko	Desember 2014			Desember 2015		
	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Pasar	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Likuiditas	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Operasional	<i>Moderate</i> (3)	<i>Fair</i> (3)	<i>Moderate</i> (3)	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Hukum	<i>Low</i> (1)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low</i> (1)	<i>Low</i> (1)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low</i> (1)
Risiko Strategik	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Kepatuhan	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
Risiko Reputasi	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)

Fungsi Manajemen Risiko

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko sebagai berikut.

1. Secara rutin/harian melakukan kajian terhadap *draft* kebijakan, revisi kebijakan dan produk/aktivitas baru dari satuan kerja operasional.
2. Secara mingguan melakukan pemantauan terhadap posisi Risiko Likuiditas melalui Laporan Pemantauan Posisi dan Risiko Likuiditas Pekan.
3. Secara bulanan RMD melakukan pemantauan terhadap eksposur Risiko Kredit dan pergerakan profil risiko pasar dan likuiditas melalui Laporan Pemantauan Eksposur Risiko Kredit dan *Monitoring* Profil Risiko Pasar dan Likuiditas.
4. Secara triwulanan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank. Selain profil risiko, RMD melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas. Untuk Risiko Operasional RMD melaporkan hasil evaluasi *BTN-Loss Event Database* dari seluruh Kantor Cabang.
5. Secara semesteran, RMD mengevaluasi dan melaporkan tingkat kesehatan Bank BTN secara *bankwide* (*Risk Based Bank Rating*) dan evaluasi atas kecukupan permodalan Bank dengan melaporkan Laporan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
6. Secara tahunan, RMD mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Bank melakukan evaluasi atas aplikasi *Credit Scoring Model* (CSM) untuk proses kredit konsumen. Bank juga mengevaluasi dan mereview Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) serta melakukan *stress testing* untuk Risiko Pasar dan Risiko Kredit.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses evaluasi efektivitas Sistem Manajemen Risiko, Perseroan membangun sistem informasi Manajemen Risiko. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu. Saat ini Perseroan sedang mengembangkan *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) yang membantu mengumpulkan informasi *loss event* yang terjadi di Kantor Cabang sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi di KC dan dapat ditindaklanjuti dengan memitigasinya.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko juga dilakukan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh RMD melalui unit kerja *assessment and measurement* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan.

Penerapan Iso 9001:2008

Dalam rangka memastikan bahwa penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko telah sesuai *standard* mutu internasional, maka pada akhir tahun 2015 RMD telah berhasil mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian *Intern* (SPIN) merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas disain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Beberapa tujuan SPIN Perseroan adalah untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan), yaitu: untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (Tujuan Informasi), yaitu: untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (Tujuan Operasional), yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko), yaitu: untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sedangkan, unsur-unsur lingkungan pengendalian Perseroan dapat disampaikan bahwa lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Sikap terhadap pentingnya pengendalian intern ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
5. Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Sistem pengendalian *intern* yang telah diterapkan oleh Bank BTN mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* bagi Bank Umum tanggal 29 September 2003. Elemen Sistem Pengendalian *Intern* Bank meliputi sebagai berikut.

Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian *intern*, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian *intern*. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian *intern*. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian *intern*. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian *intern* yang berlaku di Bank.

Sistem Pengendalian Intern

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional

Sistem Akuntansi/Kuangan, Informasi dan Komunikasi

Sistem Akuntansi/Kuangan meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak baik *intern* maupun *ekstern*, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor *ekstern*, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian *intern*. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit *intern*.

Kegiatan Pengendalian Intern

Secara garis besar tentang kegiatan pengendalian Perseroan dapat disampaikan bahwa sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat Perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Perseroan sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perseroan, yang sekurang-kurangnya meliputi:

Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.

1. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
2. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko dan
3. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - a. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.

Sistem Pengendalian Intern

- b. Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

1. Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan interen.
2. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan *internal-eksternal*.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)

1. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap asset Perseroan.
2. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

Dokumentasi (*Documentation*)

1. Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.

2. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai.
3. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor interen, akuntan publik dan otoritas pengawasan Bank.
4. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor interen ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Selain berbagai hal di atas, dapat disampaikan juga aktivitas pemisahan fungsi yang merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut.

1. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*".
2. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
3. Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen.
4. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Menetapkan fungsi dan tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadi manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
 - b. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;

Sistem Pengendalian Intern

- Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;
 - Transaksi dalam pembukuan Bank;
 - Pemberian informasi kepada nasabah Bank;
 - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit;
 - Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan;
 - Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian interen;
 3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
 4. Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
 5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
 6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Bank BTN senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian *intern* di Perseroan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian *intern* telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang telah dibentuk.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian *Internal* Perseroan senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian interen. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun *Internal Audit Division*.

Bank juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian interen secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi interen dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPIN tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan

- baik dalam organisasi Bank;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian interen;
 3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
 4. Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
 5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
 6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Pada periode 2015, *Internal Audit Division* (IAD) dalam melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas SPIN Bank yang memadai, yang mencakup lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assesment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan pertemuan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite, *Internal Audit Division* dan beberapa divisi terkait dapat dikatakan bahwa Perseroan telah memiliki sistem pengendalian *internal* yang memadai.

Perbaikan Kualitas Audit

Perbaikan kualitas audit diupayakan melalui *training* bagi para *internal auditor* dan melalui

Sistem Pengendalian Intern

forum diskusi dengan komite audit dengan agenda pembahasan seperti pemeriksaan aktivitas operasional, *refreshment risk based audit*, serta tindak lanjut hasil temuan audit.

Kesesuaian Pengendalian Internal Dengan Kerangka Coso

Sistem pengendalian *intern* Bank telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) di tahun 2013. Tujuan pengendalian *intern* menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian *intern* Bank yang telah diuraikan di atas.

Kelima unsur pengendalian *intern* menurut COSO sejalan dengan Elemen Sistem Pengendalian *Intern* Bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* bagi Bank Umum tanggal 29 September 2003.

Sertifikasi ISO 9001:2008

Compliance Division (CMPD) telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya Kepatuhan dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Aspek *Internal* menggambarkan budaya pengendalian risiko yang ada pada satuan kerja *auditee* untuk membantu identifikasi dini atas permasalahan yang timbul. Penilaian aspek *internal control* dilakukan melalui *Internal Control Assessment* (ICA) yaitu penilaian kualitas pengendalian *intern* dari satuan kerja *auditee* atas 5 (lima) komponen pengendalian *intern* COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi *rating* kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta *professional judgment* auditor melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BTN No.SKB-04 tentang Pedoman Sistem Pengendalian *Intern*, komponen pengendalian COSO meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian *intern* yang mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian *intern* yang

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian *intern* meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.

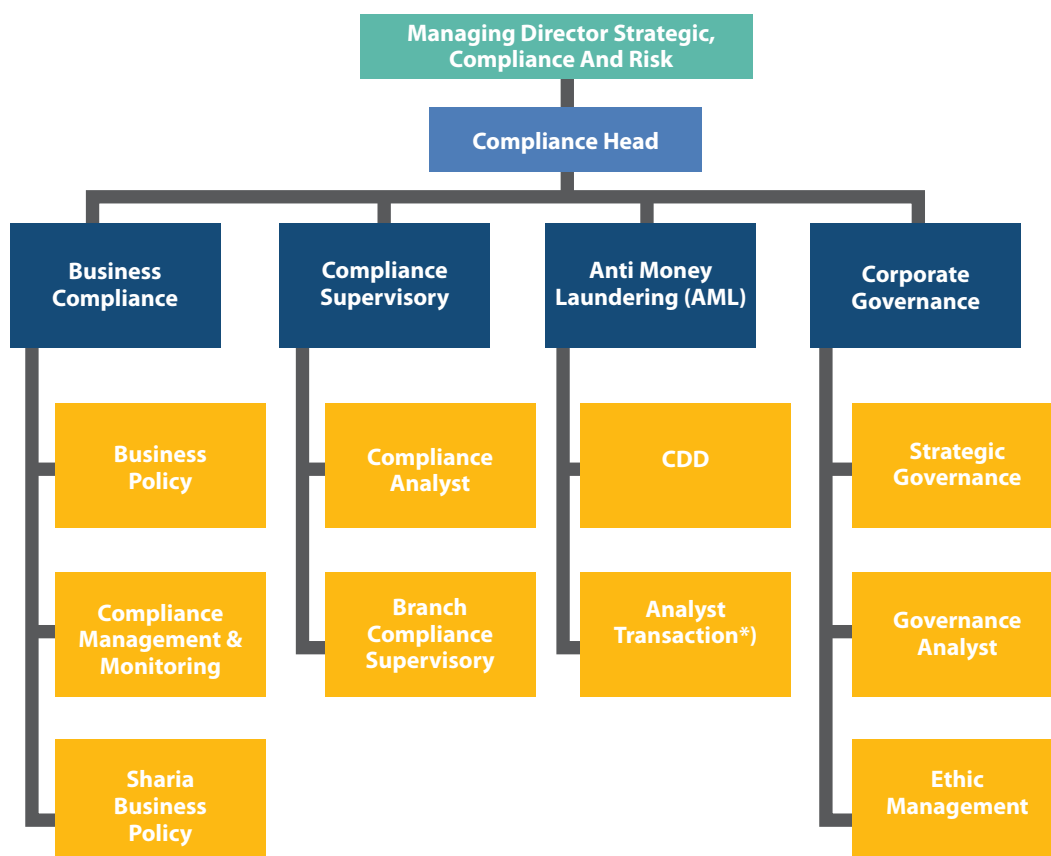
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), yang merupakan kondisi saluran komunikasi *internal* dan eksternal yang efektif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian *intern* dan kinerja manajemen apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaanya.

Fungsi Kepatuhan

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank BTN berada di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan bersama-sama dengan *Compliance Division*.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan



Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Bank mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan *internal bank* yang terdiri atas:

1. *Compliance Director* yaitu anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank.
2. *Compliance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan



Sudaryo Bagyo Utomo

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Blora 19 September 1963. Menjabat sebagai Kepala *Compliance Division* (CMPD) sejak 1 November 2012. Sebelum menjadi kepala CMPD telah menduduki berbagai posisi kunci di Bank BTN, yaitu Kepala Cabang KC Gresik (September 2002 - April 2008), Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (April 2008 - Mei 2010), *Departemen Head Compliance* (April 2008 - Agustus 2011), *System Development Audit Dept Head* (Agustus 2011 - November 2011). Telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan dan AML Level 2. Selain itu, mengikuti pelatihan dan *workshop*, antara lain: *Corporate Governance Leadership Training Program For Banking Sector*, *Training For Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Risk Management Competency For Banking Profession Level 4*, *Inhouse Training Badan Pemeriksa Keuangan RI Angk-1 (Tingkat Pra Manajerial)*, *Implementasi Internal Control (Coso - Based)*, *Boosting And Sustaining Excelent Business Performa*, *Intergrated Governance*, *Risk Management And Compliance*.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan dilaksanakan oleh *Compliance Director*. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut.

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan

- mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.

Fungsi Kepatuhan

3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama dan atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda/ *dissenting opinion* apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang serta memastikan bahwa Satuan Kerja Kepatuhan yang dibentuk oleh Bank telah memahami mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman *internal* Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
9. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Bank untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan di Bank dilaksanakan oleh *Compliance Division*. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Bank dipimpin oleh Kepala Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan *internal* tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut.

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia;
2. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan, mencakup:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak *internal* maupun eksternal.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan telah disusun program kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2015 yang meliputi serangkaian aktifitas sebagai berikut.

1. Peningkatan aspek kepatuhan dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan melalui proses sosialisasi ketentuan baru, *review* dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan *internal* Perseroan, kajian aspek kepatuhan terhadap rancangan ketentuan *internal* yang baru, produk baru dan aktifitas baru yang akan diluncurkan Perseroan.

Fungsi Kepatuhan

2. Peningkatan koordinasi antar unit kerja yang terkait dalam melakukan pengelolaan risiko, pengendalian *internal* serta fungsi kepatuhan yaitu *Internal Audit Division*, *Risk Management Division* dan *Compliance Division*.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada *Compliance Division* sebagai unit yang mengelola fungsi kepatuhan Perseroan melalui kegiatan sertifikasi kepatuhan, pendidikan, seminar baik dalam maupun luar negeri.
4. Peningkatan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PTT).
5. Sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap operasional proses bisnis di *Compliance Division*

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2015

1. Peningkatan Budaya Kepatuhan
Seluruh manajemen dan pegawai Perseroan bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Sepanjang tahun 2015 Bank senantiasa telah melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan secara berkelanjutan kepada pegawai Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* tentang Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan aktifitasnya pada masing-masing unit kerja diantaranya melalui pembekalan dan *internalisasi* kepatuhan dalam pembekalan pegawai baru maupun dalam *training refreshment* bagi pegawai *existing* yang dilakukan melalui metode *in class training*.
 2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Terkait dengan pelaksanaan program ini, Satuan Kerja Kepatuhan Bank berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan ditampilkan dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara bulanan.
3. Peningkatan Aspek Kepatuhan
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan langkah untuk mengharmonisasikan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK, Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan otoritas pengawas lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Kajian dan Opini Kepatuhan
Divisi Kepatuhan melakukan kajian atas seluruh draft kebijakan yang akan diterbitkan serta produk dan aktifitas baru yang akan diluncurkan, kajian dimaksud adalah untuk upaya memastikan bahwa kebijakan serta produk dan aktifitas baru dimaksud telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sosialisasi Ketentuan
Divisi Kepatuhan senantiasa memberikan sosialisasi atas ketentuan pihak eksternal yang baru dikeluarkan oleh regulator serta Peraturan Perundang-undangan. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah ringkasan pokok-pokok ketentuan eksternal serta *gap analysis* dengan ketentuan *internal* Perseroan. Materi sosialisasi tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait untuk memastikan penerapan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.
 - c. *Review* dan *Monitoring* Ketentuan *Internal*
Divisi Kepatuhan juga menjalankan pengkajian dan penilaian terhadap kebijakan dan ketentuan *internal* Perseroan yang berlaku sebagai bagian dari rangkaian proses untuk menciptakan dan membangun budaya kepatuhan dari setiap unit bisnis di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, serta untuk memastikan bahwa peraturan regulator yang terkait telah diterapkan dalam aktivitas unit bisnis. Selain itu, Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi *monitoring* untuk memastikan agar pelaksanaan suatu produk

Fungsi Kepatuhan

- atau transaksi sesuai dengan kebijakan *internal* dan peraturan Regulator yang berlaku, salah satu diantaranya adalah dengan menempatkan petugas di Kantor Cabang (*Branch Compliance Supervisory Officer*) yang bertugas untuk melakukan *review* dan monitoring atas kepatuhan Kantor Cabang terhadap kebijakan *internal* dan peraturan Regulator yang berlaku.
- d. Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Regulator dan Otoritas Yang Berwenang Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi untuk memenuhi seluruh komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator dan otoritas berwenang tersebut, Divisi Kepatuhan Bank secara terus menerus melakukan monitoring kepada unit-unit kerja terhadap seluruh komitmen yang diwajibkan. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit, surat Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya maupun kewajiban pelaporan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan secara berkala dalam Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa keuangan, Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - e. Peningkatan Kualitas Proses Bisnis Melalui Sertifikasi ISO
 Dalam rangka melakukan penyempurnaan dan perubahan pada proses bisnis di Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan, salah satunya adalah melakukan standarisasi proses bisnis mengacu pada standar *internasional*. Proses standarisasi *internasional* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah mengikuti sertifikasi ISO 9001:2008. Pada tanggal 30 Desember 2015 Satuan Kerja Kepatuhan dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam sertifikasi ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup sertifikasi yang dinyatakan oleh Badan Audit Sertifikasi adalah "*Compliance Assurance*".
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Fungsi Kepatuhan Perseroan, Satuan Kerja Kepatuhan berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan melalui keikutsertaan dalam, pendidikan, pelatihan sertifikasi kepatuhan, seminar baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun program pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2015 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Fungsi Kepatuhan

Tabel Pengembangan Kualitas SDM

No	Jenis Pengembangan Kualitas SDM	Peserta
1.	Sertifikasi profesi terkait <i>Compliance</i> sebagai berikut. Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Sertifikasi Auditor ISO 9001:2015 yang diselenggarakan oleh PT Premysis Consulting; Sertifikasi <i>Integrated GRC (Governance Risk and Compliance)</i> yang diselenggarakan oleh SAI Global di Sidney, Australia ;	a. Sertifikasi Kepatuhan diikuti oleh seluruh pegawai <i>Compliance Division</i> ; b. Sertifikasi Auditor ISO 9001:2015 diikuti oleh sebanyak 25 (dua puluh lima) orang; c. <i>Integrated Sertifikasi GRC (Governance Risk and Compliance)</i> diikuti oleh 1 (satu) orang
2.	Pelatihan <i>Trade Finance for Banking</i> yang diselenggarakan oleh Lentera Pro.	Pelatihan diikuti oleh sebanyak 2 (dua) orang pada <i>Compliance Policy Departement</i> .
3.	Pelatihan <i>Treasury Management</i> yang diselenggarakan oleh Lentera Pro.	Pelatihan diikuti oleh sebanyak 2 (dua) orang pada <i>Compliance Policy Departement</i> .
4.	Pelatihan <i>Workshop Risk Culture</i> yang diselenggarakan oleh Price Waterhouse Copeer.	Pelatihan diikuti oleh sebanyak 1 (satu) orang pejabat <i>Compliance Division Departement</i> .
5.	Pendidikan dan pelatihan Operasional <i>Risk Management Tools (Loss Event Database, Risk Control Sistem Assessment dan Key Risk Indicator)</i>	Pelatihan diikuti oleh sebanyak 1 (satu) orang personil pada <i>Compliance Supervisory Departement</i> .
6.	Pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Pelatihan APU-PPT menjadi bagian dalam pelaksanaan sertifikasi <i>Compliance</i> yang diikuti oleh seluruh pegawai CMPD
7.	Pendidikan dan Pelatihan Proses Bisnis Syariah	1. <i>Workshop eksekutif hybrid contract</i> pada produk perbankan yang diikuti oleh 1 orang pejabat pada <i>Compliance Policy Departement</i> . 2. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah yang diikuti staf pada <i>Compliance Supervisory Department</i> dan staf pada <i>Compliance Policy Department</i> . 3. Pelatihan implementasi PSAK 50/55 untuk Unit Usaha Syariah oleh KAP Deloitte yang diikuti staf pada <i>Compliance Policy Department</i> . 4. Pelatihan <i>workshop</i> pembiayaan mudharabah dan maqayaddah yang diikuti staf pada <i>Compliance Policy Department</i> .

Fungsi Kepatuhan

No	Jenis Pengembangan Kualitas SDM	Peserta
8.	<p><i>Training</i> terkait GCG di dalam dan luar negeri: Luar Negeri 2015 ASEAN CG Scorecard Conference Transformation in ASEAN Reforms and Priorities yang diselenggarakan oleh Asean Capital Market Forum (ACMF) DI Manila-Philipine</p> <p>Dalam Negeri The 16th Batch ASEAN CG Scorecard yang diselenggarakan oleh IICD di Jakarta; Workshop ASEAN CG Scorecard yang diselenggarakan oleh IICD di Jakarta; Self Assessment menggunakan kriteria BUMN yang diselenggarakan oleh JSM di Jakarta; Workshop Pemantapan Implementasi dan Penilaian GCG di Lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan yang diselenggarakan oleh Media Pekerja BUMN Profesional Sejahtera; First Indonesian Conference on Corporate Governance and Sustainability yang diselenggarakan oleh IICG</p>	<p><i>Training</i> terkait GCG di dalam dan luar negeri diikuti oleh: Luar Negeri ASEAN CG Scorecard Conference diikuti oleh 1 (satu) orang</p> <p>Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The 16th Batch ASEAN CG Scorecard diikuti oleh 1 (satu) orang; 2. <i>Workshop</i> ASEAN CG Scorecard diikuti oleh 4 (empat) orang; 3. <i>Self Assessment</i> menggunakan kriteria BUMN diikuti oleh 1 (satu) orang; 4. <i>Workshop</i> Pemantapan Implementasi dan Penilaian GCG di Lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan diikuti oleh 1 (satu) orang 5. <i>First Indonesian Conference on Corporate Governance and Sustainability</i> diikuti oleh 1 (satu) orang
9.	<p>Pelatihan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diselenggarakan oleh FEB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Interpretasi KPKU dan Metode Merespon Kuesioner Tentang Implementasi Sistem KPKU yang diikuti 2 (dua) orang; 2. Pelatihan Evaluator Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN yang diikuti 1 (satu) orang; 3. FGD KPKU-Finalisasi Peta ADLI KPKU yang diikuti 2 (dua) orang; 4. <i>Refreshment Evaluator</i> KPKU dan Pengembangan Peta Skor ADLI.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Perseroan berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang berlaku, dan berupaya untuk turut mencegah, mendeteksi serta melaporkan kepada pihak berwenang, hal-hal terkait penerapan program APU-PPT Kegiatan terkait pelaksanaan program APU-PPT yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Bank BTN mendapatkan Penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)
Pilot Study Survey Persepsi Publik Indonesia Atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tahun 2015



1. Melakukan *review* atas kebijakan ketentuan *internal* Bank tentang Penerapan Program APU dan PPT yang disesuaikan dengan ketentuan regulator terkait Program APU dan PPT bagi Bank Umum.
2. Melakukan proses penyempurnaan infrastruktur IT yang mendukung penerapan program APU-PPT di Perseroan yaitu sebagai berikut.
 - a. *Enhancement* atau proses penyempurnaan aplikasi iCDD (*intelligence Customer Due Diligence*) yang digunakan dalam proses pelaporan APU dan PPT oleh seluruh outlet Bank (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) serta Kantor Pusat untuk disesuaikan dengan ketentuan berlaku.
 - b. Melakukan *updating* data nasabah pada aplikasi iCDD dengan menggunakan aplikasi iCDD (*intelligence Customer Due Diligence*) yang telah di *Enhancement*.
 - c. Melakukan pembangunan aplikasi pelaporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)/ *International Funds Transfer Instructions* (IFTI).
 - d. Melakukan sosialisasi aplikasi iCDD (*intelligence Customer Due Diligence*) terhadap seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Syariah.
3. Sebagai koordinator pelaksanaan *action plan* Penerapan program APU dan PPT kepada Bank Indonesia serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Kerja terkait untuk memenuhi target *action plan* tersebut.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

4. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/*Cash Transaction Report* (CTR), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/*Suspicious Transaction Report* (STR), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)/ *International Funds Transfer Instructions* (IFTI) dan Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT).
5. Menindaklanjuti permintaan informasi/data dan dari pihak eksternal, antara lain Bank Indonesia, PPATK, KPK RI, BNN RI, Kepolisian dan Dirjen Pajak.
6. Penyampaian materi program APU dan PPT melalui modul *e-learning*, sehingga memungkinkan pegawai dapat memperoleh pelatihan penerapan program APU dan PPT secara mandiri
7. Pemberian materi APU dan PPT kepada setiap pegawai baru khususnya unit *Frontliner* (*Customer Service* dan *Teller*), FO (*Funding Officer*), dll.
8. Dalam mendorong penerapan APU dan PPT di Bank BTN, telah diedarkan buku saku (*handbook*) penerapan APU dan PPT kepada seluruh Kantor Cabang sebagai pedoman praktis/ringkas bagi petugas khususnya yang bertugas pada unit-unit yang berkaitan dengan penerapan APU-PPT agar dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman kepada ketentuan tentang program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Code of Conduct

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Bank sebagaimana tercantum dalam *Code of Conduct*.

Dalam konteks tersebut, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*. *Code of Conduct* merupakan pedoman tertulis yang merupakan panduan nilai-nilai etika/moral yang dituntut dari segenap individu yang berhubungan dengan bisnis dan pola perilaku sesuai dengan budaya Perseroan.

Isi Code Of Conduct

Code of Conduct berisikan komitmen perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan yang merupakan perwujudan dari etika bisnis dan etika kerja bagi Insan Perseroan. Sebagai sebuah etika perilaku, diharapkan tercipta perilaku yang ideal yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan sehingga menjadi budaya kerja. *Code of Conduct* terdiri dari 4 Bab sebagai berikut. Tabel Isi *Code of conduct*

Bab	Keterangan
I	<p>Pendahuluan</p> <p><i>Code of Conduct</i> ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Bank dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis.</p> <p>Implementasi <i>Code of Conduct</i>, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, <i>Code of Conduct</i> ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Bank. Penerapan <i>Code of Conduct</i> yang konsisten akan menunjukkan bahwa Bank BTN adalah Bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip GCG.</p>

Code of Conduct

Bab	Keterangan
II	<p>Standar Etika Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika Bank dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank. • Etika Bank dengan Nasabah Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah. • Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok. • Etika Bank dengan Pesaing Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan. • Etika Bank dengan Mitra Kerja Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. • Etika Bank dengan Pemerintah Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Etika Bank dengan Masyarakat Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. • Etika Bank dengan Media Massa Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik. • Etika Bank dengan Organisasi Profesi Bank membina hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka <i>sharing</i> informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
III	<p>Kebijakan Standar Prilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. • Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan • Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank.
IV	<p>Penerapan dan Penegakan</p> <p>Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada <i>Human Capital Division</i> dan identitas pelapor dilindungi. <i>Human Capital Division</i> menindaklanjuti setiap kaporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.</p>

Code of Conduct

Pengungkapan dan Penyebarluasan Code Of Conduct

Pengungkapan *Code of Conduct* yang berlaku bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 30/PD/CSD/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedoman etika bisnis dan perilaku PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan diubah sebagaimana Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku.

Code of Conduct disebarakan kepada seluruh insan BTN dan *Stakeholders* melalui *website* Bank BTN dan media *internet* yang dinamakan *Access Internal Management Standrad* (AIMS) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat.

Selain itu, agar pengungkapan dan penyebarluasan *Code of conduct* ini dapat terlaksana dengan baik maka pada periode 2015 Bank juga telah melaksanakan 5 tahapan *workshop* dan sosialisasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan KoRUPSi (KPK) tentang Program Pengendalian Gratifikasi serta *Code of Conduct* dengan peserta GCG *Champion* Kantor Pusat, *Regional Office* dan Kantor Cabang yang dilakukan di Kantor Pusat dan setiap *Regional Office*, untuk menegaskan keberadaan *Code of conduct*, sebagai berikut.

Tahap I : Kantor Pusat, tanggal 6-8 April 2015;

Tahap II : *Regional Office* I, tanggal 20-22 Mei 2015;

Tahap III : *Regional Office* II, tanggal 8 – 10 Juli 2015;

Tahap IV : *Regional Office* III, tanggal 8 – 10 September 2015;

Tahap V : *Regional Office* IV, tanggal 4 - 6 November 2015

Upaya Penerapan dan Penegakan Code Of Conduct

Code of Conduct Perseroan berlaku bagi segenap Insan Bank BTN mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, pegawai dan individu lain yang terkait dengan bisnis Perseroan. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing masing.

Setiap insan Bank BTN memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan adalah menyangkut kesediaan insan Bank BTN untuk melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya.

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Sedangkan bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan penerapan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sepanjang tahun 2015, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain:

1. Menyempurnakan dan/atau merevisi *Code of Conduct*;

Code of Conduct

2. Menyempurnakan kebijakan dan program budaya kerja;
 - a. Merumuskan nilai-nilai perusahaan baru
 - b. Melaksanakan program budaya kerja baru
 - c. Sinkronisasi *Most Valuable Player* (MVP) dan *GCG Champion*
3. Bekerjasama dengan KPK melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan *Code of Conduct* sebagaimana uraian di atas;
4. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di bawah *Compliance Division*;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS);

Punishment bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran *Code of Conduct*. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka sanksi pelanggaran berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut.

1. Sanksi Administratif
 - a. Sanksi Kategori Ringan
 - Teguran Lisan
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Sanksi Kategori Sedang
 - Penurunan Gaji Berkala
 - Tidak Mendapatkan Uang Cuti
 - Penurunan Pangkat dan Penurunan Gaji
 - c. Sanksi Kategori Berat
 - Pembebasan dari jabatan (jabatan baru disesuaikan dengan sistem kepegkatan)
 - Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan Pegawai
 - Penurunan pangkat dan/atau diberhentikan dengan hormat
2. Sanksi Finansial

Sanksi finansial yaitu mengganti kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang periode 2015, jumlah pelanggaran kode etik sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kasus dan pengenaan sanksi, yaitu: pemecatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, sanksi Surat Peringatan (SP) 1 sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus dan 1 (satu) kasus masih dalam proses pengenaan sanksi.

Kebijakan Gratifikasi

Semangat untuk menjalankan GCG secara lebih serius mendorong Bank merangkul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam mengendalikan praktik Gratifikasi dan suap di lingkungan Bank. Hal ini merupakan bukti keseriusan untuk mendukung Indonesia bersih dari Korupsi dan menjadikan Perseroan merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK.

Sebagai bentuk komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank, maka Bank wajib mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank. Sistem ini akan menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.



Bank BTN merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK
Hal ini merupakan bukti keseriusan Bank BTN untuk mendukung Indonesia bersih dari korupsi.

Sebagai pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi di Bank Bank mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi No. 45/DIR/CMPD/2015 dengan maksud untuk:

1. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
2. Standarisasi dan keseragaman sistem dan administrasi
3. Memberikan petunjuk proses dan syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi.

Dalam rangka menjamin bahwa pengendalian gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh pekerja Bank BTN dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pembelian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya antara lain pada SP3K dalam pemberian kredit.
2. Menugaskan kepada semua unit kerja di lingkungan Perseroan untuk memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak ketiga/eksternal terkait pengendalian gratifikasi.

Kebijakan Gratifikasi

3. Pejabat dan/atau Pegawai bank yang mengetahui adanya indikasi penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap wajib menyampaikan melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS). Pejabat dan/atau Pegawai Perseroan yang terbukti dengan sengaja tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan *internal* Perseroan yang berlaku.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Prosedur pengelolaan pengendalian gratifikasi terdiri dari mekanisme sebagai berikut.

1. Tata cara pelaporan gratifikasi yang dianggap suap
Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap suap yang diterima oleh pejabat dan pegawai bank, dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada KPK melalui *Compliance Division* (CMPD) selambat-lambatnya diterima oleh CPMD 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan mengisi formulir.
 - b. *Compliance Division* menyampaikan laporan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi tersebut diterima.
2. Tata cara pelaporan gratifikasi terkait kedinasan
Yang termasuk gratifikasi terkait kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam kegiatan tertentu sebagai penghargaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. gratifikasi ini dapat diterima namun wajib dilaporkan kepada Koordinator Pengelola Gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
3. Tata cara pelaporan gratifikasi terkait hari raya keagamaan
 - a. Pejabat dan/atau pegawai bank yang dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK melalui *Compliance Division* paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.
 - b. Setiap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluarsa dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada *Compliance Division* disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. selanjutnya *Compliance Division* akan meneruskan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
 - c. Pelaporan atas penerimaan gratifikasi pada hari raya keagamaan.
4. Pengaduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS)
Pejabat dan pegawai bank yang mengetahui adanya indikasi gratifikasi yang dianggap suap dan melanggar peraturan perundang-undangan serta kebijakan *code of conduct* yang berlaku maka wajib menyampaikan melalui saran WBS. Pengaduan melalui WBS dilakukan sesuai dengan mekanisme WBS sebagaimana ketentuan *internal* Perseroan mengenai WBS.

Sosialisasi Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi di *internal* Perseroan disampaikan kepada seluruh karyawan pada melalui Surat Edaran Direksi perihal Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, untuk dapat menjangkau seluruh *stakeholder* Perseroan, sosialisasi juga dilakukan melalui *website* Bank dan berbagai media, seperti: poster, PIN, sosialisasi melalui memo maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait.

Kebijakan Gratifikasi

Dapat kami sampaikan bahwa pada periode 2015 telah dilaksanakan 5 tahapan *workshop* dan sosialisasi bekerja sama dengan KPK tentang Program Pengendalian Gratifikasi serta *Code of Conduct* dengan peserta GCG *Champion* Kantor Pusat, *Regional Office* dan Kantor Cabang yang dilakukan di Kantor Pusat dan setiap *Regional Office*, sebagai berikut.

Tahap I : Kantor Pusat, tanggal 6-8 April 2015;

Tahap II : *Regional Office* I, tanggal 20-22 Mei 2015;

Tahap III : *Regional Office* II, tanggal 8 – 10 Juli 2015;

Tahap IV : *Regional Office* III, tanggal 8 – 10 September 2015;

Tahap V : *Regional Office* IV, tanggal 4 - 6 November 2015

Laporan Gratifikasi 2015

Sepanjang tahun 2015, Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) yang berada di bawah *Compliance Division* yaitu unit kerja *Ethics Management* telah menerima laporan sebanyak 40 (empat puluh) laporan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Laporan gratifikasi yang dianggap suap sebanyak 12 (dua belas) laporan
2. Laporan gratifikasi kedinasan sebanyak 7 (tujuh) Laporan
3. Laporan gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan sebanyak 19 (sembilan belas) laporan
4. Laporan Pengembalian Gratifikasi kepada Pemberi dengan bukti Berita Acara Pengembalian sebanyak 2 (dua) laporan

Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct* dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun WBS.

Keberadaan dan Tujuan WBS

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian *internal* dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk:

1. Melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran;
2. Secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Bank BTN.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian Laporan Pelanggaran Mekanisme yang dibangun oleh Perseroan dalam menerapkan WBS adalah pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya kepada:

1. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah pegawai Perseroan, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada Tim SPP/WBS. Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan modus lainnya yang dirasakan nyaman oleh Pelapor.
2. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Tim SPP/WBS, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama Perseroan di Kantor Pusat dengan ditandai "*CONFIDENTIAL*" atau "*RAHASIA*" pada sampul surat.
3. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang kemudian akan diteruskan ke Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris.

4. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang akan meneruskannya ke Direktur Utama.

Laporan pengaduan/pengungkapan tersebut, sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek, sebagai berikut.

1. **What:** Jelaskan serinci mungkin:
Apa yang terjadi dan kira-kira melanggar ketentuan apa?
Apa yang Anda lihat atau ketahui dan kira-kira melanggar ketentuan apa?
2. **Who:** Jelaskan serinci mungkin:
Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa dugaan pelanggaran tersebut?
Selain Anda, siapa sajakah yang juga mengetahui adanya peristiwa dugaan pelanggaran ini?
3. **When:** Jelaskan serinci mungkin:
Kapan Anda mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi?
Jelaskan juga mengapa Anda baru melaporkannya sekarang ini (bila terdapat selang waktu yang lama lebih dari 1 bulan)
4. **Where:** Jelaskan serinci mungkin:
Sepengetahuan Anda dimanakah peristiwa dugaan pelanggaran tersebut dilaksanakan?
Apakah ada rentetan tempat terkait peristiwa ini yang anda ketahui?
5. **How:** Jelaskan serinci mungkin:
Bagaimana proses peristiwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi?
Menurut Anda, bagaimanakah para pelaku dugaan pelanggaran tersebut melakukan modus/cara pelanggarannya (apakah dengan mark-up, komisi, suap, pemerasan, atau modus lainnya)?

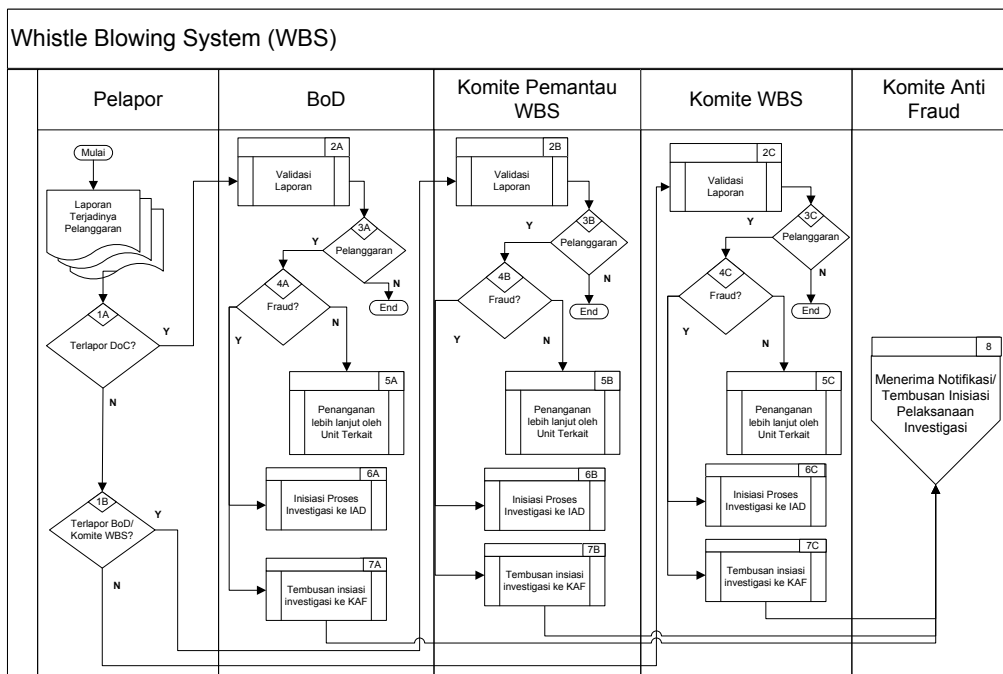
Whistleblowing System (WBS)

Pengelolaan Whistle Blowing System

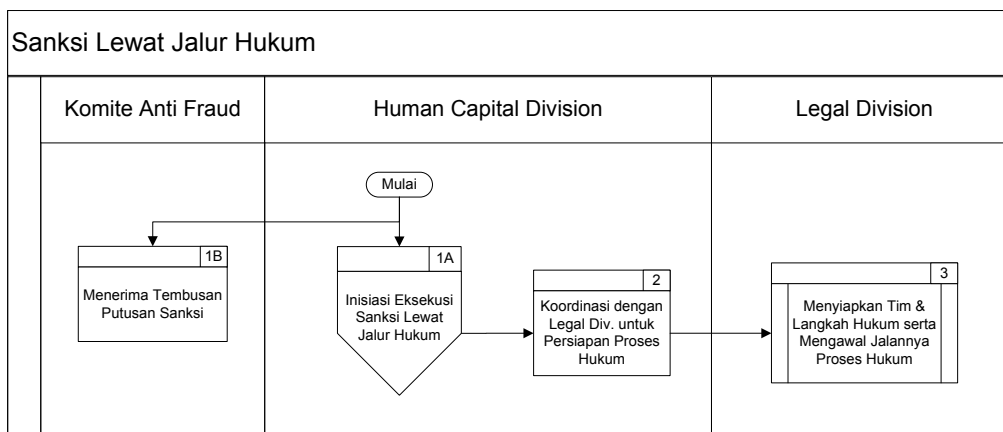
WBS Perseroan dikelola oleh Tim WBS, sebagai berikut.

1. Kepala *Internal Audit Division* (Ketua merangkap Anggota)
2. Unit Pengelola WBS (Sekretaris)
3. Kepala *Compliance Division* (Anggota)
4. Kepala *Human Capital Division* (Anggota)
5. Kepala *Risk Management Division* (Anggota)

Bagan Alur Proses Pelaporan Pelanggaran

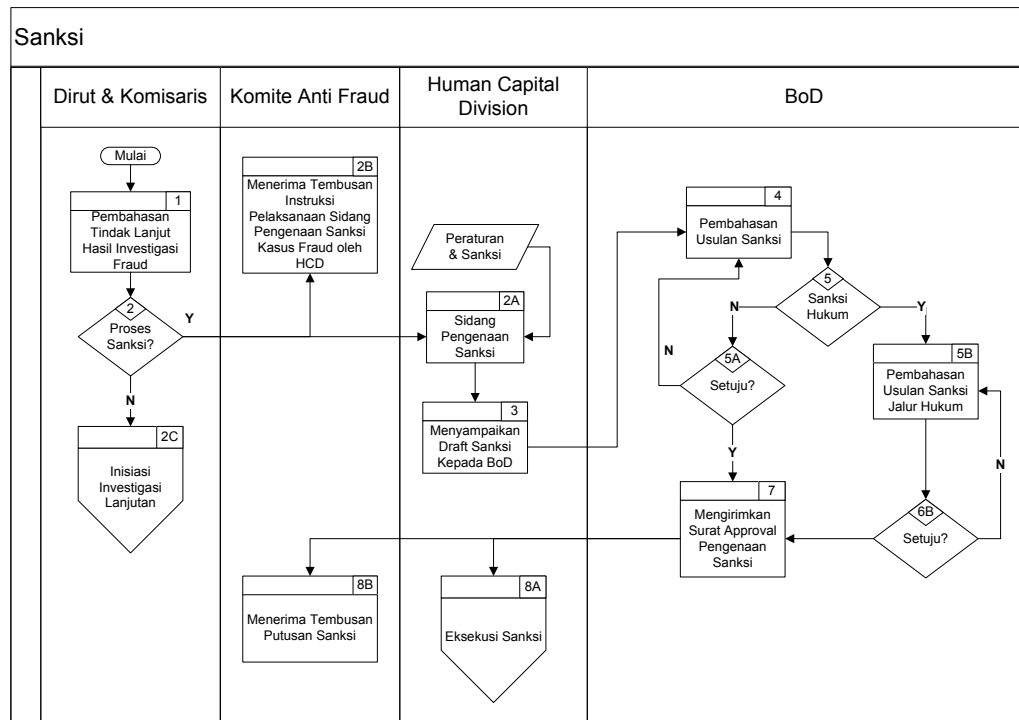


Bagan Alur Proses Sanksi – Jalur Hukum



Whistleblowing System (WBS)

Bagan Alir Proses Mekanisemen Sanksi Pada Bank



Media Pelaporan

Bank BTN menerapkan mekanisme *Whistle Blowing System* dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media:

1. Melalui kotak surat yang dikirim ditujukan kepada Tim SPP/WBS atau Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menara Bank BTN Lt. 20 Jl Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat-10130
2. Melalui email resmi yang ditujukan kepada Tim *Whistleblowing System* dengan alamat: wbs.BTN@BTN.co.id; dan
3. Melalui saluran telepon dengan nomor: 0813 11 43 43 43 dan telepon ekstensi ke Tim WBS :
 Kepala IAD : 021-6336789 ext 8801
 Kepala CMPD : 021-6336789 ext 8951
 Kepala HCD : 021-6336789 ext 8901
 Kepala LLDD : 021-6336789 ext 1421

Whistleblowing System (WBS)

Penanganan Pengaduan

1. WBS *Team* menerima pengaduan/ pengungkapan, mencatat dan menuangkan dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/ pengungkapan.
 - b. Laporan pengungkapan (*disclosure report*).
2. WBS *Team* menyampaikan laporan pengungkapan (*disclosure report*) kepada Dewan Komisaris/Direksi (sesuai dengan kategori terlapor).
3. WBS *Team* melakukan penelaahan awal/ klarifikasi terhadap pengaduan/ pengungkapan tersebut dan membuat *resume*-nya, kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Direksi (sesuai dengan kategori terlapor). Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan tindak lanjut, sebagai berikut.
 - a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - b. Bekerja sama dengan *Internal Auditor* sesuai dengan substansi pengaduan/ pengungkapan.
 - c. Bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/pengungkapan terkait dengan citra/reputasi Bank BTN dan/ atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh *Internal Auditor*.
4. Tim Investigasi melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris/ Direksi. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan:
 - a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif.
 - c. Meneruskan tindak pidana kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini, WBS *Team* melakukan koordinasi dengan *Legal and Loan Document Desk* guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka direkomendasikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.
5. Proses penelaahan awal/klarifikasi dan investigasi dimaksud dibuatkan dalam Berita Acara.
6. WBS *Team* melaporkan hasil investigasi kepada Dewan Komisaris/Direksi.
7. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bank dapat memberikan penghargaan kepada pelapor. Bentuk dan jenis penghargaan dimaksud ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Kepada Pelapor yang beritikad baik, Bank BTN memberikan jaminan perlindungan, sebagai berikut.

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, email) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;

Whistleblowing System (WBS)

3. Perlindungan dari tindakan balasan dari si Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* di *internal* Bank BTN disampaikan kepada seluruh karyawan pada melalui Surat Edaran Direksi perihal Penerapan Kebijakan System Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System* – WBS). Selain itu, untuk dapat menjangkau seluruh *stakeholder* Bank BTN, sosialisasi *Whistle Blowing System* juga dilakukan melalui *website* Bank dan berbagai media, seperti buletin *internal*, poster, sosialisasi etika dan kebijakan WBS maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran dan penyimpangan meliputi banyak hal dan masalah, akan tetapi dibatasi dengan apa yang dilakukan, terjadi atau terkait dengan Perseroan. Di bawah ini disampaikan beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan ini, antara lain adalah:

1. Semua tindakan melanggar hukum pidana, (misalnya pencurian, penipuan, penggunaan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya);
2. Penyalahgunaan wewenang dalam melayani nasabah ataupun vendor atau pemasok lainnya (misalnya penundaan pembayaran tidak beralasan, pemerasan, dan lain sebagainya);
3. Pelanggaran peraturan Perbankan yang diatur dalam No. UU No. 10/1998 jo UU No. 7/1992 tentang Perbankan (misalnya tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, membuka rahasia nasabah kepada yang tidak berhak, melakukan pencatatan yang tidak benar, meminta uang atas jasa pelayanan perbankan yang dilakukan, dll.);
4. Pelanggaran peraturan perpajakan, atau aturan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK;
5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Perbuatan yang dapat merugikan Perseroan, baik finansial maupun non-finansial, termasuk menciderai citra Perseroan;
7. Perbuatan pelanggaran berat terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Pegawai;
8. Pelanggaran aturan *internal* (SOP), yang dapat menciderai integritas pelaporan perusahaan, baik dibidang keuangan ataupun bidang lainnya;

Whistleblowing System (WBS)

Perlu dipahami bahwa daftar di atas bukanlah daftar yang komprehensif tetapi lebih merupakan contoh perbuatan-perbuatan yang dapat dilaporkan. Kebijakan ini terutama berkepentingan dengan potensi risiko yang dapat merugikan nasabah Perseroan, Pegawai Perseroan, Perseroan dan publik serta para pemangku kepentingan lainnya. Mereka semua itu haruslah dilindungi melalui deteksi dini dan pencegahan melalui kebijakan ini.

Laporan Whistleblowing System 2015

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2015, jumlah pengaduan yang masuk adalah sejumlah 101 pengaduan yang mencakup 20 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 38 pengaduan melalui SMS/*Handphone*/Datang Langsung dan 43 pengaduan melalui Email. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 83 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 18 pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus). Berdasarkan 18 pengaduan yang diteruskan proses audit dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

No	Media Pengaduan yang Digunakan Pelapor	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut			
			Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administrative)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau koRUPSi)
1	Surat/PO,BOX	6	-	5	1	-
2	SMS/ <i>Handphone</i> / Datang Langsung	3	-	3		-
3	<i>Email</i>	9	1	7	1	-
Jumlah Pengaduan		18				

Whistleblowing System (WBS)

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2015, jumlah penyimpangan *internal* dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel Penyimpangan *Internal*

<i>Internal Fraud</i> Tahun 2015	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015
Jumlah <i>internal fraud</i>	-	-	17	19	-	-
Telah diselesaikan	-	-	16	8	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	1	11	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

Catatan: *Fraud* dengan dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2015, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel Permasalahan Hukum

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	91	10	0
2.	Dalam proses penyelesaian	127	170	1
Total		218	180	1

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara tersebut (yang dihadapi perusahaan), 3 (tiga) kasus yang pengaruhnya paling signifikan mempengaruhi kondisi perusahaan dapat kami sampaikan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi (yang dikenakan kepada Perusahaan, oleh otoritas terkait pasar modal, perbankan dan lainnya pada tahun buku 2015 (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi)
1.	Gugatan atas Proses Penerbitan Sertifikat Rumah Developer rekanan BTN Unit Usaha Syariah telah Lunas dengan agunan Sertifikat Induk SHM. Lalu diberikan KPR atas 25 unit rumah dilokasi tersebut dan telah dilakukan pemecahan sertifikat atas agunan KPR nasabah(diiikat SKMHT). Dalam masa tahun 2009 sampai 2013 terjadi gugatan atas proses penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan Warga Perumahan maupun Pihak Bank. Pada tanggal 13 mei 2013 putusan MA memutuskan SHM tersebut Cacat Hukum. Pada tanggal 21 Februari 2014 Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi atas objek perkara dimana dalam hamparan tersebut terdapat agunan atas 21 unit rumah nasabah KPR BTN yang dibangun Developer rekanan BTN	Saat ini dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi.	Potensi Kerugian materiil Rp758 juta	

Permasalahan Hukum

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi (yang dikenakan kepada Perusahaan, oleh otoritas terkait pasar modal, perbankan dan lainnya pada tahun buku 2015 (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi)
2.	Gugatan Debitur dalam Proses Pelelangan			
	Penggugat adalah debitur yang telah diserahkan Bank BTN kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan proses litigasi di Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dimana Penggugat menyatakan Bank BTN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi.	Perkara dalam proses Kasasi, menunggu putusan MA, dimana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bank BTN Menang.	Kerugian materiil sebesar Rp5,9M.	-
3.	Sengketa Rumah Dinas			
	Sengketa salah satu rumah dinas Bank BTN, dimana Bank BTN belum memperoleh pengembalian haknya atas rumah dinas tersebut karena ahli waris tidak mau mengosongkan dan merasa sudah membeli rumah tersebut.	Saat ini masih dalam proses kasasi yang diajukan oleh Bank BTN ke Mahkamah Agung.	Kehilangan Asset sebesar Rp40 M.	-

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat Serta Entitas Anak

Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai catatan, Bank BTN tidak memiliki entitas anak.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik. Pada periode 2015, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut.

Tabel Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan				
1	Nefo Purwono Trianggono	Kepala Divisi <i>Consumer and Remedial Division</i> (CCRD)	Komisaris	Kredit Pegawai	300	Sesuai prosedur
2	Hirwandi Gafar	Kepala Divisi <i>Subsidized Mortgage Division</i> (SMD)	Komisaris	Kredit Pegawai	817	Sesuai prosedur
3	Ahmad Homzah	Kepala Cabang BTN KC Cilegon	Komisaris	Kredit Pegawai	600	Sesuai prosedur
4	Dewi Fitrianingrum	Kepala Divisi <i>Commercial Funding and Services Division</i> (CMFD)	Komisaris	KPR BTN	750	Sesuai prosedur
5	Adhi Kuntoyo	Kepala Cabang BTN KC Purwokerto	Komisaris	Kredit Pegawai	775	Sesuai prosedur
6	Daulat Marpaung	Kepala Cabang BTN KC Gresik	Komisaris	Kredit Pegawai	688	Sesuai prosedur

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi secara lengkap telah dibahas pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Buy Back Share dan Buy Back Obligasi

Share buy back dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi subordinasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2015, Perseroan tidak melakukan *buy back share* dan *buy back obligasi* subordinasi, dengan penjelasan sesuai ketentuan BI/OJK, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel *Buy Back Share* dan *Buy Back Obligasi*

Penjelasan Kebijakan Buy Back Obligasi	Jumlah Buy Back Obligasi (jutaan Rp)	Harga Buy Back	Peningkatan Laba dari hasil Buy Back Obligasi (jutaan Rp)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Share Option

Kebijakan

Kebijakan dalam pemberian *shares option*, dapat disampaikan, sebagai berikut.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*).
2. Program MESOP diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite dan pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program dimaksud, untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.
3. Pelaksanaan program MESOP dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Tahap Pertama Jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2010.
 - b. Tahap Kedua Jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2011.
 - c. Tahap Ketiga Jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2012.
4. Hak Opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*Option Life = Masa Berlakunya Hak Opsi*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang ditetapkan, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Share Option

5. Periode Pelaksanaan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*). Sedangkan Harga Pelaksanaan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaksud dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan dibukanya periode pelaksanaan. Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan Share Option

Pengungkapan *shares option* yang mencakup:

1. Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
2. Jumlah *shares option* yang diberikan;
3. Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
4. Harga opsi yang diberikan;
5. Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

Secara lengkap telah dibahas pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

Sepanjang tahun 2015, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), dapat disampaikan, sebagai berikut.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dan Besar (*Large Exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	NIHIL	NIHIL
2.	Kepada Debitur Inti	50	7.626.684
	a. Individu	39	5.007.227
	b. Group	11	2.619.457

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
2. Sepanjang tahun 2015, Pemberian Dana untuk kegiatan *social* yang dikemas Bank BTN dengan melaksanakan berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara garis besar, biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas CSR, sebagai berikut.

Tabel Pemberian Dana Kegiatan Sosial

Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp jutaan)	Pihak Penerima
Ekonomi	2.425	Yayasan Juang Anak Bangsa, Persatuan Purna Karyawan Bapindo Pusat 04, Yayasan Nusa Institute Indonesia, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Pengurus Mesjid An-Nur Menara Mandiri-Santunan Yatim, Haris Perdana (Kamerad), Anak yatim dan dhuafa di Jakarta, Kota Cilegon, Banjarmasin, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Mataram, Balikpapan, Bogor, Makassar, Jambi, Bandung, Panitia Takbir Akbar Nasional, Masyarakat di Kota Pontianak, Masyarakat di Kota Jayapura, Wamena, Rembang, Lamongan dan Garut
Seni Budaya	49,65	Masyarakat Peduli Seni Tradisional Kab Magelang, Panitia Pelaksanaan Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Kota Pontianak
Olahraga	49,22	Panitia Pelaksana kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Undip, Yayasan Santo Markus, SMPN Bojongsoang 1 Bandung
Pendidikan	1.942.	Panitia Pelaksana Olimpiade Indonesia Cerdas, SDN Cempaka Putih Barat 17, Yayasan Madinatur Rahmah, SMAN An Nur, Mata Air Foundation, Universitas Sumatera Utara Medan, Sekolah Aluna Jakarta, Universitas Riau, Universitas Islam Riau dan Univ Lancang Kuning Riau, Universitas Diponegoro, SDN Tenjo 5 Kab Bogor, SDN Babakan 04 Kab Bogor, SDN Clumprit Yogyakarta, SDN Gajahrejo I Pasuruan Malang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Terbuka Jakarta, UIN Walisongo Semarang, Yayasan Generasi Muslim Cendekia Mataram, The Little Hijabi, 8 SDN dan 17 SMK di Kota Jayapura, Poltekkes Semarang, SMPN 36 Bandung, PAUD At-Toyyibah Cililin Bandung, MI Muhammadiyah Wonoanti Solo, IPB Bandung, TK/TPA Baiturrahman, Yayasan Ibnu Thaha Tanah Grogot Balikpapan, SMA Nurul Ulum Pamekasan, Unsoed Purwokerto, UKSW Salatiga Semarang, Poltekkes Makassar
Kesehatan	387	Kalbis Care Share, Pekerja sektor informal (buruh), Panitia Moestopo Jelajah Nusantara, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor, Mahasiswa KKN-PPM UGM, BNPB Pusat, Pemerintah Kota Muara Enim, Masyarakat Kota Kediri, Masyarakat di Kota Indramayu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo,
Sarana Prasarana Umum	4.124	SDN Bojong Asih & MI Al Huda Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Masyarakat di Kota Lebak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DPP REI, Peserta Mudik Bersama Bank BTN, Masyarakat di Dsn Musuk, Boyolali, Masyarakat di Kota Tangkiling, Pontianak, 10 orang pedagang di Pasar Johar Semarang, Masyarakat (Nelayan) di Kab Cilacap, Masyarakat di Ds Batukaras Kab Pangandaran, Pemerintah Kota Padang, Warga Perumahan Perum Villa Indah Mas Indah Bekasi, Perum Queen Garden Solo, Perumnas Sampangan Semarang, Pengurus Panti Asuhan Elsafan Jakarta, 45 orang Veteran di Kota Jayapura

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp jutaan)	Pihak Penerima
Keagamaan/Ibadah	1.314	Pengurus Masjid Al Kautsar Gunung Putri, Bogor, Pengurus Ponpes Darus Sholihin, Yayasan Al Washiyyah Jakarta, Pengurus Ponpes Afdholush Shofiyah, Pengurus Masjid Al Muhajirin, Batam Center, Pengurus Mesjid Al-Ihsan Jakasetia Bekasi, Pengurus Mesjid Nurul Islam, Cengkareng Indah Jakbar, Pengurus Mesjid Karang Nongko, Sleman Yogyakarta, Pengurus Mesjid Baiturrahman, Sambas Kalbar, Pengurus Mesjid Al-Ihsan Cilandak Dalam, Pengurus Mesjid Awwal Fathul Mubien Kota Manado, Pengurus Gereja Masehi Injili di Kota Manado, Pengurus Musholla Al-Falach Situbondo, Pengurus Mesjid Darussalam Banyuwangi Jatim, Pengurus Mesjid Darul Fithroh Kota Demak
Pelestarian Alam	473	PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari, Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Universitas Negeri Surabaya, Komite Alumni SMAN 1 Temanggung, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Himpunan Keluarga Rembang
	10.765	

Penjelasan detail mengenai aktivitas seputar program CSR Perseroan terkait:

1. Lingkungan hidup.
2. Ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan.
4. Tanggung jawab kepada konsumen

Disajikan pada bagian Laporan CSR yang disajikan bersamaan dengan Laporan Tahunan ini.

Information Technology Governance

Kebijakan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (IT) diarahkan untuk mendukung strategi Perseroan sebagai Bank fokus perumahan serta memperluas dan meningkatkan aktivitas operasional perbankan yang berbasis IT. Penggunaan IT dalam aktivitas operasional bank akan diperluas dan ditingkatkan khususnya untuk peningkatan akuisisi nasabah, otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk, serta memberikan kemudahan layanan yang efisien kepada nasabah. Untuk itu diperlukan sinergi antara strategi bisnis dengan kehandalan IT.

Strategi Teknologi Informasi 2015

Selama tahun 2013-2015 Teknologi Informasi Perseroan memiliki strategi untuk mendukung kebutuhan bisnis yaitu melalui visi, misi serta tematik yang tercantum dalam Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTIK BTN) 2013-2015.

Visi:

Mensinergikan Strategi Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis Dengan Memberikan Layanan Berkualitas, Melampaui Ekspektasi *Customer*, Mendrive Profitabilitas dan Fokus Pada Inovasi Produk.

Misi:

- *Maximizing IT return On Investment:* meningkatkan value dari investasi Teknologi Informasi yang berdampak positif terhadap proses bisnis.
- *Aligning Product and Service development:* Mengembangkan produk dan layanan bisnis berbasis IT secara sinergis dan berkesinambungan.
- *IT Services Delivery, Secure and Available:* Menyediakan layanan Teknologi Informasi yang terimplementasi secara aman dan dapat diandalkan.
- *Right People, Right Skills on IT Workforce:* Mengembangkan SDM Teknologi Informasi dengan kualifikasi dan kompetensi yang terbaik
- *IT Compliance:* Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi agar sesuai dengan best practices dan memenuhi regulasi yang berlaku.

Tematik Teknologi Informasi:

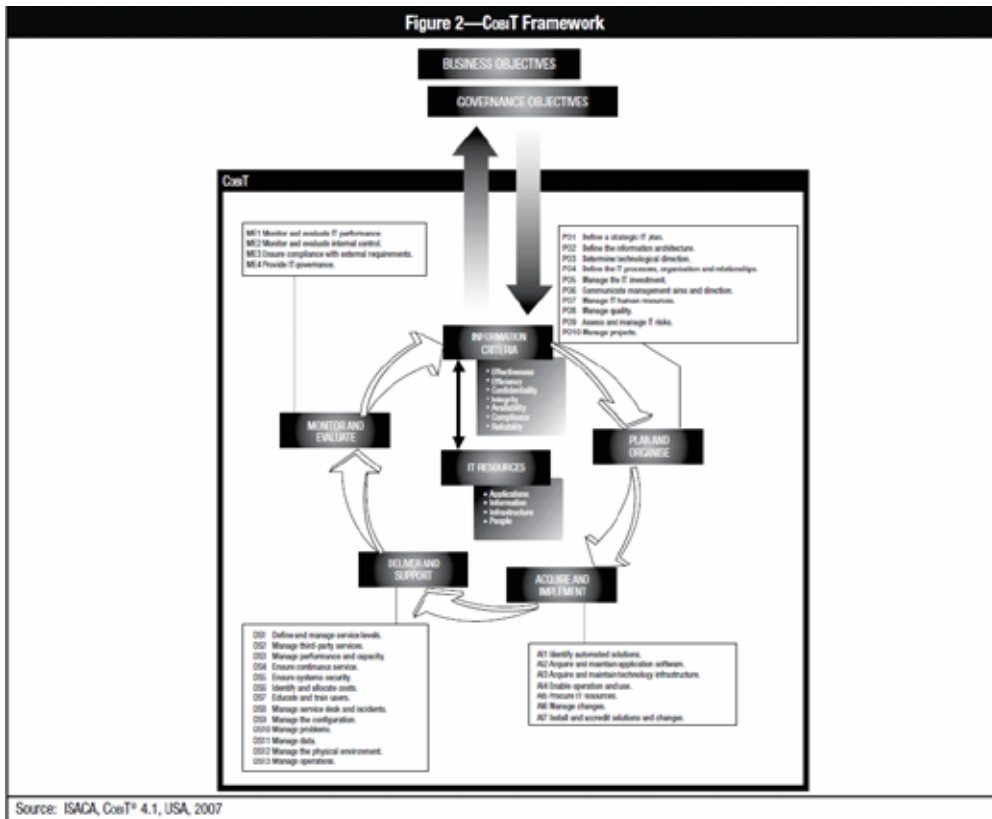
Perseroan senantiasa melakukan pengembangan terhadap sistem yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem, serta ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi yang telah dikelompokkan berdasarkan tematik dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bank BTN adalah:

Tabel Tematik Teknologi Informasi

<i>Zero Downtime</i>	Ketersediaan jaringan dan infrastruktur yang <i>secure</i> dan stabil dalam mendukung layanan Teknologi Informasi terhadap kegiatan bisnis.
<i>Time to Market and Efficiency</i>	Pengembangan berkelanjutan dalam aspek aplikasi/sistem yang mendukung produk bisnis serta efisiensi operasional dalam meningkatkan profit dan mengurangi biaya.
<i>Data Integrity and Confidentiality</i>	Penyediaan sistem manajemen informasi yang memenuhi aspek integritas data dan <i>secure</i> .
<i>E-Channel</i>	Pengadaan dan pengembangan <i>delivery channel</i> digital baru, khususnya aspek <i>commerce</i> sebagai salah satu andalan bank dalam meningkatkan produktivitas benefit dan <i>fee based income</i> dengan optimasi <i>resource</i> dan biaya yang tinggi.
<i>Leading Edge Technology</i>	Adopsi teknologi baru dalam mendukung kebutuhan dan perubahan bisnis.

Information Technology Governance

Tata Kelola Teknologi Informasi



Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan tanggung jawab Direksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola korporasi dan terdiri atas kepemimpinan, kemampuan perencanaan, dan metode untuk memastikan dukungan dan keselarasan organisasi Teknologi Informasi terhadap strategi dan tujuan perusahaan.

Pengorganisasian seluruh kapasitas yang ada untuk menyusun formulasi strategi dan rencana Teknologi Informasi, mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif, dan mengelola operasional Teknologi Informasi untuk memberikan daya saing bagi organisasi.

Pemetaan dilakukan terhadap tata kelola proses Teknologi Informasi yang berjalan saat ini di Perseroan mengacu kepada kerangka kerja *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) yang terdiri atas 4 domain sebagai berikut.

1. *Plan and Organise (PO)*
2. *Acquire and Implement (AI)*
3. *Deliver and Support (DS)*, dan
4. *Monitor and Evaluate (ME)*

Information Technology Governance

Program Kerja dan Pelaksanaan 2015

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, inisiatif strategis teknologi Informasi sepanjang tahun 2015 dilakukan dengan beberapa program kerja utama sebagai berikut.

1. *Zero Downtime*, yang meliputi:
 - a. *Capacity Planning* TI
 - b. Aplikasi *Monitoring* TI
2. Pemenuhan Arsitektur HA
 - a. *Time to Market and Efficiency*, yang meliputi:
 - b. Tata Kelola Organisasi
 - c. *Core Funding* dan *Non Funding*
 - d. *Change Management System*
 - e. Mengurangi Ketergantungan Vendor TI
3. *Data Integrity and Confidentiality*, yang meliputi:
 - a. Sistem Manajemen Informasi
 - b. Sistem IT Security
4. *E-Channel*, yang meliputi:
 - a. *Delivery Channel*
 - b. *Branchless System*
5. *Leading Edge Technology*, yaitu:
 - a. Pengembangan Aplikasi Inovatif Dalam Mendukung Proses Bisnis

Dalam upaya mewujudkan Teknologi Informasi yang handal sesuai dengan tematik selama pada tahun 2015, beberapa inisiatif Utama yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut.

Tabel Inisiatif Utama Teknologi Informasi

Tema TI	Inisiatif Turunan TI	Realisasi Project TI
<i>Zero Downtime</i>	Pengembangan Infrastruktur dan Pemenuhan Arsitektur <i>High Availability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Perangkat <i>Server Internet Banking</i> • Pengembangan Router untuk mendukung <i>High Availability</i> • <i>Enhancement MS SQL Database Server</i> • Pengembangan <i>WAN Optimizer</i> kantor Pusat dan kantor Cabang
<i>Time to Market and Efficiency</i>	Pelaksanaan Migrasi Sistem TI Sharia Sesuai Kajian Kajian dan Evaluasi Implementasi Organisasi TI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hardware RTGS</i> Syariah Tahun 2015 • Pengembangan Aplikasi <i>iWealth</i> Penyusunan <i>Career Path</i> IT
<i>Data Integrity and Confidentiality</i>	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi <i>iDas - Reporting</i> Harian Kualitas Kredit Tahun 2015 • Perangkat <i>Host Security Modul (HSM)</i> • Pengembangan Web <i>Application Firewall (Segmen Internet Web Corporate)</i>
<i>E Channel</i>	Pengembangan <i>Delivery Channel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>Internet Banking Individual (B2C)</i> dan <i>Mobile Banking</i> • PLN Prepaid • ATM Merah Putih • Pengembangan Aplikasi Host 2 Host
<i>Leading Edge Technology</i>	Pengembangan Sistem Pendukung <i>Service Care</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Interface IVR Syariah • Pengembangan FIBB

Akses Informasi

Bank BTN telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bank BTN antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut.

1. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui *website* www.BTN.co.id yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center 500 286 atau email csd@BTN.co.id.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi *Corporate Secretary/Investor Relations* Perusahaan dengan mengirim email ke investor_relations@BTN.co.id atau telepon ke (62-21) 638 70142.
4. Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin *internal*, poster dan *banner*.

6. Bank BTN juga menyampaikan informasi melalui upaya transparansi penyampaian palaporan, laporan kepada regulator, *analist meeting*, *konferensi pers*, dan lain sebagainya.

Pada *website* Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai:

1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
2. Analisis kinerja keuangan.
3. Laporan keuangan tahun selama 5 tahun terakhir
4. Profil Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Nama : Eko Waluyo

Alamat : Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta Pusat 10130

Telepon : (021) 6336789 ext.2003

Fax : (021) 6336719

E-mail : eko.waluyo@BTN.co.id

Website : www.BTN.co.id

Berikut adalah daftar siaran pers, penyampaian pelaporan dan korespondensi dengan BI/OJK sepanjang tahun 2015

Siaran Pers

Tabel Siaran Pers

No	Tempat	Tanggal	Press Release
1	Jakarta	14 Januari 2015	NPL Bank BTN Turun
2	Jakarta	29 Januari 2015	BTN Menjadi Integrator Mengatasi Kelangkaan Rumah
3	Jakarta	09 Februari 2015	BTN Luncurkan Portal Properti
4	Jakarta	10 Februari 2015	BTN Gandeng INTILAND Pasarkan Tabungan BTN Perumahan
5	Jakarta	14 Februari 2015	BTN Targetkan 1 Triliun Dalam <i>Indonesia Property Expo 2015</i>
6	Jakarta	25 Februari 2015	BTN Fasilitasi KPR Dengan DP 1%
7	Jakarta	26 Februari 2015	<i>Recovery Asset</i> BTN 2014 Sebesar 33,33% Atau Rp1,3 Triliun
8	Jakarta	06 Maret 2015	BTN Kerjasama <i>Host to Host</i> Dengan Pertamina
9	Surabaya	08 Maret 2015	BTN Dukung Pembiayaan Apartemen Avatar Sidoarjo
10	Jakarta	14 Maret 2015	BTN Luncurkan Kartu ATM Suka-Suka
11	Jakarta	24 Maret 2015	Kapitalisasi Pasar BTN 2014 Tumbuh 39 Persen
12	Jakarta	05 April 2015	Peduli Banjir Bank BTN Tanam Pohon 6,5 Km
13	Jakarta	20 April 2015	BTN Luncurkan <i>Housing Index</i>

Akses Informasi

No	Tempat	Tanggal	Press Release
14	Jakarta	21 April 2015	Maryono Jadi Presiden Regional WSBI Kawasan Asia Pasific
15	Jakarta	22 April 2015	2015 Optimis Bisnis Terus Tumbuh Positif
16	Jakarta	27 April 2015	BTN Pacu Pertumbuhan Kredit 17% dan Laba Melonjak 18%
17	Semarang	29 April 2015	BTN Siap Mendukung Program Sejuta Rumah
18	Cibinong	08 Mei 2015	Sambut Sejuta Rumah BTN Gelar Pameran di 12 Kota
19	Jakarta	21 Mei 2015	BTN Ajak Pengembang Serius Membangun Rumah Rakyat
20	Palangkaraya	25 Mei 2015	Mendukung Program Laku Pandai, BTN Kukuhkan Tabungan BTN Cermat
21	Jakarta	27 Mei 2015	Kucurkan Pinjaman Sebesar Rp 1,5 Triliun Kepada BTN Untuk Mendukung Program Sejuta Rumah
22	Jakarta	08 Juni 2015	BTN, REI, Mowilex dan SMF Gelar Ramadhan Rumah Impian
23	Jakarta	08 Juni 2015	Program CSR Ramadan Rumah Impian Kembali Digelar
24	Jakarta	10 Juni 2015	BTN <i>Property Award</i> 2015
25	Jakarta	10 Juni 2015	BTN Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Rp3 Triliun
26	Bandung	14 Juni 2015	BTN Targetkan Perolehan Dana Murah Lebih dari Rp3 Triliun
27	Bandung	16 Juni 2015	BTN Berikan Fasilitas Jasa & Layanan Perbankan ke ITB
28	Jakarta	29 Juni 2015	Bank BTN Membangun Kerjasama Dengan Kementerian Pariwisata
29	Jakarta	08 Juli 2015	Antisipasi Idul Fitri BTN Siapkan 24,6 Triliun
30	Jakarta	12 Juli 2015	BUMN Berangkatkan 75.000 Lebih Pemudik
31	Jakarta	27 Juli 2015	Semester I 2015 Laba BTN Meningkat 54,25%
32	Jayapura	13 Agustus 2015	BUMN Hadir Untuk Papua
33	Jayapura	15 Agustus 2015	Semarak HUT RI Bank BTN Gelar Pasar Murah di Jayapura
34	Jakarta	15 Agustus 2015	BTN <i>Property Expo</i> 2015
35	Semarang	16 Agustus 2015	Program Tabungan BTN eBATARAPOS Menyasar Semarang
36	Jayapura	17 Agustus 2015	HUT RI KE 70 BTN Bedah Rumah 45 Veteran di Papua
37	Jakarta	20 Agustus 2015	BTN Menyambut Positif Relaksasi Aturan LTV
38	Jakarta	24 Agustus 2015	BTN Expo Catat Transaksi Lebih Rp1,5 Triliun
39	Seoul	29 Agustus 2015	BTN Siapkan Kredit Bagi 10.000 TKI Untuk Punya Rumah
40	Jakarta	31 Agustus 2015	Dukung e-ToI Nasional BTN Luncurkan Kartu Prepaid
41	Jakarta	02 September 2015	BTN Rombak Susunan Komisaris
42	Jakarta	03 September 2015	Program Serba Untung Dari Tabungan BTN Batara Diluncurkan
43	Sidoarjo	06 September 2015	Program Tabungan BTN eBATARAPOS Menyasar Surabaya
44	Jakarta	07 September 2015	Untuk Akurasi Data Nasabah BTN Rangkul Kemendagri
45	Jakarta	09 September 2015	IBEX 2015, BTN Siap Masuk Era <i>Digital Banking</i>
46	Jakarta	14 September 2015	Bank BTN Membangun Kerjasama Dengan Kemendesa
47	Jakarta	16 September 2015	BTN Dapat Pinjaman Bilateral dari ICBC Bank
48	Tangerang	25 September 2015	Dukung Sejuta Rumah BTN Gelar Pameran di TangCity
49	Tangerang	29 September 2015	Percepat Sejuta Rumah Akad Kredit 1.000 Unit Sehari
50	Jakarta	30 September 2015	Buka Layanan di Kemenpupera, BTN Incar Dana Murah
51	Jakarta	07 Oktober 2015	KPR Bunga 7,5% Kerjasama BTN Dengan 25 Pengembang
52	Mataram	10 Oktober 2015	BTN Menggalang Dana Murah di Wilayah NTB

Akses Informasi

No	Tempat	Tanggal	Press Release
53	Malang	22 Oktober 2015	BTN Gagasan Tabungan Laku Pandai Berbasis <i>Digital Banking</i>
54	Bandung	23 Oktober 2015	BTN-ITB Kerjasama Pengembangan Masa Depan Rumah Rakyat
55	Jakarta	26 Oktober 2015	Laba Bank BTN Triwulan III 2015 Tumbuh 61,8%
56	Jakarta	27 Oktober 2015	Kerjasama BTN-BPJS TK Dukung Sejuta Rumah
57	Jakarta	28 Oktober 2015	BTN Siapkan Rp24 Miliar Lebih Dalam Program Undian Serba Untung
58	Jakarta	28 Oktober 2015	BTN Gandeng Jakarta Propertindo Kembangkan Kota Jakarta
59	Jakarta	01 Nopember 2015	Dana Tabungan Batara Capai Rp9,4 Triliun
60	Jakarta	04 Nopember 2015	Dukung Sejuta Rumah BTN Gandeng Kemenag
61	Jakarta	06 Nopember 2015	BTN Implementasikan Integrasi GRC
62	Jakarta	09 Nopember 2015	Dukung Sejuta Rumah, BTN-SMF Kerjasama <i>Refinancing</i>
63	Jakarta	11 Nopember 2015	BTN Gelar <i>Investor Summit</i> 2015
64	Jakarta	12 Nopember 2015	Kerjasama BTN-Muhammadiyah Mendukung Program Sejuta Rumah
65	Manila	14 Nopember 2015	BTN Sabet ASEAN <i>Corporate Governance Award</i> 2015
66	Jakarta	16 Nopember 2015	Bank BTN Raih Penghargaan <i>The Best Financial</i> 2015
67	Jakarta	16 Nopember 2015	BTN Raih ASEAN <i>Corporate Governance Awards</i> di Manila
68	Malang	21 Nopember 2015	BTN Terbitkan Kartu Elektronik Universitas Brawijaya
69	Makassar	25 Nopember 2015	BTN Akad Kredit 6.600 KPR Dalam Sehari
70	Jakarta	30 Nopember 2015	BTN Kelola Dana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
71	Jakarta	03 Desember 2015	Dorong Dana Murah, BTN Lakukan Bandling Event
72	Jakarta	10 Desember 2015	BTN Optimis Pasar Property 2016 Prospektif
73	Makassar	11 Desember 2015	BTN Kembangkan Wilayah Indonesia Timur
74	Jakarta	15 Desember 2015	Bank BTN Mewakili Perbankan Dalam KPI 2015
75	Palembang	17 Desember 2015	Tabungan BTN Simpel Akan Memperkuat Posisi Tabungan BTN Pelajar
76	Jakarta	21 Desember 2015	Bank BTN Siap Mensukseskan ATM HIMBARA
77	Jakarta	22 Desember 2015	Tabungan BTN Cermat Mendapat Apresiasi OJK

Akses Informasi

Transparansi Penyampaian Laporan

Tabel Transparansi Penyampaian Laporan

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	05/CSD/IR/I/2015	6-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Perpindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
2	06/CSD/IR/I/2015	6-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Perpindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
3	07/CSD/IR/I/2015	6-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Perpindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
4	08/CSD/IR/I/2015	7-Jan-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
5	09/CSD/IR/I/2015	7-Jan-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
6	12/CSD/IR/I/2015	8-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Cabang Pembantu (KCP) Arteri Pondok Indah	OJK
7	13/CSD/IR/I/2015	12-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Arteri Pondok Indah	Website SPE-OJK
8	14/CSD/IR/I/2015	12-Jan-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Arteri Pondok Indah.	Website Idxnet
9	19/CSD/IR/I/2015	15-Jan-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahap II dan III periode 01 Februari 2015 – 16 Maret 2015	OJK
10	20/CSD/IR/I/2015	16-Jan-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
11	21/CSD/IR/I/2015	16-Jan-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahap II dan III periode 01 Februari 2015 – 16 Maret 2015	Website Idxnet
12	34/DIR/CSD/I/2015	27-Jan-15	Penjelasan atas volatilitas Transaksi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Bursa Efek Indonesia via email
13	42/DIR/CSD/I/2015	30-Jan-15	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
14	53/DIR /CSD/II/2015	3-Feb-15	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Menteri BUMN
15	56/DIR/CSD/II/2015	5-Feb-15	Penyampaian Rencana & Agenda RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
16	85/CSD/IR/II/2015	5-Feb-15	Rencana RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BEI

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
17	86/CSD/IR/II/2015	5-Feb-15	Rencana RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	KSEI
18	87/CSD/IR/II/2015	5-Feb-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
19	88/CSD/IR/II/2015	5-Feb-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
20	112/CSD/IR/II/2015	13-Feb-15	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 (RUPST 2015) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
21	113/CSD/IR/II/2015	13-Feb-15	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Web SPE-OJK
22	114/CSD/IR/II/2015	13-Feb-15	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Web Idxnet
23	115/CSD/IR/II/2015	13-Feb-15	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPST	Web SPE-OJK
24	116/CSD/IR/II/2015	13-Feb-15	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPST	Web Idxnet
25	121/CSD/IR/II/2015	16-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Tanjung Duren	OJK
26	122/CSD/IR/II/2015	16-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Tanjung Duren	Website SPE-OJK
27	123/CSD/IR/II/2015	16-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Tanjung Duren	Website Idxnet
28	143/CSD/IR/II/2015	24-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Bubutan	OJK
29	144/CSD/IR/II/2015	24-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Bubutan	Website SPE-OJK
30	145/CSD/IR/II/2015	24-Feb-15	Keterbukaan Informasi Tentang Relokasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Bubutan	Website Idxnet
31	84/DIR/CSD/II/2015	25-Feb-15	Tambahan Mata Acara RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
32	154/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
33	155/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Capital Market Electronic Library (ICAMEL)
34	156/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BEI
35	159/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE OJK
36	160/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
37	161/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
38	162/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
39	157/CSD/IR/II/2015	27-Feb-15	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Menteri Keuangan
40	166/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Bukti Publikasi Pemanggilan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK-Dewan Pengawas Pasar Modal II. A
41	168/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Bukti Publikasi Pemanggilan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
42	169/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Bukti Publikasi Pemanggilan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Idxnet
43	172/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Pemanggilan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
44	173/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Pemanggilan RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
45	164/CSD/CC/III/2015	2-Mar-15	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014	BEI
46	165/CSD/CC/III/2015	2-Mar-15	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014	OJK
47	170/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014	Web SPE-OJK
48	171/CSD/IR/III/2015	2-Mar-15	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014	Web Idxnet
49	174/CSD/CC/III/2015	3-Mar-15	Penyampaian Laporan Audited Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014	Kementerian BUMN-Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain
50	189/CSD/IR/III/2015	4-Mar-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
51	190/CSD/IR/III/2015	4-Mar-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
52	193/CSD/IR/III/2015	6-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-11 (Sebelas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	OJK
53	194/CSD/IR/III/2015	6-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-11 (sebelas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
54	195/CSD/IR/III/2015	6-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-11 (sebelas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website Idxnet
55	197/CSD/IR/III/2015	9-Mar-15	Penandatanganan Kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero)	OJK
56	198/CSD/IR/III/2015	9-Mar-15	Penandatanganan Kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero)	Web SPE-OJK
57	199/CSD/IR/III/2015	9-Mar-15	Penandatanganan Kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero)	Web Idxnet
58	233/CSD/IR/III/2015	12-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-19 (Sembilan Belas) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	OJK
59	234/CSD/IR/III/2015	12-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-19 (Sembilan Belas) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Web SPE-OJK
60	235/CSD/IR/III/2015	12-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-19 (Sembilan Belas) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Web Idxnet
61	306/CSD/IR/III/2015	19-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-34 (Tiga Puluh Empat) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	OJK
62	307/CSD/IR/III/2015	19-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-34 (Tiga Puluh Empat) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	Web SPE-OJK
63	308/CSD/IR/III/2015	19-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-34 (Tiga Puluh Empat) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	Web Idxnet
64	305/CSD/IR/III/2015	19-Mar-15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dirjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan
65	334/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Laporan Pelaksanaan Program MESOP Windows I Periode 02 Februari - 16 Maret 2015	OJK
66	342/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Laporan Pelaksanaan Program MESOP Windows I Periode 02 Februari - 16 Maret 2015	Web SPE-OJK
67	343/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Laporan Pelaksanaan Program MESOP Windows I Periode 02 Februari - 16 Maret 2015	Web Idxnet
68	337/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
69	338/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
70	339/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
71	336/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
72	340/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
73	341/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
74	344/CSD/IR/III/2015	26-Mar-15	Jadwal Dividen Tunai Tahun Buku 2014	Web Idxnet
75	346/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-15 (Lima Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	OJK
76	347/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-8 (Delapan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	OJK
77	348/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-15 (Lima Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Web SPE-OJK
78	349/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-15 (Lima Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Web Idxnet
79	350/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga ke-8 (Delapan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Web SPE-OJK
80	351/CSD/IR/III/2015	30-Mar-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga ke-8 (Delapan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Web Idxnet
81	368/CSD/IR/IV/2015	6-Apr-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
82	369/CSD/IR/IV/2015	6-Apr-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
83	367/CSD/IR/IV/2015	6-Apr-15	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Tahunan	Website Idxnet
84	154/DIR/CSD/IV/2015	9-Apr-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur atas nama Sdr. Oni Febrianto R	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
85	386/CSD/IR/IV/2015	10-Apr-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
86	387/CSD/IR/IV/2015	10-Apr-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
87	388/CSD/IR/IV/2015	13-Apr-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
88	162/DIR/CSD/IV/2015	15-Apr-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur atas nama Sdr. Sis Apik Wijayanto	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
89	404/CSD/IR/IV/2015	16-Apr-15	Penyampaian Materi Public Expose	Website Idxnet
90	169/DIR/CSD/IV/2015	17-Apr-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur atas nama Sdr. Sulis Usdoko	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
91	170/DIR/CSD/IV/2015	17-Apr-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur atas nama Sdr. Lucky Fathul Aziz H	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
92	172/DIR/CSD/IV/2015	21-Apr-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur atas nama Sdr. Adi Setianto	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
93	406/CSD/IR/IV/2015	21-Apr-15	Pelaporan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang	OJK
94	405/CSD/IR/IV/2015	21-Apr-15	Pelaporan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang	Web SPE-OJK
95	409/CSD/IR/IV/2015	23-Apr-15	Penyampaian Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 50 tanggal 24 Maret 2015	OJK
96	408/CSD/IR/IV/2015	23-Apr-15	Penunjukan <i>Corporate Secretary</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
97	411/CSD/IR/IV/2015	23-Apr-15	Penunjukan <i>Corporate Secretary</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
98	416/CSD/IR/IV/2015	24-Apr-15	Penjelasan Pemberitaan pada Investor Daily tanggal 23 April 2015	Website Idxnet
99	180/DIR/CSD/IV/2015	24-Apr-15	Penjelasan Pemberitaan pada Investor Daily Tanggal 23 April 2015	BEI
100	417/CSD/IR/IV/2015	24-Apr-15	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> Tahun 2015	Website Idxnet
101	428/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCS Cirebon	OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
102	431/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCS Cirebon	Website SPE-OJK
103	434/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCS Cirebon	Website Idxnet
104	191/DIR/CSD/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Bukti Setoran Pembayaran Dividen Tahun Buku 2014 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Menteri Keuangan – Direktur Jenderal Anggaran (cc: Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kemenkeu dan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN)
105	189/DIR/CSD/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan RUPST 2015 No. 51 Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Pengawas Bank I OJK
106	190/DIR/CSD/IV/2015	28-Apr-15	Kelengkapan Dokumen Berupa Copy Sertifikat Kompetensi Level 5 atas nama Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
107	425/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2015	BEI
108	427/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Pelaporan Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2015	OJK
109	429/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Laporan keuangan Interim Non Audited 31 Maret 2015	Web SPE-OJK
110	430/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	Web SPE-OJK
111	432/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Non Audited 31 Maret 2015	Web Idxnet
112	433/CSD/IR/IV/2015	28-Apr-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	Web Idxnet
113	426/CSD/IR/IV/2015	29-Apr-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2015	Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
114	201/DIR/CSD/IV/2015	30-Apr-15	Kelengkapan Dokumen Berupa Copy Sertifikat Kompetensi Level 5 atas nama Sdr. Sis Apik Wijayanto dan Sdr. Sulis Usdoko sebagai Calon Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK (cc: Departemen Pengawasan Bank I, OJK)
115	441/CSD/IR/V/2015	4-May-15	Kelengkapan Dokumen keterangan tidak menjadi pengurus koperasi atas nama Sdr. Oni Febriarto Rahardjo Calon Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan DPIP - OJK
116	446/CSD/IR/V/2015	7-May-15	Kelengkapan copy sertifikat Manajemen Risiko atas nama Sdr. Adi Setianto dan Sdr. Oni Febriarto Rahardjo sebagai calon Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan DPIP - OJK
117	447/CSD/IR/V/2015	7-May-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Web SPE-OJK
118	448/CSD/IR/V/2015	7-May-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Web Idxnet
119	449/CSD/IR/V/2015	8-May-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK
120	450/CSD/IR/V/2015	8-May-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Web SPE-OJK
121	451/CSD/IR/V/2015	8-May-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Web Idxnet
122	237/DIR/CSD/V/2015	21-May-15	Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan RUPST 2015 No. 26 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Departemen Pengawasan Bank 1, OJK
123	216/DIR/CSD/V/2015	21-May-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan & Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Komisaris Independen atas nama Sdr. Arie Coerniadi, Sdr. Kamaruddin Sjam, dan Sdri. Catherinawati Hadiman	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan DPIP - OJK
124	239/DIR/CSD/V/2015	21-May-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Oni Febriarto Rahardjo sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Komisiner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
125	473/CSD/IR/V/2015	21-May-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Oni Febriarto Rahardjo sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web SPE-OJK
126	474/CSD/IR/V/2015	21-May-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Oni Febriarto Rahardjo sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Web Idxnet
127	242/DIR/CSD/V/2015	22-May-15	Laporan Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan	Departemen Pengawasan Bank 1, OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
128	487/CSD/IR/VI/2015	27-May-15	Penyampaian Kelengkapan Pernyataan Independensi Calon Komisaris Independen dan Tambahan Data Daftar Riwayat Hidup atas nama Sdr. Kamaruddin Sjam	Kepala Deputi Direktur Perizinan Pengurus & Kepemilikan Bank Umum OJK
129	496/CSD/IR/VI/2015	4-Jun-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
130	497/CSD/IR/VI/2015	4-Jun-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
131	503/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-12 (Dua Belas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	OJK
132	505/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-12 (Dua Belas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website SPE-OJK
133	506/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-12 (Dua Belas) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website Idxnet
134	373/DIR/CSD/VI/2015	8-Jun-15	Pengunduran Diri Sdr. Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
135	507/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Pengunduran Diri Sdr. Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
136	508/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Pengunduran Diri Sdr. Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
137	374/DIR/CSD/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Komisisioner OJK
138	509/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
139	510/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
140	375/DIR/CSD/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Sulis Usdoko sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Komisisioner OJK
141	511/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Sulis Usdoko sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
142	512/CSD/IR/VI/2015	8-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Sulis Usdoko sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
143	519/CSD/IR/VI/2015	11-Jun-15	Keterbukaan Informasi Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	OJK
144	520/CSD/IR/VI/2015	11-Jun-15	Keterbukaan Informasi Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
145	521/CSD/IR/VI/2015	11-Jun-15	Keterbukaan Informasi Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	Website Idxnet
146	459/DIR/CSD/VI/2015	11-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11 Juni 2015
147	522/CSD/IR/VI/2015	11-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
148	523/CSD/IR/VI/2015	11-Jun-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
149	526/CSD/IR/VI/2015	12-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-20 (Dua Puluh) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	OJK
150	532/CSD/IR/VI/2015	12-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-20 (Dua Puluh) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Website SPE-OJK
151	533/CSD/IR/VI/2015	12-Jun-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga Ke-20 (Dua Puluh) Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Website Idxnet
152	527/CSD/IR/VI/2015	12-Jun-15	Penyampaian Kelengkapan Pernyataan Pengunduran Diri dan Revisi Daftar Riwayat Hidup Sdr. Arie Coerniadi Calon Komisararis Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cc: Departemen Pengawasan Bank I-OJK	Deputi Direktur Perizinan & Kepemilikan Bank Umum – OJK
153	535/CSD/IR/VI/2015	15-Jun-15	Penjelasan Pemberitaan pada Bisnis Indonesia tanggal 11 Juni 2015	BEI
154	537/CSD/IR/VI/2015	15-Jun-15	Penjelasan Pemberitaan pada Bisnis Indonesia tanggal 11 Juni 2015	Website SPE-OJK
155	538/CSD/IR/VI/2015	15-Jun-15	Penjelasan Pemberitaan pada Bisnis Indonesia tanggal 11 Juni 2015	Website Idxnet
156	540/CSD/IR/VI/2015	17-Jun-15	Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Bank BTN dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)	OJK
157	541/CSD/IR/VI/2015	17-Jun-15	Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Bank BTN dengan Institut Teknologi Bandung	Website SPE-OJK
158	542/CSD/IR/VI/2015	17-Jun-15	Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Bank BTN dengan Institut Teknologi Bandung	Website Idxnet
159	548/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga Ke- 35 (Tiga Puluh Lima) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	OJK
160	. 549/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Keterbukaan Informasi tentang Pembayaran Bunga Ke-35 (Tiga Puluh Lima) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
161	550/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-35 (Tiga Puluh Lima) Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	Website Idxnet
162	547/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahap II dan III Periode 01 Juli 2015 - 18 Agustus 2015	OJK
163	551/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahap II dan III Periode 01 Juli 2015 - 18 Agustus 2015	Website SPE-OJK
164	552/CSD/IR/VI/2015	23-Jun-15	Informasi Rencana Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahap II dan III Periode 01 Juli 2015 - 18 Agustus 2015	Website Idxnet
165	764/DIR/CSD/VI/2015	25-Jun-15	Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atas nama Sdr. Irman A. Zahiruddin	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan – OJK
166	574/CSD/IR/VI/2015	29-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-16 (Enam Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	OJK
167	577/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-16 (Enam Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Website SPE-OJK
168	578/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-16 (Enam Belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Website Idxnet
169	575/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-9 (Sembilan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	OJK
170	579/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-9 (Sembilan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Website SPE-OJK
171	580/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Bunga Ke-9 (Sembilan) Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2014	Website Idxnet
172	576/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank BTN dengan Kementerian Pariwisata	OJK
173	581/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank BTN dengan Kementerian Pariwisata	Website SPE-OJK
174	582/CSD/IR/VI/2015	30-Jun-15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank BTN dengan Kementerian Pariwisata	Website Idxnet
175	786/DIR/CSD/VII/2015	3-Jul-15	Laporan Pengangkatan Efektif Komisaris Independen Hasil RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Komisiner OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
176	583/CSD/IR/VII/2015	3-Jul-15	Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik Laporan Pengangkatan Efektif Komisaris Independen Hasil RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
177	.584/CSD/IR/VII/2015	3-Jul-15	Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik Laporan Pengangkatan Efektif Komisaris Independen Hasil RUPST 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
178	585/CSD/IR/VII/2015	6-Jul-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
179	586/CSD/IR/VII/2015	6-Jul-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
180	589/CSD/IR/VII/2015	8-Jul-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 periode Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
181	590/CSD/IR/VII/2015	8-Jul-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 periode Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
182	801/DIR/CSD/VII/2015	9-Jul-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tahap I Tahun 2015 Periode Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
183	592/CSD/IR/VII/2015	13-Jul-15	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	Website Idxnet
184	808/DIR/CSD/VII/2015	13-Jul-15	Rencana dan Mata Acara RUPSLB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
185	593/CSD/IR/VII/2015	14-Jul-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
186	608/CSD/IR/VII/2015	14-Jul-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
187	609/CSD/IR/VII/2015	14-Jul-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
188	611/CSD/IR/VII/2015	15-Jul-15	Penyampaian Tambahan Dokumen Persyaratan <i>Fit and proper test</i> Sdr. Irman A. Zahiruddin Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Direktur Perizinan Perbankan – OJK
189	610/CSD/IR/VII/2015	15-Jul-15	Ralat Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
190	617/CSD/IR/VII/2015	27-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
191	619/CSD/IR/VII/2015	27-Jul-15	Pengumuman Rencana RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
192	.620/CSD/IR/VII/2015	27-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
193	621/CSD/DIR/VII/2015	27-Jul-15	Pengumuman Rencana RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
194	622/CSD/DIR/VII/2015	27-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
195	623/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Surat Keterangan Sertifikasi Manajemen Risiko atas nama Sdri. Catherineawati Hadiman Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Direktorat Pengawasan Bank I – OJK
196	624/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
197	625/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BEI
198	626/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2015	Capital Market Electronic Library (ICAMEL)
199	627/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
200	628/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
201	629/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
202	630/CSD/IR/VII/2015	28-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per 30 Juni 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
203	632/CSD/IR/VII/2015	29-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Ralat Laporan Keuangan per 30 Juni 2015	OJK
204	633/CSD/IR/VII/2015	29-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Koreksi)	Website SPE-OJK
205	634/CSD/IR/VII/2015	29-Jul-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Koreksi)	Website Idxnet
206	853/DIR/CSD/VIII/2015	4-Aug-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Komisisioner OJK
207	639/CSD/IR/VIII/2015	4-Aug-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
208	640/CSD/IR/VIII/2015	4-Aug-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
209	645/CSD/IR/VIII/2015	5-Aug-15	Penyampaian Tambahan Dokumen Persyaratan <i>Fit and proper test</i> Sdr. Irman A. Zahiruddin Calon yang membawahi fungsi kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Direktur Perizinan Perbankan – OJK
210	647/CSD/IR/VIII/2015	6-Aug-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
211	648/CSD/IR/VIII/2015	6-Aug-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
212	650/CSD/IR/VIII/2015	11-Aug-15	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
213	651/CSD/IR/VIII/2015	11-Aug-15	Pemanggilan RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	website SPE-OJK
214	652/CSD/IR/VIII/2015	11-Aug-15	Pemanggilan RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	website IDXnet
215	653/CSD/IR/VIII/2015	11-Aug-15	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	website SPE-OJK
216	654/CSD/IR/VIII/2015	11-Aug-15	Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	website IDXnet
217	878/DIR/CSD/VIII/2015	11-Aug-15	Tambahan Mata Acara RUPSLB 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
218	692/CSD/IR/VIII/2015	21-Aug-15	Laporan Pelaksanaan MESOP Windows II Periode 01 Juli s/d 18 Agustus 2015	OJK
219	693/CSD/IR/VIII/2015	24-Aug-15	Laporan Pelaksanaan MESOP windows II periode 01 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2016	website SPE-OJK
220	694/CSD/IR/VIII/2015	24-Aug-15	Laporan Pelaksanaan MESOP Windows II Periode 01 Juli s/d 18 Agustus 2015	Website Idxnet
221	705/CSD/IR/VIII/2015	28-Aug-15	Penyampaian Salinan Sertifikat Manajemen Risiko Tahun 2006 dan Tahun 2012 atas nama Sdr. Irman A. Zahiruddin	Direktorat Pengawasan Bank I – OJK
222	714/CSD/IR/IX/2015	2-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) empat Bank BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk	OJK
223	715/CSD/IR/IX/2015	2-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) empat Bank BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
224	716/CSD/IR/IX/2015	2-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) empat Bank BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Website Idxnet
225	721/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
226	724/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
227	725/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
228	733/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (KOREKSI)	Website SPE-OJK
229	734/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (KOREKSI)	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
230	722/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
231	726/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
232	727/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
233	731/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
234	732/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
235	723/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
236	728/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
237	729/CSD/IR/IX/2015	4-Sep-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
238	735/CSD/IR/IX/2015	7-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Kas Syariah Kopo	OJK
239	736/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Dalam Negeri RI	OJK
240	738/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Kas Syariah Kopo	Website SPE-OJK
241	739/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN Kantor Kas Syariah Kopo	Website Idxnet
242	740/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Dalam Negeri RI	Website SPE-OJK
243	741/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Dalam Negeri RI	Website Idxnet
244	737/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK
245	742/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Website SPE-OJK
246	743/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Penjualan)	Website Idxnet
247	744/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Pembelian)	Website SPE-OJK
248	745/CSD/IR/IX/2015	8-Sep-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Pembelian)	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
249	748/CSD/IR/IX/2015	9-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-13 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	OJK
250	749/CSD/IR/IX/2015	9-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-13 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2013	Website SPE-OJK
251	750/CSD/IR/IX/2015	9-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-13 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2014	Website Idxnet
252	752/CSD/IR/IX/2015	11-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-21 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	OJK
253	754/CSD/IR/IX/2015	14-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-21 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Website SPE-OJK
254	755/CSD/IR/IX/2015	14-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-21 Obligasi XIV Bank BTN tahun 2010	Website Idxnet
255	756/CSD/IR/IX/2015	15-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama Bank BTN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	OJK
256	757/CSD/IR/IX/2015	15-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama Bank BTN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website SPE-OJK
257	758/CSD/IR/IX/2015	15-Sep-15	Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama Bank BTN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website Idxnet
258	764/CSD/IR/IX/2015	18-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan PT Bank ICBC Indonesia	OJK
259	765/CSD/IR/IX/2015	18-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan PT Bank ICBC Indonesia	Website SPE-OJK
260	766/CSD/IR/IX/2015	18-Sep-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan PT Bank ICBC Indonesia	Website Idxnet
261	794/CSD/IR/IX/2015	22-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-36 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	OJK
262	795/CSD/IR/IX/2015	22-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-36 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2007	Website SPE-OJK
263	796/CSD/IR/IX/2015	22-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-36 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2008	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
264	1017/DIR/CSD/IX/2015	22-Sep-15	Konfirmasi Penyampaian Risalah RUPS, Laporan Keuangan (Audited) dan Bukti Setor Pembayaran Dividen Bagian Pemerintah Tahun Buku 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Penerimaan Negara Bukan Pajak (CC: Direktur Jenderal Anggaran ementerian, Sekretaris Kementerian BUMN)
265	799/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-17 (tujuh belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	OJK
266	800/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-10 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	OJK
267	801/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCP Banyuwangi	OJK
268	802/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCP Banyuwangi	Website SPE-OJK
269	803/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Keterbukaan Informasi tentang Relokasi Bank BTN KCP Banyuwangi	Website Idxnet
270	804/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-17 (tujuh belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Website SPE-OJK
271	805/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	laporan Pembayaran Bunga Ke-17 (tujuh belas) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Website Idxnet
272	806/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-10 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2011	Website SPE-OJK
273	807/CSD/IR/IX/2015	29-Sep-15	Laporan Pembayaran Bunga ke-10 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Website Idxnet
274	812/CSD/IR/IX/2015	30-Sep-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
275	817/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	OJK
276	822/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	Website SPE-OJK
277	823/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	Website Idxnet
278	818/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
279	824/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
280	825/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
281	815/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dewan Pengawas Bank 1-OJK
282	820/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
283	821/CSD/IR/X/2015	1-Oct-15	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
284	827/CSD/IR/X/2015	5-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
285	828/CSD/IR/X/2015	5-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
286	830/CSD/IR/X/2015	5-Oct-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
287	831/CSD/IR/X/2015	5-Oct-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
288	1063/DIR/CSD/X/2015	7-Oct-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 periode Juli – September 2015	OJK
289	838/CSD/IR/X/2015	8-Oct-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 periode Juli – September 2015	Website SPE-OJK
290	839/CSD/X/2015	8-Oct-15	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 periode Juli – September 2015	Website Idxnet
291	842/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	OJK
292	843/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap 1 Tahun 2015 Seri A	Website Idxnet
293	844/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	Website Idxnet
294	845/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	Website Idxnet
295	846/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
296	847/CSD/IR/X/2015	12-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Kepada Publik Pembayaran Bunga Ke-1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	Website SPE-OJK
297	1075/DIR/CSD/X/2015	13-Oct-15	Ketidakbersediaan Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Perseroan)	OJK
298	856/CSD/IR/X/2015	13-Oct-15	Ketidakbersediaan Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Perseroan)	Website SPE-OJK
299	857/CSD/IR/X/2015	13-Oct-15	Ketidakbersediaan Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
300	860/CSD/IR/X/2015	16-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Departemen Pengawasan Bank 1 – OJK
301	863/CSD/IR/X/2015	16-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
302	864/CSD/IR/X/2015	16-Oct-15	Laporan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
303	871/CSD/IR/X/2015	22-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK
304	873/CSD/IR/X/2015	23-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Website SPE-OJK
305	874/CSD/IR/X/2015	23-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Website Idxnet
306	876/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 September 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
307	877/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 September 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Bursa Efek Indonesia
308	879/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 September 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
309	880/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Laporan Keuangan Per 30 September 2015 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
310	881/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan	Website SPE-OJK
311	882/CSD/IR/X/2015	27-Oct-15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
312	884/CSD/IR/X/2015	28-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan	OJK
313	888/CSD/IR/X/2015	28-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan	Website SPE-OJK
314	889/CSD/IR/X/2015	28-Oct-15	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan	Website Idxnet
315	905/CSD/IR/X/2015	28-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK
316	906/CSD/IR/X/2015	30-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Website SPE-OJK
317	907/CSD/IR/X/2015	30-Oct-15	Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Website Idxnet
318	917/CSD/IR/XI/2015	4-Nov-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
319	918/CSD/IR/XI/2015	4-Nov-15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
320	1129/DIR/CSD/XI/2015	6-Nov-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
321	919/CSD/IR/XI/2015	6-Nov-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Irman A. Zahiruddin sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website SPE-OJK
322	920/CSD/IR/XI/2015	6-Nov-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Irman A. Zahiruddin sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Website Idxnet
323	922/CSD/IR/XI/2015	10-Nov-15	Penandatanganan Kerjasama Refinancing Bank BTN dengan PT Sarana Multiguna Finansial (SMF)	OJK
324	925/CSD/IR/XI/2015	11-Nov-15	Penandatanganan Kerjasama Refinancing Bank BTN dengan PT Sarana Multiguna Finansial (SMF)	Website SPE-OJK
325	926/CSD/IR/XI/2015	11-Nov-15	Penandatanganan Kerjasama Refinancing Bank BTN dengan PT Sarana Multiguna Finansial (SMF)	Website Idxnet
326	936/CSD/IR/XI/2015	16-Nov-15	Laporan <i>Public Expose</i>	Website Idxnet
327	1166/DIR/CSD/XI/2015	24-Nov-15	Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK
328	948/CSD/IR/XI/2015	24-Nov-15	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa	Website SPE-OJK
329	949/CSD/IR/XI/2015	24-Nov-15	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa	Website Idxnet

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
330	953/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2016 Bank BTN	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
331	954/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
332	955/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2016 Bank BTN	Website SPE-OJK
333	956/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Website SPE-OJK
334	957/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB 2016 Bank BTN	Website Idxnet
335	958/CSD/IR/XII/2015	1-Dec-15	Kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Website Idxnet
336	1200/DIR/CSD/XII/2015	16-Dec-15	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Fajar Harry Sampurno - sebagai Komisaris Bank BTN	Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
337	965/CSD/IR/XII/2015	03-Des-2015	Keterbukaan Informasi Tentang Pembukaan Kantor Wilayah IV Bank BTN	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
338	966/CSD/IR/XII/2015	04-Des-2015	Laporan Registrasi Pemegang Efek	Website SPE-OJK
339	967/CSD/IR/XII/2015	04-Des-2015	Laporan Registrasi Pemegang Efek	Website Idxnet
340	968/CSD/IR/XII/2015	04-Des-2015	Keterbukaan Informasi Tentang Pembukaan Kantor Wilayah IV Bank BTN	Website SPE-OJK
341	969/CSD/IR/XII/2015	04-Des-2015	Keterbukaan Informasi Tentang Pembukaan Kantor Wilayah IV Bank BTN	Website Idxnet
342	982/CSD/IR/XII/2015	10-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-14 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
343	983/CSD/IR/XII/2015	10-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-14 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
344	984/CSD/IR/XII/2015	10-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-14 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	Website Idxnet
345	996/CSD/IR/XII/2015	14-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-22 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
346	997/CSD/IR/XII/2015	14-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-22 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2011	Website SPE-OJK
347	998/CSD/IR/XII/2015	14-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-22 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2012	Website Idxnet
348	1001/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan RUPSLB Bank BTN 2016	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
349	1003/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Pemanggilan RUPSLB Bank BTN 2016	Website SPE-OJK
350	1004/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Pemanggilan RUPSLB Bank BTN 2016	Website Idxnet
351	1005/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan RUPSLB Bank BTN 2016	Website SPE-OJK
352	1006/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan RUPSLB Bank BTN 2016	Website Idxnet
353	1007/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Fajar Harry Sampurno - sebagai Komisaris Bank BTN	Website SPE-OJK

Akses Informasi

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
354	1008/CSD/IR/XII/2015	16-Des-2015	Laporan Pengangkatan Efektif Sdr. Fajar Harry Sampurno - sebagai Komisaris Bank BTN	Website Idxnet
355	1018/CSD/IR/XII/2015	29-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
356	1019/CSD/IR/XII/2015	29-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-18 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
357	1021/CSD/IR/XII/2015	30-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Website SPE-OJK
358	1022/CSD/IR/XII/2015	30-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	Website Idxnet
359	1023/CSD/IR/XII/2015	30-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-18 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	OJK (Elektronik)
360	1024/CSD/IR/XII/2015	30-Des-2015	Laporan Pembayaran Bunga ke-18 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	Website Idxnet

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Bank BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara dimana kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna. Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Negara Republik Indonesia memiliki 6.353.999.999 Lembar saham biasa, dan 1 lembar seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus sehingga kepemilikan sahamnya sebesar 60,04%. Secara lebih rinci Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh *investor* atau Pemegang Saham (transparansi informasi), Bank BTN memberikan perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham Mayoritas maupun Minoritas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank.

Pelaksanaan fungsi diseminasi informasi tersebut dilakukan oleh bagian Hubungan Investor (*Investor Relation*) di bawah Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Beberapa bentuk pelaksanaan transparansi informasi yang dilakukan Bank adalah aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis dan investor, melalui paparan publik untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Metode yang digunakan, adalah sebagai berikut.

1. *Direct*, yang meliputi: *Public Expose, Non Deal Road Show, Press Conference, 1-on-1 Meetings, Group Meetings, Branch Visits* dan *Site Visits*.
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report, Laporan Keuangan Publikasi, Website, Media, Conference Calls* dan *Emails*.

Prinsip dasar yang digunakan oleh Bank BTN adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
2. Bank maupun Direksi serta pegawai wajib memberikan informasi dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan dibidang perbankan yang berlaku.
3. Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*).

Bank senantiasa membangun hubungan baik dengan investor, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya melalui penyelenggaraan secara berkala kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan pemegang saham tertentu dan paparan publik.

Bank juga telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi melalui situs Perseroan di www.btn.co.id. Situs ini memuat informasi terkini seperti aksi korporasi, laporan keuangan dan *company guidance* (triwulanan), bahan presentasi Perseroan ke publik dan *kliping* media mengenai pemberitaan Bank.

Selain kebijakan transparansi informasi, Bank juga memiliki Komisaris Independen dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini antara lain dilakukan untuk menekankan komitmen Bank terkait dengan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham. Komisaris Independen Bank BTN sebanyak 3 orang dari 6 orang anggota Dewan Komisaris atau sebanyak 50%. Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan demikian, kepentingan Pemegang Saham Minoritas dapat terwakili dengan baik.

Kontribusi Bagi Negara

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank BTN dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, dimana hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembayaran Pajak

Total Pembayaran Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2015, sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

Pajak	2015
PPh (PPh Badan)	783.482.705.648
PPh21 Perorangan	158.868.428.287
PPN	5.451.947.388
PPnBM	-
PBB	7.360.544.514
Pajak Lainnya:	
PPh pasal 22	1.735.775.370
PPh pasal 23	23.189.870.347
PPh pasal 26	8.871.371.036
PPh pasal 4 ayat 2	755.188.210.000
Lainnya	206.376.894.207
Total	1.950.525.746.797

Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2015, tidak terdapat ketidakpatuhan Perseroan dalam kewajiban membayar pajak (NIHIL)

Rencana Strategis

Jangka Panjang

Bank BTN memiliki peran strategis dalam program pembangunan perumahan nasional. Sejak ditunjuk pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/1/1974 sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, Bank BTN secara konsisten menjadi bank fokus untuk pembiayaan perumahan rakyat dengan jumlah akumulasi penyaluran KPR lebih dari 3,5 juta unit.

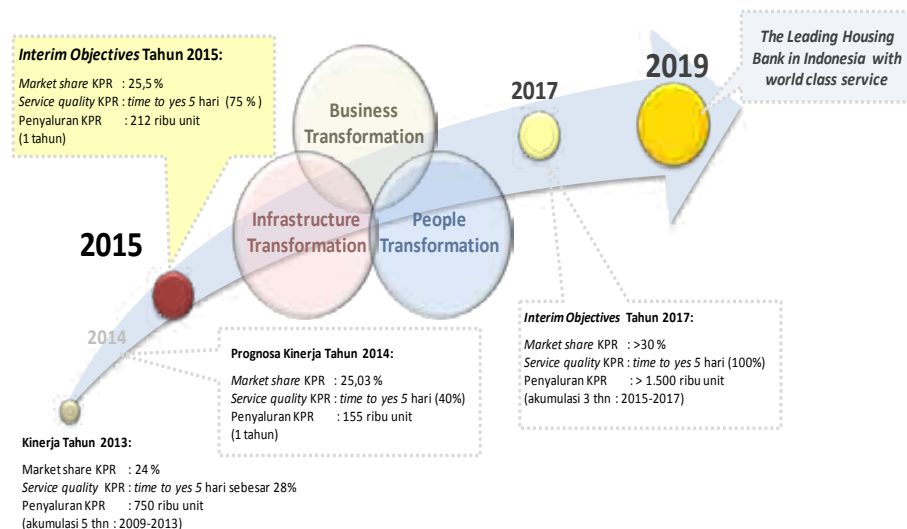
Berdasarkan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 perihal Kegiatan Usaha Bank dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti, Bank BTN telah memposisikan diri sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan. Sebagaimana ketentuan PBI tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi Bank yang memfokuskan pada kegiatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat dengan jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan Bank.

Hal ini dipertegas melalui surat Bank BTN kepada Bank Indonesia No. 450/S/DIR/SPMD-NSLD/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal permohonan sebagai bank fokus perumahan. Dalam butir 3 disampaikan bahwa kredit/pembiayaan perumahan adalah kredit yang diberikan dengan peruntukan konstruksi perumahan, pembelian rumah, membangun rumah sendiri, renovasi rumah dan penggunaan lainnya dengan agunan rumah.

Sebagian besar debitur KPR Perseroan berada pada segmen yang sangat spesifik, terdiri dari masyarakat menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah sehingga memiliki *repayment capacity* yang rentan terhadap perubahan kondisi makro ekonomi.

Mempertimbangkan faktor historis, kompetensi yang dimiliki, potensi bisnis yang ada, regulasi, serta peran Perseroan selama ini dalam pembangunan nasional, maka Bank BTN sebagai bank fokus perumahan, maka program transformasi menjadi *leading housing bank in Indonesia with world class service quality* pada tahun 2019 masih relevan sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1.3. Road map transformasi.

Gambar Road map transformasi



Rencana Strategis

Adapun sasaran objektif *road map* transformasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Business Transformation

1. Perkreditan
 - a. Fokus pada sektor perumahan dengan komposisi minimal 85%
 - Kredit perumahan
 - ✓ **Kredit subsidi / program** : melalui optimalisasi kerjasama dengan instansi terkait (Kemenpera) dan lembaga lainnya (BPJS, Bapertarum, Pemda, dll)
 - ✓ **Kredit non subsidi** : fokus segmen menengah bawah melalui kerjasama B to B
 - ✓ **Kredit home equity** : optimalisasi customer based debitur KPR BTN
 - ✓ **Kredit pembangunan perumahan** : optimalisasi kerjasama dengan pengembang untuk mendukung produksi rumah (KPR)
 - Kredit non perumahan
 - fokus pada kredit terkait perumahan pada *value chain* perumahan, terutama segmen UMKM, termasuk KUR
 - b. Memperbaiki manajemen perkreditan meliputi proses, SDM, dan manajemen risiko
 - c. Memperbaiki kualitas kredit melalui *collection management system* dan *asset management*
2. Pendanaan yang mendukung bank fokus perumahan
 - a. Pendanaan kredit subsidi berasal dari FLPP dan mengoptimalkan dana program bekerjasama dengan instansi terkait
 - b. Pendanaan kredit non subsidi mengutamakan sumber dana dari *Capital market*, pinjaman, dan sekuritisasi serta dana pihak ketiga *low cost* (CASA)
 - c. Pendanaan kredit lainnya berasal dari dana pihak ketiga
3. Memperkuat bisnis syariah dengan fokus pada sektor perumahan dan produktif segmen UMKM
4. Memperkuat permodalan melalui peningkatan profitabilitas, subdebt dan *dividen policy*
5. Menunjang kegiatan masyarakat dengan penggunaan berbagai fasilitas untuk mendukung peningkatan *fee based income*

Infrastructure Transformation

1. Memperluas dan meningkatkan aktivitas operasional perbankan berbasis IT
2. Meningkatkan *Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance* (GRC)
3. Mengembangkan *delivery channel* melalui pengembangan jaringan kantor dan ATM serta *e channel*
4. Mengembangkan *Housing Finance Institute*

People Transformation

1. Membangun budaya kerja baru, meningkatkan peran *leaders* dalam proses pengelolaan Human Capital (*Culture & Leadership*).
2. Membangun kebanggaan bersikap *laku professional* dan menghambat budaya organisasi menjadi organisasi yang pintar.
3. Memahami dan mempraktekkan SLA standar dunia (*Strategic & Tactical HC Practices*)
4. Rebranding Bank BTN sesuai visi, misi, dan nilai budaya kerja

Jangka Menengah

Business transformation, meliputi:

1. Perkreditan
 - a. Selain tetap fokus pada kredit perumahan dan mendukung program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat, dengan porsi minimal 85%. Maka dilakukan juga beberapa perbaikan strategi implementasi:
 - 1) Kredit perumahan, langkah strategis yang dilakukan adalah:
 - Pembiayaan kredit subsidi, dengan strategi meningkatkan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, yaitu: penyaluran KPR FLPP dengan Kementerian/institusi yang menangani perumahan Rakyat (penguasaan pangsa pasar > 95%).
 - Untuk pembiayaan KPR Non subsidi, target pasarnya adalah masyarakat ekonomi menengah

bawah (harga rumah < Rp350 juta) dengan pangsa pasar > 60%, melalui strategi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN, Multinasional maupun swasta nasional dalam penyediaan rumah bagi karyawan (B to B).

- Kredit *home equity*, yaitu kredit yang diberikan untuk renovasi, *top up* KPR, dilakukan dengan strategi optimalisasi *customer based* debitur KPR baik eksisting maupun yang sudah lunas.
- Untuk kredit pembangunan perumahan ditujukan untuk mendukung *supply* rumah (KPR) melalui penyediaan modal kerja konstruksi, pembebasan lahan, maupun infrastruktur perumahan bagi pengembang/developer

Rencana Strategis

- b. Tambahan strategi yang akan dilakukan:
 - Pembiayaan kredit program, strategi yang dilakukan adalah Kerjasama dengan lembaga/instansi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bapetarum, Pemda dll. Pola kerjasama yang akan dirintis dalam pemenuhan kredit program dengan BPJS ketenagakerjaan dan sekaligus dukungan dalam program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat.
 - c. Kredit non perumahan, langkah strategis yang dilakukan adalah:
 - Tetap fokus pada kredit-kredit yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan (*housing related*) dengan memanfaatkan value chain perumahan seperti kredit konstruksi, modal kerja dan pembiayaan lahan untuk rumah subsidi.
 - Memperbaiki manajemen perkreditan meliputi proses kredit, SDM perkreditan, dan memperkuat manajemen risiko kredit.
 - Memperbaiki kualitas kredit melalui implementasi *collection management system* berdasarkan *time bucket* dan *asset management*.
2. Pendanaan yang mendukung bank fokus perumahan.

Adapun sumber pendanaan yang diharapkan mendukung kegiatan bank dapat dijelaskan sebagai berikut.

 - a. Pendanaan untuk KPR subsidi/program berasal dari penempatan dana dari lembaga/instansi yang terkait kerjasama kredit (BLU-PPP, Bapertarum, Pemda, BPJS, dll) dan pendanaan pendamping berasal dari *capital market* (penerbitan surat berharga) dan pinjaman.
 - b. Pendanaan untuk KPR non subsidi disiapkan dari pendanaan *capital market* dan pinjaman, *core deposit* dana pihak ketiga yang berorientasi pada *low cost*, dan sekuritisasi KPR.
 - c. Sedangkan pendanaan untuk kredit lainnya berasal dari pengumpulan dana pihak ketiga.

Strategi tambahan dalam pendanaan yang akan dilakukan:

Pola pendanaan yang akan dikembangkan dalam rangka mendukung program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang ditempuh adalah kerjasama dengan

lembaga-lembaga pendukung yaitu BPJS TK, Taspen, SMF, World Bank, ADB dan lainnya.

3. Memperkuat bisnis syariah yang fokus pada pembiayaan sektor perumahan dan sektor produktif segmen UMKM.
4. Memperkuat permodalan dengan perbaikan profitabilitas, sekuritisasi KPR, penerbitan saham baru, *sub debt* dan *dividen policy*.
5. Menunjang kegiatan masyarakat dengan berbagai fasilitas yang dimiliki Perseroan seperti *transaction services* (loket dan *e channel*) dan *wealth management*.

Infrastructure transformation, meliputi:

1. Memperluas dan meningkatkan aktivitas operasional perbankan yang berbasis IT.
2. Meningkatkan *Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance* (GRC) dengan melakukan perbaikan proses untuk memperoleh sertifikasi ISO di tahun 2015. Sertifikasi yang dilakukan adalah sertifikasi ISO 9001 terhadap Unit *Risk Management* dan *Compliance* serta validasi model pengukuran risiko yang digunakan oleh RMD.
3. Mengembangkan *delivery channel* melalui pengembangan jaringan kantor dan ATM serta *e channel*.
4. Mengembangkan *Housing Finance Institute*.

People transformation, meliputi:

1. Membangun budaya perusahaan baru, meningkatkan peran *leaders* dalam proses pengelolaan *Human Capital (Culture and Leadership)*.
2. Membangun kebanggaan bersikap laku profesional dan mengurangi pegawai yang menghambat budaya organisasi menjadi organisasi yang pintar.
3. Memahami dan mempraktekkan SLA standar dunia (*Strategic and Tactical HC Practices*)
4. *Rebranding* Bank BTN sesuai visi, misi, dan budaya perusahaan

Jangka Pendek

Secara umum strategi pengembangan bisnis jangka pendek yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Perkreditan

Sebagai bank fokus perumahan, kredit Bank BTN pada tahun 2015 akan tumbuh sebesar 17% dengan mempertahankan portfolio perumahan

Rencana Strategis

minimal 85% serta meningkatkan *market share* KPR.

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan *market share* hingga 25% di tahun 2015 dengan pembagian segmen KPR sebagai berikut.

a. KPR Subsidi / Program

- Menguasai/menyerap KPR FLPP yang ditargetkan Pemerintah > 90%.
- Mengembangkan pola kerjasama KPR program dengan institusi (seperti Pemda, BUMN, dan swasta besar) dalam pengadaan perumahan bagi karyawan

b. KPR segmen menengah – bawah (< Rp350 juta)

- Dominan di segmen ini melalui ekspansi dan penetrasi pasar pada perumahan segmen menengah ke bawah.
- Memperluas dan mempererat kerjasama dengan para pengembang

c. KPR segmen menengah – atas (≥ Rp350 juta)

- Berpartisipasi dalam pengembangan segmen menengah atas
- Menggunakan jaringan BTN Prioritas dalam menjaring nasabah
- Memberikan *gimmick marketing* dalam *special rate* secara selektif

2. Kredit Home Equity

Meningkatkan realisasi kredit melalui produk KAR, *swagriya*, *Top up*, dan kredit isi rumah (*furnish*) untuk meningkatkan *margin* pendapatan dengan memanfaatkan *customer based* debitur KPR baik eksisting maupun yang sudah lunas.

3. Kredit Konstruksi

Kredit pembangunan perumahan yang ditujukan untuk mendukung *supply* rumah (KPR) melalui penyediaan modal kerja konstruksi, pembebasan lahan (proyek perumahan yang dibiayai KPR Bersubsidi), maupun infrastruktur perumahan bagi pengembang/ *developer*.

Strategi yang dilakukan adalah dengan membagi segmen pasar dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- a. Pengembang menengah bawah, yaitu bertujuan untuk meningkatkan produksi rumah dan mempercepat penjualan khususnya rumah subsidi dan rumah untuk menengah bawah dengan plafon sampai dengan 350 juta.

- b. Pengembang menengah atas, yaitu pembiayaan konstruksi untuk pengembang yang membangun perumahan/apartemen dengan segmen KPR di atas 350 juta.

4. Kredit *consumer* lainnya.

Fokus meningkatkan realisasi Kring BTN yang memiliki margin tinggi dan aman melalui kerjasama *payroll* dengan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/ BUMND menengah dan besar. Untuk itu akan dilakukan reorganisasi pengelolaan produk kredit *consumer* lainnya yang memiliki margin tinggi oleh unit yang lebih fokus.

5. Kredit komersial *non* perumahan

Strategi yang akan dilakukan adalah tetap fokus pada kredit-kredit yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan (*housing related*) dengan memanfaatkan *value chain* perumahan, terutama segmen UMKM termasuk KUR. Pembiayaan sektor non perumahan, akan lebih diarahkan pada pemanfaatan *value chain* perumahan baik segmen konsumen, korporasi, dan UMKM. Pembiayaan tersebut juga akan diupayakan agar memiliki margin yang lebih tinggi daripada KPR untuk membantu memperbaiki *profit margin*.

Memperbaiki Kualitas Kredit

Perbaikan kualitas kredit sebagai tolok ukur keberhasilan kredit yang diberikan dan sumber pembiayaan kembali, merupakan hal yang krusial yang menjadi prioritas untuk dibenahi.

Adapun strategi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan *collection* berbasis *time bucket*.
2. *Recovery* kredit *non performing* melalui penjualan, lelang, dan AYDA.
3. Meminimalisir kontribusi realisasi kredit baru terhadap *non performing* melalui perbaikan manajemen perkreditan dengan indikator DRBM (y.o.y) sebesar 2 %.
4. Monitoring kredit komersial dengan teknologi *iCremo* dari pembinaan kredit eksisting sampai pada *monitoring* jatuh tempo kredit.
5. Sesuai struktur organisasi baru, monitoring kualitas kredit menjadi tanggung jawab kantor cabang.

Inisiatif strategi yang dilakukan untuk perbaikan kualitas kredit adalah:

Rencana Strategis

1. Penagihan (*collection*)
 - a. Pembinaan/penagihan terhadap debitur kredit kolektibilitas 1 dan 2 (*early bucket*) agar tidak bergeser ke NPL.
 - b. Penagihan secara intensif oleh *field collector* untuk debitur kredit konsumen kolektibilitas 3 dan 4 agar membaik ke PL.
 - c. Penagihan untuk debitur kolektibilitas 5 (*bucket < 270 hari*) agar tidak menambah pembentukan CKPN baru.
 - d. Penyelesaian debitur yang terefek *one debtor*.
2. Restrukturisasi
 - a. Restrukturisasi kredit konsumen dan komersial kolektibilitas 2 *billing* 3 yang mengalami penurunan kemampuan membayar melalui restrukturisasi kredit.
 - b. Melakukan monitoring jatuh tempo kredit dan melakukan upaya perpanjangan atau restrukturisasi.
3. Penjualan/lelang aset
 - a. Penjualan dan lelang melalui kerjasama dengan Balai Lelang Swasta.
 - b. Penawaran penjualan aset secara *bulk* kepada calon investor.
 - c. Implementasi AYDA.

penjualan agunan melalui investor) dan diberikan surat peringatan (somasi)

- 2) Melakukan penagihan secara *hard collection*, melalui:
 - Visit ke debitur secara rutin
 - Kelengkapan Surat Peringatan (SP 1, 2 dan 3)
 - Diserahkan ke AMD untuk dilakukan eksekusi, melalui litigasi atau non litigasi

2. Upaya restrukturisasi
 - a. Pola restrukturisasi kredit yang diberikan tepat sasaran (bisa memilih, angsuran tetap, naik atau turun)
 - b. Komunikasi dengan debitur yang efektif (penjelasannya mudah diterima dan dipahami debitur) sehingga restrukturisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu setelah restrukturisasi kredit debitur kembali memenuhi kewajiban angsurannya secara tertib dan teratur
3. Upaya penyelesaian

Bagi debitur yang tidak kooperatif dilakukan proses eksekusi, baik melalui litigasi maupun non litigasi

Khusus mengenai KPR IO-BP dan KPR subsidi yang memiliki kontribusi cukup besar dalam rasio NPL, diperlukan strategi khusus untuk menangani kelompok debitur ini mengingat penghasilan (kemampuan membayar) yang rentan. Adapun inisiatif yang dilakukan adalah melalui upaya penagihan, restrukturisasi, dan penyelesaian sebagai berikut.

1. Upaya penagihan:
 - a. Mempertahankan debitur Lancar, melalui *soft collection* (*SMS Blast, Telecall*)
 - b. Melakukan penagihan untuk debitur Kolektibilitas DPK *billing* 1, 2 dan 3, melalui *Telecall, visit* dan penawaran restrukturisasi kredit
 - c. Melakukan penagihan dan solusi restrukturisasi, debitur kolektibilitas KL, DR dan Macet, melalui:
 - 1) *Mapping* debitur:
 - Debitur yang masih mempunyai kemampuan, untuk diberikan solusi restrukturisasi kredit.
 - Debitur yang tidak kooperatif dan tidak mempunyai kemampuan untuk dilakukan solusi penagihan seketika (penyelesaian non litigasi /

Pendanaan yang Mendukung Bank Fokus Perumahan

Pendanaan akan ditopang oleh DPK dan dana *wholesale* dengan pertumbuhan yang dikelola seiring dengan pertumbuhan kredit pada tingkat likuiditas yang optimal, rasio CASA yang meningkat, serta *share* dana *wholesale* yang terjaga. Strategi yang dilakukan dalam bidang dana adalah:

1. Pendanaan diarahkan untuk mendukung bank fokus perumahan yaitu peningkatan pendanaan jangka panjang yang berasal dari penempatan dana terkait kredit program dan dana *wholesale* (*capital market* dan pinjaman) serta dana pihak ketiga (DPK) yang berorientasi pada CASA (giro dan tabungan) serta pengurangan ketergantungan pada deposito inti (lembaga besar) dengan fokus pada deposito perorangan dan deposito ritel (lembaga kecil).
2. Pendanaan untuk KPR subsidi/program berasal dari penempatan dana dari lembaga/

Rencana Strategis

instansi yang terkait kerjasama kredit (BLU-PPP, Bapertarum, Pemda, BPJS, dll) dengan dana pendamping berupa penerbitan surat berharga/MTN/*off shore loan*/pinjaman lainnya.

3. Pendanaan untuk KPR non subsidi disiapkan dari pendanaan *capital market* dan pinjaman, *core deposits* dana pihak ketiga yang berorientasi pada *low cost*, serta sekuritisasi KPR.
4. Pendanaan untuk kredit lainnya berasal dari pengumpulan dana pihak ketiga *non core deposits*.
5. Kerjasama dengan BUMN dan Instansi Pemerintah dalam penyaluran kredit program (KPR Program).

Rencana Permodalan

Penguatan permodalan tahun 2015 diperlukan selain untuk mendukung pertumbuhan bisnis juga sebagai persiapan dalam pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai PBI No. 15/12/PBI/2013 sesuai Basel III. Upaya penguatan permodalan tahun 2015 akan ditempuh dalam beberapa strategi sebagai berikut.

1. Secara terus menerus memperbaiki kualitas kredit dan meningkatkan profitabilitas bank.
2. Melakukan sekuritisasi KPR.
3. Menerbitkan obligasi *subdebt* sebagai langkah antisipasi jika terjadi penurunan CAR.

Rencana Peningkatan Fee Base Income

Peningkatan *fee based income* diperlukan selain untuk meningkatkan *bottom line* juga untuk memperbaiki rasio efisiensi. Strategi yang dilakukan adalah :

1. Mengembangkan bisnis *wealth management* untuk menggarap nasabah segmen menengah-atas melalui investasi *property* dan melakukan pemasaran atas produk-produk *non banking* (Sukuk, SBR, ORI, Reksadana, *Bancassurance*).
2. Meningkatkan aktivitas *treasury*, *transaction services*, *card business* dan *payment point*.
3. Meningkatkan jumlah *account* baru untuk menambah pendapatan administrasi baik kredit maupun dana.
4. Meningkatkan *fee base income* bank garansi untuk cabang potensial.
5. Meningkatkan upaya perolehan pendapatan dari kredit pasif.

Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung strategi pertumbuhan melalui anorganik dan menciptakan *growth engine* yang baru. Rencana penyertaan tahun 2015 dilakukan dengan melakukan penyertaan pada perusahaan asuransi atau perusahaan keuangan lainnya yang memiliki potensi dan sinergis dengan *core business* Perseroan. Peninjauan yang sudah dilakukan adalah pembentukan anak usaha yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa. Beberapa calon *partner* yang sudah dijajaki diantaranya Asuransi Jasindo dan FWD.

Pembentukan Housing Finance Institute

Tahun 2015 merupakan tahapan awal dari pembentukan *housing finance institute*, yaitu fase *building the foundation*. Beberapa inisiatif yang bersifat *quickwin* yang akan dilakukan pada tahun 2015 adalah:

1. *Research* : menerbitkan *BTN Housing Indeks* secara berkala dan melakukan *enhancement* atas potensi Bisnis Perumahan Daerah
2. *Advisory* : melakukan *Technical Assistance* bagi Pengembang (debitur BTN) dan melakukan *strategic alliance* pada proyek B2B (lembaga DN dan berkelanjutan)
3. *Training* : menyelenggarakan "*International Housing Finance Management*" *Workshop/ Seminar Series*
4. Sampai Juni 2015, *housing finance center* telah memiliki sekretariat, dengan program sebagai berikut.
 - a. Pengembangan kurikulum.
 - b. Memperdalam riset mengenai NPL, potensi daerah, efektivitas Program Sejuta Rumah.
 - c. *Workshop* yang berkaitan dengan pembinaan pengembang.

Rebranding Bank BTN Tahap I

Akan dilakukan kajian perubahan nama, logo, dan *corporate identity* yang disesuaikan dengan visi, misi, dan nilai budaya perusahaan.

Penerapan GCG Pada Unit Usaha Syariah

Untuk memastikan bahwa Unit Usaha Syariah telah memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan, maka peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Di bawah ini akan diuraikan tentang penerapan *Good Corporate Governance* di Unit Usaha Syariah yang meliputi Dewan Pengawas Syariah, jumlah *internal fraud* dan upaya penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah, jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian, penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana serta pendapatan non halal dan penggunaannya.

Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip Syariah, yang meliputi :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank BTN.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank BTN sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini Syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS Bank BTN.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pengawas Syariah Tahun 2015

Selama Tahun 2015, DPS telah melaksanakan tugas dan/atau menghasilkan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Pemberian opini produk dan fitur syariah antara lain :
 - a. Tabungan Simpel BTN iB;
 - b. Pembiayaan Sindikasi BTN iB;
 - c. Garansi Bank BTN iB;
 - d. Kartu Debit BTN Syariah Suka-Suka;
 - e. *Safe Deposit Box* BTN iB.
2. Pemberian opini terhadap kegiatan operasional antara lain :
 - a. Pengalihan piutang/cessie Bank kepada pihak ketiga;
 - b. Perjanjian Kerjasama Penagihan Melalui Pihak Ketiga;
 - c. Draft akad Pembukaan Rekening Tabungan dan akad pembiayaan konsumen;
 - d. Biaya Administrasi untuk rekening pasif, rekening di bawah saldo minimal dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian Kerjasama dengan BMT Bintaro dan PT Laskar Anugerah Pratama.
3. Melakukan akitvitas pengawasan melalui uji petik antara lain
 - a. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Pekanbaru;
 - b. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Jakarta-Harmoni;
 - c. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Tangerang;
 - d. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Malang;
 - e. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Medan;
 - f. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Yogyakarta;
 - g. Pelaksanaan Uji Petik di KCS Semarang.

Penerapan GCG Pada Unit Usaha Syariah

Struktur Organisasi Dewan Pengawas Syariah

Tabel Struktur Organisasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Surat Keputusan (SK) Pengangkatan
1.	Drs. H. A. Nazri Adlani	Ketua	SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016.
2.	Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MBL	Anggota	SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 379/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, SK terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 s/d 31 Desember 2016
3.	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ. FIIS. QIP	Anggota	SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 379/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, SK terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 s/d 31 Desember 2016

Profil Kepala Dewan Pengawas Syariah

Ahmad Nazri Adlani, 77 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Sebelumnya beliau aktif di bidang kemiliteran dengan pangkat terakhir Brigjen TNI (purn). Pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Utusan Golongan periode 1999 sampai dengan 2004 setelah sebelumnya menjadi Anggota MPR RI periode 1997 sampai dengan 1998, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia periode 1995 sampai dengan 2000, Ketua komisi Hubungan Luar Negeri MUI periode 2000 sampai dengan 2005, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI periode 2005 sampai dengan 2014 dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015 serta turut mendirikan Dewan Syariah Nasional MUI dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI periode 2016-2021 dan anggota Sidang Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI, Ketua Dewan Pengawas Syariah Mega Finance dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Sinar Mas Syariah. Pendidikan kemiliteran diperoleh di SUSBINMINU Departemen Hankam, SUSLAPA IF VII (Sekolah Perwira Infanteri AD) Bandung dan terakhir pada SUSCADOS BINTAL ABRI (Kursus Calon Dosen Pembinaan Mental ABRI) Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir, dan Fakultas Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, serta sempat belajar di Macquary University, Sydney, Australia.

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Perseroan senantiasa melakukan pengembangan kompetensi bagi seluruh jajarannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPS, sepanjang tahun 2015, anggota DPS Bank BTN telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pengembangan Kompetensi
Drs.H.Ahmad Nazri Adlani	Ketua	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Bandung, tanggal 16-18 Desember 2015;
DR. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Bandung, tanggal 16-18 Desember 2015;
Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	Anggota	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Bandung, tanggal 16-18 Desember 2015

Penerapan GCG Pada Unit Usaha Syariah

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang Tahun 2015, DPS telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota, sebagai berikut.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
1	Drs. H. Ahmad Nazri Adlani	16	14
2	DR. H. Mohamad Hidayat		15
3	Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS		15

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Tabel Independensi Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hubungan Keluarga Dengan						Keterangan
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Drs.H.Ahmad Nazri Adlani	-	√	-	√	-	√	
DR. H. Mohamad Hidayat	-	√	-	√	-	√	
Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	-	√	-	√	-	√	

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Rincian rangkap jabatan anggota DPS adalah sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Rangkap Jabatan
1	Drs. H. Ahmad Nazri Adlani	DPS Mega Finance DPS UUS Asuransi Sinar Mas
2	DR. H. Mohamad Hidayat	DPS Bank Syariah Mandiri DPS PT Alliaz Life Inonesia DPS UUS Bringin Life
3	Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS,	DPS Asuransi Central Asia Raya Syariah DPS Panin Life Syariah DPS Asuransi Nasional Rei Syariah

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi DPS adalah sebagai berikut.

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota DPS yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota DPS, jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah :

Penerapan GCG Pada Unit Usaha Syariah

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Pengawas Syariah

No	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	850
2	Fasilitas Lainnya	-	
	yang dapat dimiliki	-	
	yang tidak dapat dimiliki	-	

Jumlah anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran penghasilan, adalah sebagai berikut

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	3 orang
Rp500 juta ke bawah	

Jumlah Internal Fraud dan Upaya Penyelesaian Oleh Unit Usaha Syariah

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di *internal Bank*, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut.

Tabel *Internal Fraud*

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	1	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Penerapan GCG Pada Unit Usaha Syariah

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	11	2
Dalam proses penyelesaian	14	17
Total	25	19

Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh UUS Bank BTN adalah sebagai berikut.

Tabel Penyaluran Dana

No.	Pihak Penerima	Jumlah (Jutaan Rupiah)
1	Bazis Bank BTN	194,76

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh berasal dari pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Pendapatan yang diperoleh selama tahun 2015, adalah sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai*	Penggunaan**)
1	Pendapatan Bunga dari penempatan dana pada Giro dan tabungan Bank BTN Induk serta Ta'zir	194,76	Sumbangan dan ZIS Bank BTN

Keterangan:

*Pendapatan (berasal dari pendapatan Non Halal dan denda);

**Penyaluran : disalurkan seluruhnya karena penyaluran dana lebih besar dari pendapatan non halal

08

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Selama 2015, Bank meningkatkan penyaluran dana CSR secara cukup signifikan, yaitu sebesar 71,65%. Dana CSR tahun 2015 sebesar Rp10.77 miliar, sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp6.27 miliar.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Highlight

Perseroan berkomitmen bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Bank BTN menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Kesadaran ini didasarkan bahwa keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) tercermin dalam konsep *triple bottom line* yaitu *people, profit, dan planet*. Selama 2015, Bank meningkatkan penyaluran dana CSR secara cukup signifikan, yaitu sebesar 72%. Dana CSR tahun 2015 sebesar Rp10.765.272.616, sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp6.271.617.876.

Bagi Perseroan, tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Tujuan tersebut tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan termasuk dalam hal ini adalah komitmen Perseroan dalam melestarikan lingkungan yang tercermin dalam berbagai kebijakan perusahaan.

Semangat Menaungi, Berbakti Pada Negeri

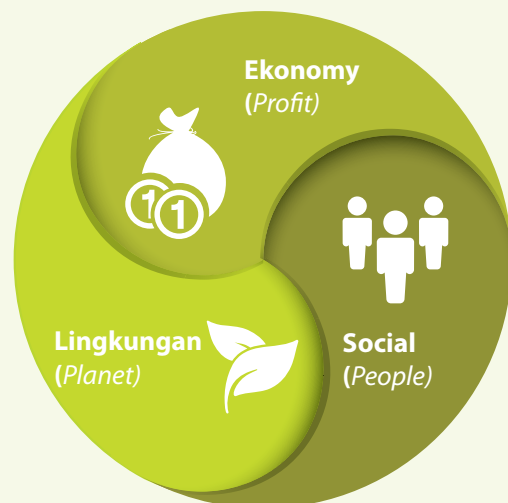
Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang ditargetkan Pemerintah, mengharapkan Perseroan menjadi integrator *stakeholder* strategis dalam permasalahan kelangkaan perumahan di Indonesia. Harapan ini dijawab oleh Perseroan dengan melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung terealisasinya program Pemerintah dalam mengurangi *backlog* rumah untuk rakyat tersebut. Komitmen Perseroan, sebagai bank milik negara, memberikan dukungan bagi suksesnya program pemerintah sekaligus mewujudkan hak asasi seluruh warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan sebuah rumah yang layak dengan cara mudah, cepat dan murah. Hal ini merupakan wujud bakti Perseroan pada Negeri.

Disamping itu, sebagai *corporate citizen*, Perseroan berupaya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CSR merupakan komitmen Perseroan untuk dapat berperan serta secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan melalui berbagai aktivitas, antara lain: pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, kemitraan, seni, dan olah raga.

Melalui CSR, dalam menjalankan putaran roda bisnis, Perseroan senantiasa berupaya menciptakan suasana kegiatan usaha yang harmonis dengan masyarakat luas dan ramah lingkungan. Dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, Perseroan diharapkan dapat menjadi perusahaan yang dicintai masyarakat luas. Dengan demikian, Perseroan dapat berperan serta dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis yang merupakan kondisi ideal bagi keberlangsungan dunia usaha mana pun.

CORPORATE SUSTAINABILITY



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kaleidoskop CSR BTN 2015

Pada tahun 2015, kegiatan CSR Perseroan terfokus pada beberapa kegiatan yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat, hal ini menunjukkan komitmen Perseroan pada tanggung jawab terhadap masyarakat:

Januari



Perseroan berpartisipasi pada bidang pendidikan untuk kegiatan Olimpiade Indonesia Cerdas (OIC) di Yogyakarta bekerja sama dengan Ditjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI

Februari



Perseroan Luncurkan PORTAL PROPERTI. Portal BTN properti adalah inovasi baru dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah. Segala kebutuhan akan rumah dengan mudah dan cepat dapat diperoleh secara *online* oleh masyarakat dan pengembang melalui portal BTN properti.

Maret



Pelaksanaan Fasilitas KPR dengan DP 1% untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (DP) untuk pembelian rumah.

April



"Bank BTN Peduli Banjir" Perseroan Melaksanakan Penanaman pohon sepanjang 6,5 KM di Banjir Kanal Timur. Perseroan menanam pohon sepanjang 6,5 KM di sepanjang sungai BKT untuk mendukung program pemerintah khususnya DKI Jakarta dalam mengatasi banjir

Mei



Partisipasi Perseroan pada pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh PK-33 LPDP bekerja sama dengan LSM Relawan Kampung di Lebak sebagai sarana penghubung bagi masyarakat dan siswa sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Juni



Ramadhan Rumah Impian (RRI) Berbagi Bersama BTN. Perseroan bekerja sama dengan REI, Mowilex dan SMF Gelar Ramadhan Rumah Impian, membagikan 32 unit rumah secara gratis kepada masyarakat tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan dan proses seleksi secara nasional

Juli



Kegiatan mudik bersama pegawai informal terkait bisnis Perseroan. Memberangkatkan 1.800 orang dengan 33 bus tujuan Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Solo. Disamping itu bersama 15 BUMN lainnya ikut mendukung program mudik bersama BUMN yang akan memberangkatkan sekitar 75.000 orang dengan tujuan wilayah Jawa dan Sumatera.

September



Perseroan membangun kerjasama dengan KEMENDESAs. Langkah awal dimulai BTN dengan memberikan dukungan layanan perbankan dan pengelolaan dana Kemendesas dalam program pengembangan desa tertinggal dan transmigrasi.

November



Perseroan melaksanakan penyediaan sarana transportasi berupa motor pengangkut sampah untuk warga di perumahan Perumnas Sampangan Kel. Gajah Mungkur Kota Semarang

Agustus



Program BUMN Hadir untuk Negeri merupakan komitmen Perseroan untuk turut mendukung Program Kementerian BUMN dalam rangka memperingati HUT RI Ke-70 dan sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam pengembangan daerah khususnya di Provinsi Papua. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan di Provinsi Papua adalah bedah rumah bagi 45 orang veteran dengan total bantuan mencapai Rp900 Juta, bantuan penyediaan atau perbaikan sarana laboratorium di 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan peningkatan sarana perpustakaan di 8 SD Negeri dan menggelar pasar murah.

Oktober



BTN-ITB Bekerjasama untuk pengembangan masa depan rumah rakyat. Diperlukan peran dunia pendidikan dalam memberikan ide dan gagasan dalam pengembangan perumahan rakyat di Indonesia, lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan program pelatihan, konsultasi pengembangan *property* dan riset untuk mendukung *Housing Finance Center (HFC)*.

Desember



Perseroan memberikan dukungan untuk pembangunan ruang perpustakaan berikut sarana dan prasarana pendukungnya pada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di Kabupaten Bogor, Yogyakarta dan Malang. Sampai dengan Tahun 2015, Perseroan telah memberikan dukungan untuk pembangunan ruang perpustakaan beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada 6 (enam) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan perbaikan sarana sanitasi pada 6 (enam) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang.

Kebijakan dan Pelaksanaan CSR

Kebijakan CSR

Dalam pelaksanaan program CSR, Perseroan mengacu pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 34 tanggal 11 Agustus 2008;
5. Peraturan Direksi Nomor 17/PD/DPKK/1203 tanggal 15 Desember 2003 tentang Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ;
6. Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/HCLD/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Usaha Kecil;
7. Surat Edaran Direksi Nomor 8/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/HCLD/2010 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Usaha Kecil.

Visi dan Misi CSR

Visi

Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan khususnya di lingkungan perumahan/pemukiman yang menjadi *core business* Bank BTN.

Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
2. Mengembangkan nilai dan budaya Bank
3. Membentuk citra Bank yang positif di mata publik
4. Meningkatkan kerjasama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasionalnya Kantor Bank

Bidang Kegiatan CSR

Sesuai dengan Visi dan Misi Pelaksanaan CSR, Perseroan melaksanakan kegiatan CSR melalui kegiatan yang telah terprogram maupun kegiatan yang bersifat insidental. Kegiatan CSR Perseroan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Direksi No. 29/PD/DSP/2008, Tentang *Corporate Sosial Responsibility* PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Adapun bidang kegiatan CSR Perseroan terbagi atas kegiatan yang telah terprogram dan kegiatan yang bersifat insidental dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bidang kegiatan CSR yang terprogram meliputi:
 - a. Bidang Sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan kesejahteraan sosial, yang meliputi:
 - i. Pendidikan, mencakup peningkatan layanan, kemudahan dan infrastruktur pendidikan.
 - ii. Kesehatan, mencakup peningkatan gizi dan kesehatan, serta infrastruktur kesehatan.
 - iii. Seni dan Budaya, mencakup pelestarian seni dan budaya serta peningkatan infrastruktur seni dan budaya.
 - iv. Olahraga, mencakup peningkatan prestasi dan infrastruktur olah raga.
 - v. Keagamaan, mencakup peningkatan infrastruktur keagamaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan CSR Bank BTN

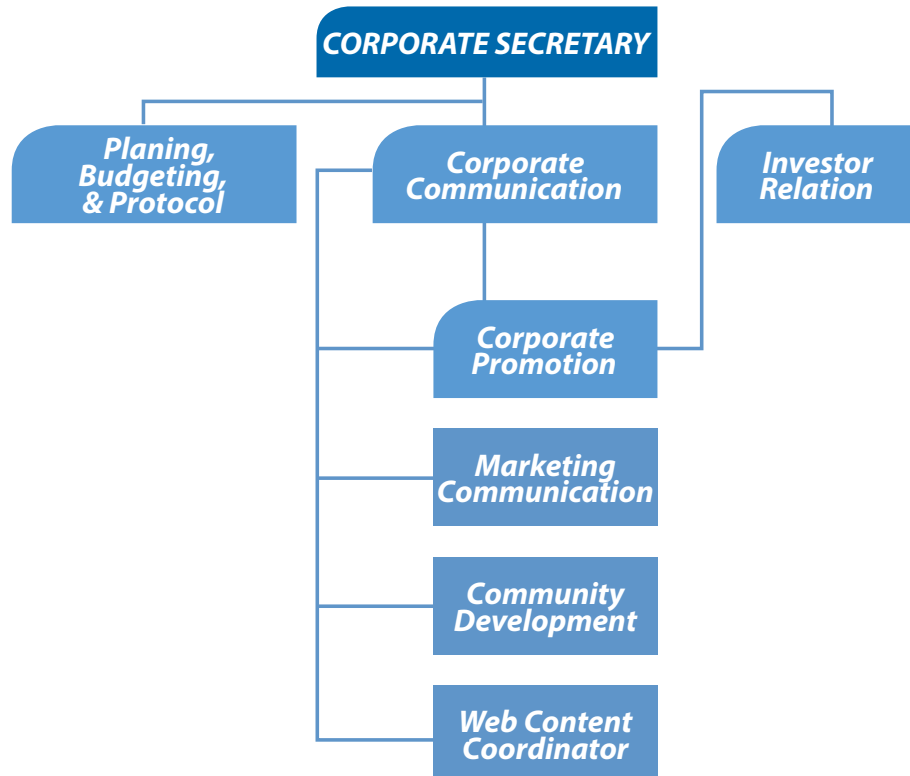
- b. Bidang Lingkungan, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan, yang antara lain meliputi: manajemen lingkungan, penanganan limbah, penanganan lahan kritis, reboisasi, reklamasi lahan, infrastruktur air bersih dan pengairan, pengendalian polusi udara, air dan tanah, kebisingan, air dan sanitasi lingkungan pemukiman (*drainase* dan penanganan banjir), serta penghematan energi dan penggunaan energi alternatif.
 - c. Bidang Ekonomi, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan peluang kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat. Bidang ini antara lain mencakup pengembangan koperasi, lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil, industri mikro kecil, teknologi kewirausahaan, pasar dan pemasaran, infrastruktur ekonomi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan.
 3. Bidang kegiatan CSR yang bersifat insidental meliputi kegiatan-kegiatan untuk meringankan beban masyarakat akibat musibah atau kondisi perekonomian tertentu, yaitu antara lain bantuan bagi korban gempa atau bencana alam lainnya dan bantuan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok.

Kebijakan dan Pelaksanaan CSR Bank BTN

Pelaksanaan Program CSR

Struktur Pengelola CSR

Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan CSR berada di *Corporate Communication Department* yaitu unit *Community Development Program* pada *Corporate Secretary Division*.



Kebijakan dan Pelaksanaan CSR Bank BTN

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, *Corporate Secretary Division* dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan :

1. Pihak *Internal* Perseroan, yaitu Kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia atau unit kerja lainnya; dan
2. Pihak Eksternal Perseroan / Pihak Ketiga, yang terdiri dari :
 - Pemerintah
 - Perguruan Tinggi
 - Lembaga Swadaya Masyarakat
 - Badan Sosial
 - Media Massa
 - Lembaga lain yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan CSR Perseroan.

Anggaran CSR

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 tanggal 24 Maret 2015, Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih Perseroan sebagai sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015, namun Perseroan membentuk cadangan biaya untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan dalam Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan. Dana Program Kemitraan Tahun 2015 bersumber dari sisa dana tahun buku 2014, penerimaan dari jasa administrasi dan jasa giro, dan Dana Program Kemitraan yang ditempatkan serta sumber lain yang sah.

Berikut anggaran penyelenggaraan CSR selama 2 (dua) tahun terakhir :

Tabel Penyaluran Anggaran CSR Tahun 2014 -2015 (dalam miliar rupiah)

Bidang Kegiatan	Penyaluran		% Real thd Penyaluran	
	2014	2015	2014	2015
Ekonomi	1,44	2,43	22,94%	22,53%
Seni Budaya	0,02	0,05	0,39%	0,46%
Olahraga	0,05	0,05	0,72%	0,46%
Pendidikan	0,66	1,94	10,46%	18,05%
Kesehatan	0,08	0,39	1,26%	3,60%
Sarana dan Prasarana	3,39	4,12	54,11%	38,31%
Keagamaan	0,40	1,31	6,31%	12,21%
Pelestarian Alam	0,24	0,47	3,81%	4,40%
	6,27	10,77	100,00%	100,00%

Terdapat peningkatan penyaluran dana CSR sebesar 71,65% untuk tahun 2015 yang semula sebesar Rp6.27 miliar di tahun 2014 menjadi sebesar Rp10.77 miliar di tahun 2015. Adapun alokasi terbesar anggaran CSR dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, di samping untuk penyaluran dalam bidang pendidikan, fasilitas umum maupun keagamaan.

Adapun realisasi biaya pelaksanaan kegiatan CSR untuk setiap bulannya sepanjang tahun 2015, berdasarkan bidang kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran CSR Bulanan Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Bulan	Ekonomi	Seni Budaya	Olah Raga	Pendidikan	Kesehatan	Sarpra	Keagamaan	Pelestarian Alam	Total
Januari	-	-	-	263.000.000	-	120.000.00	-	-	383.000.000
Februari	-	-	-	6.240.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	31.240.000
Maret	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000
April	10.000.000	-	-	-	149.565.000	157.275.000	32.000.000	69.830.492	418.670.492
Mei	(10.000.000)	-	-	95.000.000	10.000.000	105.280.000	35.000.000	-	235.280.000
Juni	184.000.000	-	-	-	10.000.000	22.420.000	20.000.000	10.000.000	246.420.000
Juli	502.726.000	-	-	75.300.000	35.000.000	1.230.500.000	10.000.000	353.000.000	2.206.526.000
Agustus	624.967.000	-	6.720.000	620.000.000	10.700.000	1.293.108.100	5.000.000	-	2.560.495.100
September	215.000.000	-	-	-	131.800.000	30.000.000	55.000.000	-	431.800.000
Oktober	450.279.388	24.650.000	22.000.000	599.488.055	-	(26.653.602)	1.000.000.000	20.000.000	2.089.763.841
November	-	-	20.500.000	26.500.000	-	34.977.000	-	10.500.000	2.050.100.183
Desember	448.415.683	25.000.000	-	257.150.000	35.000.000	1.147.034.500	127.000.000	10.500.000	2.050.100.183
	2.425.388.071	49.650.000	49.220.000	1.942.679.055	387.065.000	4.123.940.998	1.314.000.000	473.330.492	10.765.272.616

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan komitmen Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan.

Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber kehidupan yang utama.

Kebijakan

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup. Dalam upaya pelaksanaan efisiensi operasional melalui Memo No.1613/M/PGSD/PB/VIII/2015, *Procurement and General Division* telah menyampaikan himbauan kepada seluruh Unit Kerja yang meliputi seluruh Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang untuk melaksanakan peningkatan disiplin dan monitoring yang ketat terhadap pemanfaatan listrik, telepon, air, bahan bakar kendaraan dinas jabatan dan alat tulis kantor. Adapun pelaksanaan peningkatan efisiensi dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Efisiensi biaya telepon dilakukan dengan mengaktifkan penggunaan *Voic over Internet Protocol (VoIP)*.
2. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan memasang daya listrik sesuai kebutuhan kantor, mematikan *air conditioner*/lampu/komputer dan peralatan kantor lainnya jika tidak digunakan, pengoperasian *air conditioner* sentral 30 menit sebelum jam kerja sampai dengan 30 menit setelah jam kerja, penggunaan lampu hemat energy.

3. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor dilakukan dengan pemanfaatan kertas bekas untuk pencetakan memo/surat/hasil pekerjaan lainnya, mempertimbangkan penggunaan tinta printer/toner alternatif yang kompetibel dengan printer yang digunakan.

Efisiensi juga dapat dilaksanakan dengan cara lain apabila unit kerja memiliki metode efisiensi lainnya. Pelaksanaan efisiensi tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab terhadap Lingkungan Hidup juga diaplikasikan pada Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan yaitu Surat Edaran Direksi No. 336 /DIRICMLD/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Direksi No.18/DIR/CM0/2011 Perihal *Standard Operating Procedure Commercial Loan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam persyaratan kredit Perseroan mempersyaratkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pelaksanaan Kegiatan 2015 Terkait Dengan Lingkungan Hidup

1. Perseroan dalam memberikan kredit mengharuskan analisis dampak lingkungan.
2. Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang pemberian kredit yang merusak lingkungan.
3. Pada bidang Dana Perseroan telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Teroris (APUPPT) yang salah satu kewajibannya adalah melaporkan transaksi-transaksi yang melawan hukum termasuk didalamnya transaksi bisnis terkait *illegal logging*, pencemaran lingkungan.
4. "Bank BTN Peduli Banjir" Perseroan Melaksanakan Penanaman pohon sebanyak 2.167 pohon sepanjang 6,5 KM di Banjir Kanal Timur.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

5. Perseroan berpartisipasi pada program *Eco Campus* dan *Save Earth by Save Water* yang dicanangkan oleh Universitas Negeri Surabaya dalam bentuk perbaikan alat penjernih air (IPA) di Kampus Lidah Wetan Surabaya.
6. Perseroan berpartisipasi pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri dan hijau yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Bogor.
7. Perseroan berpartisipasi pada kegiatan penghijauan lingkungan berupa kegiatan penanaman pohon dan bunga di sepanjang median jalan protokol yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
8. Perseroan berpartisipasi pada kegiatan Penghijauan di sepanjang DAS Citarum dalam program BUMN Membangun Desa Berbasis Agroforestry Terintegrasi.
9. Perseroan berpartisipasi pada kegiatan penghijauan lingkungan yang dilaksanakan oleh YPK Bapindo dan Megamendung permai di kawasan Megamendung Bogor.
10. Perseroan berpartisipasi Kegiatan bakti sosial berupa kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Rembang Se-Jabodetabek di Kabupaten Rembang Jawa Tengah sebanyak 300 pohon.

Sertifikasi

Selama periode 2015, Perseroan belum memiliki sertifikasi terkait dengan lingkungan hidup.

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan Kebijakan

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah menjadi perusahaan publik, Perseroan berupaya untuk menjadi Perusahaan yang taat azas dan taat aturan. Termasuk di bidang ketenagakerjaan, Perseroan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang ketenagakerjaan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan.

Dalam pengelolaan SDM Perseroan mengacu pada Peraturan Direksi No. 29/DIR//CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Untuk menjamin efektivitas peraturan pengelolaan SDM, Perseroan melaksanakan evaluasi terhadap PKMHC setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kegiatan CSR Terkait Ketenagakerjaan Tahun 2015

Pelaksanaan kebijakan Perseroan terkait bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**
Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, *gender*, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.
- **Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**
Dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas karyawan untuk menunjang operasional perusahaan, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Setiap karyawan Perseroan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, hanya

saja dalam pelaksanaan program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan.

Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah menyelenggarakan 440 Program Pelatihan dan Pendidikan yang diikuti oleh 15.991 peserta. Dari 440 program *training* yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut, terbagi dalam 3 (kelompok) program *training* yaitu *Core Banking Academy*, *New Entry Academy* dan *Strategic Initiatives* dengan total biaya penyelenggaraan *training* selama tahun 2015 mencapai Rp106 miliar.

- **Hubungan Industrial**
Perseroan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya Perseroan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM Perseroan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Bank yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN).
- **Perjanjian Kerja Bersama**
Saat ini di lingkungan Perseroan terdapat organisasi serikat pekerja perusahaan dengan nama Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN) yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1999. Perjanjian Kerja Sama (PKB) merupakan salah satu sarana utama pencapaian hubungan industrial yang serasi, harmonis, aman dan dinamis guna menjamin kepastian hak dan kewajiban karyawan atau manajemen perusahaan, ketenangan dalam bekerja, perbaikan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan jalannya usaha perusahaan.

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam rangka mewujudkan hubungan antara pekerja dengan manajemen yang harmonis serta menjaga ketenangan bekerja, terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank BTN dengan Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN). Pembaharuan terhadap PKB antara Bank BTN dengan SP-BTN ini dilakukan secara berkala melalui mekanisme perundingan antara Manajemen dengan SP-BTN.

Bank BTN secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban karyawan ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai.

- **Remunerasi**

Kebijakan remunerasi yang diterapkan Perseroan adalah dengan menggunakan *merit system* dengan mengedepankan skill, kompetensi dan integritas karyawan. Perseroan juga telah mentaati semua aturan yang berlaku terkait remunerasi, dimana besaran remunerasi seluruh karyawan Perseroan telah sesuai atau berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan.

Terkait dengan remunerasi, Bank senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2015 adalah sebagai berikut

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	17,15:1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1:1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1:1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2:1

- **Tingkat Turnover Karyawan**

Lingkungan kerja yang baik, membuat tingkat *turnover* karyawan Perseroan cenderung rendah. Pada tahun 2015 jumlah Pekerja Perseroan berjumlah 9.042 orang, meningkat 5.36% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.582 pegawai. Sepanjang tahun 2015, Perseroan melakukan pemutusan

hubungan kerja (*resign* dan mangkir) terhadap 383 karyawan. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpedoman pada Surat Edaran Direksi No. 43/DIR/CMO/2011, tanggal 28 November 2011 yang mengatur tentang proses berakhirnya hubungan kerja, panduan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja serta hak dan kewajiban pegawai ketika hubungan kerjanya berakhir. Perseroan melaksanakan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku dan dilaksanakan secara adil, baik bagi pegawai maupun Perseroan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan

Kebijakan

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab bersama. Perseroan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing. Kebijakan tentang jaminan dan fasilitas kesehatan pegawai tertuang di dalam SE Direksi No. 43/DIR/CMO/2011, tanggal 28 November 2011 pada indeks 184/P/HC-REW/2011 tentang Bantuan Pengobatan.

Pelaksanaan

Fasilitas kesehatan yang diselenggarakan Perseroan adalah:

1. Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas *Medical Check Up*
2. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kacamatanya, alat bantu dengar, pemeriksaan lab dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter *pasca* rawat inap.

Selain itu Perseroan juga menyediakan fasilitas poliklinik dan tenaga dokter guna memberikan pelayanan jasa medis atau kedokteran kepada karyawan dan keluarganya.

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Di samping memfasilitasi pegawai untuk menjaga kesehatan, Perseroan mengikut sertakan pegawai dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan biaya pertanggung jawaban saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawan dan istri karyawan yang menjalani persalinan.

Pada tahun 2014, Perseroan juga telah memfasilitasi pegawai untuk mengikuti seminar tentang kesehatan seperti Seminar Nasional "Konsepsi dan Aplikasi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," dan *Workshop* Nasional "Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan di Perusahaan Maupun di Pemerintahan."

Dengan adanya kewajiban Perseroan untuk menjadi peserta jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan mulai tahun 2015, Perseroan telah melakukan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan kepada karyawan agar dapat memahami tentang program BPJS Kesehatan baik secara konsep maupun teknis pelaksanaannya.

Keselamatan Kerja

Kebijakan

Aspek Keselamatan Kerja merupakan salah satu hal yang jadi perhatian manajemen Perseroan. Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja Perusahaan yang optimal. Untuk itu, Perseroan bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku.

Kegiatan Terkait Keselamatan Kerja 2015

Untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti *Apar*, *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, dan *Tangga Darurat*. Perseroan telah melakukan inspeksi keselamatan kebakaran pada tanggal 23 Januari 2015, terhadap alat-alat kebakaran sebagaimana tersebut di atas.

Perseroan juga telah memiliki rencana situasi/evakuasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh karyawan tereduksi dengan baik. Perseroan juga secara rutin melaksanakan simulasi latihan evakuasi kebakaran gedung. Pada tahun 2015, simulasi dilaksanakan pada gedung menara BTN pada tanggal 22 Mei 2015.

Dalam hal pembelajaran keselamatan tenaga kerja, Perseroan telah mengikut sertakan karyawan dalam sertifikasi pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jaminan Sosial

Seluruh pegawai juga telah diikut sertakan sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi karyawan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

Sertifikasi

Perseroan telah mendapatkan sertifikasi Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, yang berlaku sampai dengan bulan April 2016.

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan, karena secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan memandang sangat perlu untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan terkait dengan tanggung jawab terhadap masyarakat diwujudkan oleh Perseroan pada dukungan penuh kepada program Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah. Perseroan menetapkan kebijakan terkait program program yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan fasilitas KPR.

Kebijakan lain dalam upaya mendukung program tersebut adalah memberikan edukasi kepada para calon pengembang maupun pengembang pemula untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Selain itu Perseroan juga mendukung masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dengan pemberian fasilitas usaha maupun pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Kegiatan CSR Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan 2015

Perseroan memberikan program khusus KPR dengan DP 1%. Program ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan. Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Kami berkepentingan untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah rakyat. Fasilitas KPR dengan DP 1% ini akan diberlakukan mulai 1 Maret 2015.

- Perseroan memberikan program khusus KPR dengan DP 1%. Program ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan. Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan program Sejuta Rumah yang dicanangkan

oleh Pemerintah. Kami berkepentingan untuk mendukung program Pemerintah dalam pemenuhan rumah rakyat. Fasilitas KPR dengan DP 1% ini akan diberlakukan mulai 1 Maret 2015.

- Perseroan membuka *Housing Finance Center* (BTN HFC) bagi pengembang pemula dan pengembang *existing* agar bersama-sama memiliki kemampuan secara professional dalam mendukung perogram Sejuta Rumah. BTN HFC dapat dimanfaatkan sebagai *Learning Center* edukasi perbankan dan pembiayaan perumahan Indonesia dengan berbagai bentuk program pelatihan seperti seminar, *workshop* dan *short course* yang bersertifikasi serta *online subscription* sebagai portal ilmu pengetahuan. BHFC bertujuan untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan perumahan dari tiga aspek utama: penelitian, pelatihan dan konsultasi. Melalui divisi penelitian, BHFC dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang harga rumah di berbagai daerah. Begitu pula divisi pelatihan, salah satu tujuannya adalah mencetak calon *developer professional*.
- Perseroan Gelar Ramadhan Rumah Impian (RRI), membagikan 32 unit rumah gratis kepada masyarakat tidak mampu selama bulan suci ramadhan dalam program RRI Berbagi Bersama BTN. Dalam kegiatan ini Perseroan melibatkan *stakeholder* yaitu *Real Estate Indonesia*, *Mowilex* dan *SMF* dalam merealisasi visi terkait dengan masalah perumahan untuk berbagi kepada masyarakat di bulan yang suci itu. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat tidak mampu dengan memberikan bantuan rumah gratis yang akan diberikan selama bulan suci Ramadhan. Rumah yang akan diberikan secara gratis tersebut merupakan donasi yang diberikan oleh para pengembang anggota REI bekerjasama dengan Perseroan, *Mowilex* dan *SMF*. Program RRI Berbagi Bersama BTN ini merupakan bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan bekerjasama dengan pengembang.
- Partisipasi Perseroan pada sinergi 4 (empat) Bank BUMN pada kegiatan pemberian jaring kepada nelayan di Kabupaten Cilacap dalam rangka *launching* BPJS Ketenagakerjaan

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

tanggal 30 Juni 2015. Hal ini bertujuan untuk membantu para nelayan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.

- Biaya pengadaan 70 ekor bayi babi dalam rangka pelaksanaan Pasar Murah Sinergi BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka HUT Ke-70 RI di Papua. Dengan pengadaan bibit ini diharapkan dapat membantu dan mengedukasi masyarakat dalam pemeliharaan ternak dan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Partisipasi Perseroan pada pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh PK-33 LPDP bekerja sama dengan LSM Relawan Kampung di Lebak sebagai sarana penghubung bagi masyarakat dan siswa sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- Partisipasi Perseroan pada perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada Balai Pelatihan Pertanian kelurahan Tangkiling dalam rangka *launching* Laku Pandai Tabungan Cermat di Palangkaraya.
- Terkait penggunaan tenaga kerja, dapat disampaikan bahwa seluruh tenaga kerja Perseroan adalah tenaga kerja lokal.

Serta beberapa kegiatan yang telah dilakukan Perseroan untuk membantu perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat disekitar lokasi bisnis atau usaha Perseroan seperti pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

Biaya Yang Dikeluarkan

Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana terkait kegiatan CSR pada tahun 2015 sebesar Rp4.123.940.998

Tabel Rincian Penggunaan Dana CSR Untuk Pembangunan Sarana dan Prasaran terkait kegiatan CSR 2015.

Tabel Dana CSR Untuk Pembangunan Sarana dan Prasaran Tahun 2015. (dalam Rupiah)

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
1	12-Jan-15	Partisipasi Perseroan pada renovasi Musholla Nurut Taqwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak	Pusat	30.000.000
2	29-Jan-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan khitanan massal bagi yatim dan dhuafa serta pemberian santunan kepada orang tua jompo lanjut usia yang dilaksanakan oleh Baziz Bank BTN	Pusat	40.000.000
3	29-Jan-15	Partisipasi Perseroan pada kunjungan bersama OJK dalam kegiatan pemberian bantuan sosial kepada korban banjir di Kabupaten Bandung Selatan untuk pembangunan dan renovasi ruang kelas serta sarana pendidikan di SD Bojong Asih 1 & 2 serta MI AL Huda	Pusat	50.000.000
4	5-Feb-15	Partisipasi Perseroan pada pembangunan sarana dan prasarana asrama dan ruang belajar di Pondok Pesantren Al Barkah, Subang Jawa Barat	Purwakarta	5.000.000
5	9-Feb-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes dalam penanganan bencana banjir berupa perbaikan tanggul yang rusak	Pekalongan	5.000.000

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
6	7-Apr-15	Pemberian sarana transportasi bagi pekerja sektor informal penerima asuransi kesehatan dalam kegiatan penanaman pohon di BKT tanggal 5 Mei 2015	Pusat	110.000.000
7	21-Apr-15	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk keikutsertaan Al Irsyad Drum Corp Surabaya pada kegiatan KAA Ke-60 di Bandung dan Pawai Budaya di Surabaya	Pusat	35.000.000
8	29-Apr-15	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana transportasi pada kegiatan pelatihan management para organ Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Surakarta di Ternate	Solo	3.675.000
9	30-Apr-15	Partisipasi Perseroan pada peratatan penunjang pembayaran administrasi siswa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih representatif berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah printer	Cikarang	8.600.000
10	4-May-15	Kegiatan bedah rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Jember	10.000.000
11	13-May-05	Partisipasi Perseroan pada pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh PK-33 LPDP bekerja sama dengan LSM Relawan Kampung di Lebak sebagai sarana penghubung bagi masyarakat dan siswa sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak	Kantor Pusat	25.000.000
12	15-May-15	Pemberian sarana transportasi bagi pekerja sektor informal penerima asuransi kesehatan dalam kegiatan penanaman pohon di BKT tanggal 5 Mei 2015 untuk KC JKT Cawang	Kantor Pusat	3.900.000
13	18-May-15	Pemberian sarana transportasi bagi pekerja sektor informal penerima asuransi kesehatan dalam kegiatan penanaman pohon di BKT tanggal 5 Mei 2015 untuk KC Bekasi	Kantor Pusat	1.380.000
14	18-May-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan baksos Mapag Lebaran yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir Sholawat Tjakraoboana Djatiraga berupa pembagian sembako kepada fakir miskin, jompo dan yatim piatu	Kantor Pusat	10.000.000
15	20-May-15	Partisipasi Perseroan pada program pembangunan Pemerintah Kota Jambi yang dikoordinir oleh Perwakilan Bank Indonesia Prov Jambi berupa pemberian bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah dan perbaikan sanitasi kamar kecil	Jambi	5.000.000
16	20-May-15	Tambahan alokasi dana dalam rangka pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh PK-33 LPDP bekerja sama dengan LSM Relawan Kampung di Lebak sebagai sarana penghubung bagi masyarakat dan siswa sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak	Kantor Pusat	25.000.000

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
17	20-May-15	Kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang diselenggarakan oleh PemProv Sulawesi Utara dalam rangka Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-43 Tingkat Nasional	Manado	25.000.000
18	17-Jun-15	Partisipasi Perseroan pada Musda DPD IKA UNDIP masa bakti 2015-2019 dalam penyediaan sarana kesekretariatan	Banjarmasin	5.000.000
19	19-Jun-15	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Bale Banjar Gunung yang dipergunakan untuk kegiatan acara adat dan kesenian generasi muda Denpasar untuk mengembangkan kreatifitas	Denpasar	5.000.000
20	29-Jun-15	Penggantian transportasi bagi pekerja sektor informal penerima asuransi kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan penanaman pohon di BKT tanggal 5 Mei 2015	Pusat	12.420.000
21	1-Jul-15	Tahap I sebesar 50% atas partisipasi Perseroan pada kegiatan ramadhan rumah impian berbagi bersama Perseroan bekerja sama dengan DPP REI dalam penyediaan 31 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu	Pusat	500.000.000
22	6-Jul-15	Biaya pelaksanaan acara safari ramadhan Direksi ke Kantor Cabang Mataram (koreksi di Agustus 2015)	Mataram	10.000.000
23	6-Jul-15	Partisipasi Perseroan pada 7 orang debitur yang terkena dampak kebakaran Pasar Johar Semarang untuk membangun kembali kios-kios agar dapat menjalankan usahanya kembali	Semarang	35.000.000
24	10-Jul-15	Biaya Tahap I sebesar 50% atas jasa EO mudik gratis bareng Bank BTN Tahun 2015	Pusat	522.500.000
25	13-Jul-15	Partisipasi Perseroan pada 1 orang debitur yang terkena dampak kebakaran Pasar Johar Semarang untuk membangun kembali kios-kios agar dapat menjalankan usahanya kembali	Semarang	5.000.000
26	24-Jul-15	Partisipasi Perseroan melalui IIKPA Batara dalam rangka penyediaan perabot rumah tangga pada kegiatan seremonial Ramadhan Rumah Impian di Makassar tanggal 9 Juli 2015	Pusat	8.000.000

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
27	29-Jul-15	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana air bersih dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan di Ds Musuk, Boyolali yang dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna Merapi Manunggal	Solo	50.000.000
28	31-Jul-15	Partisipasi Perseroan pada perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada Balai Pelatihan Pertanian kelurahan Tangkiling dalam rangka <i>launching</i> Laku Pandai Tabungan Cermat di Palangkaraya	Pusat	100.000.000
29	4-Aug-15	Kegiatan Sosialisasi anti narkoba dan keamanan berlalu lintas di tempat strategis di wilayah hukum Polres Tangerang melalui penyediaan sarana dan prasara pendukung berupa 5 buah spanduk	Tangerang	5.000.000
30	7-Aug-15	Reklas Biaya pelaksanaan acara safari ramadhan Direksi ke Kantor Cabang Mataram (koreksi di Agustus 2015)	Mataram	(10.000.000)
31	7-Aug-15	Biaya pembuatan umbul-umbul dalam rangka pelaksanaan Pasar Murah Sinergi 7 BUMN di Garut tanggal 5 Juli 2015	Pusat	11.990.000
32	14-Aug-15	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Pasar Klewer Sementara sebagai alternatif untuk menampung para pedagang Pasar Klewer yang terkena musibah kebakaran	Solo	50.000.000
33	14-Aug-15	Partisipasi Perseroan pada sinergi 4 Bank BUMN pada kegiatan pemberian jaring kepada nelayan di Kab Cilacap dalam rangka <i>launching</i> BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Juni 2015	Pusat	89.135.000
34	14-Aug-15	Partisipasi Perseroan pada sinergi 4 Bank BUMN pada kegiatan pemberian jaring kepada nelayan di Kab Cilacap dalam rangka <i>launching</i> BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Juni 2015	Pusat	94.483.100
35	19-Aug-15	Tahap II sebesar 50% atas partisipasi Perseroan pada kegiatan ramadhan rumah impian berbagi bersama Perseroan bekerja sama dengan DPP REI dalam penyediaan 31 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu	Pusat	500.000.000
36	20-Aug-15	Kegiatan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu bekerja sama dengan Gerakan Cinta Cirebon	Syad Cirebon	5.000.000

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
37	25-Aug-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh LPDP di Dusun Mandala, Ds Batukaras, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran untuk penyediaan sarana bermain PAUD	Kuningan	25.000.000
38	27-Aug-15	Biaya Tahap II sebesar 50% atas jasa EO mudik gratis bareng Bank BTN Tahun 2015	Pusat	522.500.000
39	25-Sep-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Padang Property Expo yang diikuti oleh seluruh kecamatan dan kelurahan se-kota Padang	Padang	30.000.000
40	7-Oct-15	Pengembalian dana dari PT Asabri untuk sinergi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan, terluar, tertinggal dan terpencil	Kantor Pusat	(68.149.504.85)
41	28-Oct-15	Partisipasi Perseroan pada pembangunan sarana dan prasarana di Perum Villa Mas Indah Bekasi untuk pembuatan pintu gerbang utama perumahan	Kantor Pusat	20.000.000
42	29-Oct-15	Partisipasi Perseroan untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan lingkungan dan perbaikan saluran air di Perumahan <i>Queen Garden IV</i> Solo	Solo	10.000.000
43	30-Oct-15	Biaya untuk mendukung program siswa mengenal nusantara 2015 dalam rangka kegiatan Bank BTN Hadir untuk Negeri di Papua	Kantor Pusat	11.495.903
44	19-Nov-15	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana transportasi berupa motor pengangkut sampah untuk warga di perumahan Perumnas Sampangan Kel. Gajah Mungkur Kota Semarang	Semarang	25.000.000
45	26-Nov-15	Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyaluran CSR untuk Jembatan Ruas Bonang - Moro dalam rangka pameran potensi desa 2015 di Kab. Demak	Semarang	9.977.000
46	3-Dec-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan renovasi/ perluasan Masjid Al Amanah Tahap II untuk kegiatan pembenahan sarana dan prasarana indah serta perapihan di lingkungan sekitar masjid	Pusat	100.000.000

Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

No.	Tanggal	Perincian Penggunaan	Kantor Pengelola	Jumlah
47	10-Dec-15	Kegiatan bedah rumah bagi 45 orang veteran dalam rangka kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Papua	Jayapura	930.000.000
48	11-Dec-15	Partisipasi Perseroan pada kegiatan pembangunan gedung panti asuhan Elsafan menjadi lebih layak dan memadai untuk dipergunakan bagi anak-anak berkebutuhan khusus	Pusat	40.000.000
49	21-Dec-15	Biaya site visit pembangunan Gereja Sion Mapura di Kabupaten Maybrat Papua Barat	Jayapura	7.896.000
50	28-Dec-15	Pembangunan sarana dan prasarana berupa talud pada tamah makan Hastonoloyo, Tlogo, Sukorejo Kec. Musuk Boyolali	Solo	25.000.000
51	30-Dec-15	Sarana transportasi untuk tamu dalam rangka kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Jayapura Papua	Jayapura	14.301.000
52	31-Dec-15	Penyediaan sarana dan prasarana Masjid Al Mukhlisin di Perum Setia Pertiwi, Kel. Kubang Jaya Siak hulu Pekanbaru dan kegiatan renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu dalam program Rumahku Surgaku yang dilaksanakan oleh Gerakan Cinta Cirebon	SHAD	5.000.000
53	31-Dec-15	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peresmian ruang perpustakaan pada Sekolah Percontohan di Tenjo 5 dan Babakan 04 di SDN Babakan 05 Bogor		24.837.500
TOTAL				4.123.940.998

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Kebijakan

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan nilai tambah dalam layanan pembiayaan perumahan. Layanan tersebut tidak hanya dengan produk-produk terbaik, tapi juga dengan pelayanan yang konsisten, tepercaya, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada kebutuhan para nasabah dan sekaligus sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada nasabah.

Kegiatan Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Dalam mendukung program Sejuta Rumah untuk rakyat, Perseroan mencanangkan program 5 Siap, yaitu kesiapan dari sisi SDM, Teknologi, Proses Bisnis, Pendanaan dan Supply Rumah. Program 5 SIAP BTN akan menjadikan masyarakat Indonesia saat ini semakin mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Perseroan telah menyiapkan pemenuhan kapasitas dan kompetensi SDM pemroses kredit, baik subsidi maupun non subsidi meliputi tenaga analis, loan marketing, *loan service* dan *loan administration*. Perseroan juga telah meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi melalui sistem aplikasi kredit yang terintegrasi, melakukan percepatan pelayanan dan proses kredit secara fokus, baik untuk KPR subsidi maupun KPR non subsidi. Termasuk dalam hal ini menambah jaringan pelayanan dan proses kredit melalui Griya KPR BTN yang menjadi kepanjangan tangan kantor layanan Bank BTN di daerah-daerah.

Semua kebijakan tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR untuk pemilikan rumah subsidi yang pada akhirnya membantu pemerintah mengurangi *backlog* perumahan.

Selain berpedoman pada Salah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan harus dilaksanakan oleh perbankan nasional, hal tersebut juga

ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Pemberdayaan dan Perlindungan konsumen melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan sosialisasi bagi nasabah. Melalui berbagai program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan nasional. Perseroan senantiasa berupaya untuk menyukseskan program API dimaksud untuk memberikan nilai tambah dalam layanan pembiayaan perumahan, tidak hanya dengan produk-produk terbaik, tapi juga dengan pelayanan yang konsisten, tepercaya, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada kebutuhan para nasabah dan sekaligus sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada nasabah.

Kerahasiaan Nasabah

Sebagai sebuah lembaga keuangan. Perseroan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan nasabah yang mengacu pada ketentuan sebagaimana berikut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Terkait kebijakan kerahasiaan Nasabah, yang dimaksud rahasia bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian bagi bank untuk memberikan rahasia bank sejalan dengan Pasal 40 ayat 1 Undang Undang Perbankan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A." Beberapa pengecualian bagi bank untuk memberikan rahasia bank itu, yaitu dalam hal-hal berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan
Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A ayat (1) UU Perbankan).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42A ayat (1) UU Perbankan).
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.
Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut (Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank
Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut (Pasal 44 A ayat (1) UU Perbankan).
7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.
Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan).

Terkait kebijakan agar Perseroan merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. "Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah"

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Namun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah tidak berlaku untuk (Pasal 2 ayat (4) PBI 2/19/2000):

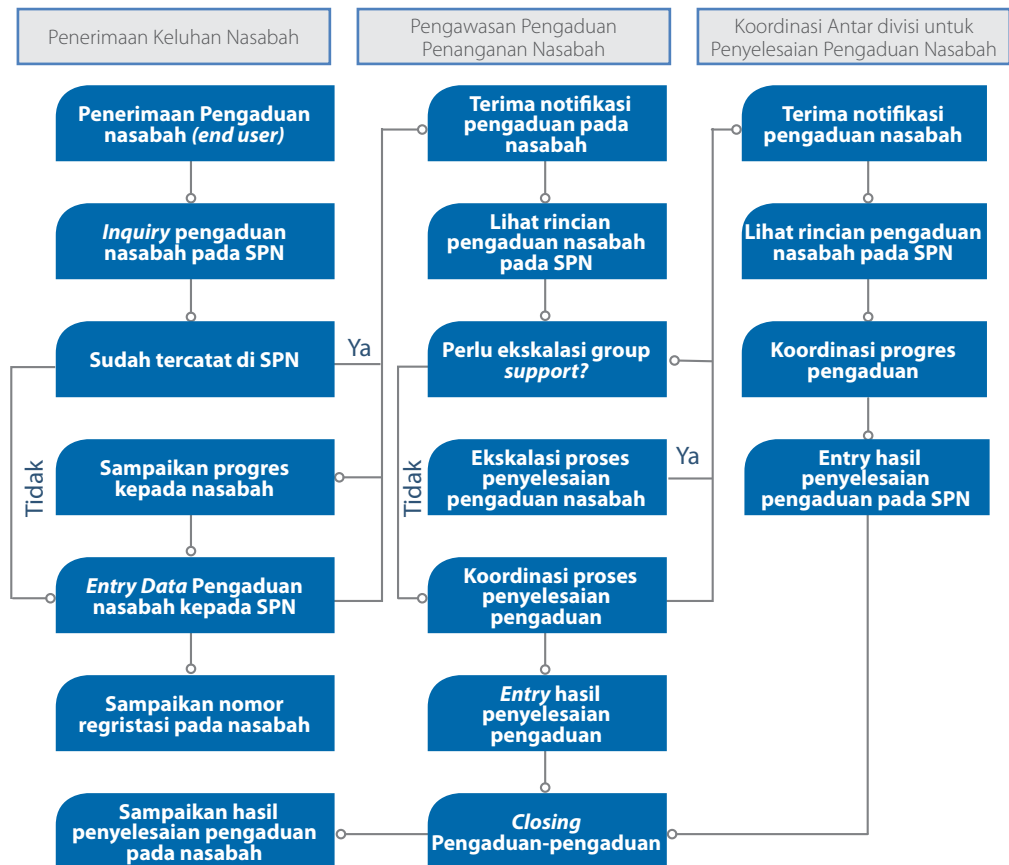
1. Kepentingan perpajakan;
2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
5. Tukar menukar informasi antar Bank;
6. Permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
7. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Nasabah dapat menyuarakan pendapat mereka mengenai pelayanan Bank melalui Kantor Cabang, Divisi Kantor Pusat, *Contact Center*, serta media cetak dan elektronik. Perseroan telah mengupayakan berbagai kebijakan, diantaranya sebagai berikut.

- Mengembangkan Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) yang dapat memantau penyelesaian pengaduan secara menyeluruh. SPN merupakan sistem berbasis *web* yang dapat memudahkan pemantauan terhadap status penyelesaian pengaduan sekaligus memberikan kepastian bagi para nasabah tentang jangka waktu yang dibutuhkan Bank untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Dengan menggunakan sistem yang *online* dan terpadu, para nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan dan mengecek status pengaduan di Kantor Cabang seluruh Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Dengan SPN yang *online* dan berbasis web serta terpadu, mekanisme penanganan keluhanpun lebih terstruktur dan dapat dimonitor dengan baik. Mekanisme penanganan keluhan nasabah dapat dilihat melalui ilustrasi bagan di bawah ini.



Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

- Membuat dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa Perseroan telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, seperti:
 - Menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
 - Informasi tersebut disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
 - Dalam memberikan informasi, Perseroan tidak memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).
 - Informasi mengenai karakteristik Produk Bank dimaksud meliputi:
 - » Nama produk
 - » Jenis produk
 - » Manfaat dan risiko yang melekat pada produk
 - » Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank
 - » Biaya-biaya yang melekat pada produk
 - » Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
 - » Jangka waktu berlakunya produk
 - » Penerbit (*issuer/originator*) produk Bank
- Terkait dengan produk Bank dan penghimpunan dana, Perseroan memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk.
- Perseroan memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik produk Perseroan.
- Perseroan mencantumkan informasi mengenai karakteristik produk bank yang letak dan atau bentuknya terlihat dan atau terbaca secara jelas dan atau mudah dimengerti.
- Perseroan menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.
- Informasi mengenai produk Bank telah dipublikasikan melalui *website* Perseroan yaitu www.btn.co.id yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemudian dapat kami sampaikan pula bahwa penggunaan data pribadi nasabah dikelola sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - Perseroan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah bahwa Perseroan tidak akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - Dalam permintaan persetujuan Perseroan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran Data Pribadi Nasabah kepada pihak Lain.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

- Permintaan persetujuan dapat dilakukan oleh Perseroan sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank.
 - Persetujuan Nasabah terhadap permintaan tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.
 - Bila Perseroan menggunakan data pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Perseroan wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarkan data pribadinya.
 - Membuat dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, diantaranya melalui:
 - » Unit Layanan Pengaduan Nasabah, baik di kantor cabang maupun di Kantor Pusat (di Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis) untuk menangani pengaduan nasabah.
 - » Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan.
- Perseroan telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa ke pada nasabah yang disampaikan baik melalui lisan, surat langsung (via pos), melalui surat via Kantor Cabang, melalui telepon, melalui *internet*, dan melalui media massa.
- Dari semua saluran komunikasi nasabah, pengaduan nasabah sepanjang tahun 2015 berjumlah 35.003 pengaduan dengan kelompok pengaduan terbesar adalah:
- a. Terkait penggunaan kartu dan mesin ATM sebanyak 25.222 pengaduan
 - b. Terkait indikasi penipuan sebanyak 1.291 pengaduan
 - c. Terkait transaksi *electronic banking* sebanyak 5.168 pengaduan
 - d. Lainnya sebanyak 3.322 pengaduan
- Pengaduan kartu dan mesin ATM sebagian besar disebabkan adanya kegagalan transaksi, yang disebabkan oleh:
1. Fisik uang di mesin maupun struk ATM habis.
 2. Terjadi gangguan komunikasi antara *host* bank dengan *host* jaringan ATM.
- Dari sejumlah pengaduan tersebut, telah berhasil diselesaikan 94% atau 23 pengaduan dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian. Terhadap pengaduan yang masuk, Perseroan senantiasa menempatkan privasi pelanggan sebagai hal yang tak bisa ditawar. Hanya dengan cara itulah, pelanggan tidak khawatir untuk melaporkan dan mengadukan jika ada layanan Perseroan yang dinilai mengecewakan atau tidak memuaskan. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan Perseroan, Perseroan secara rutin mengadakan survei kepuasan nasabah. Survei terbaru dilakukan pada Juli-Oktober 2015 dengan hasil 78,9%.

09

Laporan Keuangan

Perseroan semakin memantapkan posisinya sebagai bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended with independent auditors' report

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130
Tel. : 021.633 6789, 633 2066
Fax. : 021.634 6704
e-mail : webadmin@btn.co.id



DIREKSI

www.btn.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	Maryono	Name
Alamat Kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	Office Address
Alamat Domisili	Jl. Karlika Pinang SG 2-3 RT 014 RW 016 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Residential Address
Nomor Telepon	021-6346764	Telephone
Jabatan	Direktur Utama / <i>President Director</i>	Title
Nama	Iman Nugroho Soeko	Name
Alamat Kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	Office Address
Alamat Domisili	Jl. Brawijaya IV/1 RT 002 RW 002 Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Residential Address
Nomor Telepon	021-6346762	Telephone
Jabatan	Direktur / <i>Director</i>	Title

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; | 1. <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. <i>All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>
b. <i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 4. <i>We are responsible for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 29 Januari 2016 / January 29, 2016

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of Board of Directors*

Maryono
Direktur Utama / *President Director*

Iman Nugroho Soeko
Direktur / *Director*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1-5	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	6-7	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	8-9	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	10-12	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	13-220	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-245/PSS/2016

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-245/PSS/2016

*The Stockholders, the Boards of Commissioners and
Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-245/PSS/2016 (lanjutan)

Report. RPC-245/PSS/2016 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Auditors' responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as of December 31, 2015, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

29 Januari 2016/January 29, 2016

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015 ^{*)} / December 31, 2014/ January 1, 2015 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} / January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}	
ASET					ASSETS
KAS	2a,2d,4	1.181.219	920.482	924.451	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	2a,2d,2f,5	10.986.351	9.371.509	9.858.758	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN	2a,2c,2d, 2e,2f,6,40				CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		163.015	1.063.913	345.951	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		39.918	31.051	56.572	<i>Related parties</i>
		202.933	1.094.964	402.523	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.572)	(1.571)	(2.308)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		201.361	1.093.393	400.215	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2a,2c,2d, 2e,2g,7,40				PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga		7.679.477	1.496.455	4.834.318	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		160.000	-	5.000	<i>Related parties</i>
		7.839.477	1.496.455	4.839.318	
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	(50)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		7.839.477	1.496.455	4.839.268	
EFEK-EFEK	2a,2c,2d, 2e,2h,8,40				SECURITIES
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
Nilai wajar melalui laba rugi		-	148.588	2.086.973	<i>Fair value through profit or loss</i>
Tersedia untuk dijual		1.403.835	4.782.433	1.846.575	<i>Available-for-sale</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo		297.503	308.517	191.213	<i>Held-to-maturity</i>
		1.701.338	5.239.538	4.124.761	
Pihak berelasi					<i>Related parties</i>
Nilai wajar melalui laba rugi		-	-	9.660	<i>Fair value through profit or loss</i>
Tersedia untuk dijual		57.217	71.151	-	<i>Available-for-sale</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo		61.007	135.683	76.019	<i>Held-to-maturity</i>
		118.224	206.834	85.679	
		1.819.562	5.446.372	4.210.440	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(12.001)	(9.402)	(8.758)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		1.807.561	5.436.970	4.201.682	

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015 ^{*)} / December 31, 2014/ January 1, 2015 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} / January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}	
OBLIGASI PEMERINTAH					GOVERNMENT BONDS
Nilai wajar melalui laba rugi	2c,2d,9,2e, 2h,9,40	19.267	591.732	696.747	Fair value through profit-or-loss
Tersedia untuk dijual		5.111.280	5.994.262	5.990.887	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo		3.100.361	1.652.071	1.697.326	Held-to-maturity
		<u>8.230.908</u>	<u>8.238.065</u>	<u>8.384.960</u>	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH					LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan	2c,2d,2e,2i, 2j,10,40,49				Loans
Pihak ketiga		127.699.492	106.138.003	92.090.448	Third parties
Pihak berelasi		32.666	133.274	295.860	Related parties
		<u>127.732.158</u>	<u>106.271.277</u>	<u>92.386.308</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.725.724)	(1.365.412)	(1.007.461)	Allowance for impairment losses
		<u>126.006.434</u>	<u>104.905.865</u>	<u>91.378.847</u>	
Pembiayaan/piutang syariah					Sharia financing/receivables
Pihak ketiga		11.222.909	9.643.485	8.080.028	Third parties
Pihak berelasi		737	1.039	1.055	Related parties
		<u>11.223.646</u>	<u>9.644.524</u>	<u>8.081.083</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(324.854)	(204.771)	(129.716)	Allowance for impairment losses
		<u>10.898.792</u>	<u>9.439.753</u>	<u>7.951.367</u>	
		<u>136.905.226</u>	<u>114.345.618</u>	<u>99.330.214</u>	
ASET TETAP					PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan	2k,2l,11	3.237.287	3.000.882	2.833.751	Cost
Akumulasi penyusutan		(1.683.886)	(1.512.499)	(1.311.027)	Accumulated depreciation
		<u>1.553.401</u>	<u>1.488.383</u>	<u>1.522.724</u>	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA					INTEREST RECEIVABLE
	12	1.548.489	1.183.489	923.688	
ASET LAIN-LAIN					OTHER ASSETS
	2l,2m, 2ah,13,	1.553.599	1.007.989	783.770	
TOTAL ASET		<u>171.807.592</u>	<u>144.582.353</u>	<u>131.169.730</u>	TOTAL ASSETS

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015 ^{*)} / December 31, 2014/ January 1, 2015 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} / January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2d,2n,14	1.960.789	1.835.807	1.284.306	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH	2c,2d,2o,40				DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro	15				Demand deposits
Pihak ketiga		7.819.622	6.517.862	5.909.310	Third parties
Pihak berelasi		21.332.538	15.483.338	12.051.655	Related parties
		29.152.160	22.001.200	17.960.965	
Giro <i>Wadiah</i>	15				<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga		900.382	472.927	441.442	Third parties
Pihak berelasi		1.315.901	948.491	713.789	Related parties
		2.216.283	1.421.418	1.155.231	
		31.368.443	23.422.618	19.116.196	
Tabungan	16				Savings deposits
Pihak ketiga		29.330.080	25.162.761	23.320.833	Third parties
Pihak berelasi		72.654	67.975	62.614	Related parties
		29.402.734	25.230.736	23.383.447	
Tabungan <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i>	16				<i>Wadiah and Mudharabah</i> <i>savings deposits</i>
Pihak ketiga		1.351.009	934.190	849.167	Third parties
Pihak berelasi		3.938	2.988	5.279	Related parties
		1.354.947	937.178	854.446	
		30.757.681	26.167.914	24.237.893	
Deposito Berjangka	17				Time deposits
Pihak ketiga		23.504.207	19.405.284	17.238.042	Third parties
Pihak berelasi		34.545.033	31.086.000	31.032.591	Related parties
		58.049.240	50.491.284	48.270.633	
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>	17				<i>Mudharabah Time Deposits</i>
Pihak Ketiga		3.488.339	2.690.200	3.377.913	Third parties
Pihak berelasi		4.044.967	3.698.661	1.204.987	Related parties
		7.533.306	6.388.861	4.582.900	
		65.582.546	56.880.145	52.853.533	
Total simpanan dari nasabah		127.708.670	106.470.677	96.207.622	Total deposits from customers

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015 ^{*)} / December 31, 2014/ January 1, 2015 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} / January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}	
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2c,2d,2p, 18,40				DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga		1.719.714	1.175.970	269.514	Third parties
Pihak berelasi		1.484	3.299	5.743	Related parties
		<u>1.721.198</u>	<u>1.179.269</u>	<u>275.257</u>	
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	2c,2d,2q, 8,9,19,40				SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS
Pihak ketiga		2.135.091	3.423.234	2.652.730	Third parties
Pihak berelasi		-	394.369	-	Related parties
		<u>2.135.091</u>	<u>3.817.603</u>	<u>2.652.730</u>	
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	1c,2d,2r, 20	12.492.202	8.519.884	8.836.711	SECURITIES ISSUED
PINJAMAN YANG DITERIMA	2c,2d,2s 21,40				FUND BORROWINGS
Pihak ketiga		1.998.175	2.919.183	2.953.619	Third parties
Pihak berelasi		5.728.553	4.079.030	4.119.413	Related parties
		<u>7.726.728</u>	<u>6.998.213</u>	<u>7.073.032</u>	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	22	357.364	308.996	241.370	INTEREST PAYABLE
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - Neto	2aa,35,49	9.566	115.260	121.139	DEFERRED TAX LIABILITIES - Net
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2af,23	-	7.198	6.469	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2y,24,49	3.835.877	3.076.551	2.877.737	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		<u>157.947.485</u>	<u>132.329.458</u>	<u>119.576.373</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015 ^{*)} / December 31, 2014/ January 1, 2015 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} / January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014					Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2015 and 2014, respectively
Modal dasar - 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014					Authorized capital - 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2015 and 2014, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.582.345.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.582.344.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 10.567.696.000 Saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 10.567.695.999 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2014					Issued and fully paid capital - 10,582,345,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A dwiwarna and 10,582,344,999 shares of series B) as of December 31, 2015 and 10,567,696,000 shares (consisting of 1 share of series A dwiwarna and 10,567,695,999 shares of series B) as of December 31, 2014
Tambahan modal disetor Opsi Saham	2t,25a 25b 26	5.291.173 2.046.598 2.690	5.283.848 2.028.136 9.483	5.282.427 2.025.764 10.600	Additional paid-in capital Stock Option
Kerugian neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	2h,8,9	(133.690)	(90.013)	(90.046)	Net unrealized loss on available-for-sale securities and Government bonds, net of deferred tax
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	2y,49	(106.144)	(110.251)	(85.362)	Loss from remeasurement on defined benefit plan - net of deferred tax
Saldo laba **) Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	2b,2u	4.751.833 2.007.647	3.859.360 1.272.332	2.765.847 1.684.127	Retained earnings **) Appropriated Unappropriated
TOTAL EKUITAS		13.860.107	12.252.895	11.593.357	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		171.807.592	144.582.353	131.169.730	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

**) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) As restated (Note 49)

**) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2015	Catatan/ Notes	2014 ^{*)}	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				Interest Income and Income from Profit Sharing
Bunga	14.455.136	2v,27	12.394.564	Interest
Bagi hasil secara syariah	511.073	2x	412.764	Income from sharia
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	14.966.209		12.807.328	Total Interest Income and Income from Profit Sharing
Beban Bunga dan Bonus				Interest and Bonus Expenses
Bunga	(8.073.584)	2v,28	(7.295.733)	Interest
Beban pendanaan lainnya	(70.383)		(36.685)	Other financing expenses
Bonus	(11.166)	2x	(10.329)	Bonus
Total Beban Bunga dan Bonus	(8.155.133)		(7.342.747)	Total Interest and Bonus Expenses
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	6.811.076		5.464.581	Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pendapatan Operasional Lainnya				Other Operating Income
Pungutan administrasi dan Denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	533.688		468.951	Administration fees and penalties on deposits and loans
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	210.996		187.578	Income from recovery of loans written-off
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	147.558	2h,8	61.696	Gain on sale of securities - net
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	19.495	2h,9	47.406	Gain on sale of government bonds - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	2h,8	999	Unrealized gain on changes in fair value of securities - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	2h,9	5.571	Unrealized gain on changes in fair value of Government Bonds - net
Lain-lain	194.789	29	122.619	Others
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1.106.526		894.820	Total Other Operating Income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(901.008)	2e,2l,30	(771.166)	Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets
Pembalikan (beban) estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	7.198	2l,2af,23	(729)	Reversal (provision) for impairment losses on commitments and contingencies

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2015	Catatan/ Notes	2014 ^{*)}	
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	(2.151.266)	31	(2.122.830)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.929.346)	2y,32,37	(1.564.254)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan Pemerintah	(229.549)	39	(203.451)	Premium on Government's guarantee program
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(193)	2h,9	-	Unrealized loss on changes in fair value of Government Bonds- net
Lain-lain	(179.833)	33	(119.604)	Others
Total Beban Operasional Lainnya	(4.490.187)		(4.010.139)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	2.533.605		1.577.367	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	8.281	34	1.960	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.541.886		1.579.327	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(690.979)	2aa,35	(433.755)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.850.907		1.145.572	INCOME FOR THE YEAR
Pendapatan komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	5.476		(33.185)	Remeasurement on defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.369)		8.296	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	(58.236)	2h,8,9	44	Unrealized net gain (loss) on changes in value of available-for-sale securities and government bonds -
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	14.559		(11)	Income tax related to items that may be reclassified to profit or loss
Total laba komprehensif tahun berjalan – setelah pajak	1.811.337		1.120.716	Total Comprehensive Income for the year – net of tax
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	175	2ac,26,45	108	Basic (full amount)
Dilusian (nilai penuh)	175		108	Diluted (full amount)

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital/ Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Opsi Saham/ Stock Option	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek Kembali dan Obligasi Perintah Yang Tersedia Untuk Dijual - Neto/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - Net	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto (Loss) from Remeasurement on Defined Benefit Plan - Net	Saldo Laba/Retained Earnings *)		Ekuitas Neto/ Net Equity	Balance as of December 31, 2013
						Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2013	5.282.427	2.025.764	10.600	(90.046)	-	2.765.847	1.562.161	11.556.753	
Dampak penyesuaian atas Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013)	-	-	-	-	(85.362)	-	121.966	36.604	Impact of adjustment on the implementation on SFAS No. 24 (Revised 2013)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 setelah penyalinan kembali	5.282.427	2.025.764	10.600	(90.046)	(85.362)	2.765.847	1.684.127	11.593.357	Balance as of January 1, 2014 after restatement
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	33	(24.889)	-	1.145.572	1.120.716	Total comprehensive income for the year
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	(468.648)	(468.648)	Distribution of income Dividends
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	1.093.513	(1.093.513)	-	Appropriation for general and special reserves
Ekskusi opsi saham	1.421	2.372	(1.117)	-	-	-	-	2.676	Stock options exercised
Saldo per 31 Desember 2014	5.283.848	2.028.136	9.483	(90.013)	(110.251)	3.859.360	1.267.538	12.248.101	Balance as of December 31, 2014

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial
statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahkan modal diseor/ Additional paid-in capital	Opsi Saham/ Stock Option	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - Neto/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - Net	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto /Gain (Loss) from Remeasurement on Defined Benefit Plan - Net	Saldo Laba/Retained Earnings ^{*)}		Ekuitas Neto/ Net Equity	Balance as of December 31, 2014 Impact of adjustment on the implementation of PSAK 102 (Revised 2013)
						Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2014	5.283.848	2.028.136	9.483	(90.013)	(110.251)	3.859.360	1.267.538	12.248.101	
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK 102 (Revisi 2014)	-	-	-	-	-	-	4.794	4.794	
Saldo per 1 Januari 2015 setelah penyesuaian	5.283.848	2.028.136	9.483	(90.013)	(110.251)	3.859.360	1.272.332	12.252.895	Balance as of January 1, 2015 after adjustment
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(43.677)	4.107	-	1.850.907	1.811.337	Total comprehensive income for the year
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	(223.119)	(223.119)	Distribution of income Dividends
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	892.473	(892.473)	-	Appropriation for general and special reserves
Ekskusi opsi saham	7.325	18.462	(6.793)	-	-	-	-	18.994	Stock options exercised
Saldo per 31 Desember 2015	5.291.173	2.046.598	2.690	(133.690)	(106.144)	4.751.833	2.007.647	13.860.107	Balance as of December 31, 2015

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

^{*)} Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Desember 2015
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For the Year Ended December 31, 2015
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2015	Catatan/ Notes	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil	14.603.342		12.548.940
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	227.272		202.373
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(8.119.236)		(7.269.328)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(647.413)		(358.876)
Beban operasional lainnya - neto	(3.448.993)		(3.227.886)
Pendapatan bukan operasional lainnya - neto	8.281		1.960
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	2.623.253		1.897.183
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:			
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-		9.660
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	572.465		105.015
Pembiayaan/piutang syariah	(1.657.894)		(1.600.125)
Kredit yang diberikan	(21.816.707)		(14.199.296)
Aset lain-lain	(349.149)		(217.784)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			
Liabilitas segera	(21.579)		477.250
Simpanan dari nasabah			
Giro	7.150.960		4.040.235
Giro <i>Wadiah</i>	794.865		266.187
Tabungan	4.171.998		1.847.289
Tabungan <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i>	417.769		82.732
Deposito berjangka	7.557.956		2.220.651
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	1.144.445		1.805.961
Simpanan dari bank lain	541.929		904.012
Liabilitas lain-lain	577.268		312.021
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.707.579		(2.049.009)
			Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2015	Catatan/ Notes	2014	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Jatuh tempo efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	92.019		22.205	Maturity of held-to-maturity securities
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	(6.003)		(199.509)	Purchase of held-to-maturity securities
Pembelian aset tetap	(262.524)	11	(191.400)	Acquisitions of premises and equipment
Penurunan (kenaikan) efek-efek tersedia untuk dijual	3.399.053		(3.000.489)	Decrease (increase) available-for-sale securities
Penurunan (kenaikan) obligasi pemerintah tersedia untuk dijual	873.070		(13.286)	Decrease (increase) in available-for-sale government bonds
Jatuh tempo obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-		50.000	Maturity of held-to-maturity government bonds
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	(1.451.880)		-	Purchase of held-to-maturity government bonds
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	2.643.735		(3.332.479)	Net Cash provided by (used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	3.984.790		577.381	Proceeds from issuance of securities
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	-		(900.000)	Payment of matured securities issued
Penerimaan dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.772.233		5.146.854	Proceeds from securities sold under repurchase agreements
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(4.454.745)		(3.981.981)	Payments of matured securities sold under repurchase agreements
Eksekusi opsi saham karyawan	18.994		2.676	Employee stock option exercise
Pembayaran dividen (Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima	(223.119)	25c	(468.648)	Payments of dividends
	728.515		(74.819)	(Payment of) proceeds from fund borrowings
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.826.668		301.463	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	7.177.982		(5.080.025)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.031.998		18.112.023	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	20.209.980		13.031.998	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				<i>The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:</i>
Kas	1.181.219	2a,4	920.482	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	2f,5	9.371.509	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	202.933	2f,6	1.094.964	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7.839.477	2g,7	1.496.455	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date</i>
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	2h,8	148.588	<i>Certificates of Bank Indonesia and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within three months since acquisition date</i>
Total	<u>20.209.980</u>		<u>13.031.998</u>	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH 01.02. tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H. and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam akta notaris No. 11 tanggal 8 Desember 2015 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03-0986454 tanggal 8 Desember 2015.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 244 kantor cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 486 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.951 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 244 kantor cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 486 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.948 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The last amendment was documented under notarial deed No. 11 dated December 8, 2015 of Notary Fathiah Helmi, S.H. regarding Board of Directors and Commissioners. This amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No.AHU-AH.01.03-0986454 dated December 8, 2015.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2015, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 244 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch offices), 486 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,951 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2014, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 244 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch offices), 486 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,948 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value (full Rupiah) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 20 (dua puluh) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ <i>BTN Bonds I</i>	50.000	5 tahun/years	25 Juli/ July 25, 1994 *)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ <i>BTN Bonds II</i>	50.000	5 tahun/years	1 Juni/ June 1, 1995 *)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ <i>BTN Bonds III</i>	50.000	5 tahun/years	11 November/ November 11, 1996 *)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ <i>BTN Bonds IV</i>	100.000	5 tahun/years	23 Januari, January 23, 1996 *)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ <i>BTN Bonds V</i>	150.000	5 tahun/years	31 Juli/ July 31, 1998 *)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ <i>BTN Bonds VI</i>	350.000	5 tahun/years	21 Desember/ December 21, 2000 *)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ <i>BTN Bonds VII</i>	200.000	5 tahun/years	22 Juli/ July 22, 2001 *)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ <i>BTN Bonds VIII</i>	400.000	5 tahun/years	18 Juli/ July 18, 2002 *)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ <i>BTN Bonds IX</i>	750.000	5 tahun/years	2 Oktober/ October 2, 2008 *)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ <i>BTN Bonds X</i>	750.000	5 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2009 *)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ <i>BTN Bonds XI</i>	750.000	5 tahun/years	6 Juli/ July 6, 2010 *)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ <i>BTN Bonds XII</i>	1.000.000	10 tahun/years	19 September/ September 19, 2016	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ <i>BTN Bonds XIII A</i>	300.000	3 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2012 *)	11,75% tetap/ fixed

^{*)} Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 20 (twenty) series of bonds and 1 series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2015, with the details as follows:

^{*)} The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 20 (dua puluh) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2013 *)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2014 *)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2020	10,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XV/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2021	9,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Shelf Registration Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2022	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Shelf Registration Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	27 Maret/ March 27, 2023	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ Shelf Registration Bonds II Phase I BTN				
Seri A/A Series	900.000	3 tahun/years	8 Juni/ June 8, 2018	9,63% tetap/ fixed
Seri B/B Series	500.000	5 tahun/years	8 Juni/ June 8, 2020	9,88% tetap/ fixed
Seri C/C Series	800.000	7 tahun/years	8 Juni/ June 8, 2022	10,00% tetap/ fixed
Seri D/D Series	800.000	10 tahun/years	8 Juni/ June 8, 2025	10,50% tetap/ fixed
Obligasi Subordinasi BTN II/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2014 **)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh tempohnya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 20 (twenty) series of bonds and 1 series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2015, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman letter No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
(lanjutan)**

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the The share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahunan Bank tanggal 2 September 2015 yang berita acaranya dibuat oleh Dina Chozie, S.H., C.N., No. 1, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015

Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah*
Komisaris Independen	Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	Arie Coerniadi
Komisaris Independen	Catherinawati Hadiman**
Komisaris	Sumiyati***
Komisaris	Fajar Harry Sampurno
Komisaris	Lucky Fathul Aziz H.

* Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015.

** Sejak tanggal 8 Januari 2016 sudah tidak efektif lagi di Bank

*** Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 21 Mei 2014 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.54, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Komisaris Utama	Mardiasmo*
Komisaris Independen	Amanah Abdulkadir
Komisaris Independen	Maulana Ibrahim
Komisaris Independen	Sahala Lumban Gaol
Komisaris	Agung Kuswandono
Komisaris	Herman Hidayat**

* Sejak tanggal 13 Januari 2015 sudah tidak efektif lagi di Bank

** Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on September 2, 2015, as recorded under the notarial No. 1 signed by Dina Chozie, S.H., C.N., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2015

President/ Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

* Resignation of president and independent commissioner was based on the letter to the ministry of state owned companies (BUMN) on October 9, 2015.

** Since January 8, 2016 no longer effective in Bank

*** Will be effective upon approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) based on the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and regulations.

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on May 21, 2014, as recorded under the notarial No. 54 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2014

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

* Since January 13, 2015 no longer effective in Bank

** Will be effective upon approval from OJK based on the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Bank tanggal 24 Maret 2015, dengan berita acara No. 50 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015

Direktur Utama	Maryono
Direktur	Irman Alvian Zahiruddin
Direktur	Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	Iman Nugroho Soeko
Direktur	Adi Setianto
Direktur	Sis Apik Wijayanto
Direktur	Sulis Usdoko
Direktur	Oni Febriarto Rahardjo

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Bank tanggal 25 Februari 2014, dengan berita acara No. 29 dan akta No. 9 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Direktur Utama	Maryono
Direktur	Hulmansyah
Direktur	Iman Nugroho Soeko
Direktur	Irman Alvian Zahiruddin
Direktur	Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	Rico Rizal Budidarmo

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp16.292 dan Rp16.721 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Catatan 40b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan direksi adalah sebesar Rp37.216 dan Rp37.869 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Catatan 40b).

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2015 dan 25 Februari 2014, Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp23.449 dan Rp30.595 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun berjalan yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015 dan 26 Maret 2014.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on March 24, 2015, as stated under the notarial No. 50 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2015

President Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on February 25, 2014, as stated under the notarial No. 29 and the notarial deed No. 9 dated August 13, 2014 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2014

President Director
Director
Director
Director
Director
Director

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp16,292 and Rp16,721 for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively (Note 40b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp37,216 and Rp37,869 for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively (Note 40b).

During the Bank's Stockholders' General Meeting held on March 24, 2015 and February 25, 2014, the Bank distributed bonuses to the Directors and Commissioners amounting to Rp23,449 and Rp30,595, respectively, which were allocated from current year income and paid on June 10, 2015 and March 26, 2014.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015 dan 2014

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Eko Waluyo*
Dadang Eka Jatnika**

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 164/DIR/2014 tanggal 8 April 2014 dan bertindak sebagai pejabat sementara sejak tanggal 14 April 2014.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 176/DIR/2014 tanggal 21 April 2014.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.379/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015

Ketua
Anggota
Anggota

Ahmad Nazri Adlani
Mohamad Hidayat
Muhammad Syakir Sula

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Ketua
Anggota

Ahmad Nazri Adlani
Mohamad Hidayat

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 507/DIR/2015, tanggal 4 September 2015 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No.85/KOM/BTN/XI/2015 tanggal 2 September 2015) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Kamaruddin Sjam
Chatherinawati Hadiman*
Sondang Gayatri
Waldy Gutama
Deddy Effendi Ridwan

* Sejak tanggal 8 Januari 2016 sudah tidak efektif lagi di Bank

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2015 and 2014

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.164/DIR/2014 dated April 8, 2014 and acting Corporate Secretary since April 14, 2014.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.176/DIR/2014 dated April 21, 2014.

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.379/DIR/2015 dated June 30, 2015 are as follows:

December 31, 2015

Chairman
Member
Member

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 927/DIR/2013 dated December 27, 2013 are as follows:

December 31, 2014

Chairman
Member

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2015, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 507/DIR/2015 dated September 4, 2015 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 85/KOM/BTN/XI/2015 dated September 2, 2015) are as follows:

December 31, 2015

Chairman
Member
Member
Member
Member

* Since January 8, 2016 no longer effective in Bank

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.294/DIR/2014, tanggal 1 Juli 2014 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 72/KOM/BTN/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

Sahala Lumban Gaol
Maulana Ibrahim
Sondang Gayatri
Waldy Gutama

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 8.186 dan 7.513 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors,
Sharia Supervisory Board, Audit
Committee and Employees (continued)**

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2014, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 294/DIR/2014 dated July 1, 2014 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 72/KOM/BTN/VI/2014 dated June 25, 2014) are as follows:

December 31, 2014

Chairman
Vice Chairman
Member
Member

Based on Bank's internal regulation, scope of the Bank's key management consist of board of commissioners, audit committee, board of directors, regional office head, division head, and branch manager. The Bank's permanent employees as of December 31, 2015 and 2014 amounted to 8,186 and 7,513 employees, respectively (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the years ended December 31, 2015 and 2014 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015.

Laporan keuangan Bank cabang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The financial statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements" which was effective since January 1, 2015.

The financial statements of the Bank's sharia branches have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No.102 (Revised 2013) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 on "Accounting for Musyarakah" and SFAS 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No.110 on "Accounting for Sukuk" and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) issued by Bank Indonesia and Indonesian Institute of Accountants (IAI).

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flow. The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The presentations currency used in the financial statement is the Indonesian Rupiah, which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

- a) Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

- a) a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (ii) has significant influence over the Bank or (iii) has joint control over the Bank;
- b) an entity which is a member of the same group as the Bank;
- c) an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
- d) a member of key management personnel of the Bank;

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika (lanjutan):

- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 40 tersebut.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan penyajian dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

The Bank considers the following as its related parties (continued):

- e) a close family member of the person described in clause (a) or (d);
- f) an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e);
- g) an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 regarding "The affiliate transactions and conflict of interest of certain transactions", at the time the transaction were made. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 40 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 40.

d. Financial assets and liabilities

Effective since January 1, 2015, the Bank's implemented SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". The Implementation of this SFAS does not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation". The Implementation of this SFAS does not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar.

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi tersedia untuk dijual

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". The implementation of this SFAS does not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 68, "Fair Value Measurement". The implementation of this SFAS defines fair value, establishes in a statement, a framework for measuring fair value and requires disclosures concerning fair value measurements.

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, Government bonds, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of current liabilities, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, fund borrowings, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

(i) Classification

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale investments.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition are designated as available-for-sale investments; or*
- *those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available-for-sale.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif yang dapat dikuotasikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and comprehensive income.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value plus, for those financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut (lanjutan):

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met (continued):

- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.*

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

a. Financial assets are derecognized when:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

a. Financial assets are derecognized when (continued):

- dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a *pass through arrangement*, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statements of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

- b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

(v) Income and expense recognition

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual, serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

- b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar, diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Unrealized gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale, except financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognized, net of tax, in equity, until the financial assets are derecognized or impaired.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(v) *Income and expense recognition (continued)*

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

(vi) *Reclassification of financial assets*

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss, if the initial recognition of financial instruments is determined by Bank as measured at fair value through profit or loss.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank cannot classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

a. are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;

b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

b. occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

c. are attributable to an isolated event, that is beyond the Bank's control, is non-recurring, and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

(vi) *Reclassification of financial assets (continued)*

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(vii) Saling hapus

(vii) *Offsetting*

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Pengukuran nilai wajar

(viii) *Fair value measurement*

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(viii) Fair value measurement (continued)

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be used by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(viii) Fair value measurement (continued)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 44)

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 44).

(ix) Pengukuran biaya diamortisasi

(ix) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(x) Aset keuangan sukuk

(x) Sukuk Financial Asset

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk either measured at cost or fair value.

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

After the initial recognition, investment in *ijarah* sukuk and *mudharabah* sukuk is measured as follows:

a. Diukur pada biaya perolehan

a. Measured at cost

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut (lanjutan):

After the initial recognition, investment in ijarah sukuk and mudharabah sukuk is measured as follows (continued):

a. Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)

a. Measured at cost (continued)

- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Sukuk acquisition cost includes transaction cost.

- The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk.

- Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

b. Diukur pada nilai wajar

b. Measured at fair value

- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini
- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi

- The fair value is determined with reference to the following order:

- Quoted price in active market

- Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market

- Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction

- Sukuk acquisition cost does not include transaction cost

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar (lanjutan)

- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Semua investasi sukuk Bank dilakukan dengan akad *ijarah*.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

b. Measured at fair value (continued)

- The difference between fair value and carrying value is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income

All investment in sukuk of Bank was done under *ijarah* contracts.

e. Allowance for impairment losses on financial assets

On each statement of financial position reporting date, Bank assesses whether there is an objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrate that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;
- b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;
- c. the creditor, for economic or legal reasons relating to the financial difficulties of the debtor, provides relief (concession) to the debtor that the creditor would not otherwise consider;
- d. it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for that financial asset due to financial difficulties; or

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunannya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows (continued):

f. observable data has indicated that there is measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the decrease cannot be identified to the individual financial assets in the portfolio, including:

1. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
2. national or local economic condition related to defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of events and identification of loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months and for specific cases, it may need longer period.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with objective evidence of impairment;
2. Restructured loans which individually have significant value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond dibawah Rp5.000.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (historical loss experience). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode *roll rate* analisis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Bank menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective assessment if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with no objective evidence of impairment;
2. Loans which individually have insignificant value;
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of current and special mention, and have never been restructured; or (b) Loans with credit limit below Rp5,000.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets are collectively assessment on the basis of historical loss experience. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the roll rate analysis method, which is a statistical model analysis method to collectively assess allowance for impairment losses on loans. Under this method, the Bank uses 3 (three) years of historical data to compute for the *Probability of Default* (PD) and *Loss Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. If loans and receivables or held-to-maturity securities and Government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure impairment loss is the current effective interest rate specified in the contract.

As a practical guidance, the Bank may measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable.

Impairment losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized and the recovery is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available for sale, Bank assesses on each statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan obligasi Pemerintah yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang terpulihkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available for sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of profit or loss and other comprehensive income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale securities and Government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss previously recognized must be recovered and the recovery is recognized in the year it occurred.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The amount of reversal is recognized in the current period statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan kembali pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

Unit Usaha Syariah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year.

In compliance with Bank Indonesia (OJK), Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Commercial Banks" which is valid until August 21, 2017.

Sharia Business Unit implement (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective on January 1, 2015 and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.12/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which is valid until August 21, 2017. Assessment prior to January 1, 2015 is using PBI No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding "Asset Quality Rating for Sharia Bank and Sharia Business Units".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK) adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation (OJK) is as follows:

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, Government Bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified under loans and receivables.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility syariah*, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka dan *interbank call money*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, NCD, dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum.

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit and interbank call money.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

h. Securities and Government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), bonds, NCD, and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds that are issued by the Government for general bank recapitalization.

Sharia securities are classified as held-to-maturity investments.

Securities and Government bonds are initially measured at fair value. Subsequently, securities and Government bonds are accounted for depending on their classification as held-to-maturity, available-for-sale or fair value through profit or loss.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. *Held-to-maturity securities and Government bonds are carried at amortized cost using the effective interest method.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut (lanjutan):

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows (continued):

The Bank does not classify securities and Government bonds as held-to-maturity financial assets if the bank has, during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity securities or Government bonds prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2014) applicable in the relevant period.

2. Securities and Government bonds which are classified under available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale securities and Government bonds are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value.

Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from securities and Government bonds is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. (lanjutan)

Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government bonds (continued)

3. *Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value. (continued)*

Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.

Securities and Government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the statement of financial position date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and Government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and Government bonds.

i. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified under loans and receivables.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (Sekuritisasi KPR)

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan"), Bank telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (efek beragunan aset), Bank mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi, Bank menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan KPR yang termasuk dalam sekuritisasi.

j. Pembiayaan/piutang syariah

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *rahn*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (Bank's Mortgage Securitization)

In connection with the Bank's mortgage securitization on its housing loans ("pool of receivables"), the Bank sold its pool of receivables to third parties (Bank's mortgage securitization).

For mortgage loan securitization (asset-backed securities), the Bank considered it as a true sale as it transferred the risk and rewards of ownership to counterparty. Hence, at the effective date of the securitization, the Bank derecognized the pool of receivables covered by the securitization.

j. Sharia financing/receivables

*Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions and *rahn* transactions, for financing consist of *mudharabah* and *musyarakah* financing.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (*musyarakah* partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, *Musyarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

k. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. *Istishna* receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Rahn is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets *ujrah* (benefits) in return which are recognized on an accrual basis.

k. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Aset tetap (lanjutan)

k. Premises and equipment (continued)

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	10 - 20	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	<i>Office furniture and fixtures, and motor vehicles</i>

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land are stated at cost and not depreciated.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

l. Penurunan nilai aset non-keuangan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Premises and equipment (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

l. Impairment of non-financial assets

Effective on January 1, 2015, Bank implemented SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

l. Impairment of non-financial assets (continued)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d)

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68, "Fair Value Measurements" (Note 2d).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

m. Biaya dibayar di muka

m. Prepaid expenses

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

n. Liabilitas segera

n. Current liabilities

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

o. Simpanan

o. Deposits

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Simpanan (lanjutan)

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di muka. Pemegang deposito hanya bisa menarik deposito tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Deposits (continued)

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing from the Bank's revenue for the use of funds in accordance with the agreed nisbah. Wadiah and Mudharabah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits represent third party placements in which the profit sharing is in accordance with the nisbah as determined and agreed in advance. Depositors are entitled to withdraw the funds at specific dates in accordance with agreements between the depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method, except for sharia deposits and temporary syirkah fund which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Simpanan dari bank lain

p. Deposits from other banks

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berjangka.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits and time deposits.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

q. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali

q. Securities sold under repurchase agreements

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method. Securities sold under agreements to repurchase are classified as other financial liabilities measured at amortized cost.

r. Surat-surat berharga yang diterbitkan

r. Securities issued

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah Obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Securities issued by Bank consist of Bonds and Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, Pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

t. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

u. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

v. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

t. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

u. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

v. Interest income and expense

Interest income and expenses are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

v. Interest income and expense (continued)

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

w. Pendapatan provisi dan komisi

w. Fees and commissions

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

x. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

x. Sharia profit sharing income and bonus expense

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, margin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Pendapatan *Istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

y. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

y. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot* Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2015
1 Dolar Amerika Serikat	13.785,00
1 Dolar Australia	10.083,73
1 Poundsterling Inggris	20.439,02
1 Euro Eropa	15.056,67
1 Yen Jepang	114,52
1 Ringgit Malaysia	3.210,67
1 Dolar Hongkong	1.778,70
1 Saudi Riyal	3.672,48
1 Renminbi	2.122,85
1 Dolar Singapura	9.758,95

aa. Pajak penghasilan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of December 31, 2015 and 2014, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	2015	
	12.385,00	1 United States Dollar
	10.148,27	1 Australia Dollar
	19.288,40	1 British Poundsterling
	15.053,35	1 European Euro
	103,56	1 Japanese Yen
	3.542,11	1 Malaysian Ringgit
	1.596,98	1 Hongkong Dollar
	3.299,59	1 United States Dollar
	1.995,62	1 Renminbi
	9.376,19	1 Singapore Dollar

aa. Income tax

Effective from January 1, 2015, Bank adopted SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statement.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Pajak penghasilan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

ab. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

ab. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Pelaporan segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas (lanjutan):

b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ac. Laba per saham dasar dan dilusian

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa seluruh opsi saham karyawan dieksekusi pada harga yang telah ditentukan pada saat penerbitan opsi saham tersebut.

ad. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Segment reporting (continued)

An operating segment is a component of an entity (continued):

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ac. Basic and diluted earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

Diluted earnings per share is computed after making the necessary adjustments to the weighted average number of common shares outstanding assuming full exercise of employee stock options at the time of the issuance using the determined exercise price.

ad. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (Binomial-tree option pricing model).

ae. Stock Options

The Bank has granted stock options to Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the Binomial-tree option pricing model.

af. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011 dan POJK no.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

af. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011 and POJK no.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable statement of financial accounting standards.

ag. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

ag. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

ai. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals acquired in settlement of loans (included as part of "Other Assets") are recognized at net realizable values or loan carrying amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. The excess in loan balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible losses on loans in the current year. The difference between the value of the collateral and the proceeds from sale thereof is recognized as a gain or loss at the time of sale of the collateral.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

Reconditioning costs arising after foreclosure capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

ai. Changes in accounting policy and disclosures

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2015, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows:

- SFAS No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements", which was adopted from IAS 1, regarding the changes of group items presentation in other comprehensive income. Items that will be reclassified to profit or loss are presented separately from items that will not be reclassified to profit or loss.
- SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which was adopted from IAS 19, which removes the corridor mechanism and the contingent liabilities disclosures to simplify the clarifications and disclosures.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu (lanjutan):

- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau Unit Penghasil Kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ai. Changes in accounting policy and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2015, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows (continued):

- SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes", which was adopted from IAS 12. This SFAS provides additional regulation for deferred tax assets and liabilities arises from a non-depreciable assets measured using the revaluation model, and those arises from investment property that is measured using the fair value model.
- SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", which was adopted from IAS 36. This SFAS provides additional disclosure requirements for each individual asset or a cash-generating unit, for which impairment losses has been recognized or reversed during the period.
- SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", which was adopted from IAS 32. This SFAS provides criteria on legally enforceable right to set off the recognized amounts and settlement criteria on a net basis.
- SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which was adopted from IAS 39. This SFAS, among other, provides additional criteria of hedging instrument which can not be considered as expired or terminated, also stipulation to record financial instruments at the measurement date and after initial recognition.
- SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures", which was adopted from IFRS 7. This SFAS, among other, provides additional offset disclosures stipulation with quantitative and qualitative information, and transfers of financial instruments disclosures.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu (lanjutan):

- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan yang relevan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ai. Changes in accounting policy and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2015, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows (continued):

- SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", which was adopted from IFRS 13, provides guidance on how to determine fair value when it was required or permitted.

The impact on the financial statements of the adoption of the accounting standards mentioned above has been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities would therefore be measured at fair value and not at amortized cost.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an *arm's length* basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating allowance for impairment losses made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance for losses required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) significant negative industry or economic trends.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS

	31 Desember/December 31, 2015	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		1.179.438
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	86.954	1.199
Dolar Australia	27.300	275
Dolar Singapura	12.459	122
Euro Eropa	5.500	83
Riyal Arab Saud	12.802	47
Ringgit Malaysian	6.473	21
Yen Jepang	171.000	20
China Renminbi	4.705	10
Dolar Hong Kong	610	1
Pound Sterling Inggris	160	3
		1.781
Total		1.181.219

4. CASH

	31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		918.873	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	120.221	1.489	United States Dollar
Dolar Australia	-	-	Australian Dollar
Dolar Singapura	5.100	48	Singapore Dollar
Euro Eropa	4.725	71	European Euro
Riyal Arab Saud	-	-	Saudi Arabian Riyal
Ringgit Malaysian	-	-	Malaysian Ringgit
Yen Jepang	10.000	1	Japanese Yen
China Renminbi	-	-	China Renminbi
Dolar Hong Kong	-	-	Hong Kong Dollar
Pound Sterling Inggris	-	-	Great Britain Pound Sterling
		1.609	
Total		920.482	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp227.127 dan Rp183.269, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp227,127 and Rp183,269, as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/December 31, 2015	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		10.981.885
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	324.000	4.466
Total		10.986.351

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		9.366.753	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	384.000	4.756	United States Dollar
Total		9.371.509	Total

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp641.467 dan Rp541.680, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp641,467 and Rp541,680, as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The minimum reserve requirement ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

	2015	2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	7,95%	8,09%	Primary
Sekunder	5,21%	7,85%	Secondary
Dolar Amerika Serikat	8,08%	8,39%	United States Dollar

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2015
Syariah Rupiah	5,04%

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/2015 tanggal 26 November 2015 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional", sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 14 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,5% dan 8%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

Rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 5% dan 1%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 43).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2015 and 2014 are as follows (continued):

	2014
Sharia Rupiah	5,09%

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2015 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 17/21/2015 dated November 26, 2015, regarding "Second Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013 on Reserves Requirement Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks", whereas GWM ratios as of December 31, 2014 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 15/15/2013 dated December 24, 2013, regarding "Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks".

As of December 31, 2015 and 2014, based on the above Bank Indonesia regulations, Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 7.5% and 8%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 8%, respectively. Secondary GWM amounting to 4% in Rupiah, respectively.

The calculation of the GWM ratios based on sharia principle as of December 31, 2015 and 2014 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013, regarding "Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banks and Sharia Business Units".

As of December 31, 2015 and 2014, based on the above Bank Indonesia regulations, based on sharia principle, Bank is required to maintain GWM both in Rupiah and in foreign currencies of 5% and 1%, respectively.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 43).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		77.075		768.435	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	7.508.600	103.506	24.704.067	305.960	United States Dollar
Euro Eropa	753.866	11.351	682.842	10.279	European Euro
Yen Jepang	80.546.495	9.224	99.359.104	10.290	Japanese Yen
Singapore Dollar	149.388	1.458	-	-	Singapore Dollar
China Renminbi	150.255	319	-	-	China Renminbi
		125.858		326.529	
Total		202.933		1.094.964	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.572)		(1.571)	Less allowance for impairment losses
Neto		201.361		1.093.393	Net

b. Berdasarkan bank

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	36.574	715.930	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	29.403	39.497	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	4.142	5.475	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.583	2.507	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Citibank N.A., Jakarta	925	925	Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Jabar Banten Tbk	10	13	PT Bank Jabar Banten Tbk
Lainnya	151	72	Others
	72.788	764.419	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			<u>Related Parties (Note 40)</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.577	2.148	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	876	1.288	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	486	255	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	348	325	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	4.287	4.016	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Standard Chartered Bank, Jakarta	63.608	236.536	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	6.909	44.449	PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG	9.779	8.708	Deutsche Bank AG
Citibank N.A., Jakarta	6.582	8.230	Citibank N.A., Jakarta
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.572	1.571	Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam
PT Bank DBS Indonesia	1.458	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	319	-	PT Bank ICBC Indonesia
	90.227	299.494	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u> <u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.428	13.376
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.203	13.659
	35.631	27.035
Total	202.933	1.094.964
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.572)	(1.571)
Neto	201.361	1.093.393

Bank memiliki giro pada bank lain yang merupakan pihak-pihak berelasi sebesar Rp39.918 dan Rp31.051, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp486 dan Rp255, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Rupiah	0,63%	0,54%
Mata uang asing	0,01%	0,01%

d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Lancar	201.361	1.093.393
Macet	1.572	1.571
Total	202.933	1.094.964
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.572)	(1.571)
Neto	201.361	1.093.393

e. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

b. By bank (continued)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Foreign currencies (continued)</u> <u>Related Parties (Note 40)</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.428	13.376
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.203	13.659
	35.631	27.035
Total	202.933	1.094.964
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.572)	(1.571)
Neto	201.361	1.093.393

As of December 31, 2015 and 2014, the Bank has current accounts with other banks which represent related parties amounting to Rp39,918 and Rp31,051, respectively.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp486 and Rp255, as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	2015	2014
Rupiah	0,63%	0,54%
Foreign currencies	0,01%	0,01%

d. Collectibility

As of December 31, 2015 and 2014, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	2015	2014
Lancar	201.361	1.093.393
Loss	1.572	1.571
Total	202.933	1.094.964
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.572)	(1.571)
Neto	201.361	1.093.393

e. As of December 31, 2015 and 2014, there are no current accounts with other banks which are used as collateral.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>
Saldo awal tahun (Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	1.571
	<u>1</u>
Saldo akhir tahun	<u>1.572</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

- g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

- f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
	2.308	Balance at beginning of year
	<u>(737)</u>	(Reversal of) provision for impairment losses during the year (Note 30)
	<u>1.571</u>	Balance at end of year

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

- g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 43.

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK LAIN**

- a. Berdasarkan mata uang dan jenis

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>
<u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u> <u>Deposit Facility</u> Bank Indonesia	6.596.977
<u>Deposit Facility Syariah</u> Bank Indonesia	932.500
<u>Deposito berjangka Mudharabah</u> PT Bank Muamalat Tbk	150.000
	<u>7.679.477</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u> <u>Deposito berjangka Mudharabah</u> PT Bank BRISyariah	150.000
<u>Interbank call money</u> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.000
	<u>160.000</u>
Total	<u>7.839.477</u>

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS**

- a. Based on currency and type

	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
<u>Rupiah</u> <u>Third Parties</u> <u>Deposit Facility</u> Bank Indonesia	924.855	
<u>Deposit Facility Syariah</u> Bank Indonesia	571.600	
<u>Mudharabah time deposits</u> PT Bank Muamalat Tbk	-	
	<u>1.496.455</u>	
<u>Related Parties (Note 40)</u> <u>Mudharabah time deposits</u> PT Bank BRISyariah	-	
<u>Interbank call money</u> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	
	<u>-</u>	
Total	<u>1.496.455</u>	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar dan Rp1.242.500 dan Rp571.600, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

- b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>
≤ 1 bulan	<u>7.839.477</u>	<u>1.496.455</u>

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Rupiah	6,27%	6,51%

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 diklasifikasikan sebagai lancar.

- e. Perubahan cadangan kerugian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>
Saldo awal tahun	50
Pembalikan kerugian penurunan nilai tahun berjalan (Catatan 30)	(50)
Saldo akhir tahun	<u>-</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2014, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- a. Based on currency and type (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp1,242,500 and Rp571,600, respectively.

- b. Based on Remaining Period Until Maturity

- c. Average annual interest rates for placements with Bank Indonesia and other banks:

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2015 and 2014 are classified as current.

- e. The movements in the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:

50	<i>Balance at beginning of year</i>
(50)	<i>Reversal of impairment losses during the year (Note 30)</i>
-	<i>Balance at end of year</i>

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2014, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.

- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 43.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Sertifikat Deposito		148.588
Bank Indonesia	-	
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
	-	148.588
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Sertifikat Bank Indonesia	815.977	2.250.227
Sertifikat Deposito		
Bank Indonesia	294.714	2.355.019
Obligasi		
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Seri B 2010	-	10.065
PT Bank Permata Tbk		
Tahap I A	-	9.998
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Tahap I Seri C 2013	29.911	9.785
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Tahap II Seri C 2015	46.454	-
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Tahap II Seri A 2015	9.992	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Tahap I Seri B 2011	9.911	-
PT Berlian Laju Tanker Tbk		
Seri III 2007	5.018	5.018
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>		
PT Bank Internasional Indonesia		
Tahap IIA 2015	24.433	-
PT Commonwealth Bank		
Tahap VA 2015	24.848	-
Reksadana		
Reksadana EMCO Terproteksi	82.577	82.321
Efek Beragun Aset - KPR		
KIK EBA Danareksa		
BTN 04 - KPR BTN		
(Catatan 10g)	60.000	60.000
	1.403.835	4.782.433

8. SECURITIES

a. Based on currency, type and issuer

	<u>Fair value through profit or loss</u>
	<u>Rupiah</u>
	<u>Third Parties</u>
<i>Deposits Certificates of</i>	
<i>Bank Indonesia</i>	
<i>Bank Indonesia Certificates</i>	
<u>Available-for-sale</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
<i>Bank Indonesia Certificates</i>	
<i>Deposits Certificates of</i>	
<i>Bank Indonesia</i>	
<i>Bonds</i>	
<i>PT Bank Danamon</i>	
<i>Indonesia Tbk</i>	
<i>Seri B 2010</i>	
<i>PT Bank Permata Tbk</i>	
<i>Phase I A</i>	
<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>	
<i>Phase I Series C 2013</i>	
<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>	
<i>Phase II Series C 2015</i>	
<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>	
<i>Phase II Series A 2015</i>	
<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>	
<i>Phase I Series B 2011</i>	
<i>PT Berlian Laju Tanker Tbk</i>	
<i>Seri III 2007</i>	
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	
<i>PT Bank International Indonesia</i>	
<i>Phase IIA 2015</i>	
<i>PT Commonwealth Bank</i>	
<i>Phase VA 2015</i>	
<i>Mutual Funds</i>	
<i>Protected EMCO Mutual Funds</i>	
<i>Residential Mortgage</i>	
<i>Backed Securities</i>	
<i>KIK EBA Danareksa</i>	
<i>BTN 04 - KPR BTN</i>	
<i>(Note 10g)</i>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			<u>Related Parties (Note 40)</u>
EBA-SP SMF-BTN 01			EBA-SP SMF-BTN01
KPR BTN			KPR BTN
(Catatan 10g)	17.000	-	(Note 10g)
Obligasi			Bonds
Lembaga Pembiayaan			Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia			Ekspor Indonesia
Tahap I 2014 Seri C	20.017	20.062	Phase I Series C 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahap I 2009	-	30.945	Phase I 2009
PT Pupuk Indonesia (Persero)			PT Pupuk Indonesia (Persero)
Tahun 2014 Seri A	20.200	20.144	Year 2014 Series A
	57.217	71.151	
	1.461.052	4.853.584	
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held-to-maturity</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi			Bonds
PT Berlian Laju Tanker Tbk			PT Berlian Laju Tanker Tbk
Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000	Sukuk Ijarah 2007
PT UOB Indonesia			PT UOB Indonesia
Tahap I Seri A	8.002	-	Phase I A
Efek Beragunan Aset - KPR			Residential Mortgage
KIK EBA Danareksa			Backed Securities
BTN 05 - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas A1	3.331	5.000	BTN 05 - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class A1
BTN 05 - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	120.000	120.000	BTN 05 - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class B (Note 10g)
BTN 03 - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	60.000	60.000	BTN 03 - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class B (Note 10g)
BTN 01 - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	45.000	45.000	BTN 01 - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class B (Note 10g)
BTN 02 - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	42.200	42.200	BTN 02 - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class B (Note 10g)
SMF II - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	16.538	31.305	SMF II - KPR BTN
KIK EBA Danareksa			Class B (Note 10g)
SMF I - KPR BTN			KIK EBA Danareksa
Kelas B (Catatan 10g)	432	3.012	SMF I - KPR BTN
	297.503	308.517	Class B (Note 10g)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>		
Obligasi		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Syariah Ijarah I 2006	30.000	30.000
Sukuk Ijarah II 2007	28.007	28.011
Sukuk Ijarah IV 2010	3.000	3.000
Medium Term Notes		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Tahap I Seri A 2014	-	25.000
Tahap II 2014	-	25.000
Negotiable Certificate of Deposits		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Seri A 2014	-	24.672
	61.007	135.683
	358.510	444.200
Total	1.819.562	5.446.372
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.001)	(9.402)
Neto	1.807.561	5.436.970

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ December 31, 2014	Total Allowance for impairment losses
<u>Held-to-maturity (continued)</u>		
<u>Rupiah (continued)</u>		
<u>Related Parties (Note 40)</u>		
Bonds		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Syariah Ijarah I 2006	30.000	
Sukuk Ijarah II 2007	28.011	
Sukuk Ijarah IV 2010	3.000	
Medium Term Notes		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Phase I Series A 2014	25.000	
Phase II 2014	25.000	
Negotiable Certificate of Deposits		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Series A 2014	24.672	
	135.683	
	444.200	
Total	5.446.372	
	(9.402)	
Net	5.436.970	

b. Jatuh tempo dan suku bunga

b. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ Bank Indonesia Certificates, Deposits Certificates Of Bank Indonesia	< 1 tahun/ < 1 year	6,75% sampai 6,95%, dan 6,44% sampai 7,18% untuk periode yang berakhir masing- masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014/ 6,75% to 6,95% and 6,44% to 7,18% for years ended December 31, 2015 and 2014, respectively	Rupiah Bank Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri B 2010	Obligasi/Bonds	9 Desember/ December 9, 2015	9,00% tetap/ fixed	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series B 2010

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Bank Permata, Tbk Tahap I A	Obligasi/Bonds	3 Januari/ January 3, 2015	10,00% tetap/ fixed	PT Bank Permata, Tbk Phase I A
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap I Seri C 2013	Obligasi/Bonds	19 Februari/ February 19, 2016	7,40% tetap/ fixed	PT Bank OCBC NISP Tbk Phase I Series C 2013
Tahap II Seri A 2015	Obligasi/Bonds	20 Februari/ February 20, 2016	9,00% tetap/ fixed	Phase II Series A 2015
Tahap II Seri C 2015	Obligasi/Bonds	10 Februari/ February 10, 2018	9,80% tetap/ fixed	Phase II Series C 2015
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I B 2011	Obligasi/Bonds	23 Desember/ December 23, 2016	8,30% tetap/ fixed	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase I B 2011
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	7 Mei/ May 7, 2012	10,30%	Sukuk Ijarah 2007
PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tahap IIA 2015	Negotiable Certificate of Deposits	23 Maret/ March 23, 2016	8,7% tetap/ fixed	PT Bank International Indonesia Tbk Phase IIA 2015
PT Commonwealth Bank Tahap V A 2015	Negotiable Certificate of Deposits	19 Januari/ January 19, 2016	8,75% tetap/ fixed	PT Commonwealth Bank Phase V A 2015
PT EMCO Asset Management Reksadana EMCO Terproteksi	Reksadana/ Mutual Fund	-	-	PT EMCO Asset Management Protected EMCO Mutual Fund
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/Bonds	5 Juni/ June 5, 2017	9,25% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase I Series C 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2009	Obligasi/Bonds	11 Desember/ December 11, 2016	11,85% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I 2009
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	Obligasi/Bonds	8 Juli/ July 8, 2017	9,63% tetap/ fixed	PT Pupuk Indonesia (Persero) Year 2014 Series A
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2014	Medium Term Notes	15 Oktober/ October 15, 2015	8,75% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase I Series A 2014
Tahap II 2014	Medium Term Notes	29 Desember/ December 29, 2015	8,90% tetap/ fixed	Phase II 2014
Seri A 2014	Negotiable Certificate of Deposits	2 Maret/ March 2, 2015	8,00% tetap/ fixed	Series A 2014
PT UOB Indonesia Tahap I Seri A	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2016	8,60% tetap/ fixed	PT UOB Indonesia Phase I Series A

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	21 Juni / June 21, 2016	13,60%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli / July 10, 2017	10,40%	Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	12 Januari / January 12, 2020	12,55%	Sukuk Ijarah IV 2010
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas A1	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 September/ September 7, 2025	10,00%	KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Class A1
EBA-SP SMF – BTN01 KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 Maret 2022/ March 7, 2022	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA-SP-SMF BTN 01 KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 September/ September 7, 2025	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	26 Februari/ February 26, 2022	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 Januari/ January 7, 2023	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	27 Februari/ February 27, 2021	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	27 September/ September 27, 2019	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Desember/ December 10, 2019	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Maret/ March 10, 2018	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Note 10g)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
≤ 1 tahun	38.002	74.672
> 1 tahun ≤ 5 tahun	92.977	137.328
> 5 tahun ≤ 10 tahun	225.531	105.200
> 10 tahun	2.000	127.000
	358.510	444.200

- d. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan Moody's Investor Service adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri B 2010	Obligasi/Bonds	-	idAAA
PT Bank Permata Tbk Tahap I A	Obligasi/Bonds	-	idAAA
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap I Seri C 2013	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap II Seri C 2015	Obligasi/Bonds	idAAA	-
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap II Seri A 2015	Obligasi/Bonds	idAAA	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I Seri B 2011	Obligasi/Bonds	idAAA	-
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	idD	idD
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idD (Sy)	idD (Sy)
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas A1	Efek Beragun Aset-KPR/Residential	idAAA	idAAA
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2009	Obligasi/Bonds	-	idAA+
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	Obligasi/Bonds	AAA(idn)	idAAA
PT UOB Indonesia Tahap I Seri A	Obligasi/Bonds	idAAA	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2014	Medium Term Notes	-	idAAA
Tahap II 2014	Medium Term Notes	-	idAAA
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)

8. SECURITIES (continued)

- c. Remaining period to maturity (held-to-maturity securities)

≤ 1 year
> 1 year ≤ 5 years
> 5 years ≤ 10 years
> 10 years

- d. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia and Moody's Investor Service, are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Lancar	1.750.424	5.384.383
Dalam Perhatian Khusus	42.089	45.888
Kurang Lancar	2.578	1.324
Diragukan	3.669	1.666
Macet	20.802	13.111
Total	1.819.562	5.446.372
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(12.001)	(9.402)
Neto	1.807.561	5.436.970

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Rupiah		
Saldo awal tahun	9.402	8.758
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	2.599	644
Saldo akhir tahun	12.001	9.402

Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

g. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp147.558 dan Rp61.696, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari kenaikan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar nihil dan Rp999, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disajikan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

8. SECURITIES (continued)

e. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Lancar	1.750.424	5.384.383
Dalam Perhatian Khusus	42.089	45.888
Kurang Lancar	2.578	1.324
Diragukan	3.669	1.666
Macet	20.802	13.111
Total	1.819.562	5.446.372
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(12.001)	(9.402)
Neto	1.807.561	5.436.970

f. The movements in the allowance for impairment losses on securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Rupiah		
Saldo awal tahun	9.402	8.758
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	2.599	644
Saldo akhir tahun	12.001	9.402

Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

g. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp147,558 and Rp61,696, for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of securities - net".

h. The Bank unrealized gain - net from the increase in value of fair value through profit or loss securities amounting to nil and Rp999, for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Unrealized gain on changes in fair value of securities - net".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing berkisar dari 94,52% sampai dengan 101,00% dan berkisar dari 96,08% sampai dengan 103,15%.
- j. Bank mengakui kerugian yang belum direalisasi bersih sebesar Rp1.675 dan keuntungan yang belum direalisasi bersih sebesar Rp5.689 dari perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing pada posisi 31 Desember 2015 dan 2014 dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam laporan posisi keuangan.
- k. Mutasi keuntungan/(kerugian) efek-efek tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Saldo awal tahun	5.689	1.760	<i>Balance at beginning of year</i>
Laba yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(4.726)	6.520	<i>Unrealized gain recognized in equity</i>
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	(5.093)	(1.281)	<i>Amount realized to profit or loss</i>
Efek pajak	2.455	(1.310)	<i>Tax effect</i>
Saldo akhir tahun	(1.675)	5.689	<i>Balance at end of year</i>

- l. Terdapat investasi surat - surat berharga dengan pihak - pihak berelasi sebesar Rp118.224 dan Rp206.834, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
- m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.
- n. Efek-efek sejumlah nominal nihil dan Rp550.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19).

8. SECURITIES (continued)

- i. As of December 31, 2015 and 2014, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and available for sale ranging from 94.52% to 101.00% and range from 96.08% to 103.15%, respectively.
- j. The Bank recognized unrealized loss - net of Rp1,675 and unrealized gain - net of Rp5,689 from the changes in fair values of available-for-sale securities as of December 31, 2015 and 2014, which are presented as "unrealized gain on available-for-sale securities and government bonds - net" in the statement of financial position.
- k. Movements in unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities are as follows:

- l. As of December 31, 2015 and 2014, investments in securities with related parties amounted to Rp118,224 and Rp206,834, respectively.
- m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 43.
- n. As of December 31, 2015 and 2014, securities with nominal amounts of nil and Rp550,000, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 19).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

9. GOVERNMENT BONDS

a. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related party</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
ORI 11	20	-	ORI 11
SR 0006	1.203	-	SR 0006
SR 0007	1.514	-	SR 0007
FR 0069	9.724	-	FR 0069
<u>Zero Coupon Bonds</u>			<u>Zero Coupon Bonds</u>
SPNS 08042015	-	248.703	SPNS 08042015
SPN 12150206	-	243.675	SPN 12150206
SPNS 13022015	-	99.354	SPNS 13022015
	12.461	591.732	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDON 2026	6.806	-	INDON 2026
	6.806	-	
	19.267	591.732	
<u>Tersedia untuk dijual</u>			<u>Available-for-sale</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0064	235.542	250.068	FR 0064
FR 0065	117.854	126.008	FR 0065
FR 0062	60.778	64.964	FR 0062
SR 0004	-	10.779	SR 0004
	414.174	451.819	
<u>Zero Coupon Bonds</u>			<u>Zero Coupon Bonds</u>
SPN12160805	68.554	-	SPN12160805
SPN12161015	188.948	-	SPN12161015
	257.502	-	
Tingkat bunga mengambang			Variable interest rate
VR 0031	1.092.263	1.092.836	VR 0031
VR 0023	888.093	893.070	VR 0023
VR 0028	798.793	801.808	VR 0028
VR 0020	-	746.475	VR 0020
VR 0029	710.248	709.640	VR 0029
VR 0027	549.045	552.729	VR 0027
VR 0026	374.261	377.042	VR 0026
VR 0021	-	341.850	VR 0021
VR 0022	26.901	26.993	VR 0022
	4.439.604	5.542.443	
	5.111.280	5.994.262	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Pihak berelasi (lanjutan)</u>		
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
ORI 012	607.461	-
FR 0053	246.327	-
FR 0063	279.240	274.466
FR 0056	214.125	-
FR 0055	139.817	-
FR 0070	124.018	-
FR 0034	69.532	-
FR 0066	33.584	-
FR 0069	12.328	-
ORI 011	198	-
Tingkat Bunga mengambang		
VR 0031	1.123.210	1.122.880
VR 0029	199.725	199.660
Surat Berharga Syariah Negara		
IFR 0002	50.047	50.065
<u>Sukuk Negara</u>		
SR 0007	551	-
SR 0006	198	-
SR 0004	-	5.000
	<u>3.100.361</u>	<u>1.652.071</u>
Total	<u>8.230.908</u>	<u>8.238.065</u>

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Related party (continued)</u>		
<u>Held-to-maturity</u>		
<u>Rupiah</u>		
Fixed interest rate		
ORI 012	-	-
FR0053	-	-
FR 0063	274.466	274.466
FR0056	-	-
FR0055	-	-
FR0070	-	-
FR0034	-	-
FR0066	-	-
FR0069	-	-
ORI 011	-	-
Variable interest rate		
VR 0031	1.122.880	1.122.880
VR 0029	199.660	199.660
Government sharia bond		
IFR 0002	50.065	50.065
<u>Sukuk Negara</u>		
SR 007	-	-
SR 006	-	-
SR 0004	5.000	5.000
	<u>1.652.071</u>	<u>1.652.071</u>
Total	<u>8.238.065</u>	<u>8.238.065</u>

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>		
<u>Tingkat bunga tetap</u>		
<u>Rupiah</u>		
FR 0069	15 April/ April 15, 2019	7,87% tetap/ fixed
ORI 011	15 Oktober/ October 15, 2017	8,50% tetap/ fixed
SR 0006	5 Maret/ March 5, 2017	8,75% tetap/ fixed
SR 0007	11 Maret/ March 11, 2018	8,25% tetap/ fixed
SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
INDON 2026	8 Januari/ January 8, 2026	4,75% tetap/ fixed
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Tingkat bunga tetap</u>		
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed

b. Based on maturity and interest rate

Description	
<u>Fair value through profit or loss</u>	
<u>Fixed interest rate</u>	
<u>Rupiah</u>	
FR 0069	7,87% tetap/ fixed
ORI 011	8,50% tetap/ fixed
SR 0006	8,75% tetap/ fixed
SR 0007	8,25% tetap/ fixed
SPN	Beragam/ Various
<u>United States Dollar</u>	
INDON 2026	4,75% tetap/ fixed
<u>Available-for-sale</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Fixed interest rate</u>	
FR 0062	6,38% tetap/ fixed
FR 0064	6,13% tetap/ fixed
FR 0065	6,63% tetap/ fixed

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
<u>Tingkat bunga mengambang</u>			
VR 0020	25 April/ April 25, 2015	SPN 3 bulan/ months	VR 0020
VR 0021	25 November/ November 25, 2015	SPN 3 bulan/ months	VR 0021
VR 0022	25 Maret/ March 25, 2016	SPN 3 bulan/ months	VR 0022
VR 0023	25 Oktober/ October 25, 2016	SPN 3 bulan/ months	VR 0023
VR 0026	25 Januari/ January 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0026
VR 0027	25 Juli/ July 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0027
VR 0028	25 Agustus/ August 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0028
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
<u>Sukuk Negara</u>			
SR 0004	21 September/ September 21, 2015	6,25% tetap/ fixed	SR 0004
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			
<u>Rupiah</u>			
<u>Tingkat bunga tetap</u>			
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
FR 0034	15 Juni/ June 15, 2021	12,8% tetap/ fixed	FR 0034
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	FR 0053
FR 0055	15 September/ September 15, 2016	7,37% tetap/ fixed	FR 0055
FR 0056	15 September/ September 15, 2016	8,37% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0066	15 Mei/ May 15, 2018	5,25% tetap/ fixed	FR 0066
FR 0069	15 April/ April 15, 2019	7,87% tetap/ fixed	FR 0069
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,37% tetap/ fixed	FR 0070
ORI 011	15 Oktober/ October 15, 2017	8,5% tetap/ fixed	ORI 011
ORI 012	15 Oktober/ October 15, 2018	9% tetap/ fixed	ORI 012
<u>Tingkat bunga mengambang</u>			
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
<u>Surat berharga Syariah Negara</u>			
IFR 0002	15 Agustus/ August 15, 2018	11,95% tetap/ fixed	IFR 0002
<u>Sukuk Negara</u>			
SR 0004	21 September/ September 21, 2015	6,25% tetap/ fixed	SR 0004
SR 0006	5 Maret/ March 5, 2017	8,75% tetap/ fixed	SR 0006
SR 0007	11 Maret/ March 11, 2018	8,25% tetap/ fixed	SR 0007

Obligasi pemerintah sejumlah nominal Rp2.502.315 dan Rp3.910.452, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19).

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Available-for-sale (continued)</u>			
<u>Rupiah (continued)</u>			
<u>Variable interest rate</u>			
VR 0020	25 April/ April 25, 2015	SPN 3 bulan/ months	VR 0020
VR 0021	25 November/ November 25, 2015	SPN 3 bulan/ months	VR 0021
VR 0022	25 Maret/ March 25, 2016	SPN 3 bulan/ months	VR 0022
VR 0023	25 Oktober/ October 25, 2016	SPN 3 bulan/ months	VR 0023
VR 0026	25 Januari/ January 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0026
VR 0027	25 Juli/ July 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0027
VR 0028	25 Agustus/ August 25, 2018	SPN 3 bulan/ months	VR 0028
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
<u>Sukuk Negara</u>			
SR 0004	21 September/ September 21, 2015	6,25% tetap/ fixed	SR 0004
<u>Held-to-maturity</u>			
<u>Rupiah</u>			
<u>Fixed interest rate</u>			
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
FR 0034	15 Juni/ June 15, 2021	12,8% tetap/ fixed	FR 0034
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	FR 0053
FR 0055	15 September/ September 15, 2016	7,37% tetap/ fixed	FR 0055
FR 0056	15 September/ September 15, 2016	8,37% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0066	15 Mei/ May 15, 2018	5,25% tetap/ fixed	FR 0066
FR 0069	15 April/ April 15, 2019	7,87% tetap/ fixed	FR 0069
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,37% tetap/ fixed	FR 0070
ORI 011	15 Oktober/ October 15, 2017	8,5% tetap/ fixed	ORI 011
ORI 012	15 Oktober/ October 15, 2018	9% tetap/ fixed	ORI 012
<u>Variable interest rate</u>			
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
<u>Government Sharia Bond</u>			
IFR 0002	15 Agustus/ August 15, 2018	11,95% tetap/ fixed	IFR 0002
<u>Sukuk Negara</u>			
SR 0004	21 September/ September 21, 2015	6,25% tetap/ fixed	SR 0004
SR 0006	5 Maret/ March 5, 2017	8,75% tetap/ fixed	SR 0006
SR 0007	11 Maret/ March 11, 2018	8,25% tetap/ fixed	SR 0007

As of December 31, 2015 and 2014, government bonds with nominal amounts of Rp2,502,315 and Rp3,910,452, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 19).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Pembayaran kupon obligasi Pemerintah dengan tingkat bunga tetap dan variabel masing-masing dibayarkan tiap semester dan triwulanan.

Obligasi Pemerintah syariah seri SR dan seri IFR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" berkisar dari 71,71% sampai dengan 100,20% dan 76,65% sampai dengan 99,53% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp132.015 dan Rp95.702, yang disajikan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tanggungan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Mutasi keuntungan/kerugian obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Saldo awal tahun	(95.702)	(91.806)	Balance at beginning of year
Rugi yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(53.637)	(9.911)	Unrealized loss recognized in equity
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	5.220	3.537	Amount realized to profit or loss
Efek pajak	12.104	2.478	Tax effect
Saldo akhir tahun	(132.015)	(95.702)	Balance at end of year

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp19.495 dan Rp47.406, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui kerugian yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp193 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan keuntungan yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp5.571 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

Coupon payments of Government bonds with fixed and variable interest rates are payable semi-annually and quarterly, respectively.

SR series and IFR series sharia Government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

The market values of Government bonds classified as fair value through profit or loss and available for sale ranging from 71.71% to 100.20% and 76.65% to 99.53% of nominal amounts as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

As of December 31, 2015 and 2014, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp132,015 and Rp95,702, respectively, which are presented as "Unrealized losses on available-for-sale securities and government bonds net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

Movements in unrealized gain/loss on available-for-sale Government bonds are as follows:

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp19,495 and Rp47,406, for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of government bonds- net".

The Bank recognized unrealized loss - net from the change in value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rp193 for the year ended December 31, 2015 and unrealized gain - net from the change in fair value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rp5,571 for the years ended December 31, 2014, which is presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from change in fair value of government bonds - net".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai *underlying* obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 and 2014, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2015 and 2014, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	91.051.510	75.487.968	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	10.867.610	9.434.206	Non-housing loan
	101.919.120	84.922.174	
Modal kerja	21.286.580	17.116.519	Working capital
Investasi	3.715.351	3.640.253	Investment
Sindikasi	79.268	76.978	Syndicated
Direksi dan karyawan			Directors and employees
- Pihak ketiga	726.285	509.845	Third parties -
- Pihak yang berelasi	5.554	5.508	Related parties -
	127.732.158	106.271.277	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	6.754.551	5.105.186	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	459.259	500.105	Non-housing loan
	7.213.810	5.605.291	
Modal kerja	3.386.033	3.371.785	Working capital
Investasi	623.066	666.409	Investment
Direksi dan karyawan			Directors and employees
- Pihak yang berelasi	737	1.039	Related parties -
	11.223.646	9.644.524	
Total	138.955.804	115.915.801	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.050.578)	(1.570.183)	Less allowance for impairment losses
Neto	136.905.226	114.345.618	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	118.460.879	96.130.622	Property
Perdagangan, restoran, dan hotel	2.197.360	2.583.964	Trading, restaurant and hotel
Konstruksi	2.533.759	2.374.615	Construction
Jasa usaha	1.123.045	932.925	Business service
Jasa-jasa sosial	805.490	662.488	Social service
Manufaktur	280.410	276.059	Manufacturing
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	199.490	246.435	Transportation, warehousing, and communication
Pertanian	129.049	165.682	Farming
Pertambangan	132.932	157.865	Mining
Listrik, gas dan air	25.562	29.981	Electricity, gas and water
Lain-lain*)	1.844.182	2.710.641	Other*)
	<u>127.732.158</u>	<u>106.271.277</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	6.754.873	5.606.331	Property
Jasa usaha	2.595.790	2.570.191	Business service
Konstruksi	1.872.983	1.468.002	Construction
	<u>11.223.646</u>	<u>9.644.524</u>	
Total	138.955.804	115.915.801	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.050.578)	(1.570.183)	Less allowance for impairment losses
Neto	<u>136.905.226</u>	<u>114.345.618</u>	Net

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Individual	604.209	291.427	445.039	107.426	Individual
Kolektif					Collective
Lancar	106.696.332	17.497	86.492.731	17.453	Current
Dalam perhatian khusus	16.245.459	16.015	15.192.696	17.485	Special mention
Kurang lancar	219.943	1.113	298.237	2.844	Substandard
Diragukan	330.050	5.446	418.149	9.349	Doubtful
Macet	3.636.165	1.394.226	3.424.425	1.210.855	Loss
	<u>127.732.158</u>	<u>1.725.724</u>	<u>106.271.277</u>	<u>1.365.412</u>	
<u>Syariah</u>					<u>Sharia</u>
Lancar	10.103.098	42.107	8.715.436	41.794	Current
Dalam perhatian khusus	934.086	146.148	730.313	28.595	Special mention
Kurang lancar	30.548	21.092	39.516	18.491	Substandard
Diragukan	20.402	9.221	24.626	13.546	Doubtful
Macet	135.512	106.286	134.633	102.345	Loss
	<u>11.223.646</u>	<u>324.854</u>	<u>9.644.524</u>	<u>204.771</u>	
Total	<u>138.955.804</u>	<u>2.050.578</u>	<u>115.915.801</u>	<u>1.570.183</u>	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	1.301	963	Housing Loan
Non- kepemilikan rumah	6.365	5.974	Non-housing loan
	7.666	6.937	
Modal Kerja	25.000	122.943	Working capital
Investasi	-	3.394	Investment
	32.666	133.274	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	322	727	Housing Loan
Non- kepemilikan rumah	415	312	Non-housing loan
	737	1.039	
Total	33.403	134.313	Total

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	1.019.682	2.598.761	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	5.179.148	6.011.742	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	18.211.334	13.405.912	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	103.321.994	84.254.862	> 5 years
	127.732.158	106.271.277	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	177.005	357.932	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.375.449	1.327.515	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.718.634	2.729.837	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	6.952.558	5.229.240	> 5 years
	11.223.646	9.644.524	
Total	138.955.804	115.915.801	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.050.578)	(1.570.183)	Allowance for impairment losses
Neto	136.905.226	114.345.618	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	9.425.319	9.335.900	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	13.629.601	5.531.840	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	9.029.759	12.265.127	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	95.647.479	79.138.410	> 5 years
	<u>127.732.158</u>	<u>106.271.277</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	289.557	1.707.574	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.910.944	1.127.823	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.845.264	2.145.708	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	6.177.881	4.663.419	> 5 years
	<u>11.223.646</u>	<u>9.644.524</u>	
Total	138.955.804	115.915.801	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.050.578)	(1.570.183)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>136.905.226</u>	<u>114.345.618</u>	Net

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Piutang <i>Murabahah</i>	6.634.592	5.177.394	<i>Murabahah receivables</i>
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.243.282	1.579.366	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2.510.012	2.143.268	<i>Musyarakah financing</i>
Piutang <i>Istishna</i>	563.720	428.780	<i>Istishna receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	272.040	315.716	<i>Funds of qardh</i>
Total	11.223.646	9.644.524	Total
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(324.854)	(204.771)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>10.898.792</u>	<u>9.439.753</u>	Net

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 12,65% dan 12,01% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 12,02% dan 12,13% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 12.65% and 12.01% for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 12.02% and 12.13% for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

iii. Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit yang berkaitan dengan perumahan. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, KPR masing-masing sebesar Rp2.620.279 dan Rp6.555.181 telah dijadikan jaminan pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi) dan PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 21).

iii. Consumer loans consist of housing loans and other housing-related loans. As of December 31, 2015 and 2014, housing loans amounted to Rp2,620,279 and Rp6,555,181, respectively, are used as collateral for loans obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related party) and PT Bank Central Asia Tbk (Note 21).

iv. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 15, 16 dan 17).

iv. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 15, 16 and 17).

v. Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas tagihan Kredit Kepemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFI-KPR BTN (KIK-DSMF-I) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 80 tanggal 16 Januari 2009 dan Akta cession No. 70 tanggal 11 Februari 2009.

v. The Bank conducted the first securitization of its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMF I-KPR BTN (KIK-DSMF-I) based on sale-purchase deed No. 80 dated January 16, 2009 and Deed of Assignment No. 70 dated February 11, 2009.

vi. KIK-DSMF-I dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 79 tanggal 16 Januari 2009.

vi. KIK-DSMF-I was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 79 dated January 16, 2009.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp111.111 yang terdiri dari 5.060 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal 7 Januari 2009 (tanggal *cut off* final).

On January 7, 2009 (final cut-off date), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling Rp111,111 and consisting of 5,060 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah tanggal 7 Desember 2015. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to December 7, 2015. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DSMF-I menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DSMF-1 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai Rp100.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 13% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Maret 2018. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragunan aset dari PT Moody's Indonesia yaitu *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)*. Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-647/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp100,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with an annual fixed interest rate of 13% and due on March 10, 2018. The Class A ABS were rated *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)* by PT Moody's Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-I became effective based on Letter No. S-647/BL/2009 dated January 29, 2009 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp11.111 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2018. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 Februari 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with principal value of Rp11,111 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on March 10, 2018. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right to the residual cash flows based on the payment priorities in each interest payment period. On February 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statements of financial position (Note 8).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp111.111 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp111,111 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 114/PKS/DIM/08 tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 tanggal 26 Desember 2008. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-I dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-I yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 114/PKS/DIM/08 dated December 4, 2008 which was last amended by the second Amendment of Service Provider Agreement No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 dated December 26, 2008, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-I and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-I, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off* final (7 Januari 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (January 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vii. Bank telah melakukan sekuritisasi kedua atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit.

- vii. The Bank conducted the second securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support.

Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 135 tanggal 19 Oktober 2009 dan Akta cession No. 33 tanggal 10 November 2009. KIK-DSMF-II dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 13 tanggal 5 Agustus 2009 dan diamandemen dengan akta No. 134 tanggal 19 Oktober 2009. Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp391.305 yang terdiri dari 15.114 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal 7 Oktober 2009 (tanggal *cut off* final).

The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) based on sale-purchase deed No. 135 dated October 19, 2009 and Deed of Assignment No. 33 dated November 10, 2009. KIK-DSMF-II was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 13 dated August 5, 2009, which was amended by deed No. 134 dated October 19, 2009. On the final cut-off date (October 7, 2009), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp391,305 and consisting of 15,114 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Oktober 2017. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to October 7, 2017. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer

Selanjutnya, KIK-DSMF-II menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DSMF-II issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) EBA Kelas A senilai Rp360.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA.

- (i) Class A ABS amounting to Rp360,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 11% and due on December 10, 2019. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-9604/BL/2009 tanggal 30 Oktober 2009; dan

On October 30, 2009, the Registration Statement Letter from KIK-DSMF-II became effective based on Letter No. S-9604/BL/2009 dated October 30, 2009 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp31.305 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga.

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp31,305 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on December 10, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period.

Pada tanggal 10 November 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

On November 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp391.305 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp391,305 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 56/PKS/DIR/2009 tanggal 7 Agustus 2009.

Based on the Service Provider Agreement No. 56/PKS/DIR/2009 dated August 7, 2009, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-II dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-II yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-II and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-II, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (7 Oktober 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

viii. Bank telah melakukan sekuritisasi ketiga atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN01-KPR BTN (KIK-DBTN-01) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 158 tanggal 16 Desember 2010 dan Akta cessione No. 33 tanggal 27 Desember 2010. KIK-DBTN-01 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 118 tanggal 15 Desember 2010.

viii. The Bank conducted the third securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN01-KPR BTN (KIK-DBTN-01) based on sale-purchase deed No. 158 dated December 16, 2010 and Deed of Assignment No. 33 dated December 27, 2010. KIK-DBTN-01 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 118 dated December 15, 2010.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp750.000 yang terdiri dari 33.663 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off* final (12 Desember 2010). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 27 September 2019. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The pool of receivables, which represents selected receivables totaling to Rp750,000 and consisting of 33,663 debtors, were sold and transferred at their total principal values as of final cut-off date (December 12, 2010). The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to September 27, 2019. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-01 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-01 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai Rp688.500 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 September 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DBTN-01 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-11491/BL/2010 tanggal 23 Desember 2010; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp688,500, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 9.25% and due on September 27, 2019. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-01 dated October 30, 2009 became effective based on Letter No. S-11491/BL/2010 dated December 23, 2010 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp61.500 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga.

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp61,500 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on September 27, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2010, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh akuntan independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp750.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 47/PKS/DIR/2010 tanggal 15 November 2010. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-01 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-01 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off* final (12 Desember 2010), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Other significant information (continued)

On December 27, 2010, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp750,000 from its statement of financial position.

Based on the Service Provider Agreement No. 47/PKS/DIR/2010 dated November 15, 2010, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-01 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-01, which represents the ABS holders.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (December 12, 2010), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

ix. Bank telah melakukan sekuritisasi keempat atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN02-KPR BTN (KIK-DBTN-02) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 37 tanggal 25 Oktober 2011 dan Akta cession No. 31 tanggal 16 November 2011.

ix. The Bank conducted the fourth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN02-KPR BTN (KIK-DBTN-02) based on sale-purchase deed No. 37 dated October 25, 2011 and Deed of Assignment No. 31 dated November 16, 2011.

KIK-DBTN-02 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 15 tanggal 15 September 2011.

KIK-DBTN-02 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 15 dated September 15, 2011.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp703.450 yang terdiri dari 19.810 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off* final (19 Oktober 2011).

On the final cut-off date (October 19, 2011), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp703,450 and consisting of 19,810 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 13,58% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 1 Februari 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 13.58% with a maximum maturity of up to February 1, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-02 menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-02 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

(i) EBA Kelas A senilai Rp645.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2021. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 3 November 2011, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DBTN-02 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-11916/BL/2010 tanggal 3 November 2011; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp645,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 8.75% and due on February 27, 2021. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-02 dated November 3, 2011 became effective based on Letter No. S-11916/BL/2010 dated November 3, 2011 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp58.450 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 16 November 2011, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp58,450 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on February 27, 2021. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On November 16, 2011, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh akuntan independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp703.450 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp703,450 from its statement of financial position.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 09/PKS/TRSD/2011 tanggal 21 Oktober 2011. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-02 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-02 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 09/PKS/TRSD/2011 dated October 21, 2011, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-02 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-02, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (19 Oktober 2011), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA Kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 19, 2011), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- x. Bank telah melakukan sekuritisasi kelima, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN03-KPR BTN (KIK-DBTN-03) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 39 tanggal 14 November 2012 dan Akta cession No. 36 tanggal 12 Desember 2012.

- x. The Bank conducted the fifth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN03-KPR BTN (KIK-DBTN-03) based on sale-purchase deed No. 39 dated November 14, 2012 and Deed of Assignment No. 36 dated December 12, 2012.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

KIK-DBTN-03 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 38 tanggal 14 November 2012.

KIK-DBTN-03 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 38 dated November 14, 2012.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari 25.842 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off* final (8 November 2012).

On the final cut-off date (November 8, 2012), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,000,000 and consisting of 25,842 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 11,85% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Januari 2023. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 11.85% with a maximum maturity of up to January 7, 2023. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-03 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-03 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) EBA Kelas A senilai Rp925.000, yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 7 Januari 2023. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 5 Desember 2012, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-03 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-13867/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012; dan

- (i) Class A ABS amounting to Rp925,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 7.75% and due on January 7, 2023. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-03 dated December 5, 2012 became effective based on Letter No. S-13867/BL/2012 dated December 5, 2012 of the Chairman of Bapepam-LK; and*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- (ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp75.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2023. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 12 Desember 2012, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

- (ii) Class B ABS with a principal value of Rp75,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on January 7, 2023. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 12, 2012, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.000.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,000,000 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 09/PKS/TRSD/2012 tanggal 14 November 2012. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-03 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-03 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 09/PKS/TRSD/2012 dated November 14, 2012, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-03 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-03, which represents the ABS holders.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off final* (8 November 2012), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (November 8, 2012), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- xi. Bank telah melakukan sekuritisasi keenam, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN04-KPR BTN (KIK-DBTN-04) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 4 tanggal 4 Desember 2013 dan Akta cession No. 40 tanggal 20 Desember 2013.

- xi. The Bank conducted the sixth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN04-KPR BTN (KIK-DBTN-04) based on sale-purchase deed No. 4 dated December 4, 2013 and Deed of Assignment No. 40 dated December 20, 2013.

KIK-DBTN-04 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 15 tanggal 8 Oktober 2013.

KIK-DBTN-04 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 15 dated October 8, 2013.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari 34.452 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off final* (2 Desember 2013).

On the final cut-off date (December 2, 2013), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,000,000 and consisting of 34,452 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12,48% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 26 Agustus 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 12.48% with a maximum maturity of up to August 26, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-04 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-04 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai total Rp928.000,- yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A1 sebesar Rp403.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun dan A2 sebesar Rp525.000 sebesar 9,50% per tahun dengan tanggal jatuh tempo final pada 26 Februari 2022. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun asset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 4 Desember 2013, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-04 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-433/D.04/2013 tanggal 17 Desember 2013; dan

(i) Class A ABS amounted to Rp928,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A1 in amount of Rp403,000 ABS with an annual fixed interest rate of 8.90% and A2 in amount of Rp525,000 ABS with annual fixed interest rate of 9.50% and due on February 26, 2022. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-04 dated December 4, 2013 became effective based on Letter No. S-433/D.04/2013 dated December 17, 2013 of OJK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp72.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo final pada tanggal 26 Februari 2022. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga.

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp72,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on February 26, 2022. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Pada tanggal 20 Desember 2013, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

On December 20, 2013, Bank purchased and recorded Class B ABS as available-for-sale securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.000.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,000,000 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 12/PKS/IBD/2013 tanggal 4 Desember 2013. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-04 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-04 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 12/PKS/IBD/2013 dated December 4, 2013, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from the principal debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-04 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-04, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off final* (2 Desember 2013), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (December 2, 2013), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xii. Bank telah melakukan sekuritisasi ketujuh, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN05-KPR BTN (KIK-DBTN-05) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 32 tanggal 21 Oktober 2014 dan Akta cession No. 2 tanggal 2 Desember 2014.

- xii. The Bank conducted the seventh securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN05-KPR BTN (KIK-DBTN-05) based on sale-purchase deed No. 32 dated October 21, 2014 and Deed of Assignment No. 2 dated December 2, 2014.

KIK-DBTN-05 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 30 tanggal 23 Juli 2014.

KIK-DBTN-05 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 30 dated July 23, 2014.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari 33.173 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal *cut-off final* (28 November 2014).

On the final cut-off date (November 28, 2014), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,500,000 and consisting of 33,173 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12,48% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 26 Agustus 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 12.48% with a maximum maturity of up to August 26, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-05 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-05 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

(i) EBA Kelas A senilai total Rp1.371.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A1 sebesar Rp723.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun dan A2 sebesar Rp647.500 sebesar 10,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo final pada 7 September 2025. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun asset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 17 Oktober 2014, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-05 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-485/D.04/2014 tanggal 26 November 2014; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp1,371,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A1 ABS amounted to Rp723,500 with an annual fixed interest rate of 10% and A2 ABS amounted to Rp647,500 with annual fixed interest rate of 10.25% and due on September 7, 2025. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-05 dated October 17, 2014 became effective based on Letter No. S-485/D.04/2014 dated November 26, 2014 of OJK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp129.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo final pada tanggal 7 September 2025. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 1 Desember 2014, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp129,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on September 7, 2025. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 1, 2014, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.500.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,500,000 from its statement of financial position.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 017/PIS/KIK-DBTN05/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-05 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-05 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 017/PIS/KIK-DBTN05/VII/2014 dated July 23, 2014, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-05 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-05, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off final* (14 Oktober 2014), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 14, 2014), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

xiii. Bank telah melakukan sekuritisasi kedelapan atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai Penerbit, Arranger (penata transaksi) dan Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 21 tanggal 11 November 2015 dan Akta Cessie No. 52 tanggal 27 November 2015.

xiii. The Bank has conducted the eight securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 21 dated November 11, 2015 and Deed of Assignment No. 52 dated November 27, 2015.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Kemudian PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menerbitkan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) SMF-BTN01 berdasarkan Akta No. 20 tanggal 11 November 2015.

SMF-BTN01 was established by PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) based on deed No. 20 dated November 11, 2015.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut merupakan kumpulan tagihan terseleksi sebesar Rp200.000 dan terdiri dari 6.347 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off* final (2 November 2015). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 13,5% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah tanggal 7 September 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The principal amount of the receivables that is being sold and exchanged were a pool of selected receivables with the total amount of Rp200,000 and consists of 6,347 debtors with the price of the total receivables during the final cut off date (2 November 2015). The interest rate for the debtors during the cutoff date is 13.5% with final maturity of September 7, 2020. After the sell off and exchange the credit risk ultimately becomes the buyer's risk.

Selanjutnya PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) menerbitkan Efek Beragun Aset dalam bentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam dua kelas yaitu:

Further, PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) issued Asset-Backed Securities (ABS) in two types or classes as follows:

(i) EBA-SP Kelas A senilai Rp181.600 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA-SP Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% per tahun dan tanggal jatuh tempo final 7 Maret 2022. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA.

(i) Class A ABS-SP amounting to Rp181.600, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS-SP with an annual fixed interest rate of 8.6% and due on March 7, 2022. The Class A ABS-SP were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada tanggal 20 November 2015, Surat Pernyataan Pendaftaran dari PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-554/D.04/2015 tanggal 20 November 2015; dan

On November 20, 2015, the Registration Statement Letter from PT. Sarana Multi Griya Finansial (Persero) became effective based on Letter No. S-554/D.04/2015 dated November 20, 2015 from Otoritas Jasa Keuangan (OJK); and

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- (ii) EBA-SP Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp18.400 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA-SP Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo final pada tanggal 7 Maret 2022. EBA-SP Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA-SP Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga.

- (ii) Class B ABS-SP with a principal value of Rp18,400 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS-SP and will mature on March 7, 2022. The Class B ABS-SP are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS-SP holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period.

Pada tanggal 27 November 2015, Bank telah membeli dan mencatat EBA-SP Kelas B sebagai efek yang tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

On November 27, 2015, the Bank purchased and recorded Class B ABS-SP as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp200.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp200,000 from its statement of financial position.

Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the PT Bank Rakyat Indonesia (persero) and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of EBA-SP, which represents the ABS holders.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA-SP kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (2 November 2015), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA-SP Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA-SP kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A EBA-SP pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (November 2, 2015), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A EBA-SP holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A EBA-SP including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

xiv. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar 4,95% dan 6,31%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 10 tahun. Kredit ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp94.580 pada tanggal 31 Desember 2015 (Catatan 13).

xiv. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 4.95% and 6.31%, for the years ended December 31, 2015 and 2014, with term ranging from 1 to 10 years. The loans are settled through monthly payroll deductions. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp94,580 as of December 31, 2015 (Note 13).

xv. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp33.403 dan Rp134.313 (Catatan 40). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 0,02% dan 0,12%.

xv. As of December 31, 2015 and 2014, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp33,403 and Rp134,313, respectively (Note 40). As of December 31, 2015 and 2014, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 0.02% and 0.12%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xvi. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

xvi. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Saldo awal tahun	1.570.183	1.137.177	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	898.718	775.613	Provision for impairment losses during the year (Note 30)
Penerapan awal PSAK 102 (revisi 2013) (Catatan 49)	-	(6.392)	Implementation of SFAS No.102 (revised 2013) (Note 49)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	16.276	14.795	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(434.599)	(351.010)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	2.050.578	1.570.183	Balance at the end of year

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp324.854 dan Rp204.771, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

As of December 31, 2015 and 2014, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/ receivables amounting to Rp324,854 and Rp204,771, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

xvii. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (credit limit) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xvii. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xviii. Dalam laporan Bank ke OJK disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

xviii. Based on the report submitted by the Bank to OJK as of December 31, 2015 and 2014, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

xix. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *net*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

xix. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	219.944	30.548	298.237	39.516	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	338.138	20.402	428.994	24.626	
Macet	4.008.666	135.512	3.724.282	134.633	
	4.566.748	186.462	4.451.513	198.775	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(1.683.153)	(136.598)	(1.313.631)	(134.382)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	2.883.595	49.864	3.137.882	64.393	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	127.732.158	11.223.646	106.271.277	9.644.524	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Gross NPL/NPF)	3,58%	1,66%	4,19%	2,06%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Net NPL/NPF)	2,26%	0,44%	2,95%	0,67%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables (Net NPL/NPF)

NPL/NPF neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

Rasio NPL/NPFGross (konvensional dan syariah) adalah 3,42% dan 4,01% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The Gross NPL/NPF Ratio (conventional and sharia) is 3.42% and 4.01% as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

Rasio NPL/NPF neto (konvensional dan syariah) adalah 2,11% dan 2,76% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The net NPL/NPF Ratio (conventional and sharia) is 2.11% and 2.76% as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xx. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

xx. *Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:*

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	3.440.965	3.438.750	Property
Konstruksi	350.980	394.420	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	280.382	225.182	Trading, restaurant and hotel
Jasa Usaha	133.286	100.401	Business service
Manufaktur	70.169	57.726	Manufacturing
Pertanian	63.184	34.649	Farming
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	54.454	32.572	Transportation, warehousing, and communication
Pertambangan	43.965	48.900	Mining
Jasa-jasa sosial	35.167	30.315	Social service
Listrik, gas dan air	120	4.062	Electricity, gas and water
Lain-lain*)	94.076	84.536	Other*)
	4.566.748	4.451.513	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Jasa usaha	103.105	102.992	Business service
Perumahan	55.301	67.504	Property
Konstruksi	28.056	28.279	Construction
	186.462	198.775	
Total	4.753.210	4.650.288	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.819.751)	(1.448.013)	Less allowance for impairment losses
Neto	2.933.459	3.202.275	Net

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

xxi. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai kredit *non-performing* terhadap total kredit *non-performing* adalah 38,28% dan 31,14% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

xxi. The ratio of NPL's allowance for impairment losses to total NPLs are 38.28% and 31.14% as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

xxii. Rasio kredit *non-performing* terhadap total aset keuangan adalah 2,79% dan 3,24% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

xxii. The ratio of NPLs to total financial assets are 2.79% and 3.24% as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

xxiii. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,79% dan 1,50% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

xxiii. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.79% and 1.50% as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

xxiv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 6,00% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

xxiv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2015 and 2014, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 6.00% for each, respectively, of the total syndicated loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xxv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xxv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2015

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	874.401	1.985.540	57.754	22.169	326.739	3.266.603	Property
Konstruksi	338.012	126.081	-	-	18.878	482.971	Construction
Jasa usaha	101.488	122.413	38	6.619	4.851	235.409	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	54.761	34.722	-	-	17.765	107.248	Trading, restaurant and hotel
Listrik, gas dan air	3.713	-	-	-	-	3.713	Electricity, gas and water
Pertambangan	-	-	-	-	14.364	14.364	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3.106	3.105	-	-	-	6.211	Transportation, warehousing and communication
Jasa-jasa sosial	12.836	17.063	-	-	8	29.907	Social services
Pertanian	113	-	13	-	1.941	2.067	Farming
Manufaktur	5.680	3.394	-	-	290	9.364	Manufacturing
Lain-lain*)	1.120	3.713	326	10	2.347	7.516	Other*)
Total	1.395.230	2.296.031	58.131	28.798	387.183	4.165.373	Total

31 Desember/December 31, 2014

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	329.674	381.982	22.531	11.011	381.031	1.126.229	Property
Konstruksi	58.813	19.942	1.398	-	20.556	100.709	Construction
Jasa usaha	15.978	37.791	-	-	1.863	55.632	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	10.213	17.621	801	226	11.155	40.016	Trading, restaurant and hotel
Listrik, gas dan air	5.841	-	-	-	4.000	9.841	Electricity, gas and water
Pertambangan	-	7.263	-	-	18	7.281	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	4.830	-	-	-	4.830	Transportation, warehousing and communication
Jasa-jasa sosial	-	3.949	-	-	8	3.957	Social services
Pertanian	209	171	-	-	1.941	2.321	Farming
Manufaktur	982	232	-	-	-	1.214	Manufacturing
Lain-lain*)	521	660	22	-	2.214	3.417	Other*)
Total	422.231	474.441	24.752	11.237	422.786	1.355.447	Total

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

xxvi. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank memiliki saldo kredit yang dihapusbukukan masing-masing sebesar Rp1.252.630 dan Rp1.045.303. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit tersebut. Ikhtisar mutasi kredit hapus buku adalah sebagai berikut:

xxvi. The Bank has loans written-off as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp1,252,630 and Rp1,045,303, respectively. The Bank continues to pursue these loans for collection. The summary of the movements of the loans written-off is as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Saldo awal tahun	1.045.303	896.666	Balance at beginning of year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	434.599	351.010	Write-off during the current year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(227.272)	(202.373)	Recovery of loans written-off
Saldo akhir tahun	1.252.630	1.045.303	Balance at the end of year

xxvii. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.583.369 dan Rp2.457.582, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

xxvii. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Bank Indonesia amounted to Rp2,583,369 and Rp2,457,582 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 43.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality financial assets are disclosed in Note 43.

11. ASET TETAP

11. PREMISES AND EQUIPMENT

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2015					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya</u>					<u>Cost</u>
Tanah	537.974	286	701	537.559	Land
Bangunan	991.617	60.698	568	1.051.747	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.448.684	151.407	24.850	1.575.241	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	2.978.275	212.391	26.119	3.164.547	
Aset dalam penyelesaian	22.607	54.797	4.664	72.740	Constructions in progress
	3.000.882	267.188	30.783	3.237.287	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	341.596	50.653	68	392.181	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.170.903	145.705	24.903	1.291.705	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	1.512.499	196.358	24.971	1.683.886	
Nilai Buku Neto	1.488.383			1.553.401	Net Book Value

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

		31 Desember/December 31, 2014				
		Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	Cost
<u>Biaya</u>						<u>Land</u>
Tanah		534.079	4.583	688	537.974	
Bangunan		871.394	120.584	361	991.617	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor		1.374.755	97.149	23.220	1.448.684	Office furniture, fixtures and motor vehicles
		2.780.228	222.316	24.269	2.978.275	
Aset dalam penyelesaian		53.523	16.068	46.984	22.607	Constructions in progress
		2.833.751	238.384	71.253	3.000.882	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan		296.077	45.864	345	341.596	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor		1.014.950	179.877	23.924	1.170.903	Office furniture, fixtures and motor vehicles
		1.311.027	225.741	24.269	1.512.499	
Nilai Buku Neto		1.522.724			1.488.383	Net Book Value

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp196.358 dan Rp225.741 (Catatan 31).

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp196,358 and Rp225,741, for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively (Note 31).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp352.749 dan Rp274.704 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Tidak diaudit).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp352,749 and Rp274,704 as of December 31, 2015 and 2014, respectively (Unaudited).

Penilaian nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Bank menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena dianggap sebagai estimasi terbaik untuk mencerminkan nilai wajar. NJOP tanah dan bangunan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2015 masing-masing bernilai Rp1.173.295 dan Rp491.857, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing bernilai Rp1.022.120 dan Rp452.721. Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan tercatatnya.

Valuation of landrights and buildings owned by Bank are using taxable value, because it is considered as the best estimation to reflect the fair value. Taxable value of landrights and buildings owned by Bank on December 31, 2015 is amounted to Rp1,173,295 and Rp491,857, respectively, while on December 31, 2014 is amounted to Rp1,022,120 and Rp452,721, respectively. Other than landrights and building there are no significant difference between the fair value of the asset and its carrying value.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Landrights is consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.495.418 dan Rp1.940.370.

Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp2,495,418 and Rp1,940,370, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berkisar antara 60,00% sampai dengan 75,00%.

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2015 and 2014 is approximately 60.00% to 75.00%.

12. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2015
Kredit yang diberikan	1.443.799
Obligasi pemerintah	94.426
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	10.264
Total	1.548.489

12. INTERESTS RECEIVABLE

	31 Desember/ December 31, 2014	
	1.088.481	<i>Loans</i>
	78.976	<i>Government bonds</i>
	16.032	<i>Securities and placement with other Banks</i>
Total	1.183.489	Total

13. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2015
Tagihan kepada pihak ketiga	643.671
Biaya dibayar di muka	457.543
Uang muka pajak (Catatan 35)	210.261
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 10g)	94.580
Agunan yang diambil alih	77.591
Aset <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	2.800
Lainnya	67.153
Total	1.553.599

13. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2014	
	565.705	<i>Third party receivables</i>
	357.118	<i>Prepaid expenses</i>
	40.391	<i>Prepaid taxes (Note 35)</i>
	-	<i>Deferred expense for employee loan (Note 10g)</i>
	-	<i>Foreclosed collateral</i>
	7.530	<i>Istishna assets in progress</i>
	37.245	<i>Others</i>
Total	1.007.989	Total

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai pembayaran gaji, tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, penagihan angsuran KPR dan tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM bersama dan PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia regarding payroll payments, receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, receiving KPR's installments and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama and receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Kewajiban kepada pihak ketiga	1.566.454	1.609.899	<i>Third party payables</i>
Hutang pajak			<i>Taxes payable</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 4 (2)	80.272	64.671	<i>Article (4) 2</i>
Pasal 21	28.244	16.640	<i>Article 21</i>
Pasal 29 (Catatan 35)	242.013	105.943	<i>Article 29 (Note 35)</i>
Pajak pertambahan nilai	7.647	2.455	<i>Value added tax</i>
Bagi hasil yang belum dibagikan	16.665	17.778	<i>Undistributed profit sharing</i>
Deposito berjangka jatuh tempo	7.066	7.982	<i>Matured time deposits</i>
Bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah	4.415	3.172	<i>Interest on time deposits not collected by customers</i>
Lainnya	8.013	7.267	<i>Others</i>
Total	1.960.789	1.835.807	Total

14. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

15. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
Rupiah		8.705.884		6.958.648	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	1.024.296	14.120	2.595.184	32.141	<i>United States Dollar</i>
		8.720.004		6.990.789	
Pihak berelasi (Catatan 40)					<i>Related parties (Note 40)</i>
Rupiah		22.648.250		16.234.577	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	13.701	189	15.926.682	197.252	<i>United States Dollar</i>
		22.648.439		16.431.829	
Total		31.368.443		23.422.618	Total

This account consists of:

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp2.216.283 dan Rp1.421.418

As of December 31, 2015 and 2014, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounted to Rp2,216,283 and Rp1,421,418.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro Rupiah adalah sebesar 2,40% dan 2,56% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro Dollar Amerika Serikat adalah sebesar 0,00% dan 0,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 2.40% and 2.56% for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 0.00% and 0.00% for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar nihil dan Rp350 (Catatan 10).

Demand deposits amounted to Nil and Rp350 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. TABUNGAN

	31 Desember/ December 31, 2015
<u>Rupiah</u>	
Tabungan Batara	29.402.734
Tabungan Batara <i>Mudharabah</i>	886.138
Tabungan Batara <i>Wadiah</i>	468.809
Total	30.757.681

16. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2014	
		<u>Rupiah</u>
	25.230.736	<i>Batara savings deposits</i>
	621.747	<i>Batara Mudharabah savings deposits</i>
	315.431	<i>Batara Wadiah savings deposits</i>
Total	26.167.914	Total

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.354.947 dan Rp937.178.

As of December 31, 2015 and 2014, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,354,947 and Rp937,178.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan sebesar 4,08% dan 3,73% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The average annual interest rates for savings deposits are 4.08% and 3.73%, for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp322.799 dan Rp251.707 (Catatan 10).

Savings deposits amounted to Rp322,799 and Rp251,707 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

Tabungan Batara dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp72.654 dan Rp67.975 (Catatan 40).

As of December 31, 2015 and 2014, Batara savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp72,654 and Rp67,975, respectively (Note 40).

Tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp3.938 dan Rp2.988 (Catatan 40).

Wadiah and mudharabah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp3,938 and Rp2,988, respectively (Note 40).

17. DEPOSITO BERJANGKA

- a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

17. TIME DEPOSITS

- a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	Suku Bunga Rata-rata Per Tahun (%)/ Average Annual Interest Rate (%)		
	2015	2014	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
1 bulan	6,19%	6,18%	1 month
3 bulan	6,75%	6,84%	3 months
6 bulan	6,73%	6,74%	6 months
12 bulan	6,91%	6,87%	12 months
24 bulan	7,09%	6,44%	24 months
Dolar Amerika Serikat	0,05%	0,05%	United States Dollar

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

17. TIME DEPOSITS (continued)

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu:

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
1 bulan		34.442.582		27.477.500	1 month
3 bulan		14.792.331		14.869.297	3 months
6 bulan		3.600.883		2.342.478	6 months
12 bulan		4.258.867		5.387.525	12 months
24 bulan		8.454.624		6.779.143	24 months
		<u>65.549.287</u>		<u>56.855.943</u>	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
1 bulan	2.357.930	32.504	1.926.080	23.855	1 month
3 bulan	26.246	362	19.456	241	3 months
12 bulan	28.538	393	8.538	106	12 months
		<u>33.259</u>		<u>24.202</u>	
Total		<u>65.582.546</u>		<u>56.880.145</u>	Total

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	40.000.459	34.165.969	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	10.854.665	11.520.038	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	4.809.151	3.245.347	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	7.334.495	1.156.358	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	2.550.517	6.768.231	> 12 months ≤ 24 months
	<u>65.549.287</u>	<u>56.855.943</u>	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
≤ 1 bulan	32.504	23.855	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	362	241	> 1 month ≤ 3 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	393	106	> 6 months ≤ 12 months
	<u>33.259</u>	<u>24.202</u>	
Total	<u>65.582.546</u>	<u>56.880.145</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp7.533.306 dan Rp6.388.861.

As of December 31, 2015 and 2014, time deposits based on sharia banking principles amounted to Rp7,533,306 and Rp6,388,861, respectively.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.143.680 dan Rp812.912 (Catatan 10).

As of December 31, 2015 and 2014, time deposits amounted to Rp1,143,680 and Rp812,912, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp34.545.033 dan Rp31.086.000 (Catatan 40).

Deposito berjangka Mudharabah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp4.044.967 dan Rp3.698.661 (Catatan 40).

17. TIME DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp34,545,033 and Rp31,086,000, respectively (Note 40).

As of December 31, 2015 and 2014, Mudharabah time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp4,044,967 and Rp3,698,661, respectively (Note 40).

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2015	2014	
Giro	1,51%	0,86%	Demand Deposit
Deposito	9,09%	7,24%	Time Deposits

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

31 Desember/December 31, 2015						
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total	
<u>Rupiah</u>						<u>Rupiah</u>
Deposito	1.156.527	547.342	250	400	1.704.519	Time deposits
Giro	14.016	-	-	-	14.016	Demand deposits
Tabungan	2.663	-	-	-	2.663	Savings deposits
Total	1.173.206	547.342	250	400	1.721.198	Total
31 Desember/December 31, 2014						
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total	
<u>Rupiah</u>						<u>Rupiah</u>
Deposito	710.392	450.550	960	1.215	1.163.117	Time deposits
Giro	13.472	-	-	-	13.472	Demand deposits
Tabungan	2.680	-	-	-	2.680	Savings deposits
Total	726.544	450.550	960	1.215	1.179.269	Total

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.484 dan Rp3.299 (Catatan 40).

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan (Catatan 10).

As of December 31, 2015 and 2014, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to Rp1,484 and Rp3,299 (Note 40).

As of December 31, 2015 and 2014, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral (Note 10).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

**19. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS**

The details of securities sold under repurchase agreements are as follows:

31 Desember/December 31, 2015

Nasabah/ Customer	Jenis surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties							
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari/ February 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret/ March 2, 2011	23 Juli/ July 23, 2018	450.000	-	450.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0023	900.000	25 September/ September 25, 2015	26 September/ September 26, 2016	724.091	-	724.091
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0027	32.315	29 September/ September 29, 2015	26 September/ September 26, 2016	26.000	-	26.000
Total		2.502.315			2.135.091	-	2.135.091

31 Desember/December 31, 2014

Nasabah/ Customer	Jenis surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties							
Deutsche Bank AG	VR0020	300.000	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000
Deutsche Bank AG	VR0020	450.000	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari/ February 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Deutsche Bank AG	VR0021	345.000	1 Maret/ March 1, 2011	23 November/ November 23, 2015	300.000	-	300.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret/ March 2, 2011	23 Juli/ July 23, 2018	450.000	-	450.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0023	806.922	25 September/ September 25, 2014	25 September/ September 25, 2015	649.999	-	649.999
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0028	438.530	25 September/ September 25, 2014	25 September/ September 25, 2015	350.000	-	350.000
PT BPD Sumatera Utara	IDBI100415273S	100.000	24 Oktober/ October 24, 2014	22 Januari/ January 22, 2015	88.580	345	88.235
		4.010.452			3.423.579	345	3.423.234
Pihak berelasi/Related parties (Catatan/ Note 40)							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	300.000	5 Desember/ December 5, 2014	5 Januari/ January 5, 2015	263.093	180	262.913
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	150.000	5 Desember/ December 5, 2014	5 Januari/ January 5, 2015	131.546	90	131.456
		450.000			394.639	270	394.369
Total		4.460.452			3.818.218	615	3.817.603

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar nihil dan Rp394.369 (Catatan 40).

As of December 31, 2015 and 2014, securities sold under repurchase agreement with related parties amounted to nil and Rp394,369, respectively (Note 40).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. SURAT-SURAT DITERBITKAN	BERHARGA	YANG	20. SECURITIES ISSUED	
			31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp4.794 pada tanggal 31 Desember 2015			2.995.206	-
				<i>Shelf Registration Bonds II Phase I Net of unamortized issuance cost amounted to Rp4,794 as of December 31, 2015</i>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.927 dan Rp2.117 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			1.998.073	1.997.883
				<i>Shelf Registration Bonds I Phase II Net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,927 and Rp2,117 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.137 dan Rp3.213 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			1.997.863	1.996.787
				<i>Shelf Registration Bonds I Phase I Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,137 and Rp3,213 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Obligasi BTN XV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.990 dan Rp2.659 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			1.298.010	1.297.341
				<i>BTN Bonds XV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,990 and Rp2,659 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Obligasi BTN XIV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.175 dan Rp2.542 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			1.647.825	1.647.458
				<i>BTN Bonds XIV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,175 and Rp2,542 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Obligasi BTN XII setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp383 dan Rp861 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			999.617	999.139
				<i>BTN Bonds XII Net of unamortized issuance cost amounted to Rp383 and Rp861 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp59.391 dan Rp43.724 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			1.555.608	581.276
				<i>Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Net of unamortized issuance cost amounted to Rp59,391 and Rp43,724 as of December 31, 2015 and 2014, respectively</i>
Total			12.492.202	8.519.884
				Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi

i. Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,625%, 9,875%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

ii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds

i. Shelf Registration Bonds II Phase I

The Bank issued Shelf Registration Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.625%, 9.875%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Shelf Registration Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Shelf Registration Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2015, Shelf Registration Bonds II Phase I are rated idAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

ii. Shelf Registration Bonds I Phase II

The Bank issued Shelf Registration Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Shelf Registration Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

- a. Obligasi (lanjutan)
- ii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II (lanjutan)

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

- iii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

- a. Bonds (continued)
- ii. Shelf Registration Bonds I Phase II (continued)

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2015 and 2014, Shelf Registration Bonds I Phase II were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

- iii. Shelf Registration Bonds I Phase I

The Bank issued Shelf Registration Bonds I Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on June 5, 2022. The issuance of Shelf Registration Bonds I Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I
(lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

iv. Obligasi BTN XV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XV adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. Shelf Registration Bonds I Phase I (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, Shelf Registration Bonds I BTN Phase I were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

iv. BTN Bonds XV

The Bank issued BTN Bonds XV of 2011 with a total nominal value of Rp1,300,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 9.50%, payable every three months and are due on June 28, 2021. The issuance of BTN Bonds XV of 2011 became effective based on Letter No. S-6928/BL/2011 dated June 21, 2011 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2015 and 2014, BTN Bonds XV were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XV is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

v. Obligasi BTN XIV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

vi. Obligasi BTN XII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII Tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

v. BTN Bonds XIV

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 10.25%, payable every three months and are due on June 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated June 3, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2015 and 2014, BTN Bonds XIV are rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

vi. BTN Bonds XII

The Bank issued BTN Bonds XII of 2006 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Surabaya Stock Exchange (BES) (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). The bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 12.75%, payable every three months. These bonds are due on September 19, 2016. The issuance of BTN Bonds XII of 2006 became effective based on Letter No. S-1844/BL/2006 dated September 8, 2006 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

- a. Obligasi (lanjutan)
vi. Obligasi BTN XII (lanjutan)

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

- a. Bonds (continued)
vi. BTN Bonds XII (continued)

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditors' rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2015 and 2014, BTN Bonds XII are rated idAA, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank CIMB Niaga Tbk.

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to perform the following:

- Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.
- Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut: (lanjutan)

- Membagikan dividen kepada para pemegang saham, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp3.203 dan Rp5.793 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

b. Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 5 Desember 2014, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) I Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp625.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp280.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp45.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,59%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 89,43%.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to performing the following: (continued)

- *Distribute dividends to stockholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*

For years ended December 31, 2015 and 2014, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp3,203 and Rp5,793, respectively, recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2015 and 2014, the Bank has complied with the existing terms of the above trusteeship agreements.

For years ended December 31, 2015 and 2014, coupon payments to all bond holders have been made by the Bank on the respective interest payment due dates.

b. Negotiable Certificate of Deposits

On December 5, 2014, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase I with principal value amounted to Rp625,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp280,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 6 (six) months period with maturity date on June 4, 2015. The NCD were issued at 95.67%.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp45,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 12 (twelve) months period with maturity date on November 27, 2015. The NCD were issued at 91.59%.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp300,000 with a fixed interest rate of 9.50% per annum, for 15 (fifteen) months period with maturity date on February 26, 2016. The NCD were issued at 89.43%.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits (lanjutan)

b. Negotiable Certificate of Deposits (continued)

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp280.000 dan Seri B dengan nilai nominal Rp45.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase I Series A with a total nominal value of Rp280,000 and Series B with a total nominal value Rp45,000, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

Pada tanggal 17 Februari 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II tahap I* dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2015.

On February 17, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Phase I with principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 5 (five) months period, which has matured in July 15, 2015.

Pada tanggal 26 Februari 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits I Tahap II (NCD)* dengan nilai pokok sebesar Rp1.005.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

On February 26, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase II with principal value amounted to Rp1,005,000 within 4 (four) series as follows:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp470.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp85.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,59%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp10.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 89,43%.
- Seri D: Nilai pokok NCD sebesar Rp440.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% per tahun, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 87,32%.

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp470,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 6 (six) months period with maturity date on August 26, 2015. The NCD were issued at 95.67%.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp85,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 12 (twelve) months period with maturity date on February 18, 2016. The NCD were issued at 91.59%.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp10,000 with a fixed interest rate of 9.50% per annum, for 15 (fifteen) months period with maturity date on May 19, 2016. The NCD were issued at 89.43%.*
- *D Series: NCD principal value amounted to Rp440,000 with a fixed interest rate of 9.70% per annum, for 18 (eighteen) months period with maturity date on August 18, 2016. The NCD were issued at 87.32%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp470.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase II Series A with a total nominal value of Rp470,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

b. Negotiable Certificate of Deposits (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* II Tahap II (NCD) dengan nilai pokok sebesar Rp1.110.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp330.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,74%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp620.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,57%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 87,62%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) II Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp330.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Bank Indonesia		
Penyalur kredit program	-	877.271
Fasilitas kredit likuiditas	-	44.361
PT Bank Central Asia Tbk	999.802	1.997.551
PT Bank ICBC Indonesia	998.373	-
	<u>1.998.175</u>	<u>2.919.183</u>
<u>Pihak Berelasi</u>		
Pemerintah		
Rekening Dana Investasi	29.425	79.813
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	5.199.340	3.999.217
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	499.788	-
	<u>5.728.553</u>	<u>4.079.030</u>
Total	<u>7.726.728</u>	<u>6.998.213</u>

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits (continued)

On April 30, 2015, Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) with principal value amounted to Rp1,110,000 within 3 (three) series as follows:

- A Series: NCD principal value amounted to Rp330,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, for 6 (six) months period with maturity date on October 30, 2015. The NCD were issued at 95.74%.
- B Series: NCD principal value amounted to Rp620,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 12 (twelve) months period with maturity date on May 2, 2016. The NCD were issued at 91.57%.
- C Series: NCD principal value amounted to Rp160,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 18 (eighteen) months period with maturity date on October 31, 2016. The NCD were issued at 87.62%.

As of December 31, 2015, *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) II Phase II Series A with a total nominal value of Rp330,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.

21. FUND BORROWINGS

	Rupiah Third Parties
<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Bank Indonesia	
Loan channeling program	
Liquidity loan facility	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank ICBC Indonesia	
<u>Related Parties</u>	
Government	
Investment Funds Account	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia

i. Penyalur Kredit Program

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran Kredit Program untuk Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS) dan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS). BUMN yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator dalam penyaluran Kredit Program tersebut, juga ditunjuk untuk menerima pengalihan KLBI dalam rangka kredit program yang belum digunakan dan masih berjalan serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 dan diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI Dalam Rangka Kredit Program. Meskipun Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator, dalam program tersebut Bank tetap berpartisipasi sebagai bank pelaksana.

Berdasarkan perjanjian yang didokumentasikan dalam akta No. 13 oleh Notaris Ismudjadi, S.H., tanggal 15 November 1999 antara Bank dengan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI, Bank telah menerima penyerahan pengalihan pengelolaan KLBI yang telah ditarik oleh bank-bank pelaksana sebesar Rp2.539.023 pada posisi tanggal 31 Oktober 1999 dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Bank untuk menagih kepada bank-bank pelaksana sebesar angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain:

- a) Menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
- b) Menganalisis persyaratan teknis dan keuangan terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- c) Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- d) Menerbitkan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama Bank Indonesia;
- e) Mengadministrasikan kelonggaran tarik yang dikelola; dan

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia

i. Loan Channeling Program

Based on Decision Letter No. 487/KMK.017/1999 dated October 13, 1999 of the Ministry of Finance, the Bank was appointed as coordinator in the loan channeling program for Simple Housing Loans (KPR-RS) and Very Simple Housing Loans (KPR-RSS). The state-owned companies which are appointed as coordinator banks in the Loan Channeling Program are also appointed to receive the transfer of KLBI under the loan program for those unused and still outstanding and approved but not yet drawn based on Bank Indonesia Regulation No. 2/3/PBI/2000 dated February 1, 2000 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 5/20/PBI/2003 dated September 17, 2003 concerning the "Transfer of Management of KLBI within the Framework of Credit Program". Although the Bank was appointed as a coordinator for channeling loans, the Bank also participates in the program as an executor bank.

Based on an agreement between the Bank and Bank Indonesia which is documented in deed No. 13 dated November 15, 1999 of Notary Ismudjadi, S.H., regarding the transfer of management of KLBI, the Bank accepted from Bank Indonesia the management of KLBI which already drawn by participating banks amounted to Rp2,539,023 on October 31, 1999. Bank Indonesia has given the Bank the authority to bill the executor banks for the principal installments at maturity.

Responsibilities in the management of the KLBI include the following:

- a) Receive application from executor banks to draw down unused facility;
- b) Analyze technical and financial terms submitted by the executor banks to draw down unused facility;
- c) Recommend to Bank Indonesia the draw down of unused facility as proposed by the executor banks;
- d) Issue working agreement letters for and on behalf of Bank Indonesia;
- e) Administer unused facility that are managed; and

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

i. Penyalur Kredit Program (lanjutan)

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain (lanjutan):

- f) Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo. Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh Bank.

Hak tagih atas KLBI yang pengelolaannya dibawah Bank, sampai KLBI tersebut jatuh tempo atau dilunasi sebelum jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.

Hak tagih atas KLBI yang pengelolaannya di bawah Bank telah jatuh tempo seluruhnya. Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 17/71/DPTP tanggal 10 April 2015, Bank Indonesia telah melakukan penarikan dana kelolaan tersebut.

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia (Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI) pada berbagai tanggal sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 untuk menunjang Program Pemerintah. Tingkat suku bunga rata-rata likuiditas pinjaman per tahun adalah sebesar 0,42% dan 0,24% untuk tahun 2015 dan 2014. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 10 sampai 20 tahun dan digunakan untuk pembiayaan sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	28.016	<i>Housing loans (KPR)</i>
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS)	-	16.345	<i>Very simple housing loans (KPR-RSS)</i>
Total	-	44.361	Total

Pengembalian Dana fasilitas likuiditas KLBI dalam rangka kredit program KPR KP-RS/RSS telah dilakukan sesuai Surat Direksi Bank No. 1118/DIR/CMFD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 kepada Bank Indonesia.

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

i. *Loan Channeling Program (continued)*

Responsibilities in the management of the KLBI include the following (continued):

- f) Manage collection of KLBI principal installments received from each executor banks and to be redistributed through executor banks until maturity period. Bank Indonesia does not charge interest on KLBI principal installments which are managed by the Bank.*

The right of credit installment for KLBI under the management of the Bank until KLBI have matured or are repaid before maturity remains with Bank Indonesia.

In December 31, 2015, the right of credit installment for KLBI under the management of the Bank have entirely matured. Based on Bank Indonesia Letter No. 17/71/DPTP dated April 10, 2015, Bank Indonesia has withdraw the funds under Bank management.

ii. *Liquidity Loan Facility*

This account represents borrowing facilities obtained from Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Loans or KLBI) on various dates from 1983 through 1999 in line with the Government Program. Liquidity loan facility bears average interest rate share 0.42% and 0.24% per annum in 2015 and 2014. These borrowings will mature within 10 to 20 years and were used to finance the following:

Repayment for liquidity facility KLBI fund in relation to loan mortgage program KP-RS/RSS has been done in accordance to Board of Director Letter No. 1118/DIR/CMFD/X/2015 dated October 30, 2015 to Bank Indonesia.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas (lanjutan)

Sesuai Undang-undang No. 23 tanggal 17 Mei 1999, sejak tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi memberikan fasilitas KLBI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/5/PBI/1999 tanggal 1 September 1999, seluruh KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan perjanjian tanggal 16 November 1999 antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Pemerintah (pihak berelasi)

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI) yang diterima Bank dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS).

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 4,44% dan 4,19% untuk tahun 2015 dan 2014. Jangka waktu pinjaman ini adalah masing-masing 10, 15 dan 20 tahun dan jatuh tempo dalam berbagai tanggal sampai tahun 2016.

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 19 Maret 1999 antara Pemerintah dan Bank, Bank telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator dalam penyaluran dana RDI kepada bank pelaksana. Tujuan penyediaan dana ini adalah untuk membiayai program KPR-RSS dan KPR-RS dengan jumlah maksimum sebesar Rp22.000.

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF)

Akun ini terdiri dari Fasilitas Pinjaman Refinancing XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI dan V, Term Purchase Program tahap IV dan III dan Pembiayaan yang diperoleh dari PT SMF yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

ii. Liquidity Loan Facility (continued)

In accordance with Law No. 23 dated May 17, 1999, since 1999, Bank Indonesia will no longer grant KLBI. Based on Bank Indonesia regulation No. 1/5/PBI/1999 dated September 1, 1999, all outstanding KLBI and those which have not yet matured and which have been approved but not yet drawn down are transferred to state-owned companies based on the agreement dated November 16, 1999 between the Government and the state-owned companies appointed by the Government. The state-owned companies appointed by the Government are the Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Government (related parties)

This account represents Investment Funds Account (Rekening Dana Investasi or RDI) facility obtained from the Government of the Republic of Indonesia which was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loans (KPR-RS).

These borrowings bear average interest rates are 4.44% and 4.19% per annum in 2015 and 2014. The loans have terms of 10, 15 and 20 years and have various maturity dates until 2016.

Based on the loan agreement dated March 19, 1999 between the Government and the Bank, the Bank was appointed by the Government as coordinator for the channeling of RDI loans to executor banks. The funds are intended to finance KPR-RSS and KPR-RS with a maximum amount of Rp22,000.

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF)

This account represents Refinancing Loan Facility XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI dan V, Term Purchase Program IV and III and financing obtained from PT SMF which are intended to finance the Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* XIII, XII, dan XI masing-masing sebesar Rp700.000, Rp500.000 dan Rp1.500.000 dengan jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 12 bulan dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 September 2016 dan 26 Mei 2016. Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* IX adalah Rp1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2015. Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, VII, VI, dan V masing-masing sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 12 bulan, 60 bulan, 60 bulan dan 120 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015, 20 Juni 2018, 14 Desember 2017 dan 20 Juni 2022. Plafon pinjaman untuk *Term Purchase Program* tahap V dan III masing-masing sebesar Rp500.013 dan Rp500.000, jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 36 bulan dan 60 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal-tanggal 20 Juni 2016 dan 20 Februari 2017.

Suku bunga per tahun atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI dan V, ini masing-masing adalah sebesar 8,50%, 8,50%, 8,90%, 9,63%, 9,69% tetap selama 1 tahun, 7,60%, 7,75% tetap selama 5 tahun, dan 7,85% tetap selama 10 tahun. Pokok Fasilitas Pinjaman *Refinancing* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI, dan V dibayar pada tanggal jatuh tempo. Suku bunga *Term Purchase Program* (Repo KPR) tahap V dan III sebesar 7,50% tetap selama 3 tahun dan 7,36% tetap selama 5 tahun. Pembayaran pokok pinjaman Tahap V dan III dilakukan pada akhir periode.

Jaminan atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI, dan V dan *Term Purchase Program* (Repo KPR) adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu. Hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum masing-masing sebesar 125%, 125%, 125%, 125%, 100%, 110%, 125%, 125%, dan 100% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari baki debit pinjaman sampai jatuh tempo.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The principal amount of *Refinancing Loan Facility* XIII, XII, and XI amounted to Rp700,000, Rp500,000 and Rp1.500.000 with maturity period of 12 months respectively, and will mature on September 21, 2016 and May 26, 2016, respectively. The principal amount of *Refinancing Loan Facility* IX amounted to Rp1,000,000 with maturity period of 12 months and will mature on May 26, 2015. The principal amount of *Refinancing Loan Facility* X, VII, VI and V amounted to Rp500,000 each, with maturity period of 12 months, 60 months, 60 months, and 120 months, respectively, and will mature on September 30, 2015, June 20, 2018, December 14, 2017, and June 20, 2022, respectively. The principal amount of *Term Purchase Program* for phases V and III amounted to Rp500,013 and Rp500,000 respectively, with maturity period of 36 months and 60 months, respectively and will mature on June 20, 2016 and February 20, 2017, respectively.

The *Refinancing Loan Facility* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI and V bears interest at an annual fixed rate are 8.50%, 8.50%, 8.90%, 9.63%, 9.69% for the one-year period, 7.60%, 7.75% for the five-year period and 7.85% for the ten-year period, respectively. The principal payment for *Refinancing Loan Facility* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI, and V will be settled on its maturity date. Annual interest rate for the *Term Purchase Program* (Repo KPR) phases V and III are fixed at 7.50% for the three-year period and 7.36% for the five-year period, respectively. Principal payment for phases V and III will be settled on its maturity date.

The guarantees for the *Loan Facility* XIII, XII, XI, X, IX, VII, VI and V, and *Term Purchase Program* (Repo KPR) are the Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The values of collaterals are equivalent to at least 125%, 125%, 125%, 125%, 100%, 110%, 125%, 125%, and 100%, respectively, of the principal at the signing of the agreements and should be maintained at a minimum of 100% of the outstanding loans until the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Fasilitas Refinancing X dan IX telah jatuh tempo pada tanggal 21 September 2015 dan 26 Mei 2015.

d. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Plafon pinjaman sebesar Rp2.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2013. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun tetap selama 2 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Sesuai dengan perubahan Atas Akta Perjanjian Kredit antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 311/Add-KCK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Bank memperoleh fasilitas perpanjangan *Refinancing* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2015. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun selama 2 tahun.

Pada tanggal 23 Maret 2015 Bank melakukan pengembalian pokok atas pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000, sehingga sisa plafon pinjaman adalah sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,75%. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 29 Desember 2015 dilakukan perpanjangan selama 12 bulan atas pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000, dengan suku bunga tetap sebesar 9,25%. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Fasilitas pinjaman dijamin oleh Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang memiliki kriteria tertentu. Nilai jaminan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut adalah setara dengan minimum 125% dari nilai pokok kredit dan harus dipertahankan minimal sebesar 110% dari saldo pokok kredit sampai dengan jatuh tempo.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Refinancing Loan Facility X and IX has matured On September 21, 2015 and May 26, 2015.

d. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The principal of the loan facility amounted to Rp2,000,000 has matured on December 7, 2013. The loan facility bears interest at an annual fixed rate of 7.50% for two years. The principal payment for the loan will be paid at the maturity date.

Based on amendment of loan agreement between PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 311/Add-KCK/2013 on 6 December, 2013, the Bank acquired an extension Refinancing facility from PT Bank Central Asia Tbk with a credit limit of Rp2,000,000 that will mature on December 7, 2015. The loan facility has a fixed interest rate of 8.75% per annum for 2 years.

As of March 23, 2015, the Bank paid the loan principal amounting to Rp1,000,000, therefore reducing the credit limit to Rp1,000,000 with fixed interest rate of 8.75%. The loan principal will be paid at maturity date.

On December 29, 2015 the loan amounting of Rp1,000,000 is extended for 12 months with fixed interest rate of 9.25%. The principal amount will be paid on maturity date.

The loan facility is guaranteed by the Bank's Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The value of the collaterals at the signing of the agreement is equivalent to at least 125% of the principal amount and should be maintained at a minimum of 110% of the outstanding principal until maturity.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. FUND BORROWINGS (continued)

e. Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank ICBC Indonesia yang ditujukan untuk pembiayaan proyek pemerintah "Program Satu Juta Rumah".

Plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun dan tingkat suku bunga tetap.

Penarikan pinjaman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Penarikan pertama dilakukan pada bulan September 2015 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2016. Penarikan kedua dilakukan pada bulan Oktober 2015 dan akan jatuh tempo bulan Oktober 2016. Penarikan ketiga dan keempat akan dilakukan pada bulan November 2015 dan akan jatuh tempo pada bulan November 2016.

e. Loan from PT Bank ICBC Indonesia

This account represents loan facility obtained from ICBC Bank which is intended to finance Housing Loans (KPR) without collateral from government named "Program Satu Juta Rumah".

The principal of the loan facility amounted to Rp1,000,000, which bears interest fixed rate for one years.

Loan drawdown is conducted 4 times. The first drawdown was conducted in September 2015 and will mature on September 25, 2016. The second drawdown was conducted in October 2015 and will mature on October, 2016. The third and fourth drawdown will be conducted in November 2015 will mature on November 2016.

f. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank BNI (Persero) Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank tanpa menggunakan agunan.

Plafon pinjaman sebesar Rp500.000 akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2016. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga sebesar 8,90% per tahun tetap selama 1 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

f. Loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank BNI (Persero) Tbk which is intended to finance Housing Loans (KPR) without collateral.

The principal of the loan facility amounted to Rp500,000 will mature on June 1, 2016. The loan facility bears interest at an annual fixed rate of 8.90% for one years. The principal payment for the loan will be paid at the maturity date.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp5.728.553 dan Rp4.079.030 (Catatan 40).

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

g. Related parties transactions

As of December 31, 2015 and 2014, fund borrowings received from related parties amounted to Rp5,728,553 and Rp4,079,030, respectively (Note 40).

As of December 31, 2015 and 2014, the Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Deposito berjangka	224.298	222.744
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	20.304	31.027
Surat-surat berharga yang diterbitkan	97.008	27.842
Pinjaman yang diterima	14.741	22.528
Simpanan dari bank lain	1.013	4.855
Total	357.364	308.996

22. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Time deposits	224.298	222.744
Securities sold under repurchase agreements	20.304	31.027
Securities issued	97.008	27.842
Fund borrowings	14.741	22.528
Deposits from other Banks	1.013	4.855
Total	357.364	308.996

23. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali transaksi berdasarkan prinsip syariah penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia (BI).

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sesuai BI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp7.198.

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

23. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank assessed commitment and contingency transaction which have credit risk individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists, except transaction based on sharia principles, assessment was performed using a collectability guidance of Bank Indonesia (BI).

The minimum estimated losses on commitments and contingencies based on BI amounted to nil and Rp7,198 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

The collectability classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Lancar</u>					<u>Current</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		1.507.514		1.703.825	Unused loan facility (committed)
Garansi yang diterbitkan (Catatan 36)		1.075.991		1.001.561	Guarantees issued (Note 36)
		<u>2.583.505</u>		<u>2.705.386</u>	
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 36)					Guarantees issued (Note 36)
Dolar Amerika Serikat	27.857.144	384.010	28.438.888	352.216	United States Dollar
Yen Jepang	581.000	67	3.145.000	325	Japanese Yen
Euro Eropa		-	31.022	467	European Euro
Pound Sterling Inggris		-	14.677	283	Great Britain Pound Sterling
Dolar Singapura		-	-	-	Singapore Dollar
		<u>384.077</u>		<u>353.291</u>	
		<u>2.967.582</u>		<u>3.058.677</u>	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u>					<u>Special mention</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		56.179		40.070	Unused loan facility (committed)
Total		3.023.761		3.098.747	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp49.516 dan Rp82.573.

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Saldo awal tahun	7.198	6.469
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(7.198)	729
Saldo akhir tahun	-	7.198

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

23. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

As of December 31, 2015 and 2014, guarantees issued from related parties amounted to Rp49,516 and Rp82,573, respectively.

The changes in the estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Saldo awal tahun	7.198	6.469	Balance at beginning of year
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(7.198)	729	Provision during the year
Saldo akhir tahun	-	7.198	Balance at end of year

Based on management's judgment no provision for estimated losses on commitments and contingencies as of December 31, 2015.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 43.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

24. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 ^{*)} January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>			
Bonus dan tantiem	371.871	226.843	346.109
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 37b)	145.800	118.548	110.051
	517.671	345.391	456.160

Employee benefits liabilities
Bonuses and tantiem
Long term employee benefits
(Note 37b)

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
<u>Liabilitas lain-lain</u>		
Dana jaminan pengembang	2.688.295	2.272.756
Pendapatan diterima di muka	560.584	427.105
Lainnya	69.327	31.299
	3.318.206	2.731.160
Total	3.835.877	3.076.551

Other liabilities
Developers' security deposits
Unearned income
Others

^{*)} Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

^{*)} After restatement (Note 49)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN
(lanjutan)**

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan bunga subsidi yang diberikan pemerintah terkait dengan pembiayaan Rumah Sehat Sederhana (RSH).

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

**24. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER
LIABILITIES (continued)**

Unearned income represents interest income on subsidized fund from the Government relating to Simple Healthy Housing Loans (RSH).

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which was not yet distributed at the end of the year.

25. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

25. EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

31 Desember/December 31, 2015					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,04%	Series B Stock Government
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	Maryono (President Director)*
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	4.922.650	500	2.461	0,05%	Irman A Zahiruddin (Director)*
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	Mansyur S. Nasution (Director)*
Sis Apik Wijayanto (Direktur)*	100.000	500	50	0,00%	Sis Apik Wijayanto (Director)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.222.848.850	500	2.111.425	39,91%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.582.345.000		5.291.173	100,00%	Total

* Termasuk dalam program MESOP

* Includes shares arising from the MESOP Programs

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. EKUITAS (lanjutan)

25. EQUITY (continued)

a. Modal Saham (lanjutan)

a. Capital Stock (continued)

31 Desember/December 31, 2014					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,13%	Series B Stock Government
GIC S/A Government Of Singapore	95.597.181	500	47.799	0,90%	GIC S/A Government of Singapore
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	Maryono (President Director)*
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	Mansyur S. Nasution (Director)*
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	4.922.650	500	2.461	0,05%	Irman A Zahiruddin (Director)*
Masyarakat (kepemilikan masing- masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.112.702.669	500	2.056.351	38,92%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.567.696.000		5.283.848	100,00%	Total

* Termasuk dalam program MESOP

* Includes shares arising from the MESOP Programs

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

2015

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8, dan MESOP III tahap 5 dan 6, pada tahun 2015 (Catatan 26), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 14.649.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah Penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 14.649.000 lembar saham dan sejumlah Rp7.325.

2014

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, pada tahun 2014 (Catatan 26), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 2.842.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah Penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 2.842.500 lembar saham dan sejumlah Rp1.421.

b. Tambahan modal disetor - Neto

Pada tahun 2015, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8, dan MESOP III tahap 5 dan 6, tahun 2015 (Catatan 26), tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp18.462, yang berasal dari pembelian 14.582.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (rupiah penuh) per lembar untuk MESOP II dan 67.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (rupiah penuh) per lembar untuk MESOP III. Tambahan Modal disetor pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.046.598.

25. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

2015

With the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015 (Note 26), the Bank issued 14,649,000 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and fully paid capital of the Bank by 14,649,000 shares and Rp7,325, respectively.

2014

With the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP I, phases 5 and 6 of MESOP II, and phases 3 and 4 of MESOP III in 2014 (Note 26), the Bank issued 2,842,500 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and fully paid capital of the Bank by 2,842,500 shares and Rp1,421, respectively.

b. Additional paid-in capital - Net

In 2015, with the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015 (Note 26), the Bank's additional paid-in capital increased by Rp18,462 as a result of the conversion of 14,582,000 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II and 67,000 shares at an exercise price of Rp1,098.36 (full Rupiah) per share for MESOP III. Additional paid-in capital as of December 31, 2015 amounted to Rp2,046,598.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor - Neto (lanjutan)

Pada tahun 2014, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp1.840, Rp243, dan Rp289 yang berasal dari pembelian 2.368.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I, sejumlah 192.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II, dan sejumlah 282.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP III. Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.028.136.

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2014

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2015, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp223.119, dan alokasi atas saldo laba sebesar Rp892.473 sebagai laba ditahan.

Penggunaan Laba Tahun 2013

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Februari 2014, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp468.648, dan alokasi atas saldo laba sebesar Rp1.093.513 sebagai cadangan umum.

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

25. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital - Net (continued)

In 2014, with the exercise of purchase stock options of MESOP I phases 7 and 8, MESOP II phases 5 and 6, and MESOP III phases 3 and 4, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp1,840, Rp243, and Rp289, respectively, as a result of the conversion of 2,368,000 shares at an exercise price of Rp855 (full Rupiah) per share for MESOP I, 192,500 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II, and 282,000 shares at an exercise price of Rp1,098.36 (full Rupiah) per share for MESOP III. Additional paid-in capital as of December 31, 2014 amounted to Rp2,028,136.

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2014

In the Annual General Stockholders' Meeting held on March 24, 2015, the stockholders approved the distribution of dividends amounting to Rp223,119 and the allocation of retained earnings amounted to Rp892,473 as retained earnings.

Profit Distribution for Year 2013

In the Annual General Stockholders' Meeting held on February 25, 2014, the stockholders approved the distribution of dividends amounting to Rp468,648 and the allocation of retained earnings amounted to Rp1,093,513 as general reserve.

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, the shareholders approved the stock ownership of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and grant of option right to Management and Employees under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, subject to the following terms:

- a. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares and a maximum of 4% of the issued and fully paid-up capital for the MESOP program.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut (lanjutan):

- b. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
- c. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.
- d. Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- e. Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- f. Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

MESOP Tahap I

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap I adalah 145.234.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp855 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 29 Januari 2010. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2011.

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, the shareholders approved the stock ownership of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and grant of option right to Management and Employees under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, subject to the following terms (continued):

- b. Participants of the MESA and MESOP programs are registered employees as of September 30, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee.*
- c. Stock price discount in the MESA program amounted to 20% with a lockup period of six months. The discount will be charged as the Bank's expense.*
- d. The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years from the date of issuance with one year vesting period, which is the period the option is not exercisable.*
- e. MESA and MESOP stock allocations to management and employees is 5%:95% and should be implemented by considering equality, fairness, work achievement, work position, rights and obligation concept.*
- f. The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners to be reported to the stockholders and must comply with prevailing regulations.*

MESOP Stage I

The number of shares, which will be issued during Stage I stock option is 145,234,500 shares with execution price of Rp855 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 29, 2010. The option has vesting period of one year until February 1, 2011.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN
KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)
(lanjutan)**

MESOP Tahap I (lanjutan)

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap pertama yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2010 adalah sebesar Rp422,05 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 22 September 2010 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (Binomial option pricing model).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

7,8%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

MESOP Tahap II

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap II adalah 108.925.000 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.297,44 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2011. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2012.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap kedua yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp463,87 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (Binomial option pricing model).

**26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK
OPTION PLAN (MESOP) (continued)**

MESOP Stage I (continued)

The Bank determined that the execution period begins in 2011 until 2014 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option which was distributed on January 29, 2010 amounted to Rp422.05 (full Rupiah) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated September 22, 2010, using the Binomial option pricing model.

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

MESOP Stage II

The number of shares, which will be issued during Stage II stock option is 108,925,000 shares with execution price of Rp1,297.44 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2011. The option has vesting period of one year until February 1, 2012.

The Bank determined that the execution period begins in 2012 until 2015 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2011 amounted to Rp463.87 (Rupiah full amount) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated October 12, 2011, using the Binomial option pricing model.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN
KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)
(lanjutan)**

**26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK
OPTION PLAN (MESOP) (continued)**

MESOP Tahap II (lanjutan)

MESOP Stage II (continued)

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

7,975%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

MESOP Tahap III

MESOP Stage III

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham tahap III adalah 108.925.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.098,36 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2012. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2013.

The number of shares, which will be issued during Stage III, is 108,925,500 shares with execution price at Rp1,098.36 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2012. The option has vesting period of one year until February 1, 2013.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

The Bank determined that the execution period begins in 2013 until 2016 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

Nilai wajar dari opsi saham tahap ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 adalah sebesar Rp427,93 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 28 Juni 2012 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2012, amounted to Rp427.93 (full Rupiah) per share, based on the valuation report by PT Towers Watson dated June 28, 2012, using the Binomial option pricing model.

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

5,023%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN
KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)
(lanjutan)**

Harga rata-rata tertimbang saham adalah Rp1.139 dan Rp1.115 untuk periode tahun yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2015 dan 2014.

Ringkasan MESOP dan mutasi selama periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK
OPTION PLAN (MESOP) (continued)**

The weighted average shares price is Rp1,139 and Rp1,115 for the year ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

The summary of the MESOP and its movements during the period ended December 31, 2015 and 2014 are as follows:

31 Desember/December 31, 2015				
Jumlah Opsi/Number of Options				
	MESOP Tahap I/ Stage I	MESOP Tahap II/ Stage II	MESOP Tahap III/ Stage III	
Opsi pada awal tahun	-	14.582.000	7.722.000	Options outstanding at beginning of the year
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	-	(14.582.000)	(67.000)	Options exercised during the year
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	-	-	7.655.000	Options that can be exercised at end of the year
31 Desember/December 31, 2014				
Jumlah Opsi/Number of Options				
	MESOP Tahap I/ Stage I	MESOP Tahap II/ Stage II	MESOP Tahap III/ Stage III	
Opsi pada awal tahun	2.149.500	14.774.500	8.004.000	Options outstanding at beginning of the year
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	(2.149.500)	(192.500)	(282.000)	Options exercised during the year
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	-	14.582.000	7.722.000	Options that can be exercised at end of the year

27. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

27. INTEREST INCOME

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Kredit yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kredit yang diberikan	13.523.274	11.352.218	Loans
Giro pada Bank Indonesia	58.935	53.634	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.496	3.125	Current accounts with other banks

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PENDAPATAN BUNGA (lanjutan)

27. INTEREST INCOME (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Kredit yang diberikan dan piutang (lanjutan)			Loans and receivables (continued)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	116.020	100.573	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	725	37	Securities purchase under resale agreements
Nilai wajar melalui			Fair value through profit or loss
Laba rugi			Government bonds
Obligasi pemerintah	5.914	6.834	Securities
Efek-efek	360	878	Available-for-sale
Tersedia untuk dijual			Government bonds
Obligasi pemerintah	382.072	373.979	Securities
Efek-efek	166.888	361.716	Held-to-maturity
Dimiliki hingga jatuh tempo			Government bonds
Obligasi pemerintah	99.939	78.712	Securities
Efek-efek	97.513	62.858	
Total	14.455.136	12.394.564	Total

28. BEBAN BUNGA

28. INTEREST EXPENSE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Deposito berjangka	4.794.544	4.600.203	Time deposits
Tabungan	1.028.097	880.815	Savings deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.056.483	787.244	Securities issued
Pinjaman yang diterima	517.087	494.989	Fund borrowings
Giro	300.984	249.439	Demand deposits
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	221.782	200.505	Securities sold under repurchase agreements
Simpanan dari bank lain	154.607	82.538	Deposits from other banks
Total	8.073.584	7.295.733	Total

**29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA -
LAIN - LAIN**

29. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Jasa perbankan	87.549	64.646	Bank services
Jasa penagihan - <i>payment points</i>	5.252	4.586	Collection services - <i>payment points</i>
Lainnya	101.988	53.387	Others
Total	194.789	122.619	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA -
LAIN - LAIN (lanjutan)**

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa safe deposit box dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Lainnya terutama terdiri dari servicing fee dari transaksi sekuritisasi, provisi atas Garansi Bank yang diterbitkan, dan komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual.

**29. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS
(continued)**

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Others consist mainly of servicing fees from securitization transactions, provision from Guarantee Issued and commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers.

**30. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN
PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN
NON- ASET KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

**30. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT
LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL
ASSETS**

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan10)	898.718	775.613	Loans and sharia financing/receivables (Note 10)
Efek-efek (Catatan 8)	2.599	644	Securities (Note 8)
Giro pada bank lain (Catatan 6)	1	(737)	Current accounts with other banks (Note 6)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	-	(50)	Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)
Properti terbengkalai	(310)	(4.304)	Abandoned properties
Total	901.008	771.166	Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Promosi	416.690	508.539	Promotion
Perbaikan dan pemeliharaan	568.877	483.956	Repairs and maintenance
Sewa	348.166	337.687	Rent
Penyusutan (Catatan 11)	196.358	225.741	Depreciation (Note 11)
Listrik, air dan komunikasi	220.006	231.737	Electricity, water and telecommunications
Beban kantor	156.780	124.495	Office expenses
Transportasi	99.620	95.713	Transportation
Jasa profesional	25.796	17.680	Professional fees
Lainnya	118.973	97.282	Others
Total	2.151.266	2.122.830	Total

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi sekuritisasi aset, dan premi asuransi untuk gedung, kas dalam perjalanan serta kas dalam khasanah.

Others consist mainly of securitization asset administration expense and insurance premium on the building, cash in transit and cash in vault.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2015	2014
Gaji dan upah		
Rutin	1.014.614	898.542
Tidak rutin	688.849	459.482
Pelatihan dan pengembangan	106.012	106.964
Lainnya	119.871	99.266
Total	1.929.346	1.564.254

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

32. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

Salaries and wages
Recurring
Non-recurring
Training and development
Others
Total

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

33. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2015	2014
Imbalan atas jasa penagihan	66.697	64.328
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	30.936	19.687
Lainnya	82.200	35.589
Total	179.833	119.604

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, serta beban cadangan litigasi.

33. OTHER OPERATING EXPENSES – OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
Loss on bad debt settlement
Others
Total

Others consist mainly of representation and entertainment expense, and provision for litigation expense.

34. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2015	2014
Pendapatan sewa gedung	212	289
Pendapatan lainnya - neto	8.069	1.671
Total	8.281	1.960

Total

34. NON-OPERATING INCOME – NET

This account consists of:

Building rental income equipment
Other income - net
Total

Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

35. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
2015	2014 ¹⁾	
Laba sebelum beban pajak	2.541.886	1.579.327 <i>Income before tax expense</i>
Beda temporer:		<i>Temporary differences:</i>
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	350.540	57.067 <i>Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets</i>
Penyisihan untuk imbalan kerja	19.507	1.769 <i>Provision for employee benefits</i>
Kenaikan (penurunan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	6.764	(65.668) <i>Increase (decrease) in fair value of trading securities</i>
Kompensasi Berbasis Saham (MESOP)	(6.793)	(1.118) <i>Employee stock option (MESOP)</i>
	370.018	
Beda tetap:		<i>Permanent differences:</i>
Kenikmatan karyawan	161.265	91.242 <i>Employee welfare</i>
Beban kantor	27.472	23.653 <i>Office expense</i>
Sewa	23.127	23.433 <i>Rent</i>
Sumbangan	-	6.272 <i>Donations</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	4.371	5.206 <i>Repairs and maintenance</i>
Dana sosial dan representasi	3.937	3.343 <i>Social funds and representation</i>
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.069	2.557 <i>Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes</i>
Denda pajak	-	275 <i>Tax penalties</i>
Pendapatan sewa tarif final	(212)	(289) <i>Rent income subject to final tax</i>
	222.029	155.692
Taksiran penghasilan kena pajak	3.133.933	1.727.069 <i>Estimated taxable income</i>
Beban pajak penghasilan	783.483	431.767 <i>Income tax expense in Tax expense based on Income tax paid - Article 25</i>
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri - Pasal 25	(541.470)	(325.824)
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 14)	242.013	105.943 <i>Corporate income tax payable (Note 14)</i>

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Bank kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, Bank belum melaporkan SPT tahun 2015 kepada KPP. Namun dasar pelaporan SPT tahun 2015 akan sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2015 diatas.

Estimated taxable income in 2014 are consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax that reported by Bank to Tax Office (KPP). As of January 29, 2016, Bank has not yet reported the 2015, Tax Return to the Tax Office. However, the reporting base for 2015's Tax Return will be in accordance with the estimated taxable income for 2015 above.

¹⁾ Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

¹⁾ As restated (Note 49)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

- b. Rincian pendapatan (beban) pajak tangguhan - neto dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2015	2014 ^{*)}
Pembentukan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	87.635	14.267
Penyisihan untuk imbalan kerja	4.877	442
Kenaikan (penurunan) nilai wajar efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	1.691	(16.417)
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	(1.699)	(280)
Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan - Neto	92.504	(1.988)

- c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2015	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ January 1, 2015/ December 31, 2014 ^{*)}	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013 ^{*)}
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - dampak dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Penyisihan untuk imbalan kerja	37.257	32.380	31.938
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	672	2.370	2.650
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(127.488)	(215.122) ^{**)}	(227.791)
Kenaikan (penurunan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	48	(1.643)	14.774
	<u>(89.511)</u>	<u>(182.015)</u>	<u>(178.429)</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - dampak dari ekuitas			
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	44.563	30.004	28.836
Pengukuran kembali imbalan pasti	35.382	36.751	28.454
Liabilitas Pajak tangguhan - neto	(9.566)	(115.260)	(121.139)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi Bank terhadap penghasilan atas manfaat pajak masa mendatang yang timbul dari perbedaan temporer akan diakui di masa mendatang.

35. TAXATION (continued)

- b. The details of deferred tax benefit (expense) - net computed by computing the effect of temporary differences on tax rate are as follows:

Provision for allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
Provision for employee benefits
Increase (decrease) in fair value of trading securities
Employee stock option (MESOP)
Deferred Tax benefit (expense) - Net

- c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

Deferred tax assets (liabilities) - effect from statement of profit or loss and other comprehensive income
Provision for employee benefits
Employee stock options (MESOP)
Allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
Increase (decrease) in fair value of trading securities
Deferred tax assets (liabilities) - effect from equity
unrealized loss in fair value of available-for-sale securities and government bonds
Remeasurement of defined benefit obligation
Deferred tax liabilities - net

As of December 31, 2015 and 2014, management believes that the Bank's estimates of future taxable income indicate that the future income tax benefits arising from the temporary differences will be realized in the future.

^{*)} Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

^{**)} Termasuk dampak penerapan awal PSAK No. 102 (Revisi 2013) tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp1.599.

^{*)} As restated (Note 49)

^{**)} Including the impact of the initial adoption of SFAS No. 102 (Revised 2013) dated January 1, 2015 amounted to Rp1,599.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Laba sebelum beban pajak	2.541.886	1.579.327	Income before tax expense
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(635.472)	(394.832)	Tax expense at the applicable tax rate
Beda tetap	(55.507)	(38.923)	Permanent differences Tax expense based on
Beban pajak	(690.979)	(433.755)	Tax expense

Pemeriksaan tahun pajak 2010

Pada tanggal 3 Desember 2012, Bank telah menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	
	Tahun 2010		
SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12	27.799	12.787	TAL Corporate Income Tax No.00004/206/10/093/12
SKP PPN Kurang Bayar No.00199/207/10/093/12	1.022	471	TAL VAT Underpayment No.00199/207/10/093/12
SKP PPN Kurang Bayar No.00113/107/10/092/12	-	205	TAL VAT Underpayment No.00113/107/10/092/12
Total	28.821	13.463	Total

Untuk SKP PPN Kurang Bayar No.00199/207/10/093/12 dan SKP PPN Kurang Bayar No.00113/107/10/092/12, Bank telah melakukan pembayaran dan sudah dibebankan sebagai biaya pajak tahun 2012.

Untuk SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12, Bank telah melakukan pembayaran seluruhnya. Atas jumlah sebesar Rp4.079, Bank telah menyetujuinya dan sudah dibebankan sebagai biaya pajak tahun 2012. Sedangkan atas jumlah sisanya Bank belum menyetujuinya, yaitu sebesar Rp36.507 (Catatan 13), karena manajemen berpendapat bahwa perlakuan pajaknya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

35. TAXATION (continued)

- d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2015, and 2014, are as follows:

Assessment for fiscal year 2010

On December 3, 2012, the Bank received several Tax Assessment Letters (TAL) for fiscal year 2010 as follows:

For TAL VAT Underpayment No.00199/207/10/093/12 and TAL VAT Underpayment No.00113/107/10/092/12, the Bank has paid and was charged as tax expense in the year 2012.

For TAL Corporate Income Tax No.00004/206/10/093/12, the Bank has paid the entire amount. For the amount of Rp4,079, the Bank has already approved and was charged as tax expense in the year 2012. For the remaining amount of Rp36,507, the Bank filed objection (Note 13), the management believes that the treatment is already in accordance with the existing tax regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2013, atas SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12 tanggal 3 Desember 2012, Bank telah mengajukan permohonan keberatan. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-162/WPJ.19/2014 tanggal 29 Januari 2014, permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tanggal 24 April 2014, Bank mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding No. Put.61604/PP/M.B/ 15/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang menerima permohonan banding Bank. Pada tanggal 27 Juli 2015, Bank telah menerima pembayaran atas permohonan banding.

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	
Tahun 2012			Year 2012
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92	TAL Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92	TAL Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91	TAL Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81	TAL Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103	TAL Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94	TAL Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99	TAL Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118	TAL Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114	TAL Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110	TAL Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120	TAL Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146	TAL Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14
Total	2.624	1.260	Total

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884 (Catatan 13).

35. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2010 (continued)

On January 31, 2013, for TAL Corporate Income Tax No. 00004/206/10/093/12 dated December 3, 2012, the Bank has filed the tax objection. According to a decree of the General Director of Tax No.KEP-162/WPJ.19/2014 dated January 29, 2014, the request was rejected, then on April 24, 2014, Bank filed an appeal to the Tax Court Board and currently is still in the process on the tax court and Tax Court Board has issued a Decision No.Put.61604/ PP/M.B/15/2015 dated 5 Juni 2015 which has granted the Bank's appeal. On July 27, 2015, Bank has received repayment of Bank's appeal.

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter (TAL) of Tax Underpayment amounted to Rp3,884 (Note 13).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Bank akan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak.

Pajak atas penilaian kembali aset tetap

Bank berdasarkan surat No.1195/S/DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan hal tersebut BTN melakukan estimasi atas nilai wajar aset tetap berupa tanah, dan kemudian atas kenaikan nilai wajar dibanding dengan nilai buku aset tetap yang ada, dilakukan pembayaran pajak sebesar Rp40.035 pada tanggal 10 Desember 2015, meskipun belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Pembayaran pajak tersebut dicatat pada akun aset lain-lain-uang muka pajak (Catatan 13).

Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 90005/106/14/093/15 tanggal 29 Desember 2015, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp166.342 serta sanksi administrasi sebesar Rp26.615, sehubungan dengan koreksi atas saldo Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) minimum Bank Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa atas surat tagihan pajak tersebut tidak tepat dan perlakuannya di BTN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

35. TAXATION (continued)

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. The Bank will then file the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters.

Tax for revaluation of fixed assets

The Bank based on the letter No.1195/S/DIR/XII/2015 on December 8, 2015 have submitted an application regarding "revaluation of fixed assets for tax purposes on 2016 by tax payer that have not revalued fixed assets".

Based on the regulation No.191/PMK/010/2015 on October 15, 2015, from the Ministry of Finance, applications that are submitted up to December 31, 2015 will receive special treatment in the form of final tax rate of 3%. In conjunction based on estimated fair value of fixed assets such as land, and increase of fair value compared to the book value, BTN have made tax payment amounting to Rp40,035 on December 10, 2015, even though there are no approval from the Tax Office. The tax payment is recorded under Other Assets-Prepaid Tax (Note 13).

Tax Income Invoice Letter for fiscal year 2014

The Tax Office based on the tax invoice letter No. 90005/106/14/093/15 on December 29, 2015, have determined a deficit in income tax for 2014 amounting to Rp166,342 and administration fine amounting to Rp26,615, in relation to correction of provision of losses (PPAP). Management believes that the tax collection letter is not right and BTN treatment is in accordance with the applicable legislation.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

**Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun
pajak 2014 (lanjutan)**

Pada tanggal 5 Januari 2016, Bank mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk memenuhi syarat pembatalan surat tagihan pajak tersebut, pada tanggal 30 Desember 2015 Bank telah membayar deposit sebesar Rp166.342 dan dicatat dalam akun aset lain-lain – uang muka pajak (Catatan 13). Sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, pengajuan permohonan tersebut masih dalam proses.

35. TAXATION (continued)

**Tax Income Invoice Letter for fiscal year
2014 (continued)**

On January 5, 2016, Bank have submitted an appeal for the tax invoice. To qualify for the requirement in revoking the tax bill, on December 30, 2015 Bank have to pay a deposit amounting to Rp166,342 and it was recorded as other assets - advances taxes (Note 13). As of the date of January 29, 2016, submission of application is still in process.

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
<u>KOMITMEN</u>			<u>COMMITMENTS</u>
Liabilitas Komitmen			Commitments payable
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	<u>13.209.613</u>	<u>11.224.658</u>	Unused loan facility commitments
<u>KONTINJENSI</u>			<u>CONTINGENCIES</u>
Tagihan Kontinjensi			Contingent receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.908.418	1.644.444	Interest income on non-performing assets
Liabilitas Kontinjensi			Contingent payables
Garansi yang diterbitkan (Catatan 23)	(1.460.068)	(1.354.852)	Guarantees issued (Note 23)
Kontinjensi - neto	<u><u>448.350</u></u>	<u><u>289.592</u></u>	Contingencies - net

37. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti ("Program Pensiun") dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank yaitu sebesar 22,79%.

37. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan ("Pension Plan") and the right to pension benefits is given based on the established conditions which are stated in the regulations with consideration to the yearly gratuity factor over the working period and income on the Pension Fund. The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank at 22.79%.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 2,57% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 8,93%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 11 Januari 2016 dan 29 Januari 2015 dari aktuaris independen Bestama Aktuaris.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	<i>Basic pensionable annual salary increase rate</i>
Tingkat mortalita (kematian)	GAM-1971	GAM-1971	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	1,00%	1,00%	<i>Disability rate</i>
Tingkat Diskonto			<i>Discount rate</i>
Imbalan Jangka Panjang Lainnya -			<i>Other long-term benefits -</i>
Penghargaan Masa Kerja	8,90%	8,30%	<i>Gratuity</i>
Program Pesangon Pensiun -			<i>Retirement severance program -</i>
Selisih DPLK	9,10%	8,50%	<i>Difference from DPLK</i>
Masa Persiapan Pensiun	8,80%	8,00%	<i>Retirement Preparation Period</i>
Program Pensiun Imbalan Pasti	8,80%	8,00%	<i>Deferred Benefit Pension Plan</i>
Program Kesejahteraan	8,80%	7,90%	<i>Welfare Program</i>

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined contribution plan

The Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within one year from the normal pension age (56 years old).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 2.57% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 8.93%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2015 and 2014 is based on the actuarial reports dated January 11, 2016 and January 29, 2015, of Bestama Aktuaris, an independent actuary.

The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/
Year Ended December 31, 2015

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	27.259	34.250	61.509	Current service cost
luran peserta	(7.570)	(7.767)	(15.337)	Contribution from participant
Beban bunga neto	(591)	8.456	7.865	Net interest cost
Kerugian aktuarial	-	22.635	22.635	Actuarial loss
Biaya jasa lalu	45.458	-	45.458	Past service cost
Beban imbalan kerja - neto	64.556	57.574	122.130	Employee benefits expense - net

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/
Year Ended December 31, 2014^{*)}

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	29.016	34.420	63.436	Current service cost
luran peserta	(7.394)	(7.601)	(14.995)	Contribution from participant
Beban bunga neto	-	9.905	9.905	Net interest cost
Kerugian aktuarial	-	1.652	1.652	Actuarial loss
Beban imbalan kerja - neto	21.622	38.376	59.998	Employee benefits expense - net

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

31 Desember/December 31, 2015

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	118.548	118.548	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	64.556	57.574	122.130	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(30.083)	24.607	(5.476)	Reassessment of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran manfaat aktual	(34.473)	(54.929)	(89.402)	Actual benefit paid
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	-	145.800	145.800	Balance liabilities at end of year (Note 24)

31 Desember/December 31, 2014^{*)}

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	110.051	110.051	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	21.622	38.376	59.998	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	11.768	21.417	33.185	Reassessment of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran manfaat aktual	(33.390)	(51.296)	(84.686)	Actual benefit paid
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	-	118.548	118.548	Balance liabilities at end of year (Note 24)

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

*) As restated (Note 49)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

b. *Movements of liabilities for employee benefits (continued)*

	31 Desember 2013/1 Januari 2014/ December 31, 2013/1 Januari 2014 ⁷⁾			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	(131.518)	129.828	(1.690)	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	-	23.899	23.899	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	131.518	(17.267)	114.251	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran manfaat aktual	-	(26.409)	(26.409)	Actual benefit paid
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	-	110.051	110.051	Balance liabilities at end of year (Note 24)

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. *The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:*

	31 Desember/December 31, 2015			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.148.605	753.888	1.902.493	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	27.259	34.250	61.509	Current service cost
Beban bunga	90.186	58.458	148.644	Interest cost
Biaya jasa lalu	45.458	-	45.458	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan (Keuntungan) kerugian aktuarial	(69.808)	(67.509)	(137.317)	Benefits paid
	(43.283)	(69.498)	(112.781)	Actuarial (gain) loss
Saldo pada akhir tahun	1.198.417	709.589	1.908.006	Balance at end of year

	31 Desember/December 31, 2014			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	912.252	667.682	1.579.934	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	29.016	26.113	55.129	Current service cost
Beban bunga	77.541	65.609	143.150	Interest cost
Manfaat yang dibayarkan (Keuntungan) kerugian aktuarial	(59.213)	(72.701)	(131.914)	Benefits paid
	189.009	67.185	256.194	Actuarial gain (loss)
Saldo pada akhir tahun	1.148.605	753.888	1.902.493	Balance at end of year

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

d. *The movements in the fair value of plan assets are as follows:*

	31 Desember/December 31, 2015			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.437.731	642.870	2.080.601	Balance at beginning of year
Hasil pengembangan aset program	87.726	32.662	120.388	Return on plan asset
Kontribusi Bank	34.473	26.985	61.458	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.570	7.767	15.337	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(69.808)	(39.564)	(109.372)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	1.497.692	670.720	2.168.412	Balance at end of year

⁷⁾ Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

⁷⁾ As restated (Note 49)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut (lanjutan):

d. The movements in the fair value of plan assets are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2014

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.187.798	597.023	1.784.821	Balance at beginning of year
Hasil pengembangan aset program	268.362	59.651	328.013	Return on plan asset
Kontribusi Bank	33.390	26.410	59.800	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.394	7.601	14.995	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(59.213)	(47.815)	(107.028)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	1.437.731	642.870	2.080.601	Balance at end of year

e. Pengukuran kembali (asset) liabilitas imbalan kerja neto

d. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities

31 Desember/December 31, 2015

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	143.285	3.717	147.002	Balance at beginning of year
(Keuntungan) aktuaris	(43.283)	(92.133)	(135.416)	Actuary (gain)
Imbal hasil atas aset program	26.182	17.935	44.117	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(12.982)	98.805	85.823	change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	113.202	28.324	141.526	Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2014¹⁾

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	131.517	(17.701)	113.816	Balance at beginning of year
Kerugian aktuaris	189.009	65.533	254.542	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	(167.399)	(8.903)	(176.302)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(9.842)	(35.212)	(45.054)	change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	143.285	3.717	147.002	Balance at the end of year

31 Desember 2013/1 Januari 2014
December 31, 2013/1 Januari 2014¹⁾

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	(144.029)	(29.215)	(173.244)	Balance at beginning of year
(Keuntungan) kerugian aktuaris	-	-	-	Actuary (gain) loss
Imbal hasil atas aset program	-	-	-	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	275.546	11.514	287.060	change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	131.517	(17.701)	113.816	Balance at the end of year

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan Bank terdiri dari Surat Berharga Negara, Obligasi, Deposito Berjangka dan Saham.

f. The asset program's investment portfolio that placed in the form of Bank's financial instruments consist of government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

¹⁾ Setelah penyajian kembali (Catatan 49)

¹⁾ As restated (Note 49)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PELAPORAN SEGMENT

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha:

38. SEGMENT REPORTING

Segment information based on business type are as follows:

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut/ As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	14.455.136	511.073	-	14.966.209	<i>Segment income</i>
Beban segmen	(8.143.967)	(11.166)	-	(8.155.133)	<i>Segment expenses</i>
Pendapatan segmen - neto	6.311.169	499.907	-	6.811.076	<i>Segment Income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya	1.070.040	36.486	-	1.106.526	<i>Other operating income</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(718.428)	(182.580)	-	(901.008)	<i>Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets</i>
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	7.198	-	7.198	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
Beban operasional lainnya	(4.278.836)	(211.351)	-	(4.490.187)	<i>Other operating expenses</i>
Laba operasional	2.383.945	149.660	-	2.533.605	<i>Income from operations</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(102.389)	110.670	-	8.281	<i>Non-operating income (expenses) - net</i>
Beban pajak	(690.979)	-	-	(690.979)	<i>Tax expense</i>
Laba tahun berjalan	1.590.577	260.330	-	1.850.907	<i>Income for the year</i>
Total aset	159.835.661	13.268.941	(1.297.010)	171.807.592	<i>Total assets</i>
Total liabilitas	147.534.993	11.709.502	(1.297.010)	157.947.485	<i>Total liabilities</i>

Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut/ As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	12.394.564	412.764	-	12.807.328	<i>Segment income</i>
Beban segmen	(7.332.418)	(10.329)	-	(7.342.747)	<i>Segment expenses</i>
Pendapatan segmen - neto	5.062.146	402.435	-	5.464.581	<i>Segment Income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya	860.284	34.536	-	894.820	<i>Other operating income</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(693.604)	(77.562)	-	(771.166)	<i>Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets</i>
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(729)	-	(729)	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
Beban operasional lainnya	(3.831.984)	(178.155)	-	(4.010.139)	<i>Other operating expenses</i>
Laba operasional	1.396.842	180.525	-	1.577.367	<i>Income from operations</i>

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

38. SEGMENT REPORTING (continued)

Tanggal 31 Desember 2014
dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut/
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended

	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(19.652)	21.612	-	1.960	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(433.755)	-	-	(433.755)	Tax expense
Laba tahun berjalan	943.435	202.137	-	1.145.572	Income for the year
Total aset	135.076.817	11.151.110	(1.645.574)	144.582.353	Total assets
Total liabilitas	124.679.741	9.295.291	(1.645.574)	132.329.458	Total liabilities

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

39. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Based on Article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit ((Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah) (UP3)) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/ KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
(lanjutan)**

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta (angka penuh).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar (angka penuh) dari semula Rp100 juta (angka penuh), efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 7,50% dan 7,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 1,25% dan 1,5% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp229.549 dan Rp203.451.

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2015 dan 2014:

**Pihak-pihak berelasi/
Related parties**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

**Jenis hubungan/
Type of relationship**

Kepemilikan melalui pemerintah pusat/
Ownership through the
Central Government of the
Republic of Indonesia

**Unsur transaksi pihak berelasi/
Nature of related party transactions**

Efek-efek/ Securities

**39. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS
(continued)**

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million (full amount).

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion (full amount), from the previous Rp100 million (full amount), effective on the date stated above.

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2015 and 2014 were 7.50% and 7.75%, respectively, for deposits in Rupiah and 1.25% and 1.5% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp229,549 and Rp203,451 for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the Bank's key management personnel.

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2015 and 2014:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2015 dan 2014 (lanjutan):

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2015 and 2014 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain dan efek-efek/ <i>Current accounts with other banks and securities</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, efek-efek, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan simpanan dari bank lain/ <i>Current accounts with other banks, securities, placement with Bank Indonesia and other banks and deposits from other banks</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, pinjaman yang diterima/ <i>Current accounts with other banks, securities sold under repurchase agreements and fund borrowings</i>
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ <i>Current accounts with other banks and placement with Bank Indonesia and other banks</i>
PT BRISyariah	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ <i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
PT Bank Syariah Bukopin	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Simpanan dari Bank lain/ <i>Deposits from other Banks</i>
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2015 dan 2014 (lanjutan):

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2015 and 2014 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ <i>Ownership of majority shares through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang diterima dan Obligasi Pemerintah/ <i>Fund borrowings and Government Bonds</i>
PT Sarana Multigriya Finance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang diterima dan efek-efek/ <i>Fund borrowings and securities</i>
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Jasaraharja Putera	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Jasaraharja (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Askrimdo (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ <i>Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2015 dan 2014 (lanjutan):

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2015 and 2014 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Manajemen Kunci/ <i>Key Management</i>	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ <i>Control on company's activities</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Simpanan dari nasabah/ <i>Loans and sharia financing/receivables and Deposit from customers</i>
a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:		a. <i>Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:</i>
	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>
Aset		Assets
Giro pada bank lain (Catatan 6)	39.918	31.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	160.000	-
Efek-efek (Catatan 8)	118.224	206.834
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	8.230.908	8.238.065
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 10)	25.000	126.337
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	8.574.050	8.602.287
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(22)	(65)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	8.574.028	8.602.222
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	4,99%	5,95%
		Total assets to related parties
		<i>Current accounts with other banks (Note 6)</i>
		<i>Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)</i>
		<i>Securities (Note 8)</i>
		<i>Government bonds (Note 9)</i>
		<i>Loans and sharia financing/receivables (Note 10)</i>
		Total assets to related parties
		<i>Allowance for impairment losses for related parties</i>
		Total assets from related parties - net
		Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilitas		Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 15,16 dan 17)	61.298.554	51.273.337
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	1.484	3.299
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19)	-	394.369
Pinjaman yang diterima (Catatan 21)	5.728.553	4.079.030
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	67.028.591	55.750.035
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	42,44%	42,13%
		Total liabilities to related parties
		<i>Deposits from customers (Notes 15,16, and 17)</i>
		<i>Deposits from other banks (Note 18)</i>
		<i>Securities sold under repurchase agreements (Note 19)</i>
		<i>Fund borrowings (Note 21)</i>
		Total liabilities to related parties
		Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.757	9.450	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	18.456	10.476	Securities
Obligasi pemerintah	494.136	466.517	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	470	19.544	Loans and sharia financing/receivables
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	518.819	505.987	Total interest income and income from profit sharing from related parties
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	3,47%	3,95%	Percentage to total interest income and income from profit sharing
Beban bunga dan bonus			Interest and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	1.851.258	1.515.247	Deposits from customers
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.560	5.294	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	392.863	312.933	Fund borrowings
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	2.250.681	1.833.474	Total interest and bonus expenses from related parties
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	27,60%	24,97%	Percentage to total interest and bonus expense
	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif			Commitments and contingencies in administrative accounts
Garansi yang diterbitkan (Catatan 23)	49.516	82.573	Guarantees issued (Note 23)
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	1,64%	2,66%	Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bina Griya (Catatan 11).

As of December 31, 2015 and 2014, Bank insured certain premises and equipment to PT Asuransi Bina Griya (Note 11).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

b. Transaksi dengan manajemen kunci:

b. Transactions with key management personnel:

	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Aset			Assets
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 10)	8.403	7.976	Loan and sharia financing/receivables (Note 10)
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(1)	(10)	Allowance for impairment losses for related parties
Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dari manajemen kunci	8.402	7.966	Total loan and sharia financing/ receivables from key management personnel
Persentase terhadap total asset	0,01%	0,01%	Percentage to total assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 15,16 dan 17)	16.477	14.116	Deposits from customers (Notes 15,16, and 17)
Kompensasi karyawan kunci (Catatan 37)	95.304	100.217	Compensation of key employees (Notes 37)
Total liabilitas dari manajemen kunci	111.781	114.333	Total liabilities from key management personnel
Persentase terhadap total liabilitas	0,07%	0,09%	Percentage to total liabilities
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2015	2014	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	760	629	Loans and sharia financing/ receivables
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,01%	0,01%	Percentage to total interest income and income from profit sharing
Beban bunga dan bonus			Interest and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	329	426	Deposits from customers
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	0,01%	0,01%	Percentage to total interest and bonus expense

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2015	2014
Beban gaji dan tunjangan:		
Direksi (Catatan 1f)	37.216	37.869
Dewan Komisaris (Catatan 1f)	16.292	16.721
Karyawan Kunci	146.123	74.612
Total	199.631	129.202
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	10,35%	8.26%

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

b. Transactions with key management personnel (continued):

Salaries and employee benefits:
Board of Directors (Note 1f)
Board of Commissioners (Note 1f)
Key Employees
Total
Percentage to total salaries and employee benefits

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

	31 Desember/December 31, 2015		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	663.008	442.226	220.782
Euro Eropa	9.876	191	9.685
Yen Jepang	9.244	-	9.244
Pound Sterling Inggris	3	-	3
Dolar Singapura	1.579	-	1.579
Dolar Australia	275	-	275
Renminbi China	329	-	329
Dolar Hongkong	1	-	1
Ringgit Malaysia	21	13	8
Riyal Arab Saudi	47	-	47
			241.953
Modal (Catatan 42)			13.893.026
Rasio PDN			1,74%

**41. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES**

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

<u>Statement of financial position</u>
<u>Administrative accounts</u>
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen
Great Britain Poundsterling
Singapore Dollar
Australian Dollar
China Renminbi
Hongkong Dollar
Malaysian Ringgit
Saudi Riyal

Capital (Note 42)

NOP ratio

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)**

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

**41. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES (continued)**

Net Open Position (continued)

The Bank's NOP as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

31 Desember/December 31, 2014			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	809.553	613.964	195.589
Euro Eropa	8.780	467	8.313
Yen Jepang	10.291	326	9.965
Pound Sterling Inggris	-	283	283
Dolar Singapura	48	-	48
			214.198
Modal (Catatan 42)			11.171.458
Rasio PDN			1,92%

Statement of financial position
Administrative accounts
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen
Great Britain Poundsterling
Singapore Dollar

Capital (Note 42)

NOP ratio

**42. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM**

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti (modal inti utama/Common Equity Tier 1 dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap, sedangkan CAR pada tanggal 31 Desember 2014 dihitung berdasarkan PBI No. 14/18/PBI/2012 dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, kecuali pasal 7 ayat 1 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pasal tersebut digantikan dengan pasal 11 ayat 2 dalam PBI No.15/12/PBI/2013 terkait ketentuan penyediaan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi.

**42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR)**

Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2015 was calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/12/PBI/2013 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks where capital for credit risk consist of core capital (main core capital main / Common Equity Tier 1 capital and additional core capital) and supplementary capital, while the CAR on December 31, 2014 was calculated based on PBI No. 14/18/PBI/2012 where capital for credit risk consist of core capital and supplementary capital, except for Article 7, paragraph 1, which was revoked and was succeeded because the article was replaced by Article 11, paragraph 2 of Regulation No.15/12/PBI/2013 related provisions for minimum core capital requirement of 6% of risk weighted assets, both individually and on a consolidated basis.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (lanjutan)**

Sejak tanggal 21 Agustus 2015, Bank telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa bobot risiko kredit beragunan rumah tinggal paling rendah sebesar 35% untuk kredit konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal (KPR) atau apartemen (KPA) atau kredit konsumsi dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen dengan syarat tertentu, atau paling rendah sebesar 20% untuk KPR yang merupakan program Pemerintah Indonesia dengan syarat tertentu.

Selain itu, bobot risiko kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 30 Juni 2015 dan 2014, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum per 31 Desember 2015 dan 2014 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

**42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)**

Since August 21, 2015, the Bank has implemented Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 11 / POJK.03 / 2015 concerning prudential provisions in the Framework of the National Economic Stimulus for Commercial Banks.

The regulation stipulates that the weight of risk for credit backed residences is on minimum of 35% for consumer credit in relation with the possession of house (KPR) or an apartment (KPA) or consumer loan with collateral such as house or apartment with certain conditions, or at least by 20% for a mortgage which is a program of the Government of Indonesia with certain conditions.

In addition, the risk weight of credit to Small Medium Enterprise (SME) is guaranteed by a guarantee institution or BUMD credit insurance status of enterprises is set at 50% as long as it is fulfilling the requirement throughout meet the requirements set.

Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 is valid up to August 21, 2017.

Based on the risk profile as of June 30, 2015 and 2014, respectively, which are both *satisfactory*, the minimum CAR for December 31, 2015 and 2014, by 9% to less than 10%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the practical accounting rules differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2015 and 2014, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia for the capital adequacy ratio.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (lanjutan)**

Perhitungan CAR Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2015 and 2014 follows:

		31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Modal Inti	a	12.171.623	10.735.782	Core Capital
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	b	1.721.403	435.676	Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	c	-	-	Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	13.893.026	11.171.458	Total Core Capital and Supplementary Capital
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	e=c+d	13.893.026	11.171.458	Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Penyertaan	f	-	-	Investment
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	g=d-f	13.893.026	11.171.458	Total Capital for Credit Risk
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	h=e-f	13.893.026	11.171.458	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	i	70.474.182	66.250.928	Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk
ATMR untuk Risiko Pasar	j	222.737	226.010	Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk
ATMR untuk risiko operasional	k	11.185.168	9.855.703	Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	l=i+k	81.659.350	76.106.631	Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	m=i+j+k	81.882.087	76.332.641	(RWA) for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	n=g/l	17,01%	14,68%	CAR for Credit Risk and Operational Risk
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	o=h/m	16,97%	14,64%	CAR for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	Minimum CAR

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional. Penggunaan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk risiko kredit dan setiap triwulan untuk risiko likuiditas. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. Saat ini, *stress test* yang dilakukan oleh bank difokuskan pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar (termasuk di dalamnya risiko suku bunga) dan risiko likuiditas.

43. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SE BI No.13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by Using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been doing the calculation of minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SE BI No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Basic Indicator Approach (BIA) and the Standardized Model for market risk are in accordance with SE BI No. 9/33/DPNP dated December 18, 2007 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks, which was changed with SE BI No. 14/21/DPNP dated July 18, 2012.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario as set forth in the Risk Management Policy Manual (RMPM), which is being carried out at least once a year for credit risk and quarterly for liquidity risk. In addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole, the Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) guna meningkatkan fungsi *risk control system* minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan rencana implementasi Basel III Bank telah melakukan persiapan penerapan kerangka kerja Basel III dan terlibat di dalam *working group* masing-masing jenis risiko di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

43. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. The Bank also conducts a review of the RMPM at least once a year in order to improve the function of the risk control system. Henceforth, with regard to the implementation of Basel III, the Bank has a plan to implement the Basel III framework by involving in each types of risk working group in coordination with the Financial Services Authority.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the RMPM, if necessary.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Strategic Director*. Struktur organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Risk Officer Coordination (ROC) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi terhadap *Risk Officer* dalam melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Bank. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko, ROC dibantu oleh *Risk Superintendent (RS)* pada tingkat Divisi, *Regional Risk Superintendent (RRS)* pada tingkat Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer (BRO)* di Kantor Cabang di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination (ROC)* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division (RMD)*.

RS dan RRS merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dan Kantor Wilayah (*Regional Office*) dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi dan Kantor Wilayah dimana RS dan RRS bertugas. BRO adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Division

Risk Management Division (RMD) is a *Risk Management Working Unit (RMWU)* at the Bank, led by a *Division Head* that is responsible directly to the *Risk, Compliance & Strategic Director*. The organizational structure of the RMD consists of the *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* and *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. *Credit Risk Management Department* is responsible for credit risk management, while *Operational Risk Management Department* is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputational risk and legal risk. The *Department Head* is assisted by *Policy & Procedure Unit* and *Assessment & Measurement Unit*.

Risk Officer Coordination (ROC) has a responsibility in coordinating and supervising the *Risk Officer* during monitoring the implementation of risk management in the Bank. In performing risk monitoring functions, ROC assisted by the *Risk Superintendent (RS)* at the Division level, the *Regional Risk Superintendent (RRS)* at the level of the *Regional Office* and *Branch Risk Officer (BRO)* in the *Branch Office* under the coordination of *Risk Coordination Officer (ROC)* which is directly responsible to the *Head of Risk Management Division (RMD)*.

RS and RRS is directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management in the Division and Regional Office, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the Division and Regional office where the RS and RRS is assigned. The BRO is also directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management at branch offices, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the branch office where the BRO is assigned.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

**Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan
Manajemen Risiko**

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, RMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Selanjutnya berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank triwulan IV tahun 2015 dan 2014 berada pada peringkat low to moderate, yang tercermin dari tingkat risiko inheren moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat satisfactory. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Policies and Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with PBI No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on Risk Management for Commercial Banks, RMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on PBI No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 and SE BI No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

In general, the Bank's composite risk profile during the fourth quarter of 2015 and 2014 is low to moderate, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD, RS, RRS dan BRO untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (non-housing related).

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by RMD, RS, RRS, and BRO to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

- (i) *Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:*

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan):

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari (lanjutan):

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (coverage ratio).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur pre screening akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) *Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation (continued):*

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows (continued):

- a) *Physical collateral, such as land and buildings.*
- b) *Financial collateral, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.*
- c) *Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.*

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2015 and 2014. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2015							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	-	10.986.351	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	199.985	72	1.975	540	361	202.933	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.539.477	300.000	-	-	-	7.839.477	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.819.562	-	-	-	-	1.819.562	Securities
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	-	-	8.230.908	Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang/pebiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer	-	41.164.962	25.203.000	15.009.077	16.429.022	97.806.061	Consumer
Pemilikan rumah	-	3.516.193	3.854.528	1.443.926	2.512.222	11.326.869	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	12.829.364	5.728.241	2.847.855	3.267.153	24.672.613	Non-housing loan
Modal kerja	-	2.037.214	1.225.868	332.962	742.373	4.338.417	Working capital
Investasi	-	79.268	-	-	-	79.268	Investment
Sindikasi	-	335.498	187.882	99.828	103.077	726.285	Syndicated
Pihak ketiga	-	3.938	1.260	667	426	6.291	Third party
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related party
Bunga yang masih akan diterima	104.690	593.297	372.654	205.139	272.709	1.548.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	608.346	9.683	17.895	2.816	4.931	643.671	Other assets*)
Total kotor	29.489.319	60.869.489	36.593.303	19.942.810	23.332.274	170.227.195	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(2.064.151)	Allowances for impairment losses
Neto						168.163.044	Net

31 Desember/December 31, 2014							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	-	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.091.705	72	2.867	255	65	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	-	-	-	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.446.372	-	-	-	-	5.446.372	Securities
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	-	-	-	8.238.065	Government bonds

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third party receivables
**) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2014

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia financing/receivables
Konsumer							Consumer
Pemilikan rumah	-	34.041.535	21.083.194	12.156.124	13.312.301	80.593.154	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.843.182	3.390.827	1.382.952	2.317.350	9.934.311	Non-housing loan
Modal kerja	-	9.771.313	4.862.873	2.764.057	3.090.061	20.488.304	Working capital
Investasi	-	1.826.454	1.279.995	405.170	795.043	4.306.662	Investment
Sindikasi	-	76.978	-	-	-	76.978	Syndicated
Pihak ketiga	-	248.051	134.964	65.964	60.866	509.845	Third party
Pihak berelasi	-	4.236	1.526	785	-	6.547	Related party
Bunga yang masih akan diterima	95.008	450.108	279.372	163.464	195.537	1.183.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	540.829	3.935	15.947	2.092	2.902	565.705	Other assets*)
Total kotor	26.279.943	49.265.864	31.051.565	16.940.863	19.774.125	143.312.360	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.581.156)	Allowances for impairment losses
Neto						141.731.204	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third party receivables
**) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

31 Desember/December 31, 2015

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others*)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	599.547	629.544	216.797	117.805	1.563.693	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	1.149.330	218.680	32.070	59.988	1.460.068	Guarantees issued
Total	-	1.748.877	848.224	248.867	177.793	3.023.761	Total

31 Desember/December 31, 2014

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others*)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	951.199	496.952	177.714	118.030	1.743.895	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	1.158.851	69.134	17.387	109.480	1.354.852	Guarantees issued
Total	-	2.110.050	566.086	195.101	227.510	3.098.747	Total

*) Lain-lain Terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua
**) Only for committed unused loan facility

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2015 and 2014:

31 Desember/December 31, 2015							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	-	10.986.351	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	202.933	-	-	-	202.933	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.529.477	310.000	-	-	-	7.839.477	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.110.691	153.551	467.095	88.225	-	1.819.562	Securities
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	-	-	8.230.908	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	15.055	14.358	464.489	26.427.249	112.034.653	138.955.804	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	94.426	2.522	7.909	239.483	1.204.149	1.548.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	1.675	180.685	-	370.760	90.551	643.671	Other assets*)
Total kotor	27.968.583	864.049	939.493	27.125.717	113.329.353	170.227.195	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2.064.151)	Allowances for impairment losses
Neto						168.163.044	Net

31 Desember/December 31, 2014							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	-	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.094.964	-	-	-	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	-	-	-	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.753.834	135.465	468.900	88.173	-	5.446.372	Securities
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	-	-	-	8.238.065	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	33.533	569.576	21.293.880	94.018.812	115.915.801	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	78.976	1.308	13.494	125.786	963.925	1.183.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	14.592	231.376	-	152.586	167.151	565.705	Other assets*)
Total kotor	23.953.431	1.496.646	1.051.970	21.660.425	95.149.888	143.312.360	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.581.156)	Allowances for impairment losses
Neto						141.731.204	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) Consists of third party receivables.

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2015 and 2014, are as follows :

31 Desember/December 31, 2015							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies*)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	200	1.493.372	70.121	1.563.693	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	1.460.068	-	1.460.068	Guarantees issued
Total	-	-	200	2.953.440	70.121	3.023.761	Total

31 Desember/December 31, 2014							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies*)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	388	1.617.652	125.855	1.743.895	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	1.354.852	-	1.354.852	Guarantees issued
Total	-	-	388	2.972.504	125.855	3.098.747	Total

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

***) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

***) Only for committed unused loan facility

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Current Accounts with Other Banks

31 Desember/December 31, 2015				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Rupiah	77.075	-	77.075	Rupiah
Mata Uang Asing	124.286	1.572	125.858	Foreign currencies
Total	201.361	1.572	202.933	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.572)	Allowance for impairment losses
Neto			201.361	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2014

	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah	768.435	-	768.435
Mata Uang Asing	324.958	1.571	326.529
Total	1.093.393	1.571	1.094.964
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.571)
Neto			1.093.393

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

3. Efek-efek

31 Desember/December 31, 2015

	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Sertifikat Bank Indonesia	815.977	-	815.977
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	294.714	-	294.714
Obligasi Medium term notes	205.494	7.018	212.512
Negotiable certificate of deposits	49.281	-	49.281
Reksadana Mutual Fund	82.577	-	82.577
Efek Beragunan Aset Residential Mortgage-Backed Securities	364.501	-	364.501
Total	1.812.544	7.018	1.819.562
Cadangan kerugian penurunan nilai			(12.001)
Neto			1.807.561

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

1. Current Accounts with Other Banks (continued)

	Total
Rupiah	768.435
Foreign currencies	326.529
Total	1.094.964
Allowance for impairment losses	(1.571)
Net	1.093.393

2. Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2015 and 2014, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Securities

	Total
Certificates of Bank Indonesia	815.977
Deposits Certificates of Bank Indonesia	294.714
Bonds	212.512
Medium term notes	-
Negotiable certificate of deposits	49.281
Mutual Fund	82.577
Residential Mortgage-Backed Securities	364.501
Total	1.819.562
Allowance for impairment losses	(12.001)
Net	1.807.561

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities (continued)

	31 Desember/December 31, 2014			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not Impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Sertifikat Bank Indonesia	2.250.227	-	2.250.227	<i>Certificates of Bank Indonesia</i>
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	2.503.607	-	2.503.607	<i>Deposits Certificates of Bank Indonesia</i>
Obligasi	162.010	7.018	169.028	<i>Bonds</i>
<i>Medium term notes</i>	50.000	-	50.000	<i>Medium term notes</i>
<i>Negotiable certificate of deposits</i>	24.672	-	24.672	<i>Negotiable certificate of deposits</i>
Reksadana	82.321	-	82.321	<i>Mutual Fund</i>
Efek Beragunan Aset	366.517	-	366.517	<i>Residential Mortgage-Backed Securities</i>
Total	5.439.354	7.018	5.446.372	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(9.402)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto			5.436.970	Net

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2015 dan 2014, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Per 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 55 dan Peraturan Bank Indonesia.

4. Administrative account

As of December 31, 2015 and 2014, these administrative account items are not impaired individually as well as collectively.

5. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2015 and 2014, these financial assets are impaired subject to individual and collective impairment according to SFAS No. 55 and Bank Indonesia regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

5. Loans and sharia financing/receivables (continued)

Loans and sharia financing/receivables, as of December 31, 2015 and 2014, are summarized as follows:

31 Desember/December 31, 2015

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade				
Perumahan	83.932.421	23.388.014	17.604.110	291.207	125.215.752	Property
Konstruksi	1.674.084	1.966.805	718.635	47.218	4.406.742	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	801.800	2.260.256	620.141	36.638	3.718.835	Business services
Perdagangan, restoran dan hotel	1.142.663	332.576	586.853	135.268	2.197.360	Trading, restaurants and hotels
Jasa-jasa sosial	619.218	88.559	67.299	30.414	805.490	Social services
Manufaktur	165.583	27.691	68.001	19.135	280.410	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	70.045	45.514	78.993	4.938	199.490	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	28.994	16.181	57.080	26.794	129.049	Farming
Pertambangan	50.899	14.744	56.597	10.692	132.932	Mining
Listrik, gas dan air	8.507	8.059	8.996	-	25.562	Electricity, gas and water
Lain-lain	1.589.898	64.319	188.060	1.905	1.844.182	Others
Total	90.084.112	28.212.718	20.054.765	604.209	138.955.804	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(2.050.578)	Allowance for impairment losses
Neto					136.905.226	Net

31 Desember/December 31, 2014

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade				
Perumahan	61.265.366	23.266.764	16.981.506	223.317	101.736.953	Property
Konstruksi	1.264.173	1.804.684	645.560	128.200	3.842.617	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	576.625	2.363.102	562.219	1.170	3.503.116	Business services
Perdagangan, restoran dan hotel	1.426.372	511.673	607.189	38.730	2.583.964	Trading, restaurants and hotels
Jasa-jasa sosial	420.194	132.632	99.258	10.404	662.488	Social services
Manufaktur	143.552	36.138	85.796	10.573	276.059	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	94.491	80.452	52.939	18.553	246.435	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	38.962	27.294	91.632	7.794	165.682	Farming
Pertambangan	46.142	20.580	84.845	6.298	157.865	Mining
Listrik, gas dan air	12.435	10.234	7.312	-	29.981	Electricity, gas and water
Lain-lain	2.397.044	156.115	157.482	-	2.710.641	Others
Total	67.685.356	28.409.668	19.375.738	445.039	115.915.801	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1.570.183)	Allowance for impairment losses
Neto					114.345.618	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2015						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Nilai wajar melalui laba rugi						Fair value through profit or loss
Efek	-	-	-	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	19.267	-	-	-	19.267	Government bonds
Tersedia untuk dijual						Available for sale
Efek	1.456.034	-	-	5.018	1.461.052	Securities
Obligasi Pemerintah	5.111.280	-	-	-	5.111.280	Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held to maturity
Efek	356.510	-	-	2.000	358.510	Securities
Obligasi Pemerintah	3.100.361	-	-	-	3.100.361	Government bonds
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	10.986.351	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	201.361	-	-	1.572	202.933	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah Non kepemilikan rumah	62.410.332	20.841.981	14.553.748	-	97.806.061	Housing loan
rumah	8.174.434	1.557.484	1.594.951	-	11.326.869	Non-housing loan
Modal kerja	16.482.663	4.771.745	3.030.203	388.002	24.672.613	Working capital
Investasi	2.226.486	1.024.694	871.030	216.207	4.338.417	Investment
Sindikasi	79.268	-	-	-	79.268	Syndicated
Direksi dan karyawan	706.671	14.781	4.833	-	726.285	Directors and employees
Berelasi	4.258	2.033	-	-	6.291	Related
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	-	-	-	1.548.489	Interests receivable
Aset lain-lain ¹⁾	-	643.671	-	-	643.671	Other assets ¹⁾
Total	120.703.242	28.856.389	20.054.765	612.799	170.227.195	Total
Cadangan kerugian nilai					(2.064.151)	Allowance for impairment losses
Neto					168.163.044	Net

31 Desember/December 31, 2014						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Nilai wajar melalui laba rugi						Fair value through profit or loss
Efek	148.588	-	-	-	148.588	Securities
Obligasi Pemerintah	591.732	-	-	-	591.732	Government bonds
Tersedia untuk dijual						Available for sale
Efek	4.848.566	-	-	5.018	4.853.584	Securities
Obligasi Pemerintah	5.994.262	-	-	-	5.994.262	Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held to maturity
Efek	442.200	-	-	2.000	444.200	Securities
Obligasi Pemerintah	1.652.071	-	-	-	1.652.071	Government bonds

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

31 Desember/December 31, 2014						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Total	
	Tingkat Tinggi/High Grade	Tingkat standar/Standard grade				
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.093.393	-	-	1.571	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	-	-	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	47.071.207	19.922.542	13.599.405	-	80.593.154	Housing loan
Non kepemilikan rumah	6.508.929	1.868.572	1.556.810	-	9.934.311	Non-housing loan
Modal kerja	11.571.556	5.231.605	3.383.122	302.021	20.488.304	Working capital
Investasi	1.966.380	1.366.066	831.198	143.018	4.306.662	Investment
Sindikasi	76.978	-	-	-	76.978	Syndicated
Direksi dan karyawan	485.785	18.857	5.203	-	509.845	Directors and employees
Berelasi	4.521	2.026	-	-	6.547	Related
Bunga yang masih akan diterima	95.008	1.088.481	-	-	1.183.489	Interests receivable
Aset lain-lain ^{*)}	-	565.705	-	-	565.705	Other assets ^{*)}
Total	93.419.140	30.063.854	19.375.738	453.628	143.312.360	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.581.156)	Allowance for impairment losses
Neto					141.731.204	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) Consists of third party receivables

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

The credit quality are defined as follows:

Tingkat tinggi

High grade

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat tinggi (lanjutan)

- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi, memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih, akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality are defined as follows (continued):

High grade (continued)

- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan, borrowers with high degree of stability and diversity, has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time, very strong debt service capacity and has conservative statement of financial position ratios.
- (c) Securities and Government bonds are Sovereign securities, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over, smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market, volatility of earnings and overall performance, debt service capacity is adequate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat standar (lanjutan)

- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).
- (v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sebagai berikut:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below show the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality are defined as follows (continued):

Standard grade (continued)

- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).
- (v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2015 and 2014, follows:

31 Desember/December 31, 2015						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	lebih dari 180 hari/ More than 180 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	11.680.597	138.699	258.851	2.475.601	14.553.748	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	1.230.320	21.976	25.866	316.789	1.594.951	Non housing loan
Modal kerja	1.874.952	10.339	27.976	1.116.936	3.030.203	Working capital
Investasi	259.020	40.400	66.119	505.491	871.030	Investment
Sindikasi	-	-	-	-	-	Syndicated
Direktur dan karyawan	1.970	327	251	2.285	4.833	Directors and employees
Total	15.046.859	211.741	379.063	4.417.102	20.054.765	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.698.558)	Allowance for impairment losses
Neto					18.356.207	Net

31 Desember/December 31, 2014						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	lebih dari 180 hari/ More than 180 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	10.735.812	184.472	248.818	2.430.303	13.599.405	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	1.223.925	31.289	29.207	272.389	1.556.810	Non housing loan
Modal kerja	2.094.852	41.947	104.237	1.142.086	3.383.122	Working capital
Investasi	516.381	23.543	41.214	250.060	831.198	Investment
Direktur dan karyawan	3.253	185	432	1.333	5.203	Directors and employees
Total	14.574.223	281.436	423.908	4.096.171	19.375.738	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.240.503)	Allowance for impairment losses
Neto					18.135.235	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

31 Desember/December 31, 2015

	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/Non-Housing Loan	Modal Kerja/Working Capital	Investasi/Investment	Sindikasi/Syndicated	Direksi dan Karyawan/Directors and Employess	
Saldo awal tahun	776.922	74.860	602.307	115.946	12	136	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	100.794	3.997	595.583	197.600	24	720	Provision for impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	1.867	232	12.463	1.714	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(182.859)	(5.773)	(185.832)	(60.135)	-	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	696.724	73.316	1.024.521	255.125	36	856	Balance at end of year
Penurunan nilai individual			204.135	87.292			Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	696.724	73.316	820.386	167.833	36	856	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	388.002	216.207	-	-	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

31 Desember/December 31, 2014

	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/Non-Housing Loan	Modal Kerja/Working Capital	Investasi/Investment	Sindikasi/Syndicated	Direksi dan Karyawan/Directors and Employess	
Saldo awal tahun	670.219	45.867	371.601	49.351	3	136	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	143.992	30.534	463.354	137.724	9	-	Provision for impairment losses during the year
Penerapan awal PSAK 102 (Revisi 2013)	(4.620)	(1.509)	1.707	(1.970)	-	-	Implementation of SFAS 102 (Revised 2013)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	421	-	12.303	2.071	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(33.090)	(32)	(246.658)	(71.230)	-	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	776.922	74.860	602.307	115.946	12	136	Balance at end of year
Penurunan nilai individual			72.808	34.618			Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	776.922	74.860	529.499	81.328	12	136	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	302.021	143.018	-	-	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Intern dengan menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division (IAD)* dan *Risk Management Division (RMD)*.

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- a. *inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or*
- b. *inability to generate cash flows from funding, interbank transactions and fund borrowings.*

*In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the BOC and BOC who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (*risk appetite*) and *risk tolerance*, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and RMD.*

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus kas, dan *Stress testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are liquidity ratio, maturity profile, cash flow projection, and stress testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

31 Desember/December 31, 2015							
Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months		
ASET							ASSETS
Kas	1.181.219	-	1.181.219	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	10.986.351	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	201.361	(1.572)	202.933	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.839.477	-	7.839.477	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.807.561	(12.001)	1.330.364	281.849	200.331	7.018	Securities
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	26.901	1.285.412	6.918.595	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	136.905.226	(2.050.578)	1.536.861	4.277.034	3.900.981	129.240.928	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	-	1.548.489	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	643.671	-	643.671	-	-	-	Other assets**)
Total	169.344.263	(2.064.151)	25.269.365	4.585.784	5.386.724	136.166.541	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	1.594.600	-	1.594.600	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	127.708.670	-	102.159.451	15.663.814	7.334.495	2.550.910	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.721.198	-	1.173.206	547.592	400	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.135.091	-	-	-	750.091	1.385.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	12.492.202	-	-	996.844	1.558.806	9.936.552	Securities issued
Pinjaman yang diterima	7.726.728	-	-	1.506.968	4.217.679	2.002.081	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	357.364	-	357.364	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	2.698.574	-	2.698.574	-	-	-	Other liabilities****)
Total	156.434.427	-	107.983.195	18.715.218	13.861.471	15.874.543	Total
Perbedaan jatuh tempo	12.909.836	(2.064.151)	(82.713.830)	(14.129.434)	(8.474.747)	120.291.998	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

***) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

****) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

*****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

***) Consists of third party receivables.

****) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

*****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

		31 Desember/December 31, 2014						
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months		
ASET							ASSETS	
Kas	920.482	-	920.482	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	-	9.371.509	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	1.093.393	(1.571)	1.094.964	-	-	-	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	1.496.455	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	5.436.970	(9.402)	5.002.172	24.672	50.000	369.528	Securities	
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	6.585.994	-	5.000	1.647.071	Government bonds	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	114.345.618	(1.570.183)	1.024.958	4.580.431	5.438.085	104.872.327	Loans and sharia financing/receivables	
Bunga yang masih akan diterima	1.183.489	-	1.183.489	-	-	-	Interest receivable	
Aset lain-lain**)	565.705	-	565.705	-	-	-	Other assets**)	
Total	142.651.686	(1.581.156)	27.245.728	4.605.103	5.493.085	106.888.926	Total	
LIABILITAS							LIABILITIES	
Liabilitas segera ***)	1.638.831	-	1.638.831	-	-	-	Liabilities due immediately***)	
Simpanan nasabah	106.470.677	-	83.780.356	14.765.627	1.156.463	6.768.231	Deposits from customers	
Simpanan dari bank lain	1.179.269	-	726.544	451.510	1.215	-	Deposits from other banks	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603	-	482.604	650.000	1.299.999	1.385.000	Securities sold under repurchase agreements	
Surat berharga yang diterbitkan	8.519.884	-	-	269.686	41.494	8.208.704	Securities issued	
Pinjaman yang diterima	6.998.213	-	-	1.025.195	2.506.968	3.466.050	Fund borrowings	
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	-	308.996	-	-	-	Interest payables	
Liabilitas lain-lain****)	2.280.158	-	2.280.158	-	-	-	Other liabilities****)	
Total	131.213.631	-	89.217.489	17.162.018	5.006.139	19.827.985	Total	
Perbedaan jatuh tempo	11.438.055	(1.581.156)	(61.971.761)	(12.556.915)	486.946	87.060.941	Maturity gap	

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

***) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

****) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

*****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

***) Consists of third party receivables.

****) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

*****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga) (tidak diaudit):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest) (unaudited):

31 Desember/December 31, 2015						
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months
LIABILITAS						
Liabilitas segera *)	1.594.600	-	1.594.600	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	70.377.470	-	42.958.433	16.807.274	7.871.941	2.739.822
Tabungan	31.782.416	31.782.416	-	-	-	-
Giro	31.677.230	31.677.230	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	1.875.804	18.271	1.857.533	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.715.612	-	40.981	55.924	817.110	1.801.597
Surat berharga yang diterbitkan	18.529.189	-	75.000	1.458.063	2.131.188	14.864.938
Pinjaman yang diterima Bunga yang masih harus dibayar	8.243.816	-	-	1.606.821	4.499.032	2.137.963
Liabilitas lain-lain**)	357.364	-	357.364	-	-	-
	2.698.574	-	2.698.574	-	-	-
Total	169.852.075	63.477.917	49.582.485	19.928.082	15.319.271	21.544.320

LIABILITIES
Liabilities due immediately*)
Deposits from customers
 Time deposits
 Savings deposits
 Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under
repurchase agreements
Securities issued
Fund borrowings
Interest payables
Other liabilities**)

31 Desember/December 31, 2014						
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months
LIABILITAS						
Liabilitas segera *)	1.638.831	-	1.638.831	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	61.535.348	-	36.610.033	16.309.723	1.301.177	7.314.415
Tabungan	27.053.044	27.053.044	-	-	-	-
Giro	23.871.795	23.871.795	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	1.186.695	16.153	712.122	457.201	1.219	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.374.678	-	538.369	744.430	1.378.313	1.713.566
Surat berharga yang diterbitkan	13.019.563	-	-	648.063	413.062	11.958.438
Pinjaman yang diterima Bunga yang masih harus dibayar	7.493.202	-	-	1.093.193	2.681.055	3.718.954
Liabilitas lain-lain**)	308.996	-	308.996	-	-	-
	2.280.158	-	2.280.158	-	-	-
Total	142.762.310	50.940.992	42.088.509	19.252.610	5.774.826	24.705.373

LIABILITIES
Liabilities due immediately*)
Deposits from customers
 Time deposits
 Savings deposits
 Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under
repurchase agreements
Securities issued
Fund borrowings
Interest payables
Other liabilities**)

*) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
**) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
**) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Aset	2015		2014		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
Giro pada bank lain	0,63%	0,01%	0,54%	0,01%	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	6,27%	-	6,51%	-	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	6,70%	-	6,68%	5,62%	Securities
Obligasi Pemerintah					Government bonds
Tingkat bunga tetap	7,29%	4,21%	7,09%	-	Fixed interest rate
Tingkat bunga Mengambang	5,96%	-	5,86%	-	Variable interest rate
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah	12,35%	-	12,01%	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas					Liabilities
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	2,40%	0,00%	2,56%	0,00%	Demand deposits
Tabungan	4,08%	-	3,73%	-	Savings deposits
Deposito Berjangka	6,73%	0,05%	6,61%	0,05%	Time deposits
Simpanan dari Bank lain					Deposits from other banks
Giro	1,51%	-	0,86%	-	Demand deposits
Deposito Berjangka	9,09%	-	7,24%	-	Time deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	8,17%	-	7,44%	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	9,36%	-	9,26%	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima					Fund Borrowings
Kredit Likuiditas Bank Indonesia	0,42%	-	0,24%	-	Bank Indonesia Liquidity Loans
Rekening dana investasi	5,51%	-	4,19%	-	Investment funds account

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In measuring market risk, the Bank uses the *Standardized Method* in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2015 and 2014:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited):

31 Desember/December 31, 2015

Aset Keuangan	Suku bunga mengambang/Variable interest rate					Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia		
Kas	-	-	-	-	1.181.219	1.181.219	Cash
Giro pada Bank Indonesia	10.344.884	-	-	-	641.467	10.986.351	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	202.447	-	-	-	486	202.933	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	6.606.977	1.232.500	7.839.477	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	361.170	-	-	1.312.808	145.584	1.819.562	Securities
Obligasi Pemerintah	5.781.806	-	-	2.398.306	50.796	8.230.908	Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	2.709.044	5.895.548	85.407.272	33.720.294	11.223.646	138.955.804	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.548.489	1.548.489	Interest receivable
	-	-	-	-	643.671	643.671	Other assets*)
Total aset keuangan	19.399.351	5.895.548	85.407.272	44.038.385	16.667.858	171.408.414	Total financial assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.594.600	1.594.600	Liabilities due immediately**)
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	29.152.160	-	-	-	2.216.283	31.368.443	Demand deposits
Tabungan	28.953.249	-	-	449.485	1.354.947	30.757.681	Savings deposits
Deposito berjangka	-	-	-	58.049.240	7.533.306	65.582.546	Time deposits
Simpanan dari bank lain	14.917	-	-	1.704.519	1.762	17.211.198	Deposits from other banks
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	12.492.202	-	12.492.202	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	-	-	750.091	-	2.135.091	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	-	-	-	7.726.728	-	7.726.728	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	357.364	357.364	Interest payables
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	2.698.574	2.698.574	Other liabilities***)
Total liabilitas keuangan	59.505.326	-	-	81.172.265	15.756.836	156.434.427	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga-kotor	(40.105.975)	5.895.548	85.407.272	(37.133.880)	911.022	14.973.987	Gross interest repricing gap

31 Desember/December 31, 2014

Aset Keuangan	Suku bunga mengambang/Variable interest rate					Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia		
Kas	-	-	-	-	920.482	920.482	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.829.829	-	-	-	541.680	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.094.709	-	-	-	255	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	924.855	571.600	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	361.517	-	-	4.939.523	145.332	5.446.372	Securities
Obligasi Pemerintah	7.456.715	-	-	715.506	65.844	8.238.065	Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	2.478.994	6.005.500	74.277.487	23.509.296	9.644.524	115.915.801	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.183.489	1.183.489	Interest receivable
	-	-	-	-	565.705	565.705	Other assets*)
Total aset keuangan	20.221.764	6.005.500	74.277.487	30.089.180	13.638.911	144.232.842	Total financial assets

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2014

Liabilitas Keuangan	Suku bunga mengambang/Variable interest rate					Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia		
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.638.831	1.638.831	Liabilities due immediately*)
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	22.001.200	-	-	-	1.421.418	23.422.618	Demand deposits
Tabungan	24.887.165	-	-	343.571	937.178	26.167.914	Savings deposits
Deposito berjangka	-	-	-	50.491.284	6.388.861	56.880.145	Time deposits
Simpanan dari bank lain	12.289	-	-	1.157.282	9.698	1.179.269	Deposits from other banks
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.519.884	-	8.519.884	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.817.603	-	-	1.000.000	-	3.817.603	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.998.213	-	6.998.213	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	308.996	308.996	Interest payables
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	2.280.158	2.280.158	Other liabilities***)
Total liabilitas keuangan	49.718.257	-	-	68.510.234	12.985.140	131.213.631	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga-kotor	(29.496.493)	6.005.500	74.277.487	(38.421.054)	653.771	13.019.211	Gross interest repricing gap

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

*) Consists of third party receivables.

***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2015 and 2014. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed rate available-for-sale financial assets as of December 31, 2015 and 2014 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

		2015			
		Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+50	(139)	(19.407)		Rupiah
	-50	142	20.588		
	+125	(344)	(46.491)		
	-125	359	53.894		
Dolar Amerika Serikat	+50	(264)	-		United States Dollar
	-50	277	-		
	+125	(638)	-		
	-125	717	-		
		2014			
		Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+50	(522)	(20.810)		Rupiah
	-50	523	22.215		
	+125	(1.302)	(49.627)		
	-125	1.309	58.432		
Dolar Amerika Serikat	+50	-	-		United States Dollar
	-50	-	-		
	+125	-	-		
	-125	-	-		

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga variable (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

		2015		
		Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Rupiah	±50	±121.211		Rupiah
	±125	±303.027		

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2015 and 2014:

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2015 and 2014:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga variable (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (lanjutan):

2014

	Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Rupiah	±50	±107.105	Rupiah
	±125	±267.764	

ii. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK.

2015

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±266	United States Dollar
	±0,35%	±311	

2014

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±232	United States Dollar
	±0,35%	±270	

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The table below demonstrates the sensitivity of profit or loss to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2015 and 2014 (continued):

ii. Exchange rate risk

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi *Internal Audit* melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Risk Management Division (RMD)* berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi *BTN Loss Event Database (BTN-LED)*. Aplikasi *BTN LED* ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara *online* melalui media *web* (*web based*).

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

As of December 31, 2015 and 2014, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the RMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications *BTN Loss Event Database (BTN-LED)*. The application of *LED* was designed *BTN* connected with regional offices and branch offices. Thus regional offices and branch offices can periodically send data *loss event* each office *online* through media *web* (*web based*).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan atau regulasi yang mendukung dan kelemahan perjanjian atau perikatan. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan *Risk Management Division* dan *Legal Division* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

Legal Risk

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in policy or regulation and weak agreement or engagement. At the same time, each division together with Risk Management Division and Legal Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted together by Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparties.

Reputational Risk

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategy and Performance Management Division* (SPMD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh SPMD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (NES) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

Corporate Social Responsibility is not focused only on charity, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategy and Performance Management Division (SPMD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by SPMD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Strategik (lanjutan)

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang mereview strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, *CMPD* menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke *RMD* dan *RMC* untuk direview.

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke *RMD*.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic Risk (continued)

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, *Compliance Division* (CMPD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, *CMPD* analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by *RMD* and *RMC*.

In order to minimize the Compliance Risk, *Legal Division* (LGD) has provided a special access called *Internal Access Management Standards* (AIMS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, *CMPD* monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to *RMD*.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern. BRO memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In monitoring compliance risk, RMD and CMPD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits. BRO ensures that the branch offices have completed the findings/results of the related audit.

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2015 and 2014 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	1.181.219	1.181.219	920.482	920.482	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	148.588	148.588	Fair value through profit or loss
Efek-efek Obligasi Pemerintah	19.267	19.267	591.732	591.732	Securities Government bonds
Tersedia untuk dijual					Available for sale
Efek-efek Obligasi Pemerintah	1.455.444 5.111.280	1.455.444 5.111.280	4.848.414 5.994.262	4.848.414 5.994.262	Securities Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Efek-efek Obligasi Pemerintah	352.117 3.100.361	355.439 3.034.778	439.968 1.652.071	442.410 1.596.638	Securities Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang					Loans and Receivable
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	10.986.351	9.371.509	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	201.361	201.361	1.093.393	1.093.393	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7.839.477	7.839.477	1.496.455	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer					Consumer
Pemilikan rumah	97.806.061	97.704.626	80.593.154	79.666.510	Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	11.326.869	11.326.869	9.934.311	9.934.311	Non-housing loan
Modal kerja	24.672.613	24.672.613	20.488.304	20.488.304	Working capital
Investasi	4.338.417	4.338.417	4.306.662	4.306.662	Investment
Sindikasi	79.268	79.268	76.978	76.978	Syndicated
Direksi dan karyawan	732.576	732.576	516.392	516.392	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	1.548.489	1.183.489	1.183.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	643.671	643.671	565.705	565.705	Other assets*)
Total aset keuangan	171.394.841	171.231.145	144.221.869	143.242.234	Total financial assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini (lanjutan).

	31 Desember/December 31, 2015	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas segera**)	1.594.600	1.594.600
Simpanan nasabah		
Giro	31.368.443	31.368.443
Tabungan	30.757.681	30.757.681
Deposito Berjangka	65.582.546	65.582.546
Simpanan dari Bank Lain		
Giro	14.016	14.016
Tabungan	2.663	2.663
Deposito Berjangka	1.704.519	1.704.519
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.135.091	2.135.091
Surat berharga yang Diterbitkan	12.492.202	12.654.578
Pinjaman yang diterima	7.726.728	7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	357.364	357.364
Liabilitas lain-lain***)	2.698.574	2.698.574
Total liabilitas keuangan	156.434.427	156.596.803

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2015 and 2014 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates (continued).

	31 Desember/December 31, 2014	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value
Financial Liabilities		
Current liabilities**)	1.638.831	1.638.831
Deposits from customers		
Demand deposits	23.422.618	23.422.618
Savings deposits	26.167.914	26.167.914
Time deposits	56.880.145	56.880.145
Deposits from other banks		
Demand deposits	13.472	13.472
Savings deposits	2.680	2.680
Time deposits	1.163.117	1.163.117
Securities sold under repurchase agreements	3.817.603	3.817.603
Securities issued	8.519.884	8.110.974
Fund Borrowings	6.998.213	6.998.213
Interest payables	308.996	308.996
Other liabilities***)	2.280.158	2.280.158
Total financial liabilities	131.213.631	130.804.721

*) Consists of third party receivables.

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

		31 Desember/December 31, 2015				
		Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan						Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi						Fair value through profit or loss
	Obligasi Pemerintah	19.267	19.267	-	-	Government bonds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi		19.267	19.267	-	-	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual						Available-for-sale
	Efek-efek	1.455.444	1.455.444	-	-	Securities
	Obligasi Pemerintah	5.111.280	5.111.280	-	-	Government bonds
Total tersedia untuk dijual		6.566.724	6.566.724	-	-	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturities
	Efek-efek	355.439	355.439	-	-	Securities
	Obligasi Pemerintah	3.034.778	3.034.778	-	-	Government bonds
Total dimiliki hingga jatuh tempo		3.390.217	3.390.217	-	-	Total held-to-maturities
Kredit yang diberikan dan piutang						Loan and receivables
	Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	138.854.369	-	138.250.160	604.209	Loan and sharia financing receivables
Total kredit yang diberikan dan piutang		138.854.369	-	138.250.160	604.209	Total loan and receivables
		31 Desember/December 31, 2014				
		Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan						Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi						Fair value through profit or loss
	Efek-efek	148.588	148.588	-	-	Securities
	Obligasi Pemerintah	591.732	591.732	-	-	Government bonds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi		740.320	740.320	-	-	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual						Available-for-sale
	Efek-efek	4.848.414	4.848.414	-	-	Securities
	Obligasi Pemerintah	5.994.262	5.994.262	-	-	Government bonds
Total tersedia untuk dijual		10.842.676	10.842.676	-	-	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturities
	Efek-efek	442.410	442.410	-	-	Securities
	Obligasi Pemerintah	1.596.638	1.596.638	-	-	Government bonds
Total dimiliki hingga jatuh tempo		2.039.048	2.039.048	-	-	Total held-to-maturities
Kredit yang diberikan dan piutang						Loan and receivables
	Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	114.989.157	-	114.544.118	445.039	Loan and sharia financing receivables
Total kredit yang diberikan dan piutang		114.989.157	-	114.544.118	445.039	Total loan and receivables

a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

**44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

b. Kredit yang diberikan

b. Loans

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

c. Securities and Government Bonds

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima

d. Securities issued and fund borrowings

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December, 31 2015		
(i) Laba tahun berjalan	1.850.907	(a)	<i>Income for the year (i)</i>
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.573.170.280	(b)	<i>Weighted average (ii) number of shares outstanding</i>
(iii) Laba per saham dasar	175	(a/b)	<i>Basic earnings per share (iii)</i>
(iv) Dampak dilusi dari MESOP I MESOP II MESOP III	- - 277.751	(c)	<i>Effects of dilution from: (iv) MESOP I MESOP II MESOP III</i>
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.573.448.031	(d = b + c)	<i>Weighted average number of (v) shares outstanding after dilution</i>
(vi) Laba per saham dilusian	175	(a/d)	<i>Diluted earnings per share (vi)</i>
	31 Desember/ December, 31 2014		
(i) Laba tahun berjalan	1.145.572	(a)	<i>Income for the year (i)</i>
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.566.112.074	(b)	<i>Weighted average (ii) number of shares outstanding</i>
(iii) Laba per saham dasar	108	(a/b)	<i>Basic earnings per share (iii)</i>
(iv) Dampak dilusi dari MESOP I MESOP II MESOP III	335.539 - 117.164	(c)	<i>Effects of dilution from: (iv) MESOP I MESOP II MESOP III</i>
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.566.564.777	(d = b + c)	<i>Weighted average number of (v) shares outstanding after dilution</i>
(vi) Laba per saham dilusian	108	(a/d)	<i>Diluted earnings per share (vi)</i>

45. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic and diluted earnings per share, for the years ended December 31, 2015 and 2014, are as follows:

46. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 13 November 2015, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Mandiri Informatika sehubungan dengan pengadaan aplikasi ATM Multi solution berupa penyediaan lisensi sebanyak 1.830 unit, melakukan instalasi, pengaturan dan konfigurasi aplikasi untuk jangka waktu masa garansi selama 1 (satu) tahun sejak penandatangan Berita Acara Go Live dengan nilai kontrak sebesar Rp8.300.

Pada tanggal 8 Juni 2015, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mastersystem Infotama sehubungan dengan pengadaan Lisensi Produk Microsoft untuk jangka waktu perjanjian yang berlaku selama 2 tahun dengan nilai kontrak sebesar ASD 3.820.000 (nilai penuh)

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On November 13, 2015, Bank signed an agreement with PT Mitra Mandiri Informatika in relation to provide 1.830 units of multi solution ATM application, installing, setting and configuration of application for 1 (one) year warranty period since Go Live signing agreement with a contract value amounted to Rp8,300.

On June 8, 2015, the Bank signed an agreement with PT Mastersystem Infotama in relation to provide Microsoft Licence for 2 (two) years warranty period with a contract value amounted to USD3,820,000 (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 10 Desember 2014, Bank melakukan penandatanganan addendum kedua atas perjanjian kerjasama dengan PT Aprisma Indonesia sehubungan dengan pengadaan Aplikasi Mobile Banking dan Internet Banking Individual dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000. Dalam perjanjian ini disepakati menambah jangka waktu perjanjian sehingga pihak kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam addendum perjanjian.

Pada tanggal 24 September 2014, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Wincor Nixdorf Indonesia sehubungan dengan pengadaan Jasa Pengelolaan Terminal Layanan Mandiri (jasa pengisian ATM) sejumlah 370 unit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp20.335.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp5.070 dan Rp4.232. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Significant Agreements (continued)

On Desember 10, 2014, The Bank signed the second addendum for partnership agreement with PT Aprisma Indonesia in relation to provide Mobile Banking Application and Internet Banking Individual, with a contract value amounted to Rp25,000. In this agreement adds the agreed term of the agreement so that the second party is obliged to complete the work for 365 (three hundred sixty five) calendar days, and can be extended by agreement of the parties that will be outlined in the amended agreement.

On September 24, 2014, Bank signed an agreement with PT Wincor Nixdorf Indonesia in relation to provide "Self Service Terminal Management" (replenishment ATM Services) amounted to 370 units for 2 (two) years period with a contract value amounted to Rp20,335.

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank.

As of December 31, 2015 and 2014, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp5,070 and Rp4,232, respectively. Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI**

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2015:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2016:**

- a. ISAK 30, "Pungutan", merupakan interpretasi atas PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain daripada pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46 "Pajak Penghasilan" serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.
- b. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
- c. Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
- d. PSAK 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi", menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- e. PSAK 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- f. PSAK 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

**47. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2015:

Effective on or after January 1, 2016:

- a. IFAS 30, "Fees", is an interpretation of SFAS 57 "Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets" that clarify accounting liability to pay fees, in addition to income tax that is covered in SFAS 46 "Income Tax" along with other fine for violating the regulation of the government.
- b. Amendment SFAS 16, "Acceptable amortization and depreciation method of fixed assets", added explanation for indication of technical or commercial obsolescence of an asset. Amendment SFAS 16 clarified that depreciation using income cash flow method is no longer viable.
- c. Amendment SFAS 24 "Employee Benefit: Defined Contribution Plans", simplify the accounting method for defined contribution plans for workers nor third parties that does not rely on the total number of dedication years, for instance contribution plans that is measured using percentage of salary.
- d. SFAS 5 (2015 Adaptation), "Operating Segments", added short disclosure on combined operating segment and economic indicators that have similar characteristics.
- e. SFAS 7 (2015 Adaptation), "Related Party Disclosure", added requirements and clarify disclosure for payables that are given by the management.
- f. SFAS 16 (2015 Adaptation), "Property, Plant and Equipment", have clarified in paragraph 35 relating revaluation model, that when an entity uses revaluation model, carrying amount of assets are presented in the revaluated value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2016 (lanjutan):**

- g. PSAK 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
- h. PSAK 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
- i. PSAK 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.
- j. PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2017:**

- a. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan", memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amendment) sebagai berikut: PSAK 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK 5 "Segmen Operasi", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK 62 "Kontrak Asuransi".

48. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rasio aset produktif yang diklasifikasikan non-performing terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 3,20% dan 3,57%.

**47. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2016
(continued):**

- g. SFAS 25 (Adaptation 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", given editorial correction to SFAS 25 paragraph 27 about limitation in applying retrospective.
- h. SFAS 53 (2015 Adaptation), "Share-Based Payment", clarify definition of vesting conditions and separately define performance and service condition.
- i. SFAS 68 (2015 Adaptation), "Fair Value Measurement", clarified that portfolio exception, for companies that allow fair value measurement of asset group or liability group as net value, is to be applied for the whole contract (including non-financial contract) in the scope of SFAS 55.
- j. SFAS 110 (Revised 2015), "Sukuk Accounting", regulate recognition, measurement, presentation and disclosure or sukuk ijarah and sukuk mudharabah transaction, both as either buyer or seller.

Effective on or after January 1, 2017:

- a. Amendment SFAS 1, "Presentation of Financial Statements", have given clarification regarding materiality, hierarchy flexibility, systematic notes for financial statements and identification of significant accounting policy. Amendment SFAS 1 have impacted other SFAS (consequential amendment) such as: SFAS 3 "Interim Financial Reporting", SFAS 5 "Operating Segments", SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures", and SFAS 62 "Insurance Contract".

48. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2015 and 2014, the Bank's non-performing assets to total earning assets (*non-performing ratio*) are 3.20% and 3.57% respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

- b. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 78,74 % dan 63,68%.

48. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

- b. As of December 31, 2015 and 2014, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 55 (Revised 2014) to minimum allowance for impairment losses based on Bank Indonesia regulation is 78.74% and 63.68% respectively.

49. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN ATAS PENERAPAN AWAL PSAK No. 24 (REVISI 2013) DAN EFEK PENERAPAN PSAK 102 (REVISI 2013)

Pada tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut dan diterapkan secara retrospektif, seperti yang dijelaskan pada Catatan 2y.

Penyesuaian dari PSAK No. 102 (Revisi 2013) berasal dari perhitungan ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung dengan standar yang baru dan standar sebelumnya disesuaikan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2015. Dasar perhitungan ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai dijelaskan pada Catatan 2e.

Penerapan awal PSAK 24 (Revisi 2013):

49. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS DUE TO INITIAL IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 24 (REVISED 2013) AND EFFECT OF IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 102 (REVISED 2013)

On January 1, 2015, the Bank adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits" which applicable effectively for financial statements with period begins on or after that date and applied retrospectively, as described in Note 2y.

SFAS No. 102 (Revised 2013)'s adjustment is derived from the recalculation of allowance for impairment losses. The difference between the allowance for impairment losses calculated by the new standards and the previous standards is adjusted to retained earnings as of January 1, 2015. The basis for the recalculation of allowance for impairment losses is described in Note 2e.

Initial implementation of PSAK 24 (Revised 2013):

	1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 January 1, 2014 / December 31, 2013			
	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Liabilitas				Liabilities
Kewajiban pajak tangguhan - neto	152.777	(31.638)	121.139	Deferred tax liabilities - net
Imbalan kerja jangka panjang	115.017	(4.966)	110.051	Long term employee benefits
Ekuitas				Equity
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	-	(85.362)	(85.362)	Gain (loss) from remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.562.161	121.966	1.684.127	Unappropriated Retained earnings

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
ATAS PENERAPAN AWAL PSAK No. 24 (REVISI
2013) DAN EFEK PENERAPAN PSAK 102
(REVISI 2013) (lanjutan)**

**49. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
DUE TO INITIAL IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 24 (REVISED 2013) AND EFFECT OF
IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 102 (REVISED
2013) (continued)**

**Penerapan awal PSAK 24 (Revisi 2013)
(lanjutan):**

**Initial implementation of PSAK 24 (Revised
2013) (continued):**

1 Januari 2015 / 31 Desember 2014
January 1, 2015 / December 31, 2014

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities - net
- neto	152.422	(38.761)	113.661	
Imbalan kerja jangka panjang	121.483	(2.935)	118.548	Long term employee benefits
Ekuitas				Equity
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	-	(110.251)	(110.251)	Gain (loss) from remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.115.592	151.946	1.267.538	Unappropriated Retained earnings

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 /
For the year ended December 31, 2014

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.595.409)	31.155	(1.564.254)	Salaries and employee benefits
Beban pajak	(432.580)	(1.175)	(433.755)	Tax expense

**Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) atas
cadangan kerugian penurunan nilai secara
kolektif:**

**Implementation of PSAK 102 (Revised 2013) for
collective impairment:**

1 Januari 2015/January 1, 2015

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) /Implementation of PSAK 102 (Revised 2013)	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Aset				Asset
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah	(211.163)	6.392	(204.771)	Allowance for impairment losses - Sharia financing/receivables
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities - net
- neto	113.661	1.599	115.260	
Ekuitas				Equity
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.267.538	4.794	1.272.332	Unappropriated Retained earnings

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2016.

50. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue on January 29, 2016.

Referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		√
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		√
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	√
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√
Ikhtisar Data Keuangan Penting		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham.	26
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	26
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	27
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang hargapenutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	135
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.	136

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasarpenilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dandasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah DewanKomisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 	38-47
Laporan Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakanstrategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan,dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jikaada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 	48-65
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam halterdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidakmenandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulisdari yang bersangkutan. 	66-67
Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>email</i> , dan <i>website</i> .	71
Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	73
Bidang usaha	<p>Uraian mengenai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. 	75-87
Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai denganstruktur satu tingkat di bawah direksi.	90-91
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	<p>Mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/DewanKomisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. 	92-95

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.	98-101
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.	108-113
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.	117-118
Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	142-145
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	Tidak memiliki entitas anak/ atau asosiasi
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	Tidak memiliki entitas anak/ atau asosiasi

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Kronologis pencatatan saham*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatitkan.	138
Kronologis pencatatan efek lainnya*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatitkan; dan 5. Peringkat efek.	136-168
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan peringkat efek.	119
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	120-127
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.	128-131
Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.	576
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	154-173
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.	182-193

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	194-196
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.	197-201
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	244-245
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	244
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	247-252
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	252-253
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	177-179
Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	174-176
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i> ; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.	252-253
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. <i>Harga exercise</i> .	253-265

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	265-266
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	267-270
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan.	270-276
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.	276
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	277
Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	369-370;398-399
Informasi mengenai Komisaris Independen	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	383-384
Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	406-407;413;435-437
<i>Assessment</i> terhadap Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan <i>assessment</i> .	400-402;438-443

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. 	Komisaris: 403-404 Direksi: 444-445
Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	391-393;394-396;424-435
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimilikisepenuhnya oleh pemerintah.	602
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. 	Dewan Komisaris: 385 Direksi: 419
Komite Audit	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 	449-445
Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. 	459-464

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 	465-472
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. 4. 	473-480
Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya	Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. 	360-365
Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. 	490-503
Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. 	507
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas system manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 	511-523
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas system pengendalian intern. 	535-539

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan <p>terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.</p>	626-627
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. <p>terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.</p>	628-630
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. <p>terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.</p>	631-637
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. <p>terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.</p>	638-643
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). 	564-566
Akses informasi dan data perusahaan	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p>	576-601

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	550-553
Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.	557-563
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	Dewan Komisaris: 374-378 Direksi: 410-412
Informasi Keuangan		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	647
Opini auditor independen atas laporan keuangan		649-650
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	650
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	651-870
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	655-657
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	660-662
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	673-717
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 4. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	819-825

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	807-817
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	771-773
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	817-818
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	677-717;826-860
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	647

Laporan Tahunan **2015**

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Sahabat Keluarga Indonesia

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel. 62-21 6336789, 6332666

Fax. 62-21 6346704

E-mail : admin@btn.co.id

Contact Center: (021) 265 33 555



www.btn.co.id